Pemerintah
Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

NOMOR 3 TAHUN 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2025 - 2029



(0272)321046
bapperida@klaten.go.id Email
bapperida.klaten.go.id

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KLATEN

Tahun 2025



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan sosial, ekonomi, dan kesehatan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, SK Nomor 193186 A);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045, yang disebut disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah bentuk instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

22. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
23. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
24. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
25. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah, terhitung

sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

BAB III

FUNGSI RPJMD

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
b. pedoman dalam penyusunan RKPD;
c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029; dan
d. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Bab I berisi Pendahuluan;
    b. Bab II berisi Gambaran Umum Daerah;
    c. Bab III berisi Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. Bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. Bab V berisi Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
    a. bencana alam;
    b. goncangan politik;
    c. krisis ekonomi;
    d. konflik sosial budaya;
    e. gangguan keamanan;

f. pemekaran Daerah;
g. perubahan kebijakan nasional;atau
h. perubahan strategis daerah yang berpengaruh terhadap target akhir RPJMD.

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

(5) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar bersifat parsial, perubahan sasaran pokok, program atau perubahan target sasaran, program tahunan tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran Daerah dan program maka penetapan perubahan dimaksud dituangkan dalam RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KLATEN,

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Agustus 2025

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

MUH HIMAWAN PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (3-163/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanutnyam pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan guna meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan menjadi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJMD dan Renstra PD, selanjutnya diturunkan menjadi perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam RKPD dan Renja PD. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2045, daerah wajib untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam

rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggarakan Pemerintahan Daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sekaligus merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Sistematika RPJMD merujuk pada Bab III. Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 253

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1-1**
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen 1-7
1.4. Maksud dan Tujuan 1-9
1.5. Sistematika Penulisan 1-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **2-1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-53
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2-131
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-187
2.5. Gambaran Keuangan Daerah II-214
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis II-249

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **3-1**
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3-1
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas 3-33
3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah 3-64

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **4-1**
4.1. Program Perangkat Daerah 4-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4-63

BAB V PENUTUP **5-1**
5.1. Pedoman Transisi 5-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan 5-1
5.3. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD 5-3
5.4. Perubahan RPJMD 5-3
5.5. Pedoman Transisi 5-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa Kelurahan, RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Klaten Tahun 2024	2-2
Tabel 2.2	Daftar Embung di Kabupaten Klaten	2-7
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2024	2-8
Tabel 2.4	Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Tiap Kecamatan	2-16
Tabel 2.5	Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Klaten	2-17
Tabel 2.6	Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-18
Tabel 2.7	Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-18
Tabel 2.8	Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-19
Tabel 2.9	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2024	2-20
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024	2-20
Tabel 2.11	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-21
Tabel 2.12	Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024	2-24
Tabel 2.13	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-24
Tabel 2.14	Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-30
Tabel 2.15	Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020 – 2024	2-32
Tabel 2.16	Hasil Perhitungan GRK Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023 Berdasarkan Sumber Emisi	2-34
Tabel 2.17	Hasil Inventarisasi Sektor Penggunaan Energi Tahun 2023	2-35
Tabel 2.18	Hasil Inventarisasi Sektor AFOLU Tahun 2023	2-36
Tabel 2.19	Komposisi Sampah di TPA Troketon	2-36
Tabel 2.20	Hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Klaten	2-39
Tabel 2.21	Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024	2-41
Tabel 2.22	Nilai Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024	2-41
Tabel 2.23	Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2024	2-42
Tabel 2.24	Kondisi Jalur Evakuasi Merapi Berdasarkan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2024	2-43
Tabel 2.25	Daerah Rawan Kebakaran Berdasar Angka Kejadian Kebakaran Tahun 2020-2024	2-44
Tabel 2.26	Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-46
Tabel 2.27	Realisasi Capaian SPM Uruan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	2-46
Tabel 2.28	Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024	2-48
Tabel 2.29	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Klaten Tahun 2024	2-50
Tabel 2.30	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	2-54

Tabel 2.31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-55
Tabel 2.32 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-56
Tabel 2.33 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya Tingkat Provinsi Jawa Tengah periode Maret 2024 2-63
Tabel 2.34 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-80
Tabel 2.35 Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-84
Tabel 2.36 Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-85
Tabel 2.37 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-87
Tabel 2.38 Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan yang Berizin di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-87
Tabel 2.39 Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-90
Tabel 2.40 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024 2-91
Tabel 2.41 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-92
Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-93
Tabel 2.43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-94
Tabel 2.44 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-95
Tabel 2.45 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-95
Tabel 2.46 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-96
Tabel 2.47 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-96
Tabel 2.48 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-97
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-97
Tabel 2.50 Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-99
Tabel 2.51 Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-100
Tabel 2.52 Data Pokok Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-101
Tabel 2.53 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-102
Tabel 2.54 Kemampuan Literasi, Numerasi serta Nilai Karakter Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-103
Tabel 2.55 Ringkasan Capaian Pendidikan Per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-104
Tabel 2.56 Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-106
Tabel 2.57 Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-109

Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-114
Tabel 2.59 Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2020-2024 2-114
Tabel 2.60 Data Kelompok Kesenian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-115
Tabel 2.61 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-115
Tabel 2.62 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-116
Tabel 2.63 Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-116
Tabel 2.64 Capian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2-117
Tabel 2.65 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024 2-129
Tabel 2.66 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 2-130
Tabel 2.67 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 2-133
Tabel 2.68 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2020-2024 2-133
Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 2-135
Tabel 2.70 Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-137
Tabel 2.71 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-138
Tabel 2.72 Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2020–2024 2-138
Tabel 2.73 Jumlah Produk UMKM Yang Bersertifikasi Halal Kabupaten Klaten Tahun 2020 – 2024 2-140
Tabel 2.74 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-145
Tabel 2.75 Data IKM yang sudah bersertifikat TKDN Kabupaten Klaten Tahun 2023-2024 2-146
Tabel 2.76 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020–2024 2-146
Tabel 2.77 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-149
Tabel 2.78 Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2020-2024 2-150
Tabel 2.79 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-151
Tabel 2.80 Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-151
Tabel 2.81 Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-152
Tabel 2.82 Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-153
Tabel 2.83 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-154
Tabel 2.84 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-156
Tabel 2.85 Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Tahun 2023 2-158

Tabel 2.86 Nilai Indeks Aspek Penyelenggaraan SDI Tahun 2023 2-158
Tabel 2.87 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-159
Tabel 2.88 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 2-161
Tabel 2.89 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-162
Tabel 2.90 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-163
Tabel 2.91 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-164
Tabel 2.92 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-164
Tabel 2.93 Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-165
Tabel 2.94 Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-166
Tabel 2.95 Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-167
Tabel 2.96 Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024 2-168
Tabel 2.97 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahn 2024 2-169
Tabel 2.98 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024 2-171
Tabel 2.99 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 . 2-172
Tabel 2.100 Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-172
Tabel 2.101 Pelatihan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-173
Tabel 2.102 Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2020 - 2024 2-175
Tabel 2.103 Data Uji Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024 2-175
Tabel 2.104 Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 ... 2-176
Tabel 2.105 Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-177
Tabel 2.106 Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024 (dalam km) 2-177
Tabel 2.107 Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 2-178
Tabel 2.108 Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten 2-179
Tabel 2.109 Ketersediaan Akomodasi Wisata di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-180
Tabel 2.110 Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2020-2024 2-180
Tabel 2.111 Jumlah Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Klaten 2-181
Tabel 2.112 Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-182
Tabel 2.113 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-182
Tabel 2.114 Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2020-2024 Kawasan Subosukawonosraten 2-184
Tabel 2.115 Hasil Penilaian Komponen Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klaten Tahun 2024.. 2-188
Tabel 2.116 Perkembangan Capaian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-189
Tabel 2.117 Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2024. 2-191

Tabel 2.118 Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-193
Tabel 2.119 Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-194
Tabel 2.120 ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-195
Tabel 2.121 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar Tahun 2020–2024 2-195
Tabel 2.122 Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-196
Tabel 2.123 Opini BPK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-198
Tabel 2.124 Perkembangan Jumlah Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indeks Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-199
Tabel 2.125 Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020-2024 2-200
Tabel 2.126 Jumlah Linmas, Penegakan Perda dan Penyelesaian K3 Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-201
Tabel 2.127 Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-203
Tabel 2.128 Capaian Kinerja Indikator Kunci Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Klaten 2-206
Tabel 2.129 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rp) 2-216
Tabel 2.130 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah) 2-222
Tabel 2.131 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah) 2-224
Tabel 2.132 Ringkasan Kerangka Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah) 2-225
Tabel 2.133 Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah) 2-228
Tabel 2.134 Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 2-230
Tabel 2.135 Hasil Analisis Likuiditas Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-231
Tabel 2.136 Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-232
Tabel 2.137 Derajat Kemadirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-235
Tabel 2.138 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (%) 2-236
Tabel 2.139 Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (%) 2-237
Tabel 2.140 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten 2020-2024 2-237
Tabel 2.141 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten 2020-2024 2-238
Tabel 2.142 Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 (Rupiah) .. 2-239
Tabel 2.143 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersifat Wajib dan Mengikat Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 2-241
Tabel 2.144 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 2-241
Tabel 2.145 Laporan Perkembangan Kontribusi Dunia dalam Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-245
Tabel 2.146 Proyeksi Target Kontribusi CSR dalam Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 2-247
Tabel 2.147 Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 2-259

Tabel 2.148 Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 2-298
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten 3-8
Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten 3-12
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 3-42
Tabel 3.4 Penyelarasan Tema Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Klaten Tahun 2026-2030 3-62
Tabel 3.5 Rincian Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2025-2029 3-68
Tabel 3.6 Rincian dan Konversi Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2025-2029 ke Dalam Nomenklatur Program Urusan Pemerintahan Daerah 3-80
Tabel 3.7 Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah 3-91
Tabel 4.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dan Pendanaan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 4-20
Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten 2025-2030 4-64
Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 4-69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 1-2
Gambar 1.2 Keterkaitan Rancangan Teknokratik RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya . 1-8
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten 2-2
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Klaten 2-4
Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Klaten 2-5
Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Klaten 2-6
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten 2-6
Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang 2-9
Gambar 2.7 Grafik Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Kabupaten Klaten 2-15
Gambar 2.8 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-22
Gambar 2.9 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (%) 2-23
Gambar 2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-26
Gambar 2.11 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-26
Gambar 2.12 Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020-2024 2-27
Gambar 2.13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020-2024 2-27
Gambar 2.14 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-28
Gambar 2.15 Jumlah Penanganan Sampah yang Tertangani Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.... 2-33
Gambar 2.16 Hasil Inventarisasi GRK Landfill TPA Troketon Tahun 2019-2023 2-37
Gambar 2.17 Peta Rawan Bencana Kabupaten Klaten 2-38
Gambar 2.18 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-39
Gambar 2.19 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2020-2024 2-40
Gambar 2.20 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2024 2-51
Gambar 2.21 Proyeksi Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 2-52
Gambar 2.22 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-53
Gambar 2.23 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota sekitarnya Tahun 2024 2-54
Gambar 2.24 PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-57
Gambar 2.25 Perkembangan PMTB Kabupaten Klaten (Miliar) 2-58
Gambar 2.26 Pertumbuhan PMTB ADHB dan ADHK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-58
Gambar 2.27 Sumber Pertumbuhan PMTB Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-59
Gambar 2.28 Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-60

Gambar 2.29 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 2-60
Gambar 2.30 Posisi relatif Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 2-61
Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-61
Gambar 2.32 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 2-62
Gambar 2.33 Perkembangan Garis kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 2-64
Gambar 2.34 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, .. 2-64
Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 2-65
Gambar 2.36 Posisi Relatif Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024 2-66
Gambar 2.37 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 2-66
Gambar 2.38 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2024 2-67
Gambar 2.39 Capaian Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-68
Gambar 2.40 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-69
Gambar 2.41 Perkembangan TPT Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 2-69
Gambar 2.42 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024 2-70
Gambar 2.43 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024 2-71
Gambar 2.44 Posisi Relatif Gini Rasio Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024 2-71
Gambar 2.45 Perkembangan IPM Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 2-72
Gambar 2.46 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 2-73
Gambar 2.47 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 2-74
Gambar 2.48 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 2-74
Gambar 2.49 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 2-75

Gambar 2.50 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 2-76
Gambar 2.51 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-76
Gambar 2.52 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024..... 2-77
Gambar 2.53 Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-78
Gambar 2.54 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024..... 2-79
Gambar 2.55 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020 -2024 2-81
Gambar 2.56 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020 - 2024..... 2-82
Gambar 2.57 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2020 -2024 2-83
Gambar 2.58 Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-84
Gambar 2.59 Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-86
Gambar 2.60 Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)..... 2-88
Gambar 2.61 Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu) 2-89
Gambar 2.62 Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-100
Gambar 2.63 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-105
Gambar 2.64 PPKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020–2024 2-107
Gambar 2.65 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-108
Gambar 2.66 Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-110
Gambar 2.67 Tingkat Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-110
Gambar 2.68 Nilai Indeks Komponen Perhitungan IPMas Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024..... 2-112
Gambar 2.69 Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024. 2-112
Gambar 2.70 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-118
Gambar 2.71 Perkembangan IPG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-119
Gambar 2.72 Posisi Relatif IPG Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 2-119
Gambar 2.73 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-120

Gambar 2.74 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-121
Gambar 2.75 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-121
Gambar 2.76 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-122
Gambar 2.77 Perkembangan IDG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-123
Gambar 2.78 Posisi Relatif IDG Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 2-123
Gambar 2.79 Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-124
Gambar 2.80 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 2-125
Gambar 2.81 Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-126
Gambar 2.82 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024..... 2-127
Gambar 2.83 Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... 2-127
Gambar 2.84 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024 2-128
Gambar 2.85 Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-129
Gambar 2.86 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-132
Gambar 2.87 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-135
Gambar 2.88 Inovasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-136
Gambar 2.89 Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-139
Gambar 2.90 Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-141
Gambar 2.91 Pertumbuhan Industri Kabupaten KlatenTahun 2020-2024 2-142
Gambar 2.92 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024 2-144
Gambar 2.93 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024..... 2-147
Gambar 2.94 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 2020-2024..... 2-148
Gambar 2.95 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2020-2024..... 2-148
Gambar 2.96 Hasil Penilaian Evaluasi SDI 2-159
Gambar 2.97 Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah yang Terbangun di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-160

Gambar 2.98 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-162
Gambar 2.99 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-170
Gambar 2.100 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-174
Gambar 2.101 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-183
Gambar 2.102 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-184
Gambar 2.103 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024 2-185
Gambar 2.104 Realisasi Total terhadap Target Investasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024 2-186
Gambar 2.105 Nilai Ekspor Barang di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-186
Gambar 2.106 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024 2-187
Gambar 2.107 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klaten Tahun 2023-2024 2-188
Gambar 2.108 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-190
Gambar 2.109 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2020 – 2024 2-191
Gambar 2.110 Jumlah Pegawai Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 2-194
Gambar 2.111 Nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-197
Gambar 2.112 Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020-2023 2-200
Gambar 2.113 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-202
Gambar 2.114 Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-203
Gambar 2.115 Capaian Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Tahun 2020-2024 2-204
Gambar 2.116 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 .. 2-205
Gambar 2.117 Nilai EPPD di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024 2-206
Gambar 2.118 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024 2-217
Gambar 2.119 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-217
Gambar 2.120 Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024 (%) 2-218
Gambar 2.121 Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-219
Gambar 2.122 Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024 2-219
Gambar 2.123 Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-220
Gambar 2.124 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024 .. 2-223
Gambar 2.125 Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 2-234
Gambar 2.126 Jumlah Mata Air di Kabupaten Klaten 2-248
Gambar 2.127 Mekanisme Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan/PES *(Payment for Ecosystem Services)* 2-248
Gambar 2.128 Tujuan SDGs 2-258

Gambar 2.129 Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten 2-2
Gambar 3.1 Kesesuaian Visi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 3-6
Gambar 3.2 Tema Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2026-2030 3-51
Gambar 3.3 Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten 3-100
Gambar 3.4 Peta Calon Lokasi Kawasan Sport Center dan Persebaran Fasilitas Olahraga Eksisting yang Dikelola Pemda..... 3-101
Gambar 3.5 Sketsa Kawasan Sport Center Klaten 3-103
Gambar 3.6 Konsep Pentahelix Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Sport Center 3-104

Pemerintah
Kabupaten Klaten

BAB I
PENDAHULUAN

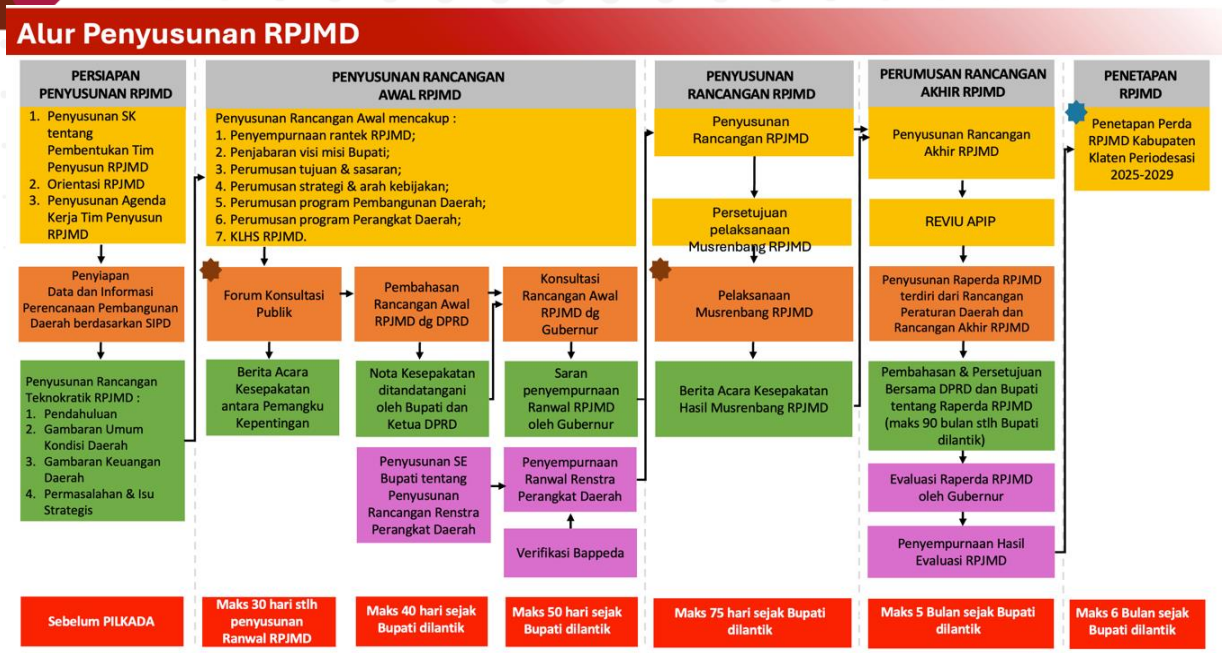


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RPJMD menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Klaten telah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 yang menghasilkan terpilihnya Hamenang Wajar Ismoyo,S.I.Kom dan H.Benny Indra Ardhianto, S.E., M.B.A sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih untuk periode tahun 2025-2029. Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik secara serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih pada gelaran Pilkada tahun 2024 termasuk Hamenang Wajar Ismoyo,S.I.Kom dan H.Benny Indra Ardhianto, S.E., M.B.A menjadi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2030. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang penetapannya paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mencakup 6 (enam) tahapan yaitu persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD.



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahapan periode pertama RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, oleh karena itu harus dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Kabupaten Klaten 2025-2045. Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten diarahkan pada kebijakan "**Penguatan Pondasi Pembangunan".** Tahap pertama ini dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM; penguatan landasan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan; penguatan peningkatan pendapatan masyarakat; peningkatan produktivitas sektor pembentuk PDRB; peningkatan kualitas infrastruktur sebagai penggerak aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan penguatan landasan tata kelola pemerintahan.

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 adalah "**Mewujudkan Klaten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".** Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan pada 6 (enam) misi, yaitu: 1) **M**eningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian; 2) **E**fektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana; 3) **N**ilai tambah ekonomi kerakyatan dan perekonomian daerah yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan; 4) **A**kuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan amanat penderitaan rakyat (Ampera); 5)

Nilai daya saing dan kemandirian daerah berbasis potensi local yang terus ditingkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang *smart* dan 6) **G**otong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan Integratif dan pendekatan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten. Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.

Penyusunan dokumen RPJMD mengacu pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 juga disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus selaras dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. Rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubugan Keuangan Antara Pemerintahah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

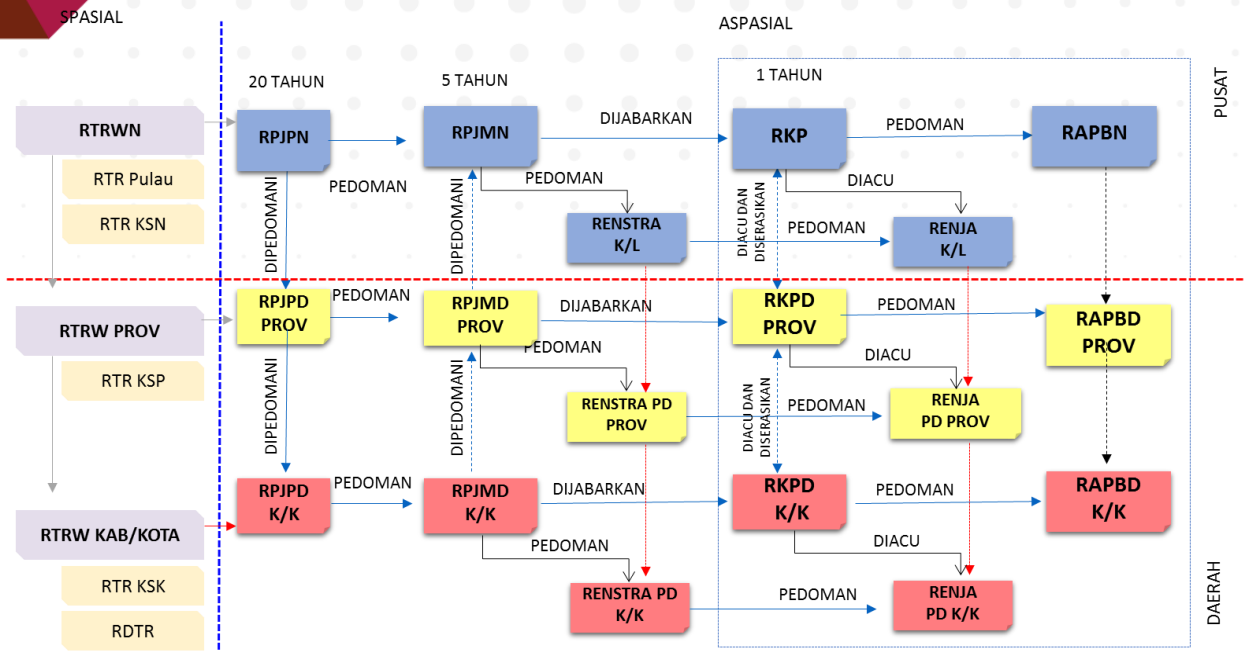
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, SK Nomor 193186 A);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah:(9-221/2024), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 252).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun daerah. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional; keselarasan antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan keselarasan dengan dokumen perencanaan multi sektor lainya. Hubungan antara RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan secara lebih rinci dalam gambar berikut.



Gambar 1.2 Keterkaitan Rancangan Teknokratik RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Klaten dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen dokumen RPJMN tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis; tema dan arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2025-2029; agenda pembangunan; arah pembangunan wilayah dan dukungan sarana prasarana yang tercantum dalam RPJMN.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 terutama terkait dengan isu strategis dan arah pembangunan daerah.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, khususnya pentahapan periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Klaten yang diarahkan pada kebijakan "Penguatan Pondasi Pembangunan".

D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan memperhatikan struktur ruang,

pola ruang dan program penataan ruang. Penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

E. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 juga harus mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten periode tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan, sebagai dasar penyusunan APBD serta bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur untuk periode 2025-2029, sesuai dengan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten;
b. Menganalisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
c. Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
d. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I **Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan RPJMD; hubungan antar dokumen RPJMD tahun 2025 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID dan dokumen rencana sekoral lainnya); maksud dan tujuan serta sistematika RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, berisi tentang data-data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 yang meliputi: Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum; Kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024 serta permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Bab III **Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**, didalamnya memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Tujuan yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Sasaran yang diturunkan dari tujuan RPJMD; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab IV **Program Perangkat Daerah dan Kinerja Perangkat Daerah,** berisi Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah yang sudah ditentukan target pencapaian keberhasilannya yang berlaku dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Bab V **Penutup**, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pemerintah
Kabupaten Klaten

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II
GAMBARAN UMUM

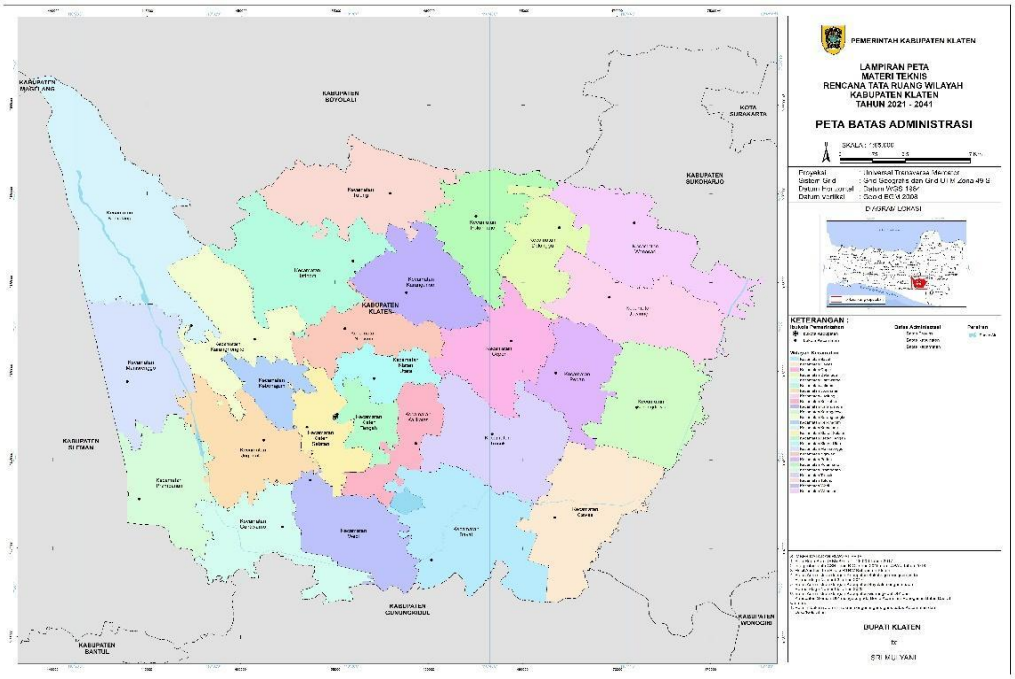
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Klaten terletak antara 7032` 19" - 7048` 33" Lintang Selatan dan antara 110026` 14" - 110047` 51" Bujur Timur. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 wilayah yaitu: (1) Dataran Lereng Gunung Merapi yang membentang di sebelah utara meliputi sebelah utara Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. (2) Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. (3) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil Kecamatan Bayat bagian selatan dan Cawas. Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/ kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten berada pada lokasi yang strategis karena berada di simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dengan adanya jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surakarta-Yogyakarta, didukung dengan jaringan jalan tol Solo-Yogyakarta. Wujud peran Strategis Kabupaten Klaten, ada beberapa point yang menyoroti strategisnya lokasi Klaten diantaranya: Lokasi di jalur utama: Klaten berada di jalur transportasi utama yang menghubungkan Yogyakarta, Surakarta dan Semarang, Klaten dapat berperan menjadikannya titik transit yang penting, Aksesibilitas: Jalur transportasi yang memadai wujud perannya memudahkan mobilitas orang dan barang, serta mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata, Potensi pariwisata: Klaten kaya akan situs bersejarah dan tempat wisata alam, menarik wisatawan dari berbagai daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional: Klaten termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, yang merupakan program prioritas nasional dan menarik minat investor, Perkembangan ekonomi: Dengan posisinya yang strategis, Klaten memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041, Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 701,52 Km^2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten

Secara administratif, Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa, 10 Kelurahan, 3.689 Rukun Warga (RW) dan 9.593 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan paling luas di Kabupaten Klaten adalah Kecamatan Kemalang dengan luas 8,58% (60,19 km^2) dari total luas wilayah Kabupaten Klaten, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Klaten Tengah dengan luas 9,59 km^2. Kecamatan dengan jumlah desa/ kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Cawas dengan jumlah desa terbanyak yaitu 20 desa, sedangkan Kecamatan dengan desa paling sedikit yaitu Kecamatan Kalikotes dan Kecamatan Kebonarum, masing-masing terdiri dari 7 desa.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Desa Kelurahan, RT, RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Desa/ Kelurahan	RT	RW	LPMK/ LPMD
1	Prambanan	26,09	16	356	134	16
2	Gantiwarno	26,44	16	306	127	16
3	Wedi	26,25	19	448	189	19

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Desa/ Kelurahan	RT	RW	LPMK/ LPMD
4	Bayat	42,09	18	460	166	18
5	Cawas	35,93	20	491	207	20
6	Trucuk	34,68	18	487	197	18
7	Kalikotes	14,10	7	290	94	7
8	Kebonarum	10,41	7	171	70	7
9	Jogonalan	27,59	18	448	206	18
10	Manisrenggo	30,60	16	434	171	16
11	Karangnongko	29,49	14	332	142	14
12	Ngawen	18,45	13	334	125	13
13	Ceper	25,76	18	471	166	18
14	Pedan	19,99	14	407	143	14
15	Karangdowo	30,80	19	376	151	19
16	Juwiring	30,90	19	402	149	19
17	Wonosari	33,40	18	375	138	18
18	Delanggu	20,03	16	338	110	16
19	Polanharjo	25,21	18	253	109	18
20	Karanganom	25,61	19	292	137	19
21	Tulung	34,44	18	355	142	18
22	Jatinom	37,10	18	489	181	18
23	Kemalang	60,19	13	314	110	13
24	Klaten selatan	15,09	12	338	131	12
25	Klaten tengah	9,59	9	331	100	9
26	Klaten utara	11,17	8	287	95	8
Kabupaten Klaten		**701,52**	**401**	**9.593**	**3.689**	**401**

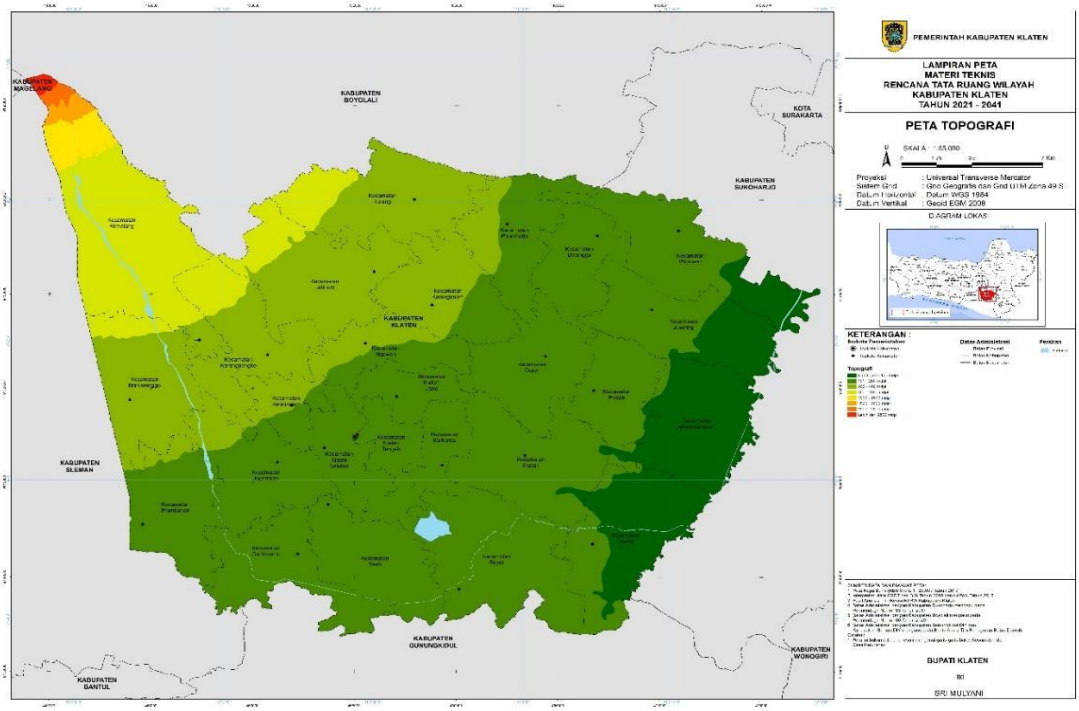
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Secara umum, wilayah Kabupaten Klaten berada pada ketinggian 100 hingga > 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 3,72% wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara ketinggian 0-100 mdpl, sebanyak 83,52% wilayahnya terletak di antara ketinggian 100-500 mdpl dan sisanya sebanyak 12,76% terletak di antara ketinggian 500-2.500 mdpl. Ketinggian Kabupaten Klaten secara terperinci yaitu:

1) Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas;
2) Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3) Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian

utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).

4) Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5) Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

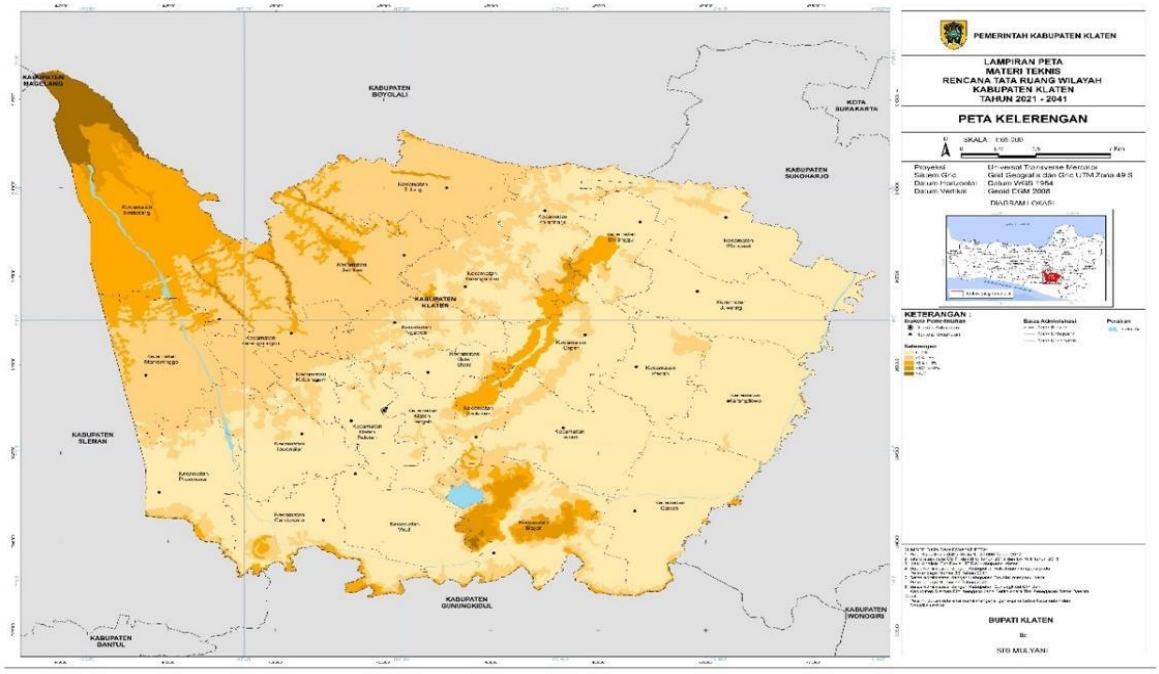
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Klaten

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Klaten terbagi:

1) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil Kecamatan Kemalang bagian utara, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom dan Tulung;
2) Dataran Rendah membujur di bagian tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo;
3) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil Kecamatan Bayat bagian selamatan, Cawas dan sebagian Gantiwarno.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Klaten, khususnya bagian tengah hingga selatan, memiliki kelerengan 0-2%, sementara wilayah utara menunjukkan peningkatan kelerengan secara bertahap. Kelerengan lebih dari 40% tercatat di

Kecamatan Kemalang, yang merupakan bagian dari lereng Gunung Merapi. Wilayah dengan kelerengan 0–5% tergolong datar dan memiliki daya dukung tinggi untuk pengembangan kawasan budidaya, seperti pertanian, perikanan, industri, permukiman dan pariwisata. Namun, wilayah dengan kelerengan di atas 25% tergolong curam dan kurang layak untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun. Beberapa area bahkan memiliki kemiringan lebih dari 45%, yang termasuk sangat curam dan berisiko tinggi terhadap pembangunan.

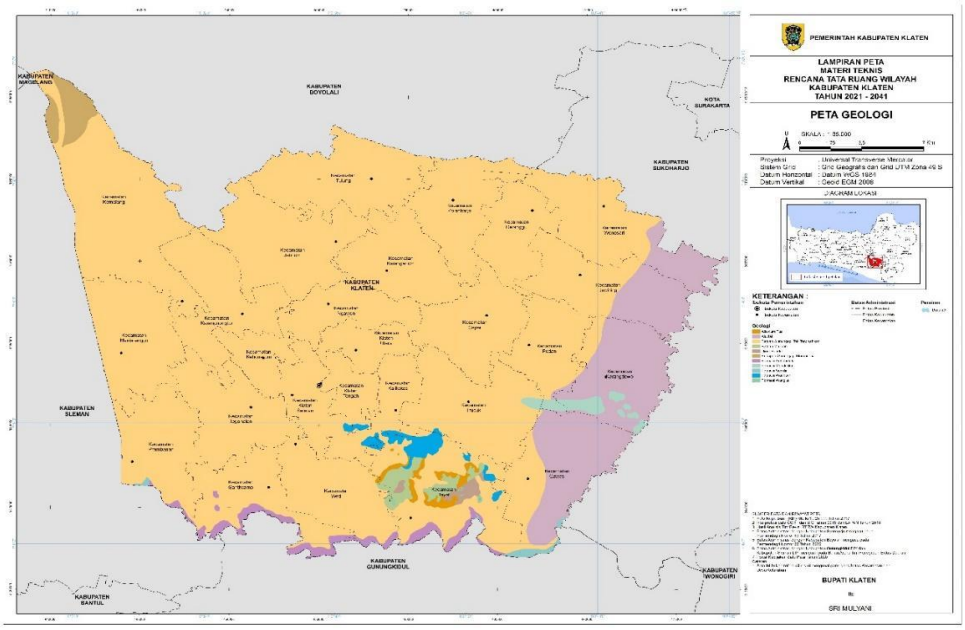


Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Klaten

2.2.2. Potensi Sumber Daya Alam

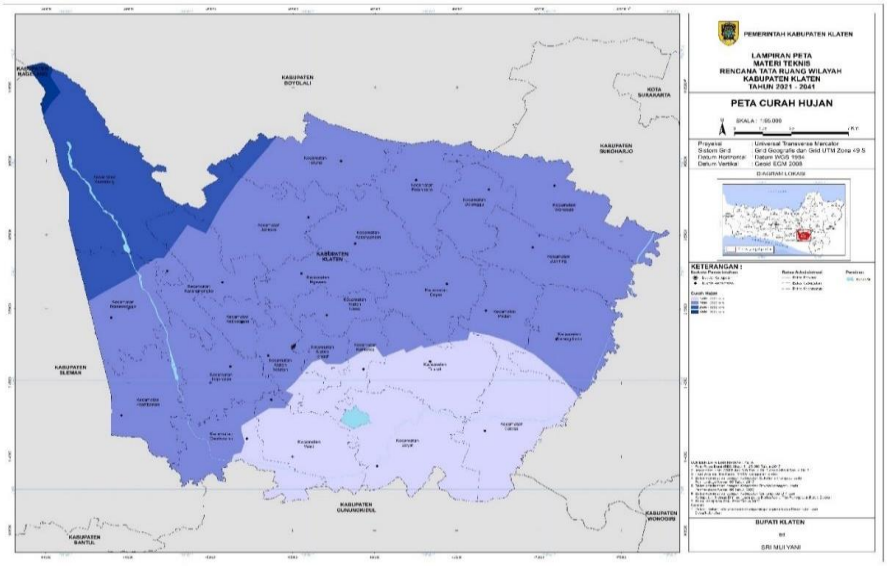
Kabupaten Klaten memiliki potensi alam yang besar, baik di sektor pertanian maupun sumber daya alam lainnya. Selain dikenal sebagai sentra produksi pertanian, daerah ini juga kaya akan bahan tambang seperti batu kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Secara geologis, wilayah Klaten termasuk dalam kategori vulkanik Kuarter Muda, dengan batuan induk yang terbentuk dari material vulkanik Gunung Merapi. Jenis batuan yang tersebar di wilayah ini meliputi Aluvium Tua, Endapan Aluvium, Batuan Gunungapi Merapi, Batuan Gunungapi Tua, Batuan Malihan, Dasit, Pendul, serta formasi geologi seperti Formasi Gamping Wungkal, Formasi Kebobutak, Formasi Semilir dan Formasi Wonosari. Keanekaragaman jenis batuan ini tidak hanya memengaruhi kesuburan tanah, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi melalui pemanfaatan material tambang untuk sektor konstruksi dan industri.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Klaten

Kondisi alam di Kabupaten Klaten juga didukung oleh iklim tropis yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Kabupaten Klaten mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang berganti secara bergilir sepanjang tahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 28-30 derajat Celcius, dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 20-25 km/jam. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Region II Jawa Tengah, rata-rata curah hujan berada pada kisaran 400-500 mm. Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten disajikan pada gambar berikut.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki dua karakteristik hidrologi utama, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan mencakup sungai, rawa danau, irigasi, serta badan air lainnya yang berada di atas permukaan tanah. Sementara itu, air tanah meliputi mata air, sumur dangkal dan sumur dalam. Air sumur dangkal berasal dari lapisan tanah dengan kedalaman sekitar 5–15 meter, meskipun kedalaman ini bervariasi tergantung lokasi. Secara wilayah, Klaten termasuk dalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu DAS Bengawan Solo dan DAS Opak. Seluruh kecamatan di Klaten berada dalam DAS Bengawan Solo dengan luas mencapai 1.888 hektare. Sementara itu, DAS Opak mencakup Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan, dengan luas sekitar 132 hektare.

Kabupaten Klaten juga memiliki berbagai sumber air lainnya, seperti waduk, embung dan mata air. Salah satu waduk utama adalah Waduk Rowo Jombor di Kecamatan Bayat, yang memiliki luas 189 hektare, kedalaman 4,5 meter dan daya tampung sekitar 4 juta m^3. Waduk ini berfungsi untuk pengendalian banjir dan penyediaan air irigasi, serta dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan perikanan. Selain itu, terdapat 206 titik mata air yang tersebar di 20 kecamatan, dengan konsentrasi terbanyak (38 titik) berada di Kecamatan Tulung. Dari jumlah tersebut, 17 mata air saat ini dalam kondisi tidak aktif. Klaten juga memiliki sejumlah embung sebagai sumber air tambahan untuk mendukung ketahanan air, khususnya pada musim kemarau.

Tabel 2.2
Daftar Embung di Kabupaten Klaten

No	Nama	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
1	Embung Tarubasan	Tarubasan	Karanganom
2	Embung Taskombang	Taskombang	Manisrenggo
3	Embung Pandes	Pandes	Wedi
4	Embung Krakitan I	Krakitan	Bayat
5	Embung Krakitan II	Krakitan	Bayat
6	Embung Kendalsari	Kendalsari	Kemalang
7	Embung Kluwih	Kecemen	Manisrenggo
8	Embung Panggang	Panggang	Kemalang
9	Embung Mranggen	Mranggen	Jatinom
10	Embung Madirdo	Tlogo	Prambanan
11	Embung Karangasem	Karangasem	Cawas
12	Embung Krikilan	Krikilan	Bayat
13	Embung Karangpakel	Karangpakel	Trucuk
14	Embung Tambong Wetan	Tambong wetan	Kalikotes
15	Embung Sidorejo	Sidorejo	Kemalang
16	Embung Tegalmulyo	Tegalmulyo	Kemalang
17	Embung Tijayan	Tijayan	Manisrenggo

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten

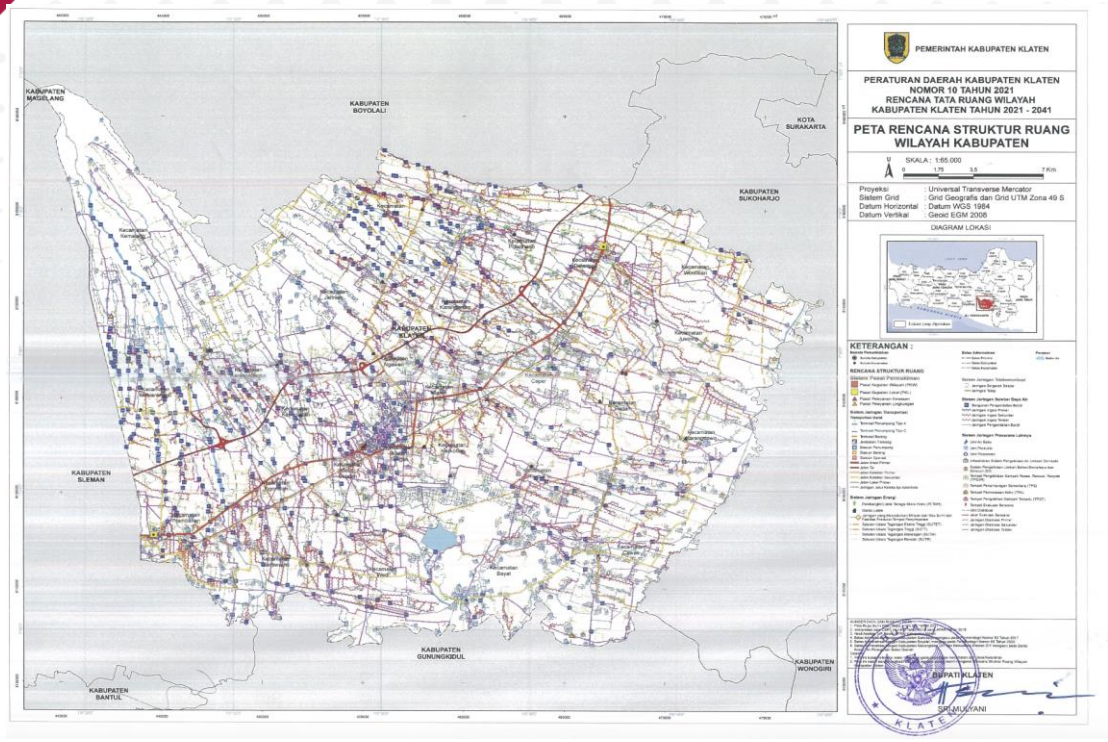
Kabupaten Klaten secara administratif mempunyai luasan 70.152,02 ha dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2024

Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	373,41
Bangunan permukiman desa	16.975,03
Bangunan permukiman kota	7.894,76
Bangunan Peternakan	4,05
Embung	2,47
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	643,41
Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	901,22
Jaringan rel kereta	42,64
Kolam ikan air tawar	136,26
Ladang/tegalan hortikultura	7.834,09
Lapangan diperkeras	228,74
Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	978,22
Sawah dengan padi terus menerus	33.668,63
Stasiun	7,45
Sungai	285,06
Terminal bus	5,40
Waduk multiguna	171,20

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten 2024

Berdasarkan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041, peruntukan lahan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Adapun kawasan budidaya terdiri atas Badan Jalan, Kawasan hutan produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan pertanian, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan permukiman dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Klaten, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.

1) Kawasan Lindung terdiri atas:

(a) Badan Air

Dengan luas kurang lebih 455 ha terdapat di Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.

(b) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Berupa Kawasan Lindung dengan luas kurang lebih 56 ha terdapat di Kecamatan Bayat.

(c) Kawasan Konservasi

Berupa Kawasan pelestarian alam yang berupa Taman Nasional. Taman Nasional berupa Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas kurang lebih 901 ha terdapat di Kecamatan Kemalang.

(d) Kawasan Lindung Geologi

Berupa kawasan cagar alam geologi yang berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil, dengan luas kurang lebih 7 ha terdapat di Kecamatan Bayat.

(e) Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
(1) Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Lor/ Candirejo, Candi Asu/Gana, Candi Plaosan Lor, Candi Plaosan Kidul dan Candi Sojiwan, dengan luas kurang lebih 72 ha di Kecamatan Prambanan,
(2) Kawasan Pandanaran dengan luas kurang lebih 6 ha di Kecamatan Bayat,
(3) Candi Karangnongko dan Candi Merak di Kecamatan Karangnongko,
(4) Kawasan Pesanggrahan Paku Buwono X di Kecamatan Kemalang,
(5) Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom,
(6) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari,
(7) Makam Panembahan Romo di Kecamatan Klaten Selatan,
(8) Makam Kyai Melati di Kecamatan Klaten Tengah,
(9) Makam Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk, dan
(10) Makam Syeh Domba di Kecamatan Bayat.

2) Kawasan Budidaya terdiri atas:

(a) Badan Jalan

Dengan luas kurang lebih 375 hektare terdapat di Kecamatan Ceper, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Prambanan.

(b) Kawasan Hutan Produksi, Terdiri atas:
(1) Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dengan luas kurang lebih 199 hektare terdapat di Kecamatan Bayat.
(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan luas kurang lebih 394 hektare terdapat Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes.

(c) Kawasan Perkebunan Rakyat

Dengan luas kurang lebih 2.340 hektare, terdapat Kecamatan Bayat, Kecamatan Karangnongko dan Kecamatan Kemalang.

(d) Kawasan Pertanian, terdiri atas:
(1) Kawasan Tanaman Pangan, dengan luas kurang lebih 32.000 hektare terdapat di seluruh kecamatan. Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Kawasan Peternakan, dengan luas kurang lebih 251 hektare, terdapat di Kecamatan Bayat, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Tulung.

(e) Kawasan Perikanan

Berupa Kawasan Perikanan Budi Daya, dengan luas kurang lebih 82 hektare terdapat Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Prambanan, dan Kecamatan Tulung.

(f) Kawasan Pertambangan dan Energi

Berupa Kawasan pertambangan mineral, berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 65 hektare terdapat di Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung.

(g) Kawasan Peruntukan Industri

Dengan luas kurang lebih 1.690 hektare terdapat di Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Pedan, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Tulung, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.

(h) Kawasan Pariwisata, terdiri atas:

(1) Kawasan Pariwisata alam meliputi:

Bukit Sidoguro dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektare di Kecamatan Bayat; Obyek Mata Air Cokro (OMAC) dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare di Kecamatan Polanharjo dan 3 (tiga) hektare di Kecamatan Tulung; Batu Putih di Kecamatan Bayat; Bukit Cinta di Kecamatan Bayat; Bukit Patrum di Kecamatan Bayat; Jombor Permai di Kecamatan Bayat; Kawah Putih di Kecamatan Bayat; Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat; Kebon Asri di Kecamatan Bayat; Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat; Watu Sepur di Kecamatan Bayat; Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganom; Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum; Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum; Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum; Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum; Deles Indah di Kecamatan Kemalang; Girpasang di Kecamatan Kemalang; Kalitalang di Kecamatan Kemalang; Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom; Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen; Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo; Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo; Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo; Umbul Sigedang Kapilaler di Kecamatan Polanharjo; Pusur Tubing di Kecamatan Polanharjo; Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo; Umbul Nilo di Kecamatan Tulung dan Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.

(2) Kawasan Pariwisata buatan meliputi:
Museum Gula Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektare di Kecamatan Jogonalan; Tirta Pelangi di Kecamatan Kalikotes; Kolam Renang Tirta Indah di Kecamatan Klaten Selatan; Kolam Renang Tirta Yudha Bakti di Kecamatan Klaten Selatan; Kolam Renang Moon di Kecamatan Klaten Utara; Prilon Park di Kecamatan Klaten Utara; D'Wangen Ketjeh Resto di Kecamatan Polanharjo; Kampung Dolanan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo; Kawasan Wisata Siblarak di Kecamatan Polanharjo; Kolam Renang Tirta Kamandanu di Kecamatan Polanharjo; Pemancingan Omah Iwak di Kecamatan Polanharjo; Kolam Renang Pancingan 47 di Kecamatan Tulung; Kolam Renang Lumintu 1001 di Kecamatan Polanharjo; Kolam Renang Sumber Mina di Kecamatan Polanharjo; Pemancingan Janti di Kecamatan Polanharjo; Ponggok Ciblon di Kecamatan Polanharjo; Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo di Kecamatan Prambanan; Kolam Renang Tirta Kencana Miri di Kecamatan Trucuk; Aqua Regia di Kecamatan Tulung; Kolam Renang Bale Tirta di Kecamatan Tulung; Kolam Renang Pancingan 100 di Kecamatan Tulung; Pesona Alam Tirta di Kecamatan Tulung; Pemandian Lumban Tirto di Kecamatan Tulung; Semego di Kecamatan Tulung; Umbul Asri di Kecamatan Tulung dan pengembangan potensi wisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan Pariwisata budaya meliputi:
Kampung Pecel Ngerangan di Kecamatan Bayat; Makam Sunan Pandanaran di Kecamatan Bayat; Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom; Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom; Tugu Waseso dan Menoro Baskoro di Kecamatan Karanganom; Candi Merak di Kecamatan Karangnongko; Candi Karangnongko di Kecamatan Karangnongko; Candi Asu/Gana di Kecamatan Prambanan; Candi Bubrah di Kecamatan Prambanan; Candi Lor/Candirejo di Kecamatan Prambanan; Candi Lumbung di Kecamatan Prambanan; Candi Plaosan Kidul di Kecamatan Prambanan; Candi Plaosan Lor di Kecamatan Prambanan; Candi Sewu di Kecamatan Prambanan; Candi Sojiwan di Kecamatan Prambanan; Makam Ronggo Warsito di Kecamatan Trucuk; Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari dan Keunikan lokal sebagai desa wisata meliputi: 1) Desa Wisata Gununggajah di Kecamatan Bayat, 2) Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat, 3) Desa Wisata Jotangan di Kecamatan Bayat, 4) Desa Wisata Krakitan di Kecamatan Bayat, 5) Desa Wisata Ngerangan di Kecamatan Bayat, 6) Desa Wisata Paseban di Kecamatan Bayat, 7) Desa Wisata Tlingsing di Kecamatan Cawas, 8) Desa Wisata Pokak di Kecamatan Ceper, 9) Desa Wisata Glagah di Kecamatan Jatinom, 10)

Desa Wisata Mranggen di Kecamatan Jatinom, 11) Desa Wisata Plawikan di Kecamatan Jogonalan, 12) Desa Wisata Tanjung di Kecamatan Juwiring, 13) Desa Wisata Jimbung di Kecamatan Kalikotes, 14) Desa Wisata Beku di Kecamatan Karanganom, 15) Desa Wisata Soropaten di Kecamatan Karanganom, 16) Desa Wisata Karangnongko di Kecamatan Karangnongko, 17) Desa Wisata Malangjiwan di Kecamatan Kebonarum, 18) Desa Wisata Ngrundul di Kecamatan Kebonarum, 19) Desa Wisata Pluneng di Kecamatan Kebonarum, 20) Desa Wisata Balerante di Kecamatan Kemalang, 21) Desa Wisata Panggang di Kecamatan Kemalang, 22) Desa Wisata Sidorejo di Kecamatan Kemalang, 23) Desa Wisata Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang, 24) Desa Wisata Tlogowatu di Kecamatan Kemalang, 25) Desa Wisata Danguran di Kecamatan Klaten Selatan, 26) Desa Wisata Nglinggi di Kecamatan Klaten Selatan, 27) Desa Wisata Jomboran di Kecamatan Klaten Tengah, 28) Desa Wisata Duwet di Kecamatan Ngawen, 29) Desa Wisata Manjungan di Kecamatan Ngawen, 30) Desa Wisata Nganjat di Kecamatan Polanharjo, 31) Desa Wisata Ponggok di Kecamatan Polanharjo, 32) Desa Wisata Sidowayah di Kecamatan Polanharjo, 33) Desa Wisata Brajan di Kecamatan Prambanan, 34) Desa Wisata Bugisan di Kecamatan Prambanan, 35) Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan, 36) Desa Wisata Melikan di Kecamatan Wedi, 37) Desa Wisata Pasung di Kecamatan Wedi dan 38) Desa Wisata Sidowarno di Kecamatan Wonosari.

(4) Kawasan Permukiman, terdiri atas:

- Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan luas kurang lebih 10.433 hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan luas kurang lebih 20.783 hektare meliputi: Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Pedan, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Tulung, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.

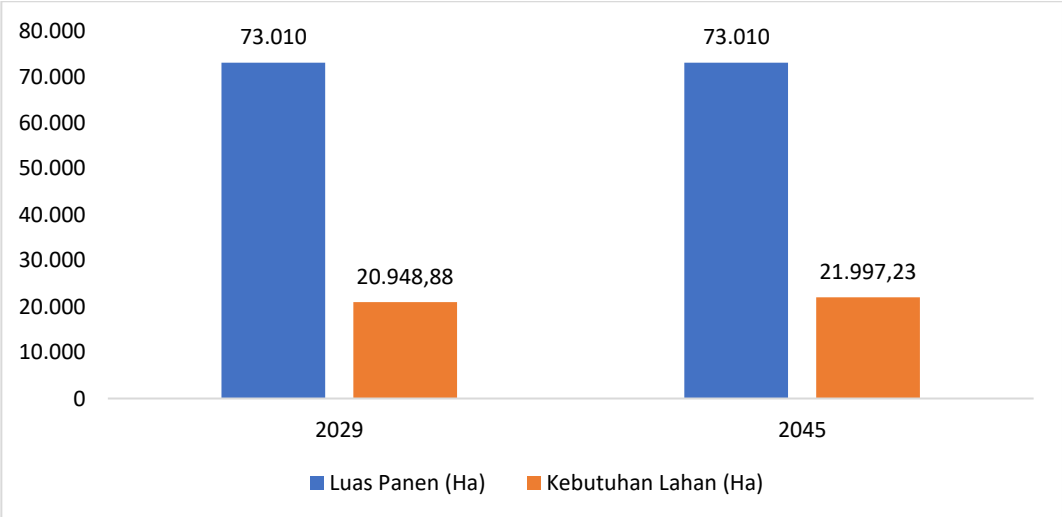
(5) Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
Depo Pendidikan dan Latihan Tempur Rindan IV/Diponegoro dengan luas kurang lebih 28 hektare terdapat di Kecamatan Klaten Selatan; Komando

Distrik Militer Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah; Kepolisian Resor Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Utara; Lapangan tembak terdapat di Kecamatan Trucuk.

- Komando rayon militer meliputi: 1) Komando Rayon Militer 01/ Kota di Kecamatan Klaten Tengah, 2) Komando Rayon Militer 02/ Jogonalan di Kecamatan Jogonalan, 3) Komando Rayon Militer 03/ Delanggu di Kecamatan Delanggu, 4) Komando Rayon Militer 04/ Pedan di Kecamatan Pedan, 5) Komando Rayon Militer 05/ Jatinom di Kecamatan Jatinom, 6) Komando Rayon Militer 06/ Kebonarum di Kecamatan Klaten Selatan, 7) Komando Rayon Militer 07/ Wedi di Kecamatan Wedi, 8) Komando Rayon Militer 08/ Ngawen di Kecamatan Ngawen, 9) Komando Rayon Militer 09/ Prambanan di Kecamatan Prambanan, 10) Komando Rayon Militer 10/ Gantiwarno di Kecamatan Gantiwarno, 11) Komando Rayon Militer 11/ Karangnongko di Kecamatan Karangnongko, 12) Komando Rayon Militer 12/ Manisrenggo di Kecamatan Manisrenggo, 13) Komando Rayon Militer 13/ Kemalang di Kecamatan Kemalang, 14) Komando Rayon Militer 14/ Karanganom di Kecamatan Karanganom, 15) Komando Rayon Militer 15/ Polanharjo di Kecamatan Polanharjo, 16) Komando Rayon Militer 16/ Tulung di Kecamatan Tulung, 17) Komando Rayon Militer 17/ Karangdowo di Kecamatan Karangdowo, 18) Komando Rayon Militer 18/Bayat di Kecamatan Bayat, 19) Komando Rayon Militer 19/ Trucuk di Kecamatan Trucuk, 20) Komando Rayon Militer 20/ Cawas di Kecamatan Cawas, 21) Komando Rayon Militer 21/ Juwiring di Kecamatan Juwiring, 22) Komando Rayon Militer 22/ Wonosari di Kecamatan Wonosari, 23) Komando Rayon Militer 23/ Ceper di Kecamatan Ceper dan 24) Komando Rayon Militer 24/ Klaten Utara di Kecamatan Klaten Utara.
- Kepolisian Sektor meliputi: Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Pedan, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Tulung, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.

2.2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Analisis status daya dukung lahan pertanian dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Menurut penelitian BPS, kebutuhan beras tiap orang sebesar 113.48 kg/kapita/tahun, sedangkan produktivitas lahan pertanian tiap hektar sebesar 5-7 ton. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih belum terlampaui untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini diasumsikan masyarakat membeli beras di wilayahnya sendiri. Walaupun begitu terdapat 3 kecamatan yang daya dukung lahan pertaniannya terlampaui yaitu Kecamatan Kemalang, Klaten Utara dan Jatinom. Kecamatan Kemalang dan Jatinom terletak di lereng Gunung Merapi sehingga karakteristik geografisnya tidak sesuai untuk tanaman pangan semusim. Selain itu kondisi tutupan lahan didominasi oleh hutan dan perkebunan. Hal ini menyebabkan luas lahan sawahnya relatif sempit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan Klaten Utara merupakan bagian dari wilayah perkotaan Klaten sehingga perkembangan permukimannya pesat. Kondisi tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sehingga luasannya berkurang. Sisi lain jumlah penduduk semakin bertambah dan berdampak pada kemampuan daya dukungnya untuk pemenuhan di masyarakat. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2029 sebanyak 1.211.188 jiwa sedangkan pada tahun 2045 sebanyak 1.271.800 jiwa. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan lahan pada tahun 2029 sampai dengan 2045 masih lebih sedikit dibandingkan ketersediaan lahan. Hasil perhitungan kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Klaten selengkapnya sebagai berikut :



Sumber: DDDTLH Kabupaten Klaten Tahun 2022

Gambar 2.7 Grafik Proyeksi Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Kabupaten Klaten

Secara rinci perhitungan daya dukung lahan pertanian pada masing-masing kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Tiap Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	Produktivitas	Kebutuhan Layak	Kebutuhan Layak (Ha)	Selisih
Bayat	65.771	1.618	6.384	113,48	1.169,12	448,48
Cawas	60.704	4.638	7.013	113,48	982,27	152,33
Ceper	68.188	1.950	5.986	113,48	1.292,68	657,42
Delanggu	43.505	4.075	6.531	113,48	755,93	3,318,97
Gantiwarno	41.443	3.338	6.312	113,48	745,08	108,06
Jatinom	62.183	756	5.830	113,48	1.210,38	(454,68)
Jogonalan	61.927	3.429	7.004	113,48	1.003,35	101,07
Juwiring	61.325	5.210	6.751	113,48	1.030,83	174,16
Kalikotes	38.217	1.350	6.411	113,48	676,74	673,03
Karanganom	47.406	3.797	6.026	113,48	892,74	121,03
Karangdowo	45.557	4.906	6.958	113,48	743	4.162,80
Karangnongko	38.367	1.903	6.437	113,48	676,38	1.226,62
Kebonarum	21.140	1.837	6.455	113,48	371,64	1,465,66
Kemalang	40.343	80	6.438	113,48	711,11	(631,01)
Klaten Selatan	45.546	1.876	6.453	113,48	800,95	44,80
Klaten Tengah	42.546	881	6.345	113,48	764,23	116,77
Klaten Utara	49.256	736	6.615	113,48	844,98	(109,48)
Manisrenggo	44.336	2.738	7.197	113,48	699,08	84,95
Ngawen	47.304	3.499	6.478	113,48	828,66	2.670,74
Pedan	49.000	2.343	5.476	113,48	1.015,43	707,27
Polanharjo	43.179	4.254	6.531	113,48	750,26	176,62
Prambanan	52.957	2.343	6.440	113,48	933,16	58,76
Trucuk	82.226	4.254	6.715	113,48	1.389,58	119,36
Tulung	55.805	2.608	6.894	113,48	918,59	70,38
Wedi	54.672	2.814	6.470	113,48	958,91	77,30
Wonosari	64.355	5.563	6.380	113,48	1.144,67	4.418.73

Sumber : DDTLH Kab. Klaten 2022

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka terlampaui. Berdasarkan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Klaten Tahun 2022, perhitungan daya dukung air dihitung menggunakan analisis sistem grid, didapatkan hasil terlampaui dan tidak terlampaui pada beberapa wilayah. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Klaten

Kecamatan	Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air (m^3)
Bayat	21.662.037,48	25.093.862,70
Cawas	21.620.077,09	35.841.643,10
Ceper	15.408.103,39	34.173.867,20
Delanggu	12.650.009,56	20.648.457,10
Gantiwarno	14.617.482,05	27.081.899,00
Jatinom	18.474.708,74	27.442.823,70
Jogonalan	16.453.190,53	27.023.636,80
Juwiring	18.934.689,54	34.458.838,70
Kalikotes	8.283.215,10	12.422.755,90
Karanganom	16.279.737,92	26.486.901,80
Karangdowo	18.704.839,37	34.098.331,60
Karangnongko	14.500.698,35	25.202.481,30
Kebonarum	6.565.474,15	12.138.358,50
Kemalang	32.431.286,23	33.188.884,50
Klaten Selatan	9.146.252,56	25.628.687,70
Klaten Tengah	5.364.624,95	7.974.876,80
Klaten Utara	6.082.901,63	17.302.254,70
Manisrenggo	15.495.673,29	10.612.979,20
Ngawen	11.364.336,72	19.512.062,80
Pedan	11.406.989,73	27.965.608,20
Polanharjo	16.821.331,38	24.408.456,60
Prambanan	14.704.034,95	12.588.963,00
Trucuk	19.689.633,27	34.274.975,20
Tulung	21.059.645,72	31.526.477,20
Wedi	14.400.671,56	24.185.166,80
Wonosari	21.448.354,73	34.962.323,90
Total	**403.570.000,00**	**646.245.574,10**

Sumber: DDDTLH Kabupaten Klaten Tahun 2022

2.2.4. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketenagalistrikan merupakan faktor penting yang mendukung roda pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Jaringan listrik memainkan peran vital dalam menunjang kegiatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari industri, perdagangan, hingga rumah tangga. Jumlah energi listrik yang terjual dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator pertumbuhan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, jumlah KWh terjual di Kabupaten Klaten menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yaitu dari 798.916.102 KWh pada tahun 2020 menjadi 960.774.069 KWh di tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan listrik, yang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 423.259 pelanggan dan meningkat menjadi 484.901 pelanggan pada tahun 2024.

Konsumsi listrik mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap teknologi, produktivitas dan kualitas hidup suatu wilayah. Semakin tinggi konsumsi listrik, umumnya mengindikasikan semakin luasnya pemanfaatan peralatan listrik dan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha, maupun industri. Hal ini juga menunjukkan adanya pertumbuhan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang semakin intensif. Gambaran jumlah KWh terjual PLN di Kabupaten Klaten pada periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
2020	233.003.146	1.452.177	166.454.905	1.390.861	233.003.146	1.452.177	166.454.905	1.390.861
2021	242.875.703	1.554.377	171.742.274	1.384.047	242.875.703	1.554.377	171.742.274	1.384.047
2022	251.982.533	1.620.455	172.774.591	1.010.456	251.982.533	1.620.455	172.774.591	1.010.456
2023	259.377.184	2157.451	180.708.297	1081.015	343.920.692	869.478	11.3068.875	203.725
2024	273.675.251	2.282.088	193.672.209	1.364.001	370.875.331	855.782	122.551.278	470.032

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA, PLN Persero UP3 Klaten, 2024

Seluruh wilayah Kabupaten Klaten telah dilayani oleh jaringan listrik PLN, yang ditandai dengan keberadaan gardu induk dan jaringan distribusi di sepanjang jalan. Untuk mewujudkan penyediaan listrik yang merata dan berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, melalui penguatan infrastruktur, pemanfaatan energi terbarukan, serta efisiensi distribusi dan penggunaan energi. Sebaran jumlah pelanggan jaringan listrik di Kabupaten Klaten per cabang pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Cabang/ Ranting	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Klaten	156.425	160.943	165.206	170.448	175.645
2	Tulung	94.280	97.094	99.236	101.639	104.555
3	Pedan	122.312	125.784	128.900	132.386	136.062
4	Delanggu	62.276	63.996	65.502	67.101	68.639
Jumlah		**423.259**	**435.293**	**447.772**	**471.574**	**484.901**

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA, PLN Persero UP3 Klaten, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, yang mencakup tiga aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator IKP didasarkan pada

relevansi dengan ketahanan pangan, sensitivitas, keterwakilan pilar ketahanan pangan dan ketersediaan data tahunan. Guna mendukung ketersediaan pangan, Kabupaten Klaten berupaya menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan peraturan daerah, dimana pada saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD.

Di Kabupaten Klaten, IKP menunjukkan tren fluktuatif selama 2020-2024. Pada tahun 2020 sebesar 84,03%, turun ke 81,60% pada 2021, lalu naik berturut-turut hingga mencapai 85,64 pada 2024. Tren ini menunjukkan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas konsumsi dan ketahanan pangan.

Sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Pada tahun 2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (POU) di Kabupaten Klaten sebesar 10,11%, menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 14,46%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas konsumsi pangan.

Berikut perkembangan pembangunan urusan pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.8
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,03	81,60	84,13	85,50	85,64
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment)*	%	14,16	14,72	15,45	14,46	10,11

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Ketersediaan cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Klaten saat ini masih di bawah target minimum 50% yang ditetapkan Pemerintah Pusat, akibat keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatannya setiap tahun melalui stabilisasi harga, penguatan stok pangan, antisipasi krisis akibat perubahan iklim dan tekanan ekonomi global, serta perlindungan daya beli masyarakat. Jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2024

No	Komoditi	Prod	Ketersediaan	Kebutuhan	+/-	Konsumsi Per Kapita	Faktor Konversi
		(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(kg/kap/ tahun)	(100-angka susut)
1	Padi	283.103	168.204,73	114.802,54	53.402,19	88,30	62,74%
2	Jagung	79.151	70.444,62	819,09	69.625,53	0,63	89,00%
3	Kedelai	3.415	3.232,71	12.663,38	-9.430,67	9,74	94,66%
4	Kacang Tanah	1.131	978,11	223,62	754,49	0,17	86,49%
5	Kacang Hijau	1.723	1.602,77	483,65	1.119,12	0,37	93,00%
6	Ubi Kayu	23.751	22.770,29	8.450,92	14.319,36	6,50	95,87%
7	Ubi Jalar	934	822,04	1.300,14	-478,10	1,00	88,00%
8	Gula	3.136	3.105,26	9.181,60	-6.076,34	7,06	99,02%
9	Daging	384.552	365.324,47	8.190,89	357.133,58	6,30	95,00%
10	Telur	29.807	29.195,58	9.375,32	19.820,25	7,21	97,95%
11	Susu	12.311	10.377,81	2.730,30	7.647,51	2,10	84,30%
12	Ikan	30.375	29.463,57	20.282,22	9.181,35	15,60	97,00%
13	Cabai Merah	923	895,62	2.481,97	-1.586,35	1,91	97,00%
14	Cabai Rawit	947	937,85	4.745,52	-3.807,67	3,65	99,00%
15	Bawang Merah	348	337,13	2.862,91	-2.525,78	2,20	97,00%

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Pada tahun 2024, ketersediaan padi mengalami surplus sebesar 53.402,19 ton, peningkatan dipengaruhi oleh penggunaan varietas unggul, teknik tanam yang tepat, pengendalian OPT, serta penyesuaian terhadap kondisi cuaca/iklim. Produksi kedelai dan ubi jalar masih belum mencukupi karena lahan lebih diprioritaskan untuk padi dan jagung, serta rendahnya minat petani akibat terbatasnya permintaan pasar dan harga jual yang kurang menarik. Kondisi ini turut memengaruhi skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Skor PPH naik dari 84,80 pada tahun 2020 menjadi 91,00 di tahun 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 91,50 pada 2022. Meskipun terjadi penurunan ke angka 89,60 pada tahun 2023, skor kembali naik signifikan pada tahun 2024 mencapai 92,77. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, peningkatan cakupan vaksinasi, serta kebijakan bantuan pangan yang mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	84,80	91,00	91,50	89,60	92,77
2.	Ketersediaan pangan utama (beras)	Ton	267.611,10	285.205,06	278.026	286.141	261.447

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita/ hari	3.003	2.663	3.454	2.862	1.890
4.	Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita/ hari	80,87	72,64	94,03	79,41	55,12
5.	Penguatan cadangan pangan	Kg	36.000	39.105	26.425	22.215	27.215
6.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Lokasi	4	4	7	8	12
7.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	78,00	83,00	84,00	81,00	95,09

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Indikator lain yang berpengaruh terhadap pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) meliputi kecukupan gizi masyarakat dan kebutuhan kalori. Berdasarkan Permen Pertanian No. 65/2010, standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.200 kkal/hari per orang. Kecukupan gizi mencakup kebutuhan energi dan protein harian sesuai usia, jenis kelamin dan aktivitas.

Ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka ketersediaan tercatat tinggi sebesar 3.003 kkal per kapita per hari. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 2.663 kkal akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan dengan peningkatan signifikan hingga 3.454 kkal, tetapi kembali menurun di tahun 2023 menjadi 2.862 kkal karena penurunan konsumsi pada beberapa kelompok pangan seperti pangan hewani, gula, sayur dan buah. Penurunan semakin tajam pada tahun 2024, yakni menjadi 1.890 kkal, disebabkan oleh naiknya harga bahan pokok yang menurunkan daya beli masyarakat serta alih fungsi lahan pertanian untuk proyek strategis nasional jalan tol Solo-Jogja.

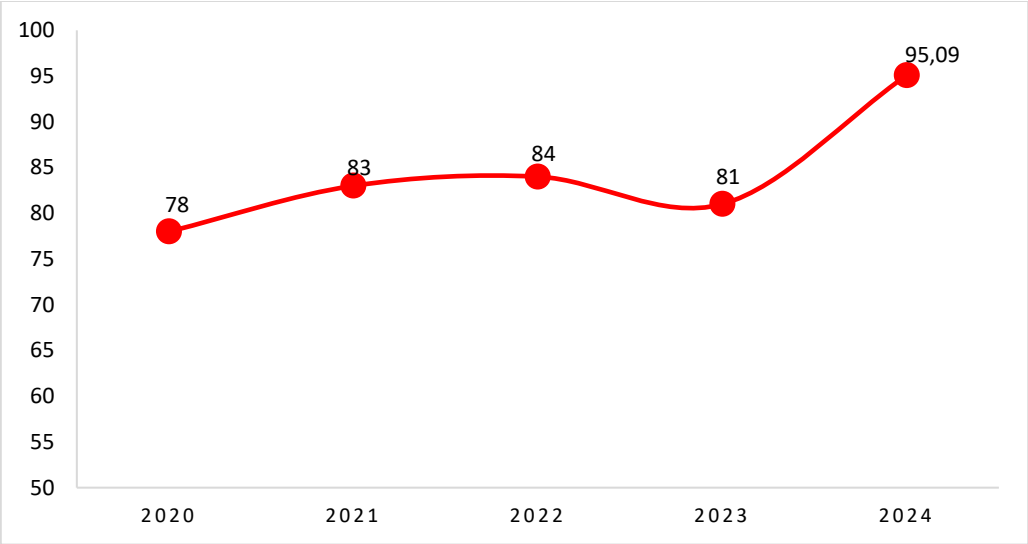
Tabel 2.11
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Capain Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan energi per kapita (kkal/ kapita/ hari)	3.003	2.663	3.454	2.862	1.890
Ketersediaan protein per kapita (kkal/ kapita/ hari)	80,87	72,64	94,03	79,41	55,12

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Selain kebutuhan kalori dan asupan gizi per kapita, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Upaya ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan segar yang aman dikonsumsi, bebas dari pencemaran kimia maupun mikroba, serta sesuai

dengan nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Dengan demikian, keamanan pangan berperan dalam mendukung kesehatan, pertumbuhan dan kecerdasan masyarakat. Di Kabupaten Klaten, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami peningkatan selama periode 2020–2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian menjadi 81% karena pelaksanaan pengawasan bertepatan dengan berbagai kegiatan lain seperti penyaluran bantuan pangan untuk penanganan stunting, program pengurangan kemiskinan dan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Akibatnya, intensitas pengawasan dan pembinaan menurun. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat signifikan menjadi 95,09%. Meski kegiatan tetap padat seperti tahun sebelumnya, pengaturan waktu dan pembagian tugas yang lebih efektif memungkinkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berjalan optimal.

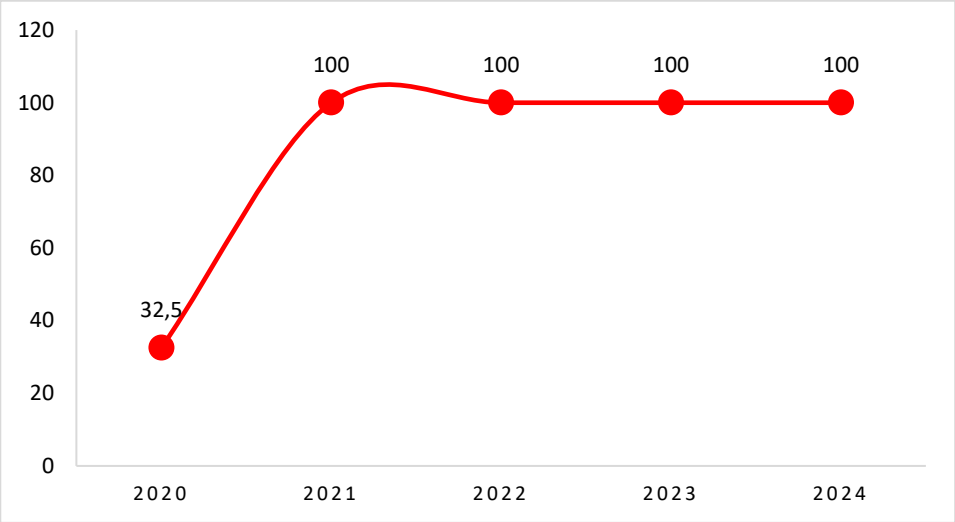


Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.8 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan di tingkat pusat dan daerah secara umum diarahkan pada dua kegiatan utama, yaitu koordinasi dan penguatan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pangan segar tersebut. Namun dalam praktiknya, kegiatan ini difokuskan untuk mengatasi berbagai permasalahan, antara lain: kurangnya komitmen daerah, rendahnya pemahaman produsen, konsumen dan aparat, belum diterapkannya praktik usaha yang baik oleh pelaku usaha buah dan sayur, kendala administrasi pencairan anggaran, keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta laboratorium terakreditasi, lemahnya koordinasi antar instansi dan belum optimalnya perencanaan kegiatan. Di Kabupaten Klaten, peningkatan ketahanan pangan daerah turut didukung oleh peran kelompok tani yang aktif, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Cakupan pembinaan terhadap kelompok tani tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.9 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (%)

Kelompok tani di Kabupaten Klaten berasosiasi membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang saat ini berjumlah 397 sesuai dengan SK Bupati Klaten. Dari jumlah tersebut, 28 Gapoktan telah menerima program penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), sementara sisanya masih memerlukan penguatan serupa. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang pada tahun 2020 berganti nama menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L), mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pekarangan dan dukungan bantuan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Program ini juga ditujukan untuk membantu pengendalian inflasi akibat kenaikan harga BBM dan dampak perang Rusia-Ukraina. Pada tahun 2021, hanya 7 kelompok memenuhi syarat untuk menerima alokasi P2L sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pertanian. Jumlah ini meningkat menjadi 16 kelompok pada tahun 2022, terdiri dari 7 kelompok yang didanai DAK Non Fisik dan 9 kelompok dari Dana Transfer Umum (DAU). Pada tahun 2023, sebanyak 9 kelompok menerima alokasi program P2L dan tahun 2024 terdaapt 16 kelompok. Sebaran lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024 disajikan dibawah ini.

Tabel 2.12
Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024

No	Tahun	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kelompok
1	2020	49	21	49
2	2021	7	7	7
3	2022	16	11	16
4	2023	9	8	9
5	2024	16	13	16
	Jumlah	**97**	**607**	**91**

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Cakupan akses air minum yang memadai sangat penting bagi Masyarakat. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Persentase rumah tangga berakses air minum capaian tahun dari 91,77 % pada tahun 2020 menjadi 94,29 % di tahun 2024, dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 94,77% dan wilayah perdesan sebesar 86,51%.

Terkait dengan upaya penyediaan infrastruktur sanitasi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga tahun 2024, akses sanitasi di Kabupaten Klaten telah mencapai 100%, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.

Tabel 2.13
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Sektor	Skala	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Minum	Kabupaten	1.218.317	1.181.835	1.190.459	1.205.331	1.225.924
		%	91,77	92,62	93,19	93,35	94,29
		Perkotaan	487.910	462.103	1.125.360	1.142.340	1.160.863
		%	95,06	93,66	93,72	93,91	94,77
		Perdesaan	731.327	720.819	62.754	63.356	65.061
		%	89,81	92,10	84,55	84,84	86,51
2	Sanitasi	Kabupaten	1.327.577	1.327.577	1.277.455	1.291.161	1.300.142
		%	100	100	100	100	100
		Perkotaan	513.253	493.395	1.203.610	1.216.481	1.224.933
		%	100	100	100	100	100
		Perdesaan	814.324	782.637	73.845	74.680	75.209
		%	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Litbang & DPU PR Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Klaten 2021–2026, target cakupan pelayanan air minum ditetapkan 100% pada tahun 2026. Namun, terdapat sejumlah kendala, seperti sulitnya menemukan sumber air di wilayah lereng Merapi, meliputi Desa Tlogowatu, Tegalmulyo, Sidorejo, Tangkil, Kendalsari dan Talun di Kecamatan Kemalang serta adanya sumber air asin di beberapa desa di Kecamatan Cawas, Bayat, Juwiring, Karangdowo dan Pedan. Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa, pemanfaatan CSR, DAK, hibah air minum, serta program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, Sanitasi Desa dan Kotaku. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengusulkan pendanaan pusat melalui Instruksi Presiden untuk pembangunan jaringan pipa dan sambungan rumah SPAM Cabang Timur di Kecamatan Karangdowo.

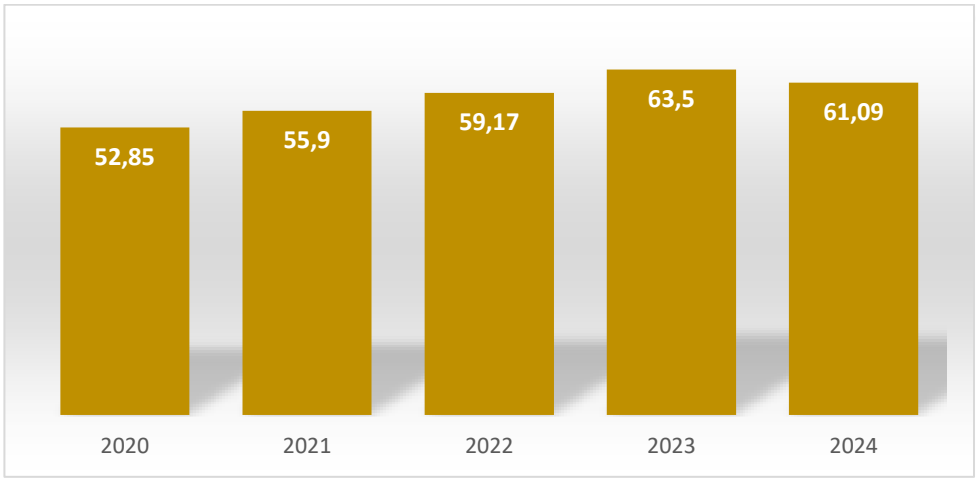
Di bidang sanitasi, pada tahun 2020 hingga 2024 cakupan akses dasar atau layak telah mencapai 100%. Target selanjutnya adalah meningkatkan akses sanitasi aman, yaitu fasilitas buang air besar yang terkoneksi ke sistem terpusat atau tangki septik yang disedot berkala dan diolah di IPLT sesuai Permen PUPR No. 29 Tahun 2018. Capaian akses sanitasi aman masih rendah, yakni 1,16% pada tahun 2021, meningkat menjadi 1,327% pada tahun 2022 dan 1,42% pada tahun 2023. Rendahnya capaian ini disebabkan belum optimalnya pendataan pengguna layanan sedot tinja, terutama dari pihak swasta, serta kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dengan Sukoharjo, Boyolali dan Sleman.

Pada tahun 2024, melalui program Instruksi Presiden (Inpres), Kabupaten Klaten mengusulkan pengadaan 1.000 tangki septik untuk rumah tangga dan 1 truk pengangkut lumpur tinja guna meningkatkan akses sanitasi dari dasar ke layak hingga aman. Upaya ini didukung melalui bantuan jambanisasi bagi masyarakat miskin, pembangunan dan pemeliharaan IPLT Jomboran, serta layanan lumpur tinja terjadwal. Pada 2024, capaian akses sanitasi layak sudah 100% tetapi akses sanitai aman baru mencapai 1,64%, dengan 91 IPAL skala permukiman terhubung ke 4.213 rumah dan 1.576 rumah terlayani sedot tinja ke IPLT. Kesadaran masyarakat terhadap layanan ini mulai tumbuh, meski data dari penyedia layanan swasta masih belum tersedia.

2.2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencerminkan tingkat kualitas lingkungan pada periode dan wilayah tertentu, semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi lingkungannya. Di Kabupaten Klaten, IKLH menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, namun menurun menjadi 61,09 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan penurunan kualitas lingkungan yang perlu menjadi perhatian

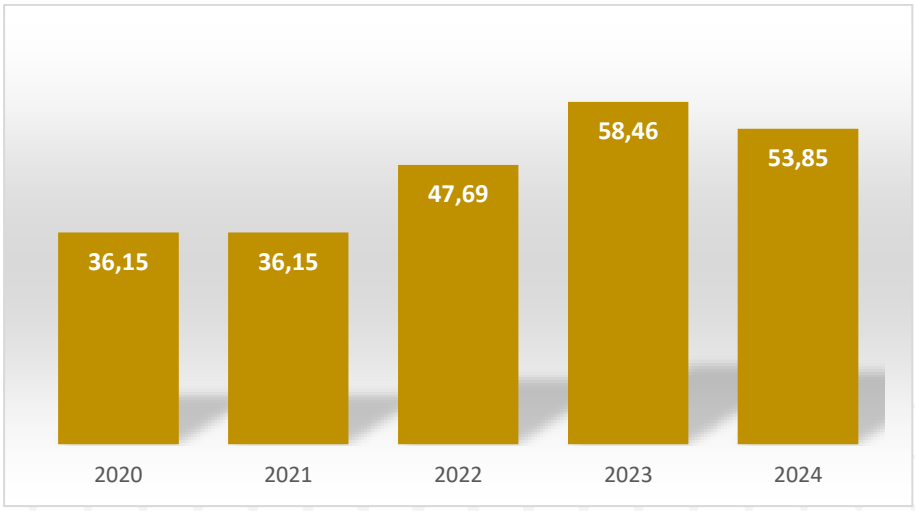
dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.



Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

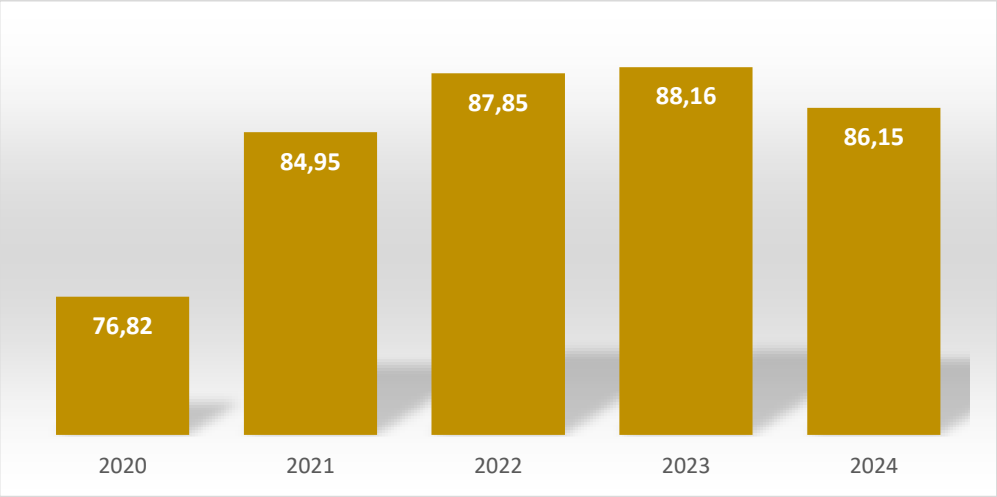
Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menunjukkan angka 53,85, yang tergolong dalam kategori sedang dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh masih rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kebersihan sungai, terutama terkait pembuangan sampah dan limbah. Di lapangan, juga ditemukan aktivitas pencucian pasir di beberapa lokasi, khususnya di Kecamatan Jogonalan, yang berdampak pada bendung dan jaringan irigasi. Pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten telah melakukan upaya penanganan terhadap permasalahan tersebut.



Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.11 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

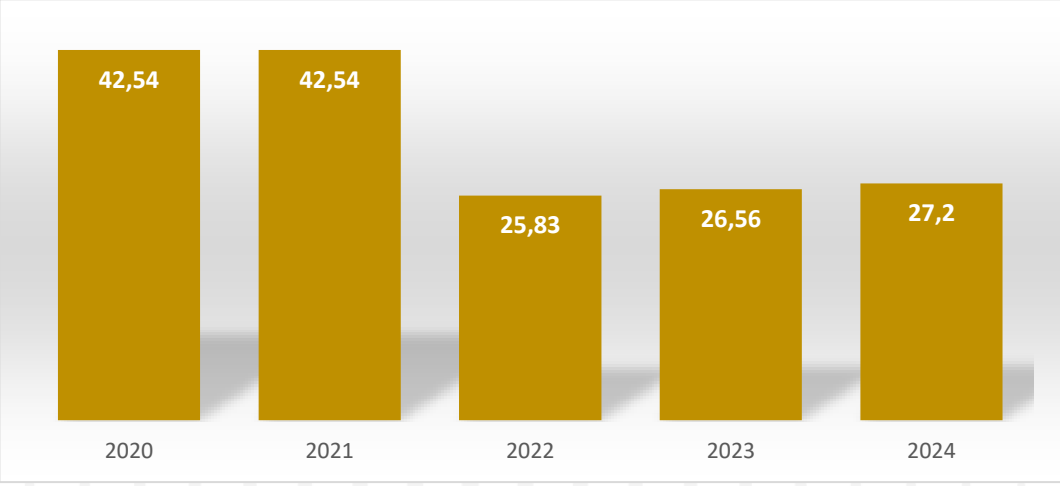
Pengukuran indeks kualitas udara (IKU) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar 86,15, capaian ini menurun dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk ikut mengendalikan pencemaran udara supaya dapat meningkat secara bertahap.



Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.12 Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020-2024

Dari Komposit pembentuk IKLH hanya IKTL yang menunjukkan data positif dari tahun tahun sebelumnya, hasil capaian Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2022 sebesar 25,83 sedangkan tahun 2023 menjadi sebesar 26,56 dan tahun 2024 sebesar 27,20. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan berupa perbedaan kelas tutupan lahan yang diakomodir, dari sebelumnya 10 macam kelas tutupan lahan menjadi 19 macam kelas tutupan lahan dengan berbasis data delineasi spasial tutupan lahan dan harus terverifikasi oleh KLHK.

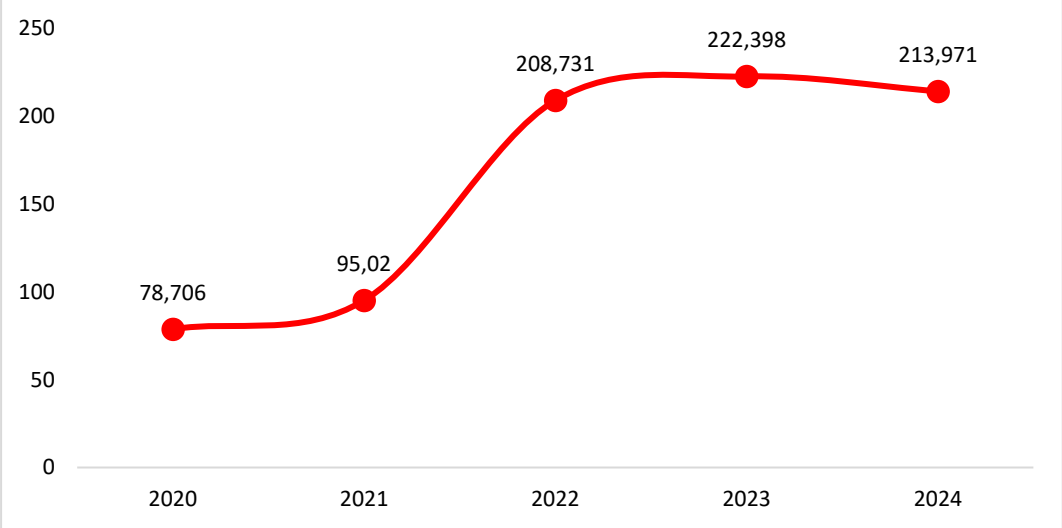


Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2020-2024

Kabupaten Klaten memiliki potensi kawasan hutan yang tersebar dalam beberapa fungsi, antara lain hutan lindung, taman nasional, cagar alam, taman hutan raya, hutan produksi dan hutan negara. Dari seluruh kawasan tersebut, fungsi hutan dengan luasan terbesar adalah Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) seluas 901 hektare, disusul oleh hutan negara seluas 648 hektare, hutan produksi seluas 593 hektare dan hutan lindung seluas 56 hektare. Potensi kawasan ini berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta penurunan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

Sampah menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, ekosistem dan merusak lingkungan hidup. Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, volume sampah yang berhasil diolah tercatat sebesar 78.704 ton dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 213.971 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, baik dari segi kapasitas fasilitas, teknologi pengolahan, maupun kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara lebih baik. Kondisi persampahan di Kabupaten Klaten dapat digambarkan melalui data timbulan sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.



Sumber: DLH Kab. Klaten, 2025

Gambar 2.14 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, timbulan sampah telah mencapai 263.706,32 ton per tahun, menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan volume sampah ini menjadi tantangan serius, terutama karena kapasitas lahan penampungan tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi keterbatasan lahan, diperlukan pengolahan

sampah yang lebih optimal, termasuk penambahan indikator Timbulan Sampah Terolah melalui fasilitas pengolahan yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian ekstra terhadap pengembangan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan limbah padat, mengingat pengelolaan sampah yang kurang memadai dapat berdampak langsung pada kondisi kesehatan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.14
Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)
1	Bayat	65.771	19.731	63.486	19.046	63.734	31.867	64.262	32.131	66.447	33.423
2	Cawas	60.704	18.211	57.548	17.264	57.675	28.838	58.105	29.053	58.409	29.380
3	Ceper	68.188	20.456	43.516	13.055	64.915	32.458	65.595	32.798	66.069	33.233
4	Delanggu	43.505	13.051	46.270	13.881	42.122	21.061	42.486	21.243	42.628	21.442
5	Gantiwarno	41.443	12.432	38.642	11.593	38.642	19.321	38.955	19.478	39.151	19.693
6	Jatinom	62.183	18.654	45.856	13.757	60.186	30.093	61.036	30.518	61.744	31.057
7	Jogonalan	61.927	18.578	42.941	12.882	59.002	29.501	59.676	29.838	60.093	30.227
8	Juwiring	61.325	18.397	42.124	12.637	58.363	29.182	58.979	29.490	59.374	29.865
9	Kalikotes	38.217	11.465	19.922	5.977	36.993	18.497	37.405	18.703	37.680	18.953
10	Karanganom	47.406	14.221	60.232	18.070	46.389	23.195	46.895	23.448	47.391	23.838
11	Karangdowo	45.557	13.667	62.757	18.827	43.328	21.664	43.866	21.933	43.923	22.093
12	Karangnongko	38.367	11.510	65.094	19.528	36.805	18.403	37.285	18.643	37.477	18.851
13	Kebonarum	21.140	6.342	58.918	17.675	19.808	9.904	19.870	9.935	19.955	10.037
14	Kemalang	40.343	12.102	37.108	11.132	39.602	19.801	40.135	20.068	40.487	20.365
15	Klaten Selatan	45.546	13.663	47.945	14.384	44.045	22.023	44.707	22.354	45.287	22.779
16	Klaten Tengah	42.865	12.859	41.206	12.362	41.107	20.554	41.352	20.676	41.671	20.961
17	Klaten Utara	49.256	14.776	43.927	13.178	47.980	23.990	48.590	24.295	48.972	24.633
18	Manisrenggo	44.336	13.300	36.760	11.028	43.232	21.616	43.707	21.854	44.040	22.152
19	Ngawen	47.304	14.191	46.907	14.072	45.869	22.935	46.125	23.063	46.401	23.340
20	Pedan	49.000	14.700	58.274	17.482	46.875	23.438	47395	23.698	47.761	24.024
21	Polanharjo	43.179	12.953	53.696	16.109	40.949	20.475	41.303	20.652	41.433	20.841
22	Prambanan	52.957	15.887	51.363	15.409	51.708	25.854	52.461	26.231	52.911	26.614
23	Trucuk	82.226	24.667	79.039	23.712	79.218	39.609	80.167	40.084	80.709	40.597
24	Tulung	55.805	16.741	39.447	11.834	53.948	26.974	54.554	27.277	55.043	27.687

No	Kecamatan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan (kg)
25	Wedi	54.672	16.401	52.039	15.612	52.061	26.031	52.526	26.263	52.814	26.565
26	Wonosari	64.355	19.306	41.013	12.304	62.899	31.450	63.724	31.862	64.272	32.329
	Jumlah	**1.319.530**	**398.273**	**1.276.030**	**382.809**	**1.277.455**	**638.728**	**1.291.161**	**645.581**	**1.302.142**	**654.977**

Sumber: DLHK dan DPU PR Kab. Klaten, 2025

Saat ini, satu-satunya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih beroperasi di Kabupaten Klaten adalah TPA Troketon yang berlokasi di Kecamatan Pedan. Sementara itu, TPA Beteng, Jomboran, Joho dan Candirejo sudah tidak beroperasi. Selain pengangkutan ke TPA Troketon, pengelolaan sampah di Klaten juga dilakukan melalui berbagai upaya pengurangan sampah, seperti pembangunan TPS3R oleh masyarakat secara swadaya maupun oleh pemerintah daerah, pembentukan bank sampah, serta budidaya maggot. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari strategi penanganan sampah yang dilaksanakan selama periode 2020–2024.

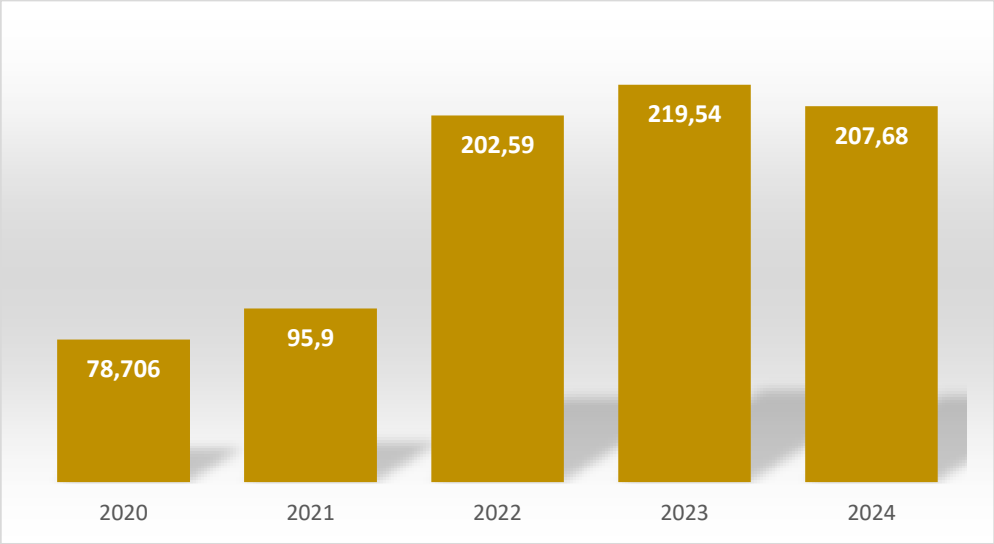
Tabel 2.15
Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020 – 2024

Unit	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bank sampah	Jumlah Unit	45	45	62	62	60
	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	0,05	0,05	1,89	1,90	1,8974
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	2,25	2,25	1,89	1,90	1,182
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0,58	0,57	0,30	0,30	0,18
Pengolahan sampah mandiri	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	-	100	-	0	0,01685
Penanganan setempat TPS3R	Jumlah Unit	17	23	33	33	41
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	0,83	0,83	106,44	100,92	86,7572
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	14,17	19,09	100,30	98,07	84,0248
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	3,58	6,26	15,72	15,37	12,83
TPA Troketon	Jumlah Unit	1	1	1	1	1
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	78,706	95,020	100,4	119,57	125,30
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	78,706	95,020	100,4	119,57	122,47
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah (%)	50,66	24,81	16,00	19,00	18,70
TOTAL SAMPAH TERTANGANI	**Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)**	**78,706**	**95,020**	**208,731**	**222,398**	**213,97145**
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	**78,706**	**95,90**	**202,591**	**219,541**	**207,6768**
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	**50,66**	**50,94**	**32,00**	**34,00**	**31,71**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan DLH Kab Klaten, 2024

Sampai tahun 2024, Kabupaten Klaten memiliki 62 kelompok bank sampah, dengan 23 diantaranya dibangun oleh pemerintah daerah dan sisanya

terbentuk secara mandiri. Selain itu, terdapat 38 unit TPS3R skala kecamatan dan desa. TPS3R skala kecamatan memiliki kapasitas pengolahan sekitar 25 ton per 30 hari (0,83 ton per hari), sementara bank sampah hanya mampu mengolah 50-60 kg sampah per hari. Data ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur pengolahan sampah telah tersedia, kapasitas pengelolaan yang ada masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan volume timbulan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten. tahun 2024

Gambar 2.15 Jumlah Penanganan Sampah yang Tertangani Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim global, Kabupaten Klaten menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), selaras dengan target minimum Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Tengah dan skenario pembangunan rendah karbon nasional dari BAPPENAS. Secara sektoral, potensi kontribusi penurunan emisi GRK Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Sektor Energi
   Menyumbang emisi terbesar, khususnya dari konsumsi listrik (82,72% dari total emisi energi). Penurunan emisi dilakukan melalui efisiensi energi, penggunaan lampu hemat energi, panel surya di fasilitas publik seperti Pasar Gedhe, serta dorongan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Target kontribusi EBT dalam bauran energi primer ditetapkan sebesar 21,32%.
2. Sektor Limbah
   Kontribusi penurunan emisi dicapai melalui pengelolaan sampah berbasis teknologi dan komunitas (reduce-reuse-recycle), serta program pengolahan sampah organik menjadi kompos atau energi. Program TPA ramah lingkungan menjadi bagian dari intervensi ini.

3. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Lahan (AFOLU)
   Emisi dari metana (CH_4) dan dinitrogen oksida (N_2O) terutama berasal dari kegiatan pertanian dan peternakan. Upaya penurunan dilakukan melalui praktik pertanian rendah emisi, integrasi agroforestry, serta pelestarian dan rehabilitasi kawasan hutan. Potensi hutan negara dan produksi yang masih luas memberi peluang besar dalam penyerapan karbon dan pelestarian lingkungan.
4. Sektor Transportasi
   Meski kontribusinya lebih kecil dibanding sektor energi dan pertanian, efisiensi transportasi publik serta dorongan kendaraan listrik di masa depan juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Upaya penurunan emisi di Kabupaten Klaten menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan berbasis bukti, serta edukasi publik untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Konsistensi dalam pemanfaatan potensi hutan, pemenuhan target energi bersih, serta reformasi sistem pertanian menjadi kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan iklim daerah.

Tabel 2.16
Hasil Perhitungan GRK Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023
Berdasarkan Sumber Emisi

No	Kategori	Emisi (Ton/tahun)			
		CO_2	CH_4	N_2O	CO_{2rq}
	Tahun 2021				
1	Penggunaan Energi	1.463.485,79	34,76	2,09	1.464.862,31
2	IPPU				
3	AFOLU	21.365,35	6.655,94	5,76	162.927,00
4	Pengolahan Limbah	6.349,00			6.349,00
Total 2021		**1.491.200,14**	**6.690,70**	**7,85**	**1.634.138,31**
	Tahun 2022				
1	Penggunaan Energi	1.221.351,55	73,33	4,4	522.726,36
2	IPPU				
3	AFOLU	3.884	4.789,20	4,619	105,887,48
4	Pengolahan Limbah	49.231,44			
Total 2022		**1.274.466,99**	**4.862,53**	**9,017**	**628.613,84**
	Tahun 2023				
1	Penggunaan Energi	1.254.395,50	73,51	4,41	1.257.306,55
2	IPPU				
3	AFOLU[1]	4.415,40	4.540,74	4,57	100.656,22
4	Pengolahan Limbah	88.530,00			88.5300
Total 2023		**1.347.340,90**	**4.614,25**	**8,985**	**1.446.492,77**

Sumber: Dokumen Investasrisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2022
Keterangan: 1 tidak dilakukan perhitungan pada sektor penggunaan lahan

Energi yang menjadi pokok bahasan dalam kegiatan inventarisasi GRK Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah bahan bakar minyak dan listrik. Emisi pada sektor energi sangat diperlukan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Padatnya arus lalu-lintas yang melewati Kabupaten Klaten berpotensi menyumbang emisi. Hal ini tidak dapat dihindari sebab sebagian besar kendaraan yang melintas merupakan kendaraan logistik yang diperuntukkan sebagai distributor kebutuhan logistik antar daerah. Selain itu jalur lintas Solo-Joga juga menjadi jalur wisata yang mana kendaraan pribadi ataupun umum yang digunakan juga berpotensi menjadi sumber emisi. Kabupaten Klaten juga dilewati jalur kerta api lintas selatan yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Padatnya arus kereta api diesel (KRD) dengan kereta api dengan lokomotif General Elektrik (GE) diduga juga menjadi salah satu sumber emisi. Pada tahun 2021 Kementerian Perhubungan telah meluncurkan Kereta Rel Listrik (KRL) sebagai pengganti Kereta Rel Diesel (KRD) Pramex (Prambanan Express) jurusan Surakarta-DIY.

Total emisi yang dibebankan terhadap lingkungan dari sektor penggunaan energi pada tahun 2023 adalah sebesar 1.257.306,55 ton CO_{2eq} dengan rincian emisi CO_2 sebesar 1.254.395,5 ton/ tahun, emisi CH_4 sebesar 73,51 ton/ tahun dan emisi N_2O sebesar 4,41 ton/ tahun.

Tabel 2.17
Hasil Inventarisasi Sektor Penggunaan Energi Tahun 2023

No	Kategori	Emisi (Ton/tahun)			CO_{2rq} (Ton/tahun)
		CO_2	CH_4	NO_2	
1	Transportasi				
	Jalan Raya*	518.125,36	73,20	4,39	521.024,09
	Kereta Api	2.305,66	0,31	0,02	2.317,98
2	Listrik	733.964,48	0,00	0,00	733.964,48
	Total	**1.254.395,50**	**73,51**	**4,41**	**1.257.306,55**

Sumber: Dokumen Inventasrisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2022
*Keterangan: *Data aktivitas jalan raya diambil dari data penjualan BBM per tahun.*

a) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan (AFOLU)

Emisi gas metana sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertanian, pengolahan lahan dan peternakan. Emisi GRK pada sektor pertanian dihasilkan dari beberapa aktivitas antara lain peternakan, budidaya, pengolahan lahan beserta penggunaan pupuk. Emisi yang dihasilkan dari kegiatan peternakan pada umumnya adalah eksresi hewan ternak. Peternakan dan pertanian merupakan kegiatan simbiosis antar suhu dengan lainnya. Pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk kendang dapat difungsikan sebagai pupuk dan sisa bahan organic dari hasil pertanian dapat difungsikan substitusi pakan ternak. Dari hasil perhitungan emisi GRK pada sektor AFOLU didapatkan hasil sebagai berikut

Tabel 2.18
Hasil Inventarisasi Sektor AFOLU Tahun 2023

No	Sektor	Nilai Emisi (Ton/tahun			CO_{2rq} (Ton/ tahun)
		CO_2	CH_4	NO_2	
1	Peternakan				
A	CH4 Fermentasi Enterik	0,00	4.148,07	0,00	87.109,37
B	CH4 Pengolahan Kotoran Ternak	0,00	390,62	0,00	8.203,08
C	N2O langsung dari pengolahan kotoran ternak	0,00	0,00	3,82	1.185,53
D	N2O tidak langsung dari pengolahan kotoran ternak	0,00	0,00	0,75	231,12
2	Pertanian				
A	Pengolahan Sawah	0,00	2,05	0,00	43,13
B	Aplikasi Pupuk Urea	4.415,40	0,00	0,00	4.415,40
3	Penggunaan lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**4.415,40**	**4.540,74**	**4,57**	**101.187,62**

Sumber: Dokumen Inventasrisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Klaten Tahun 2024

b) Sektor Pengolahan Limbah

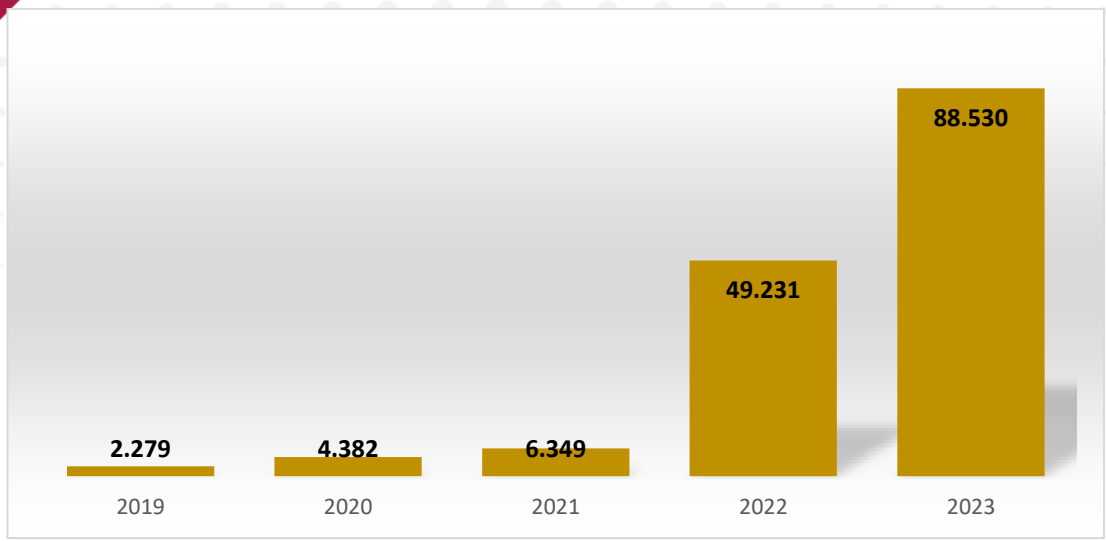
Sektor Pengolahan Limbah yang menjadi bahasan dalam Inventasrisasi GRK adalah besaran gas metana yang dihasilkan dari kegiatan landfill TPA Troketon. Limbah yang ditampung di TPA Troketon merupakan limbah padat domestik. Komposisi sampah di TPA Troketon didominasi oleh sampah sisa makanan yaitu sebesar 67,42%. Sampah sisa makanan tergolong sampah yang mydah mengalami degradasi karbon sehingga diduga akan menimbulkan gas metana lebih besar.

Tabel 2.19
Komposisi Sampah di TPA Troketon

No	Sampah	Komposisi (%)
1	Food Waste	67,42
2	Garden Waste	2,00
3	Textile	0,42
4	Glass, Plastic, & Metal Waste	15,89
5	Paper Waste	10,46
6	Wood Waste	3,82

Sumber: Dokumen GRK Kabupaten Klaten Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi emisi GRK TPA Troketon pada tahun 2023 capaiannya 88.530 ton CO_2eq/ tahun menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.



Sumber: Dokumen GRK Kabupaten Klaten Tahun 2024

Gambar 2.16 Hasil Inventarisasi GRK Landfill TPA Troketon Tahun 2019-2023

Kabupaten Klaten berkomitmen dalam mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penguatan sektor energi, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta pemanfaatan limbah yang lebih ramah lingkungan.

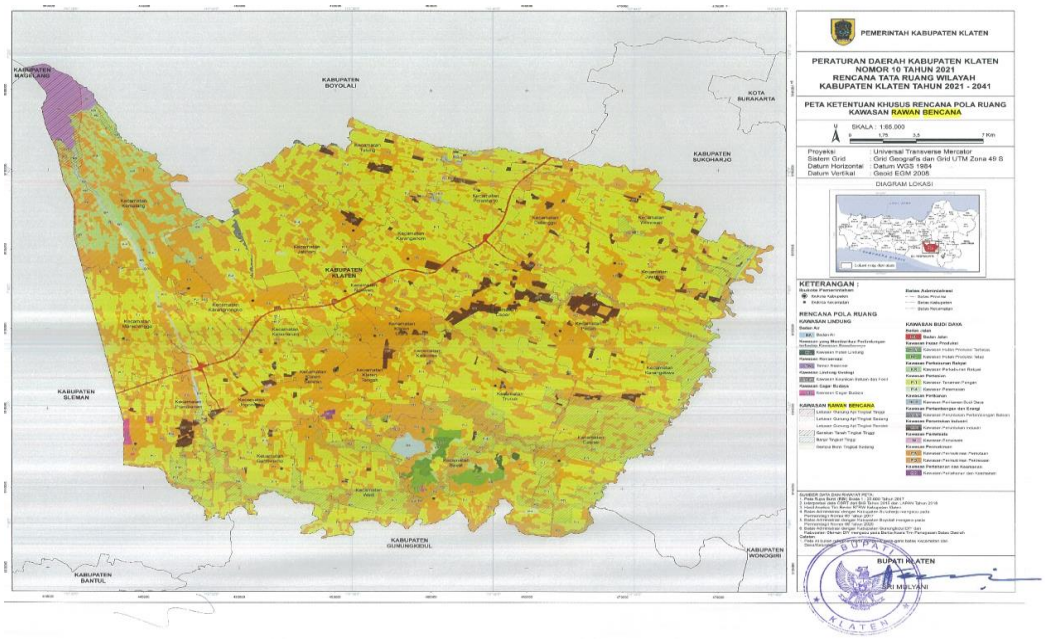
2.2.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana yang ada di Kabupaten Klaten berupa banjir, gempa bumi dan tanah longsor yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Bencana ini terjadi karena beberapa faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia. Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana, berikut jalur bencana:

- Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api terdapat di Kecamatan Jatinom, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Prambanan.
- Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah, terdapat di: Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.
- Jalur Evakuasi Bencana banjir, terdapat di Kecamatan Bayat, Kecamatan Cawas, Kecamatan Ceper, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan

Juwiring, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.

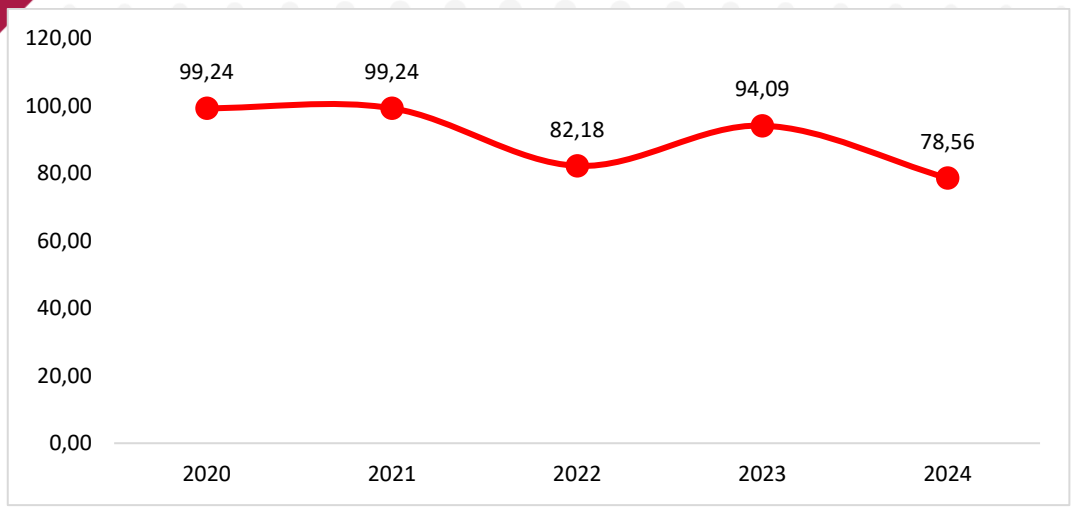
- Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi terdapat di seluruh kecamatan.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2021-2041

Gambar 2.17 Peta Rawan Bencana Kabupaten Klaten

Untuk meminimalkan kejadian dan dampak bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya mitigasi secara struktural dan non-struktural melalui pembangunan zona penghalang antara potensi bencana dan faktor risiko. Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi penyusunan kajian risiko bencana, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, pengadaan peralatan siaga bencana, pembangunan taman kebencanaan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan, pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), sekolah sungai, desa tangguh bencana, serta pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan forum relawan di tingkat kecamatan. Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi serta kebijakan penanggulangan bencana yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Klaten pada tahun 2023 94,09 sedangkan pada tahun 2024 sebesar 78,56 berada di ketegori sedang.



Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.18 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

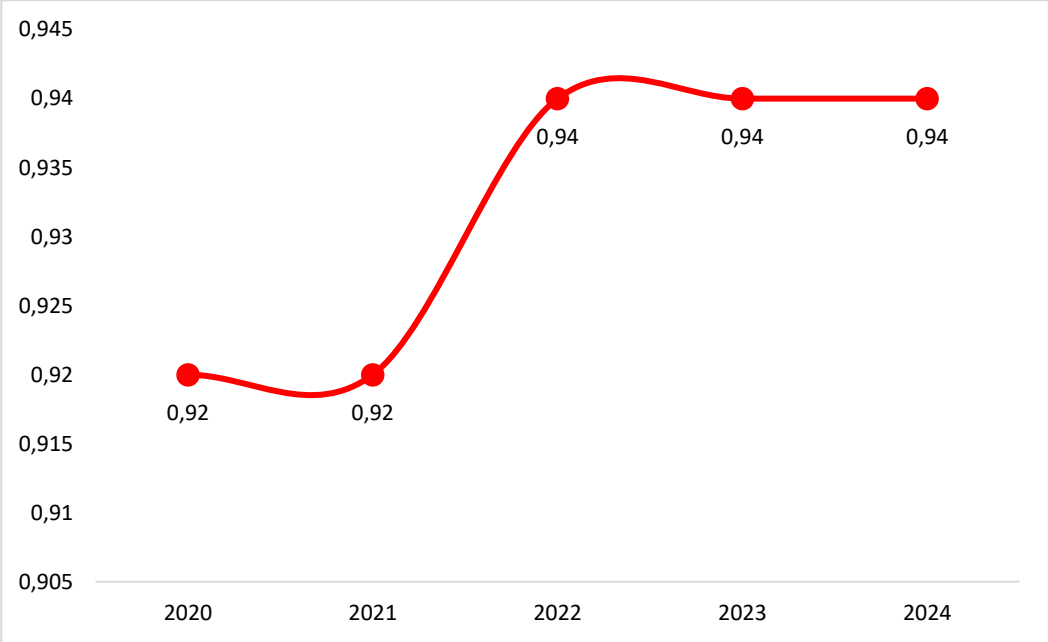
Indeks risiko bencana merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota sesuai dengan bahaya (*hazard)* yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard)* tersebut dengan tingkatan 1 untuk rendah, 2 untuk sedang dan 3 untuk tinggi . Dari hasil kajian resiko bencana didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.20
Hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Klaten

Kategori	Ttitk Wilayah Rawan
Tingkat ancaman tanah longsor **(Kategori ancaman sedang)**	Kecamatan Bayat (Desa. Paseban), Kecamatan Karangdowo (Desa. Demangan), Kecamatan Kemalang (Desa. Tegalmulyo dan Desa. Talun).
Tingkat ancaman banjir **(Kategori ancaman tinggi)**	Kecamatan Wonosari (Desa. Bendungan), Kecamatan Ngawen (Desa. Gatak), Kecamatan Jogonalan (Desa. Joton), Kecamatan Cawas (Desa. Pogung) dengan total sekitar 10 kecamatan dan 73 desa.
Tingkat ancaman gempa bumi **(Kategori ancaman sedang)**	hampir di semua wilayah rawan terutama di daerah prambanan dan cawas.
Tingkat ancaman letusan gunung api **(Kategori ancaman tinggi)**	hampir semua wilayah di Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko.
Tingkat Ancaman cuaca ekstrem/ puting beliung **(Kategori ancaman tinggi)**	Kecamatan Prambanan (Desa. Dukuh, Desa. Kabondalemlor), Kecamatan Kalikotes (Desa. Gatak, Desa. Gemblegan), Kecamatan Trucuk (Desa. Bero), Kecamatan Jogonalan (Desa. Joton, Desa. Gondangan, Desa. Nengahan, Desa. Somopuro, Desa. Gatak, Desa. Sumyang, Desa. Tangkisan pos, Desa. Titang), Kecamatan Cawas (Desa. Pakisan), Kecamatan Ngawen (Desa. Kwaren, Desa. Manjungan), Kecamatan Wedi (Desa. Birit, Desa. Sukorejo).

Sumber : BPBD Kab. Klaten, 2023

Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di daerah dilakukan melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPBD Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.19 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2020-2024

Potensi ancaman bencana di Kabupaten Klaten diperkirakan akan semakin meluas seiring meningkatnya kerentanan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, jumlah kejadian bencana menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan total 548 kejadian tercatat pada tahun 2024. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh faktor alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah dan jenis kejadian bencana di Kabupaten Klaten selama periode tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.21
Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	10	6	42	26	15
Tanah longsor	8	12	46	35	8
Angin Kencang	116	73	121	96	297
Kekeringan	1	1	1	1	1
Letusan Gunung api	1	0	0	1	0
Kebakaran	4	8	5	317	226
Gempa Bumi	0	0	1	1	1
Jumlah	140	100	216	477	548

Sumber:BPBD Kab. Klaten, 2024 (Pusdalops, Data Laporan kejadian)

Kejadian bencana juga merugikan bagi pihak yang terdampak dan menjadi korban bencana. Kerugian yang paling dapat dirasakan adalah segi material. Berikut data nilai kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai jenis bencana di Kabupaten Klaten dalam rupiah.

Tabel 2.22
Nilai Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	10.000.000	-	3.840.977.124	-	-
Tanah longsor	10.000.000	-	3.927.977.124	8.583.361.000	88.610.000
Angin Kencang	5.000.000	10.000.000	2.119.302.124	8.583.861.000	609.150.000
Kekeringan	-	-	-	-	-
Letusan Gunung api	-	-	-	-	-
Kebakaran	56.000.000	-	194.400.000	8.562.041.000	338.450.000
Gempa Bumi	-	-	-	75.000.000	20.000.000
Jumlah	81.000.000	10.000.000	10.082.656.372	25.804.263.000	1.056.210.000

Sampai dengan tahun 2024 sudah terdapat 21 Desa Tangguh Bencana yang pembentukannya menggunakan APBD Kabupaten Klaten, APBD Provinsi dan oleh Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berikut data desa tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.23
Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No.	Desa	Kecamatan	Tahun	Sumber Pendanaan
1	Tegalmulyo	Kemalang	2017	APBD Kabupaten
2	Ngandong	Gantiwarno	2018	APBD Kabupaten
3	Sidorejo	Kemalang	2019	APBD Kabupaten
4	Balak	Cawas	2018	APBD Kabupaten
5	Bawak	Cawas	2019	APBD Kabupaten
6	Mlese	Gantiwarno	2019	APBD Provinsi
7	Sengon	Prambanan	2020	UGM
8	Somopuro	Jogonalan	2020	APBD Kabupaten
9	Towangsan	Gantiwarno	2020	APBD Kabupaten
10	Paseban	Bayat	2021	APBD Provinsi
11	Balerante	Kemalang	2021	APBD Kabupaten
12	Kragilan	Jogonalan	2021	APBD Kabupaten
13	Joho	Prambanan	2022	APBD Kabupaten
14	Karanganom	Klaten Utara	2022	APBD Kabupaten
15	Karanglo	Polanharjo	2022	APBD Kabupaten
16	Kupang	Karangdowo	2022	APBD Kabupaten
17	Balerante	Kemlang	2022	APBD Kabupaten
18	Pasung	Wedi	2023	APBD Kabupaten
19	Kalikebo	Trucuk	2023	APBD Kabupaten
20	Demakijo	Karangnongko	2023	APBD Kabupaten
21	Kingkang	Wonosari	2023	APBD Kabupaten

Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024

Salah satu potensi bencana di Kabupaten Klaten adalah erupsi Gunung Merapi, sehingga dibutuhkan jalur evakuasi yang memadai untuk mengamankan warga lereng Merapi saat terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Saat ini, Kabupaten Klaten memiliki jalur evakuasi sepanjang 63,81 km yang mengarah ke tiga Tempat Evakuasi Akhir (TEA), yaitu di Kebondalem Lor (Prambanan), Malangjiwan (Kebonarum) dan Demakijo (Karangnongko). Mengingat status Gunung Merapi yang masih aktif, perbaikan dan penanganan jalur evakuasi menjadi prioritas, namun memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui skema DAK infrastruktur dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi. Beberapa ruas jalur evakuasi yang telah dibangun masih membutuhkan penambahan sarana keselamatan jalan, seperti marka, lampu penerangan jalan (PJU), cermin cekung dan guardrail. Data rinci terkait kondisi dan sebaran kerusakan jalur evakuasi tersedia per ruas jalan.

Tabel 2.24
Kondisi Jalur Evakuasi Merapi Berdasarkan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2024

Nama Ruas	Kondisi jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Dengok-Nangsri	3,7	0,20	-	-
Kepurun-Panggang	-	1,98	1,60	-
Manisrenggo-Genengsari	2,63	-	-	-
Nangsri-Tanjungsari	1,55	-	-	-
Ngemplakseneng-Batas DIY	1,83	-	-	-
Genengsari-Ngemplakseneng	1,70	-	-	-
Panggang-Balerante	1,90	0,20	1,79	-
Dompol-Kaliwuluh	1,15	-	2,00	-
Dompol-Kendalsari	-	0,06	0,80	0,80
Kaliwuluh-Deles	4,74	0,01	-	-
Mipitan-Pasar Kembang	1,49	-	-	-
Pasar Kembang-Dompol	3,73	-	-	-
Gemampir-Jiwan	3,09	-	-	-
Gorosan-Gemampir	0,86	-	-	-
Karangnongko-Gorosan	0,65	0,80	-	-
Surowono-Tegalmulyo	6,62	-	-	-
Pasar Kembang-Kadilaju	-	0,26	0,71	-
Manisrenggo-Kadilaju	2,50	3,11	-	-
Sendanglebak-Puluhwatu	0,82	-	-	-
Basin-Mipitan	4,29		-	-
Mipitan-Kadilaju	2,02	0,06	-	-
Karangnongko-Sendanglebak	0,93	0,15	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan berbagai upaya penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, antara lain:

- Pemasangan Early Warning System (EWS) berupa CCTV pemantau aliran sungai pada dua titik strategis, yaitu di Jembatan Kragilan, Kecamatan Gantiwarno dan Jembatan Talang, Kecamatan Bayat;
- CCTV pemantau aktivitas Gunung Merapi yang terpasang di Posko Induk Relawan 907, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, dimana asilitas ini merupakan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah;
- Alat pemantau lahar dingin yang berada di kompleks Kantor BPBD Kabupaten Klaten, sebagai bagian dari aset kerja sama antara JICA Jepang dan Kementerian PUPR;

- Pembangunan dan penandaan jalur-jalur evakuasi di kawasan rawan bencana;
- Telah terbentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di wilayah dengan tingkat rawan bencana yang tinggi yaitu di Kecamatan Kemalang dan Gantiwarno sebanyak 60 sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kebencanaan secara masif kepada masyarakat di wilayah rawan bencana;
- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan mitigasi bencana, pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta optimalisasi kinerja Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana);
- Penguatan jejaring kelembagaan dengan melibatkan instansi pemerintah, sektor swasta dan unsur relawan kebencanaan guna memperkuat koordinasi dan respons cepat saat terjadi bencana.

Penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Klaten masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian. Tingginya angka kejadian kebakaran serta belum optimalnya pemenuhan waktu tanggap oleh petugas pemadam kebakaran menjadi permasalahan utama. Saat ini, Kabupaten Klaten hanya memiliki satu kantor pelayanan pemadam kebakaran yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah, khususnya area yang berjarak cukup jauh.

Pada tahun 2024, terdapat 300 wilayah di Kabupaten Klaten yang tergolong sebagai daerah rawan kebakaran berdasarkan angka kejadian yang tercatat. Penanganan bencana kebakaran masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius. Tingginya frekuensi kebakaran dan belum optimalnya waktu tanggap petugas menjadi permasalahan utama. Saat ini, Kabupaten Klaten hanya memiliki satu kantor pemadam kebakaran, yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah yang cukup jauh. Penambahan pos pemadam kebakaran diharapkan dapat memperluas cakupan layanan dan mempercepat respons penanganan. Namun, keterbatasan jumlah pos, kurangnya tenaga personel, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kapasitas layanan ke depan.

Tabel 2.25
Daerah Rawan Kebakaran Berdasar Angka Kejadian Kebakaran
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ceper	15	13	13	68	31
2	Klaten Utara	17	13	15	43	37
3	Trucuk	11	14	8	32	12

No	Kecamatan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Pedan	9	7	4	28	21
5	Wonosari	4	6	3	25	13
6	Klaten Selatan	6	5	5	22	27
7	Jogonalan	5	6	7	20	14
8	Delanggu	4	4	6	20	16
9	Ngawen	5	4	4	17	15
10	Klaten Tengah	5	14	9	15	13
11	Juwiring	24	22	10	15	13
12	Bayat	0	5	3	15	7
13	Kalikotes	5	3	5	11	5
14	Prambanan	2	3	3	11	6
15	Jatinom	2	1	0	10	11
16	Tulung	2	0	1	10	6
17	Cawas	4	2	2	10	5
18	Wedi	3	4	3	10	10
19	Karanganom	3	6	1	9	11
20	Karangdowo	4	0	2	7	5
21	Polanharjo	1	2	2	7	4
22	Gantiwarno	3	1	0	4	8
23	Kebonarum	3	3	1	3	5
24	Karangnongko	0	0	0	3	1
25	Manisrenggo	2	3	2	1	4
26	Kemalang	1	3	0	1	0
	JUMLAH	**140**	**144**	**109**	**417**	**300**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Klaten, 2025

Angka kejadian kebakaran di lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, dengan kenaikan angka kejadian yang cukup signifikan di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena musim kemarau panjang dan peningkat suhu permukaan (El Nino) berdampak pada kekeringan parah disertai dengan potensi peningkatan kebakaran yang mana kejadian kebakaran di tahun 2023 sebagian besar adalah kebakaran hutan/ lahan.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 63,00%, menurun sebesar 60,83% pada 2021, kemudian meningkat menjadi 67,00% pada tahun 2022, namun pada 2023 kembai menurun menjadi 57,20%, sebelum akhirnya naik signifikasn menjadi 83,335 ditahun 2024. Sementara itu, waktu rata-rata tanggap penanganan kebakaran sempat mencapai 22,89 menit, namun terus mengalami perbaikan hingga tahun 2024. Data ini mencerminkan adanya peningkatan layanan, meskipun masih diperlukan upaya untuk menjaga kestabilan kinerja respon di seluruh wilayah.

Selengkapnya data tanggap bencana (kebakaran) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	63,00	60,83	67	57,20	83,33
Waktu tanggap (response Time) penangganan kebakaran	menit	14,9	13,6	22,56	22,89	15,97

Sumber :Satpol PP Kab. Klaten, 2025

Realisasi pencapaian SPM ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2020-2024 capaiannya sudah 100%. Indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada pada tahun 2020 tercatat 92%, meningkat menjadi 100% di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Terkait dengan capaian indikator SPM kebencanaan, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2024 sudah tercapai 100%. Capaian indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana masing-masing sudah mencapai 100% di tahun 2024. Berikut realisasi capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban umum sebagai berikut.

Tabel 2.27
Realisasi Capaian SPM Uruan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	92	100	100	100	100

No	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100

Sumber :Satpol PP dan BPBD Kab Klaten, 2025

2.2.7. Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.302.648 jiwa, terdiri dari 647.853 laki-laki dan 654.795 perempuan. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023-2024 sebesar 0,46%, sedikit menurun dibandingkan laju 2022–2023 yang sebesar 0,32%.

Persebaran penduduk cenderung merata di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Trucuk (80.923 jiwa), disusul Ceper (65.918 jiwa), sedangkan yang terendah adalah Kebonarum (19.973 jiwa). Kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Klaten pada 2024 adalah .857 jiwa/km^2. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Klaten Utara (4.392 jiwa/km^2), disusul Klaten Tengah (4.355 jiwa/km^2) dan Klaten Selatan (3.009 jiwa/km^2). Kepadatan terendah tercatat di Kemalang (675 jiwa/km^2).

Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Klaten terus meningkat secara bertahap, dengan distribusi penduduk yang relatif merata antar kecamatan. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu diimbangi dengan perencanaan tata ruang, infrastruktur dan pelayanan publik yang tepat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi. Sebaran jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)						Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)					Luas wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
1	Prambanan	52.824	54.667	51.499	52.068	52.712	53.155	3,49	-5,80	1,10	1,24	0,84	26,09	2.037
2	Gantiwarno	40.696	44.262	38.620	38.875	39.091	39.194	8,76	-12,75	0,66	0,56	0,26	26,44	1.482
3	Wedi	54.507	57.338	52.068	52.355	52.716	52.878	5,19	-9,19	0,55	0,69	0,31	26,26	2.014
4	Bayat	65.649	69.554	63.541	64.083	64.374	64.539	5,95	-8,65	0,85	0,45	0,26	42,10	1.533
5	Cawas	60.690	62.222	57.569	57.990	58.339	58.471	2,52	-7,48	0,73	0,60	0,23	35,94	1.627
6	Trucuk	81.715	82.901	79.064	79.933	80.568	80.923	1,45	-4,63	1,10	0,79	0,44	34,69	2.333
7	Kebonarum	20.935	21.467	19.835	19.868	19.911	19.973	2,54	-7,60	0,17	0,22	0,31	10,42	1.917
8	Jogonalan	61.237	63.848	58.869	59.487	59.893	60.168	4,26	-7,80	1,05	0,68	0,46	27,59	2.181
9	Manisrenggo	44.373	45.378	43.018	43.566	43.910	44.249	2,26	-5,20	1,27	0,79	0,77	30,60	1.446
10	Karangnongko	38.096	39.087	36.873	37.125	37.420	37.649	2,60	-5,66	0,68	0,79	0,61	29,49	1.277
11	Ceper	67.619	70.048	65.048	65.369	65.918	66.205	3,59	-7,14	0,49	0,84	0,44	25,77	2.569
12	Pedan	48.990	50.421	46.907	47.210	47.586	47.803	2,92	-6,97	0,65	0,80	0,46	20,00	2.390
13	Karangdowo	45.256	47.089	43.486	43.639	43.873	43.950	4,05	-7,65	0,35	0,54	0,18	30,83	1.426
14	Juwiring	61.155	60.339	58.354	58.784	59.198	59.375	-1,33	-3,29	0,74	0,70	0,30	30,90	1.922
15	Wonosari	64.770	62.900	62.816	63.370	64.063	64.387	-2,89	-0,13	0,88	1,09	0,51	33,38	1.929
16	Delanggu	43.661	42.267	42.129	42.342	42.560	42.605	-3,19	-0,33	0,51	0,51	0,11	20,03	2.127
17	Polanharjo	42.969	41.146	41.009	41.194	41.371	41.435	-4,24	-0,33	0,45	0,43	0,15	25,22	1.643
18	Karanganom	47.602	46.270	46.304	46.725	47.179	47.453	-2,80	0,07	0,91	0,97	0,58	25,62	1.852
19	Tulung	55.419	53.634	53.834	54.430	54.856	55.157	-3,22	0,37	1,11	0,78	0,55	34,44	1.602
20	Jatinom	62.312	60.171	60.296	60.752	61.526	62.064	-3,44	0,21	0,76	1,27	0,87	37,11	1.672
21	Kemalang	40.064	39.299	39.479	39.907	40.372	40.656	-1,91	0,46	1,08	1,17	0,70	60,19	675
22	Ngawen	47.368	45.860	45.853	46.144	46.325	46.330	-3,18	-0,02	0,63	0,39	0,01	18,45	2.511

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)						Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)					Luas wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
23	Kalikotes	38.116	37.083	37.069	37.307	37.609	37.807	-2,71	-0,04	0,64	0,81	0,53	14,11	2.679
24	Klaten utara	49.265	48.023	47.928	48.379	48.903	49.060	-2,52	-0,20	0,94	1,08	0,32	11,17	4.392
25	Klaten tengah	42.634	41.620	41.146	41.238	41.557	41.763	-2,38	-1,14	0,22	0,77	0,50	9,59	4.355
26	Klaten selatan	45.687	43.908	43.921	44.571	44.862	45.399	-3,89	0,03	1,48	0,65	1,20	15,09	3.009
Jumlah		**1.323.609**	**1.330.802**	**1.276.535**	**1.286.711**	**1.296.692**	**1.302.648**	**0,54**	**-4,08**	**0,80**	**0,78**	**0,46**	**701,52**	**1.857**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, *Data DKB Semester II Tahun 2024*

a. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Klaten tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 647.853 jiwa penduduk laki-laki dan 654.795 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan kelompok umur penduduk terbanyak di Kabupaten Klaten tahun 2024 terdapat pada kategori usia 40-44 tahun dengan jumlah penduduk tertinggi sebesar 99.960 jiwa sedangkan untuk kategori usia 70-74 tahun merupakan jumlah penduduk terendah sebesar 38.629 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk diketahui bahwa penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 895.092 jiwa sedangkan untuk usia non produktif sebesar 407.556 jiwa.

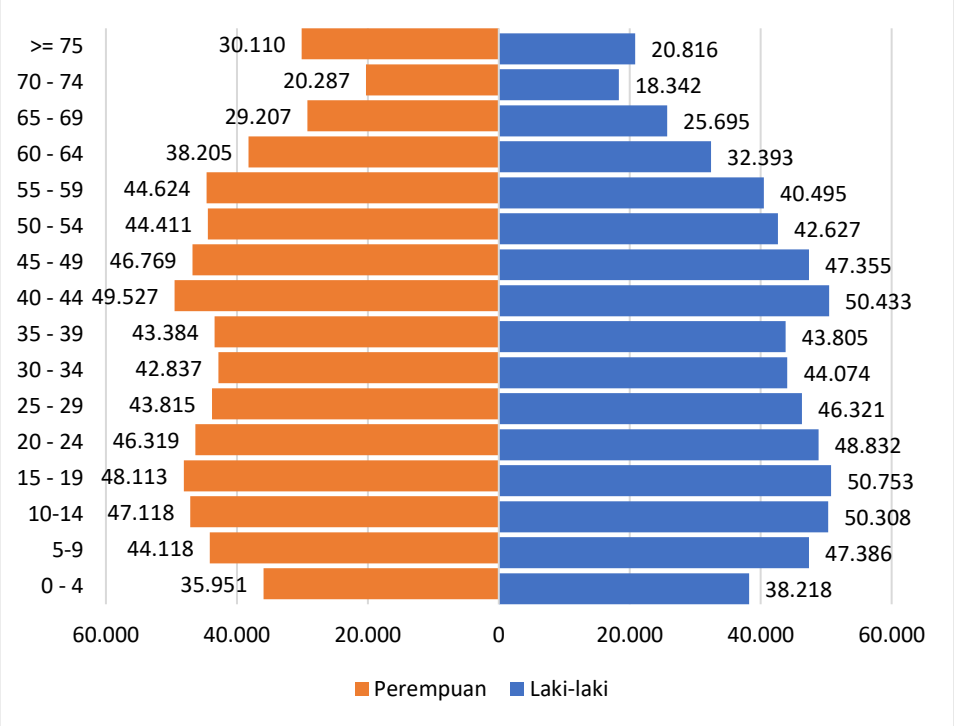
Tabel 2.29
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4	38.218	35.951	74.169
2	5 - 9	47.386	44.118	91.504
3	10 - 14	50.308	47.118	97.426
4	15 - 19	50.753	48.113	98.866
5	20 - 24	48.832	46.319	95.151
6	25 - 29	46.321	43.815	90.136
7	30 - 34	44.074	42.837	86.911
8	35 - 39	43.805	43.384	87.189
9	40 - 44	50.433	49.527	99.960
10	45 - 49	47.355	46.769	94.124
11	50 - 54	42.627	44.411	87.038
12	55 - 59	40.495	44.624	85.119
13	60 - 64	32.393	38.205	70.598
14	65 - 69	25.695	29.207	54.902
15	70 - 74	18.342	20.287	38.629
16	>= 75	20.816	30.110	50.926
Jumlah		**647.853**	**654.795**	**1.302.648**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
** Data DKB Semester II Tahun 2024*

Piramida penduduk Kabupaten Klaten membentuk piramida stasioner/ granat, dengan bentuk piramida yang cenderung mengerucut di bagian bawah dan bagian atas dapat diartikan jumlah penduduk Kabupaten Klaten memperlihatkan keseimbangan antara jumlah kelahiran dan kematian penduduk. Piramida ini juga dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil serta jumlah penduduk usia produktif yang lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun ke atas) jumlahnya mendominasi dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia nonproduktif (0-14 dan >65 tahun). Berdasarkan data tersebut Rasio Beban Tanggungan (RBT) berada

di angka 45,61% hal ini dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif.

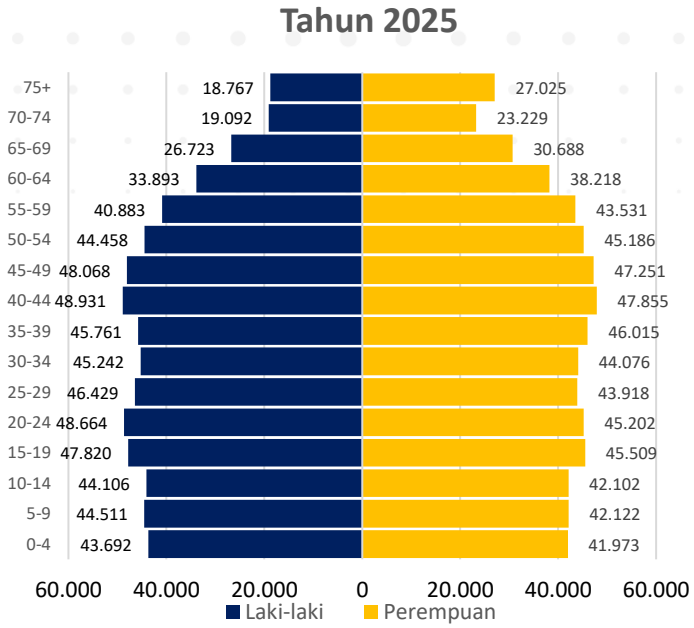


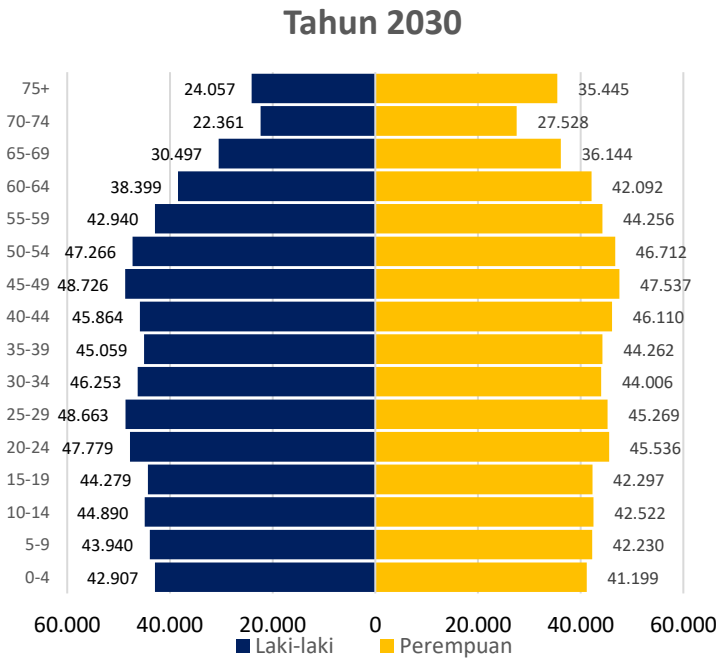
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
** Data DKB Semester II Tahun 2024*

Gambar 2.20 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, yang secara langsung menuntut ketersediaan fasilitas publik dan lapangan kerja yang memadai demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2025 akan mencapai 1.300.940 jiwa, pada tahun 2030 akan meningkat menjadi 1.337.025 jiwa. Pada Tahun 2035 menjadi 1.365.182 jiwa, pada tahun 2040 menjadi 1.384.283 jiwa, pada Tahun 2045 menjadi 1.394.162 jiwa.

Dari sisi struktur umur, kelompok usia tidak produktif muda (0–14 tahun) menunjukkan tren menurun, sementara kelompok usia tidak produktif tua (65 tahun ke atas) justru meningkat. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten yang cenderung meningkat, disertai dengan pergeseran struktur umur ke arah populasi lansia, menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi jangka panjang terkait penyediaan layanan publik, jaminan sosial, fasilitas kesehatan lansia, serta penciptaan lapangan kerja untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.





Sumber: Hasil Analisis,, 2025

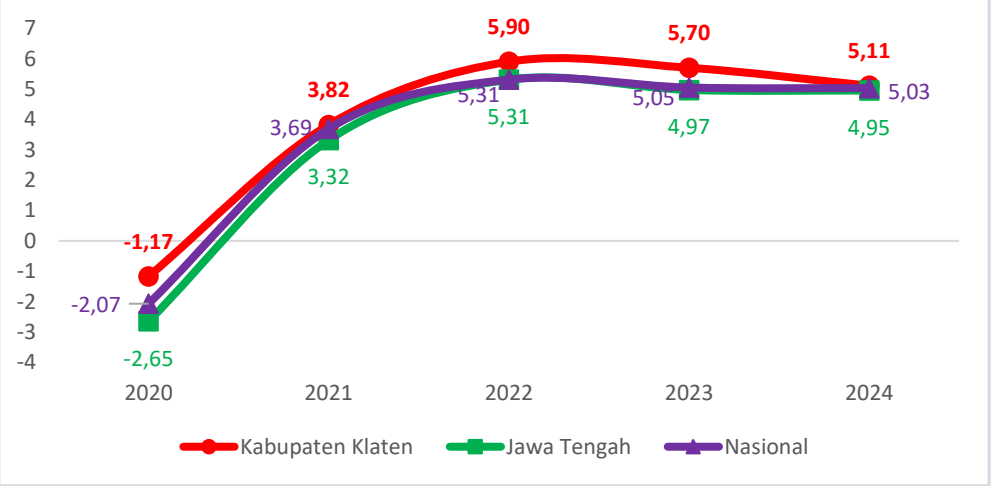
Gambar 2.21 Proyeksi Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mengalami kontraksi sebesar -1,17% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun, kondisi mulai membaik pada 2021 dengan pertumbuhan 3,82% dan meningkat signifikan pada tahun 2022 mencapai 5,90%. Pada tahun 2023, pertumbuhan menurun menjadi 5,70% dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 5,11%, disebabkan oleh tidak optimalnya proyeksi sebagian besar sektor ekonomi. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Klaten tetap relatif stabil dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

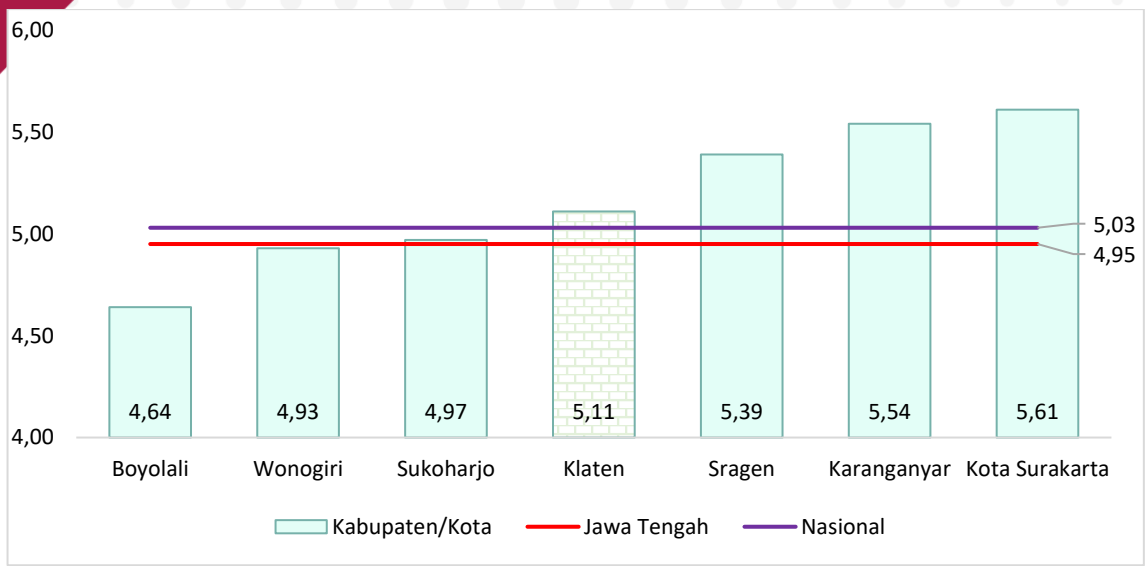
Meskipun sempat mengalami kontraksi akibat pandemi, perekonomian Kabupaten Klaten menunjukkan tren pemulihan yang cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya strategi penguatan sektor-sektor produktif agar pertumbuhan dapat kembali meningkat secara berkelanjutan. Posisi pertumbuhan yang tetap berada di atas rata-rata provinsi dan nasional mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.22 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota disekitarnya berada di peringkat keempat, Pada posisi pertama Kota Surakarta sebesar 5,61%, kemudian diikuti Kabupaten Karanganyar sebesar 5,54% dan ketiga Kabupaten Sragen sebesar 5,39%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Nasional sebesar 4,95% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,03%. Data selengkapnya dapat dilihat sebagaimana pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.23 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota sekitarnya Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,11%, didorong oleh kontribusi berbagai sektor usaha. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi pasca pandemi, yang didukung oleh kontribusi signifikan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, konstruksi, kesehatan, serta informasi dan komunikasi. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,94%), diikuti Jasa Perusahaan (8,57%), Konstruksi (8,2%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,85%), serta Informasi dan Komunikasi (7,71%). Peningkatan ini turut dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha di sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta konstruksi, yang didorong oleh pembangunan jalan tol dan pengembangan sektor jasa lainnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan tumbuhnya sektor jasa menjadi pendorong utama peningkatan tersebut. Dengan tren ini, Kabupaten Klaten memiliki potensi untuk terus meningkatkan daya saing ekonomi dan memperluas lapangan kerja jika pertumbuhan sektor-sektor unggulan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Tabel 2.30
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2,12	1,14	1,61	1,21	-0,37
Pertambangan dan Penggalian	-0,26	4,62	1,04	2,72	4,76
Industri Pengolahan	-1,2	3,68	3,91	5,85	5,37
Pengadaan Listrik dan Gas	4,51	7,56	4,31	5,86	4,33

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,99	6,57	0,88	2,01	3,39
Konstruksi	-1,96	8,9	16,7	18,27	8,2
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,79	5,65	4,03	3,68	3,63
Transportasi dan Pergudangan	-28,35	2,13	79,27	4,97	6,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,03	8,81	14,94	9,05	8,94
Informasi dan Komunikasi	17,84	5,43	2,36	6,66	7,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,51	1,99	1,05	0,98	1,17
Real Estate	-0,24	2,19	4,6	6,49	5,04
Jasa Perusahaan	-7,04	3,22	5,07	5,2	8,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,26	-1,32	1,04	4,6	7,15
Jasa Pendidikan	-0,18	0,12	1,84	4,78	7,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,34	0,33	2,14	4,84	7,85
Jasa lainnya	-5,56	0,66	11,24	4,82	6,53
PDRB	-1,17	3,82	5,9	5,7	5,11

**Angka Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Kabupaten Klaten memiliki struktur ekonomi yang bervariasi dimana berbagai sektor telah menyumbangkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten. Pada tahun 2024, sektor dengan nilai PDRB ADHB tertinggi yaitu sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 21.301,06 miliar rupiah. Di posisi kedua, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni sebesar 8.048,51 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menghasilkan PDRB sebesar 5.172,93 miliar rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.365,91	4.419,24	4.700,66	5.038,47	5.172,93
Pertambangan dan Penggalian	1.253,65	1.326,27	1.380,56	1.458,48	1.535,54
Industri Pengolahan	14.934,78	15.944,98	17.399,29	19.447,07	21.301,06
Pengadaan Listrik dan Gas	61,15	65,39	68,55	72,97	76,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,01	18,37	18,79	19,40	21,25
Konstruksi	2.515,48	2.850,69	3.550,39	4.328,49	4.714,10
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.145,08	6.575,70	7.113,42	7.617,04	8.048,51
Transportasi dan Pergudangan	576,29	604,75	1.146,86	1.317,90	1.432,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.351,40	1.495,96	1.751,76	1.926,08	2.142,33
Informasi dan Komunikasi	1.674,71	1.766,20	1.812,74	1.936,25	2.101,89

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.366,58	1.461,02	1.608,10	1.661,74	1.688,84
Real Estate	510,80	528,37	563,55	605,73	639,35
Jasa Perusahaan	135,86	141,79	155,72	170,34	189,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	910,58	890,53	922,85	984,63	1.078,16
Jasa Pendidikan	2.898,74	2.942,32	3.022,68	3.201,77	3.484,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	550,78	557,97	580,28	622,95	680,87
Jasa lainnya	670,82	681,70	795,42	864,90	942,92
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	**39.939,64**	**42.271,26**	**46.591,61**	**51.274,19**	**55.249,45**

**Angka Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Berdasarkan PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2024 menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010, sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai Rp11.396,48 miliar. Di posisi kedua, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang Rp5.535,51 miliar, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp3.093,04 miliar. Struktur perekonomian Kabupaten Klaten masih sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan, diikuti sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dan perdagangan menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas, daya saing dan keberlanjutan pada sektor-sektor ini perlu menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.32
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

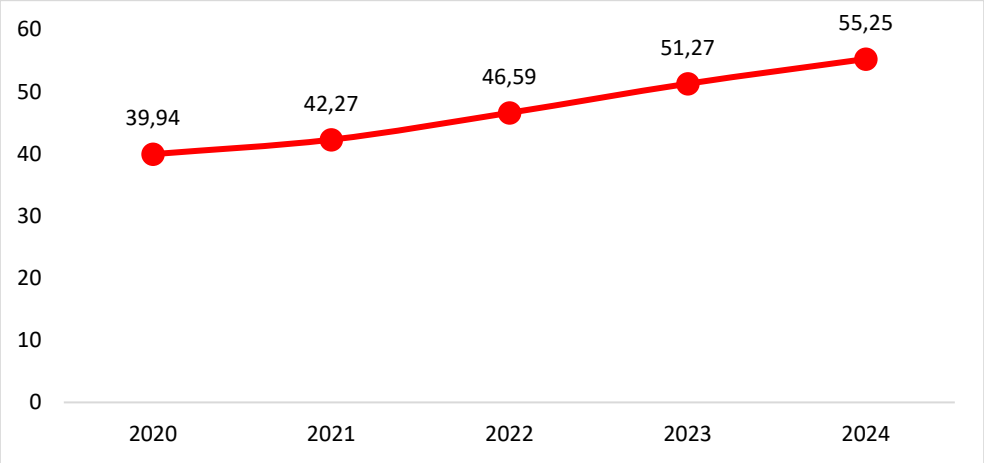
Kategori	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2.985,13	3.019,02	3.067,58	3.104,58	3.093,04
Pertambangan dan Penggalian	705,05	737,59	745,25	765,54	802,00
Industri Pengolahan	9.483,87	9.832,84	10.217,66	10.815,41	11.396,48
Pengadaan Listrik dan Gas	51,88	55,81	58,21	61,62	64,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,74	15,70	15,84	16,16	16,71
Konstruksi	1.708,28	1.860,30	2.170,91	2.567,60	2.778,16
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.687,43	4.952,34	5.152,05	5.341,52	5.535,51
Transportasi dan Pergudangan	470,53	480,54	861,44	904,23	959,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.043,08	1.134,93	1.304,46	1.422,45	1.549,62
Informasi dan Komunikasi	1.511,72	1.593,77	1.631,35	1.740,06	1.874,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	947,45	966,28	976,39	985,99	997,50
Real Estate	419,05	428,22	447,91	476,97	501,00

Kategori	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Jasa Perusahaan	92,40	95,37	100,21	105,42	114,46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	633,38	625,04	631,53	660,60	707,82
Jasa Pendidikan	1.839,36	1.841,65	1.875,51	1.965,18	2.103,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364,38	365,59	373,42	391,50	422,23
Jasa lainnya	522,66	526,12	585,26	613,49	653,57
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	**27.480,36**	**28.531,11**	**30.214,98**	**31.938,33**	**33.568,92**

**Angka Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah adalah PDRB per kapita, yaitu nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dibagi jumlah penduduk. Nilai ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk dan potensi ekonomi daerah, seperti sumber daya alam dan faktor produksi lainnya. Selama periode tahun 2020-2024, PDRB per kapita Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku terus meningkat, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp55,25 juta, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya perbaikan tingkat kemakmuran penduduk di Kabupaten Klaten. Tren ini mencerminkan penguatan produktivitas ekonomi, meskipun tetap perlu diimbangi dengan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat.

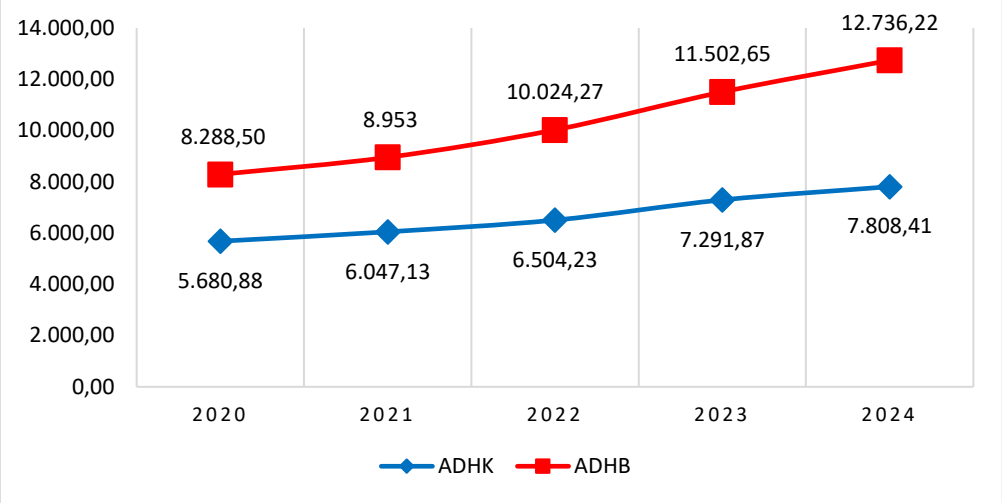


Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.24 PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator penting dalam ekonomi yang mengukur investasi dalam aset tetap. Data PMTB digunakan untuk berbagai keperluan analisis ekonomi, termasuk perhitungan PDB dan pemantauan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan tingkat investasi dalam perekonomian dan dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di masa depan.

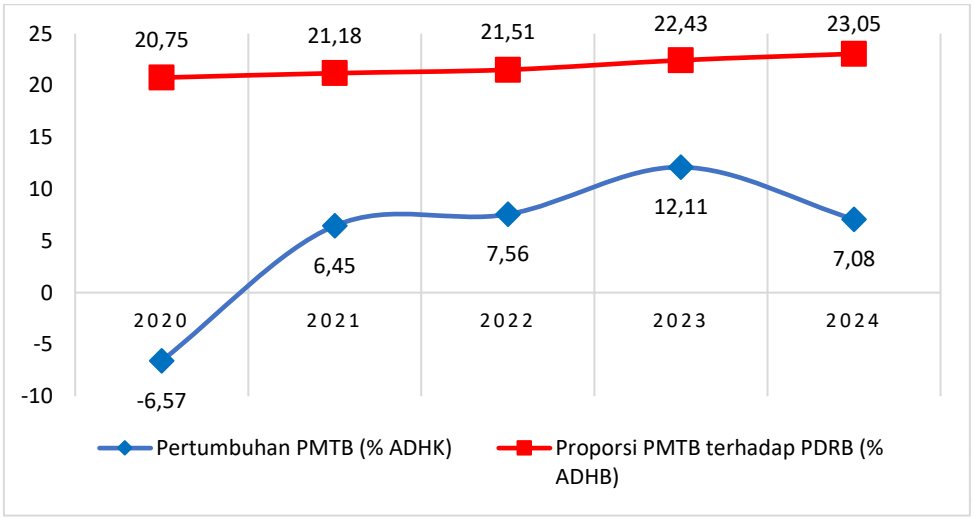
Komponen PMTB terus mengalami kenaikan setelah tahun 2020, baik untuk ADH berlaku maupun ADH konstan 2010. Pada tahun 2020, jumlah total konsumsi PMTB berdasar ADH berlaku sebesar 8.288,50 miliar rupiah naik menjadi 12736,22 miliar rupiah pada tahun 2024. Tidak hanya nilai nominal PMTB yang meningkat, peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Klaten selama kurun waktu 3 tahun terakhir terus meningkat, demikian juga pertumbuhan yang meningkat danmengalami percepatan dari tahun ke tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.25 Perkembangan PMTB Kabupaten Klaten (Miliar)

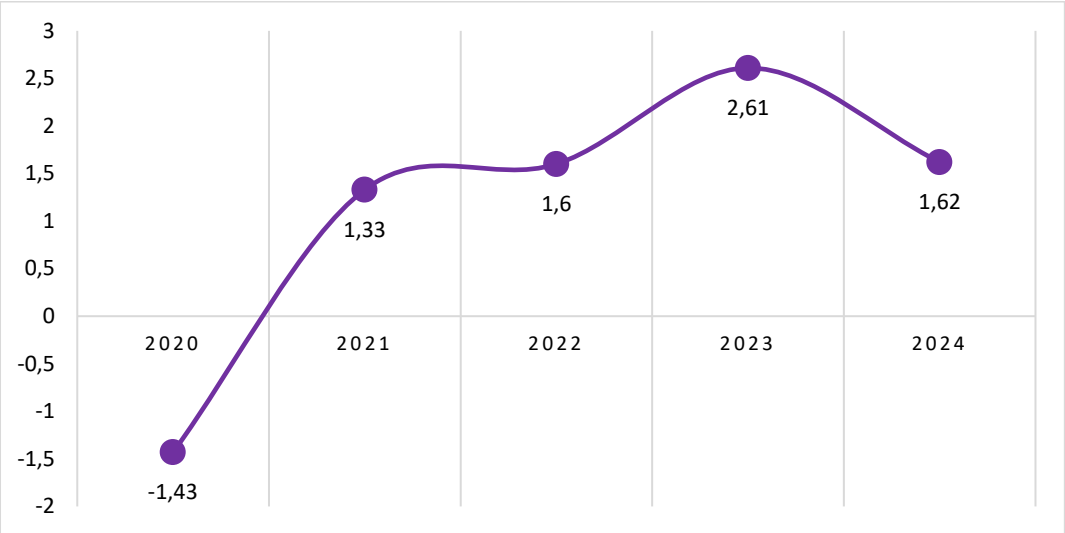
Pada tahun 2023, komponen pengeluaran PMTB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 12,11 persen. Hal ini didorong oleh meningkatnya PMTB Bangunan karena puncak pembangunan jalan tol Surakarta-Yogyakarta yang melalui Kabupaten Klaten, juga meningkatnya pembangunan infrastruktur lainnya di Kabupaten Klaten.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.26 Pertumbuhan PMTB ADHB dan ADHK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Salah satu sumber pertumbuhan terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,62 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dengan kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61 persen. Hal tersebut erat kaitannya dengan proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogja dan pada tahun 2023 sedang memasuki tahap puncak pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten.

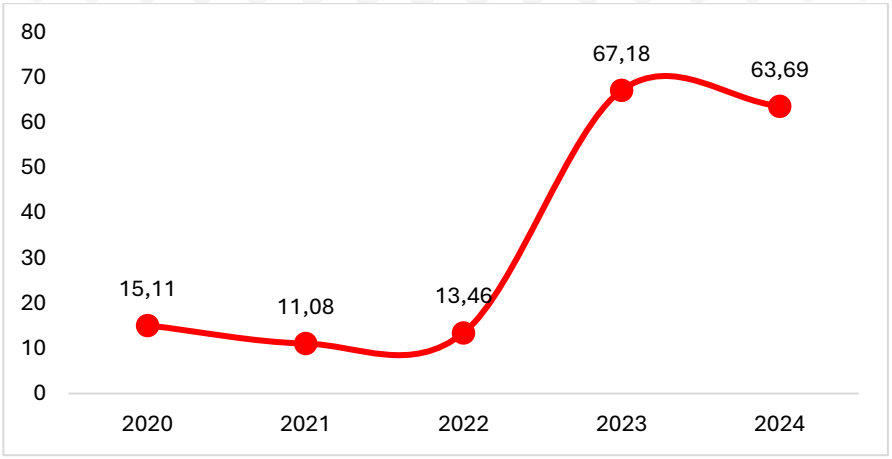


Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.27 Sumber Pertumbuhan PMTB Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Transformasi usaha mikro dari sektor informal ke sektor formal merupakan langkah strategis yang terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi rakyat. Formalisasi usaha mikro tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan, pasar, serta perlindungan hukum. Dengan menjadi usaha formal, pelaku usaha mikro memiliki kesempatan untuk berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

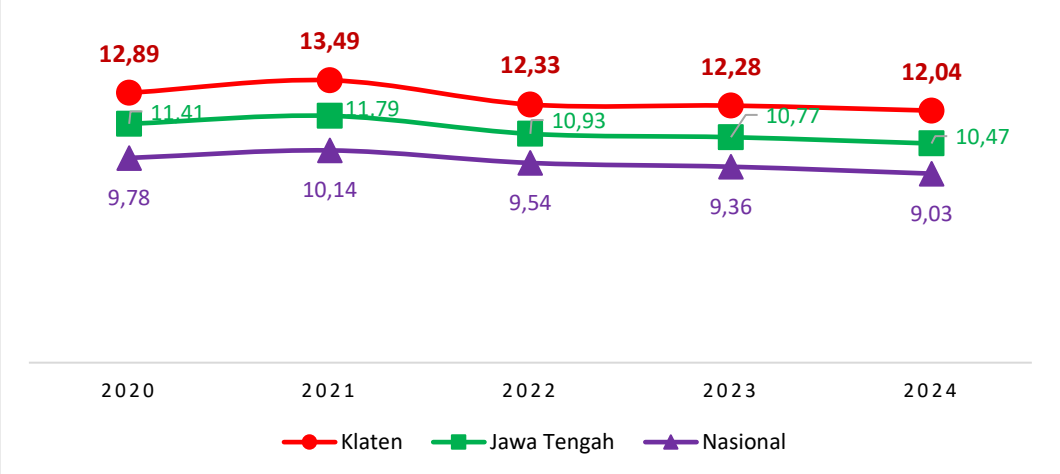
Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, persentase usaha mikro yang berhasil bertransformasi dari informal ke formal menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, capaian sebesar 15,11% dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, hingga capaian paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 67,18%. Meskipun pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 63,69%, secara keseluruhan capaian lima tahunan tetap menunjukkan peningkatan.



Gambar 2.28 Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, namun tidak cukup jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat menyebabkan ketimpangan, di mana masyarakat rentan tidak merasakan manfaatnya. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten tercatat sebesar 12,04%, menurun 0,24% dibandingkan tahun 2023. Meski merupakan capaian positif, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, menunjukkan tantangan dalam mempercepat penurunan kemiskinan secara menyeluruh.

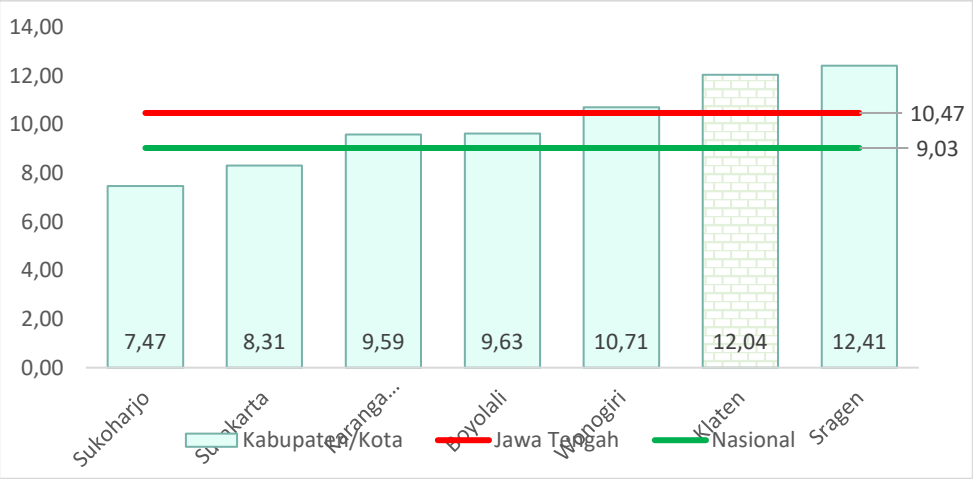
Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten merupakan langkah progresif, namun tantangan masih ada mengingat persentasenya relatif tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusifagar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.29 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

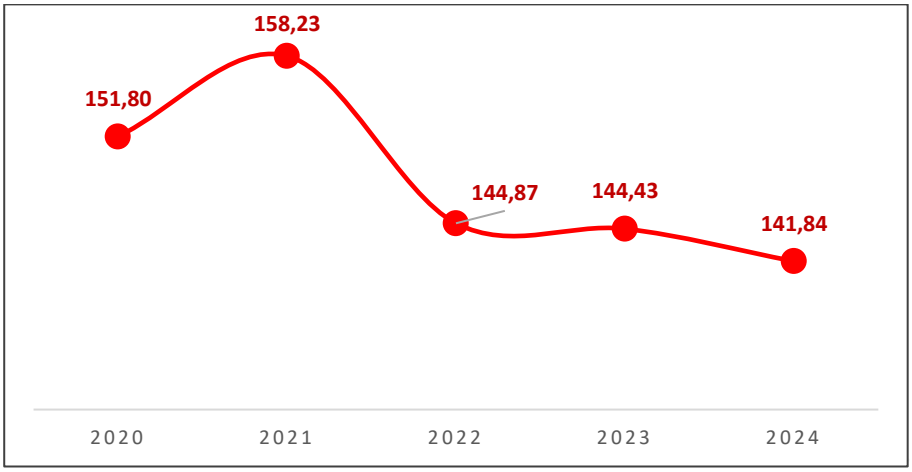
Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya menduduki peringkat ke dua teratas, posisi pertama adalah Kabupaten Sragen sebesar 12,41%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.30 Posisi relatif Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

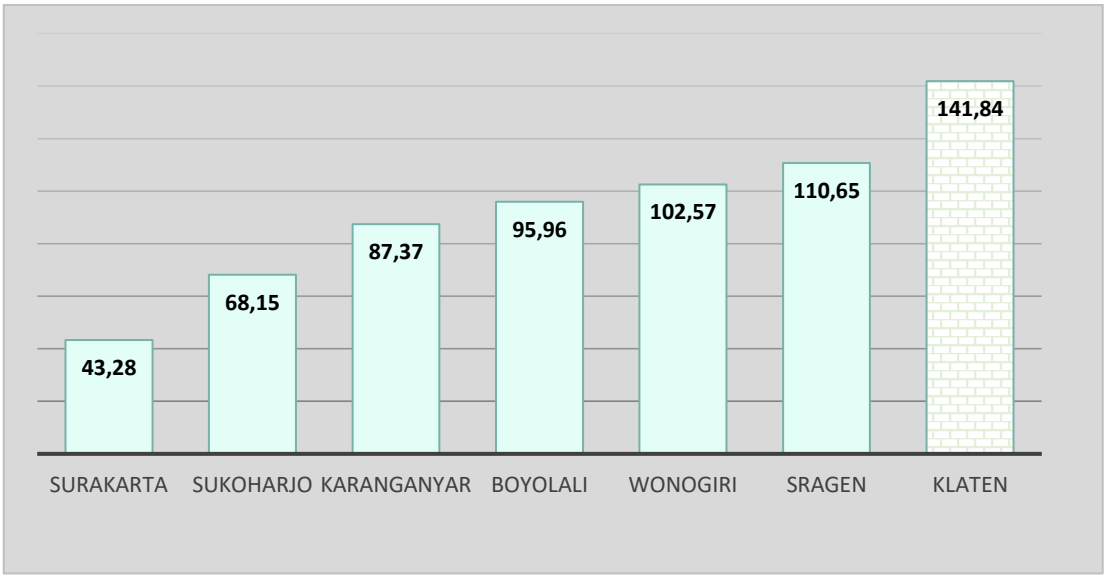
Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Klaten terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 158,23 ribu jiwa. Seiring dengan kondisi perekonomian Kabupaten Klaten yang berangsur membaik, jumlah penduduk miskin semakin berkurang di tahun 2024 menjadi 141,84 ribu jiwa.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah Subosukawonosraten tahun 2024, penduduk miskin Kabupaten Klaten menepati peringkat teratas. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.32 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

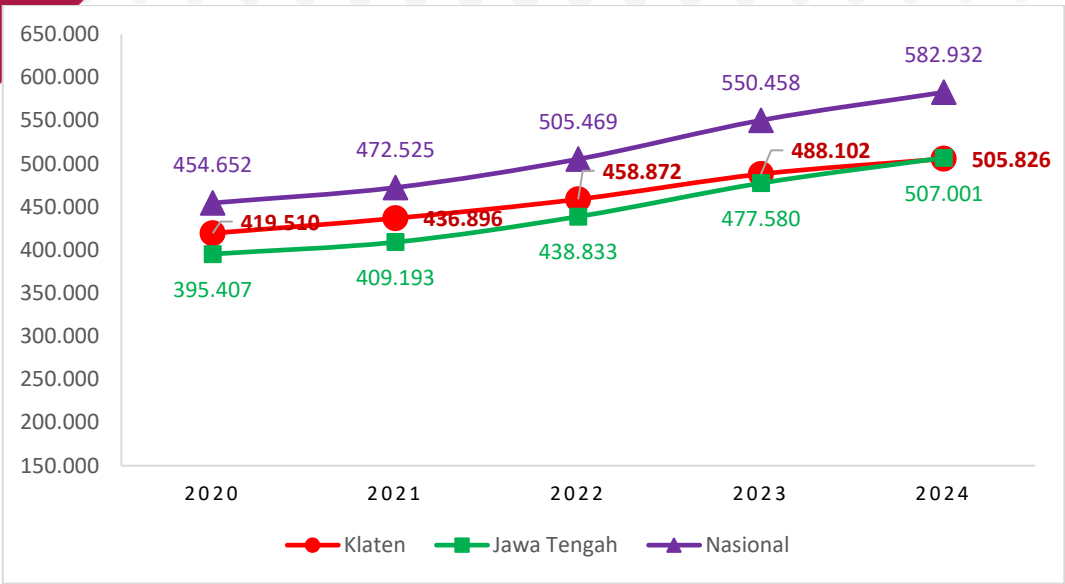
Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Berdasarkan daftar komoditi makanan yang memberi pengaruh besar terhadap kenaikan garis kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2024, baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama, kecuali komoditas roti dan kue basah yang memberikan sumbangan besar di perkotaan namun tidak di perdesaan. Sementara komoditas cabe rawit dan kopi memberikan sumbangan besar di perdesaan namun tidak di perkotaan. Beras masih memberikan sumbangan terbesar yakni sebesar 22,73 persen di perkotaan dan 24,31 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (10,10 persen di perkotaan dan 9,03 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,54 persen di perkotaan dan 3,80 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,34 persen di perkotaan dan 3,92 persen di perdesaan), tempe (2,49 persen di perkotaan dan 2,56 persen di perdesaan) dan seterusnya.

Tabel 2.33
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya Tingkat Provinsi Jawa Tengah periode Maret 2024

No	Komoditi	Kota (%)		Komoditi	Desa (%)
	Makanan	**75,54**		**Makanan**	**75,70**
1.	**Beras**	**22,73**		**Beras**	**24,31**
2.	**Rokok kretek filter**	**10,10**		**Rokok kretek filter**	**9,03**
3.	**Daging ayam ras**	**4,54**		**Telur ayam ras**	**3,92**
4.	Telur ayam ras	4,34		Daging ayam ras	3,80
5.	Tempe	2,49		Tempe	2,56
6.	Gula pasir	2.35		Mie instan	2,30
7.	Mie instan	2,33		Gula pasir	2,29
8.	Roti	2,33		Tahu	2,22
9.	Kue basah	2,08		Cabe rawit	2,17
10.	Tahu	2.06		Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,11
11.	Komoditi makanan lainnya	20,43		Komoditi makanan lainnya	20,99
	Bukan Makanan	**24,46**		**Bukan Makanan**	**24,30**
1.	**Perumahan**	**7,03**		**Perumahan**	**8,04**
2.	**Bensin**	**4,43**		**Bensin**	**4,17**
3.	**Listrik**	**2.62**		**Listrik**	**1,73**
4.	Pendidikan	1,85		Pendidikan	1,23
5.	Perlengkapan mandi	1,19		Perlengkapan mandi	1,14
6.	Kesehatan	0.82		Kesehatan	0,97
7.	Pajak kendaraan bermotor	0,61		Sabun cuci	0,76
8.	Pengeluaran bukan makanan lainnya	5,91		Pengeluaran bukan makanan lainnya	6,26

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

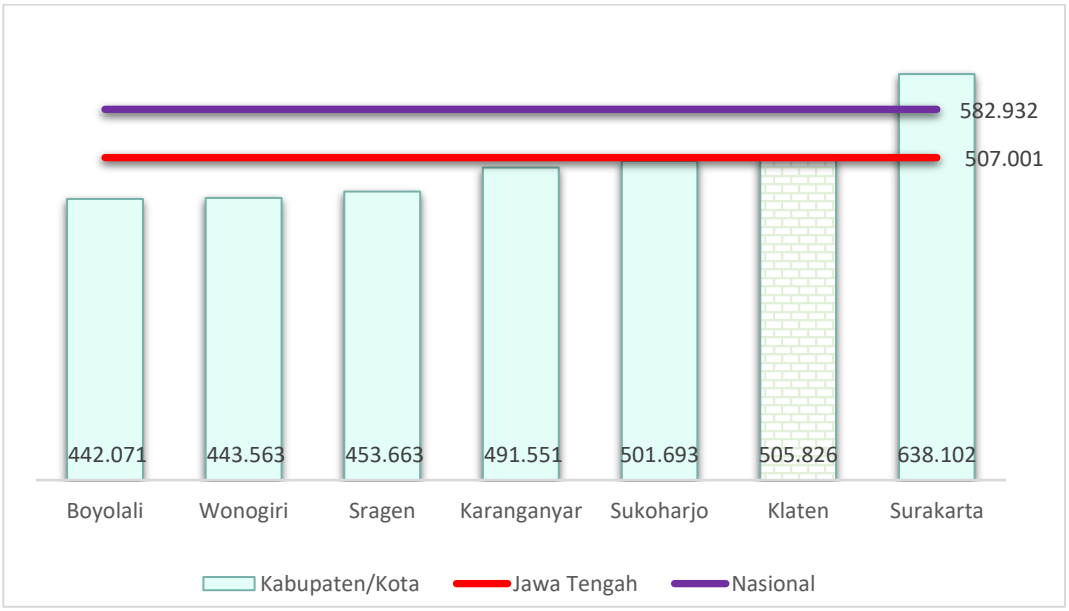
Garis Kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya biaya hidup minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Pada tahun 2024, GK mencapai Rp505.826 per kapita per bulan, naik 3,63% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tetapi juga oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemaknaan praktis dari GK ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan 4 anggota perlu memiliki pengeluaran minimal Rp2.023.304 per bulan agar tidak tergolong miskin. Fakta ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta penyusunan upah minimum yang relevan dengan kebutuhan dasar penduduk.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.33 Perkembangan Garis kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

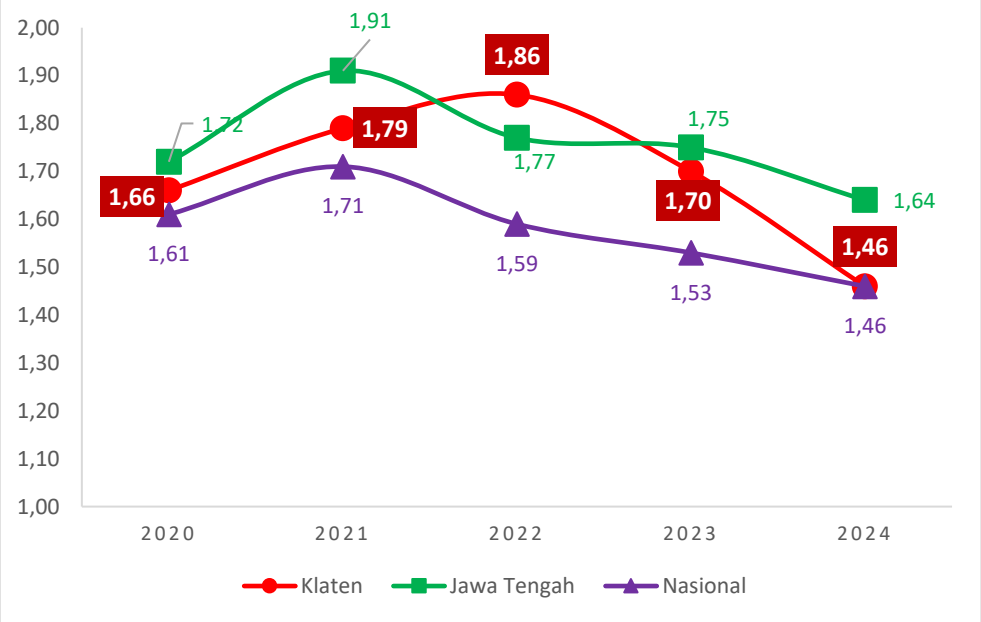
Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya berada di peringkat tinggi ke dua, pada peringkat pertama Kota Surakarta sebesar Rp. 638.102,-/ kapita/ bulan. Namun demikian garis kemiskinan Kabupaten Klaten berada di bawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.34 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024

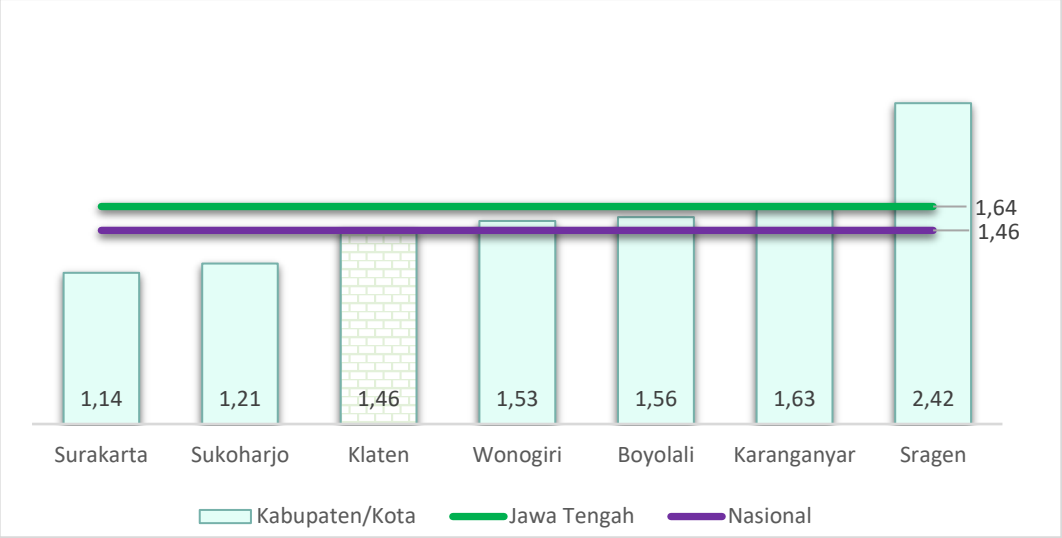
Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2023 tercatat sebesar 1,70 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 1,46, dengan demikian terjadi penurunan sebesar 0,24 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2024 semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

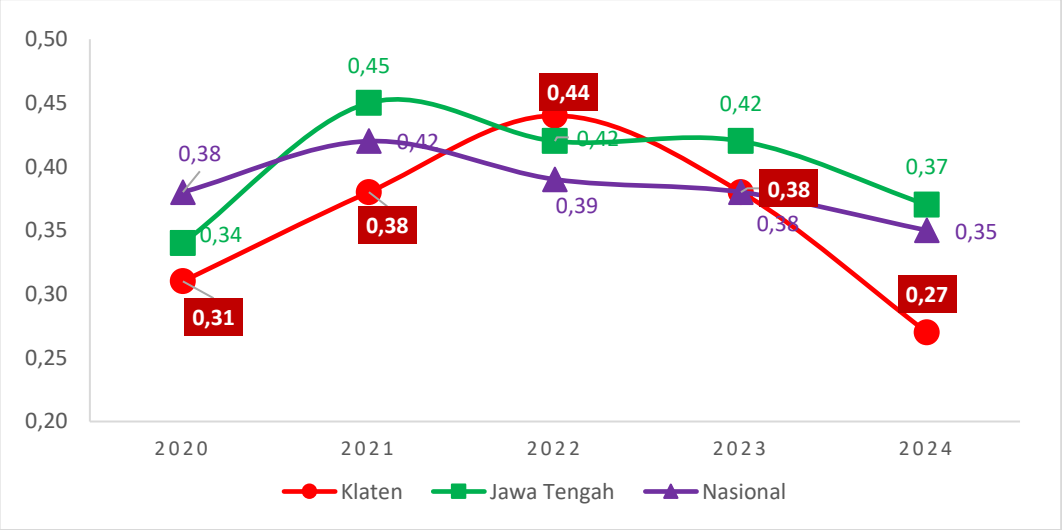
Berdasarkan posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, Kabupaten Klaten berada di peringkat kelima. Peringkat pertama di tempati oleh Kabupaten Sragen sebesar 2,42, diikuti oleh Kabupaten Karanganyar sebesar 1,62, Kabupaten Boyolali sebesar 1,54 dan Kabupaten Wonogiri di peringkat keempat sebesar 1,53. Selain itu, Kabupaten Klaten juga berada di bawah rata-rata P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.36 Posisi Relatif Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024

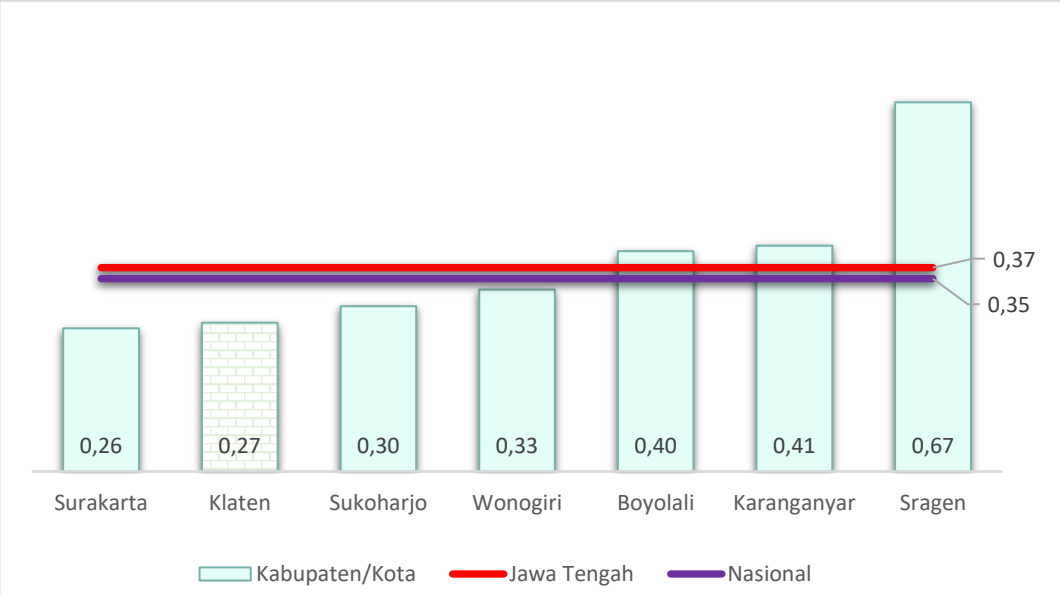
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari 0,38 pada tahun 2023 menjadi 0,27 pada tahun 2024. Penurunan P2 di Kabupaten Klaten mencerminkan kesenjangan penduduk miskin semakin berkurang. Penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, karena upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih fokus dan tidak memerlukan pendekatan yang terlalu beragam.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.37 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

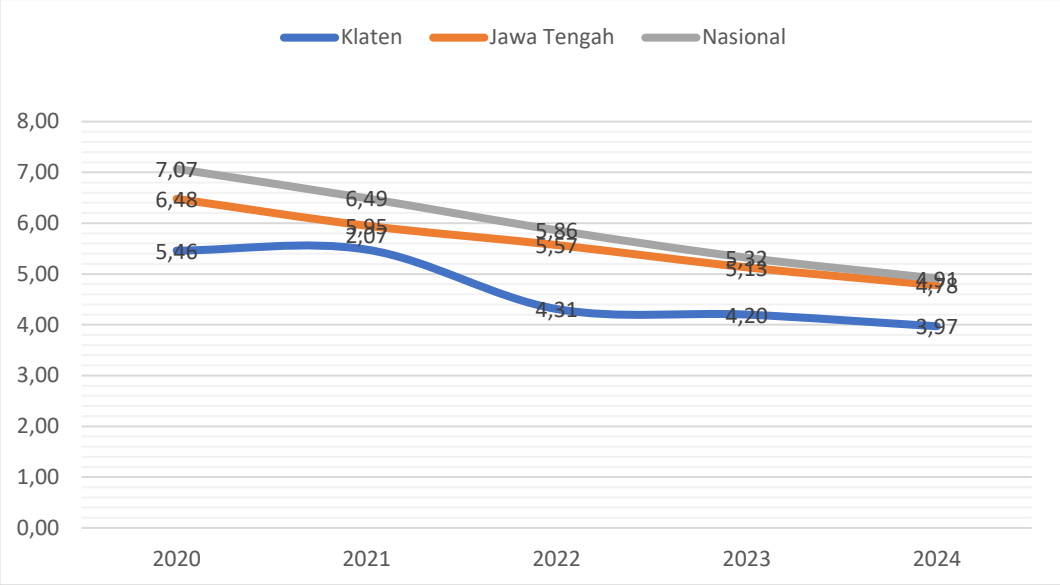
Berdasarkan posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, Kabupaten Klaten berada peringkat rendah kedua, peringkat terendah ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 0,26. Selain itu Kabupaten Klaten juga berada di bawah rata-rata P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

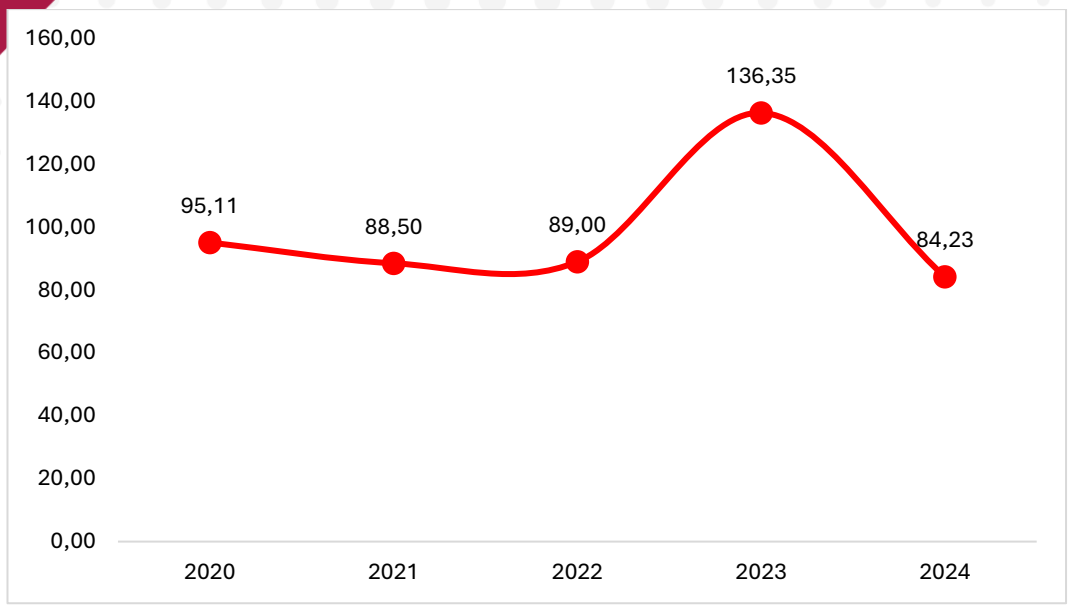
Gambar 2.38 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2024

Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Klaten menunjukkan tren penurunan dari 5,46 persen pada tahun 2020 menjadi 3,97 persen pada tahun 2024 dan secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Penurunan yang signifikan terjadi pada periode 2021–2022, meskipun laju penurunannya cenderung melambat pada tahun-tahun berikutnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, namun diperlukan langkah berkelanjutan dan terukur agar target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai sasaran.



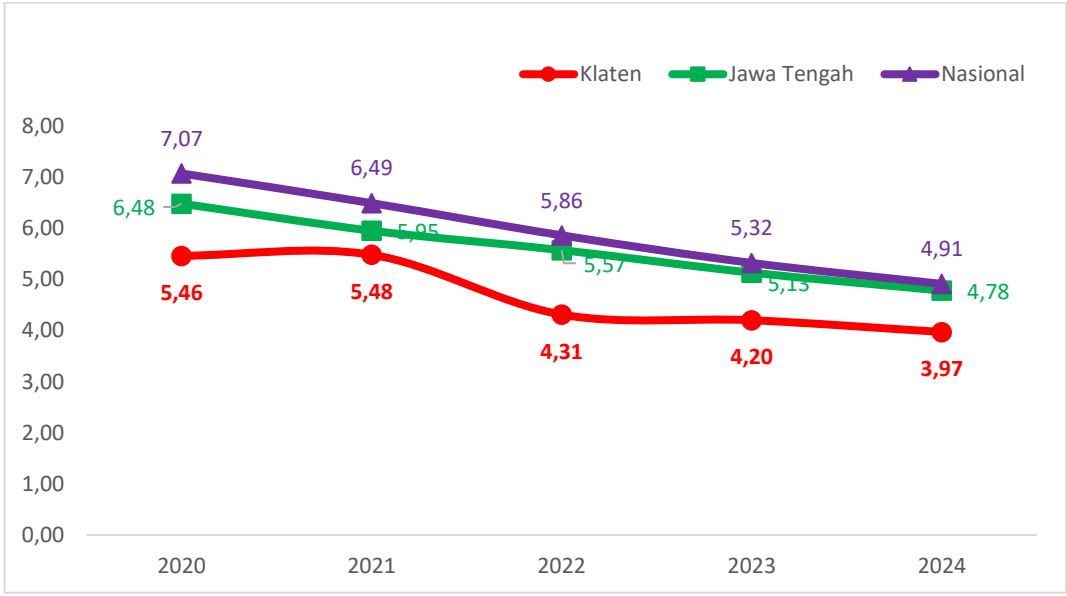
Gambar 2.39 Capaian Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), capaian persentase penerima manfaat yang kebutuhan dasarnya terpenuhi menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 95,11%, menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat telah mendapat akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 136,35% pada tahun 2023 kemudian pada tahun 2024 capaian menurun menjadi 84,23%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi pendanaan, distribusi bantuan, akurasi data sasaran, maupun dampak eksternal seperti kondisi sosial ekonomi dan bencana yang mungkin memengaruhi ketersediaan dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Penurunan angka tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyesuaian kebijakan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Diharapkan strategi pemenuhan kebutuhan dasar dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat, sehingga seluruh penerima manfaat dapat menikmati hak dasar mereka secara layak dan bermartabat.



Gambar 2.40 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

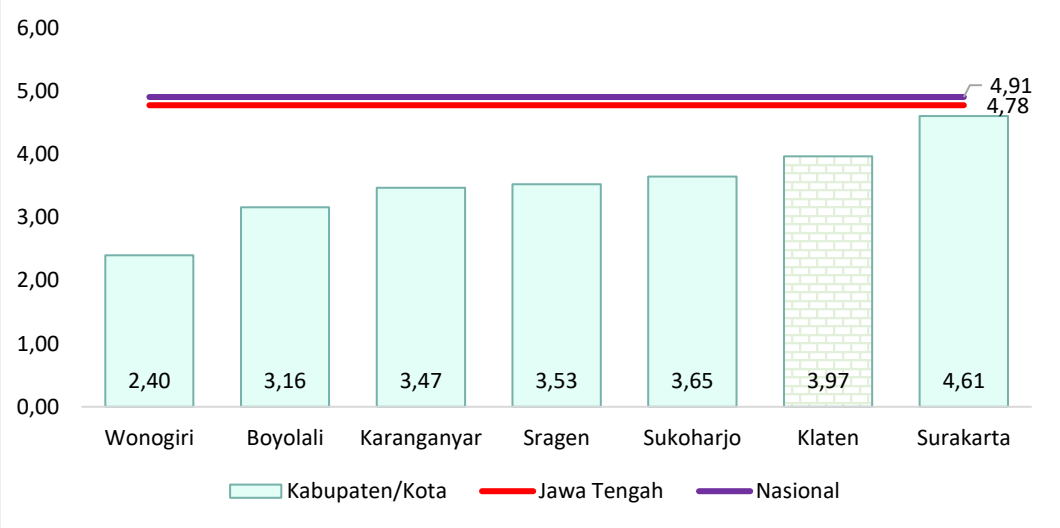
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara sederhana, TPT mengukur seberapa besar angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, maka TPT Kabupaten Klaten tahun 2024 berada pada posisi kedua tertinggi setelah urutan pertama di tempati Kota Surakarta sebesar 4,61%.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.41 Perkembangan TPT Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian TPT Kabupaten Klaten masih lebih baik, berada dibawah rata-rata TPT provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



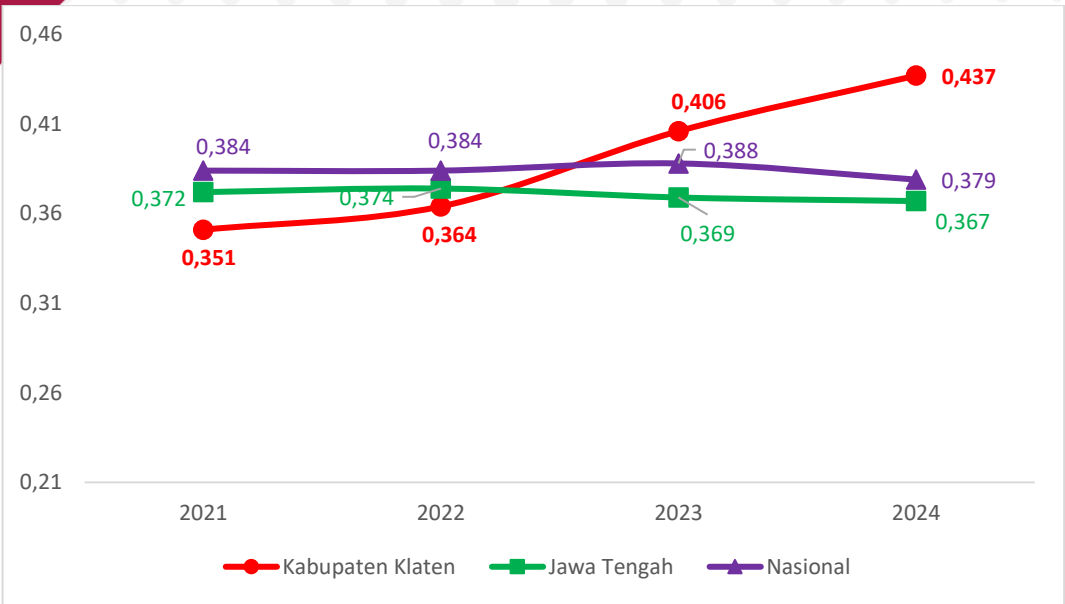
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.42 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024

Aspek kesenjangan ekonomi dapat diukur melalui **Indeks Gini (Gini Ratio)**, yang merupakan indikator untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berada pada rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, distribusi pendapatan menunjukkan pemerataan yang sempurna; sebaliknya, semakin mendekati angka 1, distribusi pendapatan menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi.

Di Kabupaten Klaten, nilai Gini Ratio menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, Gini Ratio tercatat sebesar 0,351 dan meningkat menjadi 0,437 pada tahun 2024. Meskipun masih berada dalam kategori ketimpangan sedang, tren peningkatan ini mencerminkan melebar-nya kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.

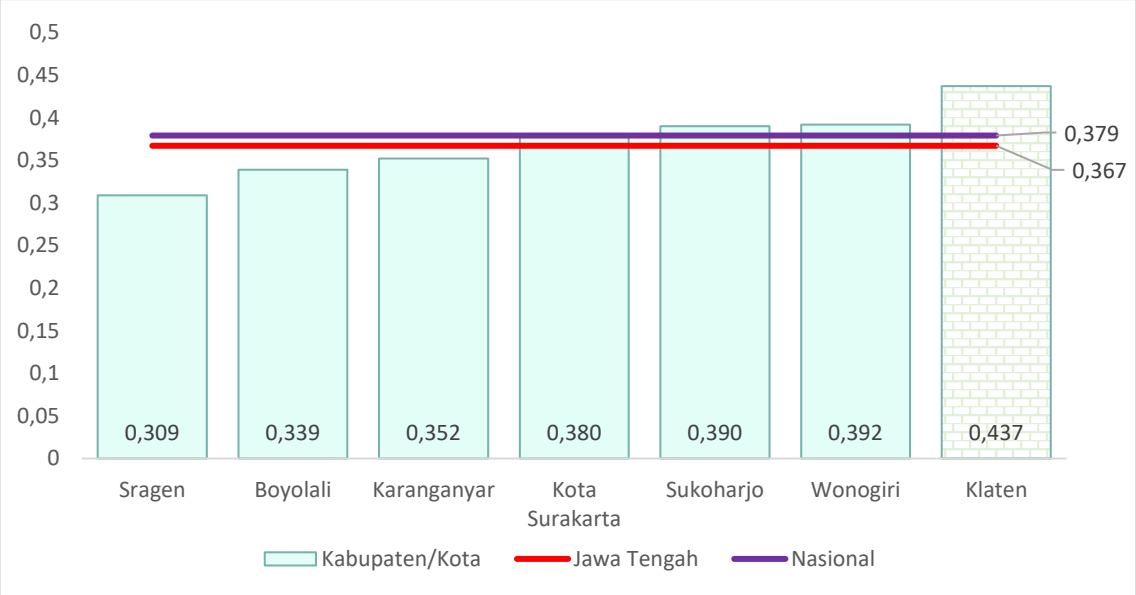
Peningkatan Gini Ratio di Klaten ini juga **berbeda arah** dengan tren di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, yang justru menunjukkan **penurunan ketimpangan** dalam kurun waktu yang sama. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi yang lebih terarah dan berkeadilan untuk menurunkan ketimpangan dan mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.43 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, Gini Ratio Kabupaten Klaten masih termasuk yang tertinggi dan melebihi Gini Ratio di Provinsi Jawa Tengah serta Nasional. Oleh karena itu diperlukan program-program pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah.

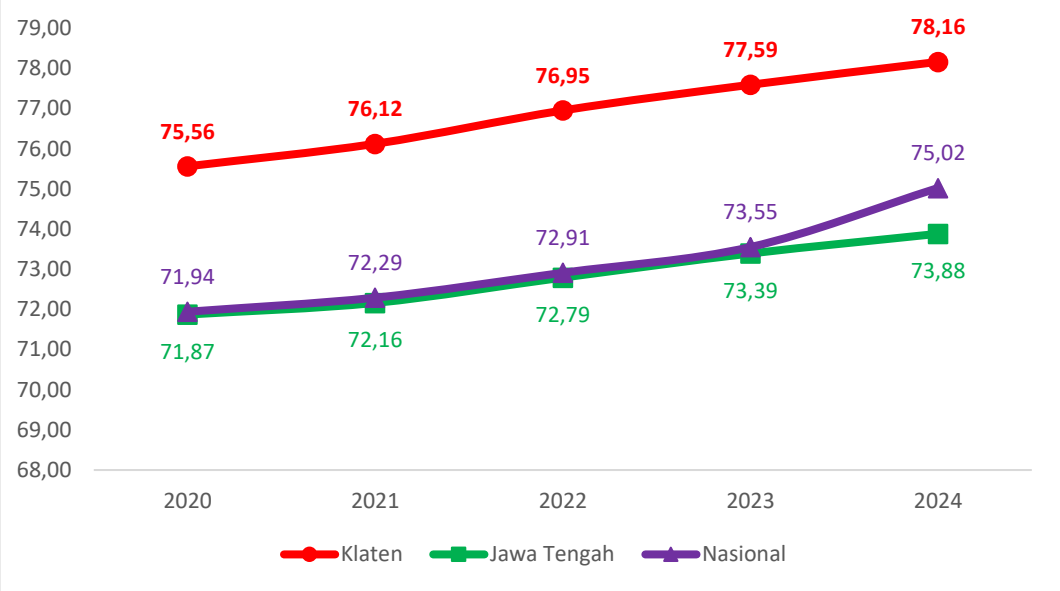


Gambar 2.44 Posisi Relatif Gini Rasio Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten menunjukkan tren positif dan stabil dalam lima tahun terakhir, meningkat dari 75,56 pada tahun 2020 menjadi 78,16 pada tahun 2024 dan dikategorikan sebagai "Tinggi". Capaian ini bahkan melampaui rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, menandakan kemajuan signifikan dalam aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat.

Namun demikian, tingginya IPM belum sejalan dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, menunjukkan adanya kesenjangan pemerataan pembangunan, terutama dalam bidang pendidikan. Permasalahan seperti Anak Tidak Sekolah (ATS), ketimpangan kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana-prasarana, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Untuk mencapai pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, perlu adanya intervensi strategis dalam pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, serta penguatan akses terhadap layanan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Dengan begitu, IPM yang tinggi akan lebih berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan secara nyata.

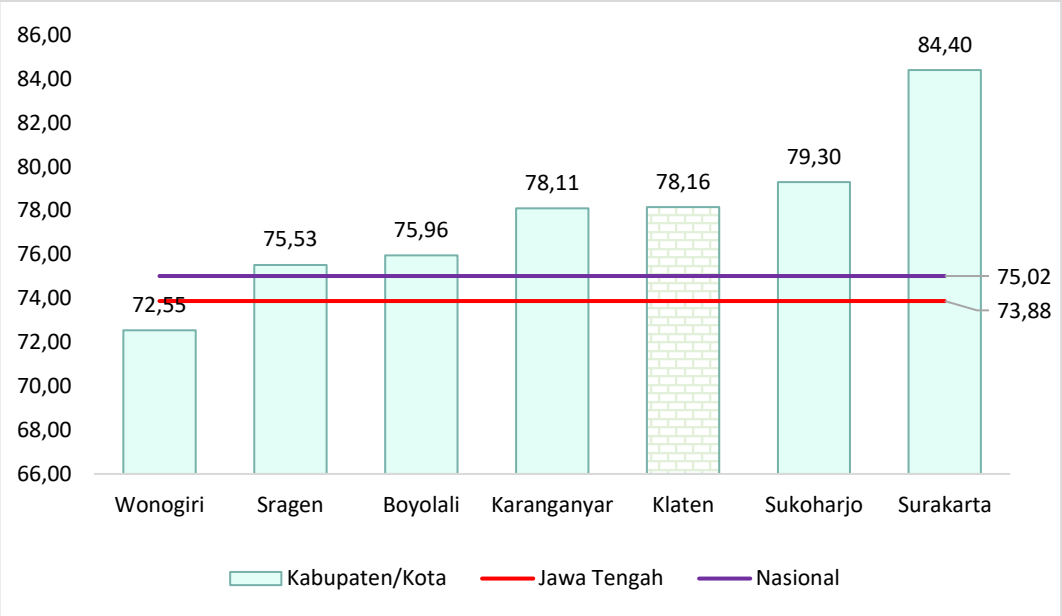


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.45 Perkembangan IPM Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, capaian IPM Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menempati posisi ketiga tertinggi. Posisi pertama ditempati oleh Kota Surakarta sebesar 84,40 disusul Kabupaten

Sukoharjo sebesar 79,30. Capaian IPM Kabupaten klaten menunjukkan perkembangan yang lebih baik, berada di atas rata-rata capaian IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

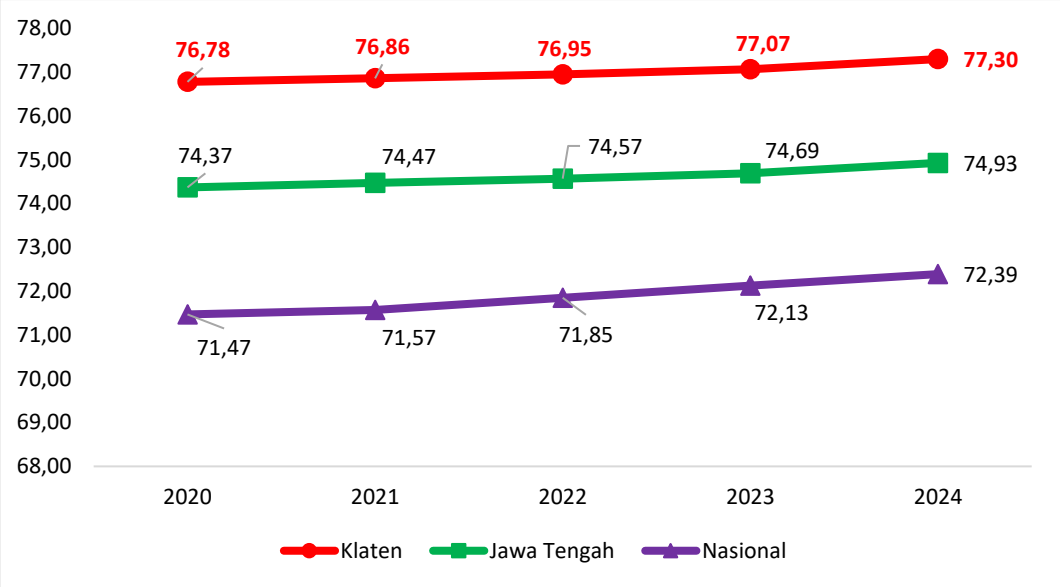
Gambar 2.46 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

Terdapat beberapa komponen dalam pengukuran IPM. Pengukuran IPM meliputi 3 dimensi, diantaranya adalah Dimensi Umur Panjang dan Sehat, Dimensi Pendidikan dan Dimensi Standar Hidup Layak. Berikut adalah uraian yang menjelaskan mengenai dimensi yang terdapat dalam pengukuran IPM.

1. **Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat**

   Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk, sekaligus menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam bidang kesehatan. Di Kabupaten Klaten, UHH menunjukkan tren positif selama periode 2020–2024, meningkat dari 76,79 tahun pada 2020 menjadi 77,30 tahun pada 2024. Angka ini mencerminkan bahwa rata-rata penduduk Klaten diperkirakan dapat hidup hingga usia 77 tahun dan capaian tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

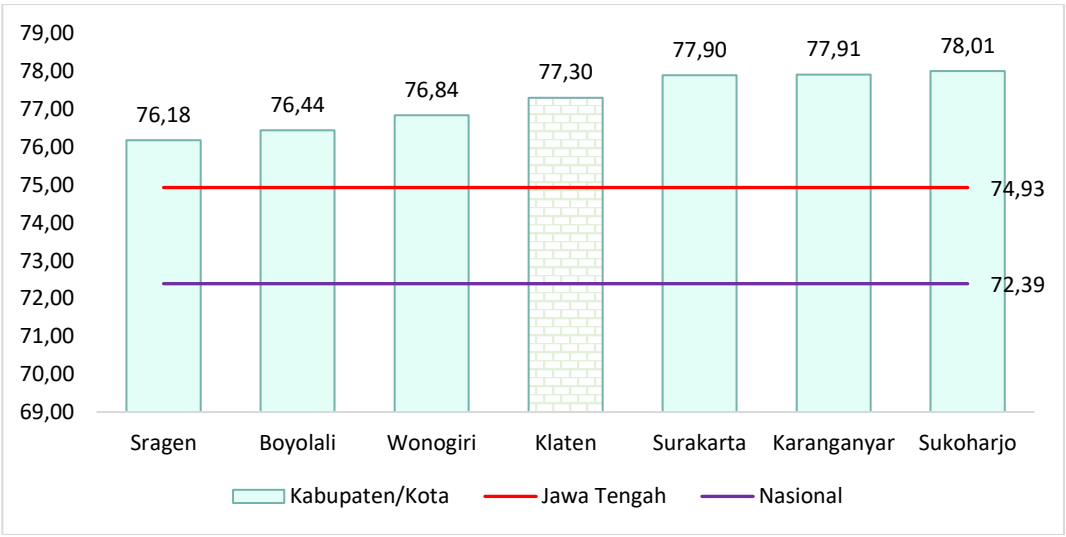
   Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Klaten secara umum. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait kasus kematian ibu, bayi dan balita yang masih terjadi. Upaya perbaikan gizi, akses layanan kesehatan dasar dan penurunan angka kematian ibu dan anak tetap menjadi prioritas untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.47 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, capaian UHH Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menduduki urutan keempat setelah posisi tertinggi ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 78,01 tahun, diikuti Kabupaten Karanganyar 77,91 tahun dan Kota Surakarta 77,90 tahun. Meskipun demikian, capaian UHH Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini mencerminkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

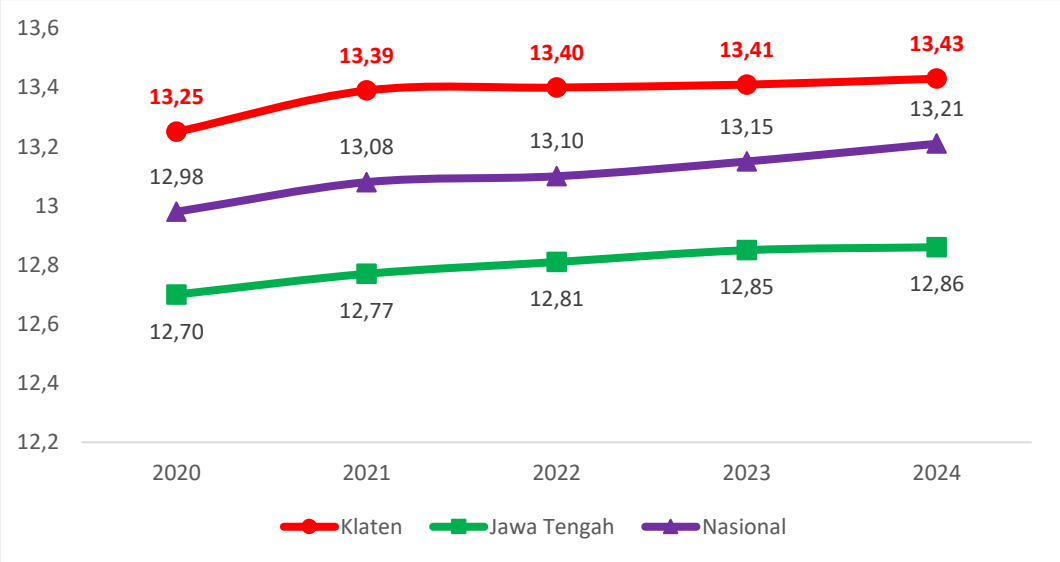


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.48 Posisi Relatif Umur Harapan Hidup Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

2. Dimensi Pengetahuan

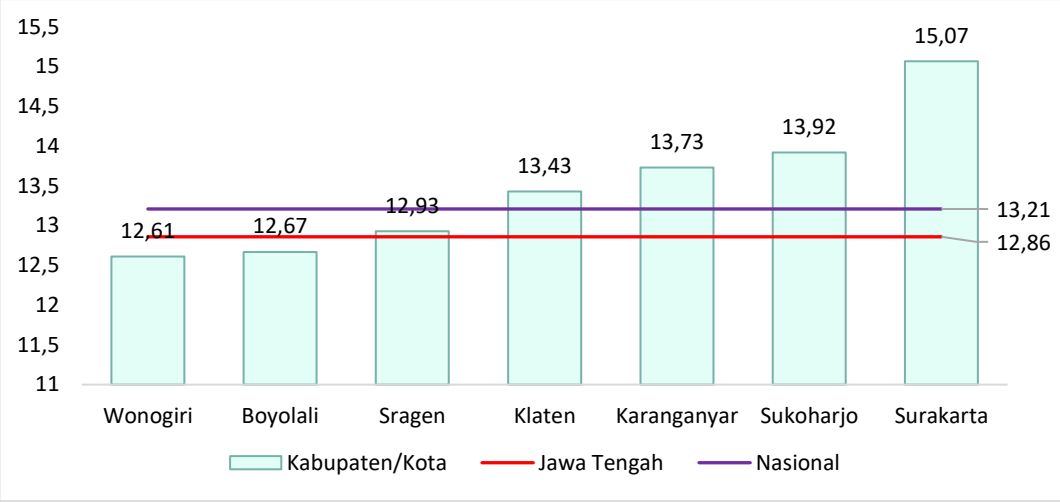
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020-2024. Angka HLS mengalami kenaikan dari 13,25 tahun pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,43 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa anak-anak di Kabupaten Klaten memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan formal selama 13,43 tahun atau menamatkan pendidikan hingga Diploma Satu dan mulai masuk ke jenjang Diploma Dua. Capaian HLS Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.49 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, HLS Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menempati urutan keempat. Posisi tertinggi pertama ditempati oleh Kota Surakarta (15,07 tahun) diikuti oleh Kabupaten Sukoharjo (13,92 tahun) dan Kabupaten Karanganyar (13,73 tahun). Namun demikian, capaian HLS Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Capaian HLS Provinsi Jawa tengah dan Nasional

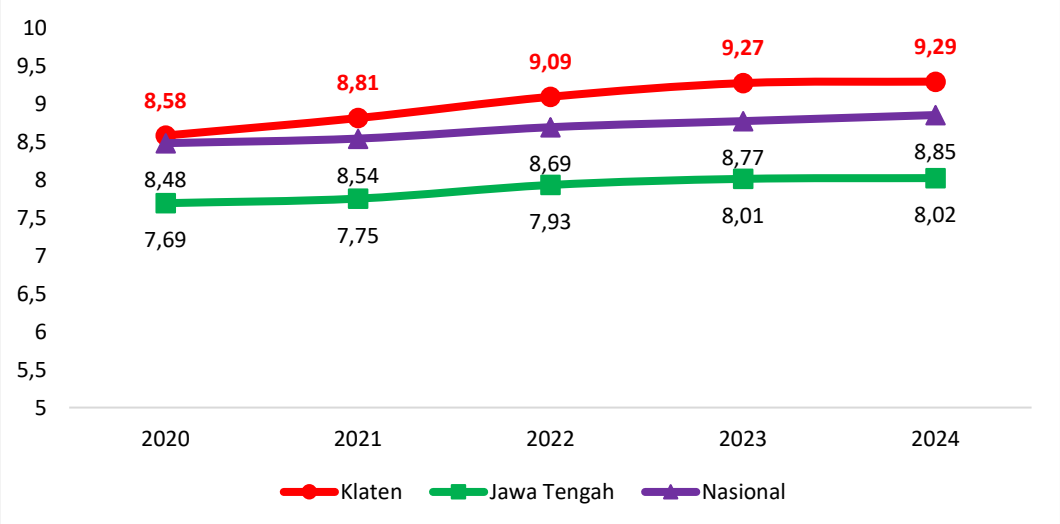


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.50 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten tahun 2024 sebesar 9,29 tahun mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 9,27 tahun.

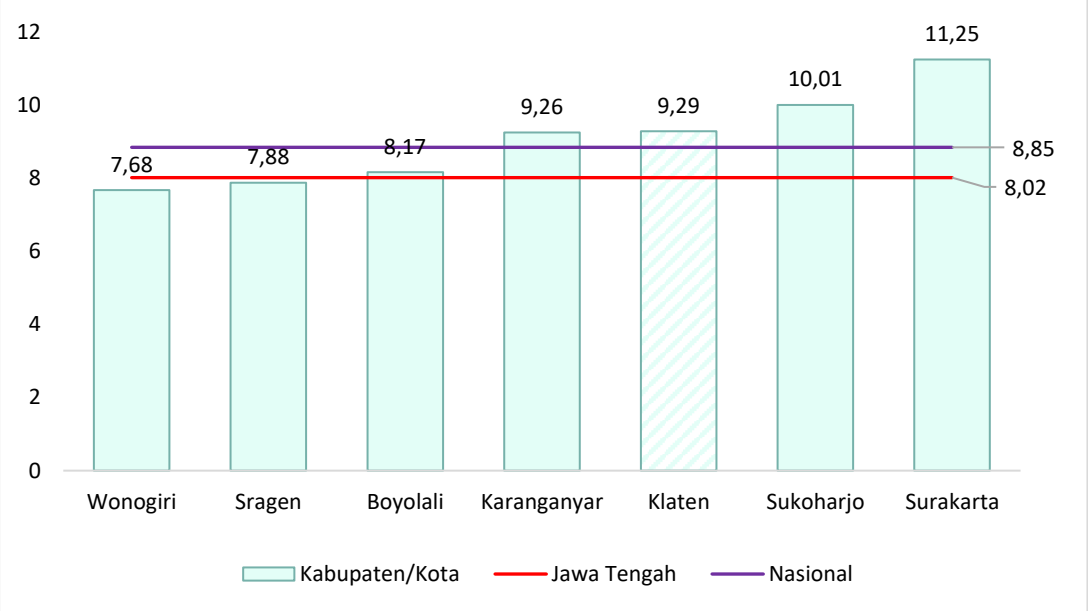
Angka ini menunjukkan rata-rata penduduk Kabupaten Klaten usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 9,09 tahun atau masuk kelas IX (SMP kelas tiga). Di lihat dari tren perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2020 hingga 2024 selalu menunjukkan peningkatan serta berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa minat penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi makin meningkat.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.51 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten menempati peringkat tiga teratas di wilayah Subosukawonosraten, setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki kinerja yang cukup baik dalam sektor pendidikan. Bahkan, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata Nasional. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan sektor pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

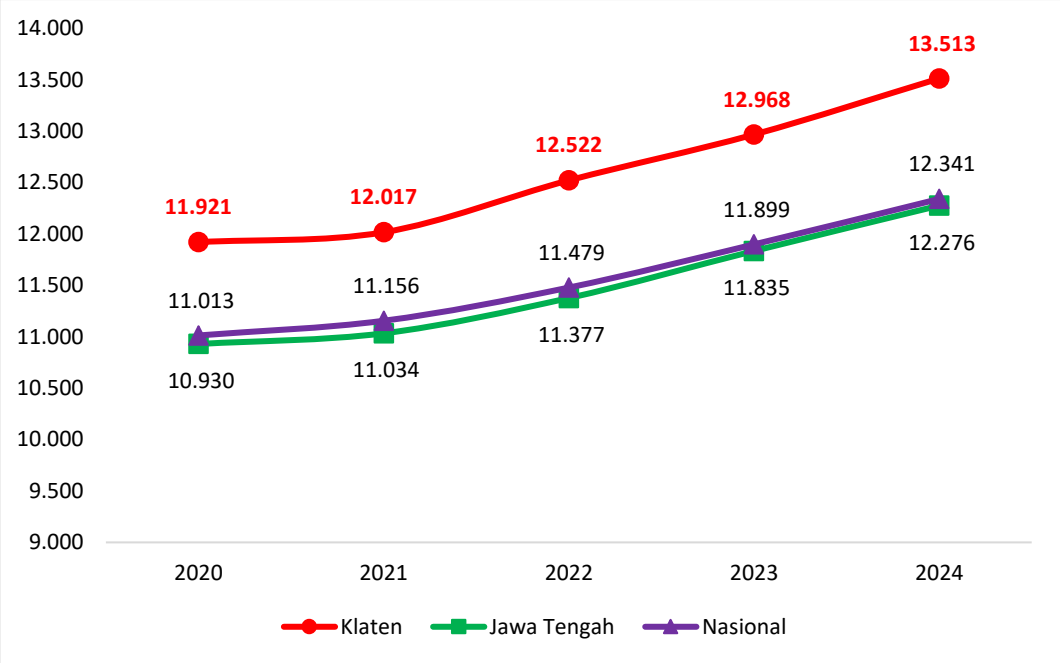


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.52 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

3. Dimensi Standar Hidup Layak

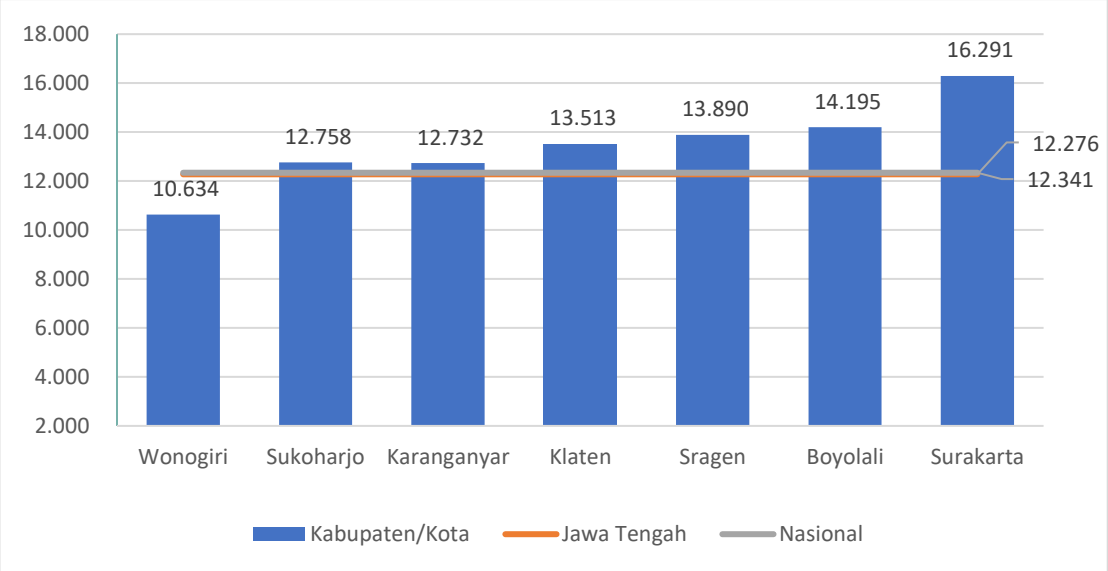
Kondisi Pengeluaran per kapita (PPP) Kabupaten Klaten terus membaik ditunjukkan dengan meningkatnya nilai PPP. Pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp13.513 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp12.968. angka ini menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Klaten sebesar Rp13.513 per bulan. Di lihat dari tren perkembangan PPP Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2020 hingga 2024 selalu menunjukkan peningkatan dan berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.53 Perkembangan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten berada pada peringkat keempat terendah di antara kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengeluaran masyarakat Klaten relatif lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di sekitarnya, daya beli dan konsumsi masyarakat secara umum masih cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi dan Nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi stabilitas ekonomi masyarakat serta efektivitas program pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan yang dijalankan pemerintah daerah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.54 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten bertujuan untuk meningkatkan umur harapan hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, layanan kesehatan dan keturunan. Kesehatan merupakan modal utama sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan, sehingga peningkatannya berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai program pembangunan. Di Kabupaten Klaten, derajat kesehatan masyarakat menunjukkan peningkatan, terlihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 yang mencapai 77,30 tahun. Capaian ini didukung oleh keberhasilan berbagai program kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, serta penanggulangan kemiskinan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator penting kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Klaten, AKI sempat meningkat dari 17 kasus pada tahun 2020 menjadi 45 kasus di tahun 2021, namun berhasil ditekan hingga 10 kasus pada tahun 2024 berkat peningkatan fasilitas kesehatan, edukasi kehamilan dan jaminan kesehatan ibu hamil. Masalah gizi seperti stunting juga masih menjadi perhatian. Pada tahun 2024, prevalensi stunting balita menurun menjadi 13,88%, lebih rendah dari target nasional 14%. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan kondisi kesehatan yang dipengaruhi akses pangan bergizi dan layanan kesehatan. Pemerintah terus meningkatkan akses layanan kesehatan melalui pembangunan sarana-prasarana, penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga medis, serta penyediaan jaminan kesehatan. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 98,67% penduduk Klaten telah memiliki

jaminan kesehatan nasional, mendukung perlindungan kesehatan secara menyeluruh.

Peningkatan indikator kesehatan di Kabupaten Klaten mencerminkan efektivitas berbagai program intervensi pemerintah. Namun, tantangan seperti pemerataan kualitas layanan, gizi anak dan edukasi kesehatan tetap harus menjadi fokus utama agar capaian kesehatan yang tinggi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan capaian Pembangunan Kesehatan dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Kesehatan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

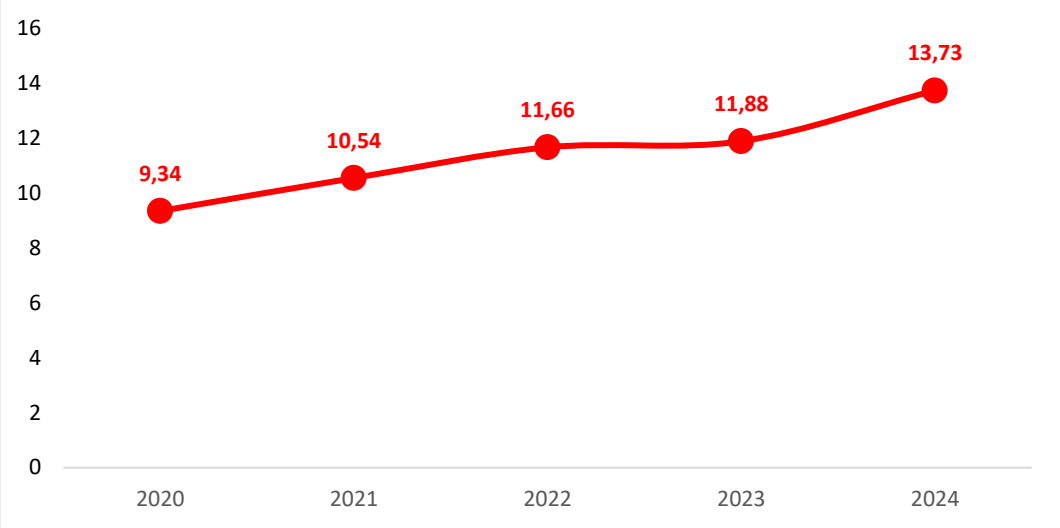
Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,78	76,86	76,95	77,07	77,30
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	17	45	11	11	10
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,95	11,40	14,90	13,90	13,88
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	39,67	47,20	61,50	96,90	79,10
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	79,30	87,60	85,6	88,30	85,50
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	89,00	95,40	95,73	98,67	98,82

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kondisi ibu dan bayi, maupun faktor lingkungan dan sosial. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan.

AKB di Kabupaten Klaten tahun 2024 sebesar 13,73/1000 kelahiran hidup dan kondisi ini meningkat dibandingkan AKB tahun 2023 sebesar 11,88/1000 kelahiran hidup. Penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital dan sepsis. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1).Menerapkan perilaku sehat, 2).Imunisasi sebagai upaya pencegahan, 3).Pengentasan kemiskinan, 4).Akses kepada layanan kesehatan dasar yang

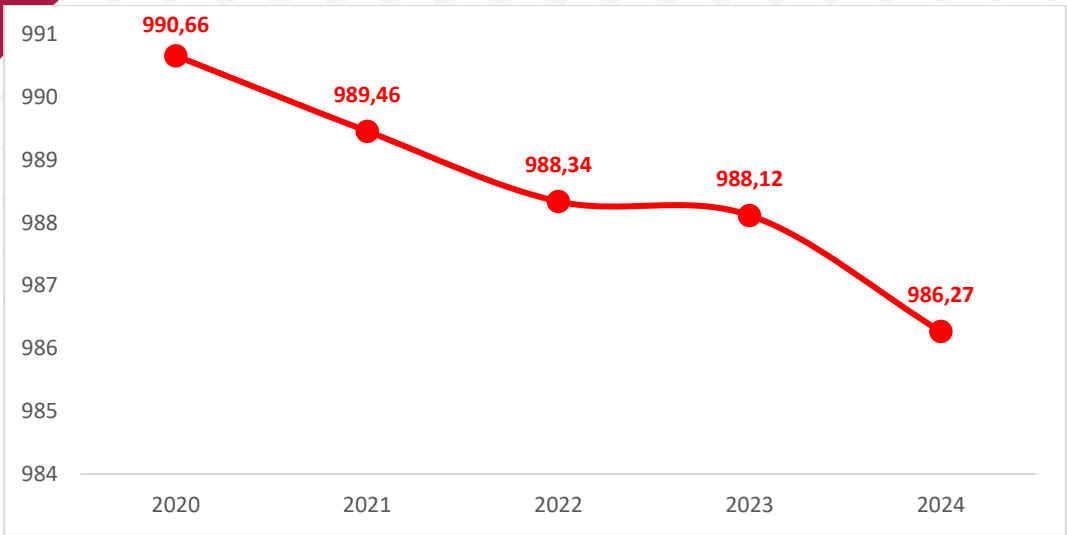
mudah dan murah. Selain itu juga dibutuhkan upaya–upaya untuk menurunkan AKB saat pandemi diantaranya: optimalisasi telemedicine untuk pemeriksaan ibu hamil tanpa resiko tinggi, optimalisasi kunjungan hamil dan kunjungan neonatus, optimalisasi program ANC Terpadu dan P4K, serta optimalisasi pemantauan dan perkembangan bayi melalui posyandu.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2025

Gambar 2.55 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020 -2024

Sejalan dengan angka kematian bayi, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) yang mencerminkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun turun terdampak. AKHB di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menurun menjadi 986,27. Untuk mempertahankan atau meningkatkannya, ibu hamil didorong rutin memeriksakan kehamilan, mengonsumsi gizi seimbang, serta melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga medis. Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024



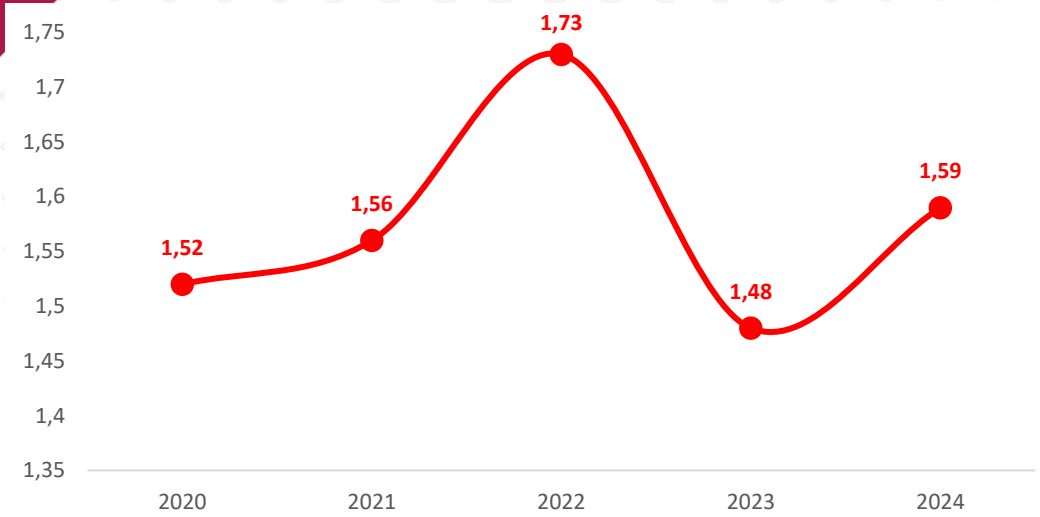
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.56 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Selain memperhatikan AKB dan AKHB, Angka Kematian Balita juga menjadi indikator penting dalam menilai status Kesehatan anak-anak usia dini. Angka kematian balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten tahun 2024 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Angka kematian balita pada tahun 2024 sebesar 1,59/1000 Kelahiran Hidup. Kondisi ini naik jika dibandingkan Angka Kematian Balita Tahun 2023 sebesar 1,48/ 1000 Kelahiran Hidup.

Naiknya angka kematian balita ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya pneumonia, demam berdarah dan penyakit kelainan kongenital. Upaya-upaya yang sudah dilakukan di antaranya: 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular dan pemenuhan gizi yang cukup, 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan, 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin.

Berikut perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024 dapat dilihat berikut ini.

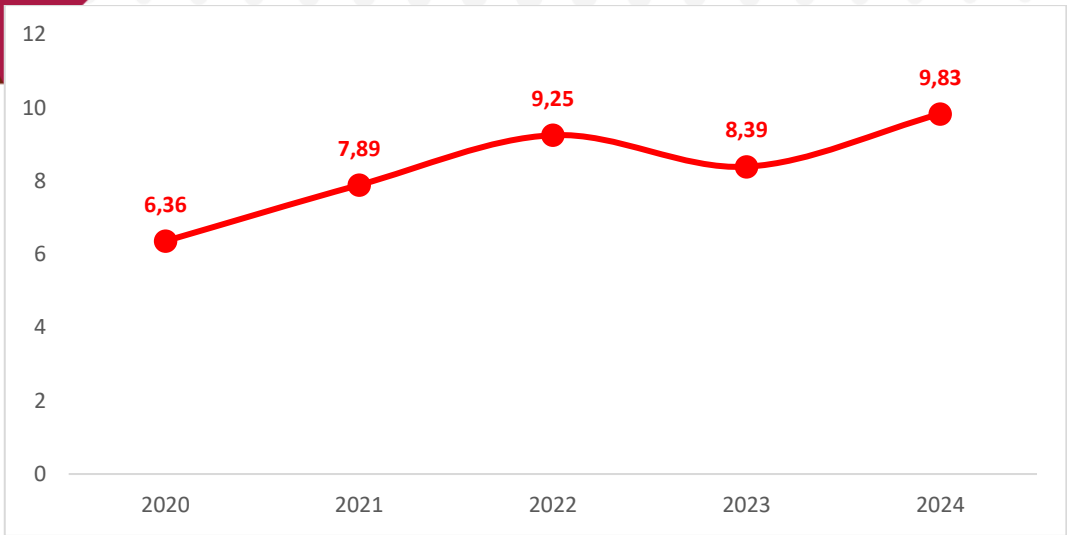


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2025

Gambar 2.57 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Salah satu bagian penting dari angka kematian bayi adalah angka kematian neonatal, yaitu jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar 9,83/1000 Kelahiran Hidup dan kondisi ini naik dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 8,39/1000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian terbesar di usia neonatal adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia ,kelainan kongenital dan sepsis. Upaya Penurunan Angka Kematian Neonatal adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi pelayanan *Antenatal Care* (ANC) pada ibu hamil, 2) Pemberdayaan pada ibu hamil dan keluarga dalam membaca buku KIA, 3) Pelaksanaan kelas ibu hamil, 4) Menguatkan kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus dan 6) Pemantauan di Posyandu.

Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024 dapat dilihat berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2025

Gambar 2.58 Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Cakupan imunisasi dasar juga menjadi indikator penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Dapat dilihat dari tabel bahwa Cakupan desa UCI di Kabupaten Klaten sudah tercapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan telah berhasil memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayi sesuai standar nasional. Namun tantangan masih terlihat dalam penanganan kasus gizi buruk. Kasus gizi buruk yang mendapat penanganan sesuai PGBT sudah sekitar 99,62%. Capaian ini menunjukkan respons yang baik, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek pencegahan dan penanganan dini agar kasus gizi buruk dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.35
Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	32,6	54,1	99,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Berdasarkan data yang ada, semua indikator terkait cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin menurun. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR, Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, Cakupan balita pneumonia yang ditangani, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami penurunan di tahun 2024. Sedangkan penderita diare yang ditangani dan angka kejadian malaria mengalami peningkatan di tahun 2024. Untuk ke depannya, upaya penanganan penyakit menular maupun tidak menular akan jauh lebih ditingkatkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten.

Tahun 2024 sampai dengan bulan Mei terdapat peningkatan kasus DBD yang sangat signifikan, jumlah kasus penderita DBD tahun ini sudah melebihi kasus tahun kemarin sebesar 393 kasus sedangkan tahun 2023 kasus DBD sebesar 308 kasus. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

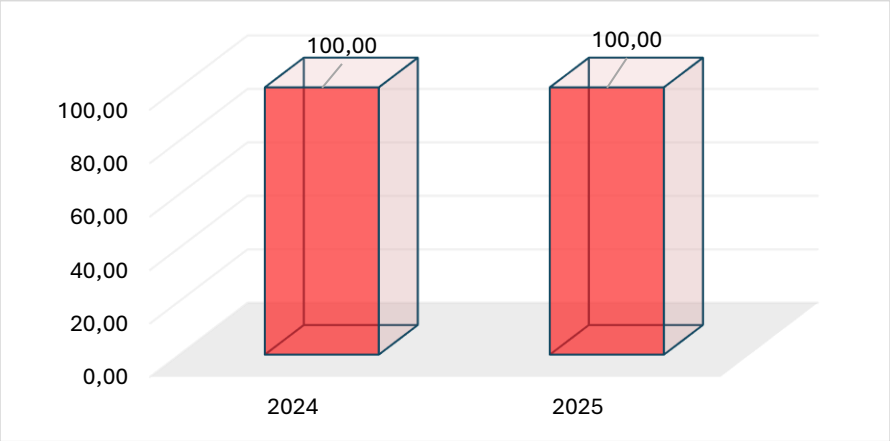
Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/ MR	%	88,40	99,70	106,10	104,90	87,60
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	83,33	120,00	100,00	128,57	114,29
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	29,33	29,80	29,05	43,71	40,65
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	29,98	31,70	36,60	37,20	*
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	46,04	86,30	122,70	133,50	*
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	1,96	2,60	2,90	4,20	*
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	31,44	47,20	51,10	88,60	85,43
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	71,63	87,60	85,60	88,29	85,43
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	%	4,40	3,40	3,50	4,600	6,55

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,0033	0,77	0,60	0,90	0,39
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,011	0,010	0,010	0,011	*

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah munculnya atau meningkatnya kasus kesakitan dan/atau kematian yang signifikan secara epidemiologis di suatu desa atau kelurahan dalam kurun waktu tertentu. Situasi ini memerlukan respons cepat dan tepat, yaitu tindakan penanggulangan dan pelaporan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam kepada otoritas kesehatan terkait.

Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi yang cepat sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut serta meminimalkan dampak KLB terhadap masyarakat. Dari tahun 2020 hingga 2024, cakupan penyelidikan epidemiologi terhadap KLB yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam mencapai 100%, menunjukkan respons yang sigap dan efektif dari sistem kesehatan dalam menghadapi potensi wabah.



Gambar 2.59 Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga medis di Kabupaten Klaten sebagai salah satu indikator untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita

pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya pertambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter dan tenaga medis di Kabupaten Klaten masih diperlukan peningkatan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Tabel 2.37
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio posyandu per satuan balita	28,00	29,01	30,17	30,95	35,73
Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,009	0,009	0,009
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,001	0,001	0,001
Rasio dokter per satuan penduduk	0,026	0,06	0,059	0,059	0,059
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,05	0,03	0,718	0,718	0,718

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Sarana kesehatan yang paling menonjol di Kabupaten Klaten saat ini adalah keberadaan tenaga medis swasta berizin, khususnya tenaga dokter, yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 460 orang. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata, diperlukan peningkatan peran serta pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rendah, yang kerap mengalami kendala dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Dengan keterlibatan aktif pemerintah, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

Tabel 2.38
Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan yang Berizin
di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

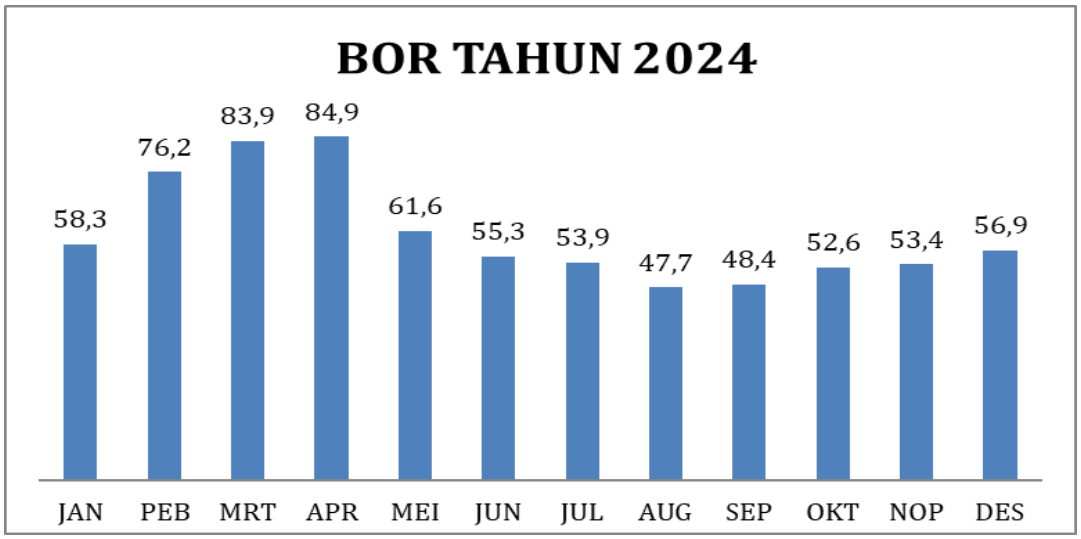
Sarana dan Prasarana Kesehatan		Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
SWASTA						
1	Rumah Sakit	9	9	9	10	10
2	Balai Pengobatan	-	-	-	-	
3	Rumah Bersalin	-	-	-	-	
4	Dokter Praktek	461	461	461	389	460
5	Apotek	107	107	107	108	199
6	Toko Obat	1	1	1	2	2
NEGERI						
1	Rumah Sakit Umum	2	2	2	2	2
2	Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1

Sarana dan Prasarana Kesehatan		Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Apotek Daerah	1	1	1	1	1
4	Toko Obat Berijin	1	1	1	0	0
5	Balai Pengobatan Kesehatan Paru Masyarakat	1	1	1	1	1
6	Puskesmas / Balai Pengobatan	34	34	34	34	34
7	Puskesmas Pembantu	84	84	84	84	84
8	Puskesmas Yang Ada Fasilitas Rawat Inap	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2024

Salah satu indikator kinerja pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Klaten ditunjukkan melalui Rumah Sakit Daerah (RSUD) Bagas Waras, khususnya melalui indikator *Bed Occupancy Rate* (BOR) atau tingkat pemanfaatan tempat tidur. BOR memberikan gambaran efisiensi penggunaan fasilitas rawat inap. Nilai ideal BOR menurut Kementerian Kesehatan RI berada di kisaran 60-85%. Pada tahun 2024, BOR RSUD Bagas Waras tercatat sebesar 61,17%, yang berarti berada dalam kategori ideal. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan rawat inap berjalan efisien dengan kapasitas yang masih mencukupi tanpa kelebihan beban.

Capaian BOR tahun 2024 menunjukkan bahwa RSUD Bagas Waras telah memberikan pelayanan rawat inap secara optimal. Meski demikian, pemerintah tetap perlu melakukan pemantauan dan evaluasi rutin agar BOR tetap dalam batas ideal dan kualitas pelayanan kesehatan terus terjaga.



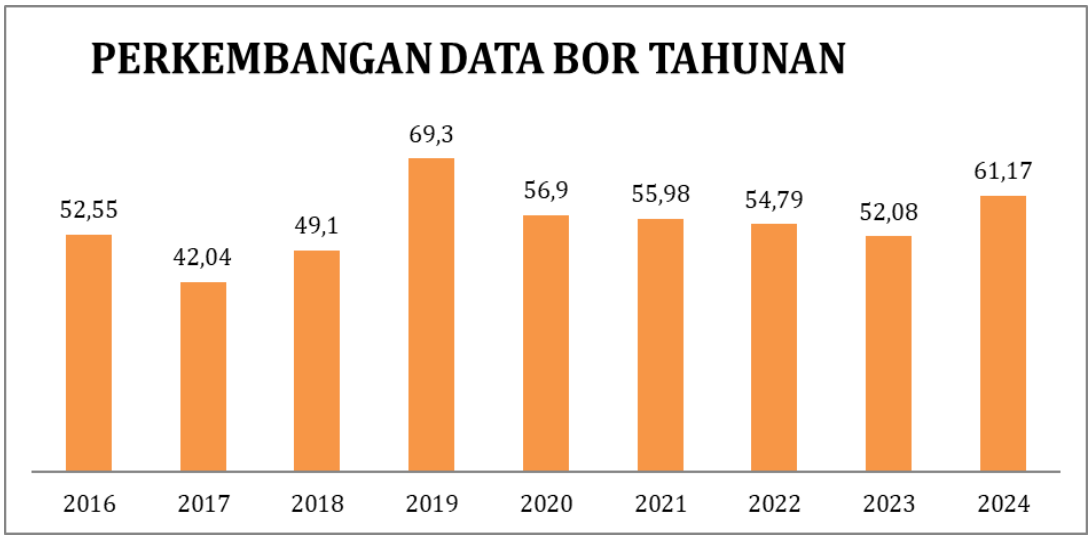
Sumber : RSD Bagas Waras Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.60 Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)

Tahun 2024, jumlah kunjungan pasien sebanyak 119.343 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 9616 orang/tahun (atau

rata-rata 26 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 99828 orang/tahun (atau rata-rata 272 orang/hari) dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 9.899 orang/tahun (atau rata-rata 27 orang/hari).

Kondisi menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan medis non-emergensi dan kontrol rutin. Sementara itu, angka kunjungan rawat inap dan IGD yang relatif stabil menunjukkan bahwa pelayanan emergensi dan perawatan intensif masih dalam batas kapasitas yang dapat ditangani rumah sakit. Hal ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan penguatan layanan rawat jalan, seperti peningkatan jumlah tenaga medis, penambahan ruang pemeriksaan, serta pengembangan sistem antrean digital untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan.



Sumber : RSUD Bagaswaras Kab. Klaten, November 2024

Gambar 2.61 Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)

Pada tahun 2024, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 119,9%, melebihi target sebesar 20% atau 2.269 kasus. Jumlah kasus aktual mencapai 2.720 kasus, mencakup komplikasi saat kehamilan, persalinan dan masa nifas. Jenis komplikasi terbanyak antara lain: KEK (Kekurangan Energi Kronik) sebanyak 917 kasus; Anemia Trimester 1 & 2 seanyak 414 dan 362 kasus; Preeklampsia/eclampsia sebanyak 270 kasus; Perdarahan sebanyak 174 kasus; Obesitas sebanyak 117 kasus; sepsis sebanyak 35 kasus, Tuberculosis sebanyak 2 kasus; Jantung sebanyak 6 kasus, DM sebanyak 24 Kasus; dan lain-lain sebanyak 354 kasus.

Tingginya kasus hipertensi dalam kehamilan menjadi perhatian utama, sehingga skrining preeklampsia sesuai Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) versi

tahun 2020 perlu lebih dioptimalkan. Di sisi lain, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten masih menunjukkan tren fluktuatif, yang berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi. Tantangan ini perlu diatasi dengan peningkatan akses layanan, edukasi kepada masyarakat, serta distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata, khususnya di wilayah dengan akses terbatas.

Tingginya angka komplikasi kebidanan menunjukkan perlunya penguatan sistem deteksi dini dan perawatan ibu hamil. Di sisi lain, fluktuasi cakupan layanan persalinan oleh tenaga terlatih menegaskan pentingnya pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas layanan untuk menekan risiko kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.39
Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capain Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	84,40	82,61	76,18	125,04	119,9
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,99	100	99,99	99,98	99,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Cakupan pelayanan bayi di tahun 2024 sudah di atas target yang ditetapkan artinya telah dilakukan pelayanan kunjungan bayi sesuai standar dimana dipantau pertumbuhan sebanyak minimal 8 kali, dipantau perkembangan sebanyak 2 kali dan diberikan pelayanan standar pada bayi. Capaian indikator cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2024 sebesar 97,09 %, yang artinya masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pertama kali lebih dari 12 minggu dan masih ada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat hamilnya tidak dipantau oleh tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2024 sebesar 97,71 % dan kinerja ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya tenaga kesehatan sudah memberikan pelayanan nifas lengkap dari kunjungan nifas 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan standar pelayanan kunjungan nifas. Indikator cakupan neonatus komplikasi yang ditangani pada tahun 2024 sebesar 67,62 % dan ini masih di bawah target yang ditetapkan. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendeteksi kasus komplikasi-komplikasi neonatus sejak dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2024 sebesar 98,24%, sehingga masih ada balita yang belum mendapatkan pelayanan balita sesuai standar dikarenakan balita tidak

mengukur berat badan minimal 8 kali setahun, tidak dipantau perkembangannya dan lain – lain.

Tabel 2.40
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,09	12,63	11,7	12,8	13,8
Cakupan kunjungan bayi	%	96,89	68,13	96,93	98,79	99,79
Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
Cakupan pembantu puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,33	95,24	93,15	94,63	97,09
Cakupan pelayanan nifas	%	96,92	98,47	98,54	97,39	97,71
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	55,63	57,57	64,33	67,98	67,62
Cakupan pelayanan anak balita	%	92,71	67,75	95,97	98,55	98,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi.

Pada tahun 2024 terdapat 3 indikator SPM yang capaiannya belum 100%, yaitu Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dan terintegrasi untuk meningkatkan capaian indikator SPM tersebut, termasuk melalui penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya promotif dan preventif.

Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2020-2024.

Tabel 2.41
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	93,44	95,24	100	100	85,88
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,99	100	99,99	100	94,46
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96,70	98,21	100	100	93,24
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92,71	0,66	95,16	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	31,13	58,28	94,03	100	100
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,26	84,98	100	100	100
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,14	93,41	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32,38	68,16	100	100	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,76	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,32	96,45	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	29,28	24,65	100	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	86,08	88,35	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan indikator penting pembangunan daerah karena berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kabupaten

Klaten menunjukkan tren positif di sektor ini, tercermin dari meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah dari 13,41 tahun (2023) menjadi 13,48 tahun (2024), serta Rata-rata Lama Sekolah dari 9,27 menjadi 9,29 tahun.Peningkatan ini mencerminkan membaiknya partisipasi pendidikan, terutama didorong oleh intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui program Wajib Pendidikan Dasar dan dukungan BOS daerah. Capaian ini menunjukkan komitmen Kabupaten Klaten dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Tabel 2.42
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,39	13,40	13,41	13,48
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,58	8,81	9,09	9,27	9,29

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Salah satu hak warga negara adalah memperoleh akses Pendidikan yang merata bagi semua orang. Untuk memenuhi hak tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidika yang memadai, serta memastikan semua penduduk usia sekolah mengenyam Pendidikan. Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah d isuatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 terbanyak adalah APS di rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sedangkan untuk APS Usia 16-18 tahun masih di bawah 85 % dikarenakan saat ini masih banyak warga yang belum mampu mengakses layanan pendidikan. Hal itu terlihat dari rendahnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) terutama pada jenjang pendidikan menengah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator APS	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS Usia 7-12 Tahun	101,01	95,84	96,26	102,21	97,99
APS Usia 13-15 Tahun	91,88	91,93	72,13	75,7	99,99
APS Usia 16-18 Tahun	77,09	79,92	80,12	80,23	75,07

Sumber: BPS. 2024

Pendidikan dasar terdiri dari jenjang pendidikan SD dan SMP, pengelolaan pendidikan dasar merupakan kewenangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota oleh karena itu semua penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pendidikan dasar diukur melalui beberapa indikator salah satunya Angka Partisipasi Kasar (APK), merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Capaian APK jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A dari tahun 2020-2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Jika pada tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan, namun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan kenaikan dari 103,03% di tahun 2022 naik menjadi 101,80% di tahun 2023, tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 101,65%. Sama halnya dengan APK SMP/MTs/Paket B juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, terakhir pada tahun 2024 APK SMP/MTs/Paket B sebesar 85,35.

Kondisi yang sama perkembangan nilai APK SMA/SMK/MA/Paket C mengalami perkembangan yang fluktuatif, terakhir di tahun 2024 APK SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 99,83 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Fluktuasi nilai APK di setiap jenjang pendidikan ini mencerminkan perlunya penguatan kebijakan pemerataan akses pendidikan, khususnya untuk jenjang menengah pertama, serta upaya pelacakan dan penanganan dini terhadap anak usia sekolah yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nilai APK di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator APK	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI/Paket A	%	96,02	91,65	91,5	98,43	101,65
APK SMP/MTs/Paket B	%	100,48	98,62	93,55	98,35	85,35
APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C	%	86,28	86,66	85,81	86,61	99,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur sejauh mana anak usia sekolah mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai usianya. APM lebih akurat untuk menilai partisipasi pendidikan karena hanya mencakup siswa yang bersekolah tepat waktu. Jika semua anak usia sekolah bersekolah sesuai jenjang, APM akan mencapai 100%. Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), APM cenderung lebih rendah karena APK juga menghitung siswa di luar usia sekolah.

Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2024 sebesar 97,67% kondisinya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada APM SMP/MTs/ Paket B juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 74,6 ditahun 2023 menjadi 79,38% ditahun 2024. Demikian pula untuk APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2024 sebesar 66,38%. Hal ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang dasar. Namun, perlu perhatian khusus untuk jenjang menengah agar partisipasi tetap optimal.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator APM	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI/Paket A	%	88,54	83,91	84,15	91,9	97,67
APM SMP/MTs/Paket B	%	71,14	72,11	68,12	74,4	79,38
APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	63,58	64,63	59,29	65,58	66,38

Sumber: BPS, 2024

Kualitas pendidikan dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah angka putus sekolah, yang mencerminkan persentase peserta didik yang tidak menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Angka ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pendidikan dalam mempertahankan peserta didik hingga lulus.

Pada jenjang SD/MI, angka putus sekolah pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,02 sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan pendidikan dasar masih cukup stabil dan terkendali.

Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs, terjadi penurunan angka putus sekolah, dari 0,04 pada tahun 2023 menjadi 0,03 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya menjaga keberlanjutan pendidikan pada tingkat menengah pertama, baik melalui intervensi program pemerintah, peran serta sekolah, maupun dukungan masyarakat.

Meskipun angka putus sekolah relatif rendah, hal ini tetap perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi peningkatan di masa mendatang, khususnya dengan memperkuat sistem deteksi dini terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah dan memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Angka Putus Sekolah (APS)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka putus sekolah SD/MI	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,08	0,05	0,07	0,04	0,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2025

Angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dengan Ujian Nasional, namun berdasarkan nilai Raport. Kebijakan Kemendikbudristek bahwa Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Nasional (AN) dan pelaksanaan Asesmen Nasional untuk jenjang SD/MI adalah siswa Kelas V, jenjang SMP/MTs siswa Kelas VIII.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Angka Kelulusan (AL)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AL SD/MI	%	100	100	100	100	100
AL SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
AL SMA/SMK/MA	%	99,75	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Angka melanjutkan sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas manajemen pelayanan pendidikan, khususnya dalam hal transisi peserta didik dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Pada tahun 2024, angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Klaten tercatat sebesar 102,05%. Capaian ini melebihi angka ideal 100%, Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di luar Klaten, karena mengikuti orang tua yang merantau bekerja, atau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren.

Tabel 2.48
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Angka Melanjutkan (AM)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,73	100,11	99,22	102,19	102,05
AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	92,55	91,98	88,37	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapras pendidikan Klaten. Kondisi sarana prasarana pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kondisi fluktuatif, dari 67,10% di tahun 2020 naik menjadi 83,07% di tahun 2024. Begitu juga untuk sekolah Pendidikan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik tahun 2020 sebesar 74,35%, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024 menjadi 80,00%. Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru, sedangkan proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Fasilitas Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SARANA PRASANA						
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	68,87	71,36	67,10	67,10	83,07
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	74,35	88,01	82,70	82,70	80,00
RASIO						
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	1 : 71	1 : 71	1 : 72	1 : 187	1 : 206
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1 : 25	1 : 20	1 : 19	1 : 17	1 : 21
Rasio guru/murid PAUD	%	1 : 9	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 15
Rasio guru/murid SD/MI dasar	Rasio	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 16
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 19
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	Rasio	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs	Rasio	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32
PROPORSI & PARTISIPASI PENDUDUK						

Indikator Fasilitas Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100,00	95,93	100,00	100,00	100
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99,59	99,60	99,66	99,68	99,87
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Orang	1.035.959	981.563	983.220	1.007.542	1.023138
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,97	89,79	90,11	91,81	98,55
Penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	94,10	94,55	87,11	98,92	98,65
Penduduk usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	73,97	67,26	43,05	92,14	92,98
Penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	%	88,54	83,91	84,15	99,67	99,45
Penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	%	71,14	72,11	68,12	97,47	98,03
Penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	5,79	0,84	1,34	10,91	13,9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Ketersediaan sarana pendidikan tersebar di seluruh kecamatan, rincian sarana pendidikan skala lingkungan yaitu TK/ RA/ BA dan SD/ MI adalah: terdapat 538 unit TK, 422 unit RA/ BA, 707 unit SD dan 87 unit MI. Sedangkan rincian sarana untuk SMP/ MTs dan SMA/ MA/SMK adalah: 117 unit SMP, 24 unit MTs, 25 unit SMA, 8 unit MA dan 53 unit SMK. Terdapat juga 9 perguruan tinggi yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten.

Sebaran sarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sudah merata di seluruh kecamatan, hanya tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi yang belum tersedia di setiap kecamatan. Kecamatan yang belum tersedia sarana pendidikan menengah atas adalah Kecamatan Kemalang, Kalikotes dan Kebonarum. Sarana pendidikan menengah atas dan sarana pendidikan tinggi sebagian besar berada di kawasan perkotaan Klaten dan sekitarnya. Untuk melihat sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Klaten dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	PT
1	Kec. Prambanan	18	14	25	2	3	1	1	1	2	-
2	Kec. Gantiwarno	21	6	24	2	5	1	1	-	2	-
3	Kec. Wedi	18	12	32	-	6	1	1	-	1	-
4	Kec. Bayat	25	14	35	4	6	1	1	-	1	-
5	Kec. Cawas	27	19	37	1	7	1	1	-	3	-
6	Kec. Trucuk	26	38	34	9	7	2	-	-	1	-
7	Kec. Kalikotes	9	13	20	4	2	1	-	-	-	-
8	Kec. Kebonarum	9	8	10	2	1	-	-	-	-	1
9	Kec. Jogonalan	24	19	27	2	5	-	1	-	4	-
10	Kec. Manisrenggo	20	11	28	4	4	1	-	-	1	-
11	Kec. Karangnongko	14	13	20	3	2	1	1	-	-	-
12	Kec. Ngawen	4	34	21	6	4	-	1	-	1	-
13	Kec. Ceper	27	25	34	9	3	2	1	1	3	2
14	Kec. Pedan	19	15	24	3	4	1	1	-	4	-
15	Kec. Karangdowo	20	16	23	5	3	1	1	-	1	-
16	Kec. Juwiring	31	17	35	7	6	1	1	-	1	-
17	Kec. Wonosari	36	15	37	2	3	1	1	1	2	-
18	Kec. Delanggu	22	11	30	-	8	-	1	-	2	-
19	Kec. Polanharjo	24	12	28	6	3	-	1	-	-	-
20	Kec. Karanganom	27	18	27	5	6	1	1	1	-	-
21	Kec. Tulung	26	17	27	7	4	1	-	-	1	-
22	Kec. Jatinom	21	22	36	1	5	2	1	1	2	-
23	Kec. Kemalang	15	5	23	-	3	1	-	-	-	-
24	Kec. Klaten Selatan	16	14	22	-	5	-	3	-	5	1
25	Kec. Klaten Tengah	20	15	30	-	4	1	-	-	6	2
26	Kec. Klaten Utara	19	19	18	3	8	2	5	3	10	3
TOTAL		**538**	**538**	**422**	**707**	**87**	**117**	**24**	**25**	**8**	**53**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2024

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Pada tahun 2024, terdapat 926 lembaga PAUD di Kabupaten Klaten, yang meliputi kelompok bermain, tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis, serta Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). Selain itu, jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) tercatat sebanyak 603 lembaga.

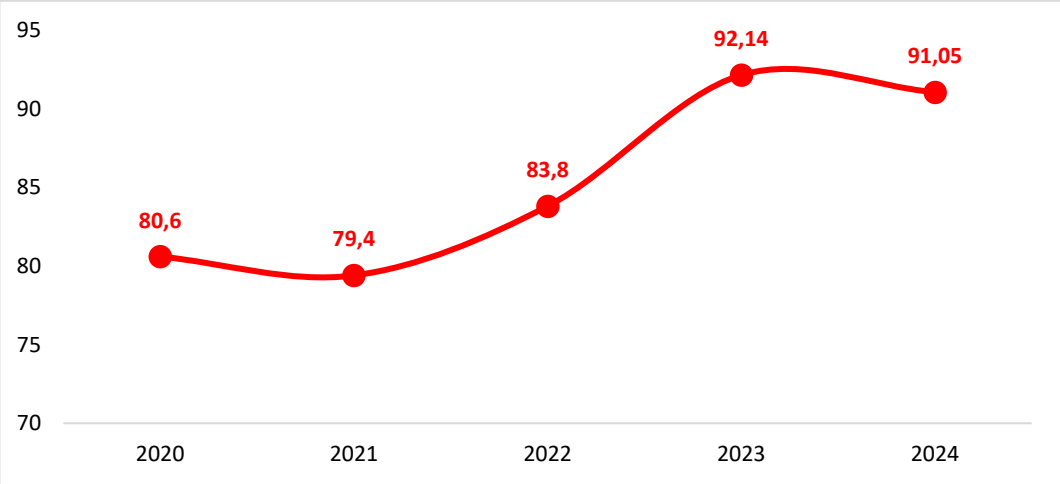
Tabel 2.51
Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
1	Satuan PAUD Sejenis	9	74	86	160	8
2	Taman Penitipan Anak	24	195	183	378	48
3	Kelompok Bermain	471	4993	4819	9812	663
4	RA/BA	422	9.719	9.257	19.976	1.086
5	TK	603	9572	9034	18606	1131
	PAUD	**1.529**	**24.553**	**23.379**	**48.932**	**2.936**

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2024

Penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih tergantung pada partisipasi dan kemudahan orang tua untuk mencapai sekolah anak-anaknya. Sementara itu pendidikan usia dini masih kurang partisipasinya dari masyarakat dikarenakan pengetahuan akan pentingnya pendidikan usia dini sangat minim informasi dan sosialisasi tergantung pada pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Klaten.

Perkembangan capaian APK PAUD di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan fluktuatif, yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan kenaikan dan pada tahun 2024 ini mengalami penurunan yaitu dari 92,14% menjadi 91,05% di tahun 2024.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.62 Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) merujuk kepada lembaga atau program pendidikan yang tidak mengikuti struktur dan kurikulum formal seperti yang ada di sekolah umum. Berbeda dengan pendidikan formal yang biasanya diatur oleh pemerintah dan terstruktur secara ketat, pendidikan nonformal

bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi khusus masyarakat atau individu.

SPNF tidak terikat pada aturan dan struktur yang sama ketatnya seperti pendidikan formal. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta.

Program nonformal sering kali ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak tercakup atau kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan kerja atau masyarakat pedesaan yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal. Meskipun tidak formal, SPNF memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan berusaha mencapai hasil pembelajaran yang dapat diukur. Contohnya termasuk kursus keterampilan, pelatihan kejuruan, atau program literasi.

Dengan kelebihan fleksibilitasnya, Satuan Pendidikan Nonformal memainkan peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hidup, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal atau membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih individual dan relevan.

Di Kabupaten Klaten terdapat Satuan Pendidikan Non Formal milik Pemerintah Daerah yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Klaten yang berada di Cawas dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berikut disajikan data eksisting Satuan Pendidikan Non Formal tahun 2024.

Tabel 2.52
Data Pokok Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Klaten Tahun 2024

NO	NPSN	Nama PKBM	Alamat	Status	Akreditasi			
					A	B	C	Belum
1	P9984266	PKBM Ar Royyan	Ngolodono, Karangdowo	Aktif				Belum
2	P9998228	PKBM Banyutowo	Solodiran, Manisrenggo	Aktif				Belum
3	P2970284	PKBM Cipta Kharisma	Socokangsi, Jatinom	Aktif				Belum
4	P2970282	PKBM Dewi Fortuna	Danguran, Klaten Selatan	Aktif	A			
5	P9926277	PKBM Harapan Bangsa	Jambakan, Bayat	Aktif		B		
6	P9970448	PKBM Ibnu Abbas Klaten	Ketandan, Klaten Utara	Aktif				Belum
7	P2970283	PKBM Karsa Mandiri	Beku, Karanganom	Tidak Aktif				Belum
8	P9908248	PKBM Karya Bakti	Gaden, Trucuk	Aktif				Belum
9	P9948575	PKBM Marsudi Kawruh	Ceper, Ceper	Tidak Aktif				Belum
10	P9934500	PKBM Mentari Kaya Arta	Jimus, Polanharjo	Aktif	A			
11	P9926282	PKBM Prima Sejahtera	Belang Wetan, Klaten Utara	Aktif		B		

NO	NPSN	Nama PKBM	Alamat	Status	Akreditasi			
					A	B	C	Belum
12	P9926278	PKBM Taruna Teladan	Juwiring, Juwiring	Aktif				Belum
13	P9926281	PKBM Usaha Mandiri	Bawukan, Kemalang	Aktif				Belum

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2024

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota sebagaimana sesuai dengan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdiri atas a) pendidikan anak usia dini, b) pendidikan dasar dan c) pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data dibawah ini, 3 indikator sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 100% sebagaimana target yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.53
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	66,92	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	91,71	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	5,79	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Laporan SPM, 2024, diolah

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.54
Kemampuan Literasi, Numerasi serta Nilai Karakter Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Indikator	2023	2024	Perubahan Skor	Definisi Capaian
1	LITERASI SMP	71,51	78,37	Naik 6,86	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
2	NUMERASI SMP	58,96	68,85	Naik 9,89	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi
3	IKLIM KEAMANAN SMP	69,56	72,9	Naik 3,34	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.
4	IKLIM KEBINEKAAN SMP	69,01	75,79	Naik 6,78	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme.
5	IKLIM INKLUSIVITAS SMP	56,32	61,09	Naik 4,77	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.
6	LITERASI SD	58,67	66,31	Naik 7,64	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
7	NUMERASI SD	44,17	51,35	Naik 7,18	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi
8	IKLIM KEAMANAN SD	73,12	75,18	Naik 2,06	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.

No	Indikator	2023	2024	Perubahan Skor	Definisi Capaian
9	IKLIM KEBINEKAAN SD	75,39	72,06	Naik 3,33	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/ kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme.
10	IKLIM INKLUSIVITAS SD	57,42	58,09	Turun 0,67	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Sumber : Rapot Mutu Pendidikan Tahun 2024

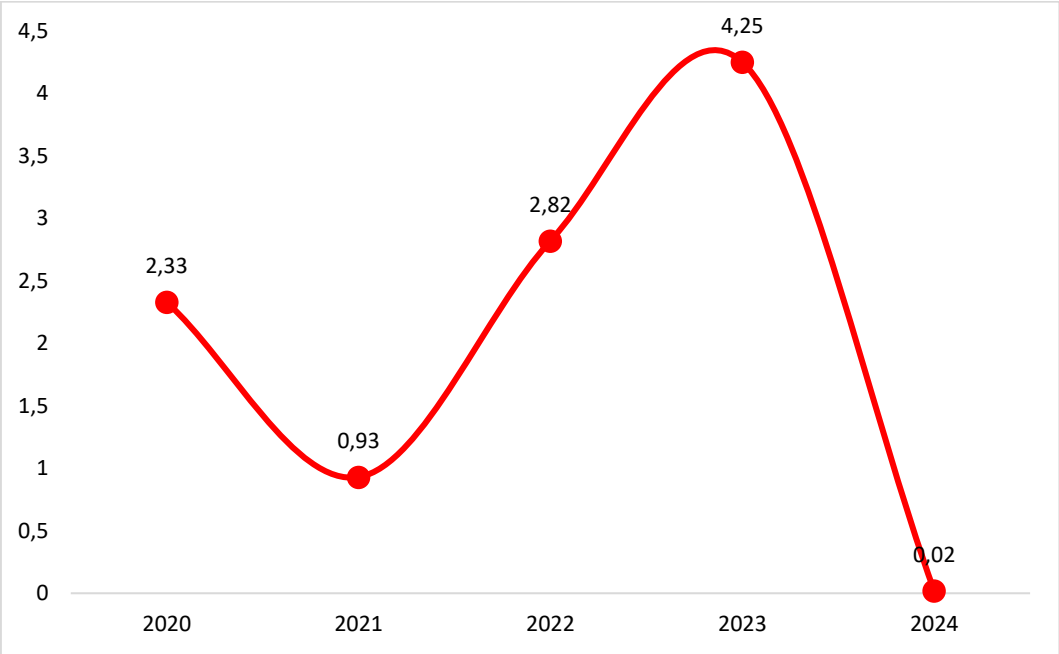
Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa melalui 3 iklim yaitu iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas. Iklim keamanan menggambarkan kondisi satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang terhindar dari perundungan, pelecehan seksual serta kekerasan. Iklim kebhinekaan merepresentasikan penerimaan terhadap perbedaan, kebebasan berpendapat, nalar kritis, kreativitas, sikap saling menghargai, toleransi, gotong royong serta ketaqwaan. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan iklim.

Tabel 2.55
Ringkasan Capaian Pendidikan Per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024

Jenjang	Capaian	Indikator Prioritas
PAUD	Capaian Terbaik	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
	Capaian Terendah	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
SD Umum	Peningkatan Tertinggi	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
	Capaian Terbaik	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi
SMP Umum	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terbaik	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi

Sumber : Rapot Mutu Pendidikan Tahun 2024

Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, dibutuhkan bangsa yang cerdas sebagai fondasinya. Salah satu langkah nyata dalam mendukung upaya tersebut adalah peningkatan literasi masyarakat, yang tidak bisa dilepaskan dari peran penting perpustakaan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perpustakaan daerah berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi dan pengembangan budaya baca masyarakat. Pemanfaatannya menjadi indikator penting dalam menilai kesadaran literasi di suatu wilayah. Namun demikian, capaian pemanfaatan perpustakaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, tingkat pemanfaatan perpustakaan tercatat sebesar 2,33% angka ini menurun menjadi 0,39% pada tahun 2021 akibat terbatasnya akses layanan selama pandemi COVID-19 dan berkurangnya intensitas kunjungan langsung. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,82% dan kembali naik di tahun 2023 mencapai 4,25%. Namun pada tahun 2024 persentase pemanfaatan perpustakaan tercatat menurun bukan karena penurunan kunjungan melainkan adanya perbedaan metode perhitungan yang digunakan dibandingkan tahun tahun sebelumnya, tercatat sebesar 0,02% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi dan akses terhadap sumber informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penguatan peran perpustakaan daerah perlu terus didorong, baik melalui peningkatan layanan, digitalisasi koleksi, maupun program-program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten 2024

Gambar 2.63 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Klaten hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 67.714 orang, meningkat 10.423 orang dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh beragam inovasi layanan perpustakaan, termasuk peluncuran Mobil Buku Anak Keliling "Mbak Marsini". Hingga akhir 2024, seluruh layanan perpustakaan telah beroperasi optimal, antara lain:

1. Jambu Carlin (Pinjam Buku Cara Online);
2. Bejanaku (Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku);
3. Pocadi (Pojok Baca Buku Digital) di Mall Pelayanan Publik;
4. Perpustakaan Car Free Day dan layanan perpustakaan keliling.

Sebagai inovasi layanan berbasis digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga meluncurkan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis NIK (Kanda Pusta Berindu) yang terintegrasi dengan Dinas Dukcapil. Program ini memungkinkan anggota perpustakaan daerah otomatis terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional. Selain itu, layanan digital juga diperkuat melalui aplikasi I-Klaten yang menyediakan koleksi e-book dan dapat diakses melalui Playstore oleh anggota e-pustaka.

Jumlah koleksi buku tahun 2024 mencapai 52.511 eksemplar, meningkat 1.134 eksemplar dari tahun sebelumnya, dengan 39.178 judul buku dan didukung oleh 5 pustakawan. Terkait pengembangan perpustakaan desa, hingga 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 156 perpustakaan desandari total 391 desa. Pembinaan ini terus dilakukan setiap tahun guna mendorong pemerataan akses literasi di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

Tabel 2.56
Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

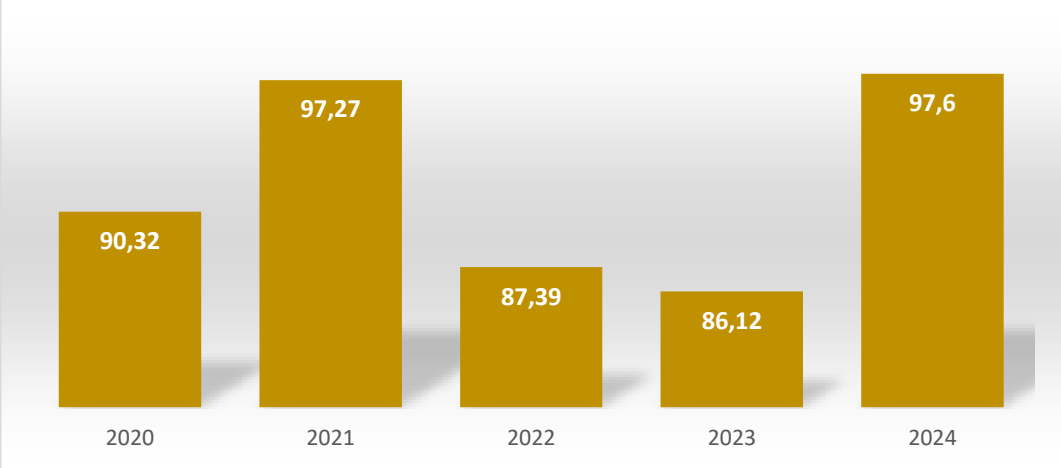
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/ Pengunjung	70.878	11.811	35.434	57.291	67.714
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	49.786	50.156	50.745	51.377	52.511
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	Orang/ Pengunjung	55.154	55.154	51.867	51.785	48.626
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eksemplar	37.457	37.673	38.009	38.348	39.178
Jumlah pengunjung perpustakaan per hari	Orang/ Pengunjung	194	32	97	157	185

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten 2024

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Klaten. Meskipun program perlindungan sosial yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan PPKS, capaian positif mulai terlihat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah PPKS yang menerima bantuan, termasuk melalui program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dukungan lintas sektor, khususnya dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk menekan angka PPKS secara berkelanjutan.

Penanganan PPKS di Kabupaten Klaten menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, sebanyak 86,12% PPKS telah menerima bantuan dan meningkat tajam menjadi 97,6% pada 2024. Capaian ini mencerminkan optimalisasi upaya pemerintah daerah dalam menjangkau kelompok rentan dan memperkuat program pemberdayaan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor dan pendekatan berkelanjutan menjadi kunci terciptanya layanan sosial yang inklusif dan adaptif.



Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kab. Klaten 2024

Gambar 2.64 PPKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020–2024

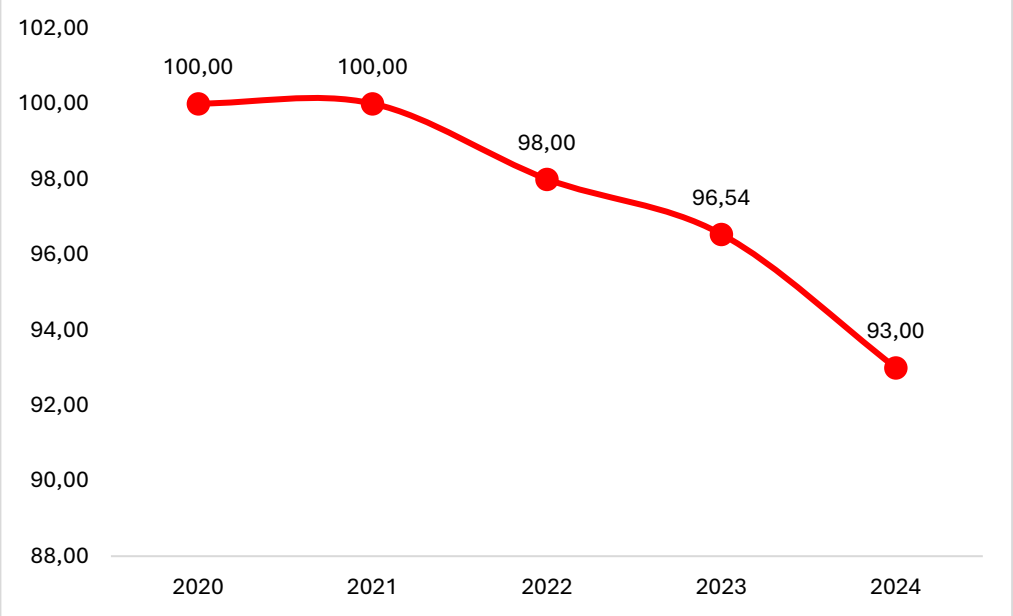
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. PSKS mencakup perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki kapasitas serta kemauan untuk berperan aktif dalam menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberadaan PSKS sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial, khususnya di luar panti rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan pelayanan sosial oleh PSKS terbagi dalam dua kategori, yaitu berbasis lembaga dan non-lembaga. Keduanya berperan dalam

menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, PSKS juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup.

Capaian kinerja PSKS pada tahun 2020, tercatat mencapai 100%, yang menunjukkan optimalnya peran serta dan dukungan dari para pelaku PSKS dalam mendukung agenda kesejahteraan sosial, kondisi ini menurun pada tahun 2024, menjadi 93,00%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, baik dari segi pendanaan, koordinasi antar pihak, kapasitas kelembagaan, maupun dampak dari kondisi sosial ekonomi yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Diperlukan langkah-langkah penguatan kapasitas, peningkatan sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan peran PSKS agar mereka dapat berkontribusi lebih optimal dalam menjawab tantangan sosial yang terus berkembang.

Dengan memperkuat peran PSKS, diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus diwujudkan, serta menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.



Gambar 2.65 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Klaten juga melakukan upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas, tahun 2024 terdapat 1.431 penyandang disabilitas dengan beragam disabilitas yang ada, setelah dilakukan verifikasi dan validasi

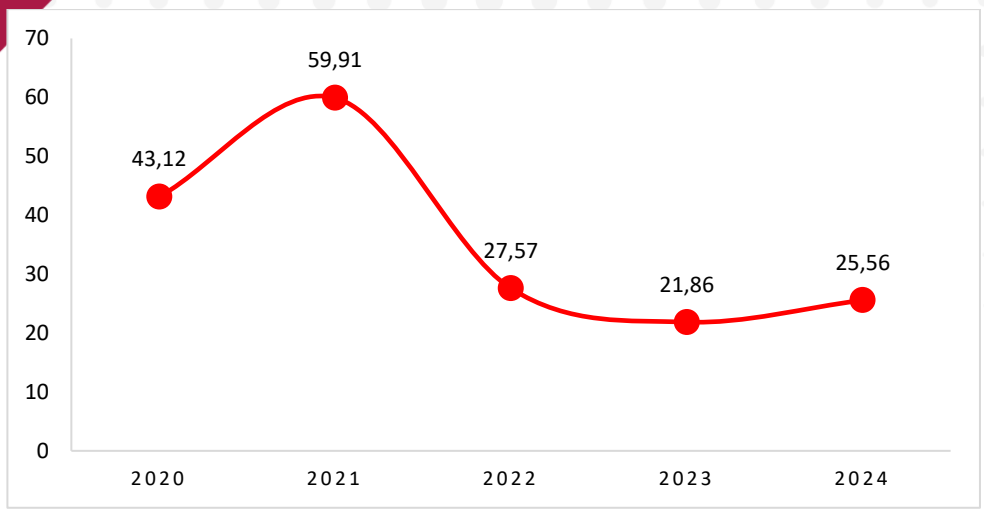
data jumlah ini turun apabila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di tahun 2023 yang tercatat sebanyak 4.953. Upaya penanganan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas. Penanganan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas pun dapat berupa bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan disabilitas berat.

Tabel 2.57
Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp 000)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	173	173	100	592.088.000	493.624.457	83,3
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	440	440	100	888.132.000	740.436.685	83,3
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	850	850	100	1.184.176.000	987.248.914	83,3
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	135	135	100	296.044.000	246.812.228	83,3
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	178	178	100	433.258.000	7.415.744	1,7

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, 2024

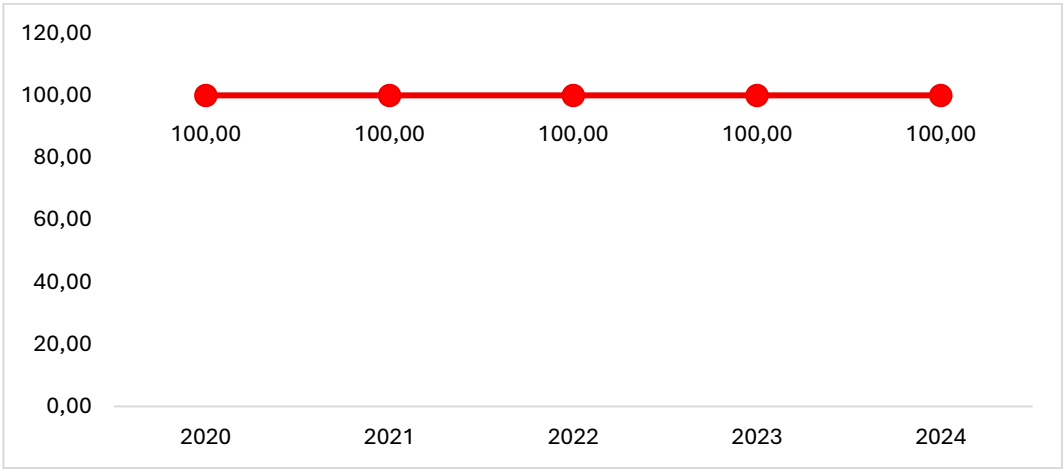
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No. 82 Tahun 2019, setiap pemberi kerja dengan minimal 10 pekerja atau yang membayar upah minimal Rp1.000.000 wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan karyawan melalui pemotongan gaji. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan hak perlindungan sosial bagi seluruh pekerja dan berfungsi seperti asuransi dalam mengalihkan risiko kerja. Tingkat kepesertaan pekerja di Kabupaten Klaten dalam program Jamsostek menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2020 sebesar 43,12%, meningkat menjadi 59,91% di 2021, namun menurun signifikan menjadi 25,56% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.



Sumber: Disperinaker Kab. Klaten 2024

Gambar 2.66 Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, baik dari sisi output, waktu pelaksanaan, maupun pemanfaatannya oleh masyarakat. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara perangkat daerah, dukungan kebijakan yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dan mitra pembangunan lainnya. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan fokus pada kualitas layanan, inovasi program, serta perluasan jangkauan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



Gambar 2.67 Tingkat Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

2.2.5. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan fondasi penting bagi masyarakat Kabupaten Klaten dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua nilai tersebut berkontribusi besar terhadap kelancaran pembangunan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus menumbuhkan kesadaran dalam merawat nilai-nilai luhur Pancasila serta menguatkan karakter kebangsaan.

Kesadaran ini berdampak luas, termasuk dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mencegah perilaku koruptif, mengatasi konflik sosial, serta menekan potensi intoleransi dan radikalisme. Di Kabupaten Klaten, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan telah menunjukkan hasil positif, tercermin dari tingginya tingkat kerukunan, toleransi, saling menghormati dan kepedulian sosial. Hal ini diperkuat melalui hasil survei Indeks Tolerans idan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) yang berada dalam kategori baik, serta capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tergolong kategori sedang.

IPMas sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi sosial budaya masyarakat dan digunakan sebagai tolok ukur capaian pembangunan masyarakat. Sejak tahun 2022, Kabupaten Klaten telah menghitung IPMas secara berkala, dengan tiga dimensi utama: Gotong Royong, Toleransi dan Rasa Aman. Data diperoleh melalui survei langsung kepada masyarakat, guna menghasilkan potret sosial yang representatif.

Pada tahun 2023, hasil IPMas menunjukkan capaian sebagai berikut:

- **Indeks Toleransi**: 0,341 (tertinggi),
- **Indeks Gotong Royong**: 0,341,
- **Indeks Rasa Aman**: 0,219 (terendah).

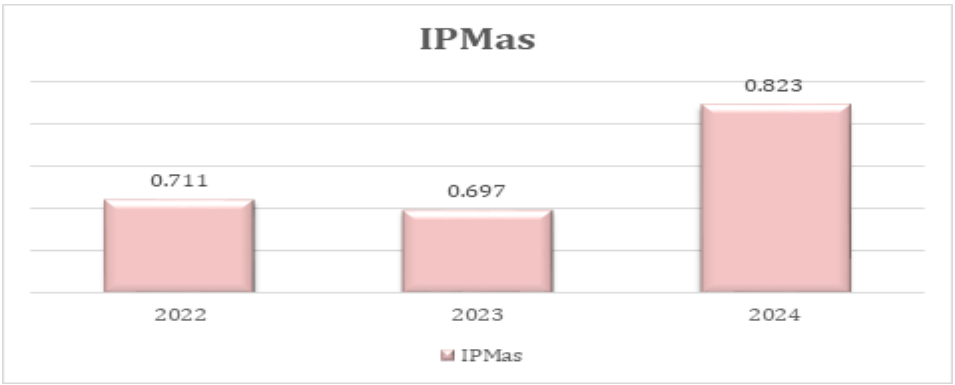
Capaian ini menggambarkan bahwa meskipun nilai-nilai toleransi dan gotong royong sudah cukup kuat, aspek rasa aman masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam intervensi kebijakan pembangunan sosial di Kabupaten Klaten. Adapun capaian Indeks per komponen perhitungan IPMas sebagai berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.68 Nilai Indeks Komponen Perhitungan IPMas Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024

Nilai IPMas di Tahun 2022 sebesar 0,711, terjadi penurun pada tahun 2023 menjadi 0,697 penurunan terjadi dikarenakan responden yang disasar pada tahun 2023 hanya mengarah pada generasi muda (Gen Z) pada tingkat pelajar dan mahasiswa sehingga kurang representatif. Di tahun 2024 telah dilakukan perluasan sasaran survey ke Ketua/ Pengurus RT/ RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pemuda, Relawan Kebencanaan dan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga terjadi peningkatan nilai IPMas menjadi 0,823 di tahun 2024. Nilai interval 0,823 berdasarkan kualitas masyarakat masuk pada nilai dengan kategori Sangat Baik (A).



Sumber : Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.69 Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, wawasan kebangsaan, serta semangat kebudayaan merupakan fondasi penting dalam

mewujudkan masyarakat Kabupaten Klaten yang berkarakter, berdaya saing dan berkepribadian. Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai tersebut berperan sebagai pengikat persatuan, perekat sosial, sekaligus penggerak pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada jati diri dan kearifan lokal masyarakat.

Upaya pemajuan kebudayaan masih menghadapi tantangan. Pada tahun 2023, persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang berhasil dilestarikan baru mencapai 10,09%, menunjukkan bahwa masih banyak potensi budaya yang belum terinventarisasi maupun terkelola dengan baik. Selain itu, partisipasi kelompok kesenian dalam kegiatan pertunjukan budaya juga masih tergolong rendah, yakni sebesar 19,29% kelompok kesenian yang aktif tampil atau menyelenggarakan kegiatan kesenian dalam satu tahun terakhir.

Selain peningkatan dalam penyelenggaraan kegiatan, jumlah karya budaya yang diakui secara resmi juga mengalami perkembangan. Sebanyak 13 karya budaya mendapat penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM dan satu karya budaya direvitalisasi melalui media film berjudul *Anusapati*. Pada tahun yang sama, dua karya budaya dari Kabupaten Klaten, yakni Payung Juwiring dan Putaran Miring Gerabah Melikan, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pemerintah daerah juga mulai membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka melestarikan budaya lokal melalui penyelenggaraan event bersama.

Di bidang pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, jumlah yang dilestarikan meningkat dari 169 pada tahun sebelumnya menjadi 197 lokasi pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan berita acara serah terima dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCP) Jawa Tengah pada tahun 2020, Kabupaten Klaten menerima limpahan pengelolaan terhadap empat situs cagar budaya serta 130 objek yang diduga sebagai cagar budaya. Seluruh objek tersebut kini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan disimpan di Museum Daerah Kabupaten Klaten. Jumlah objek cagar budaya yang dikelola juga meningkat secara signifikan pada tahun 2024.

Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memajukan kebudayaan menunjukkan hasil yang positif melalui peningkatan kegiatan seni budaya, pengakuan terhadap karya budaya lokal, serta pelestarian situs dan objek cagar budaya. Ini menandakan komitmen yang kuat untuk menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus sebagai daya tarik pariwisata yang potensial. Selengkapnya perkembangan indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Seni Budaya	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	7	1	5	40	53
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	132	149	159	169	197
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	1	1	14	22	22
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	3	3	3	3	3
Jumlah event yang dilaksanakan dengan pihak lain	Event	0	2	8	9	6
Jumlah Pembinaan Sanggar seni	kegiatan	0	10	10	47	4
Jumlah Situs Cagar Budaya yang di Kelola Dinas	Situs	0	4	4	4	4
Jumlah Objek Cagar budaya yang di Kelola Dinas	Objek	0	26	87	87	130
Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang ditetapkan	Sertifikat	0	2	4	4	5

Kabupaten Klaten memiliki keuntungan geografis karena terletak diantara Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pusat perpaduan peradaban antar zaman. Beberapa tahun terakhir ini terdapat peningkatan penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Klaten sehingga perlu diupayakan untuk pelestariannya. Sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya, pada tahun 2021 telah dilakukan penetapan Monumen Juang 45 Klaten sesuai dengan SK Bupati Klaten Nomor 430/280 Tahun 2021 sebagai Taman Budaya yang didalamnya terdapat museum sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewadahi pelaku seni (seniman) dalam berkarya dan melaksanakan kegiatan seni budaya serta sebagai tempat penyimpanan, memamerkan dan memberikan edukasi tentang sejarah perkembangan peradaban di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.59
Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan Taman Budaya	Lokasi	0	1	0	0	1
Museum Daerah	Lokasi	0	1	0	0	1

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

Kabupaten Klaten yang banyak melahirkan pelaku seni yang bervariatif dan tersebar seluruh wilayah Kabupaten, diantaranya dari bidang seni Lukis, Seni

Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Tari dan Seni Teater. Data kelompok kesenian tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.60
Data Kelompok Kesenian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Seni Tari Klasik	Grup	6	6	6	6	6
Seni Tari Tradisional	Grup	7	8	8	8	8
Seni Kreasi Baru	Grup	5	5	5	5	5
Seni Tari Modern	Grup	1	1	1	1	1
Seni Patung	Grup	2	2	2	2	2
Seni Lukis	Grup	3	3	3	3	3
Seni Pedalangan	Grup	1	1	1	1	1
Seni Musik Tradisional	Grup	1	1	1	1	1
Seni Karawitan	Grup	24	24	24	24	24
Seni Ketoprak	Grup	10	10	10	10	10
Seni Teater	Grup	1	1	1	1	1
Seni Reog Ponorogo	Grup	0	0	17	17	17

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tradisi Lisan	Grup	42	42	42	42	42
Manuskrip	Grup	27	27	27	27	27
Ritus	Grup	9	9	9	9	9
Pengetahuan Tradisional	Grup	16	16	16	16	16
Teknologi Tradisional	Grup	3	3	3	3	3
Seni	Grup	9	9	9	9	9
Bahasa	Grup	2	2	2	2	2
Permainan Rakyat	Grup	6	6	6	6	6
Olahraga Tradisional	Grup	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di gunakan indikator iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga). iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui

ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Penghitungan atau pengukuran iBangga dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Tabel 2.62
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	N/A	57,02	59,06	65,61	66,13
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	61,8	63	65,5	69,4	65,3

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2023

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas, maka perlu dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T, terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Peserta KB aktif tahun 2024 sebesar 66,55% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 65,88%, yaitu meningkat sebesar 0,67%. Hal ini didorong oleh berbagai intervensi program dan edukasi terhadap semua pihak yang mendukung terlaksananya program Keluarga Berencana.

Gambaran peserta KB baru dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	PUS	Peserta KB baru		Peserta KB Aktif	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2020	195.133	12.348	6,33	138.344	70,94
2021	197.321	13.550	5,15	138.719	70,30
2022	188.158	10.392	5,52	124.337	66,09

Tahun	PUS	Peserta KB baru		Peserta KB Aktif	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2023	176.543	6.751	3,82	116.309	65,88
2024	177.337	N/A	N/A	118.024	66,55

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk rata-rata per tahun dari tahun 2020-2024 fluktuatif karena ada aktivitas konsolidasi bersih data kependudukan di tahun 2021, LPP di tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,27%. Sedangkan rata-rata TFR baru tersedia data sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 1,91, anak per pasangan usia subur ini merupakan capaian yang baik, menandakan bahwa rata-rata tiap keluarga memiliki 1 s/d 2 anak. Untuk Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) belum mengalami penurunan yang berarti positif yaitu semakin kecil peserta KB yang drop out atau keluar dari peserta KB, serta adanya KIE dan pendampingan dari kader kepada PUS yang belum ber-KB. Untuk Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) bersifat tetap yaitu terdapat 1 orang PPKB di setiap desa.

Tabel 2.64
Capian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

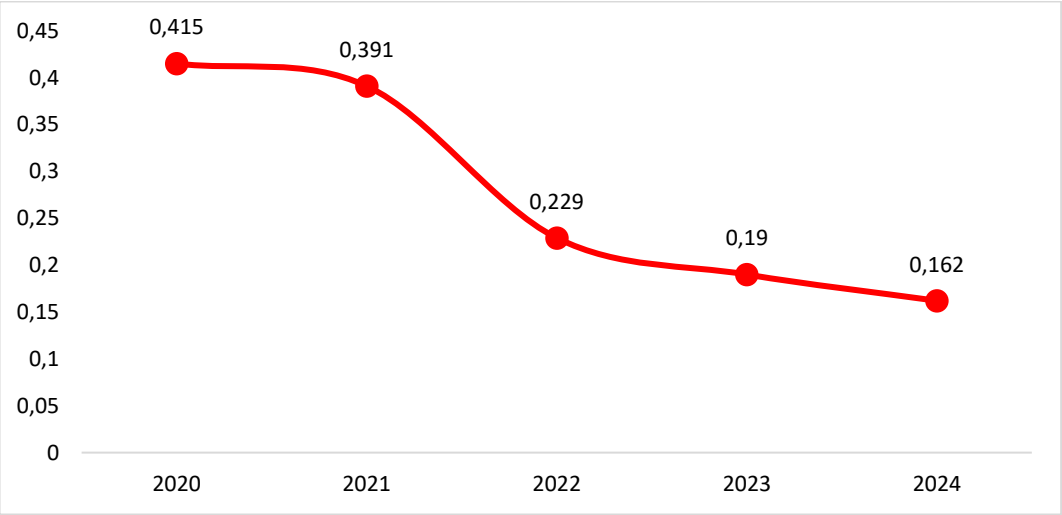
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,54	-4,08	0,80	0,78	0,27
Total Fertility Rate (TFR)	Anak per usia subur	2,10	1,60	2,08	1,95	1,91
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	70,9	70,30	65,14	65,88	66,55
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,95	16,97	17,87	12,54	8,32
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2023.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu indikator nasional untuk mengukur perkembangan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Indeks Ketimpangan Gender juga akan dapat memperlihatkan potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja sehingga dapat lebih jauh memahami tingkat keberhasilan seseorang yang dibatasi oleh

ketimpangan gender. Melalui pemahaman konsep dan cara penghitungan IKG tersebut, diharapkan akan dapat memperkuat upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk mewujudkan kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang inklusif di Indonesia.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Klaten pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren penurunan. Nilai IKG pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,415 dan terus menurun hingga mencapai 0,162 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Klaten semakin berkurang, yang berarti akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin setara.

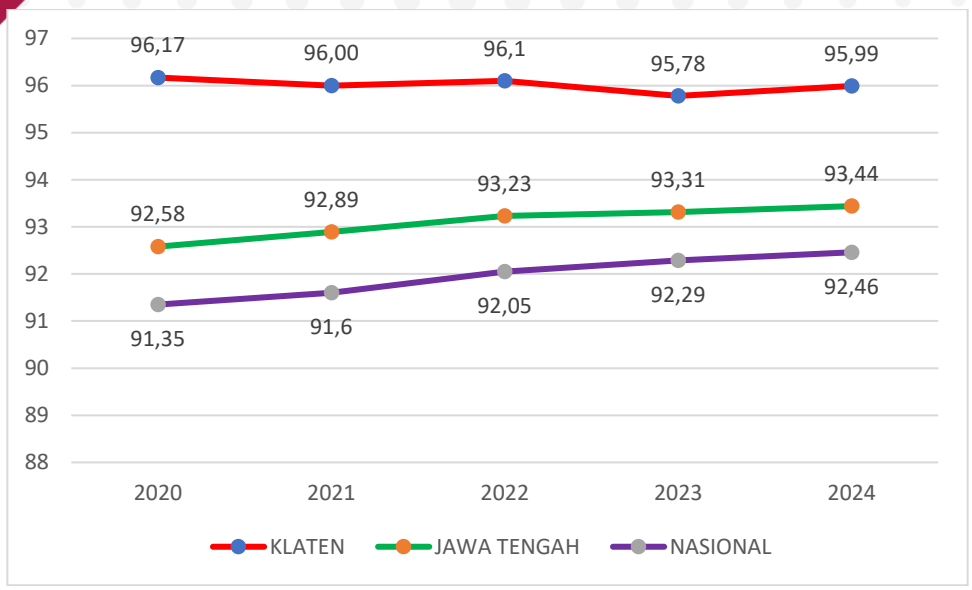


Sumber: BPS Jawa tengah, 2024

Gambar 2.70 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sejalan dengan itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) juga menjadi indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya pembangunan. IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan dan hidup layak sama halnya dengan IPM.

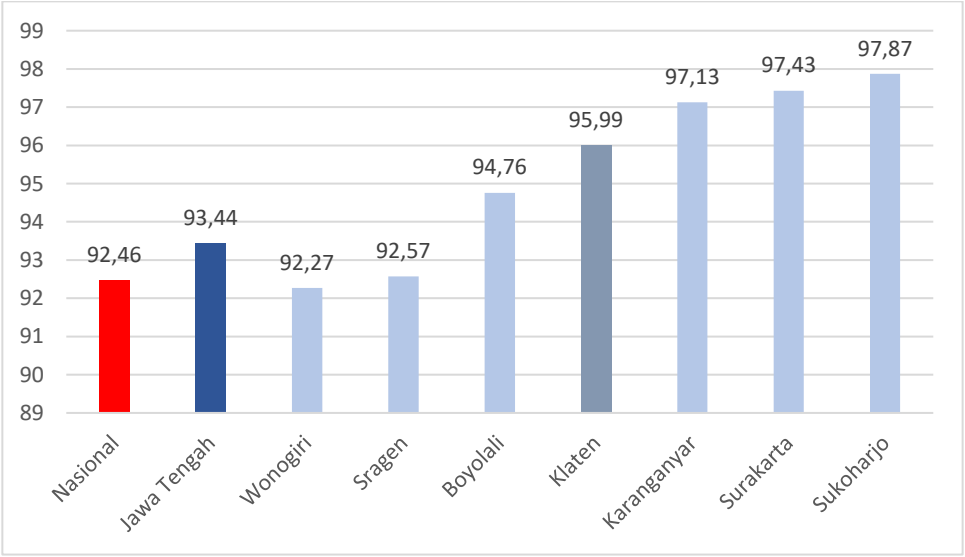
Sejak tahun 2020 hingga 2023, nilai IPG Kabupaten Klaten cenderung menurun. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 96,17 dan menurun menjadi 95,78 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 IPG mulai mengalami peningkatan yakni naik menjadi 95,99 atau meningkat sebesar 0,11 poin dibanding tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.71 Perkembangan IPG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten, IPG Kabupaten Klaten pada tahun 2024 berada diperingkat 4 rendah, diurutan teratas ditempati Kabupaten Sukoharjo, disusul Kabupaten Karanganyar, diikuti Kota Surakarta, selanjutnya Kabupaten Klaten. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPG Kabupaten Klaten pada tahun 2024 masih lebih baik berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



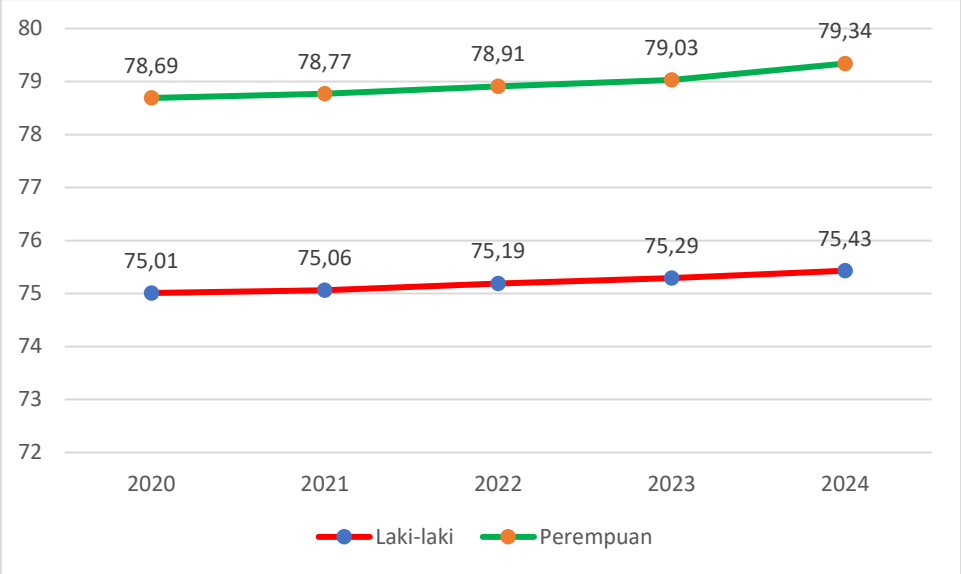
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.72 Posisi Relatif IPG Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan. pada tahun 2024 UHH Perempuan di Kabupaten Klaten telah mencapai 79,34 tahun, sementara laki-laki mencapai 75,43 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan Pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan.

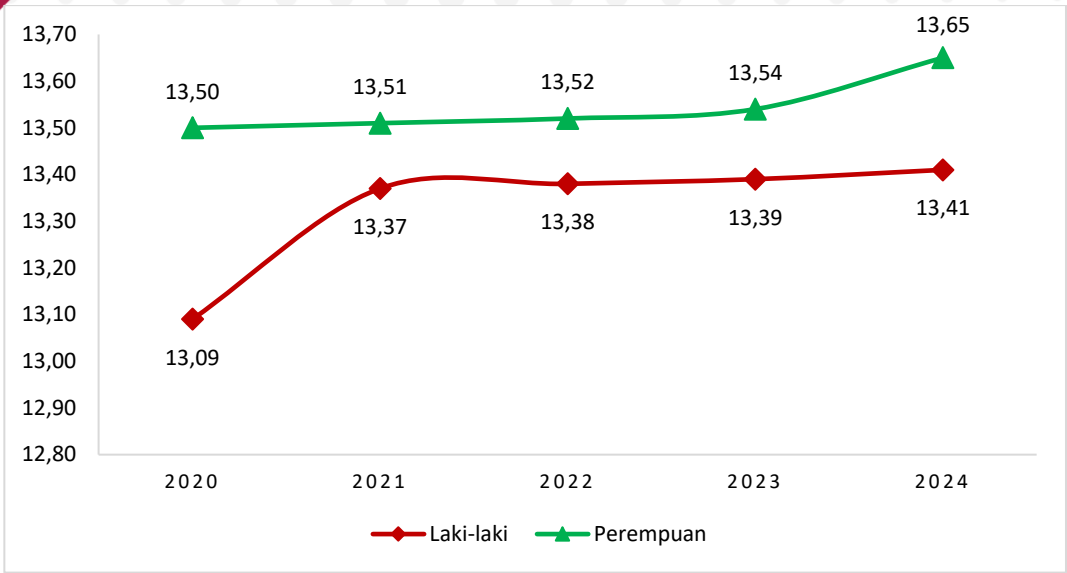


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.73 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing menunjukkan peningkatan. HLS Laki-laki lebih rendah dibanding HLS perempuan. Pada tahun 2024 HLS perempuan adalah 13,65 tahun dan laki-laki sebesar 13,41 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

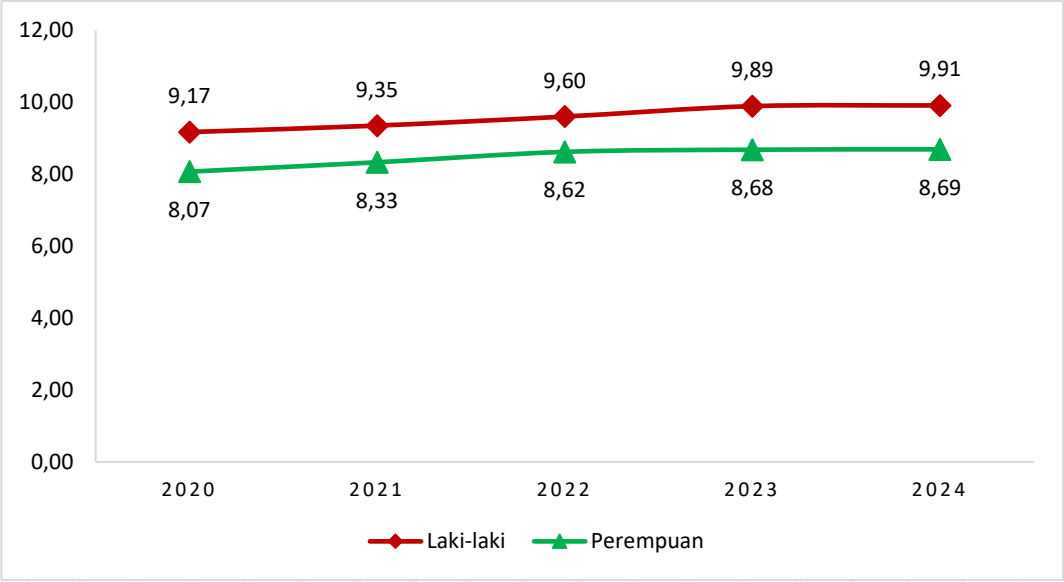


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.74 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Klaten tahun 2024 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 9,91 tahun sedangkan perempuan 8,69 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 2.

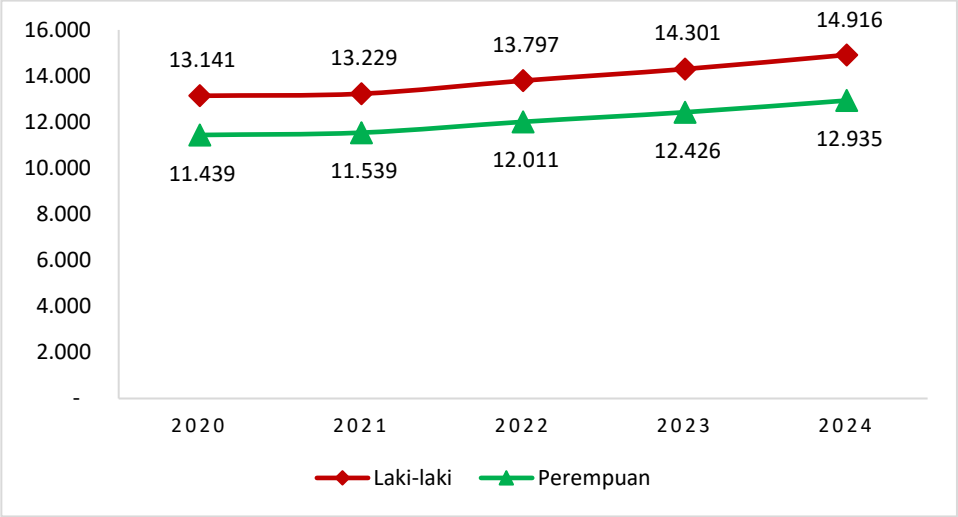


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.75 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

4) Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp12.935, jauh di bawah laki-laki sebesar Rp14916. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki.

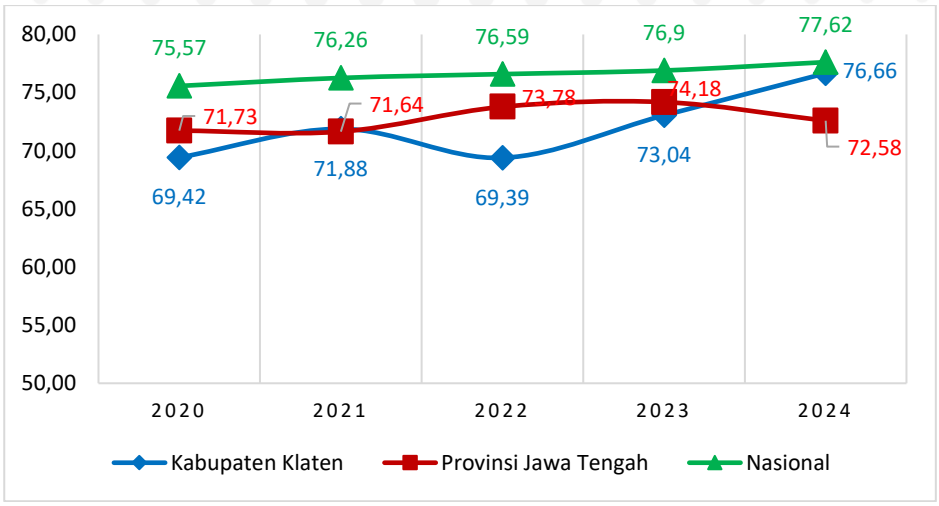


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.76 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

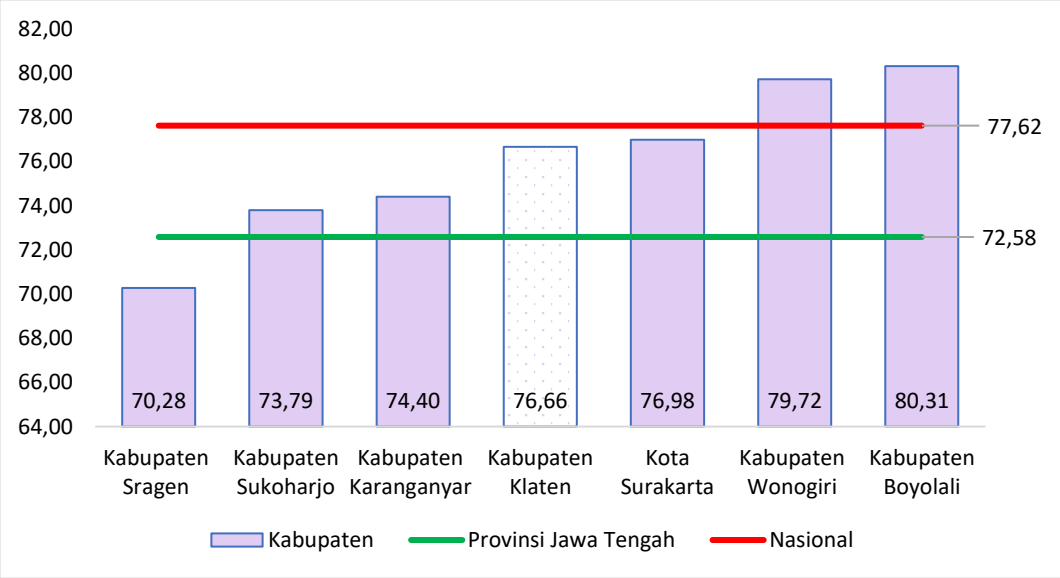
Capaian IDG di Kabupaten Klaten pada tahun 2020–2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, nilainya sebesar 71,73%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 74,18% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 72,58%. Penurunan ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam posisi strategis di lembaga pemerintahan dan pengambilan keputusan, serta tantangan sosial-budaya yang membatasi partisipasi aktif perempuan dalam ranah publik dan politik.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.77 Perkembangan IDG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menempati peringkat tinggi keempat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten. Peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Boyolali, disusul oleh Kabupaten Wonogiri di posisi kedua dan Kota Surakarta di posisi ketiga. Capaian IDG Kabupaten Klaten juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun masih di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Klaten sudah cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan agar setara dengan capaian nasional.



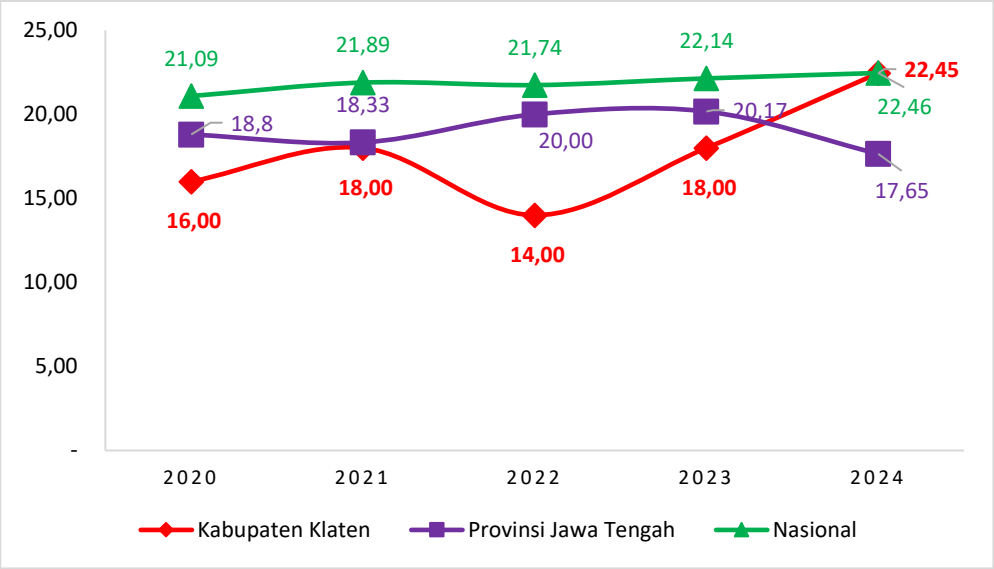
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.78 Posisi Relatif IDG Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Gambaran indikator pembentuk IDG Kabupaten Klaten secara lengkap dijabarkan berikut ini.

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 16,00%, kemudian meningkat menjadi 18,00% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sempat menurun menjadi 14,00%, sebelum kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 22,45%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, semakin diperhatikan dan mendapat ruang yang lebih luas seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender.

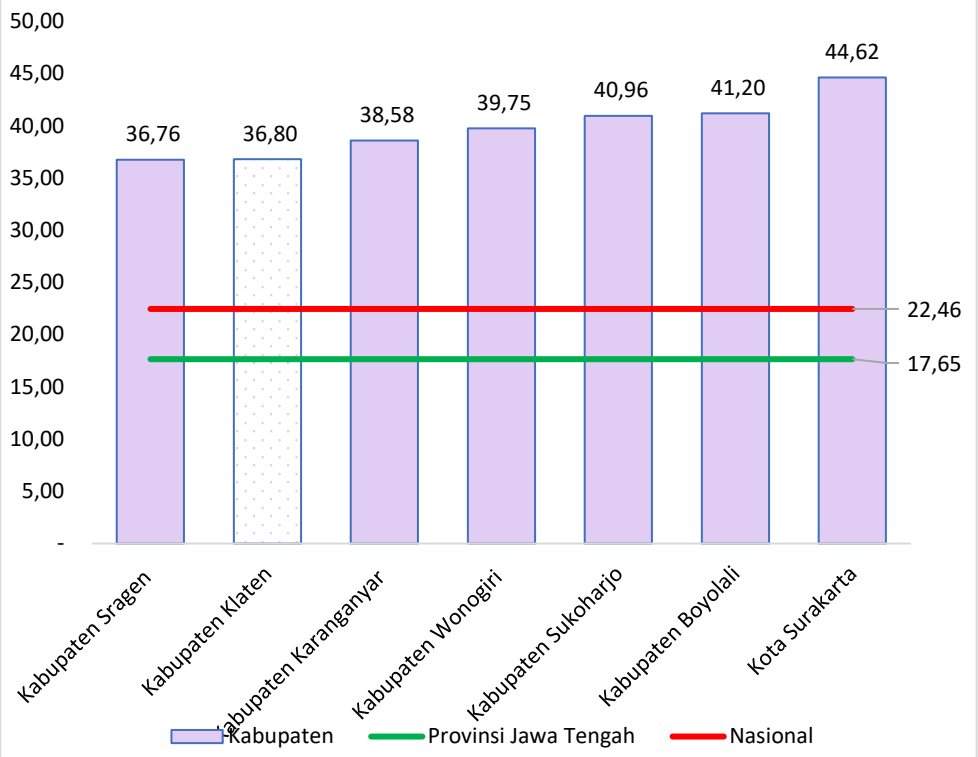


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.79 Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan posisi relatif keterlibatan perempuan di parlemen se-wilayah Subosukawonosraten pada tahun 2024, Kabupaten Klaten menempati peringkat terendah kedua, setelah Kabupaten Sragen yang mencatat keterlibatan perempuan paling rendah, yaitu sebesar 36,80%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata Nasional, keterlibatan perempuan di parlemen

Kabupaten Klaten pada tahun 2024 justru berada di atas kedua rata-rata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regional masih rendah, secara lebih luas keterlibatan perempuan di Klaten sudah menunjukkan kemajuan yang positif dalam konteks perwakilan politik.

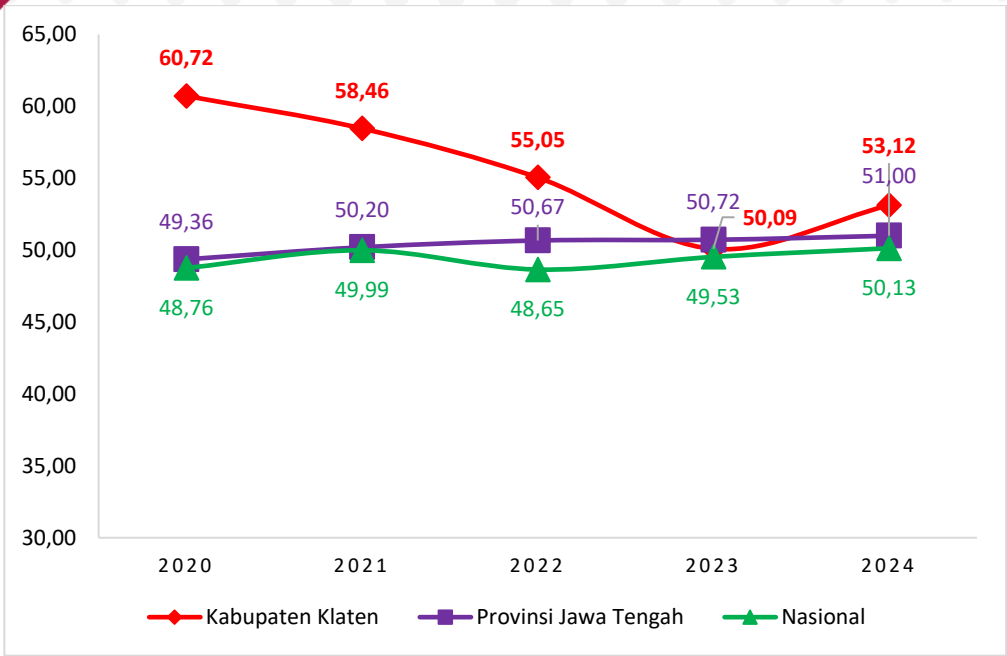


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.80 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

2) Perempuan sebagai tenaga Profesional

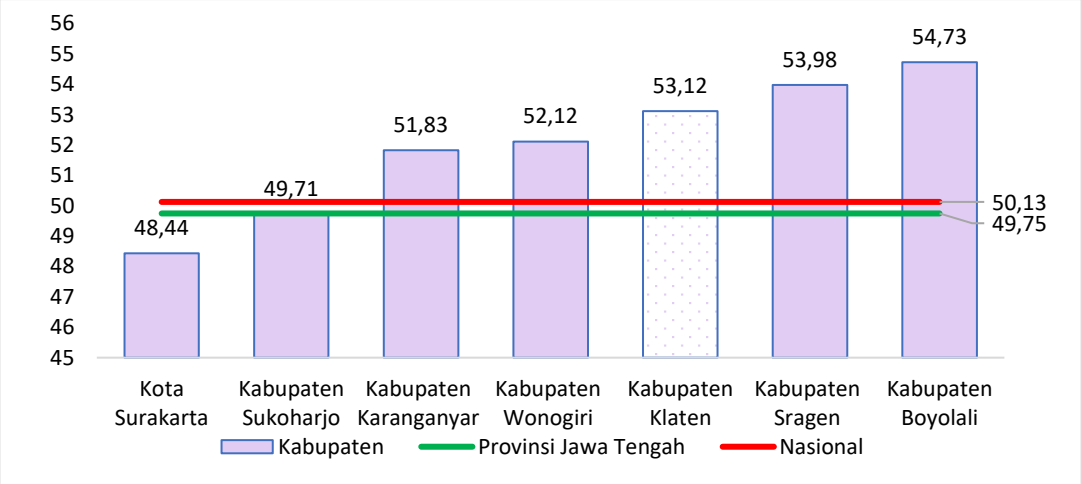
Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, mencapai 60,72%, namun mengalami penurunan bertahap hingga pada tahun 2023 sebesar 50,00%. Pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan menjadi 53,12%. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun perempuan masih mendominasi di sektor profesional, namun kestabilan partisipasinya belum sepenuhnya terjaga dan memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam dunia kerja profesional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.81 Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan posisi relatif perempuan sebagai tenaga profesional di wilayah Subosukawonosraten pada tahun 2024, Kabupaten Klaten menempati peringkat ketiga tertinggi dengan capaian sebesar 53,12%, setelah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Klaten berada di bawah rata-rata provinsi, namun masih di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada ruang untuk peningkatan di tingkat provinsi, Kabupaten Klaten telah menunjukkan kinerja yang cukup baik secara nasional dalam memberdayakan perempuan di sektor profesional.

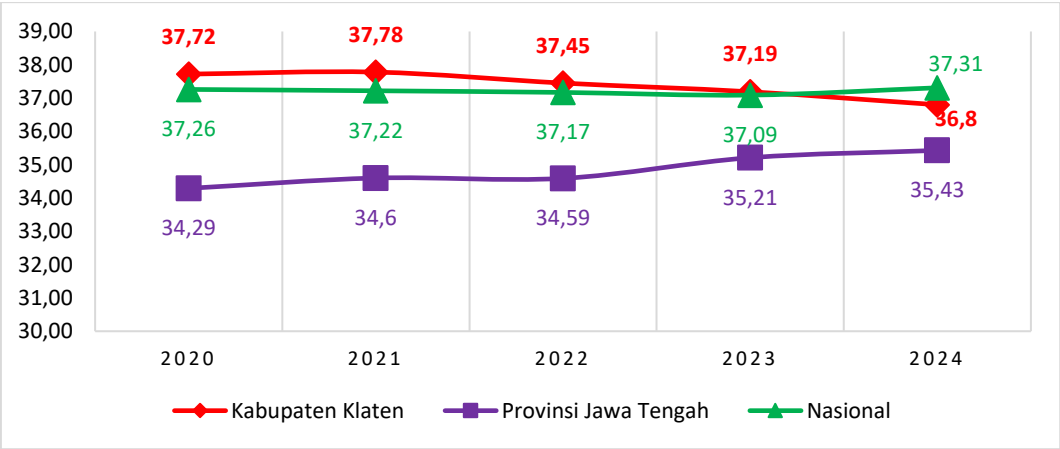


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.82 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

3) Sumbangan Pendapatan Perempuan

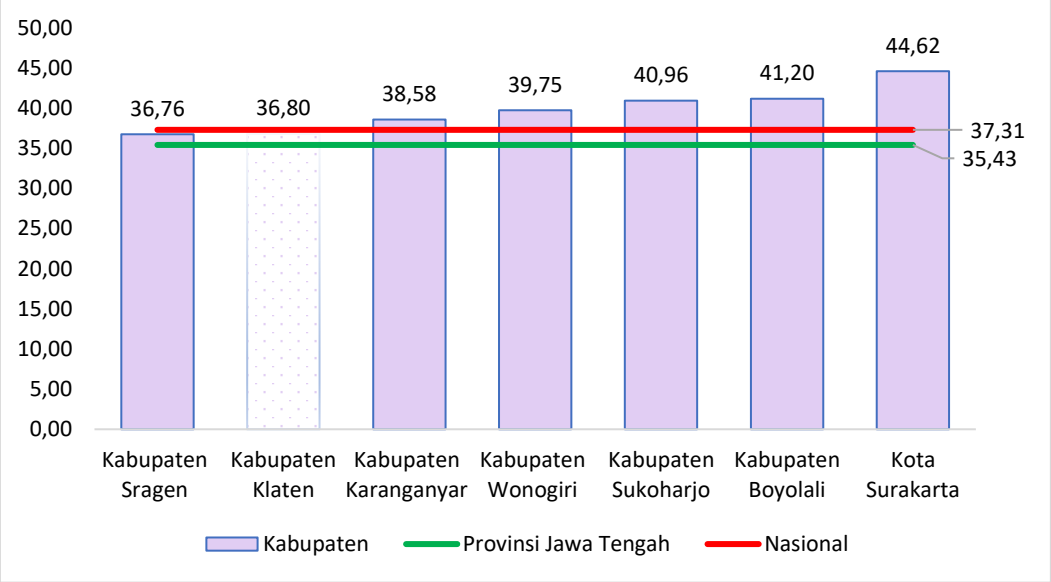
Sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Klaten selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi pendapatan perempuan tercatat sebesar 37,72% dan menurun menjadi 36,80% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi perempuan, baik dari segi akses terhadap pekerjaan yang layak, peluang usaha, maupun tingkat upah yang setara dengan laki-laki. Diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan memperkuat peran mereka dalam pembangunan daerah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.83 Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan posisi relatif sumbangan pendapatan perempuan di wilayah Subosukawonosraten pada tahun 2024, Kabupaten Klaten menempati peringkat terendah kedua, setelah Kabupaten Sragen yang memiliki sumbangan paling rendah. Sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Klaten juga tercatat berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan di Kabupaten Klaten masih perlu ditingkatkan melalui perluasan akses terhadap lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta kebijakan yang mendorong kesetaraan dalam pendapatan antara laki-laki dan perempuan.



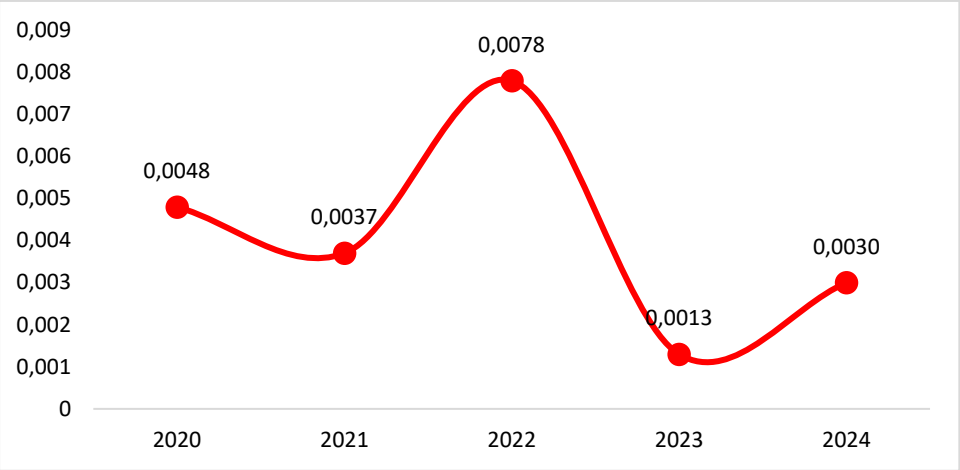
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.84 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kondisi ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap kelompok rentan adalah rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada periode 2020-2024 rasio KDRT menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio tercatat sebesar 0,0048, kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 0,0037, selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,0078 dan selanjutnya menurun tajam pada tahun 2023 menjadi 0,0013, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 0,0030.

Oleh karena itu, upaya preventif dan responsif terhadap kekerasan harus terus ditingkatkan melalui kebijakan yang berpihak pada korban, penguatan sistem perlindungan sosial, serta pemberdayaan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, setara dan mendukung perkembangan setiap anggotanya. Dengan demikian, ketangguhan keluarga akan

terbangundan kualitas sumber daya manusia pun akan meningkat, mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten 2024

Gambar 2.85 Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender dan anak. Pada tahun 2024, tercatat bahwa kasus kekerasan yang paling banyak didampingi dan terlayani adalah kekerasan seksual sebanyak 10 kasus, disusul oleh bentuk kekerasan lainnya sebanyak 9 kasus. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kekerasan tertinggi terjadi pada kelompok usia 13–17 tahun dengan total 12 bentuk kekerasan yang dilaporkan. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan sosial, edukasi keluarga dan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan agar keluarga mampu menjadi lingkungan yang aman, adil dan mendukung perkembangan seluruh anggotanya. Dengan memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesadaran gender dan membangun masyarakat yang inklusif, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.65
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024

Rentang Usia	Jenis Kelamin	Bentuk Kekerasa							Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
0-5 tahun	laki-laki	0	0	0	0	0	1	0	2
	perempuan	0	0	0	0	0	0	1	
6-12 tahun	laki-laki	0	0	0	0	0	1	3	8
	perempuan	0	0	3	0	0	0	1	
13-17 tahun	laki-laki	0	0	2	0	0	0	1	12
	perempuan	0	0	5	0	0	1	3	
Jumlah		**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**3**	**9**	**22**

Sumber : Dissosp3appkb Kabupaten Klaten, 2024

Peran pemuda dalam pembangunan Kabupaten Klaten tercermin melalui meningkatnya jumlah wirausaha muda serta keaktifan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Pada 2024, persentase wirausaha muda pemula mencapai 24%, naik dari 23% pada 2023. Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya peserta pelatihan kewirausahaan. Wirausaha muda diharapkan berkontribusi dalam menekan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kreativitas dan inovasi.

Partisipasi organisasi pemuda juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024, tingkat organisasi yang aktif mencapai 81%, meskipun persentase OKP yang aktif secara kelembagaan masih 17% menurut data KNPI, yang menjadi induk organisasi kepemudaan.

Di bidang olahraga, pembinaan dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan klub dan organisasi masyarakat. Hingga 2024, terdapat 45 cabang olahraga yang dibina, melibatkan 269 atlet muda dari berbagai ajang seperti POPDA Karesidenan, POPDA Provinsi, PEPARPEDA, Bocce, PON dan PEPARNAS. Sebanyak 77 pelatih dari 31 cabor telah tersertifikasi dan 122 atlet berhasil meraih total 154 prestasi. Perkembangan indikator yang termasuk kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	76	81	81	81	81
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif	OKP	19	17	17	17	17
Persentase wirausaha muda pemula	%	19	20	22	23	24
Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	36	39	42	42	42
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	80	64	64	77	77
Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	330	89	148	175	260
Jumlah atlet berprestasi	Orang	211	24	15	127	122
Jumlah prestasi olahraga	Orang	0	14	15	192	154
Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	0	56,5	56,38	37,25	49

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

Beberapa Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi:

1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),
2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda,
3. Organisasi Pemuda Partai Politik,
4. Organisasi Kemahasiswaan,
5. Praja Muda Karana (Pramuka),
6. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA,
7. Karang Taruna,

8. Organisasi Pemuda Kedaerahan,
9. Organisasi Pemuda Profesi,
10. Perkumpulan Pemuda di bidang Seni,
11. Pemuda Pencinta Alam,
12. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
13. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI),
14. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI)
15. Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS)

Organisasi Kepemudaan yang bernaung di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Klaten. KNPI merupakan wadah penyalur aspirasi dari organisasi-organisasi kepemudaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. Sedangkan organisasi kepemudaan yang masuk dalam wadah KNPI Kabupaten Klaten sampai dengan saat ini yaitu:

1. GP Anshor,
2. Fatayat NU,
3. IPNU
4. IPPNU,
5. Nasyiatul Aisyiyah,
6. Pemuda Muhammadiyah,
7. Ikatan Pelajar Muhammadiyah,
8. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah:
9. Pemuda LDII,
10. Pemuda Katolik,
11. Pemuda Gereja,
12. Orang Muda Katolik,
13. Pemuda Hindu,
14. Pemuda Pancasila,
15. Pemuda Panca Marga,
16. Patria Buddis,
17. FKPPI.

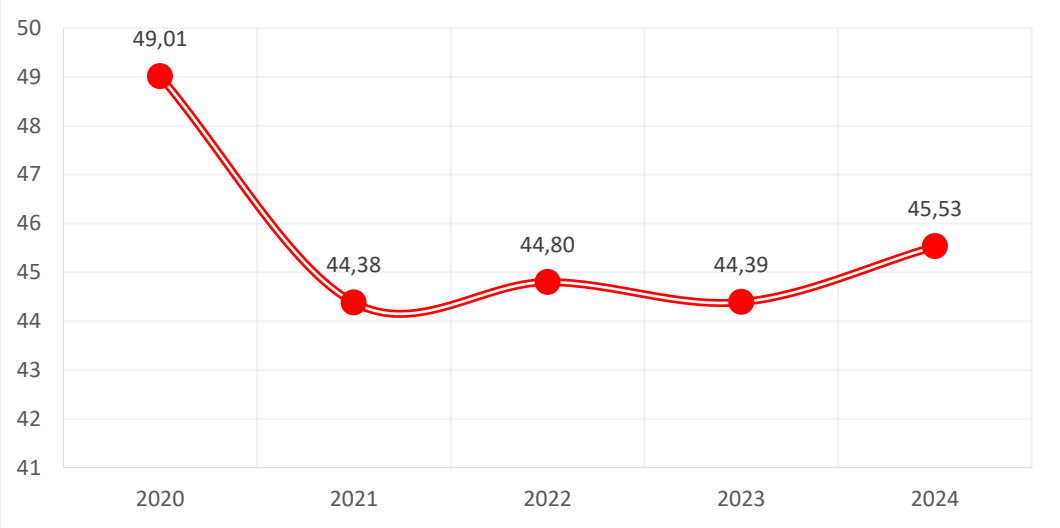
2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah merupakan faktor kunci dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Klaten, daya saing sumber daya manusia (SDM) memainkan peranan yang sangat penting, karena kualitas SDM yang unggul dapat mendorong perkembangan sektor-sektor strategis dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Dalam upaya meningkatkan daya saing ini, perhatian terhadap faktor-faktor demografis juga menjadi sangat relevan, salah satunya adalah Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio).

Pada tahun 2024, Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Klaten sebesar 45,53%, dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 45 hingga 46 orang penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Terlihat bahwa pada

tahun 2024 penduduk usia kerja di Klaten masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Secara keseluruhan, selama kurun waktu 2020-2024 rasio ketergantungan Kabupaten Klaten mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 sebesar 49,01% menurun menjadi 45,53% ditahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.86 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 5 sektor lapangan usaha. Dari kelima lapangan pekerjaan tersebut, industri pengolahan dan perdagangan yang menyerap pekerja terbanyak. Sementara, pertanian menempati urutan ketiga, selanjutnya jasa kemasyarakatan dan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2022 lapangan pekerjaan industri pengolahan mengalami penurunan menjadi 33,01% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 34,80%. Selain itu, sektor perdagangan juga mengalami penurunan dari 31,19% menjadi 30,81% pada tahun 2022. Dari semua sektor usaha yang mengalami peningkatan adalah jasa kemasyarakatan dari 11,36% pada tahun 2021 menjadi 13,22% pada tahun 2022.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 5 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri pengolahan (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan konstruksi), perdagangan (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel), jasa kemasyarakatan (transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan serta jasa kesehatan) dan lainnya.

Dari kelima lapangan pekerjaan tersebut, industri pengolahan dan perdagangan yang menyerap pekerja terbanyak. Sementara, pertanian menempati urutan ketiga, selanjutnya jasa kemasyarakatan dan lapangan usaha

lainnya. Pada tahun 2022 lapangan pekerjaan industri pengolahan mengalami penurunan menjadi 33,01% tahun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 34,80%. Selain itu, sektor perdagangan juga mengalami penurunan dari 31,19% menjadi 30,81% pada tahun 2022. Dari semua sektor usaha yang mengalami peningkatan adalah jasa kemasyarakatan dari 11,36% pada tahun 2021 menjadi 13,22% pada tahun 2022.

Tabel 2.67
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Pekerjaan	Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	18,93	17,03	18,01	17,16	N/A
Industri Pengolahan	24,72	34,80	33,01	34,82	N/A
Perdagangan	29,42	31,19	30,81	-	-
Jasa	12,81	11,63	13,22	48.03	N/A
Lainnya	14,12	5,35	4,82	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Perkembangan status pekerjaan selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi selama lima terakhir. Status pekerjaan buruh/karyawan dan pekerja bebas cukup tinggi di tahun 2018 sebesar 52,15%, terus menurun hingga menjadi 47,81% di tahun 2020. Kemudian kembali meningkat ke angka 53,28% di tahun 2021 dan 50,43% di tahun 2022. Penduduk yang berusaha sendiri di tahun 2018 yaitu sebesar 21,35%, lalu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 23,86%. Namun, pada tahun 2021 kembali turun menjadi 22,94% dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 23,90%.

Tabel 2.68
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan	Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	23,86	22,94	23,90	28,99	N/A
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	14,37	11,52	11,85	8,86	N/A
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,17	2,75	2,19	2,85	N/A
Buruh/ karyawan dan pekerja bebas	36,92	39,6	37,59	45,80	N/A
Pekerja Bebas Pertanian	2,74	5,1	8,83	2,28	N/A
Pekerja Bebas Non Pertanian	8,15	8,58	4,01	3,72	N/A
Pekerja keluarga	10,8	9,5	11,63	7,49	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

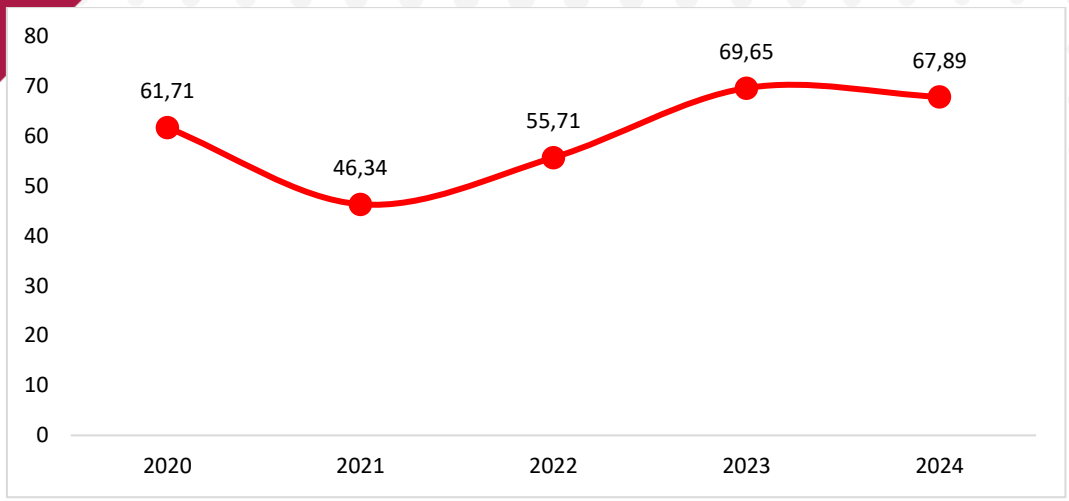
2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Penyelenggaraan inovasi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Inovasi tidak hanya menjadi instrumen pelengkap, melainkan pendorong utama dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien dan adaptif terhadap perubahan.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan Pelayanan Publik, (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (c) peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah dilaksanakan mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif Inovasi Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Klaten pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk indikator tujuan indeks Inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah (IID).

IID Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 61,71%, mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar ditahun 2021 sebesar 46,34%. Hal ini disebabkan oleh masuknya Pandemi wabah Covid Corona dan adanya kebijakan Pemerintah tentang PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar). Selanjutnya untuk tahun 2022, Tahun 2023 tingkat capaian indek inovasi mengalami pertumbuhan seiring dengan berkurangnya Wabah Covid-19 dan mulai dibukanya kembali kegiatan di berbagai bidang.

Tahun 2024 capaian indeks Inovasi mengalami penurunan kembali sebesar 1,76%, dari 69,65% pada tahun 2023 turun menjadi 67,89% di tahun 2024. Pada tahun 2024 Kabupaten Klaten menyusun dan mengirimkan 218 Inovasi ke Kemendagri, namun nilai tingkat kematangan inovasinya relatif lebih kecil dibandingkan pada tahun 2023, dikarenakan tidak dapat memenuhi semua isian indikator penilaian.



Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.87 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Perkembangan penerapan atau implementasi inovasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori Sangat tinggi (>90%). Perkembangan ini mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan target 90% inovasi yang terapkan tercapai 90,85% yang artinya target terpenuhi 100%.

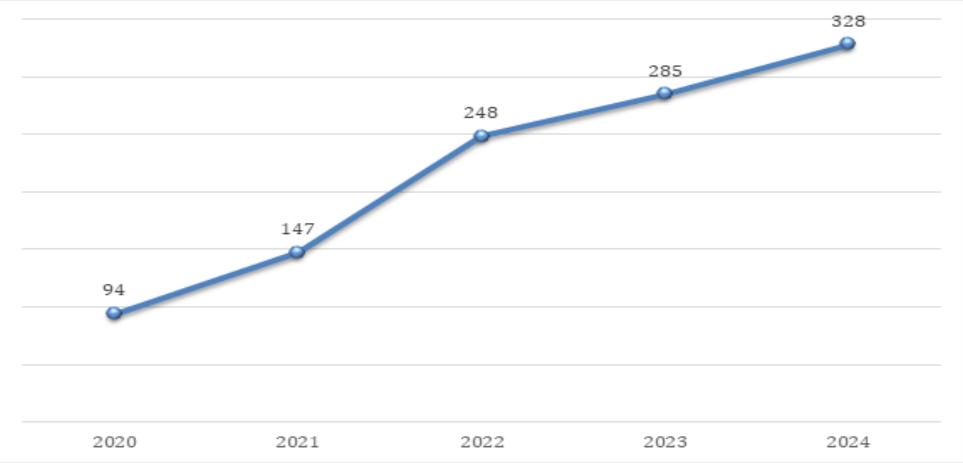
Perkembangan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di tahun 2020-2024 menunjukkan angka fluktuatif dengan rata-rata lebih dari 60% hasil kajian/penelitian telah diimplementasikan atau dimanfaatkan sebagai masukan penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah period 2021-2026. Sedangkan Capaian pertumbuhan inovasi perangkat daerah selama tahun 2020 s/d tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang melambat dikarenakan banyak inovasi yang sudah tidak layak untuk diterapkan kembali. Perlu upaya keras untuk meningkatkan persentase pemanfaatan hasil penelitian salah satunya dengan meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian/perguruan tinggi yang berkompeten. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan inovasi diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan Perangkat Daerah untuk selalu berinovasi dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	53,85	66,67	58,33	54,50	65
Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	10,59	56,38	68,71	14,92	15,09

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Peningkatan inovasi yang cukup signifikan di lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan.dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang begitu banyak, perangkat daerah perlu menyusun strategi dengan mengedepankan inovasi dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptekin) dalam rangka peningkatan kualitas layanan maupun peningkatan kinerja perangkat daerah. Di samping itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Klaten Inovasi Award (KIA), sebagai penghargaan kepada OPD, Masyarakat, akademisi dan Insan Inovator di Kabupaten Klaten. Dengan adanya penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah telah memotivasi daerah untuk berlomba-lomba melakukan inovasi baik inovasi di bidang tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan akhir daripada inovasi ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.



Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.88 Inovasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kemampuan ekonomi suatu daerah merupakan fondasi penting dalam mendorong daya saing daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, kapasitas ekonomi tidak hanya diukur dari besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari seberapa besar ekonomi daerah tersebut mampu menciptakan daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku usaha, investor, serta tenaga kerja untuk hadir, berkembang dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Kemampuan ekonomi suatu daerah juga secara langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya dapat dilihat melalui pola konsumsi rumah tangga. Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/ pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana masyarakat

mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan makanan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 cenderung menurun, di mana pada tahun 2024 menurun menjadi 41,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2020 sebesar 50,14%, meningkat menjadi 58,49% di tahun 2024.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Rata–rata Pengeluaran Penduduk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Makanan	49,86	49,92	48,85	43,65	41,51
2. Non Makanan	50,14	50,08	51,15	56,35	58,49
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi, maka dilakukan langkah-langkah antisipasi, seperti penguatan dalam pelaksanaan operasi pasar di beberapa daerah yang terkendala pasokan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencegah disparitas harga antar kabupaten/kota. Langkah tersebut sebagai Upaya dalam menjaga stok kebutuhan pokok bagi Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten sudah cukup baik dalam menekan disparitas harga, capaiannya di tahun 2023 sebesar 1,01.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari banyaknya jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Capaian rasio kewirausahaan tahun 2023 sebesar 67,18%.

Pemerintah terus berusaha mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu strateginya adalah membentuk dan memberdayakan koperasi dan UMKM. Karena UMKM sangat stretegis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberdaan koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha memiliki peranan penting. Koperasi dan UMKM diyakini mampu menopang ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi wahana penciptaan lapangan kerja. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB capaiannya meningkat dari 0,99% ditahun 2019 menjadi 1,24% ditahun 2023.

Tabel 2.71
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Disparitas Harga	%	1,09	1,07	1,04	1,01	12,80
Rasio Kewirausahaan	%	3,00	2,56	2,20	2,88	3,30
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,31	1,35	1,22	1,24	1,13

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2023

Beberapa upaya dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain dengan melakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya, pembinaan bagi UMKM dalam bentuk fasilitasi pameran untuk produk UMKM baik di tingkat lokal dalam kabupaten maupun pengiriman UMKM untuk mengikuti pameran ditingkat nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cinta produk lokal, menerapkan Sistem Penjualan Sistem Online, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha. Hal ini juga mendukung percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan amanat Inpres No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selain itu juga gerakan cinta produk lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten.

Pada tahun 2024, perkembangan toko swalayan di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya persaingan dengan platform perdagangan daring (online marketplace), perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja secara online, serta tantangan ekonomi pasca pandemi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, tingginya biaya operasional dan persyaratan perizinan juga menjadi kendala bagi keberlangsungan usaha toko swalayan di daerah. Pada tahun 2024 terdapat 400 toko swalayan dan terjadi penurunan sebanyak 376 toko swalayan atau 48,5% jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat 776 toko swalayan.

Tabel 2.72
Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2020–2024

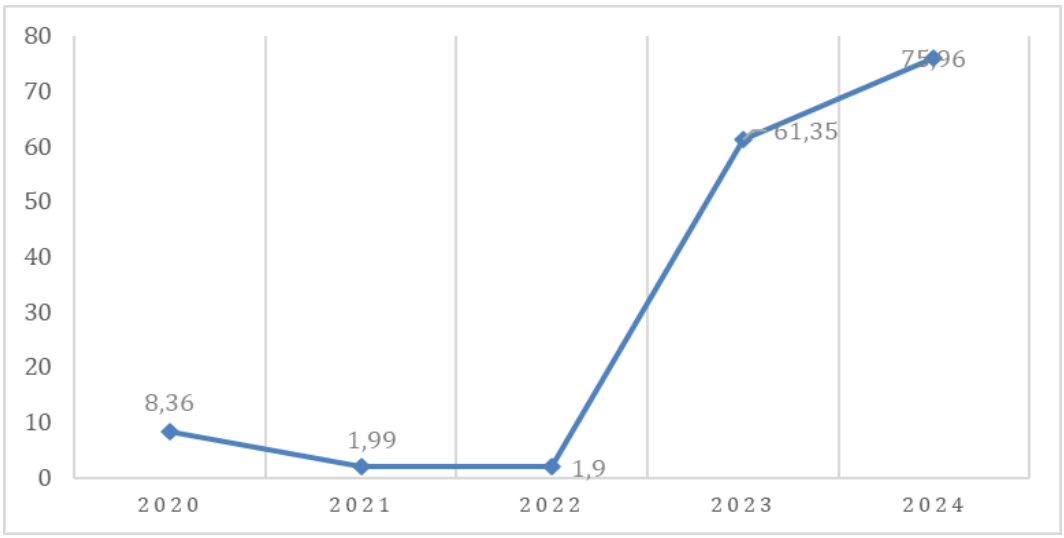
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Toko Swalayan	604	705	759	776	400
Pasar Umum/Rakyat	85	85	91	91	91
Pasar Hewan	12	12	10	10	10
Pasar Buah	1	1	1	1	1

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar Sepeda	4	4	1	1	2
Pasar Ikan	0	0	0	-	-
Lain-Lain / Pasar Burung	3	3	2	1	1
Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	**710**	**811**	**865**	**881**	**506**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2023

Cakupan bina kelompok usaha informal menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 8,36% selanjutnya di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,99% kemudian menunjukkan peningkatan hingga di tahun 2024 menjadi 75,06%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah dalam memberdayakan pelaku usaha informal melalui berbagai program pendampingan, pelatihan dan akses permodalan.

.



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.89 Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Konsep ekonomi syariah memberikan alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, fokus pada keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat. Sistem ini juga menjaga aspek spiritualitas dalam kegiatan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan dan krisis keuangan. Sebagai upaya pendukung pengembangan ekonomi syariah, Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM baik usaha mikro maupun industri kecil, terutama pada sektor makanan olahan, obat herbal dan air minum dalam kemasan. Pendampingan ini tidak hanya fokus pada

peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada fasilitasi sertifikat halal sebagai bentuk jaminan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 11.013 kelompok usaha (mikro, kecil dan menengah) di Kabupaten Klaten telah memperoleh sertifikat halal. Capaian ini menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar halal dalam memperluas akses pasar, baik domestik maupun global.

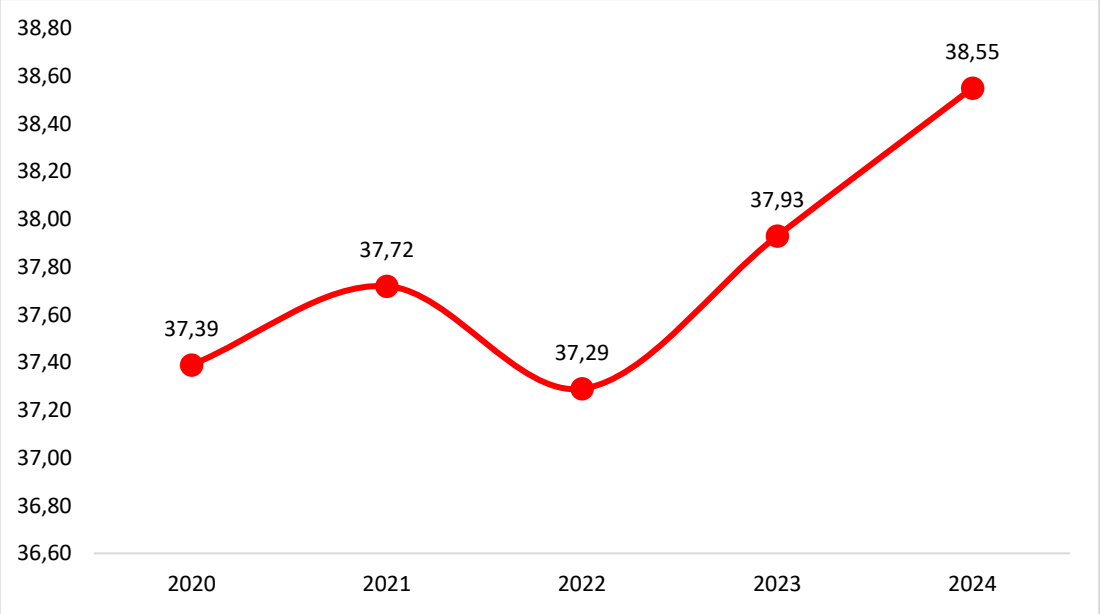
Berdasarkan klasifikasi menurut jenis usaha, sertifikasi halal didominasi oleh kelompok makanan dan minuman, dengan rincian hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 10.824 usaha mikro dan 143 usaha kecil, sementara jumlah sertifikasi halal pada kelompok jasa dan obat relatif masih terbatas. Komposisi ini menunjukkan bahwa sektor makanan/ minuman masih menjadi prioritas utama sekaligus potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Klaten, namun di sisi lain juga membuka peluang untuk memperluas cakupan sertifikasi pada sektor jasa dan obat herbal di masa mendatang.

Tabel 2.73
Jumlah Produk UMKM Yang Bersertifikasi Halal Kabupaten Klaten
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kelompok Usaha			Kelompok Menurut Jenis								
				Jasa			Makanan/Minuman			0bat		
	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah
2020	10	6	0	0	1	0	10	1	0		4	0
2021	42	1	1	2	0	1	39	1	0	1	0	0
2022	595	2	0	2	0	0	579	2	0	14	0	0
2023	7.079	116	0	5	0	0	7069	116	0	5	0	0
2024	3.095	22	0	7	1	0	3086	21	0	2	0	0
2025	42	2	0	1	0	0	41	2	0		0	0
Jumlah	**10.863**	**149**	**1**	**17**	**2**	**1**	**10.824**	**143**	**0**	**22**	**4**	**0**

Sumber : Kementerian Agama Kab. Klaten, 2025, di olah

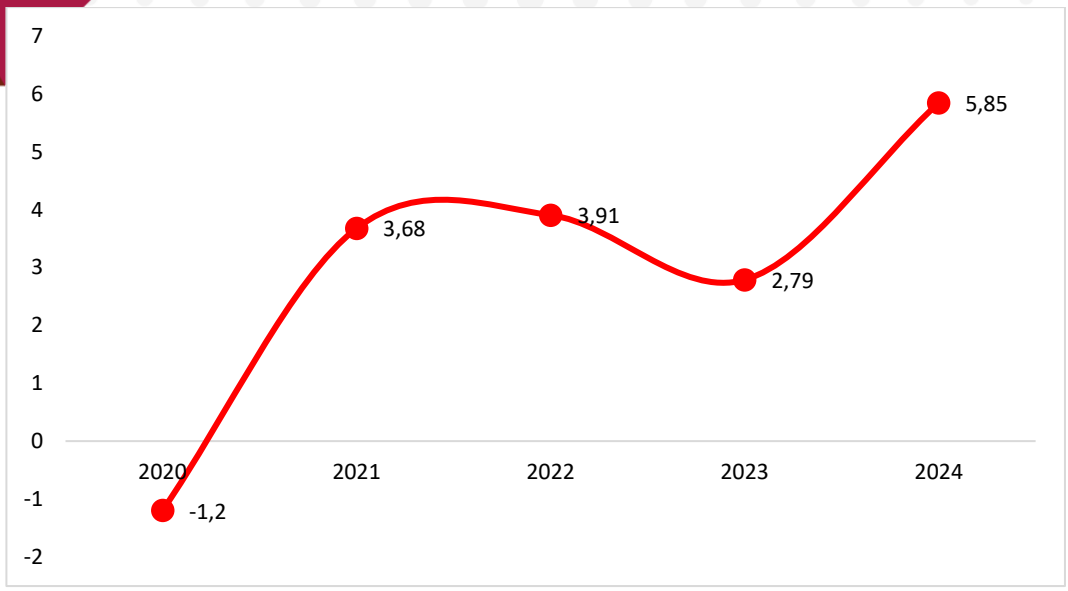
Peran sektor industri pengolahan masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Klaten. Hal ini terlihat dari rasio PDRB sektor industri pengolahan yang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 37,39%, meningkat menjadi 37,72% pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 37,29% pada tahun 2022, sektor ini kembali menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 38,55% pada tahun 2024. Data ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.



Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.90 Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pertumbuhan sektor lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Klaten dari tahun 2020-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam menjadi -1,20% dampak adanya pandemi Covid19. Sedangkan pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 3,68% dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,91%. Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan karena pelaku usaha yang sebelumnya dari buruh pabrik kembali bekerja di pabrik dan meninggalkan usahanya. Untuk sektor lapangan usaha industri pengolahan saat ini sudah mulai bangkit dan pulih kembali walaupun belum kembali pulih secara normal jika di banding sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Guna mendukung percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di sektor industri untuk mendukung Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui gerakan cinta produk lokal, maka perlu adanya peran pemerintah untuk memfasilitasi pelaku IKM untuk meningkatkan daya saing produk yang berorientasi ekspor. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten, sebab dalam hal konstribusi terhadap PDRB kabupaten, sektor industri memiliki peran cukup besar. Perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan konstribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024.



Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.91 Pertumbuhan Industri Kabupaten KlatenTahun 2020-2024

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2023 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi. Industri besar dan sedang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri dimana selama tahun 2019-2023 yang mengalami peningkatan adalah perusahaan industri tekstil, sedangkan industri lainnya cenderung stabil. Industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Karanganom, Polanharjo dan Delanggu. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan furniture terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen dan Klaten Utara.

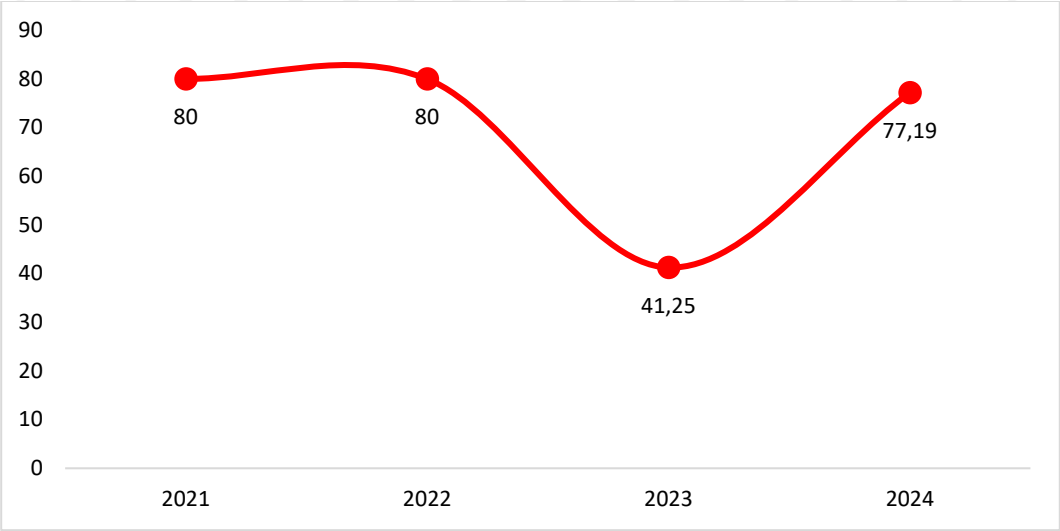
Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui Pola Klaster, dimana sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/225 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten yang terdiri dari:

Klaster	Lokasi
Klaster Batik	Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, Prambanan, Wedi, Pedan dan Manisrenggo
Klaster Lurik	Kecamatan Pedan, Cawas, Bayat, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo
Klaster Konveksi	Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Wonosari, Karanganom, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah,

Klaster	Lokasi
	Klaten Selatan, Kemalang, Karangnongko, Delanggu, Polanharjo dan Ceper
Klaster Logam	Kecamatan Ceper, Delanggu, Karanganom, Wonosari, Polanharjo dan Jatinom
Klaster Keramik	Kecamatan Wedi dan Bayat
Klaster Makanan Olahan	Kecamatan Wedi, Jogonalan, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kemalang, Prambanan, Gantiwarno, Karanganom, Ceper, Bayat, Cawas dan Jatinom
Klaster Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang
Klaster Mebel	Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring,
Klaster Desa Wisata	Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Jogonalan, Manisrenggo, Kalikotes, Wonosari, Trucuk, Karangdowo, Karanganom, Jatinom, Klaten Selatan, Juwiring dan Ceper
Klaster Handycraft	Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten Selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko, Polanharjo, Karanganom, Jogonalan, Ngawen dan Prambanan
Klaster Minapolitan	Kecamatan Karanganom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal merujuk pada penggunaan data terkait investasi untuk berbagai tujuan strategis, seperti pengambilan keputusan, perencanaan ekonomi, serta pengembangan dan promosi investasi. Pengelolaan dan pemanfaatan data investasi yang baik memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan investasi nasional. Pemahaman yang mendalam tentang potensi data serta tata kelola yang efektif, suatu daerah dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk menarik, mempertahankan dan mengembangkan investasi. Capaian pemanfaatan data dan informasi penanaman modal di Kabupaten Klaten, selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2021, capaian berada pada tingkat yang cukup tinggi yakni 80%, mencerminkan kinerja yang baik dalam pengelolaan data investasi serta pemanfaatannya dalam mendukung perencanaan dan promosi penanaman modal, selanjutnya terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 41,25%, kemudian tahun 2024, capaian kembali mengalami peningkatan menjadi 77,19%, menunjukkan adanya perbaikan kinerja serta pemulihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data penanaman modal. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan terus meningkatkan integrasi data lintas sektor, memperkuat digitalisasi layanan dan memastikan bahwa setiap kebijakan investasi berbasis pada informasi yang

akurat dan terkini, demi menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.



Gambar 2.92 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024

Sedangkan untuk penguatan daya saing daerah, diharapkan dapat membranding Produk Unggulan Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 31/050/1 Tahun 2024 tentang produk unggulan daerah kabupaten klaten meliputi batik, lurik, konveksi, tembakau asepan dan rajangan, mebel, keramik, logam, beras rojolele, *handycraft* dan makanan olahan. Untuk produk lurik, logam dan tembakau selain memenuhi kebutuhan di daerah sekitar, juga memenuhi permintaan di tingkat nasional. Sedangkan untuk produk batik, mebel, handycraft, keramik, konveksi dan makanan olahan, selain memenuhi permintaan kebutuhan di tingkat nasional sudah mampu merambah ke pasar ekspor, antara lain ke Belanda, Amerika, Eropa, Cina, Jepang, Kanada, Australia dan lain-lain

Pertumbuhan industri menengah dan besar cukup signifikan, dengan beberapa sektor menjadi unggulan. Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA) serta Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, baik dari segi PDRB maupun penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan Industri Menengah dan Besar pada tahun 2024 sebanyak 147 unit, dengan nilai investasi sebesar Rp. 594.717.641,-. Sedangkan untuk industri kecil pada Tahun 2024 sebanyak 35.106 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.002.155.334,-

Tabel 2.74
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kelompok Industri			Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
I	**INDUSTRI BESAR / MENENGAH**					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)					
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan					
Sub Jumlah I		2020	139	12.845	588.829.348	2.899.096.664
		2021	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
		2022	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
		2023	145	12.717	588.829.348	2.899.396.664
		2024	147	12844	594.717.641	2.928.390.630
II	**INDUSTRI KECIL**					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)					
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan					
Sub Jumlah II		2020	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
		2021	33.657	137.028	962.436.429	4.014.945.555
		2022	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
		2023	34.759	141.571	992.233.004	4.139.180.129
		2024	35.106	142.986	1.002.155.334	4.180.571.930
Jumlah I + II		2020	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
		2021	33.796	149.745	1.554.209.924	6.928.537.702
		2022	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
		2023	34.904	154.288	1.581.062.352	7.038.576.793
		2024	35.253	155.830	1.596.872.975	7.108.962.560

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

Untuk meningkatkan produk UMKM agar mampu berdaya saing dan naik kelas yang berorientasi ekspor serta mendukung program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, perlu adanya dukungan kepada pelaku usaha agar mampu tumbuh dan berkembang serta dapat membuka lapangan usaha yang dapat memberikan dampak positif dan mampu menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian masyarakat, maka diperlukan adanya dukungan melalui fasilitasi, kolaborasi, inovasi dan kreatifitas yang dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat perlu adanya gerakan Cinta Produk Klaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten. Sedangkan produk IKM terfasilitasi sertifikasi Tingkat

Komitmen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana data untuk tahun 2023-2024sebagai berikut :

Tabel 2.75
Data IKM yang sudah bersertifikat TKDN Kabupaten Klaten Tahun 2023-2024

No	Tahun	Jumlah IKM terfasilitasi Sertifikasi TKDN	Jumlah IKM Sertifikasi TKDN Secara Mandiri	Jumlah
1	2023	35	19	54
2	2024	47	24	71

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

Tantangan dalam pembangunan daerah juga berkaitan erat dengan kualitas angkatan kerja. Kualitas dan karakteristik angkatan kerja memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi makro. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Klaten periode 2020-2024 bersifat fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2022, dari 68,66% pada tahun 2023 menurun menjadi 66,71% pada tahun berikutnya, sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan kembali sebesar 74,24. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Klaten mayoritas berasal dari luar daerah, sehingga meski usia produktif penduduk Kabupaten Klaten meningkat, namun jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten masih rendah karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga banyak lowongan kerja yang belum terisi, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi penempatan tenaga kerja lewat sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara) ataupun penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pencari kerja.Gambaran perkembangan indikator ketenagakerjaan Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

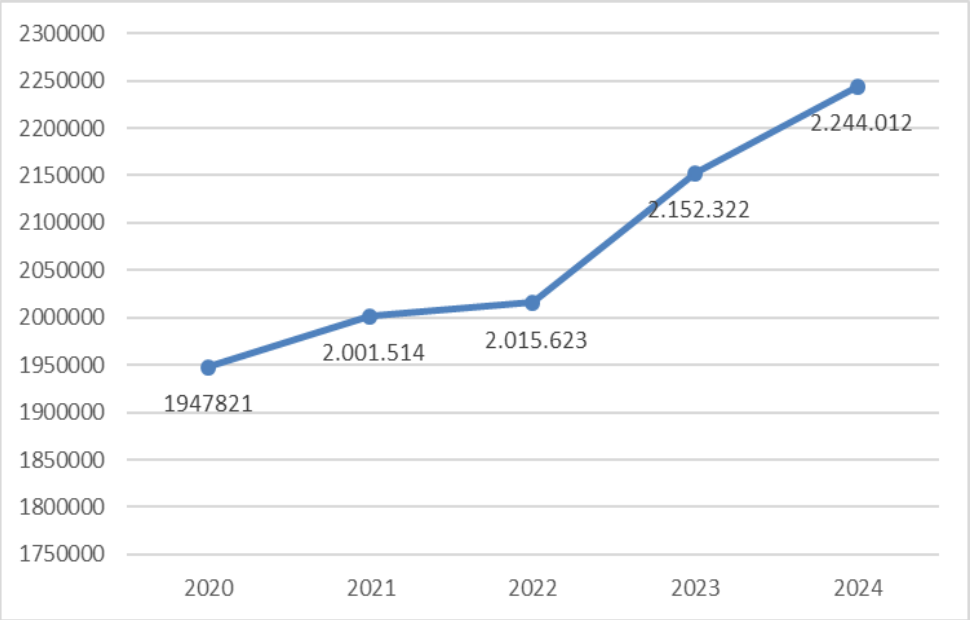
Tabel 2.76
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,79	86,94	68,66	66,71	74,24
Tingkat pengangguran terbuka	%	5,46	5,48	4,31	4,20	3,97
Rasio penduduk yang bekerja	%	0,96	0,76	95,69	95,80	95,80

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

Selaras dengan upaya peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2020–2024 juga menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023. UMK Klaten mengalami kenaikan dari Rp 2.015.623 pada tahun 2022, menjadi Rp 2.152.322

pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi Rp 2.244.012 pada tahun 2024. Kenaikan UMK ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja secara bertahap.

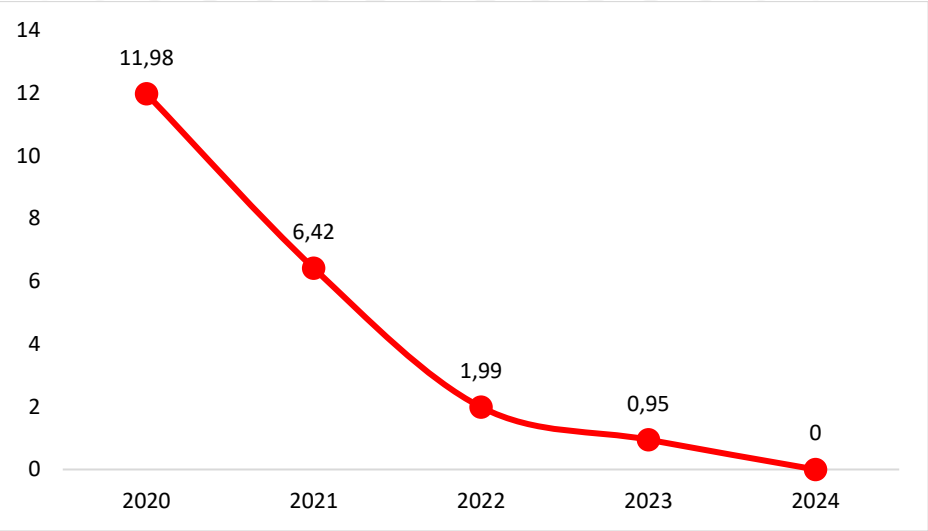


Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.93 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dalam sebuah perusahaan. baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Hal tersebut disebabkan karena masih ada perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

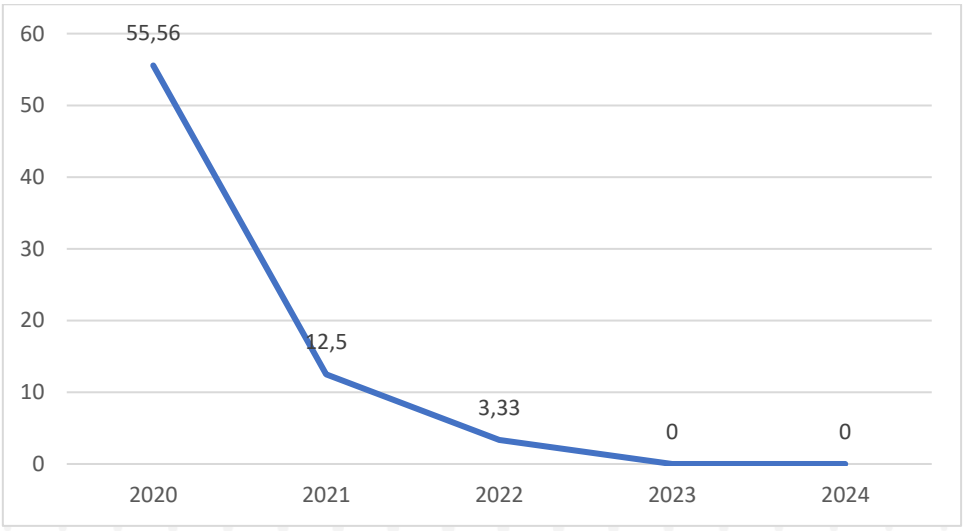
Perkembangan angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan yang cukup tajam. Tahun 2020 angka sengketa pengusaha-pekerja sebesar 11,98% turun menjadi 0,95 di tahun 2023 kemudian 0% di tahun 2024. Hal ini disebabkan ada beberapa sengketa pengusaha-pekerja ada sebagian yang bisa diselesaikan di perusahaan masing-masing.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.94 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 2020-2024

Salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melalui Perjanjian Bersama (PB), yang menjadi solusi damai antara pihak pengusaha dan pekerja agar hubungan kerja tetap berjalan secara harmonis. Perkembangan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama pada tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 2020 sebesar 55,56% kemudian menurun hingga ditahun 2024 menjadi 0% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sengketa telah dapat diselesaikan di tingkat internal perusahaan tanpa perlu diformalkan melalui PB, sekaligus mencerminkan meningkatnya efektivitas komunikasi antara pengusaha dan pekerja.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.95 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2020-2024

Di samping penguatan sektor industri dan ketenagakerjaan, sektor pariwisata juga memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Pariwisata merupakan sektor riil yang memberikan keunggulan kompetitif dalam pengembangan potensi wilayah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pengembangan pariwisata, masyarakat memiliki peluang untuk terlibat secara aktif dalam peningkatan ekonomi rumah tangga, baik melalui penyediaan jasa, produk lokal, maupun kegiatan pendukung lainnya. Selain itu, pembangunan sektor pariwisata turut mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memanfaatkan potensi lokal.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 214.811 orang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan masyarakat yang berwisata semakin meningkat termasuk arus wisatawan mancanegara juga semakin meningkat. Untuk wisatawan nusantara didominasi pada objek wisata air atau umbul yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan serta wisata minat khusus seperti river tubing, tracking dan wisata alam, sedangkan wisatawan mancanegara didominasi berkunjung ke Candi Prambanan, Candi Plaosan, Candi Sojiwan dan Ekowisata Kalitalang. Kenaikan jumlah pengunjung disebabkan adanya penataan di beberapa objek wisata dan penambahan atraksi, amenitas maupun aksesibilitas di daya tarik wisata serta peran serta desa wisata yang semakin berkembang maupun stakeholder pariwisata yang selalu mendorong kemajuan pariwisata di daerah.

Tabel 2.77
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pariwisata
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	22.199	463	60.461	163.882	214.811
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,40	3,54	3,76	3,76	3,73

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, 2024

Sedangkan di sisi lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 1 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Ke depan perlu ada penambahan amenitas khususnya untuk jasa akomodasi (Hotel dan Homestay/pondok wisata), tempat oleh-oleh, jasa makanan dan minuman, pengembangan obyek wisata baru dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), supaya jumlah

kunjungan wisata semakin meningkat serta lama kunjungan wisatawan pun semakin lama. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar. Untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 1.000.- s/d Rp.1.200.000.- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.1.500.000.- s/d Rp.2.500.000,-.

Tabel 2.78
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman)
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	1.000	1.500
2021	82	1.632.085	463	1	1	1.000	1.500
2022	82	4.777.338	60.461	1	1	1.000	1.500
2023	1122	6.309.870	163.882	1	1	1.000	1.500
2024	129	6.647.805	214.811	1	1	1.000	1.500

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, 2024

Sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Pertanian tanaman pangan, khususnya padi dan kedelai, masih menjadi sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam sektor ini cukup kompleks, antara lain berkurangnya luas lahan pertanian, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti wereng batang coklat (WBC), tikus, penggerek batang dan sundep, serta fenomena perubahan iklim yang mempengaruhi siklus tanam dan hasil panen. Kondisi ini juga diperparah dengan ancaman puso (gagal panen) yang berpengaruh langsung terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan, di antaranya melalui pengembangan dan penggunaan benih unggul, serta penerapan teknologi terapan di bidang pertanian guna meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.

Namun demikian, produksi kedelai di Kabupaten Klaten pada periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Produksi terendah tercatat pada tahun 2024 sebesar 155 ston. Hal ini disebabkan oleh harga kedelai yang tidak kompetitif dan kurang menguntungkan bagi petani, sehingga sebagian petani memilih beralih menanam kacang hijau yang dinilai lebih menjanjikan. Selain itu, kondisi iklim ekstrem seperti El Nino turut memberikan dampak signifikan terhadap produksi, menyebabkan udara terlalu kering, ukuran polong menjadi kecil, bahkan sebagian tanaman mati atau tidak menghasilkan. Meskipun serangan OPT pada kedelai masih dalam kategori rendah, faktor-faktor tersebut

secara keseluruhan tetap mempengaruhi tingkat provitas dan minat petani dalam membudidayakan komoditas ini.

Tabel 2.79
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	459.044	62,19	480.024	65,48	475.550	65,26	481.599	65	440.037	64,34
2	Jagung	81.981	79,66	88.538	80,73	99.663	99,63	99.310	94,37	96.042	86,69
3	Kedelai	7.026	19,76	1.998	15,67	2.636	21,06	1.779	15,79	1155	11,53
4	Kacang Tanah	1.816	14,01	1.087	15,23	1.297	20,56	904	13,29	732	14,99
5	Kacang Hijau	81	11,31	1.542	14,79	1.558	14,47	1.419	11,78	1.134	15,28
6	Ubi Kayu	9.370	261,80	15.155	242,32	23.816	282,28	22.823	300,75	15.744	255,25
7	Ubi Jalar	297	103,67	266	136,65	118	91,50	620	156,87	172	123,12

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2024

Perkebunan merupakan salah satu sektor penting dalam urusan pertanian di Kabupaten Klaten, dengan komoditas utama yang meliputi tembakau rajangan, tembakau asepan, tembakau Vorstenland, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa deres, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada dan tebu.

Namun, khusus untuk tembakau Vorstenland, dalam lima tahun terakhir sudah tidak lagi diproduksi. Sementara itu, tembakau rajangan menjadi komoditas andalan dan unggulan, dengan produksi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 2.038,14 ton. Sejak itu, produksi tembakau rajangan mengalami penurunan setiap tahun hingga mencapai 531 ton pada tahun 2024.Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan komoditas tembakau, baik dari segi luas lahan, minat petani, maupun kondisi iklim, yang memerlukan perhatian khusus agar keberlanjutan produksi dapat terjaga.

Tabel 2.80
Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Tembakau Rajangan	2.038,13	12,8	1.567,45	14.08	1.601,16	12	824,73	9,19	531	1,26
2	Tembakau Asepan	1.487,00	10,3	1.270,83	16.12	1.307,68	10	1.985,33	9,05	1.799	1,86
3	Tembakau Vorstenland	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4	Kelapa Dalam	4.322,36	28,356	4.322,36	13,58	3.905,50	13,58	4.200,26	14,39	4.000,252	13,70
5	Kelapa Hibrida	29,94	10,14	29,94	10,14	35,93	11,22	55,25	16,4	28,82	10,2
6	Kelapa Deres	78,84	33,14	78,84	33,14	80,84	34	80,84	34	25,52	16,6
7	Kopi Arabica	162,20	10	145,98	10	169,25	10,05	169,25	10.05	165,20	9,05

No	Jenis Komoditas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
8	Kopi Robusta	12,94	13	36,46	13	36,70	13	38,94	13-10	13,20	8,28
9	Cengkeh	149,75	4,8	237,73	4,8	29,95	5,83	127,50	4,10	122,20	3,24
10	Lada	17,70	11,7	19,50	11,7	19,50	13,31	17,70	8,85	17	29,41
11	Tebu	2.902,92	10,92	2.882,67	11,77	2.484,93	6,08	4.680	7,28	1.786,62	39,10

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2024

Populasi sapi potong, sapi perah dan kambing di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi selama 2020–2024, bahkan cenderung menurun hingga mencapai 64.876 ekor pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan ternak oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi Covid-19, turunnya permintaan, pembatasan layanan Inseminasi Buatan (IB), serta dampak penyakit seperti PMK sejak 2022 dan LSD sejak 2023. Upaya penanganan yang dilakukan meliputi sosialisasi, penyuluhan, pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi pada ternak, khususnya di wilayah dengan kasus suspek.

Tabel 2.81
Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	104.352	104.162	70.559	67.081	64.876
2	Sapi Perah	6.847	6.783	4.618	3.663	2.820
3	Kambing	105.782	108.932	97.114	99.996	77.357
4	Domba	61.527	51.278	49.947	56.000	35.547
5	Ayam Bukan Ras	2.109.668	2.789.638	3.531.257	3.569.441	2.726.653
6	Ayam Pedaging	2.489.800	3.268.129	3.867.566	3.778.864	4.490.292
7	Ayam Petelur	900.342	784.621	804.568	817.950	713.014
8	Itik	397.012	213.877	267.528	292.893	337.886
9	Burung Puyuh	363.563	327.829	427.829	432.921	334.839

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2024

Produksi susu di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.933.433 liter, mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 3.101.024 liter. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sebagian sapi perah, sehingga berdampak langsung pada volume produksi. Hal serupa juga terjadi pada produksi daging, yang pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan total produksi sebesar 2.657.205 kg. Sementara itu, berbeda dengan tren produksi susu dan daging, produksi telur justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah produksi telur mencapai 159.251.009 butir, menunjukkan adanya perkembangan positif pada subsektor peternakan unggas di tengah tantangan penyakit ternak lainnya.

Tabel 2.82
Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Susu (Liter)	4.456.373	4.630.000	4.547.617	3.101.024	1.933.433
2	Daging (Kg)	2.649.317	2.267.819	2.170.370	2.639.000	2.657.205
3	Telur (Butir)*	154.567.112	123.875.702	135.356.469	126.192.000	159.251.009

Sumber: DKPP Kab. Klaten, 2024

Kondisi geografis Kabupaten Klaten dengan sumber mata air yang berlimpah memberikan kontribusi penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat, baik melalui aktivitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan, dengan capaian rata-rata sebesar 498 ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi perikanan budidaya juga terus meningkat dari 27.603,83 ton pada tahun 2020 menjadi 30.641 ton pada tahun 2024. Lonjakan produksi tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai program penguatan sektor perikanan di Kabupaten Klaten, yang meliputi peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, pengembangan sarana dan prasarana produksi, serta perluasan akses pasar. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki potensi besar sebagai penopang ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Klaten.

Selain manfaat ekonomi, pengembangan produksi perikanan juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Konsumsi ikan berkontribusi pada pencegahan stunting, karena ikan merupakan sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang tinggi, termasuk omega-3 yang penting bagi perkembangan otak anak pada masa pertumbuhan. Data menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 20,28 kg/kapita/tahun pada 2020 menjadi 24,62 kg/kapita/tahun pada 2024. Peningkatan ini menggambarkan adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat menuju pola makan yang lebih sehat sekaligus mendukung pencapaian program perbaikan gizi nasional.

Tabel 2.83
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan Budidaya	Ton	27.603,83	30.109,31	30.300,49	30.461,15	30.641
Produksi perikanan tangkap	Ton	183,8	311,82	372,87	370,45	498
Angka Konsumsi ikan	Kg/Kapita/ Tahun	20,28	21,88	23,35	23,42	24,62

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Penerapan ekonomi hijau menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi Kabupaten Klaten menuju pertumbuhan yang tinggi namun tetap berkelanjutan. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH). Ekonomi hijau menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta praktik pertanian dan industri yang rendah emisi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, membuka lapangan kerja ramah lingkungan (*green jobs*), menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah perubahan iklim.

Beberapa langkah yang telah dilakukan Kabupaten Klaten dalam penerapan ekonomi hijau antara lain:

- Penggunaan panel surya untuk penerangan jalan umum dan atap gedung pemerintah;
- Pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga, desa dan fasilitas pengelolaan terpadu;
- Pembangunan instalasi biogas yang mengubah kotoran ternak menjadi gas pengganti energi listrik rumah tangga maupun usaha kecil;
- Penggunaan pupuk dan pestisida organik dalam sektor pertanian guna menjaga kualitas tanah dan mengurangi polusi lingkungan.

Selain upaya yang telah berjalan, Kabupaten Klaten memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang signifikan sebagai modal penguatan ekonomi hijau. Pemanfaatan potensi ini akan membawa beberapa manfaat strategis, yaitu diversifikasi sumber energi, pengurangan emisi karbon sesuai agenda net zero emission, penciptaan lapangan kerja hijau di berbagai sektor, serta penguatan daya saing ekonomi lokal melalui integrasi energi bersih dengan sektor pertanian, industri dan pariwisata. Namun demikian, penerapan ekonomi hijau di Klaten juga

menghadapi tantangan seperti investasi awal yang tinggi, keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM, serta perlunya regulasi dan insentif yang lebih kuat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menyiapkan kebijakan yang terintegrasi meliputi insentif fiskal bagi pelaku usaha hijau, kemitraan publik-swasta, penguatan kapasitas masyarakat, serta integrasi program EBT dalam perencanaan tata ruang wilayah. Langkah ini akan menjadi penggerak terwujudnya "Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan", sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap target pembangunan rendah karbon dan visi Indonesia Emas 2045.

Meskipun Kabupaten Klaten tidak memiliki wilayah laut, namun secara ekologi dan geografis memiliki potensi usaha perikanan budidaya air tawar yang memadai, prinsip ekonomi biru tetap relevan melalui pengelolaan berkelanjutan sumber daya air tawar. Capaian penerapan ekonomi biru terlihat dari upaya konservasi mata air dan kawasan resapan untuk menjaga ketersediaan air baku, pengembangan budidaya perikanan darat ramah lingkungan dan pemanfaatan limbah kolam, serta pengelolaan ekowisata berbasis perairan seperti Umbul Ponggok yang dikelola dengan mengutamakan kelestarian ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Penerapan Ekonomi Biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem, guna meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan agar mampu mandiri dan inovatif sehingga dapat memberikan nilai tambah serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup melalui program pembibitan, budidaya ikan, pengolahan hasil produksi perikanan dan pemasaran. Beberapa komoditas yang sudah berkembang di Kabupaten Klaten diantaranya adalah komoditas ikan nila, ikan lele, ikan gurameh dan lain-lain.

Analisis dari capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan ekonomi biru di Klaten tidak hanya berfokus pada aspek ekologi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata berupa peningkatan pendapatan masyarakat, diversifikasi usaha dan peningkatan daya tarik wisata daerah. Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain kurang optimalnya kelembagaan klaster, harga pakan ikan terlalu mahal tetapi harga ikan cenderung stagnan, ketersediaan bibit yang masih mengandalkan dari luar daerah dan belum memanfaatkan Unit Balai Benih Ikan yang ada di Kabupaten Klaten.

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi biru perlu didorong melalui penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik terkait pengelolaan air serta sinergi lintas sektor agar kontribusi ekonomi biru semakin optimal dalam membentuk Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Klaten dengan upaya peningkatan kapasitas SDM perikanan dan pariwisata berbasis ekologi, peningkatan kelembagaan klaster, optimalisasi Balai Benih Ikan untuk penyediaan bibit ikan dan peningkatan

pemasaran hasil produksi perikanan salah satunya melalui Program Gemar Makan Ikan (Gemari). Secara keseluruhan, penerapan ekonomi hijau dan biru dalam sasaran pembangunan Kabupaten Klaten mencerminkan upaya transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berpihak pada kelestarian lingkungan.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi elemen penting dalam mendorong efisiensi, inovasi dan percepatan pembangunan di berbagai sektor. Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui pengembangan super platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem terpadu, percepatan digitalisasi di sektor publik dan ekonomi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi dan penciptaan talenta digital. Langkah ini menjadi pondasi menuju sistem pemerintahan dan ekonomi yang lebih adaptif, inklusif dan berdaya saing tinggi di era digital.

Di era globalisasi, masyarakat menuntut pelayanan pemerintah yang cepat, fleksibel dan efisien. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan kualitas layanan publik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan indeks SPBE sebagai alat ukur untuk mengetahui peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2022 Kabupaten Klaten tidak mengikuti dalam Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PANRB karena Pemantauan dan evaluasi hanya wajib bagi IPPD dengan indeks SPBE Tahun 2021 kurang dari 2.60. Kandidat IPPD dengan Indeks SPBE Tahun 2021 lebih dari 2.60 dan mendaftarkan pengajuan (usulan) dengan pertimbangan jika tersedianya kuota yang ada, akan tetapi lebih diprioritaskan pada IPPD dengan indeks SPBE Tahun 2021 kurang dari 2.60 sehingga di tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Klaten masih NA dikarenakan sudah masuk kategori baik. hasil evaluasi SPBE tahun 2024, capaian indeks SPBE untuk Kabupaten Klaten telah mencapai 4,07 Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.84
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,0	2,74	N/A	3,70	4,07

Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Klaten, 2024

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan amanat peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Menindaklanjuti Perpres tersebut diatas maka dibentuk Perbub Satu Data Kabupaten Kabupaten Nomor 52 tahun 2020, dalam pelasanaannya ditetapkan Surat Keputusan bupati klaten nomor 050/400/2022 dibentuk SK Penyelenggara Satu Data. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki 1 website utama yaitu www.klatenkab.goid, namun keberadaan website tersebut masih perlu terus ditingkatkan, untuk menyajikan informasi yang lengkap dan up to date pada website tersebut.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) membutuhkan kolaborasi lintas instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan muakhir semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

Sebagai upaya percepatan Satu Data Indonesia, pada tahun 2024 Sekretariat SDI Tingkat Pusat telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI tahun 2023. Terdapat perubahan metodologi evaluasi dari asesmen yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, sehingga hasil asemen tidak dapt menjadi pembanding dengan evaluasi 2023. Capaian Indeks SDI Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebesar 56,34%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan SDI telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan terutama pada Domain Penyelenggaraan SDI yang memperoleh skor relatif rendah (33,02), sebaliknya capaian tertinggi terdapat pada Domain Data Leadership (80,43) yang mencerminkan adanya komitmen pimpinan dalam mendorong implementasi SDI. Sementara Domain Kebijakan dan Lembagaan menunjukkan hasil mederat (69,53) yang berarti perangkat regulasi dan tata kelola sudah terbentuk, namun masih perlu diperkuat dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.85
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI Tahun 2023

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	69,53
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	33,02
3	Domain Data Leadership	23%	80,43
	Indeks Satu Data Indonesia		**56,34**

Sumber : Badan Perencanaan Pembagunan Nasional, 2025

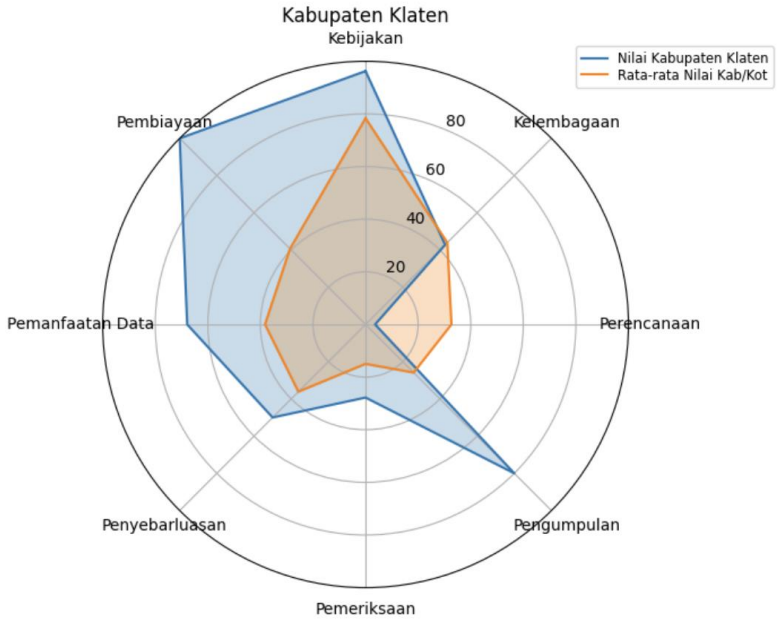
Hasil evaluasi Indeks Aspek Penyelenggaraan SDI tahun 2023 menunjukkan variasi capaian di tiap aspek. Capaian tertinggi terdapat pada Aspek Kebijakan (96,26) dan Aspek Pembiayaan (100). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan ketersediaan pendanaan sudah cukup kuat sehingga dapat menjadi landasan penting dalam pelaksanaan SDI. Hasil evaluasi juga menyoroti tantangan besar pada beberapa aspek yang masih rendah. Aspek Kelembagaan (42,80) dan Aspek Pemeriksaan (27,78) menunjukkan bahwa tata kelola organisasi penyelenggaraan SDI serta mekanisme verifikasi dan validasi data belum berjalan efektif. Capaian terendah terdapat pada Aspek Perencanaan (3,64) yang menandakan belum terintegrasinya SDI secara memadai ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Tabel 2.86
Nilai Indeks Aspek Penyelenggaraan SDI Tahun 2023

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	96,26
2	Aspek Kelembagaan	17%	42,80
3	Aspek Perencanaan	11%	3,64
4	Aspek Pengumpulan	6%	80,00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	27,78
6	Aspek Penyebarluasan	8%	50,00
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	67,86
8	Aspek Pembiayaan	9%	100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025

Kabupaten Klaten sudah memiliki fondasi kebijakan yang kuat serta dukungan anggaran penuh, sehingga memiliki potensi besar dalam mempercepat implementasi SDI. Kemahan utama terletak pada aspek perencanaan, kelembagaan dan pemeriksaan data. Tanpa penguatan pada tiga aspek keberlanjutan dan konsisten data berisiko tidak terjaga.



Sumber : Badan Perencanaan Pembagunan Nasional, 2025

Gambar 2.96 Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik tahun 2024 sebesar 38,60% meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 38%. Sementara di lihat dari persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (*e-sign*/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah di tahun 2024 sudah 100%.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	-	-	35,00	38,00	38,60
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (*e-sign*/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	-	29,41	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Klaten, 2024

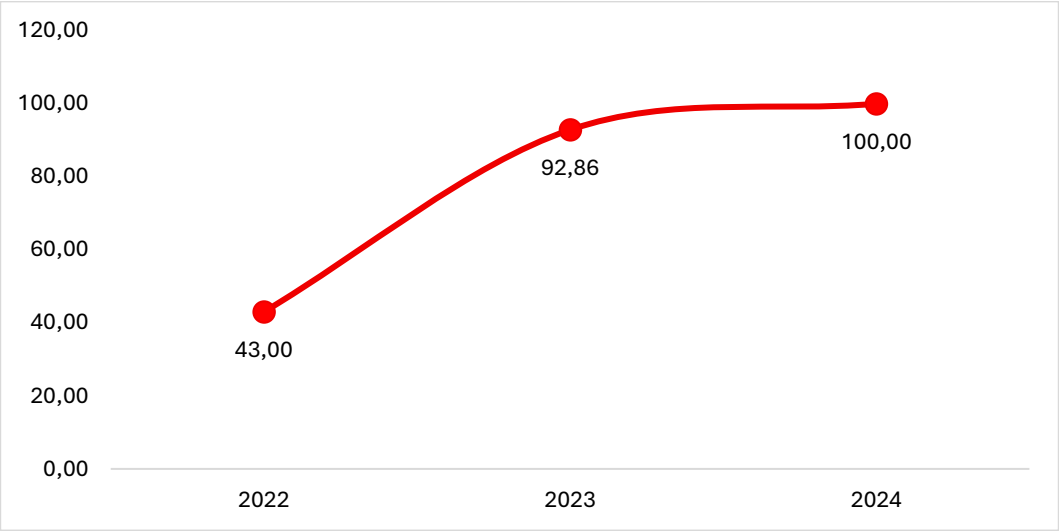
2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan berperan besar dalam mendorong perekonomian, menjadi tempat yang inklusif dan berkelanjutan. Kota yang maju tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pada kesetaraan dan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan perdesaan yang

mandiri dan berkelanjutan, di sisi lain, memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas pertanian, serta mengurangi kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup adalah perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Kualitas rumah tinggal mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, yang ditentukan oleh bahan bangunan, kesehatan, kenyamanan dan fasilitas yang ada. Rumah yang layak memberikan kenyamanan dan mendukung peningkatan martabat hidup. Seiring dengan itu, sektor perumahan juga menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan gedung perkantoran pemerintah merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja aparatur sipil negara di daerah. Fasilitas perkantoran yang memadai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Klaten, capaian pembangunan gedung perkantoran pemerintah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, capaian pembangunan baru mencapai 43,00%, yang menandakan tahap awal pembangunan serta proses penyesuaian terhadap perencanaan dan alokasi anggaran. Kemudian pada tahun 2023, capaian meningkat secara drastis hingga mencapai 92,86%, seiring dengan percepatan pembangunan fisik, penyelesaian administrasi proyek, serta optimalisasi anggaran yang tersedia. Puncaknya, pada tahun 2024, capaian pembangunan gedung perkantoran pemerintah telah mencapai 100%, yang berarti seluruh target pembangunan gedung perkantoran yang direncanakan dalam periode tersebut telah terealisasi sepenuhnya.



Gambar 2.97 Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah yang Terbangun di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

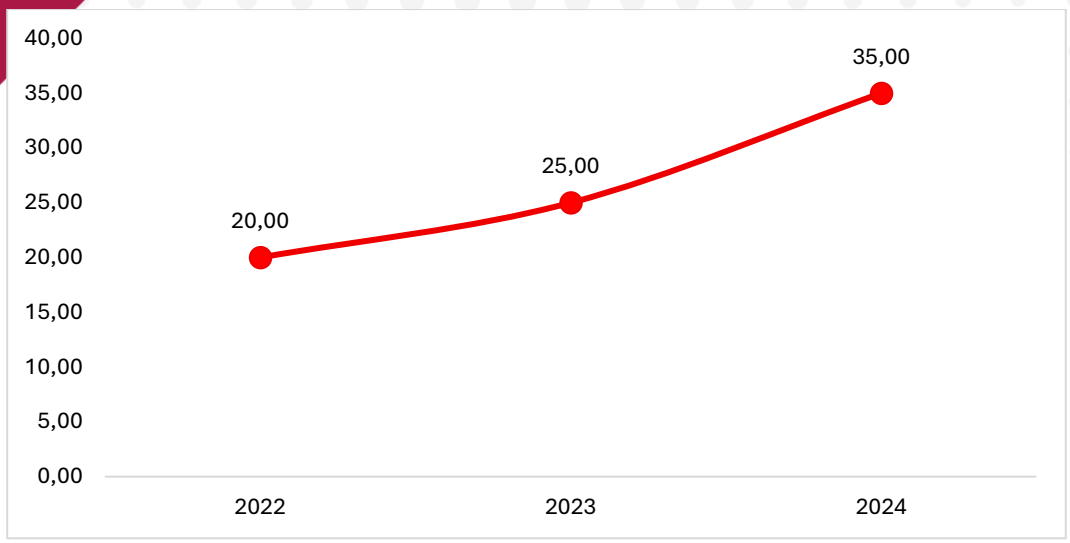
Kabupaten Klaten menargetkan pada tahun 2025 agar 95,85% rumah tangga memiliki akses ke hunian layak, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Penyelarasan RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan integrasi pengembangan wilayah perkotaan yang maju dan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Tabel 2.88
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	(%)	97	95,32	96,28	97,56	97
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	1,16	1,327	1,4	1,64	1,16

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klaten, 2024

Penataan bangunan dan lingkungan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan yang tertata, aman, nyaman dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan fisik yang sesuai dengan rencana tata ruang, memperhatikan aspek estetika, fungsi, keamanan bangunan, serta kelestarian lingkungan hidup.Di Kabupaten Klaten, capaian penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian sebesar 20,00%, yang mencerminkan dimulainya tahapan awal penataan, termasuk identifikasi kawasan prioritas dan perencanaan teknis. Selanjutnya, pada tahun 2023, capaian meningkat menjadi 25,00% seiring dengan pelaksanaan program penataan di beberapa titik strategis, termasuk penataan kawasan publik, peremajaan fasilitas umum dan penguatan regulasi teknis bangunan. Pada tahun 2024, capaian penataan bangunan dan lingkungan terus mengalami kemajuan dengan realisasi sebesar 35,00%. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas pelaksanaan serta alokasi sumber daya yang lebih optimal.



Gambar 2.98 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Di Kabupaten Klaten, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Diharapkan, ke depan, jumlah RTLH akan terus berkurang hingga tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni di daerah tersebut. Penanganan RTLH ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, seperti APBN (DAK, BSPS), APBD Provinsi (Bankeu Pemdes), Baznas, APBDes, CSR dari dunia usaha, serta swadaya masyarakat. Dengan pengembangan wilayah perkotaan yang inklusif dan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, Kabupaten Klaten berusaha menciptakan ekonomi yang lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di seluruh wilayah.

Tabel 2.89
Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bayat	3.903	1.128	1.118	948	694
2	Cawas	685	1.539	1.528	1467	435
3	Ceper	30	504	483	465	405
4	Delanggu	32	1.022	1.013	970	560
5	Gantiwarno	99	379	378	367	226
6	Jatinom	1.299	908	898	710	398
7	Jogonalan	199	627	626	560	298
8	Juwiring	369	508	486	429	253
9	Kalikotes	28	389	388	371	98
10	Karanganom	197	734	717	661	491
11	Karangdowo	734	769	758	703	572
12	Karangnongko	942	646	638	400	242
13	Kebonarum	49	224	224	186	95

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Kemalang	1.029	388	385	323	165
15	Klaten Selatan	42	644	633	609	367
16	Klaten Tengah	260	484	484	453	281
17	Klaten Utara	48	573	571	555	441
18	Manisrenggo	684	611	609	525	358
19	Ngawen	291	868	863	818	403
20	Pedan	32	596	593	542	438
21	Polanharjo	10	741	739	721	625
22	Prambanan	332	432	421	414	76
23	Trucuk	2.243	999	974	687	475
24	Tulung	701	894	880	811	404
25	Wedi	662	891	876	722	225
26	Wonosari	369	513	500	336	247
Total RTLH		**15.204**	**18.011**	**17.783**	**15.762**	**9.272**
RTLH Tertangani		**3.093**	**1.281**	**1.741**	**1.766**	**1.273**
Total RTLH Tertangani		**9.505**	**10.786**	**12.527**	**14.293**	**15.566**
Persentase Total RTLH Tertangani		**38,37**	**43,54**	**50,57**	**57,7**	**62,84**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klaten, 2024

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan menjadi salah satu sasaran penanganan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pada tahun 2020 kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten seluas 41,65 hektar yang terbagi di dua lokasi, yaitu di desa Bugisan dan Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan ulang kawasan kumuh di Kabupaten Klaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023, di mana total kawasan kumuh di Kabupaten Klaten seluas 145,75 hektar yang tersebar di 9 lokasi. Dengan berbagai program/penanganan yang sudah dilakukan, luas kawasan kumuh Kabupaten Klaten tahun 2024 menyisakan 68,18 hektar.

Tabel 2.90
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaaan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kawasan Kumuh	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan permukiman kumuh perkotaaan (ha)	41,65	41,65	145,75	112,95	68,18
Persentase kawasan permukiman kumuh perkotaaan (%)	0,14	0,14	1,14	1,10	0,65
Pengurangan luasan kumuh perkotaaan (ha)	0	0	0	0	44,77
Persentase Pengurangan Kumuh (%)	0	0	0	0	39,64

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klaten, 2024

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2024 telah mencapai target 100%. Jenis pelayanan dasar beserta indikator capaian dan kinerjanya seperti yang tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.91
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	100	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian ha katas penggunaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	100	100	100
RATA – RATA CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					100

Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota

Selain hunian yang layak, keberadaan jaringan jalan yang baik juga menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jalan yang memadai meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur jalan yang baik juga menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data tahun 2020–2023, persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi. Tahun 2020 tercatat sebesar 90,08%, meningkat menjadi 90,86% di tahun 2021, kemudian naik signifikan menjadi 94,67% pada 2022, namun kembali menurun di tahun 2023 menjadi 90,93%. Perkembangan capaian Pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.92
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	N/A	89,00	94,67	91,05	91,39
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan	%	33,58	32,67	32,53	33,13	35,58
Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	91,77	92,62	93,19	93,35	94,29

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	36,17	40,89	44,91	49,03	50,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan SK Bupati Klaten No 611.51/130/2023 tentang status Ruas – Ruas Jalan di Kabupaten Klaten ada sebanyak 339 ruas jalan dengan panjang ruas jalan 720,85 km yang tersebar di 26 kecamatan. Tahun 2024 jalan dalam kondisi baik sepanjang 346,42 km atau 48,06%, jalan kondisi sedang sepanjang 259,15 km atau 35,95% dan rusak ringan sebesar 14,68% atau sepanjang 105,82 km. Untuk jalan rusak berat sepanjang 9,46 km atau 1,31%.

Tabel 2.93
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Keadaan	Status Jalan					
		Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten				
		2024	2020	2021	2022	2023	2024
I	**Jenis Permukaan**						
	a. Aspal/Hotmix/ Lapen/sandsheet (km)	34,51	605,19	605,19	594,915	562,35	587,44
	b. Berbatu/ Macadam (km)	-	-	-	-	-	-
	c. Kerikil (km)	-	11,55	11,55	1,07	85,6	1,76
	d. Tanah/Jalan Belum Tembus (km)	-	–	–	-	-	-
	e. Beton (km)	-	99,14	99,14	113,29	123,49	131,63
	Jumlah – I (km)		**715,89**	**715.89**	**715,89**	**720,85**	**720,85**
II	**Kondisi Jalan**						
	a. Baik (km)	14,83	474,26	437,36	437,44	489,08	346,42
	Persentase (%)	42,97	66,25	61,09	61,10	67,85	48,06
	b. Sedang (km)	14,60	170,64	223,65	214,36	172,62	259,15
	Persentase (%)	42,31	23,84	31,24	29,94	23,95	35,95
	c. Rusak Ringan (km)	3,10	59,44	46,2	55,98	53,47	105,82
	Persentase (%)	8.98	8,3	6,45	7,82	7,42	14,68
	d. Rusak Berat (km)	1.98	11,55	8,68	8,11	5,68	9,46
	Persentase (%)	5,74	1,61	1,21	1,13	0,79	1,31
	Jumlah – II	**34,51**	**715,89**	**715,89**	**715,89**	**720,85**	**720,85**
	Persentase (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Kelas Jalan						
	a. Kelas I (km)	-	-	-	-	-	-
	b. Kelas II (km)	-	-	-	-	-	-
	c. Kelas III (km)	-	-	-	-	-	-
	d. Kelas IIIA (km)	-	-	-	-	-	-
	e. Kelas IIIB (km)	-	-	-	-	-	-
	f. Kelas IIIC (km)	-	715,89	715,89	715,89	720,85	720,85
	g. Kelas IV (km)	-	-	-	-	-	-
	h. Kelas Tidak Dirinci (km)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah – III (km)	**34,51**	**715,89**	**715,89**	**715,89**	**720,85**	**720,85**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2024

Kondisi jembatan pun menjadi bagian penting dari jaringan transportasi yang aman dan nyaman. Berdasarkan SK Bupati Klaten No. 611.51/130/2023 tentang Status Ruas-Ruas Jalan, terjadi perubahan kriteria jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten, yaitu dengan panjang bentang minimal 4 meter. Perubahan ini membuat jumlah jembatan di bawah kewenangan Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menjadi 316 jembatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4 jembatan (1,27%) berada dalam kondisi baik, 234 jembatan (74,05%) dalam kondisi sedang dan ringan, serta 78 jembatan (24,69%) dalam kondisi rusak ringan.

Tabel 2.94
Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jembatan	Tahun (unit) / Persentase (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Baik	200	202	181	6	4
		63,90	64,54	57,83	1,90	1,27
2.	Sedang dan Ringan	113	110	105	234	234
		36,10	35,54	33,55	74,29	74,05
3.	Rusak Berat	0	1	26	75	78
		0	0,32	8,31	23,81	24,69
Jumlah		**340**	**313**	**313**	**315**	**316**

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Infrastruktur irigasi juga memainkan peran vital dalam mendukung sektor pertanian sebagai penopang ekonomi perdesaan. Berdasarkan Permen PUPR No. 14 tahun 2015 bahwa luas area layanan irigasi terbagi menjadi tiga kewenangan, yaitu Kewenangan Pemerintah Pusat seluas 2,003 Ha dengan jumlah 2 DI (Daerah Irigasi) meliputi DI Tuk Kuning BBWS Serayu Opak dan DI Colo BBWS Bengawan Solo, Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 2,716 Ha dengan jumlah 2 DI meliputi DI Jaban dan DI Ploso Wareng serta Kewenangan Pemerintah Kabupaten seluas 29.713 Ha dengan jumlah 478 Daerah Irigasi. Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut penanganan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Klaten dilakukan secara kolaborasi anggaran baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dana desa maupun CSR.

Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan irigasi dimana salah satu komponennya adalah besarnya persentase DI (Daerah Irigasi) dalam kondisi baik atau biasa dikenal dengan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi).

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, kondisi DI di Kabupaten Klaten semakin tahun semakin mengalami perbaikan, DI yang rusak berat dan rusak ringan semakin tahun semakin berkurang.

Tabel 2.95
Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kondisi DI	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Baik	10,747	36,17	12,149	40,89	13,344	44,91	14,567	49,03	14,902	50,01
Rusak sedang	15,261	51,36	12,477	41,99	11,579	38,97	10,758	36,21	10,667	35,09
Rusak berat	3,705	12,47	5,087	17,12	4,790	16,12	4,576	15,4	4,518	15,2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air selain digunakan untuk keperluan irigasi, juga untuk penanganan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi dan Wonosari. Penanganan sumber daya air dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/ tebing sungai, sesuai dengan kewenangan. Sungai di Kabupaten Klaten yang sering menimbulkan banjir (Sungai Dengkeng dan beberapa anak sungainya) merupakan kewenangan Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo) sehingga untuk penanganannya Klaten berkoordinasi dengan BBWS. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kawasan Brebes, Tegal, Pemalang, terdapat kegiatan pengendalian banjir Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo Kabupaten Klaten, yang didanai dari anggaran APBN senilai 100 Milyar untuk tahun 2020-2024.

Perkembangan wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Klaten tidak hanya ditopang oleh penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, jalan, jembatan dan sistem irigasi, namun juga memerlukan perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 telah disahkan pada 24 Desember 2021 dan menjadi dasar hukum serta acuan utama dalam pembangunan wilayah. Untuk menjabarkan RTRW ke dalam skala yang lebih operasional, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan dua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 dan RDTR Kawasan Perkotaan Delanggu melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024.

Dalam aspek pengendalian tata ruang, tren simpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang berjalan efektif, didukung oleh keberadaan Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah (FKPRD) yang aktif dalam memantau dan mengkoordinasikan penataan ruang lintas sektor. Meski demikian, konsistensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan tetap diperlukan agar implementasi tata ruang semakin optimal dalam mendukung arah pembangunan yang tertib, efisien dan berwawasan lingkungan.

Tabel 2.96
Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	0,230	0,235	0,228	0,228	0,440
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	0,100	0,095	2,190	0,104	0,202
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	25,00	25,00	0,970	0,997	0,813
4	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	11,00	11,00	0,970	0,444	0,362
5	Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air dan Rel KA	12,00	12,00	25,62	13,911	13,911
6	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	1,00	1,00	0,69	0,353	0,353
Total Simpangan (%)		**12,00**	**12,00**	**1,764**	**0,901**	**0,917**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2024 untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sudah memenuhi standar yang ditetapkan, tercatat capaian sebesar 100% sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sudah mencapai 100%. Berikut capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2024.

Tabel 2.97
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2024

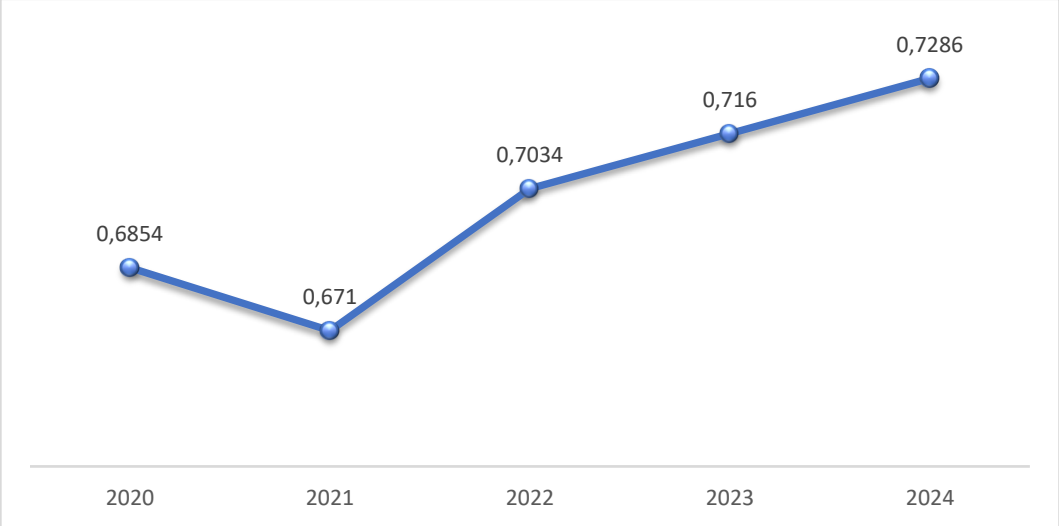
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari–hari	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					100

Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota

Dalam rangka menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat untuk mengukur tingkat kemandirian dan perkembangan desa memiliki 3 (tiga) komposit indeks yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL).

Pada tahun 2024, Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten tercatat sebesar 0,7286, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 0,716. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemajuan desa di Kabupaten Klaten dalam hal ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi semakin baik, mengarah pada tercapainya kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.99 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yang dapat menentukan status kemandirian desa. Dalam pengukuran IDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten beserta Tenaga Ahli P3MD yang bekerja sama dengan Kecamatan/Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa dan Desa bersama-sama melakukan update data profil desa dan input data indikator komposit IDM. Update data Profil Desa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun, dengan pelaksanaan input oleh masing-masing desa.

Status Desa di tahun 2024 mengalami perkembangan yang positif. Data tahun 2024 menunjukkan sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal. Sudah tidak adanya desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Kabupaten Klaten merupakan hasil dari upaya kolaboratif yang masif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Terjadi perkembangan yang cukup signifikan dari jumlah desa dengan status maju dan mandiri. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa upaya telah dilakukan untuk menaikkan status IDM seperti peningkatan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan sosial, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, optimalisasi dana desa dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

Meskipun demikian masih terdapat banyak tantangan untuk meningkatkan jumlah desa dengan status mandiri, dikarenakan masih kecilnya persentase desa dengan status mandiri di tahun 2024 yaitu dari 391 desa baru 27 desa (6,9%) dengan status desa mandiri.

Pengukuran perkembangan kemandirian desa di tahun 2025 tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) namun berganti nomenklatur menjadi Indeks Desa (ID). perubahan ini sebagai bentuk evaluasi arah dan strategi pembangunan desa yang selama ini diterapkan. Perbedaan mendasar terletak pada dimensi pengukuran, IDM dengan tiga dimensi sedangkan ID hanya berfokus di dua dimensi yaitu sosial-ekonomi dan tata kelola-pelayanan publik. Disamping itu juga terdapat penyederhanaan indikator untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pengumpulan data. IDM yang awalnya fokus pada kuantitas sedangkan ID fokus dalam pengukuran kualitas tata kelola desa.

Tabel 2.98
Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024

Status Desa	Jumlah (Desa) s.d Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat tertinggal	0	0	0	0	0
Tertinggal	8	3	0	0	0
Berkembang	288	272	248	209	161
Maju	92	113	137	173	203
Mandiri	3	3	6	9	27
Total Desa	391	391	391	391	391

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2024

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di tahun 2024 tidak terjadi penambahan rata-rata jumlah Desa binaan PKK, Jumlah PKK aktif (Kelembagaan PKK) serta Jumlah LPMD dari kondisi di tahun 2023. Sedangkan jumlah Posyandu aktif mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu menjadi 2.313 kelompok. Selengkapnya data lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 2.99
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah Desa binaan PKK	%	78	91	100	52	52
Jumlah PKK aktif (Kelembagaan PKK)	Desa	428	428	428	428	428
Jumlah LPMD	Desa / Kelurahan	391	391	391	391	391
Jumlah Posyandu aktif	Kelompok	2.313	2.313	2.313	2.278	2.313

Sumber: Dispermades Kab. Klaten, 2024

Dalam rangka pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes, telah dilakukan upaya pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan mendorong pengembangan usaha BUMDes. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan (permodalan) dan optimalisasi pengelolaan BUMDes. BUMDes dapat menjadi sarana strategis untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kemandirian desa.

Tabel 2.100
Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
2020	357	41	41
2021	389	41	41
2022	391	41	41
2023	391	41	41
2024	391	41	41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2024

Dalam rangka mendorong kemandirian desa, Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan teknologi tepat guna, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan. Mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi mencakup 26 kecamatan, kemdian proses pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) antar desa dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

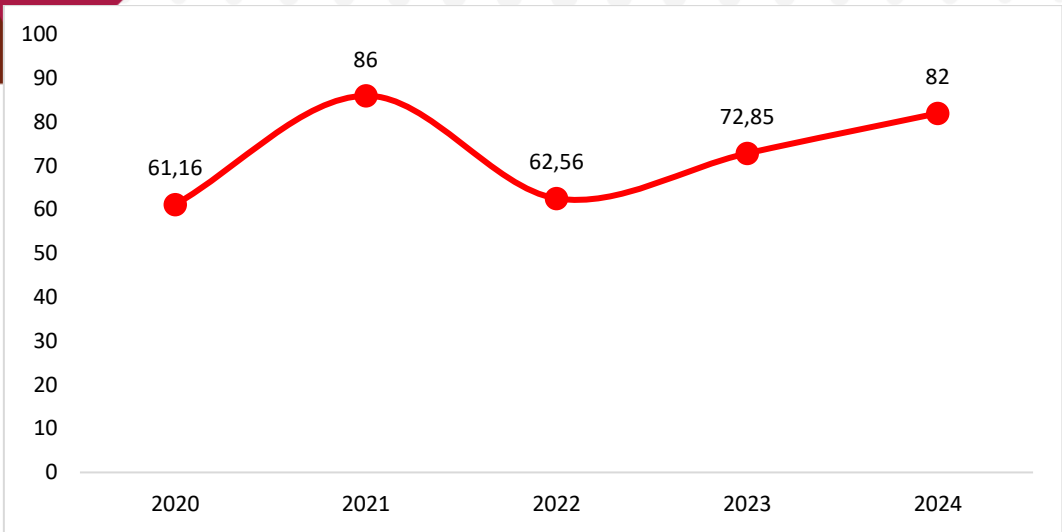
Tabel 2.101
Pelatihan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	-	Pelatihan pengelolaan sampah di Desa Kranggan Kec. Polanharjo	Pelatihan pemanfaatan sumber daya alam desa menuju ketahanan pangan berbasis pengolahan sampah melalui TTG di Desa Semangkak Kec. Klaten Tengah dan Desa Sukorini Kec. Manisrenggo	1. Penguatan lembaga posyantek desa 2. Pembentukan posyantek desa	Penguatan lembaga posyantek desa dan perencanaan TTG dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa (TAPM) tahun 2025
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan	1. Posyantek antar Desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar Desa Kec. Trucuk	-	3. Posyantek antar Desa Kec. Klaten Tengah 4. Posyantek antar Desa Kec. Klaten Utara 5. Posyantek antar Desa Kec. Kebonaru 6. Posyantek antar Desa Kec. Juwiring	1.Posyantekdes Desa Semangkak Kec. Klaten Tengah 2.Posyantek-des Desa Sukorini Kec. Manisrenggo	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten. 2024

Perhubungan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur transportasi yang baik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, akan memperlancar arus barang, jasa dan manusia, yang pada gilirannya mendukung perkembangan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, diperlukan fasilitas pelengkap seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya. Dengan sistem transportasi yang efisien dan fasilitas pelengkap yang baik, kedua wilayah ini saling terintegrasi, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing dan membuka peluang ekonomi lebih luas, baik di kota maupun desa.

Pada tahun 2024, persentase kelengkapan jalan terhadap kondisi ideal di Kabupaten Klaten mencapai 82%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 72,85%. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan wilayah.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.100 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Ketersediaan sarana prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Secara keseluruhan tidak ada penambahan baru penasangan sarana dan prasaranan fasilitas perlengkapan jalan, tetapi kondisi fasilitas perlengkapan jalan masih dalam kondisi baik. Sarana dan prasarana yang sudah terpasang melampaui kebutuhan adalah marka jalan karena sudah terpasang 56.570 m^2 target kebutuhan 34,965 m^2, kemudian guardrail terpasang 3.544 m^2 dari target kebutuhan 3.000 m^2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian sarana pendukung transportasi jalan di Kabupaten Klaten telah tersedia secara memadai dan mampu memberikan dukungan terhadap keselamatan serta kelancaran lalu lintas.

Untuk indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota selama ini belum dilakukan perhitungan, untuk mrndukung target Pusat dan Provinsi maulai tahun 2025 akan dilakukan perhitungan target awal sebesar 44%. Data sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 berdasarkan kebutuhan dan yang terpasang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Klaten
Tahun 2020 -2024

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Rambu lalu lintas biasa	3.979	buah	227	0	98	250	205	3988	87,26
2	Rambu RPPJ	200	buah	0	0	10	10	12	172	86
3	Rambu Tipe F	100	buah	0	0	6	5	10	64	64
4	Marka Jalan	34.965	m^2	5715	0	2650	3122	2600	56570	83,29
5	Traffic Light	40	unit	0	0	0	2	2	35	106,06
6	Guardrail	3.000	m	104	0	48	136	120	3544	83,58
7	Paku marka/ mata kucing	97.125	buah	0	0	0	0	0	1685	77,12
8	Traffic cone	500	buah	0	0	0	100	50	190	38
9	Deliniator	10.000	buah	0	0	0	0	0	0	0
10	Cermin Tikungan	50	buah	22	0	15	20	20	140	66,67
11	Zona Selamat sekolah	50	unit	0	0	1	0	0	9	30
12	Lampu kedip	20	buah	0	0	0	4	0	15	57,69
13	Rambu elektronik	40	unit	0	0	0	0	0	8	61,54
14	Water Barrier	100	buah	20	0	0	25	45	136	71,20

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Secara umum data uji kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebanyak 9.222 belum memenuhi target dari 9.860 yang ditargetkan. Selengkapmya data uji kendaraan bermotor tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Data Uji Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024

No	Jenis Kendaraan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Bus Umum	450	315	300	253	200	192	190	201	198	228
2	Bus Bukan Umum	600	453	400	381	350	369	350	219	300	287
3	Mobil Penumpang Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Taksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kendaraan Roda Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pick Up	11.000	9.332	9.500	9.679	8.000	7.786	7.500	6.911	6800	5702
7	Truk	4.500	4.033	4.000	3.830	3.000	2.188	2.500	2.100	2.500	2.894
8	Kereta Gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Kendaraan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9	Kereta Tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Traktor Head	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kendaraan Khusus	19	28	25	25	20	23	20	22	25	30
Jumlah Total		16.611	14.209	14.270	14.211	11.608	10.601	10.595	9.490	9.860	9.222

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Klaten, 2023

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik akan memiliki kemudahan akses dan konektivitas. Kemudahan akses dan konektivitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.104
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Barang	8.072	6.829	7.133	6.684	10.419
Mobil Bus	488	433	456	427	571
* Umum	391	399	397	338	
Bus Besar	91	84	87	76	243
Bus Sedang	215	230	234	201	92
Bus Kecil	85	85	76	61	133
* Bukan Umum	97	34	59	89	287
Kendaraan Khusus/ Alat Berat	10	17	8	7	50
Jumlah	8.570	7.279	7.597	7.883	11.040

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 6 (enam) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Jumlah angkutan yang beroperasi dan masuk terminal semakin lama semakin menurun, seiring makin maraknya moda transportasi berbasis aplikasi (gojek, gocar, grab dan sebagainya) serta semakin mudahnya akses untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Data terminal angkutan penumpang umum pada Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Terminal	Alamat	kondisi	Type	Luas	Jumlah Bus/ Angkutan
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	85%	C	4500 m^2	5
2	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	75%	C	3310 m^2	0
3	Tulung	Tulung, Klaten	75%	C	400 m^2	0
4	Cawas	Cawas, Klaten	75%	C	300 m2	0
5	Delanggu	Karang, Klaten	80%	C	7000 m^2	26
6	Ir. Soekarno	Buntalan, Klaten Tengah	85%	A	35.000 m^2	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sepanjang 720,85 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa dan (iv) Jalan Lingkungan. Kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8,10 km; (ii) Kecamatan Pedan 6,10 km; (iii) Kecamatan Tulung 6,00 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5,0 km. Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 42,54 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42,88 km; (iii) Kecamatan Prambanan 33,80 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38,75 km.

Tabel 2.106
Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024 (dalam km)

No	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
1	Prambanan	-	33,80	78,58	43,35
2	Gantiwarno	-	42,54	136,95	27,90
3	Wedi	-	24,88	88,06	48,16
4	Bayat	-	24,95	87,81	93,13
5	Cawas	8,10	37,18	101,21	87,33
6	Trucuk	0,94	32,05	104,63	98,28
7	Kalikotes	-	18,20	84.68	74,37
8	Kebonarum	-	20,44	42,82	10,72
9	Jogonalan	-	21,23	81,14	65,71
10	Manisrenggo	-	21,63	105,84	51,05
11	Karangnongko	-	33,75	74,54	37,73
12	Ngawen	2,90	23,64	64,46	58,70
13	Ceper	5,00	14,99	81,57	77,25
14	Pedan	6,10	24,66	64,52	75,00
15	Karangdowo	-	22,14	107,31	37,31
16	Juwiring	-	29,02	121,64	83,07
17	Wonosari	-	28,07	54,81	57,82
18	Delanggu	-	20,92	57,54	57,41
19	Polanharjo	-	28,56	95,26	56,27
20	Karanganom	-	23,41	100,65	81,08
21	Tulung	6,00	32,49	107,33	79,39

No	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
22	Jatinom	4,40	32,17	83,55	98,78
23	Kemalang	-	33,04	137,45	26,10
24	Klaten Selatan	-	24,97	59,28	30,40
25	Klaten Tengah	-	42,88	24,85	13,46
26	Klaten Utara	1,40	29,23	24,50	24,77
	JUMLAH	**34,84**	**720,85**	**2.171,00**	**1.494,61**

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2024 & DPU PR 2024

Selain transportasi, pasar juga merupakan sarana pendukung yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan ekonomi daerah berfungsi sebagai sarana distribusi, penyeimbang harga dan promosi produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa dan (iii) milik perorangan.

Pada tahun 2024 jumlah kios sebanyak 3.001, jumlah los sebanyak 901 dan pedagang sebanyak 8.396, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu jumlah kios sebanyak 2.580, jumlah los sebanyak 180 dan pedagang sebanyak 8.353, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sudah diresmikan dan mulai beroperasinya Pasar Gede Klaten sebagai pasar tradisional di Kabupaten Klaten. Selain itu, pada tahun 2024 ada revitalisasi pasar Pokoh di Desa Menden di Kecamatan Kebonarum. Gambaran Jumlah perkembangan pasar kios, los dan pedagang tahun 2019–2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.107
Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan
Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah			
	Pasar	Kios	Los	Pedagang
Prambanan	3	106	22	219
Gantiwarno	2	36	10	100
Wedi	4	248	21	629
Bayat	1	101	4	375
Cawas	4	178	19	649
Trucuk	2	48	12	80
Kalikotes	1	25	6	119
Kebonarum	1	10	0	10
Jogonalan	2	44	13	190
Manisrenggo	1	61	16	169
Karangnongko	1	76	4	197
Ngawen	1	21	1	94
Ceper	0	0	0	0
Pedan	1	229	3	302
Karangdowo	1	72	2	175
Juwiring	3	174	7	386
Wonosari	2	50	3	285
Delanggu	1	319	4	456

Kecamatan	Jumlah			
	Pasar	Kios	Los	Pedagang
Polanharjo	0	0	0	0
Karanganom	3	95	3	311
Tulung	2	51	2	100
Jatinom	2	196	14	732
Kemalang	2	2	4	880
Klaten Selatan	1	36	3	94
Klaten Tengah	6	655	725	1627
Klaten Utara	4	168	3	217
2024	**51**	**3.001**	**901**	**8.396**
2023	**51**	**2.580**	**180**	**8.353**
2022	**51**	**2.445**	**177**	**7.998**
2021	**51**	**2.445**	**177**	**7.881**
2020	**50**	**3.248**	**448**	**9.601**

Sumber: Dinas Perdagangan. Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2024

Seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan, sektor pariwisata di Kabupaten Klaten juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Sarana akomodasi sebagai penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten telah tersedia sebanyak 42 hotel/losmen. Walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah dengan perincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108
Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten

Biro Perjalanan	
1. PT Ekapari	10. Persada Indah Tour
2. CV. Dewa Nusantara Tour	11. Sargede Tour and Travel
3. CV. Pulo Mas Tour	12. Pradana Tour
4. PT. Danita Tour Service	13. Selendang Sutera
5. Adi Tour	14. Bintang Timur
6. Giri Sampurna Putra Tour	15. Galihayu Tour and Travel
7. H and R Tour	16. Astuti Pinastika Tour
8. Multi Pratama	17. Graphindo Tour Travel
9. Sembilan Buana Tour	18. Kharisma Tour

Sumber: Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga Kab. Klaten, 2020

Guna menunjang kenyamanan wisatawan, perlu didukung dengan akomodasi wisata yang nyaman dan memadai. Jumlah akomodasi wisata di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Selain itu, akomodasi hotel dan makan minum di tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat pesat karena dicabutnya aturan terkait PPKM dan dibukanya kembali obyek wisata, sehingga pergerakan masyarakat meningkat.

Tabel 2.109
Ketersediaan Akomodasi Wisata di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Akomodasi	Tahun				
		2022	2021	2022	2023	2024
1	Hotel	51	54	60	60	63
2	Rumah Makan dan Restoran	90	86	230	260	268

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, 2024

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak dan Retribusi khususnya sektor usaha pariwisata mengalami kenaikan, peningkatan omzet dan investasi pada dunia usaha khususnya sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah pajak yang dipungut. Objek Pajak yang dipungut meliputi : Pajak Hotel (Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang), Pajak Restoran (Rumah Makan/Restaurant dan Catering), Pajak Hiburan (Pagelaran Musik/Tari/Busana, Permainan Ketangkasan dan Hiburan Olah Raga), sedangkan untuk retribusi meliputi : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyewaan Bangunan, Hasil Penjualan Aset Lainnya serta Hasil Kerja sama daerah.

Tabel 2.110
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2020-2024

No	Jenis PAD	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel Bintang	587.067.925	762.651.635	1.136.795.371	1.177.765.048	1.261.258.640
2	Pajak Hotel Melati/Motel	143.457.475	127.217.828	165.587.907	182.714.451	197.572.602
3	Pajak Rumah Makan	1.916.032.221	2.777.678.048	4.418.592.021	7.091.155.252	9.838.508.693
4	Pajak Catering catering	4.354.957.176	4.009.137.308	5.514.503.005	7.419.754.602	8.010.487.863
5	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	19.419.537	23.754.600	278.295.615	279.572.356	946.967.106
6	Pajak Permainan Ketangkasan	222.192.310	145.883.750	356.336.000	253.111.183	283.911.019
7	Pajak Hiburan/ pertandingan Olahraga	235.151.050	120.860.500	49.409.300	546.832.500	599.738.158
8	Retribusi Obyek Wisata	1.051.962.520	837.599.759	2.186.293.000	2.108.299.000	4.931.305.000
Jumlah		**8.530.240.214**	**8.804.783.428**	**14.452.269.721**	**19.059.204.392**	**26.252.710.396**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, 2024

Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Klaten tentang pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, kesadaran di kalangan pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan dan melindungi produknya pun

semakin berkembang. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat Kekayaan Intelektual Komunal, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting sebagai hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Objek yang dilindungi dalam HKI adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, yang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya, sehingga perlu mendapatkan penghargaan dan perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya penting untuk pengakuan karya individu, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di perkotaan maupun perdesaan, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.111
Jumlah Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Klaten

Hak Kekayaan Intelektual	Tahun 2024
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	16
Hak Cipta	15
Merek	45
Jumlah	76

Sumber : Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui keberadaan koperasi yang aktif. perkembangan jumlah koperasi pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan meskipun untuk jumlah koperasi aktif, koperasi tidak aktif dan koperasi cukup sehat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Koperasi aktif dalam tinjauan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir masih melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Perkembangan koperasi pada tahun 2024 sebanyak 912 koperasi, mengalami peningkatan jika dibanding pada tahun 2023 sebanyak 909 koperasi, ada penambahan sebanyak 3 koperasi yang terinput di data base Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Sedangkan untuk koperasi aktif pada tahun 2024 sebanyak 312 koperasi, mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 304 koperasi, sehingga masuk dalam kategori koperasi tidak aktif, hal ini dikarenakan koperasi tersebut tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Sedangkan untuk koperasi tidak aktif pada tahun 2024 sebanyak 608, mengalami kenaikan sebanyak 11 koperasi dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 597 dikarenakan koperasi tersebut tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut.

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), harapannya koperasi yang sehat dapat berperan aktif dalam menggerakkan roda

perekonomian masyarakat melalui penyediaan bahan bakunya, sehingga koperasi tersebut dapat produktif. Sedangkan untuk koperasi yang cukup sehat agar ada pembinaan dan pendampingan menuju koperasi sehat, agar dapat dikembalikan fungsi koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Sedangkan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) dari tahun 2020-2024 mengalami stagnasi, untuk itu selaras dengan program pemerintah pusat untuk terus mendorong revitalisasi KUD sebagai langkah penting untuk mendukung swasembada pangan, yang mencakup peningkatan aset, pengembangan usaha, termasuk dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Tabel 2.112
Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi	893	898	900	909	912
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	717	494	315	312	304
4	Koperasi Tidak Aktif	176	404	585	597	608
5	Koperasi Sehat	15	16	16	16	16
6	Koperasi Cukup Sehat	352	335	203	260	288

Sumber: Dinas Dagkop & UMKM dan Disperinaker Kabupaten Klaten, 2024

Jumlah usaha mikro selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan, dari 50.070 unit di tahun 2020 menjadi 50.322 unit di tahun 2024. Sedangkan jumlah usaha mikro pada tahun 2024 sebanyak 5.030 unit. Kenaikan jumlah UMKM ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja untuk usaha kecil dari 141.571 orang pada tahun 2023 menjadi sebanyak 142.986 orang ditahun 2024. Sedangkan jumlah tenaga kerja usaha menengah/besar pada tahun 2023 sebanyak 12.717 orang bertambah menjadi sebanyak 12.884 orang ditahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam sektor UMKM, yang turut berkontribusi pada peningkatan lapangan pekerjaan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.113
Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

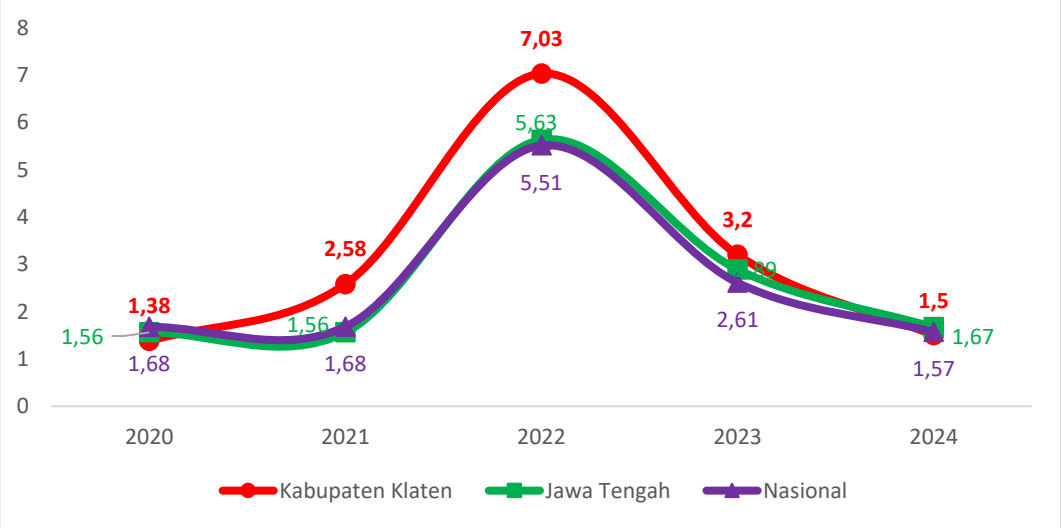
No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Usaha (UMKM)					
	a). UMKM Mikro	50.070	50.125	50.175	50.245	50.322
	b). UMKM Kecil	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
2	Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
	a).Usaha Kecil	141.266	137.228	141.266	141.571	142.986
	b).Usaha Menengah/ Besar	12.845	12.717	12.717	12.717	12.884

Sumber: Dinas Dagkop & UMKM dan Disperinaker Kabupaten Klaten, 2024

2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, pada Tahun 2020 inflasi sebesar 1,38% atau lebih rendah dibanding Tahun 2024 sebesar 1,50, sedangkan untuk tahun 2021 inflasi Kabupaten Klaten sebesar 2,58% dan mengalami peningkatan menjadi 7,03% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 terkendali pada 3,20% dan pada tahun 2024 sebesar 1,50%, hal ini disebabkan selama satu tahun terakhir banyak terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok penting pembentuk tingkat inflasi daerah. Pada tahun 2021 perubahan harga didominasi untuk sector pengeluaran keperluan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa pada tahun 2021 masih terjadi masa pandemi covid-19 varian delta dan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa-siswi sekolah masih dilaksanakan secara daring.

Pada tahun 2023 tingkat inflasi di Kabupaten Klaten terkendali pada angka 3,20% dan pada tahun 2024 tingkat inflasi sebesar 1,50%, walaupun beberapa bulan berturut-turut dari bulan Mei-Agustus mengalami deflasi. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Indonesia, 2024

Gambar 2.101 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

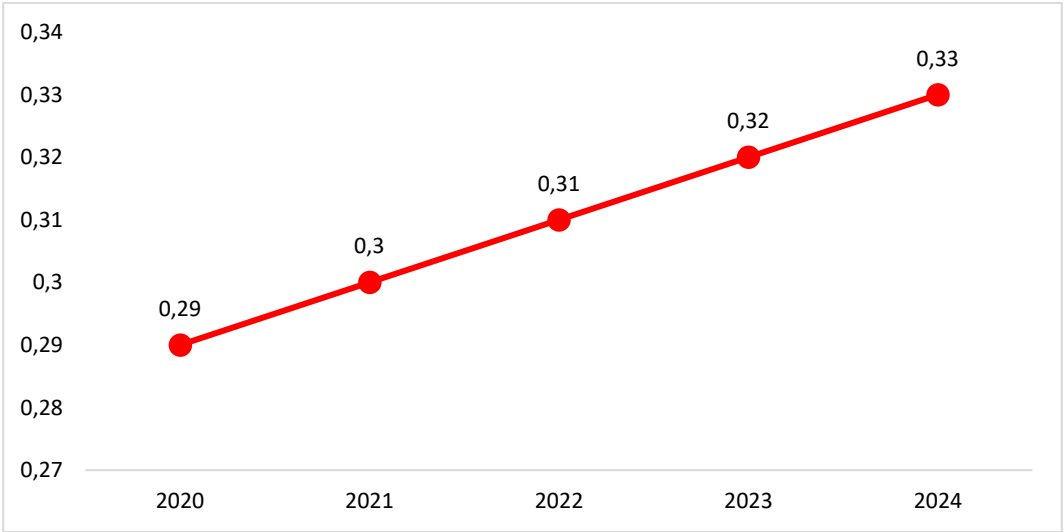
Berdasarkan diagram diatas, pada tahun 2024 tingkat inflasi Kabupaten Klaten sebesar 1,50%, data ini diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta hal ini dikarenakan sejak tahun 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak menghitung tingkat inflasi.

Tabel 2.114
Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2020-2024
Kawasan Subosukawonosraten

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Surakarta	1,38	2,58	7,03	3,20	1,50
2	Klaten	1,38	2,58	7,03	3,20	1,50
3	Jawa Tengah	1,56	1,70	5,63	2,89	1,67
4	Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Daerah dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 0,31% sedikit lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya.

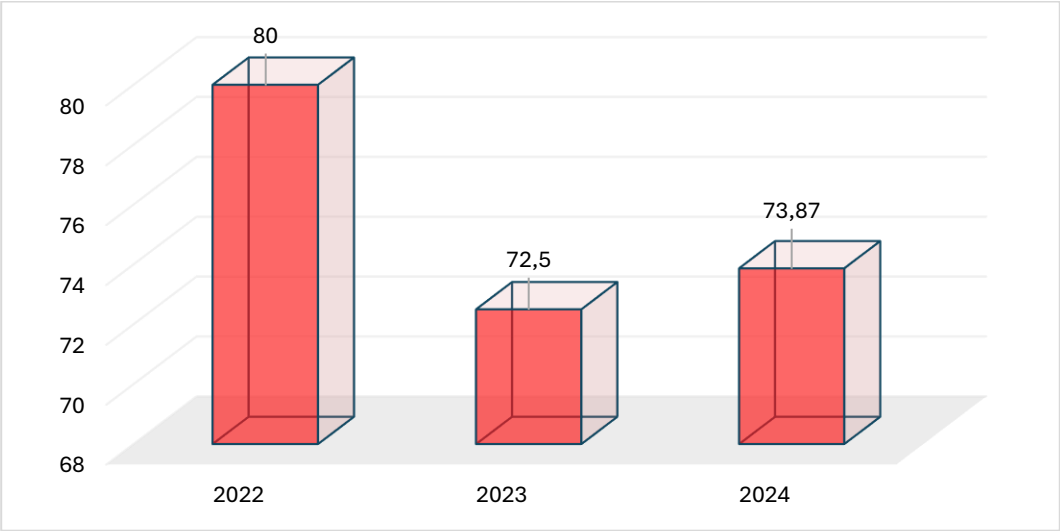


Sumber: BPKPAD Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.102 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

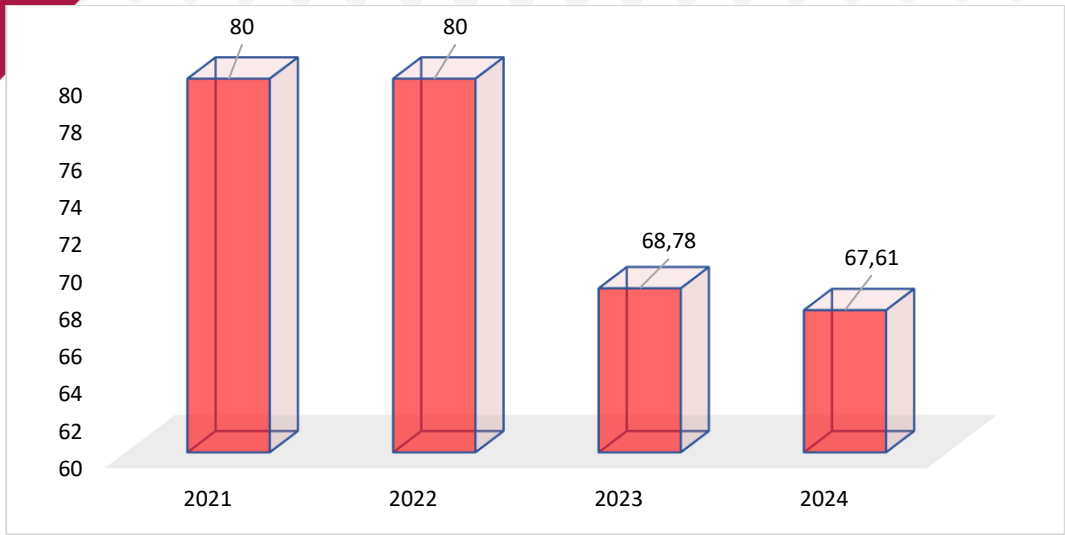
Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, memiliki dampak strategis terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pertumbuhan sektor-sektor produktif di wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Klaten mengalami penurunan tingkat investasi. Pada tahun 2020 persentase investor

yang berinvestasi tercatat sebesar 80%, kemudian menurun ditahun 2023 sebesar 72,5% selanjutnya pada tahun 2024 sedikit menjadi sebesar 73,87%. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah, baik dari sisi regulasi, kesiapan infrastruktur, maupun kondisi ekonomi makro yang memengaruhi keputusan investasi. Penurunan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat strategi promosi investasi yang lebih terarah dan berbasis potensi lokal, sehingga ke depan iklim investasi di Kabupaten Klaten kembali tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif.



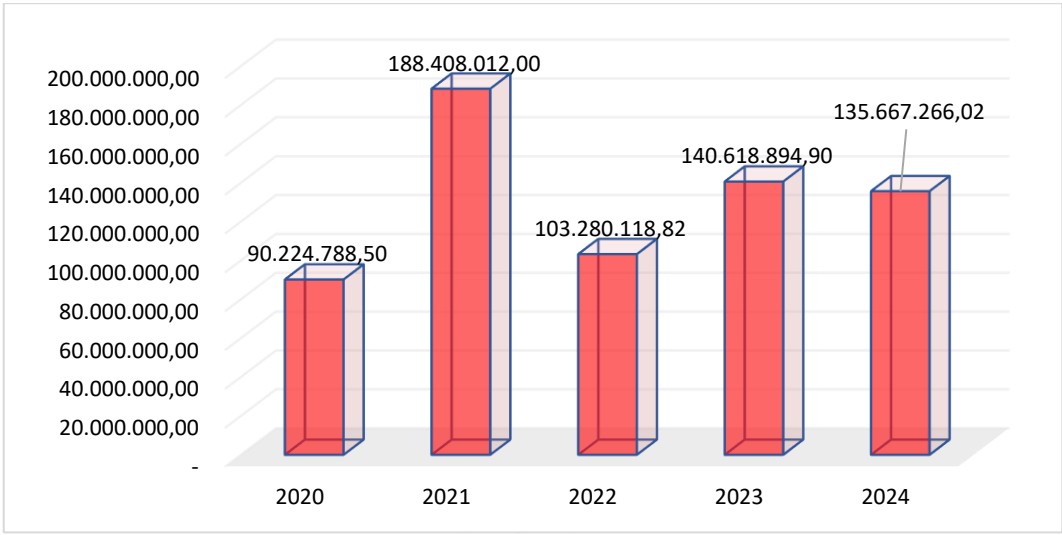
Gambar 2.103 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024

Realisasi investasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 capaiannya sebesar 80% kemudian menurun sampai pada tahun 2024 menjadi sebesar 67,61%. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu memperkuat strategi peningkatan realisasi investasi melalui perbaikan iklim usaha, penyederhanaan layanan perizinan, penyiapan kawasan strategis investasi, serta pengawasan dan pendampingan terhadap proyek-proyek investasi yang sedang berjalan. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan capaian realisasi investasi dapat kembali meningkat dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten.



Gambar 2.104 Realisasi Total terhadap Target Investasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024

Sektor ekspor merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi daerah. Peningkatan nilai ekspor mencerminkan daya saing produk lokal di pasar internasional, serta keberhasilan pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dilihat dari nilai ekspor, dalam kurun waktu lima tahun cenderung fluktuatif dari US$ 90.224.788,50,- pada tahun 2020 kemudian naik menjadi US$ 188.408.012,00,- pada tahun 2021 yang merupakan puncak capaian ekspor tertinggi dalam lima tahun terakhir, kemudian di tahun 2022 menurun menjadi sebesar US$ 103.280.118,82, kembali naik di tahun 2023 menjadi US$ 140.618.894,90. Di tahun 2024 kembali menurun sebesar US$ 135.667.266,02. Ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah volume dan jenis produk yang bisa diterima pasar internasional.



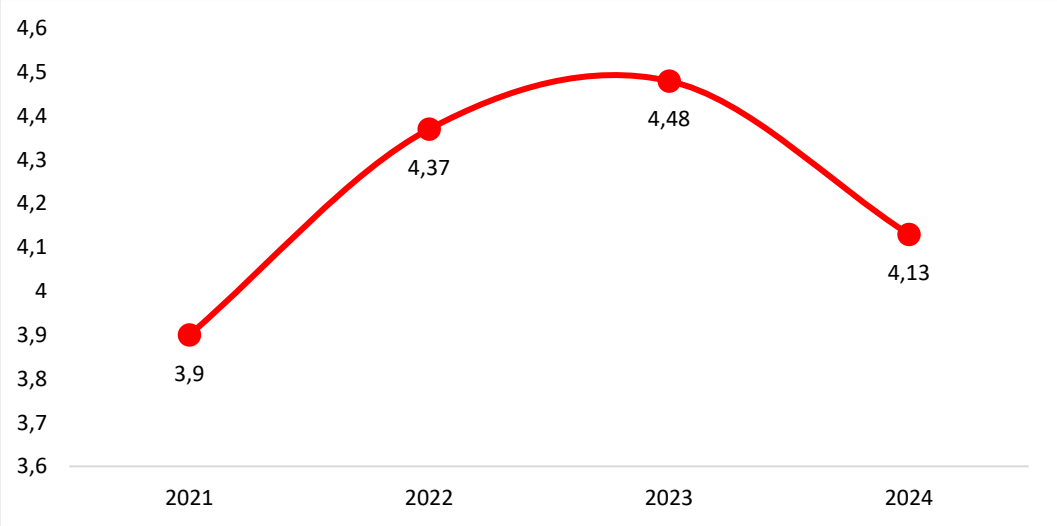
Gambar 2.105 Nilai Ekspor Barang di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah (PD) yang baik. Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yaitu upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

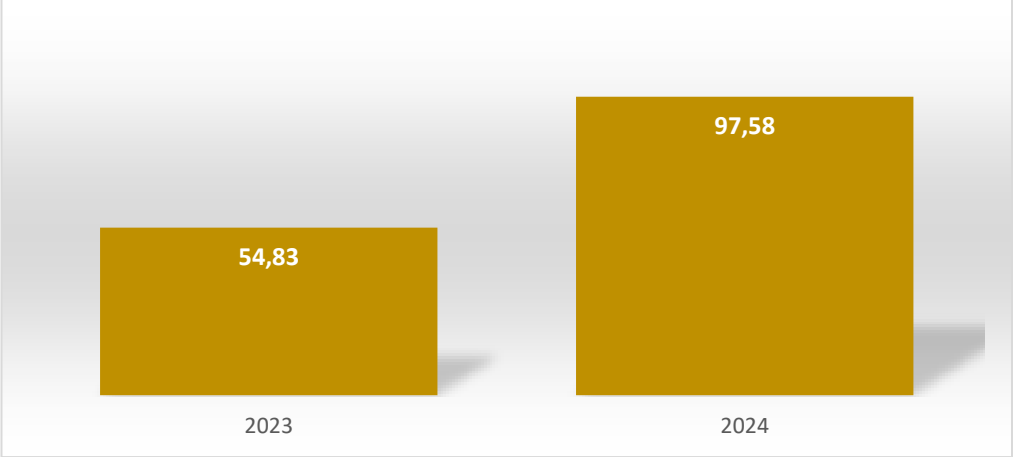
Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024, di mana nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten adalah 4,13 (Kategori A-) dibandingkan tahun 2023 yaitu 4,48 yang mengalami penurunan sebanyak 0,35 poin. Penilaian tersebut terdiri dari 3 unit lokus evaluasi yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nilai IPP sebesar 4,18, RSUD 4,14, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4,08.



Gambar 2.106 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024

Untuk mendukung perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel maka digunakan Indeks Reformasi Hukum (IRH). IRH ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Kemudian, peraturan ini menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klaten baru mulai dilakukan penilaian pada Tahun 2024 atas

pelaksanaan tahun 2023 dengan nilai 54,38. Sedangkan penilaian atas pelaksanaan Tahun 2024 sebesar 97,58.



Gambar 2.107 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klaten Tahun 2023-2024

Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yaitu tingkat koordinasi, penguatan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau de-regulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu serta penataan database peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nilai IRH, menunjukkan semakin berhasilnya pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum.

Tabel 2.115
Hasil Penilaian Komponen Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Variabel	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	17,8
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	22,5
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	30	27,6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
	NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM	**100**	**87,90**
	NILAI APRESIASI		**9,68**
	NILAI AKHIR		**97,58**

Perkembangan capaian Pembangunan bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Lainnya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Perkembangan Capaian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	0,98	1,07	1,06	1,03	1,00
Total Kredit/PDRB	%	1,05	1,09	1,08	1,08	1,00
Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,73	2,78	2,32	1,12	-0,5

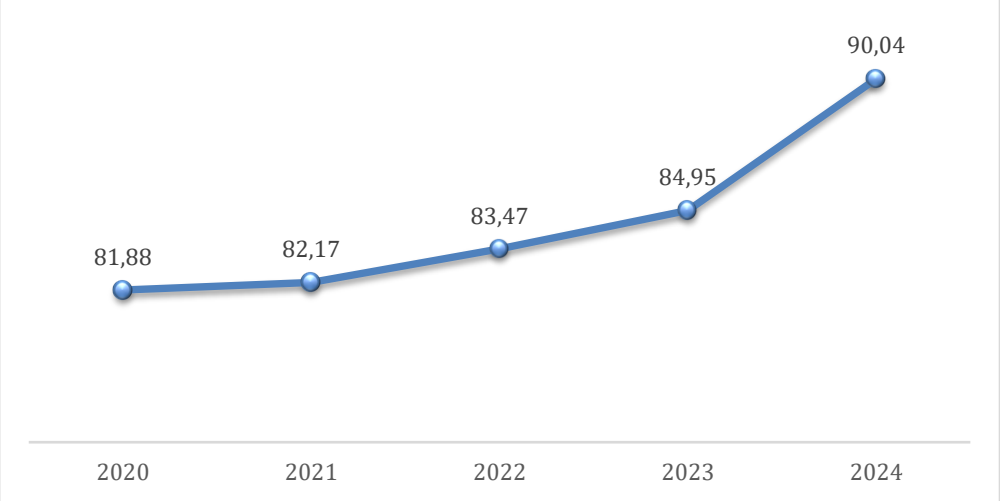
Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Klaten, 2025

Total dana pihak ketiga maupun total kredit dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi pasca covid berdampak pada belanja pemerintah, tingkat investasi dan pendapatan masyarakat yang menurun. Hal ini berdampak pada penurunan total dana pihak ketiga. Banyaknya gelombang PHK membuat masyarakat cenderung mengambil tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang-barang sekunder dan berpikir ulang dalam pengambilan kredit untuk investasi. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan total kredit. Sedangkan Return on Aset (ROA) BUMD cenderung terus menurun dikarenakan terbebani dengan kondisi Perusahaan Daerah BKK Klaten yang tidak sehat dikarenakan mengalami kerugian cukup besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, menetapkan bahwa survey kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten tahun 2024 berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan adalah sebesar 90,04 meningkat dari tahun 2023 dengan IKM sebesar 84,95.

Dilihat dari perkembangannya nilai IKM dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu meningkat hal tersebut dikarenakan penilaian pada setiap unsur pelayanan juga meningkat. Peningkatan signifikan diperoleh dari unsur biaya/tarif, karena pada pelayanan publik di Kabupaten Klaten sebagian besar tidak dipungut biaya (gratis). Meskipun beberapa masih ada pelayanan yang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti layanan perizinan tertentu. Unsur lainnya yang mempengaruhi kenaikan nilai IKM adalah unsur sarana prasarana yang dinilai baik oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya melakukan inovasi dan melengkapi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Meskipun sudah dinilai baik, perlu dilakukan upaya yang lebih optimal guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga nilai IKM dapat meningkat menjadi "sangat baik".

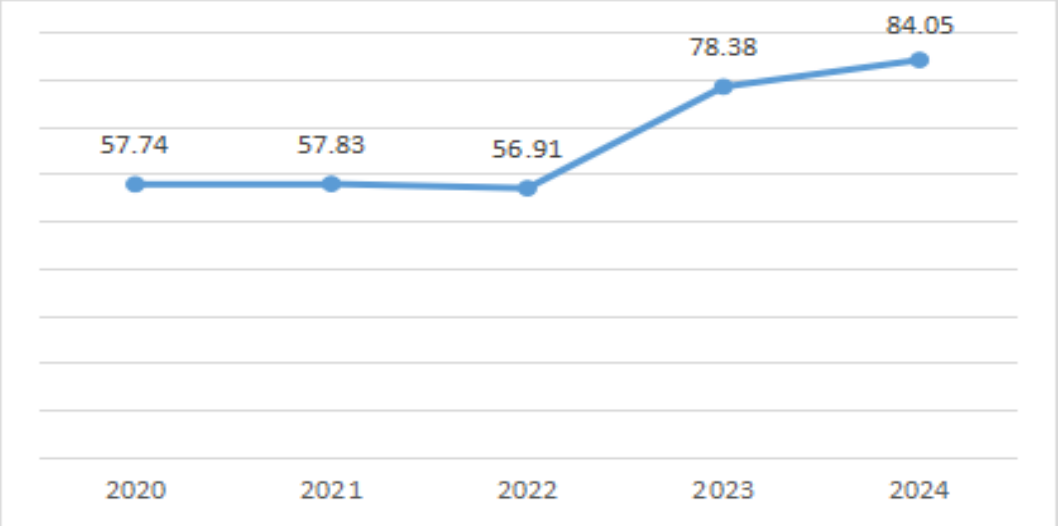


Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.108 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendorong terciptanya birokrasi digital kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional, pemerintah perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penajaman roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Klaten menyesuaikan dengan roadmap reformasi birokrasi nasional dengan menerbitkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan program reformasi birokrasi yang berdampak untuk mencapai tujuan Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 57,74 selalu menunjukkan peningkatan hingga ditahun 2024 menjadi 84,05%.



Gambar 2.109 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2020 - 2024

Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 mengacu pada Permen PANRB No. 9 Tahun 2023, dengan fokus pada dua dimensi yaitu: RB General dan RB Tematik. RB General menilai perbaikan internal birokrasi. Kabupaten Klaten meraih skor 74,29, didukung capaian indikator seperti penyederhanaan struktur organisasi, digitalisasi arsip, SPBE, pelayanan publik, opini dan tindak lanjut BPK, serta survei integritas dan kepuasan masyarakat. Sementara itu, RB Tematik menilai inovasi dalam menangani isu strategis pembangunan. Klaten memperoleh skor 9,72, dengan indikator seperti pengentasan kemiskinan, investasi, digitalisasi administrasi, penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023, terutama pada dimensi RB General. Meskipun capaian RB Tematik masih memerlukan peningkatan, langkah-langkah strategis dan kolaborasi antar pihak telah berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks reformasi secara keseluruhan. Kenaikan skor RB ini tidak lepas dari kolaborasi efektif antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten. Rincian hasil penilaian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.117
Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi
Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	**Reformasi Birokrasi General**	**100**	**74,29**
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	5,65
3	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	-	-
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	3	1,8

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2,48
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	2,67
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1,5
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	2,37
10	Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	1
11	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	1,87
12	Indeks Reformasi Hukum	2,5	2,44
13	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	1,26
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	1,57
15	Indeks Sistem Merit	4	2,59
16	Indeks Pelayanan Publik	2	1,65
17	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	1,96
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	7,33
19	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	4
20	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	6	3,63
21	Opini BPK	5	5
22	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	3,88
23	Indeks BerAkhlak	4	2,96
24	Survei Penilaian Integritas	10	6,96
25	Survei Kepuasan Masyarakat	8	6,84
B	**Reformasi Birokrasi Tematik**	**20**	**9,72**
1	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	1	0,86
2	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	1	0,88
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	1	0,71
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	1	1
5	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	1	0,63
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	-	-
7	Realisasi Investasi (Capaian Output)	-	-
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	-	-
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	-	-
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	-	-
11	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0,71
12	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2
13	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,75

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
14	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,18
15	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0
	Indeks Reformasi Birokrasi	**120**	**84,05**

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kabupaten Klaten telah mengimplementasikan SAKIP. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai AKIP Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah 66,73 dengan predikat B meningkat 0,46 poin dari tahun 2023 dengan nilai AKIP 66,27 (predikat B). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP di Kabupaten Klaten sudah baik namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas implementasi AKIP adalah meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja agar pelaporan kinerja dapat disusun dengan komprehensif, serta mengoptimalkan evaluasi internal agar dapat menyajikan temuan dan rekomendasi yang memadai serta mengidentifikasi akar permasalahan.

Tabel 2.118
Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

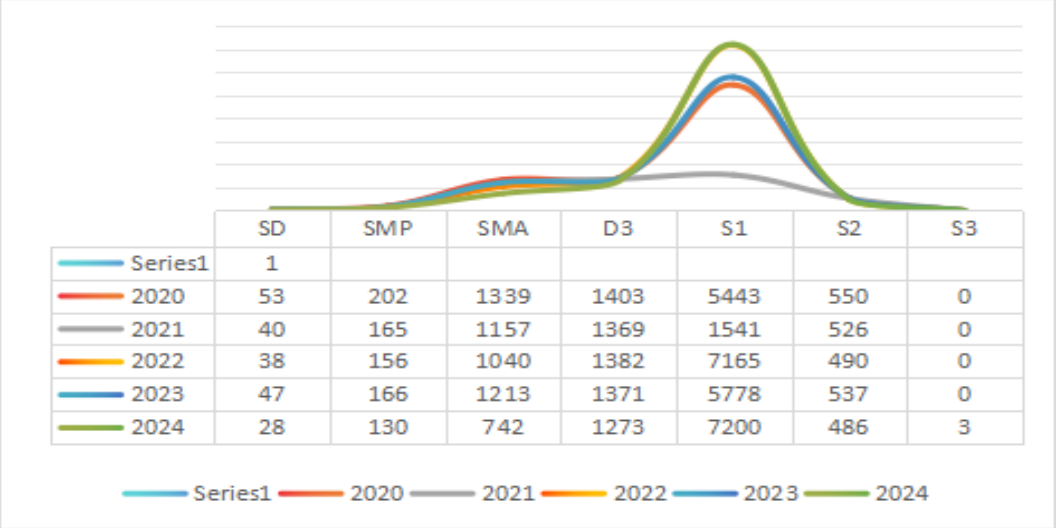
No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,79	20,96	21,30	21,39	21,52
2	Pengukuran Kinerja	25	15,16	15,43	18,56	19,18	19,41
3	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,42	10,73	10,83	10,90
4	Evaluasi Internal	10	5,29	5,39	14,55	14,87	14,90
5	Capaian Kinerja	20	10,49	10,68	-	-	-
	Nilai hasil Evaluasi	**100**	**62,07**	**62,88**	**65,14**	**66,27**	**66,73**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas sangat penting untuk memastikan pengelolaan SDM sektor publik berjalan efisien dan akuntabel. Penguatan sistem kepegawaian menjadi kunci terciptanya birokrasi profesional dan responsif. Menurut data BKPPD Kabupaten Klaten, jumlah PNS tahun 2024 mencapai 9.862 orang, didominasi oleh lulusan S1. Komposisi berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar

ASN di Kabupaten Klaten telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dengan rincian: SD sebanyak 28 orang, SMP 130 orang, SMA 742 orang, D3 sebanyak 1.273 orang, S1 sebanyak 7.200 orang, S2 sebanyak 486 orang dan S3 sebanyak 3 orang.

Namun, terjadi *zero growth* karena penambahan ASN tidak sebanding dengan jumlah pensiun. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dalam manajemen ASN, termasuk optimalisasi teknologi informasi, manajemen berbasis kinerja dan konsistensi reformasi birokrasi.Dengan keterbatasan formasi ASN, penguatan tata kelola SDM yang adaptif dan inovatif menjadi kunci agar pelayanan publik tetap optimal dan birokrasi tetap berjalan efektif.



Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.110 Jumlah Pegawai Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kabupaten Klaten untuk jabatn pimpinan tinggi ada kenaikan yang cukup signifikan karena komitmen dari PPK untuk segera melakukan pengisian Jabatan yang kosong sedangkan untuk jabatan administrasi, Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan pelaksana ada penurunan jumlah jabatan karena memasuki banyaknya pejabat yang memasuki usia pensiun. Berikut perkembangan ASN di Kabupaten Klaten menurut Jabatannya.

Tabel 2.119
Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	24	25	21	24	29
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	2.664	557	376	377	372

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	6.449	6007	5.483	8.311	8.137
Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	orang	-	2523	2.331	1.500	1.324

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Persentase ASN maupun pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2024 tercatat sebesar 224,96%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 347,22%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran, perubahan prioritas program, atau keterbatasan pelaksanaan pelatihan secara tatap muka maupun daring. Meskipun demikian, partisipasi ASN dalam peningkatan kompetensi tetap penting untuk mendukung profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Tabel 2.120
ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	11,26	19,37	42,78	347,22	224,96
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	60,13	0	0	27,68	22,26

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur pada tahun 2024 Kabupaten Klaten sudah melaksanakan diklat, bimtek, seminar dan sejenisnya untuk peningkatan kompetensi ASN sebanyak 1.451 ASN dari target 645 ASN jika dibandingkan dengan target yang direncanakan capaian melebihi 100% atau 224,96% jika dirasiokan dengan jumlah ASN tahun 2024 capaian sebesar 14,71% angka ini cukup rendah dikarenakan belum semua ASN melaporkan pengembangan kompetensi yang sudah dilaksanakan.

Tabel 2.121
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek dan Seminar Tahun 2020–2024

No	Permohonan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	20	198	-		-
2.	Diklat Teknis Fungsional	5.050	4.720	-		-

No	Permohonan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Bimbingan Teknis	0	0	-		-
4.	Seminar dan sejenisnya	0	0	-		-
5.	Diklat Teknis	-	-	293	1.250	347
6.	Diklat Jabatan (Diklat latsar, Diklatpim dan diklat fungsional)	-	-	3.220	842	1.110
JUMLAH		**5.070**	**4.918**	**3.513**	**2.092**	**1.457**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Nilai capaian IPASN Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebesar 80,94 dari target 80 atau targetnya tercapai sebesar 101,17% realisasi capaian bisa melebihi target karena ada upaya maksimal mendokrak nilai dari aspek pengembangan kompetensi.Persentase ASN yang mengikuti diklat di tahun 2024 sebesar 22,49% terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 22,49%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Capaian nilai Sistem Merit Kabupaten Klaten pada tahun 2024 tercatat sebesar 265,5, yang masih sama dengan capaian pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sebelumnya berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit, sudah tidak lagi menjalankan fungsi tersebut. Kewenangan tersebut telah dialihkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebagai konsekuensinya, penilaian Sistem Merit bagi instansi pemerintah yang merencanakannya pada semester II tahun 2024 belum dapat dilaksanakan, karena masih dalam masa transisi dari KASN ke BKN. Oleh karena itu, untuk penilaian tahun 2024, instansi diperkenankan menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023.

Tabel 2.122
Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

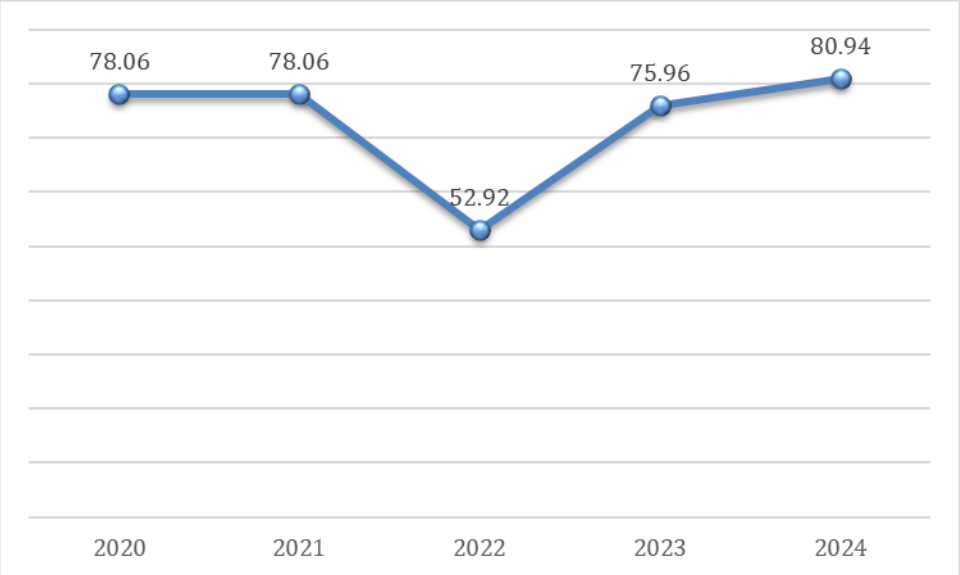
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,06	78,06	52,92	75,96	80,94
Indeks Sistem Merit	Nilai	160,50	204,50	258,00	265,50	265,50
Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	42,93	155,86	42,78	20,48	22,49
Persentase layanan sumber daya aparatur	%	104,47	95,11	-		-
Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	100,00	103,03	-		-
Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	98,00	101,20	-		-

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengembangan Aparatur	%	77,74	90,93	-		-
Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	-	-	213,00	84,38	100,80
Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	-	-	94,14	115,12	100,00
Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	-	-	100,00	51,00	416,60
Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	-	-	247,00	98,80	48,60

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Mendasari tugas dan fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepegawaian, Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator tujuan dan sasaran di Urusan kepegawaian. Penghitungan penilaian IPASN untuk tahun 2024 sudah menggabungkan nilai IPASN PNS dan PPPK dengan rincian nilai rata rata IPASN PNS 82,81 dan nilai rata rata IPASN PPPK 74,55 untuk kenaikan capaian nilai IPASN disebabkan upaya maksimal mendokrak nilai IPASN dari aspek pengembangan kompetensi yang masih rendah

Secara lebih jelas nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.111 Nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Opini BPK Kabupaten Klaten di tahun 2023 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sedangkan Opini BPK tahun 2024 belum rilis dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Di tahun 2023 BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu masih adanya pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih adanya kelebihan pembayaran dan adanya pemanfaatan aset tetap yang tidak sesuai ketentuan.

Upaya yang telah ditempuh adalah membuat instruksi Bupati kepada seluruh OPD agar mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan bukti pengeluaran riil; menginstruksikan OPD yang melakukan kelebihan bayar untuk menyetorkan ke Kas Daerah; memastikan dan memproses hak Pemerintah daerah atas pemanfaatan aset tetap: serta melakukan sosialisasi terkait ketentuan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut Opini BPK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.123
Opini BPK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK pada Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Opini BPK pada LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kab. Klaten, 2024

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Pada tahun 2024, Kabupaten Klaten memperoleh kategori PEDULI dalam Indeks Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), sebuah pencapaian yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia di tingkat lokal. Salah satu indikator penting dari pencapaian ini adalah pengelolaan peraturan daerah (Perda) yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

Berdasarkan Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024, sebanyak 15 Peraturan Daerah direncanakan untuk ditetapkan. Namun, pada tahun 2024, sebanyak 12 Perda telah berhasil ditetapkan, sementara 1 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Selain itu, terdapat 2 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang batal diusulkan, dikarenakan keterbatasan anggaran dan waktu pengusulan yang tidak memungkinkan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kabupaten Klaten akan memprioritaskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diusulkan dalam Propemperda Tahun 2025. Ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menciptakan

peraturan yang relevan, adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat perlindungan HAM di tingkat daerah.

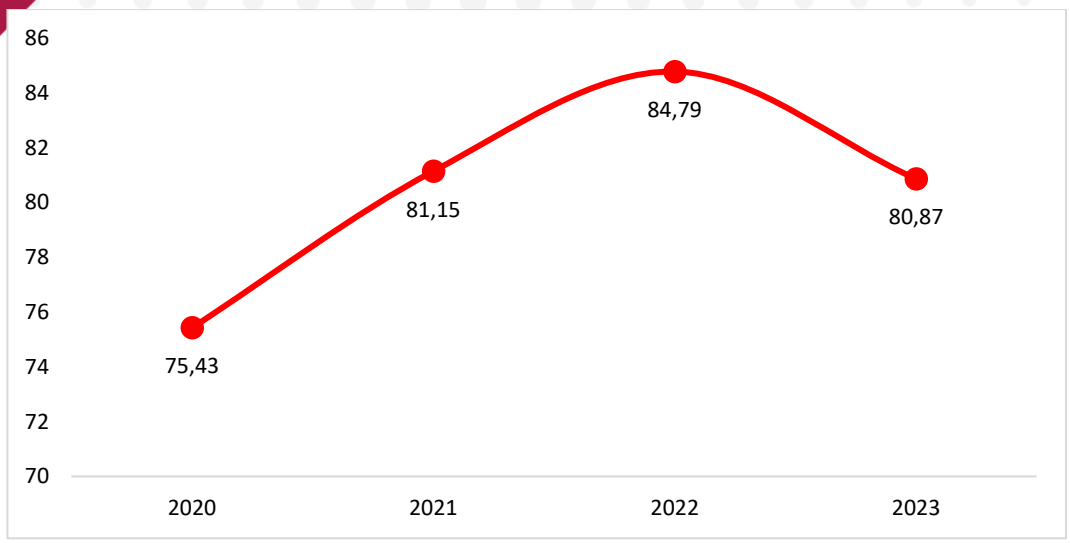
Tabel 2.124
Perkembangan Jumlah Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indeks Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Tahun	Variabel			
		Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Perkara	Indeks Kabupaten peduli HAM
1.	2020	10	73	10	PEDULI
2.	2021	7	78	15	-
3.	2022	7	73	15	PEDULI
4.	2023	15	65	13	PEDULI
5.	2024	15	57	15	PEDULI

Untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif serta menjamin kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan demokratis, capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kabupaten Klaten menjadi tolok ukur penting. IDI merupakan indikator komposit yang disusun oleh BPS, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Polhukam, yang mencerminkan kualitas demokrasi daerah berdasarkan tiga aspek: kebebasan sipil, hak-hak politik dan fungsi lembaga demokrasi.

Data IDI Jawa Tengah menunjukkan bahwa capaian IDI dalam beberapa tahun terakhir berada pada kategori baik, meskipun mengalami fluktuasi seiring dinamika demokrasi lokal. Penguatan terlihat pada partisipasi masyarakat dalam pemilu dan musyawarah desa, serta keterbukaan ruang publik terhadap aspirasi dan kritik. Namun, tantangan masih ada dalam penguatan lembaga demokrasi, seperti peran pengawasan DPRD, keberdayaan partai politik dan responsivitas pemerintahan terhadap hak masyarakat.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun iklim demokrasi di Klaten relatif kondusif, penguatan sistemik tetap diperlukan. Peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi politik dan perluasan partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mendorong demokrasi yang lebih substantif di tingkat lokal.



Gambar 2.112 Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020-2023

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Pada aspek Kebebasan Sipil, IDI mencatat angka 73,68 pada tahun 2020, kemudian meningkat hingga mencapai 88,83 pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan menjadi 85,84 pada tahun 2023. Sementara itu, pada aspek Hak-Hak Politik, indeks tercatat sebesar 75,46 pada tahun 2020, meningkat secara signifikan menjadi 82,73 pada tahun 2022, namun sedikit menurun menjadi 80,28 pada tahun 2023. Untuk aspek Lembaga Demokrasi, nilai indeks berada di angka 77,60 pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 83,25 pada tahun 2022, namun kembali turun pada tahun 2023 menjadi 76,70. Fluktuasi nilai IDI ini mencerminkan dinamika demokrasi di Kabupaten Klaten selama empat tahun terakhir, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial dan kelembagaan. Meskipun mengalami penurunan pada beberapa aspek di tahun terakhir, secara umum capaian IDI menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah.

Tabel 2.125
Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Tahun 2020-2024

Aspek IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten Menurut Aspek				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kebebasan Sipil	73,68	87,9	88,83	85,84	N/A
Hak-Hak Politik	75,46	77,68	82,73	80,24	N/A
Lembaga-Lembaga Demokrasi	77,6	78,63	83,25	76,73	N/A
IDI	75,43	81,15	84,79	80,87	N/A

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Klaten, 2024

Dalam hal penegakan peraturan daerah (Perda), terdapat peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Persentase penegakan Perda meningkat dari 92,00 pada tahun 2020 menjadi 100% ditahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan efektivitas dalam penegakan regulasi daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, capaian dalam penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) juga mengalami peningkatan yang signifikan, naik dari 92% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2024, yang menandakan bahwa pelayanan penegakan aturan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban dan kebersihan semakin membaik.

Secara keseluruhan, capaian ini menjadi indikator bahwa tingkat kedisiplinan, ketertiban sosial dan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Klaten mengalami tren positif, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, hukum, serta pentingnya peran serta dalam menjaga harmoni sosial. Upaya berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok-kelompok sosial sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan memperkuat kondisi ini demi terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan berdaya.

Tabel 2.126
Jumlah Linmas, Penegakan Perda dan Penyelesaian K3
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	31	31	31	31	30
Persentase Penegakan PERDA	%	92	92,3	95,8	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	92	91	92	98,78	100

Sumber : Satpol PP Kab. Klaten, 2024

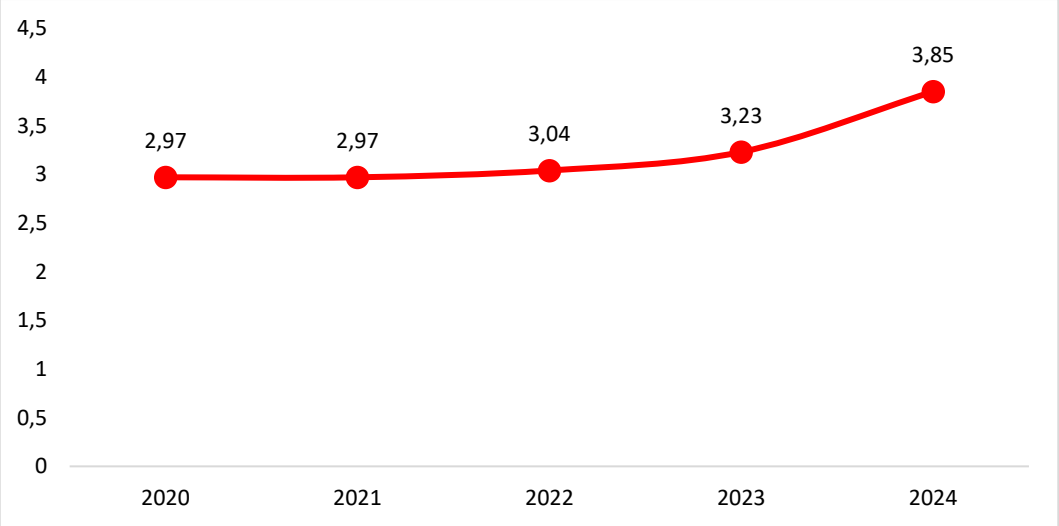
Untuk menciptakan harmoni di Kabupaten Klaten, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak. Fokus utama adalah pemerataan ekonomi, penguatan toleransi, pelestarian budaya dan kolaborasi antar stakeholder. **Indeks harmoni** sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat keharmonisan, kerukunan dan keseimbangan dalam masyarakat, baik secara sosial, budaya, ekonomi dan keberagaman di Kabupaten Klaten. Indeks ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik masyarakat hidup berdampingan, saling menghargaidan bekerja sama, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam membangun harmoni.

Pengukuran Indeks harmoni di Kabupaten Klaten baru akan dilakukan mulai di tahun 2025. Hasil pengukuran Indeks Harmoni ini akan digunakan

sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan pelayanan publik dan mempromosikan kerukunan serta persatuan dalam masyarakat.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

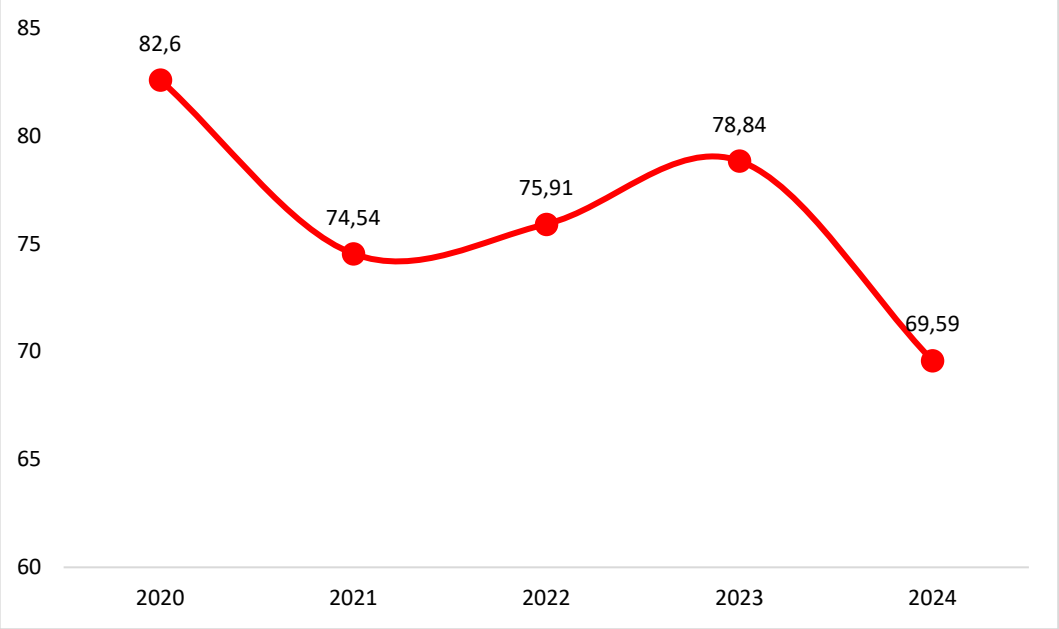
Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat aspek, yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek pasar/market, aspek sumber daya manusia/human capital dan aspek penguat/enabling environment. Secara keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimens, dan 97 indikator penilaian yang merepresentasikan keempat aspek tersebut. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Perkembangan IDSD di Kabupaten menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 sebesar 2,97 dan meningkat ditahun 2024 menjadi 3,85.



Gambar 2.113 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan mencegah korupsi, Kabupaten Klaten bersama KPK RI melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023. Survei ini bertujuan memetakan risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem antikorupsi. Hasilnya menunjukkan skor 70,97, menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal penting perlunya penguatan sistem pencegahan korupsi, sesuai dengan kerangka Indeks Integritas Nasional (IIN). Beberapa langkah strategis yang didorong antara lain digitalisasi layanan, penguatan pengawasan internal dan partisipasi publik. Upaya peningkatan SPI dan IIN akan menjadi bagian dari kebijakan reformasi

birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Penurunan nilai SPI menegaskan perlunya percepatan reformasi tata kelola yang berintegritas. Peningkatan integritas melalui strategi konkret akan menjadi fokus penting dalam arah pembangunan Kabupaten Klaten ke depan.



Sumber : Inspektorat Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.114 Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Inspektorat telah membuat program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko yang bertujuan untuk mengarahkan Perangkat Daerah dalam kondisi optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan penerapan SPIP. Berdasarkan hasil *Quality Assurance* yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah level 3 (terdefinisi).

Tabel 2.127
Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

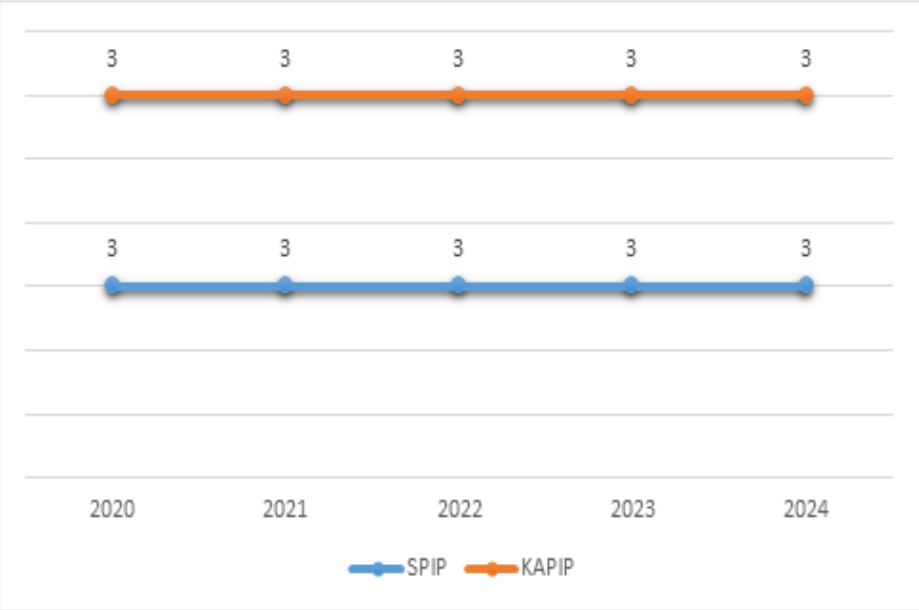
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
2	Maturitas SPIP	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2024

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Model peningkatan Kapabilitas APIP mengacu kepada *Internal Audit*

Capability Model (IACM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasikan aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Capaian kapabilitas APIP pada tahun 2020-2024 menunjukkan level yang sama yaitu level 3. Kondisi ini berarti sudah mencapai target dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dimana target level Kapabilitas APIP adalah level 3 *(Integrated)* yang diartikan bahwa APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

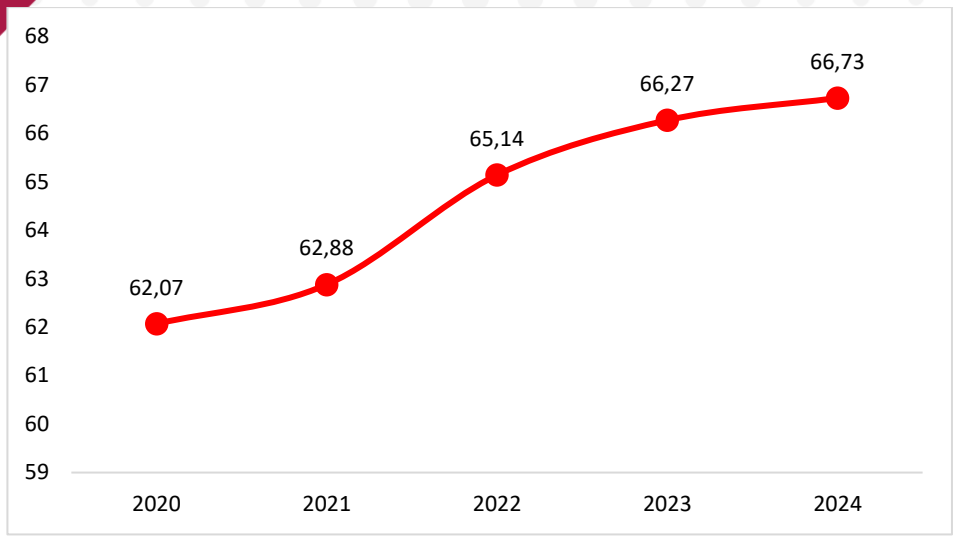


Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.115 Capaian Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Tahun 2020-2024

Pada RPJMD Kabupaten Klaten target akhir nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang baik.

Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Klaten di lima tahun terakhir menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2024 nilai AKIP menunjukkan sebesar 66,73 naik dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung dengan peningkatan nilai di semua komponen penilaian AKIP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana yang ada dalam tabel berikut



Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.116 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

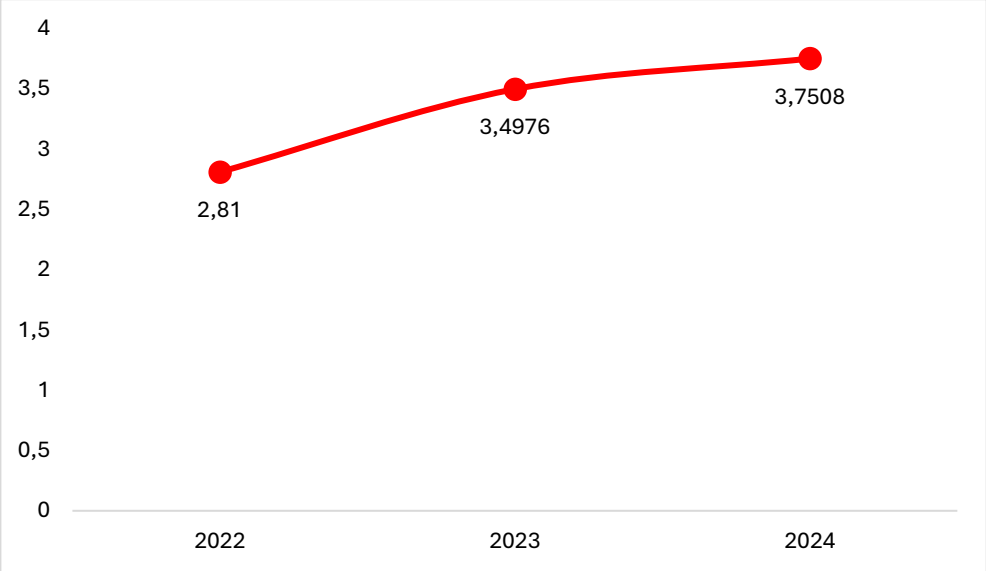
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan selambat lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kabupaten Klaten menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui capaian penyampaian laporan keuangan yang 100% tepat waktu selama lima tahun terakhir (2020–2024). Keberhasilan Kabupaten Klaten dalam mempertahankan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara konsisten menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sekaligus mendukung tercapainya opini audit yang positif dan memperkuat fondasi transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan keuangan publik.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan mekanisme penting yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta capaian kinerja dan akuntabilitas dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Pada tahun 2024, Kabupaten Klaten meraih penghargaan peringkat ke-2 secara nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan capaian nilai sebesar 3,7508. Capaian ini merupakan prestasi membanggakan

sekaligus menjadi bukti nyata atas komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten tahun 2024 memperoleh penilaian sangat baik dengan nilai tinggi, mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di semua lini pemerintahan daerah, serta memperkuat sinergi antara perangkat daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.117 Nilai EPPD di Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024

2.4.4. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

Kinerja indikator kunci setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.128
Capaian Kinerja Indikator Kunci Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Klaten

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	73,97	67,26	43,05	92,14	92,98
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	88,54	83,91	84,15	99,67	99,45

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	71,14	72,11	68,12	97,47	98,03
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5,79	0,84	1,34	10,91	13,90
	Kesehatan					
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,13	1,41	1,43	1,45	1,51
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	66,67	66,67	95,74	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,44	95,24	100	100	85,88
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,99	100	99,99	100	94,46
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,70	98,21	100	100	93,24
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,71	90,66	95,16	100	100
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31,13	58,28	94,03	100	100
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	73,26	84,98	100	100	100
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	73,14	93,41	100	100	100
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32,38	68,16	100	100	100
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,76	100	100	100	100
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	88,32	96,45	100	100	100
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Penjelasan IKK Outcome	29,28	24,65	100	100	100
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	86,08	88,35	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	5,74	10,95	35,79	83,100	47,07
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	91,80	92,69	93,15	93,35	94,29

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
	terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota					
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100	100	100
1.c.6	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100	100	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota	N/A	89,00	94,67	91,05	91,39
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	100	100
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100
1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	NA	NA	0,05	0,36	0,04
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,01	3,00	4,28	4,15	2,44
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	100	100	100	100
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	917.520	3.400	100	100	100
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6.500	4.812	100	100	100
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	39.200	4.181	100	100	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	62,85	67,12	39,63	58,99	83,33
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14,91	15,00	15,85	18,84	15,97
	Sosial					
1.f.1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	26,06	17,69	95,20	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	0	77,78	70,00	100
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3,51	4,35	11,00	13,60	7,39
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS (Ketenagakerjaan)	8,79	6,15	71,14	96,44	3,56
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	21,11	15,87	35,30	81,34	85,34
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,70	0,380	0,76	3,01	2,16
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,01	0,004	100,00	100,00	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,30	4,996	5,57	1,99	2,85
	Pangan					
2.h.1	Persentase Cadangan Pangan	244,03	251,98	100	100	92,72
	Pertanahan					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	N/A	N/A	N/A	100	100
2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	N/A	N/A	100	100	N/A
2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	100	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	N/A	N/A	100	N/A	N/A
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	N/A	100	100	100	100
	Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	50,90	55,90	62,83	63,50	61,09
2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	23,24	43,62	55,67	59,94	62,50
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	0	0	0

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	97,87	98,18	99,14	97,89	99,35
2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	43,21	69,36	63,86	68,80	73,13
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	92.87	95,37	97,97	99,12	99,29
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	31,37	15,68	27,45	96,07	95,34
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	86,44	62,50	100	100	100
2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	12,5	5,55	8,82	73,38	23,44
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,10	1,60	2,08	1,95	1,95
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,90	70,30	66,08	65,28	66,43
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,95	16,97	17,70	12,54	8,22
	Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas	NA	NA	0,125	0,125	0,12
2.n.2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	N/A	86,00	62,56	72,85	82,00
	Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	100	100	100
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	N/A	61,54	75,00	86,67	78,13
2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	65,00	68,00	71,00	73,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	29,75	45,55	67,62	88,46	88,85
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	11,08	18,37	31,94	67,18	63,69
	Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	-63%	116%	154%	24%	36%
	Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,02	1,05	1,08	7,61	7,51
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,15	57,11	96,86	95,64	94,42
2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	0	39,00	51,00	190,00	55,00

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Statistik					
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100
	Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	N/A	58,60	58,60	72,87	85,10
	Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya					
	Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	64,04	64,18	59,73	64,67	78,09
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	13,12	43,57	63,56
	Kearsipan					
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	70,00	70,00	70,01	100	100
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	63,30	63,33	64,17	82,50	89,17
	Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	27788	30421,13	100	100	100
	Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	-88,00	-98,00	129,59	171,05	31,08
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-66,00	17,00	193,00	32,08	5,36
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	15,00	11,80	31,80	35,60	38,00
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.351.399.840.000	2.201.653.210.000	1.790.230.750.000	1.926.078.330.000	2.1423.300.000.000
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,59	2,93	4,13	5,62	7,08
	Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	N/A	66,94	69,75	68,31	68
3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	N/A	50,00	0	50,00	68,65
	Kehutanan					
3.h	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	100	100	0	0
	Perdagangan					

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100	100	100	100
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	95,00	94,00	96,00	96,00	87,00
3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	65,00	70,00	72,00	75,00	80,00
	Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	-	-	42	61	98
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	-	1	-	-	97,56
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	-	-	-
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65	115	181	268	336
	Transmigrasi					
3.h	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Perencanaan dan Keuangan					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	N/A	N/A	38,585	37,026	34,567
4.a.2	Rasio PAD	12,80	12,27	13,84	12,69	13,43
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	68,372	73,02	61,28	60,095	62,93
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pengadaan					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2,68	2,43	69,61	73,49	43,55
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	83,95	94,02	44,48	46,73	69,52

No IKK	Urusan/ IKK Outcome	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	20,11	4,77	87,47	38,82
	Kepegawaian					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	123,35	151,90	60,11	59,64	60,24
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,83	20,98	29,15	24,09	21,41
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	100	100	100
	Manajemen Keuangan					
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	16,29	8,02	6,41	0,94	8,45
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	8,33	26,59	30,44	11,84	11,58
4.d.3	Assets Management	4	4	4	4	4
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	16,43	19,39	21,23	112,71	10,102
	Transparansi dan Partisipasi Publik					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	119,93	100	100	83,69	92,34
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	100	100	100	100

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Mendasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang adan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Berikut gambaran mengenai kinerja Keuangan masa lalu Kabupaten Klaten.

2.5.1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan

keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu dianalisis terhadap perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan daerah. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, adalah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 4 tahun terakhir, yaitu dari sebesar Rp.2,57 Triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 2,76 triliun pada tahun 2024. Secara rata-rata peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 hingga tahun 2024 pada angka 1,82%.

Secara rinci sumber pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rp)

Kode	Uraian	Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Pertumbuhan Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.578.135.836.354**	**2.570.037.777.373**	**2.587.693.432.935**	**2.645.498.554.643**	**2.769.790.059.107**	**1,82**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**329.963.261.898**	**315.304.009.782**	**358.048.103.989**	**339.062.660.642**	**372.119.407.091**	**3,39**
4.1.01	Pajak Daerah	116.132.536.269	126.672.231.091	146.179.152.569	165.852.621.120	180.723.655.751	11,72
4.1.02	Retribusi Daerah	14.760.621.483	14.405.348.660	17.152.918.048	18.752.608.690	148.686.406.479	179,43
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.577.664.499	16.409.075.267	18.641.433.357	21.741.480.548	23.716.628.018	8,17
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	181.492.439.647	157.817.354.764	176.074.600.015	132.715.950.284	18.992.716.843	(27,95)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.752.155.233.956**	**2.131.117.520.091**	**2.214.576.328.946**	**2.291.935.894.001**	**2.384.470.652.016**	**8,27**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.573.561.257.076	1.923.414.170.983	1.982.237.746.675	2.058.100.270.592	2.129.849.584.578	8,16
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	178.593.976.880	207.703.349.108	232.338.582.271	233.835.623.409	254.621.067.438	9,42
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**496.017.340.500**	**123.616.247.500**	**15.069.000.000**	**14.500.000.000**	**13.200.000.000**	**(43,91)**
4.3.01	Pendapatan Hibah	115.170.740.000	15.627.000.000	15.069.000.000	14.500.000.000	13.200.000.000	(25,69)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	380.846.600.500	107.989.247.500		-		

Keterangan

*#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019 *) An-Audite*

Proporsi pendapatan daerah di Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pendapatan daerahnya, masih didominasi oleh Pendapatan Transfer setiap tahunnya proporsi pendapatan transfer selalu meningkat dari sebesar 67,96% pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 86,09% pada tahun 2024. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil yaitu di bawah 15%. Dapat dikatakan bahwa kemandirian Kabupaten Klaten masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Selengkapnya proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada grafik berikut.

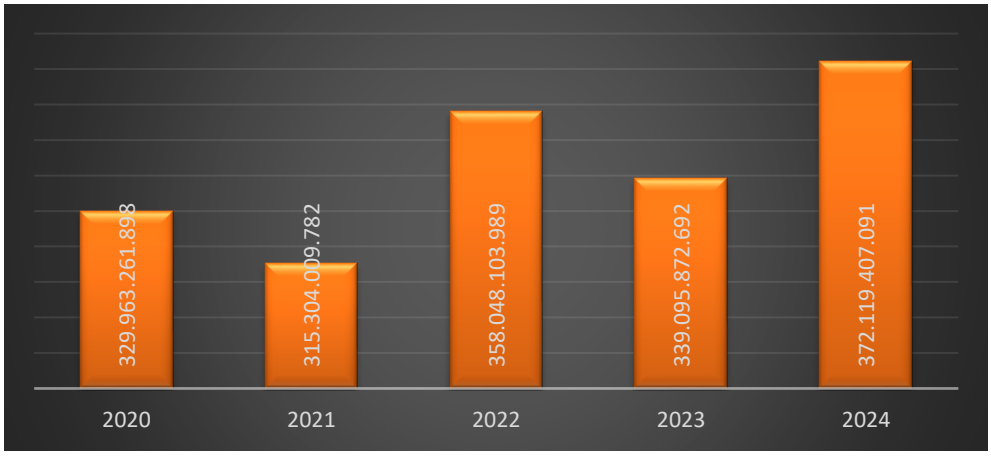


Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Gambar 2.118 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

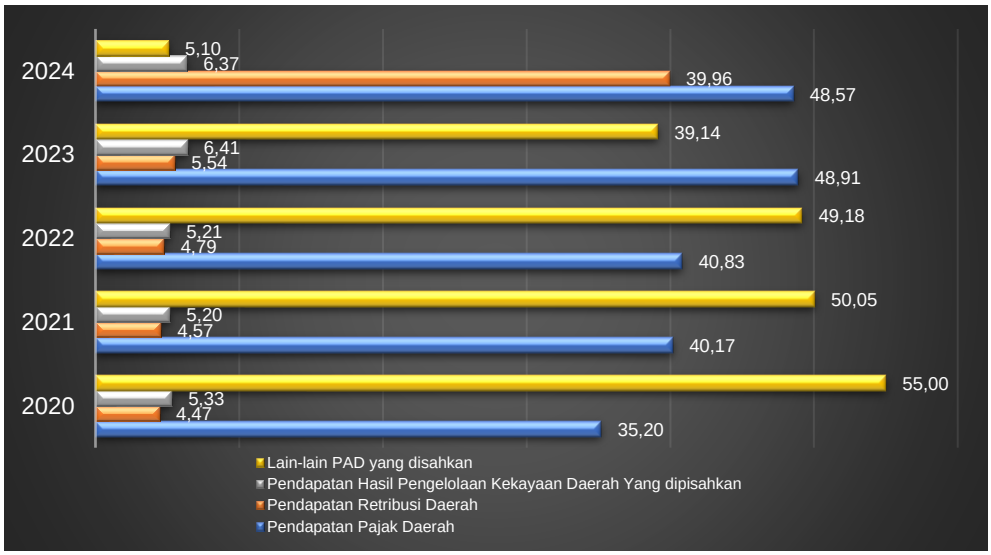
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2021 PAD Kabupaten Klaten sebesar Rp. 315.304.009.782 meningkat cukup tinggi menjadi Rp. 358.048.103.989 ditahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp. 372.119.407.091 seperti terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Gambar 2.119 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang disahkan. Secara proporsi PAD tahun 2020-2023 masih didominasi oleh lain-lain PAD yang disahkan, namun pada tahun 2024 didominasi oleh pendapatan pajak daerah sebesar 48,57 % diikuti oleh pendapatan retribusi sebesar 39,96% pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6,37% dan sebesar 5,10% dari lain-lain PAD yang disahkan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

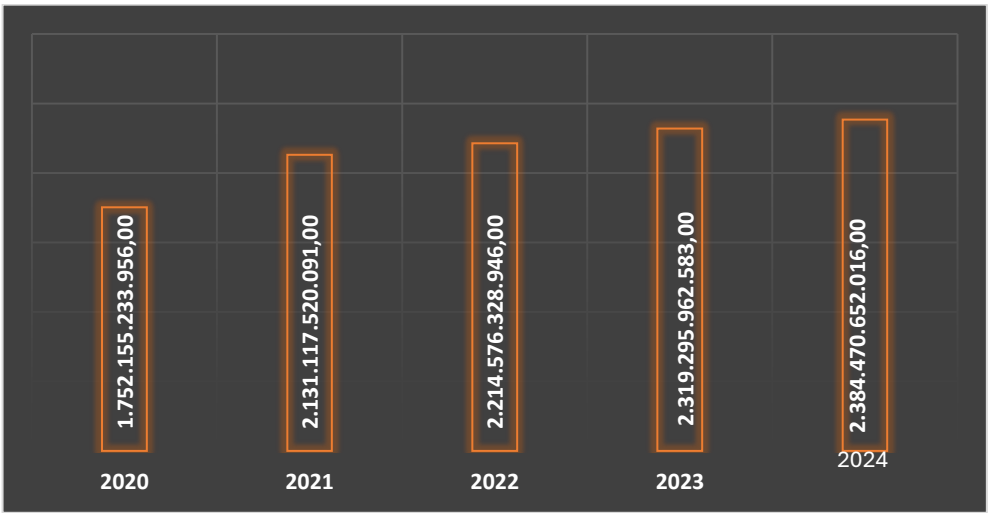
Gambar 2.120 Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024 (%)

Kenaikkan pendapatan asli daerah pada tahun 2021 ke tahun 2022 di terjadi pada semua sektor pendapatan asli, baik itu pendapatan asli daerah atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain lain PAD yang sah. Untuk pajak daerah ini sendiri meningkat cukup signifikan pada pendapatan daerah atas pajak penerangan jalan dan pajak BPHTB. Sedangkan untuk sektor pendapatan asli daerah atas retribusi daerah meningkat hampir merata pada semua jenis pendapatan retribusi daerah. Hal ini disebabkan oleh sudah pulihnya perekonomian kembali pasca pandemi covid 19. Pada tahun 2024 pendapatan asli daerah didominasi oleh pendapatan pajak daerah disebabkan oleh perubahan regulasi dimana pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan yang semula menjadi bagian lain lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2024 menjadi pendapatan retribusi sehingga menyebabkan penurunan yang signifikan atas lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

1) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, pada tahun 2020

pendapatan transfer sebesar Rp. 1.752.155.233.956 meningkat menjadi sebesar Rp. 2.384.470.652.016 pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Gambar 2.121 Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten berasal dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer Antar Daerah. Secara proporsi pendapatan Transfer ini masih didominasi oleh Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) pada tahun 2020 sebesar 89,81% turun pada tahun 2024 menjadi sebesar 89,32% selama lima tahun terakhir, sedangkan yang bersumber dari Transfer antar daerah menurun dari sebesar 10,19% pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,68% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

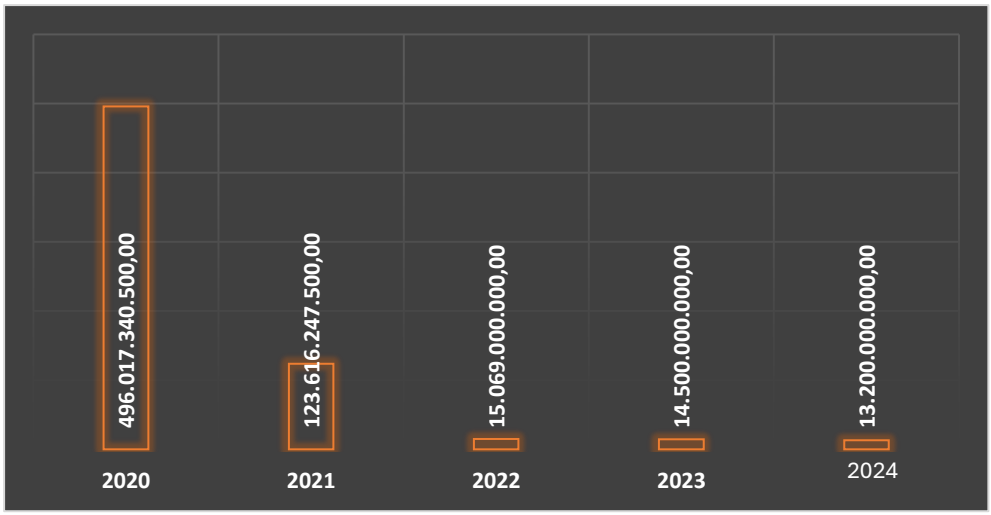
Gambar 2.122 Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024

Meningkatnya pendapatan transfer Kabupaten Klaten didorong oleh beberapa faktor antara lain sebagai beirkut ;

a) Lonjakan Total Alokasi APBN melalui KPPN Klaten
   Kenaikan total alokasi APBN yang dikelola KPPN Klaten (meliputi Klaten dan Boyolali) dari Rp 2,18 triliun (2020) → Rp 2,03 triliun (2021) → Rp 2,32 triliun (2022) → Rp 5,13 triliun (2023) → Rp 5,09 triliun (2024).
b) Pertumbuhan Komponen Transfer Utama
   Beberapa komponen transfer mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, Dana Insentif Fiskal dan DAK Non-Fisik.
c) Efisiensi dan Koordinasi Penyaluran Transfer Pusat di Tingkat Daerah.
   Tingkat realisasi transfer ke daerah di Klaten sangat tinggi demikian juga untuk penyaluran dana desa termasuk tertinggi se jawa Tengah. Disamping itu adanya koordinasi efektif antara Pemda Klaten dan KPPN Klaten menjadi salah satu factor penentu juga
d) Kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) Nasional dalam Kerangka Redistribusi
e) Secara nasional, Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN terus meningkat.

2) Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Klaten mengalami penurunan cukup signifikan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, pada tahun 2020 pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 496.017.340.500 menurun menjadi sebesar Rp. 13.200.000.000 pada tahun 2024, pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Klaten ini bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Gambar 2.123 Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dari gambar di atas kondisi pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Klaten bersumber dari Pendapatan Hibah menurun dikarenakan Dana hibah dari pusat/provinsi tidak bersifat tetap dan alokasinya sangat tergantung pada kebijakan anggaran. Disamping itu juga adanya pengetatan fiskal, perubahan prioritas nasional/daerah, atau refocusing anggaran (seperti saat pandemi) dapat menyebabkan turunnya alokasi hibah. Dalam hal pendapatan hibah ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional atau donor agar peluang disetujui lebih tinggi, Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelaporan penggunaan dana hibah, Memastikan realisasi anggaran dan pelaporan tepat waktu agar kepercayaan pemberi hibah terjaga serta Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

c. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

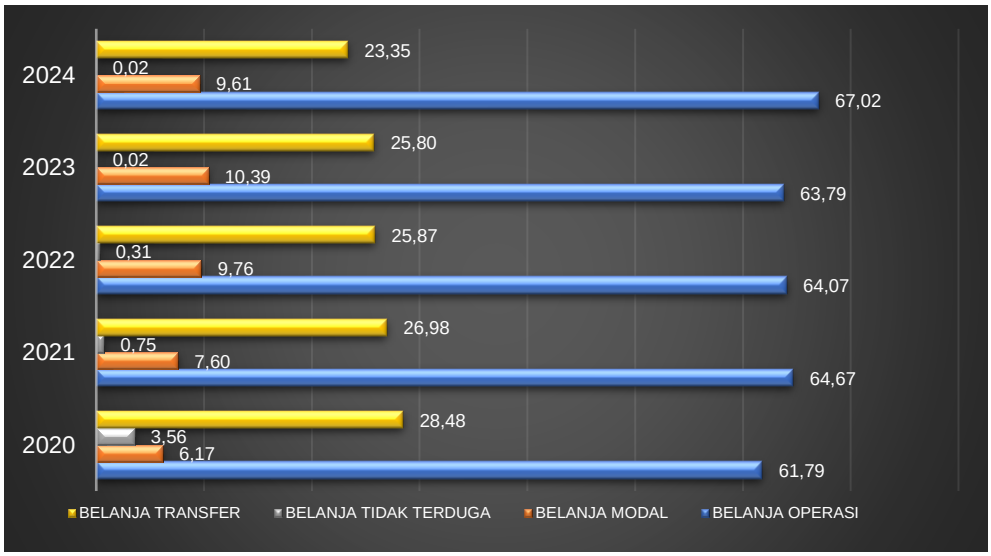
Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuasi, dari sebesar Rp. 2,54 triliun pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp. 2,52 triliun pada tahun 2022, kemudian terjadi peningkatan belanja daerah hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 2,84 trilliun. Rerata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2020-2024 sebesar 2,99%, dimana pertumbuhan paling besar yaitu belanja Operasi sebesar 5,04%. Komponen Belanja Daerah Kabupaten Klaten meliputi belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Selengkapnya belanja daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.130
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	**BELANJA DAERAH**	**2.545.164.494.577**	**2.493.406.881.542**	**2.527.619.332.474**	**2.843.755.495.798**	**2.846.943.837.640**
2.1	**Belanja Operasi**	**1.572.625.425.629**	**1.612.412.988.846**	**1.619.377.441.227**	**1.813.918.311.416**	**1.907.987.444.311**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.046.020.322.799	1.006.278.863.371	965.541.425.166	974.218.788.878	1.043.577.278.123
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	423.557.260.173	570.241.936.649	583.404.693.292	734.742.952.742	748.141.399.634
2.1.3	Belanja Bunga					
2.1.4	Belanja Subsidi	1.988.515.348	1.940.554.067	1.795.750.000	1.907.074.332	1.249.916.001
2.1.5	Belanja Hibah	97.547.602.309	28.410.769.759	57.905.772.769	89.978.195.464	104.633.550.553
2.1.6	Bantuan Sosial	3.511.725.000	5.540.865.000	10.729.800.000	13.071.300.000	10.385.300.000
2.2	**Belanja Modal**	**157.126.719.574**	**189.606.772.936**	**246.670.020.742**	**295.594.876.519**	**273.582.426.518**
2.2.1	Belanja Tanah			1.853.240.700	5.009.187.370	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	70.270.376.590	68.901.715.247	63.015.807.876	103.690.199.242	58.635.585.955
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	49.518.428.837	66.197.965.314	65.909.190.529	81.821.621.133	107.412.962.580
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.032.863.863	48.969.127.000	107.441.269.466	93.344.039.187	101.085.714.305
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.305.050.284	5.537.965.375	8.450.512.171	11.729.829.587	6.386.669.678
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				-	61.494.000
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**90.590.754.081**	**18.618.661.003**	**7.794.077.100**	**657.130.800**	**605.500.000**
2.4	**Belanja Transfer**	**724.821.595.293**	**672.768.458.757**	**653.777.793.405**	**733.585.177.063**	**664.768.466.811**
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil	13.255.263.593	16.428.812.657	16.621.066.005	18.057.136.463	20.490.965.311
2.4.1.3	Belanja Bantuan Keuangan	711.566.331.700	656.339.646.100	637.156.727.400	715.528.040.600	644.277.501.500

Sumber: Dokumen LRA Audited

Proporsi belanja Daerah Kabupaten Klaten paling mendominasi yaitu Belanja Operasi dengan rasio yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari sebesar 61,79% pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 67,02% pada tahun 2024. kemudian disusul oleh Belanja Transfer dengan rasio rerata 20% lebih, disusul Belanja Modal yang masih cukup sedikit yaitu di bawah 10% dan belanja tidak terduga rerata di bawah 1%. Seperti terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Gambar 2.124 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024

d. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuasi, dari sebesar Rp.408.687.702.548,00 pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp.529.593.676.302,00 pada tahun 2023 kemudian terjadi penurunan menjadi Rp.364.430.015.779,00. Rata-rata penurunan penerimaan pembiayaan Daerah selama tahun 2019-2024 sebesar 0,14%, yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan.

Kinerja pengeluaran pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari sebesar Rp. 1.000.000.000,00 pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 39.300.000.000,00 pada tahun 2024. Pengeluaran pembiayaan Daerah digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah, sedangkan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SILPA yang diperuntukan untuk menutup defisit serta pencairan dana cadangan dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.. Secara rinci Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah)

KODE	URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
3.1	**PENERIMAAN**	**408.687.702.548**	**440.589.680.010**	**493.720.575.841**	**529.593.676.302**	**364.430.015.779**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	382.687.702.548	440.589.680.010	493.720.575.841	529.593.676.302	319.430.015.779
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.4	Pencairan Dana Cadangan	26.000.000.000	-	-	-	45.000.000.000
3.2	**PENGELUARAN**	**1.000.000.000**	**23.500.000.000**	**24.201.000.000**	**39.300.000.000**	**-**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	-	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-
3.2.3	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	8.500.000.000	9.201.000.000	24.300.000.000	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
	PEMBIAYAAN NETTO				490.293.676.302	364.430.015.779
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**440.659.044.325**	**493.720.575.841**	**529.593.676.302**	**319.430.015.779**	**287.276.237.246**

Sumber: Dokumen LRA Audited

Tabel 2.132
Ringkasan Kerangka Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah)

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,578,135,836,354**	**2,570,037,777,373**	**2,587,693,432,935**	**2,672,891,835,275**	**2,769,790,059,107**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**329,963,261,898**	**315,304,009,782**	**358,048,103,989**	**339,095,872,692**	**372,119,407,091**
4.1.01	Pajak Daerah	116,132,536,269	126,672,231,091	146,179,152,569	165,852,621,120	180,723,655,751
4.1.02	Retribusi Daerah	14,760,621,483	14,405,348,660	17,152,918,048	18,784,804,890	148,686,406,479
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17,577,664,499	16,409,075,267	18,641,433,357	21,741,480,548	23,716,628,018
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	181,492,439,647	157,817,354,764	176,074,600,015	132,716,966,134	18,992,716,843
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,752,155,233,956**	**2,131,117,520,091**	**2,214,576,328,946**	**2,319,295,962,583**	**2,384,470,652,016**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,573,561,257,076	1,923,414,170,983	1,982,237,746,675	2,085,460,339,174	2,129,849,584,578
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	178,593,976,880	207,703,349,108	232,338,582,271	233,835,623,409	254,621,067,438
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**496,017,340,500**	**123,616,247,500**	**15,069,000,000**	**14,500,000,000**	**13,200,000,000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	115,170,740,000	15,627,000,000	15,069,000,000	14,500,000,000	13,200,000,000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	380,846,600,500	107,989,247,500			
5	**BELANJA DAERAH**	**2,545,164,494,577**	**2,493,406,881,542**	**2,527,619,332,474**	**2,843,755,495,798**	**2,846,943,837,640**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,572,625,425,629**	**1,612,412,988,846**	**1,619,377,441,227**	**1,813,918,311,416**	**1,907,987,444,311**
5.1.01	Belanja Pegawai	1,046,020,322,799	1,006,278,863,371	965,541,425,166	974,218,788,878	1,043,577,278,123
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423,557,260,173	570,241,936,649	583,404,693,292	734,742,952,742	748,141,399,634
5.1.04	Belanja Subsidi	1,988,515,348	1,940,554,067	1,795,750,000	1,907,074,332	1,249,916,001
5.1.05	Belanja Hibah	97,547,602,309	28,410,769,759	57,905,772,769	89,978,195,464	104,633,550,553
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,511,725,000	5,540,865,000	10,729,800,000	13,071,300,000	10,385,300,000
5.2	**BELANJA MODAL**	**157,126,719,574**	**189,606,772,936**	**246,670,020,742**	**295,594,876,519**	**273,582,426,518**
5.2.01	Belanja Modal Tanah			1,853,240,700	5,009,187,370	

KODE	URAIAN	REALISASI ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,270,376,590	68,901,715,247	63,015,807,876	103,690,199,242	58,635,585,955
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49,518,428,837	66,197,965,314	65,909,190,529	81,821,621,133	107,412,962,580
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	30,032,863,863	48,969,127,000	107,441,269,466	93,344,039,187	101,085,714,305
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,305,050,284	5,537,965,375	8,450,512,171	11,729,829,587	6,386,669,678
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					61,494,000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**90,590,754,081**	**18,618,661,003**	**7,794,077,100**	**657,130,800**	**605,500,000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	90,590,754,081	18,618,661,003	7,794,077,100	657,130,800	605,500,000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**724,821,595,293**	**672,768,458,757**	**653,777,793,405**	**733,585,177,063**	**664,768,466,811**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13,255,263,593	16,428,812,657	16,621,066,005	18,057,136,463	20,490,965,311
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	711,566,331,700	656,339,646,100	637,156,727,400	715,528,040,600	644,277,501,500
	SURPLUS / (DEFISIT)	***32,971,341,777***	***76,630,895,831***	***60,074,100,461***	***(170,863,660,523)***	***(77,153,778,533)***
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**408,687,702,548**	**440,589,680,010**	**493,720,575,841**	**529,593,676,302**	**364,430,015,779**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	382,687,702,548	440,589,680,010	493,720,575,841	529,593,676,302	319,430,015,779
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	26,000,000,000				45,000,000,000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1,000,000,000**	**23,500,000,000**	**24,201,000,000**	**39,300,000,000**	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000	8,500,000,000	9,201,000,000	24,300,000,000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**407,687,702,548**	**417,089,680,010**	**469,519,575,841**	**490,293,676,302**	**364,430,015,779**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**440,659,044,325**	**493,720,575,841**	**529,593,676,302**	**319,430,015,779**	**287,276,237,246**

e. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

1) Perkembangan Neraca Daerah

Aset Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang menurun, pada tahun 2019 Aset yang dimiliki sejumlah Rp. 4.157.398.988.909,00 terjadi penurunan secara jumlah hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 3.450.983.954.998,21. Aset Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, di mana Aset Tetap mendominasi jumlah aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten.

Dari sisi kewajiban mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar Rp. 14.356.397.757,00 meningkat menjadi Rp. 20.876.092.289,00 pada tahun 2020, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 14.045.774.843,00. Kewajiban Daerah didominasi oleh Utang Jangka Pendek Lainnya.

Ekuitas pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang menurun pada tahun 2019 ekuitas sebesar Rp. 4.143.042.591.152,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 3.436.938.180.155,21 hingga tahun 2023. Selengkapnya Neraca Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.133
Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
1.1	ASET LANCAR	667.032.607.795,67	649.542.579.614,62	609.784.909.004,47	398.775.921.354,60	365.768.825.643,26
1.1.1	Kas	545.964.329.071,74	542.262.068.806,28	579.990.973.188,00	366.160.229.070,00	259.955.191.126,00
1.1.2	Piutang	-44.980.197.738,73	23.097.348.080,31	-32.042.239.947,00	-18.398.601.362,81	48,431,116,638.46
1.1.3	Persediaan	166.048.476.462,66	84.183.162.728,03	61.836.175.763,47	51.014.293.647,41	57.382.517.878,80
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	178.945.272.695,00	187.445.272.695,00	200.331.096.802,95	223.932.571.934,81	230.938.307.813,87
1.2.1	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	
1.2.2	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	178.945.272.695,00	187.445.272.695,00	200.331.096.802,95	223.932.571.934,81	230.938.307.813,87
1.3	ASET TETAP	2.556.910.271.392,16	2.476.188.153.215,51	2.553.602.488.616,45	2.687.493.465.763,62	2.807.355.855.073,34
1.3.1	Tanah	832.215.833.323,00	872.759.316.356,00	876.430.381.056,00	883.964.452.106,00	905.693.246.835,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	781.817.876.877,00	854.480.555.825,00	930.401.453.124,30	1.030.039.299.542,30	1.110.509.491.893,30
1.3.3	Gedung dan Bangunan	955.733.620.648,00	1.001.172.413.563,00	1.081.341.113.090,00	1.147.038.482.182,20	1.250.073.085.841,14
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.563.883.565.527,06	1.614.799.656.227,07	1.741.846.607.536,87	1.843.870.379.498,87	1.965.669.987.201,03
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	268.305.695.189,98	285.230.432.895,92	296.112.363.856,61	318.155.313.068,62	331.507.321.052,70
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	57.293.192.856,00	68.515.490.490,00	22.718.467.637,20	28.226.907.291,00	4.384.003.724,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.902.339.513.028,89)	(2.220.769.712.141,48)	(2.395.247.897.684,54)	(2.563.801.367.925,37)	(2.760.481.281.473,83)
1.4	ASET LAINNYA	163.889.719.155,51	152.283.378.628,89	30.334.954.186,00	62.637.279.207,53	76.492.031.503,31
1.4.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0		
1.4.2	Aset Tidak Berwujud	4.690.020.198,29	11.915.835.753,00	13.107.021.728,00	13.281.564.707,00	13.591.336.393,00
1.4.3	Aset Lain-lain	149.667.268.197,22	141.321.821.332,22	118.398.242.997,44	154.601.374.732,43	186.085.184.475,50
1.4.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	-9.549.827.058,33	-9.974.225.581,62	-10.859.892.037,89	-11.867.401.699,49
1.4.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	-936.882.158,00	-936.882.158,00	-107.378.281.954,01	-121.333.182.425,70

No	Uraian	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH ASET DAERAH		**4.157.398.988.909,00**	**3.566.777.871.038,34**	**3.515.210.592.463,72**	**3.535.972.154.908,27**	**2,883,847,886,576.65**
2	**KEWAJIBAN**					
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**20.876.092.289,00**	**8.335.992.845,00**	**11.570.216.778,00**	**14.045.774.843,00**	**23.270.414.487,00**
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	29.775.000,00	47.125.000,00	51.400.000,00	0	
2.1.2	Pendapatan Diterima di Muka	0	0	0	0	2.153.330.010,00
2.1.3	Hutang Belanja	0	0	0	0	21.117.084.477,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.502.079.212,00	7.273.021.055,00	6.241.261.590,00	12.281.463.407,00	
JUMLAH KEWAJIBAN		**14.356.397.757,00**	**20.876.092.289,00**	**8.335.992.845,00**	**11.570.216.778,00**	**23.270.414.487,00**
3	**EKUITAS DANA**	3.545.901.778.749,34	3.506.874.599.618,73	3.524.401.938.130,27	3.436.938.180.155,21	3.460.286.410.485,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**4.157.398.988.909,00**	**3.566.777.871.038,34**	**3.515.210.592.463,73**	**3.535.972.154.908,27**	**3,483,556,824,972.66**

Sumber: BPKAD Kabupaten Klaten

Aset lancar cenderung mengalami penurunan di mana rata-rata penurunan sejak tahun 2019 sebesar -4,37%, di mana aset lancar menurun cukup signifikan pada tahun 2023 hingga sebesar -34,60%. Investasi jangka panjang cenderung meningkat dengan rerata sebesar 6,09% pada tahun 2019-2023. Aset tetap mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -4,26%, di mana pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Sedangkan pada aset lainnya mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 10,71% di mana pada Tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 106,49%. Secara keseluruhan Aset Daerah Kabupaten Klaten mengalami Penurunan selama tahun 2019-2023 dengan rerata penurunan sebesar -4,37%.

Kewajiban Daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,38%. Sementara Ekuitas Dana terjadi penurunan rerata sebesar -4,37%. Selengkapnya pertumbuhan Neraca Daerah sebagai berikut.

Tabel 2.134
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun Ke-				Rata-Rata
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	
1	**ASET**					
1.1	**ASET LANCAR**	**25,85**	**(2,62)**	**(6,12)**	**(34,60)**	**(4,37)**
1.1.1	Kas	15,23	(0,68)	6,96	(36,87)	**(3,84)**
1.1.2	Piutang	12,44	(151,35)	(238,73)	(42,58)	**(105,05)**
1.1.3	Persediaan	72,56	(49,30)	(26,55)	(17,50)	**(5,20)**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**0,95**	**4,75**	**6,87**	**11,78**	**6,09**
1.2.1	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
1.2.2	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,95	4,75	6,87	11,78	**6,09**
1.3	**ASET TETAP**	(22,24)	(3,16)	3,13	5,24	**(4,26)**
1.3.1	Tanah	(35,92)	4,87	0,42	0,86	**(7,44)**
1.3.2	Peralatan dan Mesin	12,62	9,29	8,89	10,71	**10,38**
1.3.3	Gedung dan Bangunan	(0,43)	4,75	8,01	6,08	**4,60**
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,04	3,26	7,87	5,86	**7,75**
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	0,83	6,31	3,82	7,44	**4,60**
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		19,59	(66,84)	24,25	**(7,67)**
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	42,69	16,74	7,86	7,04	**18,58**
1.4	**ASET LAINNYA**	**23,52**	**(7,08)**	**(80,08)**	**106,49**	**10,71**
1.4.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah					
1.4.2	Aset Tidak Berwujud	161,90	154,07	10,00	1,33	**81,82**
1.4.3	Aset Lain-lain	23,95	(5,58)	(16,22)	30,58	**8,18**
1.4.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			4,44	8,88	**6,66**
1.4.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya					

No	Uraian	Tahun Ke-				Rata-Rata
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	
JUMLAH ASET DAERAH		**(14,21)**	**(1,45)**	**0,59**	**(2,40)**	**(4,37)**
2	**KEWAJIBAN**	**45,41**	**(60,07)**	**38,80**	**21,40**	**11,38**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
2.1.2	Pendapatan Diterima di Muka	-	-	-	-	-
2.1.3	Hutang Belanja	-	-	-	-	-
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**45,41**	**(60,07)**	**38,80**	**21,40**	**11,38**
3	**EKUITAS DANA**	**(14,41)**	**(1,10)**	**0,50**	**(2,48)**	**(4,37)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			**(14,21)**	**(1,45)**	**0,59**	**(2,40)**

Sumber: BPKAD Kabupaten Klaten

2) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas diukur dengan rasio lancar dengan kondisi cenderung menurun, pada tahun 2019 sebesar 36,92 menurun pada tahun 2023 sebesar 28,39. Rasio cepat (*Rasio Quick*) juga mengalami penurunan dari sebesar 30,22 pada tahun 2019 menurun menjadi 24,76 pada tahun 2023. Sedangkan cash rasio juga mengalami penurunan dari sebesar 26,68 pada tahun 2019 menjadi 22,74 pada tahun 2023. Selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Hasil Analisis Likuiditas Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Rasio Likuiditas	Tahun Ke				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar = Aset lancar dibagi kewajiban lancar.	31,95	77,92	52,70	28,39	15,71
2	Rasio cepat = (Aset Lancar dikurangi Persediaan) dibagi Kewajiban Lancar	24,00	67,82	47,36	24,76	13,25
3	Cash Ratio = (Kas + Setara Kas) dibagi Kewajiban Lancar	21,51	59,23	45,78	22,74	11,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Klaten, diolah

3) Rasio Solvabilitas

Rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Klaten, selama periode tahun 2019 sebesar 0,003 meningkat tahun 2023 sebesar 0,004. Sedangkan Rasio Utang (Kewajiban) terhadap Aset selama kurun waktu periode tahun 2019

sebesar 0,003 meningkat tahun 2023 sebesar 0,004. Hasil analisis *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, dilihat dari kinerja neraca Daerah sangat sehat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Rasio Solvabilitas	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Utang (kewajiban) terhadap Ekuitas = Total Utang (kewajiban) dibagi Ekuitas (Modal)	0,006	0,002	0,003	0,004	0,006
2	Rasio Utang (Kewajiban) terhadap Aset = Total Utang atau Kewajiban dibagi Total Aset	0,006	0,002	0,003	0,004	0,007

Sumber: BPKAD Kabupaten Klaten, diolah

2.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Kebijakan ini juga bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Adapun secara terinci kebijakan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Klaten Sebagai berikut:

a. Analisis Fiskal Daerah

Beberapa analisis fiskal daerah untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah diuraikan berikut ini.

1) Rasio Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran pembiayaan tertentu. Kapasitas fiskal ini digunakan oleh Kemenkeu RI untuk: a) mempertimbangkan dalam pengusulan daerah penerima Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam Negri dan/atau pinjaman luar negeri atau hibah luar Negri dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal *(Pre-financing)*; b) penentuan besaran dana pendampingan oleh pemerintah daerah jika di persyaratkan; c) pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; d) pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat; e) pertimbangan dalam pemberian persetujuan

pembentukan dana abadi daerah; f) pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementrian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan; g) pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur dan h) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkeu No. 65 th 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten/Kota dihitung melalui rumusan sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu]

dengan penjabaran sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
PAD	= pendapatan asli daerah;
TKD	= transfer ke daerah;
PTAD	= pendapatan transfer antar daerah;
LLPS	= lain-lain pendapatan daerah yang sah;
SiLPA	= sisa lebih perhitungan anggaran;
OTSUS	= dana otonomi khusus;
DTI	= dana tambahan infrastruktur;
DD	= dana desa;
ADD	= alokasi dana desa;
BP	= belanja pegawai;
BBH	= belanja bagi hasil;
BB	= belanja bunga;
PUD	= pembiayaan utang daerah.

Sedangkan cara perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$$

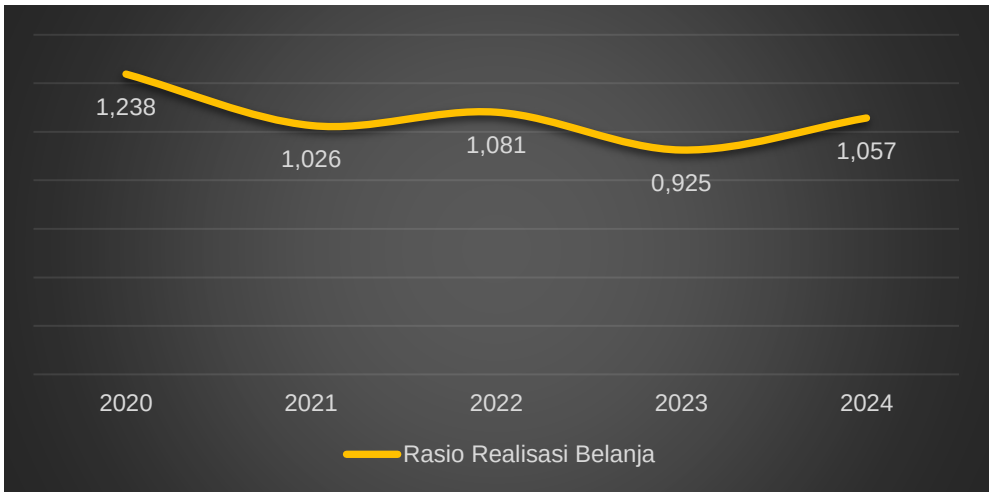
Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
$KFD_{kabupaten/kota-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota;
Belanja $Pegawai_{kabupaten/kota-i}$	= Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Rentang RFKD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 0,947	Sangat rendah
0,947 ≤ RKFD < 1,203	Rendah
1,203 ≤ RKFD < 1,459	Sedang
1,459 ≤ RKFD < 1,715	Tinggi
1,715 ≤ RKFD	Sangat Tinggi

Dari hasil perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Klaten pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024, terjadi penurunan Rasio kapasitas fiskal Daerah yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,238 (kategori Sedang) turun menjadi sebesar 1,057 (kategori Rendah) pada tahun 2024. Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Klaten masih tergolong Rendah, artinya kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Klaten juga masih rendah.



Sumber: Kemenkeu, 2024

Gambar 2.125 Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

2) Rasio/ Derajat Kemandirian/ Desentralisasi Fiskal Daerah (Kemandirian Keuangan Daerah)

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Derajat kemandirian ini biasanya diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut.

Di Kabupaten Klaten, data menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2020, PAD hanya menyumbang 12,80% dari total pendapatan daerah. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 13,43% pada tahun 2024. Di sisi lain, ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan, dari 87,20% pada tahun 2020 menjadi 86,57% pada tahun 2024. Meskipun peningkatannya relatif kecil, yaitu 0,63 poin, tren ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya secara bertahap.

Namun demikian, kemandirian fiskal Kabupaten Klaten secara umum masih tergolong rendah. Dengan kontribusi PAD yang masih di kisaran 13%, sebagian besar pendanaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat. Ketergantungan yang tinggi ini berisiko menghambat fleksibilitas daerah dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan pembangunan yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Lebih lanjut, perlu dicermati pula bahwa peningkatan PAD belum tentu mencerminkan peningkatan kinerja ekonomi daerah secara nyata, terutama jika sebagian besar PAD tersebut berasal dari pendapatan bunga simpanan dana daerah yang belum dibelanjakan. Kondisi ini justru menunjukkan adanya belanja yang belum optimal, sehingga potensi dana daerah belum dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas dan pelayanan masyarakat.

Untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah optimalisasi sumber-sumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta penguatan peran BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal. Selain itu, efisiensi dan efektivitas belanja daerah juga harus ditingkatkan, agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun terdapat tanda-tanda peningkatan kemandirian fiskal di Kabupaten Klaten, masih diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk benar-benar mewujudkan daerah yang mandiri secara keuangan dan mampu membiayai pembangunan dari sumber daya sendiri.

Tabel 2.137
Derajat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	329.963.261.898	315.304.009.782	358.048.103.989	339.095.872.692	372.119.407.091
Total Pendapatan Daerah	2.578.135.836.354	2.570.037.777.373	2.587.693.432.935	2.672.891.835.275	2.769.790.059.107
Rasio/Derajat Kemandirian/ Desentralisasi Fiskal Daerah	12,80	12,27	13,84	12,69	13,43
Rasio/Derajat Ketergantungan Fiskal Daerah	87,20	87,73	86,16	87,31	86,57

Sumber : Hasil Analisis

3) Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Klaten bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir (2020-2024) cenderung meningkat. Secara proporsi, belanja operasi mendapatkan porsi belanja paling besar, dikarenakan dalam struktur belanja Operasi terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan presentase yang relatif besar.

4) Proporsi Belanja Pegawai

Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Pegawai, sehingga terjadi peningkatan Belanja barang dan jasa dan belanja modal yang dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat mendorong roda perekonomian daerah dan kualitas pelayanan publik. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Klaten menunjukkan penurunan dari sebesar 41,10% pada tahun 2020 menjadi sebesar 36,66% pada tahun 2024. Perkembangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.138
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024 (%)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	1.046.020.322.799	1.006.278.863.371	965.541.425.166	974.218.788.878	1.043.577.278.123
Belanja Daerah	2.545.164.494.577	2.493.406.881.542	2.527.619.332.474	2.843.755.495.798	2.846.943.837.640
Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	41,10	40,36	38,20	34,26	36,66

Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten, 2025

1) Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Proporsi belanja modal Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan dari sebesar 6,17% pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,25% pada tahun 2023, namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi

sebesar 9,61%. Perkembangan rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.139
Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024 (%)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Modal	157.126.719.574	189.606.772.936	246.670.020.742	295.594.876.519	273.582.426.518
Total Belanja Daerah	2.545.164.494.577	2.493.406.881.542	2.527.619.332.474	2.843.755.495.798	2.846.943.837.640
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	6,17	7,60	9,76	10,25	9,61

Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten, 2025

b. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali, atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit anggaran Daerah.

Analisis ini diperlukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan daerah dimasa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah dengan melihat kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Pada tahun 2020 Pembiayaan Daerah mengalami surplus sebesar Rp. 32.971.341.777, meningkat hingga tahun 2021 menjadi Rp. 76.630.895.831 kemudian pada tahun 2022 turun menjadi sebesar Rp. 60.074.100.461 dan 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 210.163.660.523,00 dan 2024 kembali defisit sebesar Rp. 77.153.778.533,00, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	2.578.135.836.354	2.570.037.777.373	2.587.693.432.935	2.672.891.835.275	2.769.790.059.107
Belanja Daerah	2.545.164.494.577	2.493.406.881.542	2.527.619.332.474	2.843.755.495.798	2.846.943.837.640
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	23.500.000.000	-	39.300.000.000	-

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Surplus/Defisit riil	32.971.341.777	76.630.895.831	60.074.100.461	210.163.660.523	77.153.778.533

Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten, 2025

Komposisi penutup defisiit Riil Anggaran Kabupaten Klaten pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	382.687.702.548	440.589.680.010	493.720.575.841	529.593.676.302	319.430.015.779
Pencairan Dana Cadangan	26.000.000.000	-	-	-	45.000.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten, 2025

2.5.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan mendistribusikan pada sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

a. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Klaten selama periode waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut.

Tabel 2.142
Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 (Rupiah)

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.833.745.861.364**	**2.632.726.717.930**	**2.703.468.144.047**	**2.738.119.296.744**	**2.783.303.911.918**	**2.815.873.297.012**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**543.860.359.592**	**545.374.208.058**	**589.940.593.297**	**624.591.745.994**	**669.776.361.168**	**702.345.746.262**
4.1.01	Pajak Daerah	335.842.142.572	333.328.350.000	364.809.577.276	386.354.371.862	417.645.117.871	451.774.326.250
4.1.02	Retribusi Daerah	161.477.544.402	175.909.266.251	185.701.624.971	195.349.447.701	205.544.646.226	203.842.344.538
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.101.122.090	21.188.191.751	23.307.010.926	25.637.712.018	28.201.483.220	28.201.483.220
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	24.439.550.528	14.948.400.056	16.122.380.124	17.250.214.413	18.385.113.851	18.527.592.254
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.276.845.501.772**	**2.074.312.509.872**	**2.100.487.550.750**	**2.100.487.550.750**	**2.100.487.550.750**	**2.100.487.550.750**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.152.182.111.772	1.964.597.716.872	1.990.772.757.750	1.990.772.757.750	1.990.772.757.750	1.990.772.757.750
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.663.390.000	109.714.793.000	109.714.793.000	109.714.793.000	109.714.793.000	109.714.793.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.040.000.000**	**13.040.000.000**	**13.040.000.000**	**13.040.000.000**	**13.040.000.000**	**13.040.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
5	**BELANJA DAERAH**	**3.115.022.098.610**	**2.902.695.275.831**	**2.849.605.877.846**	**2.880.698.795.615**	**2.918.433.905.371**	**3.085.898.287.432**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.137.758.476.421**	**2.071.412.480.301**	**1.937.492.546.112**	**1.962.157.694.394**	**1.991.728.925.436**	**2.144.515.641.693**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.287.952.386.326	1.306.666.450.406	1.231.664.731.967	1.221.664.729.635	1.220.295.279.707	1.212.607.305.165
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.402.255.451	729.214.514.095	671.245.841.373	704.306.254.335	733.814.612.790	829.638.075.584
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	46.903.184.644	29.031.515.800	27.539.427.969	28.895.808.605	30.106.457.911	94.037.839.215
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.500.650.000	4.500.000.000	5.042.544.804	5.290.901.819	5.512.575.028	6.232.421.728
5.2	**BELANJA MODAL**	**266.692.588.557**	**214.831.681.280**	**303.218.347.634**	**306.526.855.390**	**310.542.139.650**	**321.977.114.785**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.372.440.249	40.709.345.112	81.882.500.564	82.775.945.470	83.860.251.608	86.948.205.768
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.718.919.254	61.724.468.200	67.225.725.027	67.959.245.391	68.849.463.274	71.384.680.882
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	85.458.247.134	100.284.566.052	117.608.772.608	118.892.037.751	120.449.439.067	124.884.702.965
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.135.481.920	12.053.301.916	36.494.345.557	36.892.546.478	37.375.812.654	38.752.087.992
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.500.000	60.000.000	7.003.878	7.080.300	7.173.047	7.437.177

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.061.938.938**	**12.651.547.625**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.061.938.938	12.651.547.625	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**699.509.094.694**	**603.799.566.625**	**603.894.984.100**	**607.014.245.831**	**611.162.840.285**	**614.405.530.954**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42.332.144.894	49.923.761.625	55.051.120.225	58.170.381.956	62.318.976.410	65.561.667.079
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	657.176.949.800	553.875.805.000	548.843.863.875	548.843.863.875	548.843.863.875	548.843.863.875
	SURPLUS / (DEFISIT)	***(281.276.237.246)***	***(269.968.557.901)***	***(146.137.733.799)***	***(142.579.498.871)***	***(135.129.993.453)***	***(270.024.990.420)***
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**287.276.237.246**	**269.968.557.901**	**175.807.733.799**	**172.389.498.871**	**165.099.993.453**	**280.164.990.420**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	287.276.237.246	269.968.557.901	175.807.733.799	172.389.498.871	165.099.993.453	220.164.990.420
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	60.000.000.000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**6.000.000.000**	**0**	**29.670.000.000**	**29.810.000.000**	**29.970.000.000**	**10.140.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	0	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	-	9.670.000.000	9.810.000.000	9.970.000.000	10.140.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**281.276.237.246**	**269.968.557.901**	**146.137.733.799**	**142.579.498.871**	**135.129.993.453**	**270.024.990.420**

Sumber : BPKAD Kabupaten Klaten, 2025, diolah dengan proyeksi 5 tahun ke depan

b. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.143
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Bersifat Wajib dan Mengikat Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Belanja Pegawai	1.302.797.062.301	1.306.666.450.406	1.231.664.731.967	1.221.664.729.635	1.220.295.279.707	1.212.607.305.165
Belanja Barang dan jasa	777.807.720.839	729.214.514.095	671.245.841.373	704.306.254.335	733.814.612.790	829.638.075.584
Belanja Tidak Terduga	11.211.938.938	12.651.547.625	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	29.670.000.000	29.810.000.000	29.970.000.000	10.140.000.000
JUMLAH	**2.091.816.722.078**	**2.048.532.512.126**	**1.937.580.573.340**	**1.960.780.983.970**	**1.989.079.892.497**	**2.057.385.380.749**

Dari perolehan data diatas dapat dihitung kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029. Dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
Pendapatan Daerah	**2.830.745.861.364**	**2.632.726.717.930**	**2.703.468.144.047**	**2.738.119.296.744**	**2.783.303.911.918**	**2.815.873.297.012**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	287.276.237.246	269.968.557.901	175.807.733.799	172.389.498.871	165.099.993.453	220.164.990.420
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	60.000.000.000
TOTAL	**3.118.022.098.610**	**2.902.695.275.831**	**2.879.275.877.846**	**2.910.508.795.615**	**2.948.403.905.371**	**3.096.038.287.432**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Dikurangi :						
Belanja Wajib mengikat	**2.091.816.722.078**	**2.026.670.369.747**	**1.937.580.573.340**	**1.960.780.983.970**	**1.989.079.892.497**	**2.057.385.380.749**
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.026.205.376.532**	**876.024.906.084**	**941.695.304.506**	**949.727.811.645**	**959.324.012.874**	**1.038.652.906.683**

Kebijakan pendapatan dan belanja daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029 dapat dirinci sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

a. Optimalisasi PAD (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan data potensi yang direview setiap tahunnya);
b. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah;
c. Kualitas Manajemen Aset Daerah dan Kinerja BUMD;
d. Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB;
e. Memberikan kemudahan akses perizinan dan non perizinan yang mengarah meningkatnya iklim investasi daerah.

2) Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

(a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

(1) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13;
(2) Gaji DPRD Kabupaten Klaten;
(3) Tambahan Penghasilan PNS;
(4) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

(b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

(1) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
(2) Pencapaian visi misi dan program unggulan Kepala Daerah;
(3) Pemenuhan kebutuhan prioritas RPJMD Kabupaten Klaten.

(c) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

(d) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name by address* penerima hibah.

(e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada

SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima bansos.

2. **Belanja Modal**
   Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur dan layanan dasar.
3. **Belanja Tidak Terduga**
   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. **Belanja Transfer**
   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

3) Pembiayaan Daerah

Kebijakan penggunaan pembiayaan daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029 meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber antara lain:

(a) Penerimaan Pembiayaan
   1. Dengan pemanfaatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai dengan tren pertahunnya yang difokuskan untuk menutup defisit anggaran, dengan mempertimbangkan komponen penggunaan yang diprioritaskan untuk kegiatan lanjutan serta mengalokasikan ke dalam program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan.
   2. Pencairan dana cadangan difokuskan pada kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak.

(b) Pengeluaran Pembiayaan
   1. Pembentukan dana cadangan dilakukan dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak yang dialokasikan mulai tahun 2027.

2. Pengeluaran pembiayaan pada komponen penyertaan modal untuk pemenuhan kewajiban daerah mempedomani prinsip kehati-hatian (prudental)/dan pengelolaannya berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal atau ketentuan lainnya. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah di bidang perbankan dialokasikan 35% dari bagian laba untuk pemerintah daerah (deviden) tahun sebelumnya untuk memenuhi rasio kecukupan modal minimum sampai terpenuhinya modal dasar.

c. Alternatif Pendanaan

Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, pemerintah Kabupaten Klaten telah melibatkan dunia usaha dalam pembangunan daerah, guna mensinergiskan antara program CSR dengan program prioritas daerah.

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip kemitraan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menginisiasi dan memfasilitasi keterlibatan dunia usaha dalam mendukung program prioritas daerah. Melalui Forum CSR, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Klaten diajak untuk menyelaraskan program CSR mereka dengan kebutuhan pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hingga saat ini, ada 94 perusahaan yang telah tergabung dalam Forum CSR, dari total 150 perusahaan yang ada di Kabupaten. Adapun Laporan Kontribusi Dunia Usaha dalam Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.145
Laporan Perkembangan Kontribusi Dunia dalam Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	Perusahaan	Perusahaan yang Tergabung dalam Forum CSR	Perusahaan yang Melaporkan	Kontribusi CSR (Rupiah)
2020	150	57	26	10.388.405.997
2021	150	57	26	13.858.255.612
2022	150	72	25	14.402.583.632
2023	150	84	16	11.568.603.800
2024	150	96	17	12.690.772.531

Sumber: Forum CSR Kabupaten Klaten, 2025

Berdasarkan data kontribusi dunia usaha melalui CSR dalam prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Klaten, terlihat adanya tren yang fluktuatif selama periode tahun 2020-2024. Kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp.14.402.583.632, angka ini menurun pada tahun 2024 menjadi Rp.12.690.772.531. yang disebabkan antara lain adanya pergantian personel yang

menangani CSR di sejumlah perusahaan, sehingga memerlukan masa penyesuaian dan pemahaman kembali terkait kebijakan CSR. Akan tetapi pada tahun 2024 meningkat men

Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp.10.388.405.997, rendahnya kontribusi pada tahun tersebut dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada kegiatan usaha. Meskipun terjadi keterbatasan operasional, pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan penutupan beberapa perusahaan, dunia usaha di Kabupaten Klaten tetap berupaya memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, jumlah perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR Kabupaten Klaten hingga kini masih tergolong sedikit. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak perusahaan yang belum mengetahui keberadaan forum ini. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah melalui Forum CSR telah melakukan anjangsana atau kunjungan langsung ke sejumlah perusahaan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep CSR sekaligus memperkenalkan Forum CSR Kabupaten Klaten. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan kegiatan ini hanya dapat menjangkau sekitar 12 perusahaan per tahun.

Perusahaan yang hanya menerima undangan tanpa kunjungan langsung umumnya belum berminat bergabung karena masih adanya persepsi negatif terhadap CSR. Sebaliknya, perusahaan yang telah dikunjungi cenderung memberikan respons positif dan bersedia menjadi anggota forum. Bahkan, beberapa perusahaan secara inisiatif meminta untuk dimasukkan menjadi bagian dari Forum CSR Kabupaten Klaten.

Melihat perkembangan tersebut, pengembangan CSR memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penopang penting dalam pembangunan Kabupaten Klaten. CSR tidak hanya menjadi wujud tanggungjawab sosial perusahaan, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk mendukung program prioritas daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas koordinasi, perluasan jangkauan sosialisasi dan penguatan citra positif CSR diharapkan mampu mendorong partisipasi dunia usaha secara lebih luas dan berkelanjutan.

Tabel 2.146
Proyeksi Target Kontribusi CSR dalam Pembangunan Kabupaten Klaten
Tahun 2025-2030

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Perusahaan yang Tergabung dalam Forum CSR	96,00	106,00	116,00	126,00	136,00	146,00
2	Perusahaan yang Melaporkan	25,00	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00
3	Kontribusi CSR	10.527.491.444	11.580.240.588	12.738.264.647	14.012.091.112	15.413.300.223	16.954.630.245

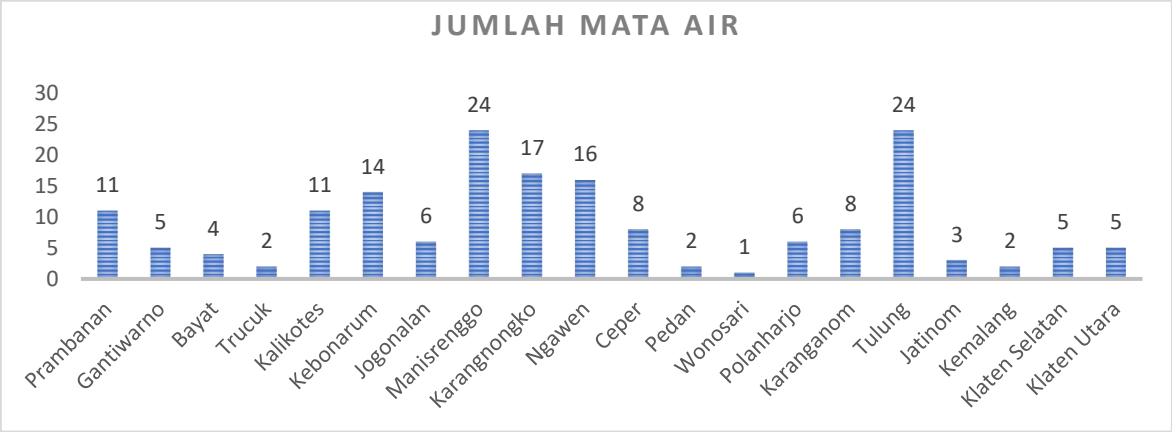
Sumber: Forum CSR Kab. Klaten 2025;

Selain melalui dukungan CSR dari dunia usaha, Pemerintah Kabupaten Klaten juga memiliki peluang untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan lain dalam mendukung pembangunan daerah, yaitu melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik, di mana pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sebagian atau seluruhnya dilaksanakan oleh Badan Usaha. Mekanisme ini memberikan solusi pembiayaan yang berkelanjutan tanpa sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dasar hukum pelaksanaan KPBU telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Melalui skema ini, berbagai proyek prioritas daerah dapat direalisasikan, seperti pembangunan dan peningkatan jalan; pengelolaan dan pengolahan sampah; penerangan jalan umum; penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan; infrastruktur penunjang pelayanan publik lainnya. Pemanfaatan skema KPBU diharapkan dapat menjadi salah satu penopang utama pembangunan Kabupaten Klaten di samping CSR. Dengan melibatkan investasi swasta, pemerintah daerah dapat mempercepat penyediaan infrastruktur strategis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Alternatif pendanaan lainnya, bisa diperoleh dari imbal jasa lingkungan/PES (Payment for Ecosystem Services) untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan berkelanjutan. Pendanaan yang melibatkan masyarakat secara luas tersebut dapat menjadi instrumen ekonomi lingkungan hidup sesuai pada Pasal 42 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kabupaten memiliki potensi untuk imbal jasa lingkungan tersebut, salah satunya dari air (tawar). Kabupaten Klaten memiliki 174 mata air yang

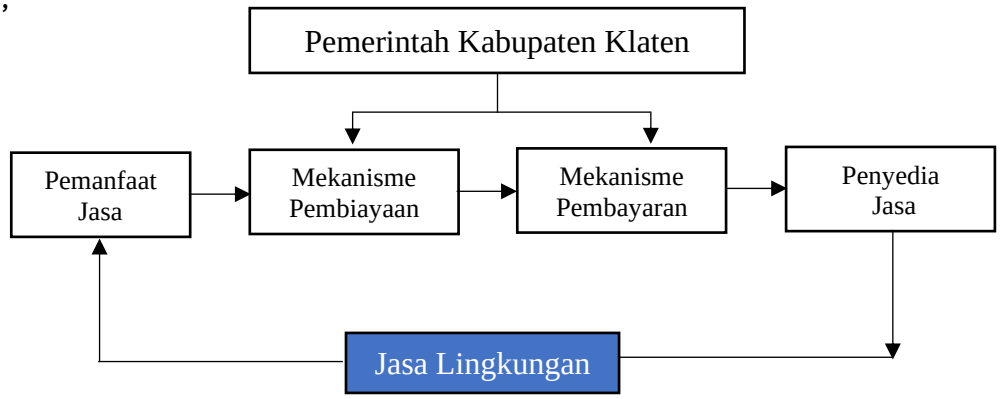
tersebar di 20 kecamatan yang dapat menjadi potensi dalam pembiayaan altenartif melalui mekanisme Imbal Jasa Lingkungan (PES).



Sumber: BPS, 2015

Gambar 2.126 Jumlah Mata Air di Kabupaten Klaten

Sebagian besar mata air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengairan/irigasi pertanian. Kecamatan Tulung memiliki mati air terbanyak dan debit yang besar diantaranya umbul Ponggok dan Umbul Cokro yang dimanfaatkan untuk wisata dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang dapat menjadi potensi imbal jasa lingkungan di Kabupaten Klaten. Mekanisme pelaksanaan imbal jasa lingkungan/PES *(Payment for Ecosystem Services),* dapat dilihat dalam alur dibawah ini,



Sumber : Pagiola, S dan G. Platais, "Pengantar mengenai imbal jasa lingkungan", pemaparan pada Hari-hari Pembelajaran 2005 – Pekan ESSD, Bank Dunia, Washington DC, 2005.

Gambar 2.127 Mekanisme Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan/PES *(Payment for Ecosystem Services)*

Sampai saat ini, Peraturan Menteri tentang sistem pembayaran imbal jasa lingkungan yang dapat menjadi payung legalitas kegiatan ini belum terbit, sehingga Kabupaten Klaten belum melaksanakan kegiatan tersebut. Ke depannya, perlu

dilakukan sinergitas lintas sektoral sehingga imbal jasa lingkungan/PES (*Payment for Ecosystem Services*) dapat menjadi kebijakan alternatif pendanaan selama 5 tahun ke depan

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten lima tahun ke depan, penting untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan pembangunan yang masih dihadapi daerah ini secara komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga lintas sektor *(crosscutting),* berskala makro dan berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan ini didasarkan pada analisis gambaran umum daerah, yang mencakup kondisi geografis, tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta kualitas pelayanan umum. Selain itu, evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir menjadi dasar penting dalam menilai permasalahan yang masih relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan serta kebutuhan riil masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Klaten masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang bersifat multidimensi, mencakup berbagai sektor urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Permasalahan ini menunjukkan masih perlunya penguatan tata kelola pembangunan daerah yang lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Secara umum, permasalahan pembangunan di Kabupaten Klaten dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Belum Meratanya Akses dan Mutu Pelayanan Dasar**
   Di sektor pendidikan, masih terdapat anak usia dini yang belum mengakses PAUD, rendahnya angka partisipasi murni pada jenjang SD dan SMP, serta keberadaan penduduk usia >15 tahun yang masih buta aksara. Capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih perlu ditingkatkan. Di sektor kesehatan, angka kematian bayi dan ibu masih terjadi, prevalensi stunting cukup signifikan, serta rasio tenaga medis belum memenuhi standar pelayanan. Demikian pula pada sektor pekerjaan umum, masih terdapat infrastruktur jalan dan drainase yang belum optimal, serta masih adanya keterbatasan akses air minum dan sanitasi.
2. **Tingginya Tantangan Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial**
   Masih terdapat rumah tidak layak huni, kawasan kumuh dan tingginya backlog perumahan menunjukkan belum meratanya kesejahteraan. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum sepenuhnya optimal dan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial belum seluruhnya tercapai. Ketimpangan perlindungan masyarakat juga terlihat dari belum optimalnya kesiapsiagaan bencana dan layanan kebakaran.

3. **Kurangnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja**
   Kabupaten Klaten masih menghadapi tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, terutama di kalangan usia muda. Kompetensi tenaga kerja relatif rendah, dengan persentase pemilik sertifikasi kompetensi yang sangat kecil dan ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. Penempatan tenaga kerja belum optimal akibat keterbatasan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, sementara sengketa hubungan industrial seperti perselisihan upah dan PHK masih sering terjadi. Struktur lapangan kerja juga belum beragam, cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu yang rentan gejolak.
   Selain itu, transformasi digital belum diimbangi peningkatan keterampilan berbasis teknologi, banyak pekerja informal belum terlindungi jaminan sosial dan tingginya migrasi kerja ke luar daerah mencerminkan terbatasnya peluang kerja layak di Klaten.
4. **Belum Optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan Investasi**
   Pertumbuhan UMKM dan koperasi berjalan lambat, dengan rendahnya tingkat kesehatan dan kepatuhan koperasi. Pertumbuhan investasi juga menunjukkan tren penurunan, baik untuk investasi skala nasional maupun daerah.
5. **Kurangnya Inklusivitas Gender dan Perlindungan Anak**
   Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan dan representasi perempuan dalam legislatif belum memenuhi kuota 30%. Pemanfaatan data pilah gender juga belum menyeluruh di semua OPD.
6. **Tantangan dalam Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup**
   Penurunan skor Pola Pangan Harapan dan penanganan daerah rawan pangan yang belum maksimal menunjukkan ketahanan pangan masih menjadi persoalan. Sementara itu, indeks kualitas lingkungan hidup, air dan kinerja pengelolaan sampah belum optimal, ditambah tantangan dalam pengendalian timbulan sampah di wilayah perkotaan.
7. **Kelemahan dalam Infrastruktur dan Teknologi Informasi**
   Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan digital belum sepenuhnya terintegrasi dan merata. Layanan online, pengelolaan data kependudukan, keamanan siber, serta pemanfaatan tanda tangan elektronik masih perlu ditingkatkan.
8. **Belum Optimalnya Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**
   Jumlah desa mandiri masih sangat rendah dan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) belum memuaskan. BUMDes yang masuk kategori maju juga masih terbatas.

9. **Belum Optomalnya Partisipasi Pemuda dan Pembinaan Olahraga**
   Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi dan organisasi masih minim, pembinaan atlet muda menurun, serta pelatih bersertifikat masih terbatas.
10. **Belum optimalnya Pengelolaan Sektor Statistik, Arsip dan Perpustakaan**
    Penyediaan statistik sektoral, pemanfaatan aplikasi satu data dan pengelolaan arsip belum berjalan optimal. Budaya baca masyarakat rendah dan jumlah kunjungan perpustakaan menurun.
11. **Pengembangan Pariwisata yang Belum Maksimal**
    Destinasi wisata belum memiliki daya tarik yang kuat secara regional maupun nasional dan masih didominasi oleh kunjungan wisatawan lokal. Kurangnya *travel pattern* dan pengelolaan kawasan wisata menjadi penghambat utama.

2.6.2. Isu-Isu Strategis

a. Analisis Lingkungan Strategis Global

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional dan regional, terutama kondisi terkini dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi kondisi lingkungan strategis pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1) Megatrend Global

Megatrend global mencerminkan perubahan besar yang terjadi secara lintas negara dan berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut perlu dicermati karena dapat memengaruhi arah kebijakan dan strategi pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Beberapa kecenderungan global yang relevan untuk diperhatikan antara lain: 1) dinamika demografi global; 2) perubahan geopolitik dan geoekonomi; 3) kemajuan teknologi; 4) peningkatan urbanisasi; 5) perdagangan internasional; 6) pergeseran sistem keuangan internasional; 7) pertumbuhan kelas menengah dunia; 8) peningkatan kompetisi terhadap pemanfaatan sumber daya alam; 9) perubahan iklim dan perkembangan eksplorasi serta 10) pemanfaatan luar angkasa.

Meskipun tidak seluruh isu tersebut berdampak langsung terhadap Kabupaten Klaten, pemahaman terhadap *megatrend global* menjadi penting agar kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara adaptif dan antisipatif. Hal ini juga diperlukan untuk menangkap peluang yang muncul dari dinamika global tersebut, serta meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam jangka menengah, terdapat sejumlah isu global yang diperkirakan akan memberi pengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Klaten, antara lain:

a) Dinamika Demografi Global

Perubahan demografi global merupakan salah satu kecenderungan utama yang mempengaruhi arah pembangunan dunia dalam jangka panjang. Menuju tahun 2045, jumlah penduduk dunia diperkirakan terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannya mulai melambat. Di saat yang sama, terjadi pergeseran struktur usia penduduk, ditandai dengan meningkatnya kelompok usia lanjut (*aging population*) serta tetap dominannya kelompok usia muda di negara-negara berkembang. Fenomena ini membawa implikasi besar terhadap ketersediaan tenaga kerja, sistem perlindungan sosial dan pelayanan publik.

Selain itu, percepatan urbanisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika demografi global. Semakin banyak penduduk dunia yang tinggal di wilayah perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, perumahan, transportasi dan pelayanan dasar. Di sisi lain, transformasi struktur keluarga akibat perkembangan teknologi dan perubahan nilai sosial juga turut memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga dan komunitas.

Dinamika tersebut memiliki relevansi bagi Kabupaten Klaten sebagai bagian dari wilayah penyangga aglomerasi Solo-Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk Klaten terus terjadi dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya kebutuhan akan layanan publik dan kesempatan kerja. Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 1.300.940 jiwa dan akan terus meningkat menjadi 1.394.162 jiwa pada tahun 2045. Pertumbuhan ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan terhadap infrastruktur, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja yang layak.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan demografi global menjadi penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Kabupaten Klaten perlu memanfaatkan peluang bonus demografi dengan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga dan penyediaan layanan publik yang adaptif. Dengan langkah tersebut, Klaten dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing di tengah perubahan global yang dinamis.

b) Perubahan Geopolitik Dan Geoekonomi

Ketegangan geopolitik global yang terus meningkat, termasuk persaingan antarnegara adidaya dan munculnya kekuatan baru, telah menimbulkan ketidakstabilan di berbagai kawasan dunia. Kondisi ini

berdampak pada krisis energi dan pangan global, terganggunya rantai pasok, serta meningkatnya ketidakpastian geoekonomi.

Meskipun Kabupaten Klaten tidak terdampak secara langsung, pengaruhnya tetap terasa melalui fluktuasi harga pangan, energi dan bahan baku industri. Krisis global semacam ini dapat memengaruhi daya beli masyarakat, menekan pelaku UMKM dan industri pengolahan, serta menurunkan potensi investasi dan ekspor daerah. Oleh karena itu, Klaten perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi lokal, mendorong diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan kemandirian sektor strategis guna mengurangi kerentanan terhadap tekanan global dan menjaga stabilitas pembangunan daerah.

c) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya disrupsi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem produksi, pelayanan publik, hingga pola interaksi sosial masyarakat. Teknologi digital seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing* dan sistem otomasi lainnya semakin banyak diadopsi dalam proses bisnis dan tata kelola pemerintahan modern.

Bagi Kabupaten Klaten, perkembangan ini menawarkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat arus informasi, serta mendorong produktivitas sektor industri, pertanian dan UMKM. Contohnya, penerapan otomasi dan digitalisasi dapat mendukung pertanian presisi, sistem pemasaran daring bagi UMKM, serta pengelolaan data pembangunan yang lebih akurat dan real time.

Namun di sisi lain, Klaten juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur digital, pemerataan akses internet, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Jika tidak diantisipasi, disrupsi teknologi dapat memperlebar kesenjangan digital, menurunkan daya saing tenaga kerja lokal dan menghambat transformasi ekonomi. Oleh karena itu, Kabupaten Klaten perlu mendorong adopsi teknologi secara inklusif, memperkuat literasi digital masyarakat, serta membangun ekosistem inovasi yang mampu menjembatani antara potensi teknologi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

d) Peningkatan Urbanisasi

Urbanisasi merupakan salah satu megatrend global yang terus menguat, ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Fenomena ini dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari akses yang lebih baik terhadap pekerjaan,

pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur. Di masa depan, sebagian besar populasi dunia diperkirakan akan terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sehingga memunculkan tantangan dan peluang baru dalam pembangunan wilayah.

Bagi Kabupaten Klaten, yang secara geografis berada di antara dua pusat pertumbuhan utama Kota Surakarta dan Yogyakarta, peningkatan urbanisasi memberikan dampak ganda. Di satu sisi, posisi strategis ini membuka peluang pengembangan wilayah sebagai bagian dari hinterland kawasan aglomerasi perkotaan. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan konektivitas, investasi, serta perluasan jaringan infrastruktur dan kawasan permukiman. Namun, disisi lain, urbanisasi juga dapat memicu sejumlah tantangan, seperti alih fungsi lahan pertanian, tekanan terhadap infrastruktur dasar, kemacetan, serta meningkatnya kebutuhan akan hunian dan pelayanan publik di wilayah pinggiran kota. Jika tidak dikelola secara bijak, urbanisasi dapat menimbulkan ketimpangan antarwilayah dan memperbesar beban sosial maupun lingkungan.

Oleh karena itu, Kabupaten Klaten perlu merumuskan kebijakan tata ruang dan pembangunan wilayah yang adaptif terhadap tren urbanisasi. Penguatan konektivitas antarkawasan, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis potensi lokal perlu dilakukan guna memastikan urbanisasi berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

e) Perdagangan Internasional

Meningkatnya peran negara berkembang, khususnya di kawasan Asia-Afrika, dalam perdagangan internasional membuka peluang besar untuk masuk dalam rantai pasok global. Adaptasi terhadap kemajuan teknologi, hilirisasi sumber daya, serta kerja sama kawasan mendorong integrasi perdagangan yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Klaten, hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan sektor industri pengolahan dan UMKM berbasis potensi lokal, seperti pertanian, kerajinan dan logam, agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor. Dukungan infrastruktur, inovasi dan teknologi menjadi kunci agar Klaten tidak hanya menjadi basis produksi, tetapi juga bagian dari rantai pasok regional. Namun demikian, tantangan utamanya adalah peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing produk lokal, serta kesiapan logistik dan digitalisasi industri. Tanpa langkah strategis ini, Klaten berisiko tertinggal dalam kompetisi pasar regional yang semakin terbuka dan berbasis teknologi.

f) Pergeseran Sistem Keuangan Internasional

Perubahan struktur ekonomi, demografi dan kemajuan teknologi telah mendorong transformasi signifikan dalam desain kebijakan fiskal global dan nasional menuju tahun 2045. Di sisi lain, pertumbuhan kelas menengah yang semula terpusat di Eropa dan Amerika kini bergeser ke Asia, khususnya Tiongkok dan India, menjadikan kawasan ini sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi global. Perkembangan ini menciptakan peluang ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap produk bernilai tambah, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam hal stabilitas sosial dan ketimpangan ekonomi.

Bagi Kabupaten Klaten, tren ini menjadi peluang untuk mendorong sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif dan UMKM agar mampu menyasar pasar kelas menengah Asia yang terus tumbuh. Dengan strategi hilirisasi dan penguatan kapasitas produksi lokal, Klaten dapat meningkatkan kontribusi dalam rantai nilai nasional bahkan internasional. Akan tetapi tantangan tetap ada, antara lain kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, literasi keuangan, serta inklusi ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya dinikmati segelintir kelompok. Selain itu, Klaten perlu bersiap menghadapi tekanan fiskal lokal, khususnya dalam pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, seiring dengan perubahan ekspektasi dan tuntutan masyarakat kelas menengah yang semakin kompleks.

g) Pertumbuhan Kelas Menengah Dunia

Pertumbuhan kelas menengah secara global, terutama di kawasan Asia seperti Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN, menjadi salah satu megatrend yang akan membentuk arah ekonomi dunia ke depan. Kelas menengah yang semakin besar mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya permintaan terhadap kualitas pendidikan, kesehatan dan teknologi.

Bagi Kabupaten Klaten, fenomena ini menciptakan dua sisi dampak. Di satu sisi, meningkatnya kelas menengah membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi pelaku UMKM, industri kreatif, serta sektor jasa dan perdagangan yang mampu memenuhi permintaan produk-produk berkualitas dan bernilai tambah. Klaten dapat mengambil peran dalam rantai pasok regional dengan mengembangkan sektor unggulan seperti industri logam, olahan makanan dan kerajinan berbasis kearifan lokal.

Di sisi lain, pertumbuhan kelas menengah juga membawa tantangan, seperti meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih modern, infrastruktur yang lebih memadai, serta penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat memperbesar ketimpangan

sosial dan tekanan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu merancang strategi pembangunan yang adaptif dengan dinamika kelas menengah, baik dari sisi peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing ekonomi lokal, maupun penyediaan layanan publik yang inklusif dan berbasis teknologi.

h) Peningkatan kompetisi terhadap pemanfaatan sumber daya alam

Secara global, peningkatan populasi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi telah mendorong naiknya tekanan terhadap ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam. Persaingan dalam pemanfaatan lahan, air, energi dan mineral menjadi semakin intens, baik antarnegara maupun di tingkat domestik. Megatrend ini menuntut tata kelola sumber daya alam yang lebih efisien, adil dan berkelanjutan.

Kabupaten Klaten sebagai wilayah agraris dengan cadangan sumber daya alam yang cukup potensial, seperti tanah subur, sumber air bawah tanah (termasuk umbul mata air alami), serta bahan galian industri dan pertanian, turut menghadapi tantangan dari tren ini. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, tekanan terhadap ketersediaan air bersih, serta eksploitasi sumber daya mineral skala kecil dapat mengancam keseimbangan ekologis dan ketahanan ekonomi lokal apabila tidak dikelola dengan bijak. Di sisi lain, tren ini juga membuka peluang bagi Klaten untuk memperkuat posisi dalam pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara lestari. Strategi hilirisasi hasil pertanian dan sumber daya alam, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengembangan industri berbasis kearifan lokal dapat menjadi arah pembangunan yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga berwawasan lingkungan.

Untuk itu, Kabupaten Klaten perlu memperkuat regulasi pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, mendorong kolaborasi multipihak dalam perlindungan lingkungan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan guna menjawab tantangan global sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

i) Perubahan iklim dan perkembangan eksplorasi

Di tingkat global, kelangkaan dan persaingan terhadap akses sumber daya alam seperti energi, air dan pangan diproyeksikan semakin meningkat. Fenomena ini diperparah oleh tiga krisis planet (Triple Planetary Crisis): perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ketiganya akan terus berlangsung dan memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat dunia, termasuk di tingkat lokal. Hal ini mendorong negara-negara untuk beralih ke aktivitas ekonomi rendah emisi dan

mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berbasis energi bersih dan sirkularitas sumber daya.

Bagi Kabupaten Klaten, tantangan ini sangat relevan mengingat wilayah ini memiliki karakter agraris dengan ketergantungan tinggi terhadap keberlanjutan sumber daya air dan lahan. Ketergantungan pada pertanian tradisional dan penggunaan energi berbasis fosil dalam kegiatan industri rumah tangga atau UMKM juga berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap krisis iklim. Selain itu, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas tanah dan ancaman terhadap sumber-sumber air (seperti umbul atau mata air) menjadi risiko nyata jika tidak diimbangi dengan upaya konservasi. Sementara itu, pertumbuhan penduduk Klaten yang terus meningkat juga menambah tekanan terhadap kebutuhan pangan, energi dan air bersih.

Namun demikian, transisi menuju ekonomi hijau justru menjadi peluang strategis bagi Klaten untuk memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan. Klaten dapat mulai mendorong adopsi energi baru dan terbarukan (seperti biogas skala rumah tangga atau panel surya), pengembangan pertanian organik dan berkelanjutan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta efisiensi energi pada sektor industri dan rumah tangga. Dengan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, peningkatan kesadaran publik dan kolaborasi multipihak, Kabupaten Klaten berpeluang menjadi salah satu daerah pelopor dalam penguatan ekonomi hijau di tingkat regional, sekaligus menjawab tantangan global secara adaptif dan berkelanjutan.

2) Isu dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14)

Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Sumber: https://www.sdg2030indonesia.org/

Gambar 2.128 Tujuan SDGs

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Permasalahan capaian TPB/SDGs berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten yang dikelompokkan menjadi empat pilar yaitu:

Tabel 2.147
Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
1	Pilar Sosial TPB 1	Perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, capaian pada tahun 2021 sebesar 85,11% (1.4.1.(d)/SBT)	Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	Menurunnya kualitas dan kuantitas air
	Pilar Lingkungan TPB 6	Perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, capaian pada tahun 2021 sebesar 85,11% (6.1.1.(a)/SBT)		
	Pilar Lingkungan TPB 6	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Capaian tahun 2021 sebesar 32% (6.1.1.(c)/ SST)		
	Pilar Lingkungan TPB 6	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau pulau. Kondisi tahun 2021 sebesar 176 m^3/detik. (6.1.1.(b)/SST)	Perlunya peningkatan kapasitas prasarana air baku	
	Pilar Lingkungan TPB 6	Perlunya peningkatan kualitas air sungai, saat ini indeks kualitas air sungai sebesar 40,77 (6.3.2.(b)/SST)	Masih perlunya peningkatan kualitas air sungai	
2	Pilar lingkungan TPB 7	Bauran energi terbarukan. (indikator daerah : Bauran energi terbarukan (jumlah biogas)) (7.2.1*/TBC)	Masih perlu peningkatan adaptasi perubahan iklim	Belum optimalnya adaptasi perubahan iklim
	Pilar lingkungan TPB 11	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, Tahun 2021 sebanyak 3 (11.5.1.(c)/SST)		
	Pilar Lingkungan TPB 11	• Belum memiliki indikator Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste dalam target daerah. • Jumlah Desa Proklim tahun 2021 sebanyak 1 desa, tahun 2022 sebanyak 4 desa (11.6.1.(b)/TBC)		
3	Pilar Lingkungan TPB 11	Masih perlunya peningkatan rasio ruang terbuka hijau. Persentase RTH perkotaan tahun 2021 sebesar 4,83% (11.7.1.(a)/SST)	Perlunya pemenuhan ruang terbuka hijau	Belum optimalnya pengelolaan daya dukung lingkungan
	Pilar Lingkungan TPB 15	Proporsi tutupan lahan hijau/hutan terhadap luas lahan keseluruhan.(15.1.1.(a)/TAD)		
	Pilar Lingkungan TPB 15	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan		

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
		keseluruhan. Tahun 2021 sebesar 3,18 hektar (15.3.1.(a)/SST)		
	Pilar Lingkungan TPB 15	• Belum memiliki indikator Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam target daerah. • Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Tahun 2021 tersedia 1 dokumen (15.9.1.(a)/TBC)	Masih perlu peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati	
	Pilar Lingkungan TPB 12	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Tahun 2021 sebanyak 4 perusahan. (12.6.1.(a)/SST)	Masih perlu peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan	
	Pilar Lingkungan TPB 12	• Belum memiliki indikator Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dalam target daerah. • Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Tahun 2021 sebanyak 1 produk ramah lingkungan. (12.7.1.(a)./TBC)		
4	Pilar Sosial TPB 2	• Belum memiliki indikator Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam target daerah. • Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Capaian tahun 2021 sebesar 9,73 (2.1.1.(a)/TBC)	Masih adanya stunting pada anak	Menurunnya ketersediaan pangan
	Pilar Sosial TPB 2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Capaian tahun 2021 sebesar 11,4 (2.2.1*/SBT)		
	Pilar Sosial TPB 2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. (2.2.1.(a)/TAD)		
	Pilar Sosial TPB 2	• Belum memiliki indikator prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe dalam target daerah. • Perlunya penurunan prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, kondisi tahun 2021 sebesar 5,64% (2.2.2*/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 2	• Belum memiliki indikator Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dalam target daerah. • Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Capaian tahun 2021 sebesar 45 (2.2.2.(b)/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 2	• Belum memiliki indikator Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari dalam target daerah.	Masih adanya penduduk yang belum mencapai asupan kalori	

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
		• Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Capaian tahun 2021 sebesar 12,8 (2.1.2.(a)/TBC)	minimum	
	Pilar Sosial TPB 2	• Belum memiliki indikator Prevalensi anemia pada ibu hamil dalam target daerah. • Prevalensi anemia pada ibu hamil. Capaian tahun 2021 sebesar 9,43 (2.2.2.(a)/TBC)	Masih adanya anemia pada ibu hamil	
	Pilar Sosial TPB 2	• Perlunya peningkatan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH tahun 2021 sebesar 91. (2.2.2.(c)/SBT)	Perlu peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
	Pilar Sosial TPB 2	• Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (2.3.1*/TAD)	Perlu upaya Nilai Tambah Pertanian	
5	Pilar Sosial TPB 6	Masih perlunya upaya mempertahankan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Capaian pada tahun 2021 sebesar 100% (1.4.1.(e)/SST)	Masih perlunya peningkatan terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Rendahnya pengelolaan sanitasi dan limbah
	Pilar Lingkungan TPB 6	Perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, capaian pada tahun 2021 sebesar 100% (6.2.1.(b)/SST)		
	Pilar lingkungan TPB 6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Capaian Tahun 2021 sebanyak 401 desa (6.2.1.(c)/SST)		
	Pilar lingkungan TPB 6	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Capaian Tahun 2021 sebanyak 401 desa (6.2.1.(d)/SST)		
	Pilar lingkungan TPB 6	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Tahun 2021 Kabupaten Klaten sudah masuk (6.2.1.(e)/SST)	Masih perlunya peningkatan sistem pengelolaan air limbah	
	Pilar lingkungan TPB 6	• Belum memiliki indikator proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat dalam target daerah. • Perlunya peningkatan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, capaian 2021 sebesar 0,86%		

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
		(6.2.1.(f)/TBC)		
	Pilar lingkungan TPB 6	• Jumlah Kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Tahun 2021 sudah punya IPLT (6.3.1.(a)/ SST)	Masih rendahnya pelayanan sistem pengelolaan lumpur tinja	
	Pilar lingkungan TPB 6	• Belum memiliki indikator Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja dalam target daerah. • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Tahun 2021 sebanyak 0,0116% (6.3.1.(b)/TBC)		
	Pilar lingkungan TPB 12	• Belum memiliki indikator Jumlah limbah B3 yang terkelola (limbah industri dan fasyankes) dalam target daerah. • Jumlah limbah B3 yang terkelola (limbah industri dan fasyankes). Tahun 2021 sejumlah 11 ton/th (Limbah B3 yang terkelo-la) (12.4.2.(a)/TBC)	Perlu upaya peningkatan jumlah limbah B3 yang terkelola	
6	Pilar Sosial TPB 1	• Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Tahun 2021 sejumlah 4 jiwa. (1.5.1*/TBC)	Masih adanya korban akibat bencana	Kurang optimalnya penanganan dan mitigasi bencana
	Pilar lingkungan TPB 11	• Belum memiliki indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak dalam target daerah. • Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Tahun 2021 : 4,10 (11.5.1*/TBC)		
	Pilar lingkungan TPB 13	• Belum memiliki indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak dalam target daerah. • Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Tahun 2021 sebanyak 4,10 (13.1.2*/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 1	• Belum memiliki indikator jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah dalam target daerah. • Masih perlunya upaya meningkatkan jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Tahun 2021 memiliki 2 kelurahan tangguh bencana (1.5.1.(a)/TBC)	Masih perlunya meningkatkan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana	
	Pilar Sosial TPB 1	• Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. Tahun 2021 sejumlah 5 sekolah (1.5.1.(d)/SST)		

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
	Pilar Sosial TPB 1	• Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Tahun 2021 sejumlah 67 jiwa. (1.5.1.(c)/SST)	Masih perlunya peningkatan pendampingan korban bencana	
	Pilar Sosial TPB 1	• Masih perlunya menurunkan capaian indeks risiko bencana pada pusat pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Indeks resiko saat ini 99,24 (1.5.1.(e)/SST)	Masih tingginya indeks risiko bencana	
	Pilar lingkungan TPB 11	Perlunya penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) saat ini IRB sebesar 99,24 (11.5.1.(a)*/SST)		
	Pilar Sosial TPB 1	• Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Tahun 2021 105.640.000 (1.5.2.(a)/SST)	Masih adanya kerugian ekonomi akibat bencana	
	Pilar Sosial TPB 1	• Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2021 tersedia 1 dokumen. (1.5.3*/SST)	Perlunya penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana secara berkala	
	Pilar lingkungan TPB 11	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Tahun 2021 : 105.640.000 (11.5.2.(a)/SST)		
	Pilar lingkungan TPB 11	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi. Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen (11.b.2*/SST)		
	Pilar lingkungan TPB 13	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen (13.1.1*/SST)		
7	Pilar Lingkungan TPB 11	Perlunya peningkatan sampah perkotaan yang tertangani, capaian pada tahun 2021 sebesar 61,2% (11.6.1.(a)/SBT)	Masih perlunya peningkatan penanganan sampah	Belum optimalnya cakupan pelayanan sampah
	Pilar Lingkungan TPB 12	• Belum memiliki indikator jumlah volume sampah yang didaur ulang dalam target daerah. • Perlunya peningkatan jumlah volume sampah yang didaur ulang. Capaian tahun 2021 sebesar 27,36 ton (sampah yang diangkut) (12.5.1.(a)/TBC)	Masih perlunya peningkatan daur ulang sampah	
8	Pilar Ekonomi TPB 8	• Belum memiliki indikator PDB per kapita dalam target daerah. • Perlunya peningkatan PDB per kapita, capaian pada tahun 2021 sebesar Rp 22.513,8 juta (8.1.1.(a)/TBC)	Perlunya peningkatan PDB daerah	Belum optimalnya Daya saing daerah
	Pilar Ekonomi TPB 8	• Belum memiliki indikator Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam target daerah. • Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. Kondisi tahun 2021 -1,00 (8.2.1*/TBC)		

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
	Pilar Ekonomi TPB 8	• Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (8.3.1.(c)/TAD)	Perlunya pengembangan industri, UMKM dan pariwisata daerah	
	Pilar Ekonomi TPB 8	• Belum memiliki indikator Jumlah wisatawan mancanegara dalam target daerah. • Jumlah wisatawan mancanegara. Capaian tahun 2021 sebesar 463 orang (8.9.1.(a)/TBC)		
	Pilar Ekonomi TPB 8	• Belum memiliki indikator Jumlah devisa sektor pariwisata dalam target daerah. • Jumlah devisa sektor pariwisata. Capaian tahun 2021 sebesar 300.013.085.037 (8.9.1.(c) /TBC)		
	Pilar ekonomi TPB 9	• Belum memiliki indikator Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri dalam target daerah. • Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Capaian tahun 2021 sebesar 1,62 (9.3.1*/TBC)		
	Pilar ekonomi TPB 10	• Belum memiliki indikator jumlah desa mandiri dalam target daerah. • Jumlah Desa Mandiri. Capaian tahun 2021 sebesar 3 (10.1.1.(d)/ TBC)	Masih rendahnya jumlah desa mandiri	
	Pilar ekonomi TPB 9	• Belum memiliki indikator Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB dalam target daerah. • Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Capaian tahun 2021 sebesar 0,018 (9.5.1*/TBC)	Perlu peningkatan pengelolaan anggaran pemerintah	
	Pilar ekonomi TPB 17	• Belum memiliki indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dalam target daerah. • Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Capaian tahun 2021 sebesar 0,44. (17.1.1.(a)/TBC)		
	Pilar ekonomi TPB 17	• Belum memiliki indikator Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik dalam target daerah. • Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Capaian tahun 2021 sebesar 5,08 (17.1.2*/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri dalam target daerah. • Perlunya penurunan Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Belum optimalnya kondisi keamanan dan ketertiban daerah	

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
		Tahun 2021 sebesar 22 kematian (3.4.2*/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam target daerah. • Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Tahun 2021 sebanyak 62 kasus (3.5.1.(e)/TBC)		
	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	• Belum memiliki indikator Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dalam target daerah. • Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Tahun 2021 sebesar 25% (16.1.3.(a)/TBC)		
	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	• Belum memiliki indikator Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun dalam target daerah • Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Tahun 2021 sebesar 9,01% (16.2.3.(a)/TBC)		
9	Pilar Sosial TPB 3	• Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Capaian tahun 2021 : 72%.(1.4.1.(c)/SBT)	Perlunya peningkatan penggunaan alat kontrasepsi	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dalam target daerah • Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Kondisi tahun 2021 : 70,30% (3.7.1*/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 3	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Kondisi tahun 2021 : 70,30% (3.7.1.(a)/SBT)		
	Pilar Sosial TPB 3	Masih perlunya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), kondisi saat ini masih sebesar 100 (3.1.1.*/SBT)	Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak	

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup dalam target daerah. • Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Capaian tahun 2021 : 7,89 per 1000 kelahiran hidup. (3.2.2*/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dalam target daerah • Masih perlunya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, saat ini sebesar 10,54% (3.2.2.(a)/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 3	• Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Kondisi tahun 2021 : 98,7%.(3.2.2.(b)/SBT)		
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam target daerah • Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.* Kondisi tahun 2021 : 0. (3.3.3.(a)/TBC)	Belum optimalnya eliminasi malaria dan filariasis	
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis dalam target daerah • Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).* Kondisi tahun 2021 : 0 (3.3.5.(b)/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun dalam target daerah • Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. Kondisi tahun 2021 : 2,35% (3.4.1.(a)/TBC)	Masih adanya penduduk yang merokok	
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun dalam target daerah • Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. Kondisi tahun 2021 : 1,09%. (3.a.1*/TBC)		
	Pilar Sosial TPB 3	• Belum memiliki indikator Prevalensi tekanan darah tinggi dalam target daerah • Prevalensi tekanan darah tinggi. Kondisi tahun 2021 : 68%. (3.4.1.(b)/TBC)	Belum optimalnya eliminasi tekanan darah tinggi	

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
	Pilar Sosial TPB 3	• Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. (3.5.2*/TAD)	Masih adanya penduduk yang. konsumsi alkohol	
	Pilar Sosial TPB 3	Unmet need pelayanan kesehatan. Kondisi tahun 2021: 16,97%.(3.8.1.(a)/SBT)	Perlu penurunan Unmet need pelayanan kesehatan	
	Pilar Sosial TPB 3	Perlu penurunan Proporsi kematian akibat keracunan. (3.9.3.(a)/TAD)	Perlu penurunan Proporsi kematian akibat keracunan	
	Pilar Sosial TPB 3	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Kondisi tahun 2021 : 86% (3.b.1.(a)/SBT)	Perlu peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	
		• Belum memiliki indikator kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan dalam target daerah (3.c.1*/TBC) • Perlunya peningkatan kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan, capaian tahun 2021 sebesar 9,1. (tenaga Kesehatan/1000 penduduk)	Perlu peningkatan distribusi tenaga kesehatan	
	Pilar Sosial TPB 5	• Belum memiliki indikator Proporsi perempuan berstatus hidup bersama umur 15 tahun dan sebelum umur 49 tahun dalam target daerah • Proporsi perempuan berstatus hidup bersama umur 15 tahun dan sebelum umur 49 tahun. Kondisi tahun 2021 : 58,24% (5.6.1*/TBC)	Perlu peningkatan proporsi perempuan berstatus hidup bersama umur 15 tahun dan sebelum umur 49 tahun	
	Pilar Sosial TPB 5	• Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).Kondisi tahun 2021 : 16,97%.(5.6.1.(a)/SBT)	Perlu penurunan Unmet need KB	
	Pilar Sosial TPB 5	• Belum memiliki indikator Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dalam target daerah • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.Kondisi tahun 2021 : 72%. (5.6.1.(b)/TBC)	Perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	
	Pilar Sosial TPB 1	Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat. Kondisi saat ini 83,91% (1.4.1.(g)/SBT)	Masih perllunya peningkatan APK dan APM pada PAUD, SD, SMP, SMA dan PT	
	Pilar Sosial TPB 1	Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B. Kondisi saat ini 72,11% (1.4.1.(h)/SBT)		
	Pilar sosial TPB 4	Perlunya upaya mempertahankan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Kondisi saat ini : 91,65% (4.1.1.(d)/SBT)		

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
	Pilar sosial TPB 4	Perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), nilai APK tahun 2021 yaitu 79,40 (4.2.2.(a)/SBT).		
	Pilar sosial TPB 4	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di(1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat. Kondisi tahun 2021 : 0,98% (4.5.1*/TBC)		
	Pilar sosial TPB 4	Proporsi usia remaja (SMP) yang menggunakan internet. Kondisi saat ini : 73,40% (4.4.1*/ TBC)	Perlu peningkatan remaja yang menggunakan internet	
	Pilar sosial TPB 4	Masih perlunya upaya peningkatan Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Kondisi saat ini : 99,60%. (4.6.1.(a)/SBT)	Perlu peningkatan Persentase angka melek aksara	
	Pilar sosial TPB 4	• Belum memiliki indikator persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun dalam target daerah. • Masih perlunya upaya peningkatan persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. Kondisi saat ini : 99,60%. (4.6.1.(b) /TBC)		
	Pilar ekonomi TPB 8	• Belum memiliki indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin dalam target daerah. • Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin (Berdasarkan definisi BPS). Capaian tahun 2021 sebesar laki-laki 13,8% dan Perempuan 12,5%(8.3.1*/TBC)	Masih minimnya lapangan kerja informal sektor non-pertanian	
	Pilar ekonomi TPB 8	Persentase tenaga kerja formal.(8.3.1.(a)/TAD)	Perlunya peningkatan tenaga kerja formal dan informal	
	Pilar ekonomi TPB 8	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (8.3.1.(b)/TAD)		
	Pilar ekonomi TPB 8	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).(8.6.1*/TAD)		
	Pilar ekonomi TPB 9	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (9.2.2*/TAD)		
	Pilar ekonomi TPB 8	Perlunya penurunan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, kondisi tahun 2021 sebesar 5,48% (8.5.2*/SBT)	Masih adanya pengangguran	
	Pilar ekonomi TPB 8	• Belum memiliki indikator Tingkat setengah pengangguran dalam		

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
		target daerah; • Tingkat setengah pengangguran. Capaian tahun 2021 : 18,2%(8.5.2.(a)/TBC)		
10	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	Masih perlunya peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik. Indeks Reformasi Birokasi saat ini sebesar 57,83% (16.6.1.(d)/SBT)	Perlunya peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Belum optimalnya tata kelola kelembagaan daerah
	Pilar Ekonomi TPB 17	• Belum memiliki indikator jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam target daerah. • Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tahun 2021 belum ada proyek KPBU.(17.17.1.(a)/TBC)	Perlunya peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	
	Pilar Ekonomi TPB 17	• Belum memiliki indikator Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam target daerah. • Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tahun 2021 belum ada proyek KPBU. (17.17.1.(b)/TBC)		
	Pilar Ekonomi TPB 17	• Belum memiliki indikator Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target dalam target daerah. • Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. Tahun 2021 sebanyak 61,13% (17.18.1.(d)/TBC)	Perlu peningkatan indikator SDGs terpilah yang relevan	
	Pilar Ekonomi TPB 17	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).Capaian tahun 2021 98,78 (17.19.2.(d)/TBC)	Perlu peningkatan konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik	
11	Pilar Sosial TPB 5	• Belum memiliki indikator Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan dalam target daerah. • Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Kondisi tahun 2021 belum ada kebijakan. (5.1.1*/TBC)	Masih perlunya peningkatan kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Belum optimalnya kesetaraan gender
	Pilar Sosial TPB 5	• Perlu upaya penurunan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual,	Masih adanya perempuan yang mengalami kekerasan	

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
		atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Kondisi tahun 2021 sebesar 0,77% (5.2.1*/SBT)		
	Pilar Sosial TPB 5	• Belum memiliki indikator Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun dalam target daerah. • Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Kondisi tahun 2021 sebesar 0,27%)(5.3.1*/TBC)	Masih adanya perempuan yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	
	Pilar Sosial TPB 5	• Belum memiliki indikator Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dalam target daerah • Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Kondisi tahun 2021 sebesar 32 orang (5.3.1.(b)/TBC)	Masih adanya Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19	
	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	• Belum memiliki indikator persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III dan IV dalam target daerah. • Perlu upaya peningkatan Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III dan IV. Kondisi tahun 2021 sebesar 8,3%. (16.7.1.(b)/TBC)	Perlu peningkatan persentase perempuan pada jabatan eselon II,III dan IV	
12	Pilar Sosial TPB 5	• Belum memiliki indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dalam target daerah. • Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Capaian tahun 2021: 61,9%.(5.b.1*/TBC)	Perlu penigkatan individu yang memiliki telepon genggam	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana wilayah
	Pilar ekonomi TPB 9	• Belum memiliki indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dalam target daerah • Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Capaian tahun 2021 : 61,9%. (9.c.1.(a)/TBC)		
	Pilar lingkungan TPB 6	• Belum memiliki indikator Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri dalam target daerah. • Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Saat ini belum ada.(6.4.1.(b)/TBC)	Perlu peningkatan Insentif penghematan air	
	Pilar lingkungan TPB 6	• Belum memiliki indikator Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk dalam target daerah	Perlu peningkatan jaringan informasi sumber daya air	

No	Pilar/ Tujuan TPB	Rekomendasi KLHS Terhadap Isu Permasalahan		
		Masalah TPB	Rumusan permasalahan	Isu Strategis TPB
		• Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. Kondisi tahun 2021 sebanyak 18. (6.5.1.(c)/TBC)		
	Pilar lingkungan TPB 6	• Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. (6.5.1.(f)/TAD)	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai	
	Pilar lingkungan TPB 6	• Belum memiliki indikator Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dalam target daerah. Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Saat ini berupa GP3A (6.5.1.(g)/TBC)	Perlu peningkatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air	
	Pilar lingkungan TPB 11	• Belum memiliki indikator Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur dalam target daerah • Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. Saat ini belum ada (11.3.2.(b)/TBC)		
	Pilar ekonomi TPB 17	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. (17.6.2.(b)/TAD)	Perlu peningkatan Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar	
13	Pilar Sosial TPB 1	Perlunya penurunan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, kondisi kemiskinan saat ini sebesar 13,49% (1.2.1*/SBT)	Masih adanya kemiskinan	Masih adanya penduduk miskin
	Pilar Sosial TPB 1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Tahun 2021 sebesar 61.908 RUTA (1.3.1.(d)/SBT)		
	Pilar Ekonomi TPB 10	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Kondisi tahun 2021 sebesar 13,49% (10.1.1.(a)/SBT)		
	Pilar Ekonomi TPB 10	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. (10.2.1*/TAD)		
14	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. (16.9.1.(a)/TAD)	Belum optimalnya data terkait kelahiran dan kematian	Belum optimalnya Pelayanan administrasi penduduk
	Pilar Ekonomi TPB 17	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) (17.19.2.(b)/TAD)		

b. Analisis Lingkungan Strategis Nasional

1) Isu Strategis Pembangunan Nasional Berdasarkan Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat lima tantangan utama pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu: rendahnya produktivitas, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, pergeseran struktur kelas masyarakat, krisis lingkungan, serta lemahnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan. Kelima tantangan tersebut tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Klaten perlu disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, agar mampu menjawab tantangan tersebut secara adaptif dan selaras dengan dinamika lokal.

a) Rendahnya produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

b) Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) masih tertinggal dibandingkan siswa negara OECD. Selain itu, juga terdapat tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari rendahnya pendidikan tenaga kerja. Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2024 menunjukkan bahwa 52,32 peren penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (SMP/MTs ke bawah).

c) **Pergeseran struktur kelas masyarakat**

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat. Disisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat. Risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin,disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat.

d) **Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif**

Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan.

e) **Krisis lingkungan**

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.

f) **Geopolitik dan geoekonomi**

Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi pcrsaingan antamegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia intemasional.

g) **Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah**

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2) Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten Klaten Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

Merujuk pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, tema pembangunan untuk Pulau Jawa adalah: **Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan,** sedangkan tema untuk Provinsi Jawa Tengah adalah: **Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional.** Perekonomian Wilayah Jawa didorong oleh kinerja aktivitas jasa melalui penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif dan peningkatan aktivitas pariwisata di 8 kawasan wilayah Jawa. Sementara itu, industrialisasi wilayah Jawa juga akan terus didorong dengan optimalisasi kinerja industri hilir dan berteknologi tinggi di 10 Kawasan Wilayah Jawa.

Sebagai bagian integral dari kawasan Bengawan Solo, Kabupaten Klaten menyatakan komitmennya untuk mendukung program nasional Swasembada Pangan, Air dan Energi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Dengan potensi sumber daya alam yang strategis, dimana luas kawasan tanaman pangan mencapai 32.000 hektar dengan keberadaan sistem irigasi Colo Barat (kewenangan pemerintah pusat), daerah irigasi (DI) Jaban dan DI Ploso wareng (kewenangan Provisi Jawa Tengah) serta 478 DI kewenangan Kabupaten yang mengairi puluhan ribu hektare lahan pertanian produktif, Klaten mengambil peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui modernisasi infrastruktur pertanian, optimalisasi irigasi, serta intensifikasi produksi berbasis teknologi tepat guna. Di sektor air, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong integrasi pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan sistem penyediaan air bersih, konservasi mata air, serta peningkatan sanitasi lingkungan untuk menjamin kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, sejalan dengan arah RPJMN dalam memperkuat ketahanan energi daerah, Klaten mulai mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti penerapan pompa irigasi tenaga surya dan penerangan jalan berbasis energi alternatif. Kolaborasi lintas sektor, penguatan kelembagaan lokal, serta dukungan kebijakan daerah menjadi landasan bagi Klaten untuk turut serta membangun kawasan yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis sumber daya di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Klaten menempatkan sektor hortikultura sebagai salah satu fokus intervensi utama dalam mendukung swasembada pangan. Klaten memiliki potensi agroklimat dan lahan yang sangat mendukung pengembangan tanaman hortikultura, seperti cabai, bawang merah, sayuran dataran rendah, serta buah-buahan tropis unggulan. Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas hortikultura, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong adopsi teknologi budidaya modern, penyediaan benih

unggul, akses pembiayaan dan asuransi pertanian bagi petani hortikultura serta optimalisasi pemanfaatan Agrotehnopark (ATP) Humo.

Di sisi hilir, penguatan rantai pasok dilakukan melalui pengembangan kelembagaan petani hortikultura (gapoktan dan koperasi), serta perluasan kemitraan dengan pelaku industri pengolahan, pasar modern dan ekspor. Pemerintah daerah juga aktif mengintegrasikan pengembangan kawasan hortikultura dengan pemanfaatan air irigasi dan energi terbarukan, sebagai bentuk sinergi lintas sektor yang berorientasi pada keberlanjutan. Intervensi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan lokal, tetapi juga mendukung visi nasional dalam menjadikan kawasan Bengawan Solo sebagai pusat pertumbuhan pertanian tangguh berbasis sumber daya lokal dan teknologi inovatif.

Keterlibatan Kabupaten Klaten dalam pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura dilakukan melalui sejumlah strategi intervensi lintas sektor yang bersinergi dengan kebijakan nasional maupun potensi lokal. Berikut adalah bentuk-bentuk konkret keterlibatan tersebut:

a) **Pengembangan Kawasan Sentra Hortikultura**
   Klaten telah menetapkan beberapa wilayah sebagai sentra hortikultura berbasis komoditas unggulan seperti cabai, bawang merah, tomat dan aneka sayuran dataran rendah. Pemerintah daerah mendukung penyusunan peta komoditas dan zonasi kawasan hortikultura sesuai agroklimat lokal. Beberapa kecamatan yang potensial untuk pengembangan komoditas hortikultura antara lain Kecamatan Prambanan, Manisrenggo, Jogonalan, Karangnongko ,Pedan, Tulung dan Kemalang.

b) **Penyediaan Sarana Produksi Pertanian**
   Dukungan berupa penyediaan benih unggul bersertifikat, pupuk organik, pestisida hayati dan alat mesin pertanian (alsintan) hortikultura terus ditingkatkan melalui APBD maupun sinergi program pusat (Kementan).

c) **Peningkatan Kapasitas Petani Hortikultura**
   Pemerintah daerah secara aktif memfasilitasi pelatihan teknis budidaya hortikultura modern (irigasi tetes, vertikultur dan sistem greenhouse), pengendalian hama terpadu (PHT) dan pascapanen untuk petani muda, kelompok tani (poktan) dan gapoktan.

d) **Revitalisasi Irigasi dan Air untuk Hortikultura**
   Melalui program irigasi tersier dan embung desa, Klaten memperkuat dukungan air bagi pertanian hortikultura, terutama untuk komoditas yang membutuhkan irigasi presisi di musim kemarau.

e) Penguatan Kelembagaan dan Akses Pasar

Pemerintah mendorong terbentuknya koperasi petani hortikultura dan kemitraan dengan pasar modern, industri pengolahan, serta digitalisasi penjualan melalui platform daring. Dinas terkait juga aktif memfasilitasi akses pemasaran, branding produk dan sertifikasi (organik, PIRT, halal).

f) Inovasi Teknologi dan Energi Terbarukan

Beberapa desa didorong untuk modernisasi pertanian seperti penyemprotan dengan drone, serta mengembangkan teknologi pascapanen sederhana untuk memperpanjang umur simpan produk hortikultura.

g) Kolaborasi Program Pusat dan Daerah

Keterlibatan Klaten juga mencakup integrasi program nasional seperti Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis Korporasi Petani, *Food Estate* mini skala desa dan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor hortikultura yang difasilitasi melalui dinas teknis.

c. Analisis Lingkungan Strategis Regional

1) Isu Strategis Pembangunan Regional Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagai bagian integral dari Provinsi Jawa Tengah, perlu memastikan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Isu-isu strategis pembangunan Jawa Tengah dalam dua dekade mendatang sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 meliputi:

a) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal disebabkan oleh rendahnya produktivitas sejumlah sektor ekonomi serta kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya alam sebagai faktor produksi utama. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui transformasi ekonomi. Transformasi ini dilakukan dengan mengalihkan sektor-sektor berproduktivitas rendah ke sektor unggulan berproduktivitas tinggi, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga menjadi kunci untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan mampu bersaing secara global.

Transformasi ekonomi akan diarahkan melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau fokus pada investasi, infrastruktur dan pekerjaan yang ramah lingkungan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, sementara ekonomi biru mengedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara lestari. Keberhasilan transformasi ini juga sangat bergantung pada terciptanya lingkungan yang kondusif dan stabil. Selain itu, pembangunan desa yang belum optimal turut menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi desa, perbaikan pelayanan dasar, serta penguatan peran kelembagaan supra desa perlu mendapat perhatian agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

b) Penurunan tingkat kemiskinan

Kemiskinan di Jawa Tengah merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensi, mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga ketidakberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan ke depan harus dilakukan secara efektif, terpadu dan menyeluruh. Pendekatan yang digunakan perlu mengacu pada empat prinsip utama, yaitu penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, serta pembangunan yang inklusif.

Strategi yang diterapkan mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kapasitas dan pendapatan, pengembangan usaha mikro dan kecil secara berkelanjutan, serta pengurangan wilayah kantong kemiskinan melalui sinergi kebijakan dan program. Semua intervensi perlu dirancang secara terintegrasi dengan dukungan basis data yang akurat agar menghasilkan dampak yang signifikan. Mengingat kompleksitasnya, penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah memerlukan keterlibatan lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berkualitas.

c) Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional dalam mendukung ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketahanan pangan hanya dapat terwujud secara berkelanjutan jika ditopang oleh sarana pertanian yang memadai, pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, serta peningkatan kapasitas SDM pertanian. Distribusi yang lancar, harga dan stok yang stabil juga menjadi kunci keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan pangan perlu didorong melalui pola konsumsi bergizi,

beragam, aman, serta pengembangan pangan lokal. Untuk itu, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah di Jawa Tengah dalam kerangka pembangunan kewilayahan yang terintegrasi.

Untuk mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional, telah dilakukan pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi dan ramah lingkungan serta pemanfaatan lahan pekarangan dengan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk mendukung 10 program unggulan kepala daerah berupa pupuk mudah, murah dan insentif untuk petani dan program hilirisasi produk hasil pertanian melalui klaster olahan pangan, utamanya untuk olahan pangan lokal. Selain itu pemerintah Kabupaten Klaten juga mengembangkan varietas padi lokal Rojolele Srinuk untuk mengembalikan masa kejayaan Beras Rojolele di masa lalu. Namun demikian untuk kontribusi pertanian mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan iklim, serangan hama dan adanya alih fungsi lahan dampak pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo

d) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan menjaga kondisi jalan agar aman dan nyaman Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan (utamanya anak, pelajar, perempuan dan lansia) dan kelompok berkebutuhan khusus (aksesibilitas disabilitas di simpul dan jaringan transportasi) perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif.

Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan diantara melalui peralihan menggunakan angkutan umum.

Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi aman, energi listrik dan transportasi.

e) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah. Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

f) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

g) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Salah satu isu strategis penting di Jawa Tengah adalah penguatan budaya sebagai fondasi karakter dan jati diri masyarakat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, budaya lokal memiliki peran sentral sebagai penyeimbang agar masyarakat tidak kehilangan identitas. Modernisasi memang membawa kemajuan, namun juga dapat memunculkan tantangan seperti pergeseran nilai, menurunnya aspek

moral dan spiritual, serta terbentuknya pola pikir dan perilaku yang menjauh dari budaya luhur Jawa. Selain itu, ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga menjadi sorotan, mengingat perubahan gaya hidup dan arus informasi yang cepat dapat memengaruhi relasi dalam keluarga. Isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak, ketimpangan gender, serta pergeseran norma menjadi ancaman terhadap nilai-nilai keluarga dan sosial.

Dalam konteks ini, pembangunan karakter berbasis budaya menjadi kunci untuk menjaga kohesi sosial, membentuk masyarakat yang bermoral dan berjati diri, serta memperkuat ketahanan dari berbagai ancaman seperti kriminalitas, radikalisme dan terorisme. Budaya yang kuat diharapkan menciptakan lingkungan sosial yang aman, nyaman, serta harmonis bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

h) Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme kokreasi antaraktor dapat dioptimalkan. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya langkah transformatif dalam mewujudkan collaborative governance, juga pada proses untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan lima tahun ke depan.

2) Posisi Strategis Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah dalam WP Subosukawonosraten

Dalam rangka meningkatkan kontribusi Provinsi Jawa Tengah pada perwujudan Indonesia Emas 2045, akan dikembangkan 10 titik aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru (berbasis WP) di Jawa Tengah, salah satunya adalah Wilayah Pengembangan (WP) Subosukawonostraten. Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP

Subosukawonosraten, berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

a. **Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (Event Tourism) dan Wisata Alam dan Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY**

(1) Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Keberadaan Jalan tol Solo-Yogyakarta dengan 4 exit tol di wilayah Kabupaten Klaten serta KRL Jogja Solo dengan 5 stasiun pemberhentian di wilayah Klaten, mempunyai peran strategis untuk mendukung mobilitas orang dan barang dari dan keluar Klaten.

(2) Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara. Keberadaan 90 (sembilan puluh) obyek wista yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten dan sangat beragam, dari wisata budaya alam, wista air hingga wisata budaya merupakan potensi yang luar biasa untuk menarik wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara. Dengan adanya keunikan batuan di Wilayah Bayat beserta keragaman budaya serta flora dan fauna di sekitarnya mendorong pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengembangkan Geopark Klaten (yang saat ini sedang dlam proses pengusulan ke pemerintah pusat). Keberadaan Geopark Klatenini nantimya diharapkan dapat mendorong pelaksanaan konservasi, edukasi serta peningkatan perekonomian masyarakat, melalui wisata.

b. **Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (tekstil dan alas kaki).**

Keberadaan industri tekstil dan alas kaki yang banyak terdapat di wilayah Solo Raya, serta adanya 10 produk unggulan Daerah kabupaten Klaten yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 31/050 Tahun 2024 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten, yang meliputi : Batik, lurik, konveksi, tembakau asepan dan rajangan, mebel, Kemarik, logam, beras rojolele, handycraft dan makanan olahan merupakan merupakan salah satu modal untuk pengembangan industri (terutama mikro-kecil-menengah) di Kabupaten Klaten

c. **Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian**

(1) Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas)

Dengan luas lahan pertanian pangan yang mencapai 32.000 hektar dan fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi

pertanian, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), optimalisasi lahan, peningkatan system jaringan irigasi, pembangunan tampungan air (embung) dan juga penyediaan bibit unggul yang berkualitas Kabupaten Klaten mampu mendukung ketahana pangan di Solo Raya bahkan Nasional. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa komoditas padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, ikan, daging dan telur di Kabupaten Klaten mengalami surplus yang cukup signifikan.

(2) Hilirisasi pertanian (dalam arti luas)

Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan, penguatan kelembagaan kelompok tani serta promosi produk-produk pertanian (dalam arti luas) diharapkan dapat meningkat perekonomian masyarakat, terutama petani. Untuk mendukung komoditas unggulan hilirisasi industri pengolahan pangan, utamanya untuk olahan pangan lokal dengan mengembangkan program diversifikasi pangan dan turunannya serta diversifikasi produk melalui klaster makanan olahan, agar dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan terkait perlunya fasilitasi promosi dan pemasaran produk makanan olahan, serta perlunya pembinaan dan pendampingan untuk membranding produk makanan olahan sebagai ikon Klaten.

d. Analisis Lingkungan Strategis Kabupaten Klaten

Analisis lingkungan strategis tingkat daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 adalah: 1) Dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 dan 2) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041. Amanat dalam kedua dokumen tersebut diatas menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di dokumen Rancagan Teknokratik RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

1) Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045

Rancangan RPJPD Kabupaten Klatem Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 20 tahun kedepan, merupakan

salah satu pedoman yang harus dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perancaaan lainnya. Isu strategis daerah Kabupaten Klaten diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Kabupaten Klaten dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

a) Kualitas dan Daya Saing SDM

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain:

Pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh pelosok tanah air.

Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Keempat, adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkonstribusi dan memenangkan persaingan global guna menyonsong Indonesia Emas 2045.

b) Tata Kelola Pemerintahan Dinamis *(Dynamic Governance)*

Dinamisme *(dynamism)* pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai ide baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif (Neo & Chen, 2007, p. 1). Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan optimal serta mampu memperbaiki pola dalam pengambilan keputusan publik sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang *(*obsolescence*)* serta terbukanya peluang-peluang baru. Seriring dengan dinamika perubahan di masyaakat yang begitu cepat, berbandin lurus dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga membutuhan penyelesaian yang multi perspektuf dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Kedinamisan kondisi pemerintah nantinya akan berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan pengarusutamaan transformasi di Kabupaten Klaten dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

c) Tingkat kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dimanisfestasikan melalui seperangkat kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran. Setiap negara akan memilih dan menerapkan strategi pembangunan tertentu yang dianggap tepat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyatnya. Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama kurun waktu tahun 2013-2023 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten cenderung fluktuatif (naik-turun). Pada tahun 2013 indeks kedalaman sebesar 2,37 kemudian naik ditahun 2015 menjadi 2,72 dan ditahun berikutnya menunjukkan penurunan menjadi 1,70 ditahun 2023. Hal ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tidak menentu terkadang kecil terkadang besar.

Indeks keparahah kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan

kemiskinan Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2013-2023 juga mempunyai trend fluktuatif (naik-turun). Tahun 2013 indeks keparahan sebesar 0,55 kemudian naik ditahun 2015 menjadi 0,72, selanjutnya menurun sampai tahun 2019 diangka 0,27 dan tahun-tahun berikutnya naik kembali hingga tahun 2023 sebesar 0,38.

d) Ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur Yang Berkualitas

Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkonstribusi terhadap pertumbuan ekonomi. Pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, menjadi isu strategis sebagai *mainstream* pembangunan Kabupaten Klaten ke depan.

Merujuk pada publikasi *World Development Report* (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang baik dan berkualitas. Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat masih terdapat sekitar 12,28 % penduduk Kabupaten Klaten yang berada di bawah kemiskinan dan sekitar 4,20% yang menganggur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya wilayah dengan tipologi perbukitan-pedesaan dan daerah perbatasan masih menjadi tantangan tersendiri.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah merupakan bentuk dari *'Regional Growth Strategy'*, utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

e) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional. Pemahaman mengenai pentingnya daya saing berkembang seiring dengan semakin berkembangnya globalisasi dan perdagangan bebas. Daya saing secara garis besar diukur berdasarkan kondisi institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara. Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi dan daya saing tinggi berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten saat ini masih belum optimal, salah satunya adalah tingkat produktivitas dan kualitas yang masih kurang serta belum memperhatikan keberlanjutannya. Bagaimana kedepan Kabupaten Klaten dapat membranding dan mewujudkan perekonomian daerah yang mampu berdaya saing, ramah lingkungan, berkelanjutan serta berorientasi eksport, utamanya untuk pengembangan produk unggulan daerah dengan pola pendekatan klaster dan pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk menjadikan Kabupaten Klaten yang berkedaulatan pangan, sebagai daerah tujuan wisata serta menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kota Kreatif perlu adanya kolaborasi, inovasi dan kreatifitas dengan melibatkan berbagai sektor baik sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan adanya bonus demografi, dimana masyarakat di dominasi oleh penduduk usia produktif, bagaimana agar dapat dikelola dengan baik dan menangkap peluang tersebut dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan potensi daerah yang di miliki, serta menarik investor dengan memberikan kemudahan perijinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Melalui transformasi ekonomi lokal agar dapat memberikan nilai tambah dan mampu menjadi daya ungkit pergerakan perekonomian melalui hilirisasi, peningkatan daya saing ekonomi yang berkelanjutan menuju ekonomi hijau dengan menerapkan teknologi serta pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan, didukung dengan kondisi wilayah yang kondusif diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f) Kualitas Lingkungan dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Persoalan lingkungan merupakan masalah dunia yang terjadi hampir di semua negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Isu lingkungan yang mendunia dan sempat menjadi berita terkait dengan pemanasan global (*global warming*). Masalah pemanasan global tentu tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak hal, antara lain tingkat polusi yang tinggi dari negara-negara industri. Demikian pula dengan penggundulan hutan, baik secara resmi maupun *illegal logging*.

g) Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana

Berdasarkan kondisi geografis, klimatologis dan hidrologi, wilayah Klaten merupakan kawasan rawan bencana atau berpotensi terjadi bencana alam. Kawasan rawan banjir meliputi 11 wilayah kecamatan, yakni Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wed, dan Wonosari. Sedangkan kawasan rawan longsor di Klaten tersebar di tujuh wilayah kecamatan yakni Bayat, Cawas, Gantiwarno, Wedi, Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan.

Untuk pengurangan risiko bencana dan mewujudkan ketahanan bencana, penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana harus terus dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.

2) Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten dalam dokumen RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten. Pengembangan Potensi Wilayah diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam Lampiran II (Sistem Perkotaan Nasional) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Klaten ditetapkan sebagai PKW (II/C/1). Artinya bahwa wilayah Klaten berada dalam tahapan pengembangan dengan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional melalui pengembangan atau peningkatan fungsi.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Klaten termasuk dalam RTRW Kawasan Strategis Subosukowonostraten sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala regional atau provinsi. Suatu PKW harus

mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal meliputi lebih dari satu kabupaten, seperti misalnya pusat pendidikan berskala provinsi atau nasional, baik negeri ataupun swasta, atau juga, atau juga kegiatan industri manufaktur dan perdagangan yang aktivitasnya mencakup skala Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Klaten termasuk ke dalam pengembangan kerjasama strategis daerah kabupaten yang tergabung dalam regional Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional. Secara geografis, ketujuh wilayah kabupaten tersebut memiliki keterkaitan erat dalam hal jenis kondisi dan struktur geologis.

Kabupaten Klaten merupakan lumbung padi Jawa Tengah serta termasuk dalam penyokong ketahanan pangan nasional. Berdasar keterkaitan antar ruang, Kawasan Andalan Subosuka – Wonosraten dengan PKN Surakarta, PKW Boyolali dan PKW Klaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Bandar Udara Adi Sumarmo di Surakarta. Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai hinterland dari Kota Surakarta serta Yogyakarta memberikan pengaruh dalam penyediaan pangan termasuk pendistribusian hasil pertanian, perdagangan dan jasa sepanjang koridor DI Yogyakarta-Surakarta serta pariwisata Kawasan Strategis Nasional (KSN) Candi Prambanan.

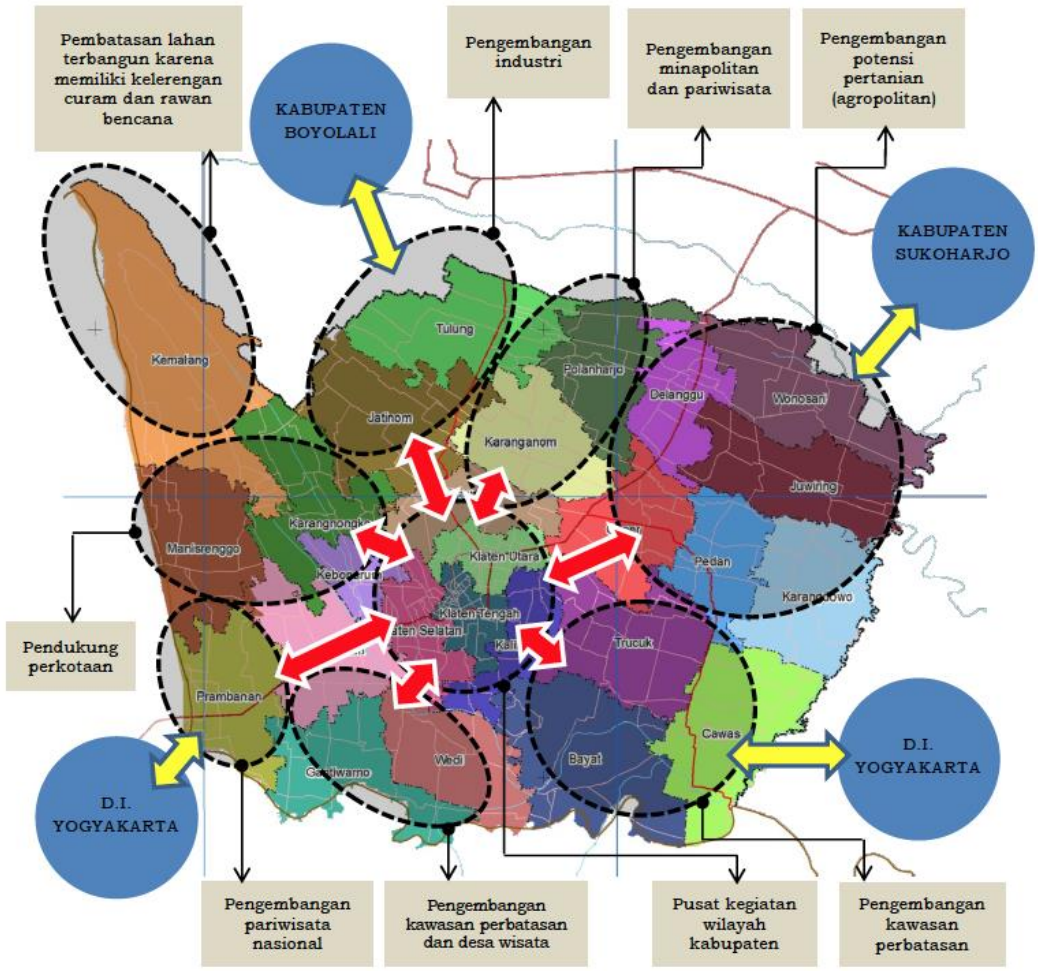
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten berdasarkan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 adalah:

"Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Pertanian, Industri dan Pariwisata"

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, serta penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten.

Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten disusun dengan memadukan: (1) Konsep pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) Konsep pengembangan wilayah terpadu; (3) Konsep pengembangan ekonomi lokal; (4) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya; dan (5) Konsep pengembangan wilayah berbasis klaster.

Pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis potensi sumber daya lokal yang teraglomerasi dengan wilayah sekitarnya, sehingga antara satu kecamatan dengan kecamatan lain saling mendorong pertumbuhan wilayah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.129 Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten

3) Konversi Kawasan Geoheritage Bayat

Kecamatan Bayat, yang terletak di bagian selatan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 39,43 km^2 dan terdiri atas 18 desa. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyimpan potensi luar biasa di bidang geologi yang menjadikannya layak dikembangkan sebagai kawasan geopark berbasis warisan geologi (geoheritage).

Mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan

Geologi, warisan geologi atau *geoheritage* didefinisikan sebagai keragaman geologi (*geodiversity*) yang memiliki nilai lebih karena menjadi rekaman proses yang pernah atau sedang terjadi di bumi. Warisan ini dinilai tinggi karena keunikan, kelangkaan, keindahan dan nilai ilmiahnya yang bermanfaat untuk penelitian dan pendidikan kebumian. Objek geoheritage yang memiliki ciri khas tertentu disebut sebagai *geosite*, yang merupakan bagian penting dari narasi evolusi bumi di suatu wilayah.

Bayat menjadi istimewa karena merupakan salah satu dari hanya tiga lokasi di Pulau Jawa yang memiliki singkapan batuan metamorf sebagai batuan dasar, dengan usia mencapai 98 juta tahun. Dua lokasi lainnya adalah Karangsambung di Kabupaten Kebumen (yang telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional Karangsambung–Karangbolong) dan Ciletuh di Kabupaten Sukabumi (yang telah berstatus UNESCO Global Geopark Ciletuh).

Singkapan batuan tua di Bayat menjadi bukti nyata sejarah evolusi bumi di Pulau Jawa, sehingga memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi. *Geodiversity* di kawasan ini tidak hanya terbatas pada batuan metamorf, tetapi juga meliputi struktur geologi yang kompleks, jenis batuan lainnya, hingga potensi geowisata edukatif. Saat ini, terdapat 13 situs geoheritage di wilayah Bayat dan Wedi yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebagai bagian dari Warisan Geologi Nasional.

Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, pengembangan taman bumi (geopark) telah diintegrasikan sebagai bagian dari Prioritas Nasional (PN) 2 dan Prioritas Nasional (PN) 3. Pada PN 2, geopark disebut sebagai salah satu area preservasi yang perlu diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta penyusunan rencana aksi yang terintegrasi. Selain itu, geopark menjadi bagian dari upaya mendorong ekonomi hijau, ekonomi biru, serta pelestarian sumber daya alam sebagai bagian dari kemandirian bangsa.

Sementara itu, pada PN 3, pengembangan geopark dikaitkan dengan diversifikasi atraksi pariwisata, khususnya geopark bertaraf internasional seperti UNESCO Global Geopark, untuk mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan industri kreatif, serta integrasi dengan kawasan agromaritim dan ekonomi lokal.

Dengan demikian, pengembangan Geopark Klaten tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga sejalan dengan arah pembangunan nasional jangka menengah dan perlu dijadikan salah satu prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Klaten. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan, memperkuat kelembagaan di tingkat daerah, serta mendukung pencapaian target nasional

melalui strategi pembangunan yang terdesentralisasi dan berbasis potensi lokal.

4) Mitigasi Dampak Keberadaan Tol Semarang–Yogyakarta terhadap Ekonomi Kabupaten Klaten

Keberadaan Tol Semarang–Yogyakarta merupakan salah satu proyek strategis nasional yang akan memberikan pengaruh besar terhadap pola mobilitas, konektivita, dan perekonomian di wilayah Kabupaten Klaten. Peningkatan aksesibilitas wilayah melalui infrastruktur tol ini diproyeksikan akan membawa peluang pertumbuhan ekonomi baru, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan usaha lokal, perubahan struktur ekonomi, serta pergeseran pusat-pusat pertumbuhan. Untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi dampak negatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan berbagai langkah strategis yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memastikan bahwa keberadaan tol tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga menjadi instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.

Pertama, **penguatan daya saing ekonomi lokal** dilakukan melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu memanfaatkan peluang pasar yang terbuka lebih luas akibat meningkatnya konektivitas. Pemerintah Kabupaten Klaten akan memberikan fasilitasi berupa pelatihan manajemen usaha, pendampingan pemasaran digital, bantuan permodalan serta kemudahan perizinan. Peningkatan kualitas dan standardisasi produk unggulan daerah juga menjadi prioritas agar dapat memenuhi selera dan persyaratan pasar yang lebih kompetitif.

Kedua, **pengembangan kawasan ekonomi strategis** di sekitar titik akses (pintu keluar) tol akan diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru yang mampu menarik investasi, mendorong aktivitas perdagangan dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Perencanaan tata ruang akan dioptimalkan untuk mengatur pemanfaatan lahan, mencegah alih fungsi lahan produktif secara tidak terkendali, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, **peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)** menjadi faktor kunci. Pemerintah Kabupaten Klaten akan mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan sektor potensial seperti industri kreatif, jasa pariwisata, kuliner, logistik dan perdagangan. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatihan,dan dunia usaha akan diperkuat untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, adaptif dan mampu bersaing di pasar kerja yang semakin terbuka.

Keempat, **penguatan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan ekonomi syariah** akan menjadi strategi untuk memanfaatkan kemudahan akses tol dalam menarik wisatawan dari luar daerah. Promosi destinasi wisata unggulan, pengembangan paket wisata terpadu, serta perbaikan infrastruktur pendukung akan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan lama tinggal wisatawan. Selain itu, keberlanjutan budaya dan lingkungan akan dijaga melalui pengelolaan pariwisata yang bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama.

Kelima, **penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan usaha lokal** akan diarahkan untuk mencegah terjadinya dominasi pasar oleh pelaku usaha eksternal yang berpotensi menggeser peran pelaku ekonomi daerah. Kebijakan ini mencakup perlindungan pasar tradisional, pemberian insentif bagi investor yang memberdayakan tenaga kerja lokal, serta pembatasan aktivitas yang dapat mengganggu keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Melalui upaya-upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten menargetkan terciptanya struktur ekonomi daerah yang lebih kokoh, adaptif dan kompetitif. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, keberadaan Tol Semarang–Yogyakarta diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian visi *"Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"* menuju Indonesia Emas 2045.

5) Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen perencanaan, analisis terhadap permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten, serta identifikasi tantangan yang berpotensi muncul dalam periode 2025–2029, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Daya saing daerah sangat ditentukan oleh kualitas SDM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Klaten, meskipun terjadi perbaikan dalam struktur demografi dengan turunnya Angka Beban Ketergantungan dari 49,01% (2020) menjadi 45,53% (2024), tantangan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM masih signifikan. Proporsi penduduk usia

produktif yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi tenaga kerja yang kompetitif, adaptif dan inovatif.

Sebaran penduduk yang bekerja masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan, namun keduanya menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Sementara sektor jasa kemasyarakatan justru mengalami peningkatan, mencerminkan adanya pergeseran struktural lapangan kerja. Namun, hal ini belum dibarengi dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja secara merata. Di sisi lain, fluktuasi status pekerjaan, terutama tingginya proporsi pekerja informal dan pekerja bebas, mencerminkan kerentanan pasar tenaga kerja serta masih terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Situasi ini menandakan bahwa pembangunan SDM belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang dinamis dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih kuat dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan kerja yang berbasis kebutuhan industri, serta penguatan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

2. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, teknologi dan kebutuhan masyarakat *(dynamic governance)***

Di tengah tuntutan perubahan global dan percepatan inovasi teknologi, tata kelola pemerintahan yang dinamis menjadi keharusan untuk mendorong efektivitas, efisiensi dan daya saing daerah. Kabupaten Klaten telah menunjukkan kemajuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, namun masih dihadapkan pada tantangan dalam konsistensi kinerja, integritas dan kemampuan berinovasi.

Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari 2,97 (2020) menjadi 3,85 (2024) mencerminkan penguatan kapasitas dalam ekosistem inovasi, SDM dan pasar. Namun, penurunan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK RI tahun 2023 menjadi 70,97 menunjukkan bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi masih memerlukan perhatian serius, termasuk melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan internal dan partisipasi publik.

Penurunan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari 4,48 (2023) menjadi 4,13 (2024) juga menjadi sinyal perlunya peningkatan kualitas dan konsistensi pelayanan publik di beberapa unit layanan strategis, seperti Disdukcapil dan RSUD. Di sisi lain, capaian Reformasi Birokrasi

(RB) tahun 2023 mencatat skor RB General 74,29 dan RB Tematik 9,72, dengan kontribusi positif dari upaya penyederhanaan struktur, digitalisasi arsip, penanganan stunting dan pengendalian inflasi.

Secara umum, meskipun tata kelola pemerintahan di Klaten telah mengalami kemajuan, masih diperlukan penguatan dalam aspek integritas, inovasi birokrasi dan responsivitas terhadap perubahan. Transformasi tata kelola ini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan inklusif dan peningkatan daya saing daerah dalam dua dekade ke depan.

3. **Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar**

Kemiskinan masih menjadi isu strategis utama di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 12,04%, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah (10,47%) dan nasional (9,03%). Meski terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 151,8 ribu jiwa (2020) menjadi 141,84 ribu jiwa (2024), laju penurunannya relatif lambat. Klaten bahkan menempati peringkat ke-9 tertinggi jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dan tertinggi di wilayah Subosukowonosraten. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural dan sektoral yang memperkuat kemiskinan.

Akan tetapi tren positif terlihat pada indikator ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,31% (2022) menjadi 3,97% (2024), seiring pulihnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan belum merata karena masih adanya ketimpangan akses kerja dan *mismatch* antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Upaya perlindungan sosial juga menunjukkan kemajuan, terutama dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Cakupan penerima bantuan meningkat dari 86,12% (2023) menjadi 97,6% (2024), termasuk melalui pemberdayaan ekonomi seperti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Meski demikian, kualitas pendampingan dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kemandirian kelompok rentan secara berkelanjutan.

Pada sisi infrastruktur dasar, cakupan layanan sanitasi telah mencapai 100% dan akses air bersih rumah tangga mencapai 94,29%. Namun, distribusi air bersih yang belum merata serta pengelolaan sampah yang belum optimal masih menjadi tantangan yang berdampak

langsung pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Ketimpangan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari permasalahan kemiskinan. Masyarakat miskin masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta layanan dasar lainnya. Hal ini memperkuat jurang kesejahteraan dan menciptakan kerentanan sosial yang berkelanjutan, terutama bagi anak-anak, perempuan, lansia dan kelompok rentan lainnya. Meskipun terdapat kemajuan di berbagai sektor, penurunan kemiskinan belum sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap manfaat pembangunan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, terpadu dan berkeadilan untuk memastikan pengurangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Klaten.

4. **Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung pembangunan yang berkualitas, aman dan ramah lingkungan di seluruh wilayah**

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah saat ini adalah belum meratanya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas publik lainnya yang layak, aman dan ramah lingkungan. Ketimpangan ini terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar kecamatan dalam satu kabupaten.

Ketidakseimbangan infrastruktur berdampak langsung terhadap akses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta mobilitas ekonomi masyarakat. Di beberapa wilayah pinggiran dan desa terpencil, masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, sanitasi layak, jaringan internet stabil, hingga jalan penghubung yang memadai. Hal ini tidak hanya menghambat produktivitas dan konektivitas, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Di sisi lain, infrastruktur yang telah tersedia di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten sering kali belum memenuhi standar ketahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan. Masih minimnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menyebabkan munculnya risiko kerusakan lingkungan, pencemaran dan ketidaksiapan menghadapi

bencana. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan juga mengancam keberlanjutan sumber daya lokal.

Kondisi ini menuntut penguatan perencanaan infrastruktur yang berpihak pada wilayah tertinggal, pembangunan berbasis kebutuhan lokal dan integrasi aspek lingkungan, keamanan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat menjadi penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan, demi mendorong pertumbuhan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan.

5. **Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten masih belum menunjukkan performa yang optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.Meskipun perekonomian Kabupaten Klaten menunjukkan tren pemulihan pascapandemi dengan pertumbuhan positif sejak 2021, laju pertumbuhan mengalami penurunan dari 5,90 % pada tahun 2022 menjadi 5,70% pada 2023 dan kembali turun menjadi 5,11% pada 2024.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya produktivitas sektor unggulan, keterbatasan inovasi dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi lokal. Selain itu, daya saing daerah masih terhambat oleh pemenuhan infrastruktur penunjang ekonomi, kurangnya akses pembiayaan dan teknologi bagi UMKM, serta terbatasnya investasi dari sektor swasta. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan keterbatasan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

6. **Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Klaten mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 61,09, setelah menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Kondisi ini mencerminkan menurunnya kualitas lingkungan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan timbulan sampah yang mencapai 263.706,32 ton per tahun di tahun 2024, tidak diimbangi dengan kapasitas lahan penampungan dan fasilitas pengolahan yang memadai serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan limbah. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, belum berjalan optimal dan memerlukan perhatian serta penguatan dari sisi infrastruktur, kebijakan dan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan diklat serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya

7. **Belum optimalnya kapasitas ketahanan daerah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana**

Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan gempa bumi, dengan klasifikasi risiko yang bervariasi dari rendah hingga tinggi, khususnya di beberapa kecamatan seperti Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari. Meskipun Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi struktural dan non-struktural seperti penyusunan kajian risiko, pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang, pembentukan SPAB, sekolah sungai dan desa tangguh bencana kapasitas ketahanan daerah masih belum optimal.

Hal ini terlihat dari tingginya jumlah kejadian bencana yang mencapai 548 kasus pada tahun 2024, serta tingginya Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 78,56, meskipun menurun dari tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan kerentanan di sektor ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup dan tata ruang turut memperbesar risiko. Keterbatasan peralatan, sumber daya manusia, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana menjadi tantangan utama. Dengan meningkatnya frekuensi dan skala bencana, diperlukan penguatan sistem ketangguhan daerah melalui sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas TRC dan relawan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan penanganan bencana berbasis komunitas.

Tabel 2.148
Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

Potensi Kabupaten Klaten	Isu Staregis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 (SDGs)	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Darah
		Global	Nasional	Regional	
• Peternakan dan perikanan (biogas, diversifikasi produk susu, agrowisata perikanan): Sapi perah Kemalang, ayam pedaging/ petelur, perikanan air tawar Polanharjo; • Sumber daya air (PES, konservasi air, wisata air): Umbul ponggok, umbul manten, umbul cokro, SUB DAS Pusur, Dengken, Pepe, Samin; • Ekonomi Syariah (Klaster Halal dan Inklusi Keuangan Syariah): UMKM halal bayat dan trucuk, lembaga keuangan syariah, wisata religi	• Menurunnya kualitas dan kuantitas air; • Belum optimalnya cakupan pelayanan sampah; • Rendahnya pengelolaan sanitasi dan limbah; • Belum optimalnya adaptasi perubahan iklim; • Belum optimalnya pengelolaan daya dukung lingkungan; • Kurang optimalnya penanganan dan mitigasi bencana	Perubahan iklim dan perkembangan eksplorasi	Krisis lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan
				Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Belum optimalnya kapasitas ketahanan daerah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
• Pertanian dan pangan (pertanian organik dan varietas rendah emisi): Sentra beras delanggu, hortikultura, jagung, kedelai; • Energi Terbarukan (desa mandiri energi, penurunan emisi GRK) : Biogas sapi,	Menurunnya ketersediaan pangan	Peningkatan kompetisi terhadap pemanfaatan sumber daya alam		Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	

Potensi Kabupaten Klaten	Isu Staregis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 (SDGs)	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Darah
		Global	Nasional	Regional	
mikrohidro merapi, PLTS atap;					
• SDM dan Pendidikan (pusat vokasi dan riset inovasi: pesantren, SMK Teknik Ceper, Universitas Widya Dharma;		Demografi dan Urbanisasi	• Rendahnya produktivitas; • Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM
• Industri dan UMKM (digitalisasi UMKM, sertifikasi halal, modernisasi dan branding UMKM): Logam ceper, batik bayat, gerabah mekikan, gula kelapa trucuk; • Pariwisata (ekowisata, pariwisata halal): Candi plaosan, prambanan, Geopark Klaten, umbul-umbul polnharjo, wisata budaya bayat				Penurunan tingkat kemiskinan	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tingginya kemiskinan, ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar
		Peningkatan urbanisasi		Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
• Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel; • Posisi strategis antara Solo–Yogyakarta sebagai		• Kemajuan teknologi • Perdagangan internasional • Pergeseran sistem keuangan internasional	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, teknologi dan

Potensi Kabupaten Klaten	Isu Staregis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 (SDGs)	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Darah
		Global	Nasional	Regional	
peluang kolaborasi lintas daerah.					kebutuhan masyarakat (*dynamic governance*)
		• Pertumbuhan kelas menengah dunia; • Perubahan geopolitik dan geoekonomi	• Pergeseran struktur kelas masyarakat; • Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif; • Geopolitik dan geoekonomi	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	

Sumber : Hasil analisis, 2024

Pemerintah
Kabupaten Klaten

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/ kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satu unsur penting yang harus dirumuskan dengan jelas adalah **visi**. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, memberikan definisi yang cukup tegas mengenai apa yang dimaksud dengan visi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

Menurut peraturan ini, **visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan**. Artinya, visi merupakan sebuah gambaran besar tentang arah pembangunan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Visi tidak sekadar menjadi hiasan kata-kata yang indah, melainkan merupakan bentuk ekspresi dari aspirasi kolektif masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang padat, jelas, dan inspiratif. Visi menggambarkan kondisi ideal yang hendak dicapai, serta menjadi arah dan pedoman bagi seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan visi harus memperhatikan potensi, permasalahan, serta tantangan daerah, dan tentu saja harus selaras dengan visi pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2030 yaitu:

"Mewujudkan Klaten Yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan"

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 merupakan tahap awal cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten yang tertuang dalam dokumen RPJPD tahun 2025-2045. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi, memiliki infrastruktur yang baik, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

- Ekonomi yang berkembang, ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat; tersedianya lapangan kerja dan minimnya angka pengangguran serta pertumbuhan sektor ekonomi seperti industri, perdagangan, UMKM, dan pertanian modern.
- Infrastruktur yang berkualitas, diukur dengan tersedianya jalan, jembatan, transportasi umum, dan fasilitas publik yang baik guna mendukung mobilitas masyarakat; rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang berkualitas bagi masyarakat; akses yang mudah terhadap air bersih, listrik, internet, dan fasilitas telekomunikasi serta perencanaan tata kota dan desa yang baik untuk mendukung perkembangan wilayah.
- Kualitas hidup yang tinggi, diukur dengan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses; layanan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi semua masyarakat serta lingkungan yang sehat dan aman, bebas dari polusi dan kemacetan yang parah.
- Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan, diukur dengan masyarakat ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; pemerintahan yang transparan, adaptif dan akuntabel serta terjaminnya hak-hak sosial dan budaya masyarakat.

SEJAHTERA, perwujudan Kabupaten Klaten Sejahtera, ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, layanan sosial; jumlah penduduk miskin yang rendah; lapangan pekerjaan yang cukup; pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi dan merata; kemampuan untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri dan tidak tergantung dengan daerah lain serta dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daerah lain sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin, aman dan sentosa didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

BERKELANJUTAN, Perwujudan Kabupaten Klaten Berkelanjutan pada tahun 2045, ditunjukkan dengan kualitas lingkungan yang baik, dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tangguh dan memperhatikan kearifan lokal, serta pembangunan infrastruktur berkualitas dan menyeluruh di semua wilayah. Kualitas hidup masyarakat Kabupaten Klaten yang baik ditandai dengan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh; kesehatan dan pendidikan yang prima; lingkungan hidup yang lestari dan asri; hunian yang terjangkau; permukiman penduduk layak huni; kualitas udara, air dan tanah yang baik; terkelolanya sampah dan limbah B3; terjaganya sumber mata air dan sungai dari pencemaran serta masyarakat yang tangguh bencana.

Dengan pembangunan yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan meminimalisir risiko bencana untuk mencegah kerugian di masa depan dengan penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif. Pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif serta memperhatikan lingkungan hidup diharapkan mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah merupakan bentuk dari "*Regional Growth Strategy*", utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Visi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian visi jangka Panjang daerah tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Klaten Yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan. Keselasaran tersebut khususnya terletak pada unsur visi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, sehingga apa yang dicita-citakan
untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diharapkan akan mampu mendorong pencapaian cita-cita pembangunan jangka panjang Kabupaten Klaten tahun 2025-2045.

3.1.2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian;
2. Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
3. Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan;
4. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera);

5. Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang *smartcity*;
6. Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 meliputi 3 (tiga) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut

1. **Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian**

   Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan *(people-centered development)*. Misi ini tidak hanya mencerminkan perhatian terhadap aspek pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menyiratkan perlunya pembangunan karakter dan peningkatan daya saing di tengah tantangan globalisasi. Misi ini juga mencakup upaya memperkuat kualitas keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter dan kesejahteraan masyarakat; mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan; pemenuhan hak anak serta pembangunan pemuda dan pengembangan prestasi olahraga. Dengan demikian, misi ini mendukung pembangunan SDM Kabupaten Klaten secara menyeluruh dan inklusif.
2. **Misi 2: Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana**

   Misi ini mengarah pada penyediaan infrastruktur yang merata, tangguh, dan mendukung konektivitas wilayah serta pelayanan dasar masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ini tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan, dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas ekosistem. Misi ini juga mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan sarana irigasi, jalan produksi, dan perlindungan lahan pertanian. Di sisi lain, penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Misi 3: Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan**

   Misi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui penguatan sektor-sektor produktif rakyat, seperti UMKM, pertanian, dan perdagangan lokal. Upaya penurunan tingkat kemiskinan dilakukan dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, dan akses

pembiayaan. Di sisi lain, pengembangan sektor perindustrian diarahkan pada industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal, sementara sektor pariwisata ditumbuhkan melalui promosi destinasi unggulan, penguatan ekonomi kreatif, dan peningkatan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, ekonomi tumbuh secara inklusif dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. **Misi 4: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera)**

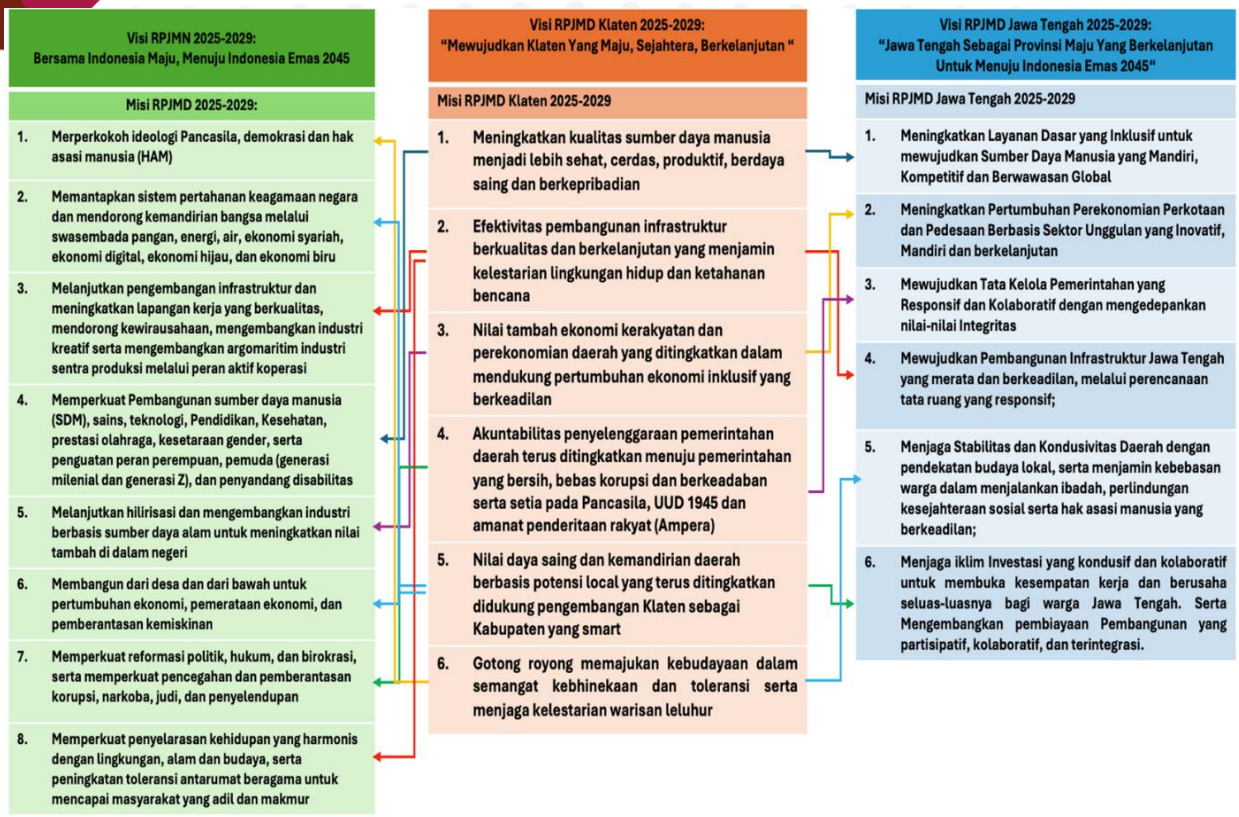
   Misi ini ditujukan untuk penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Reformasi birokrasi terus didorong melalui peningkatan integritas aparatur, digitalisasi layanan publik, dan pengawasan internal yang efektif. Pemerintahan dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan etika pelayanan publik, guna mewujudkan birokrasi yang responsif, bersih dari praktik korupsi, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

5. **Misi 5: Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang *smartcity***

   Misi ini dilakukan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kompetitif melalui penyediaan infrastruktur pendukung, promosi potensi unggulan, serta pemanfaatan teknologi digital. Rasio kewirausahaan ditingkatkan dengan mendorong tumbuhnya wirausaha baru berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif. Sementara itu, kemandirian daerah diperkuat melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata, yang dikelola secara inovatif dan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan Klaten sebagai kabupaten yang cerdas (*smart regency*).

6. **Misi 6: Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur**

   Misi ini difokuskan pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah, serta penguatan ekspresi budaya melalui seni, tradisi, dan kearifan lokal. Pemajuan kebudayaan ini dibarengi dengan upaya memperkuat kerukunan antar umat beragama dan memperkokoh toleransi sosial, pembinaan kehidupan beragama, serta penguatan peran komunitas dalam menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk.



Gambar 3.1 Kesesuaian Visi RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing;
2. Mewujudkan tata tekola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas;
3. Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1: Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing**, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja daerah;
   b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; pendapatan per kapita masyarakat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan;
   c. Meningkatnya daya saing ekonomi dan potensi lokal daerah;
   d. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya konektivitas antar wilayah;
2. **Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas**, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah;
   b. Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.
3. **Tujuan 3: Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari,** dengan:
   a. Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan antar umat beragama;
   b. Terwujudnya lingkungan hidup yang Asri dan berkualitas;
   c. Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan;
   d. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Baseline Data	Target					Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MAJU		**Tujuan1: Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing**	**1. Indeks Daya Saing Daerah**	**Indeks**	**3,85**	**3,90**	**3,95**	**4,00**	**4,05**	**4,10**	**4,15**	**4,15**
			2. Tingkat Kemiskinan	**%**	**12,04**	**11,24-10,61**	**11,32-11,21**	**10,50-10,33**	**10,40-10,30**	**10,33-10,25**	**10,30-10,10**	**10,30-10,10**
	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian	**Sasaran 1.1 :** Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja daerah	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,16	77,90-78,80	78,70-79,50	79,00-80,00	80,00-81,00	81,00-82,00	82,00-83,00	82,00-83,00
			2. Tingkat pengangguran terbuka	%	3,97	4,00–3,68	3,70-3,00	3,65-3,55	3,55-3,45	3,50-3,40	3, 45-3,35	3, 45-3,35
SEJAHTERA	**Misi 3:** Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan	**Sasaran 1.2 :** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	3. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,70-6,00	5,70-6,50	6,60-7,20	7,00-7,80	7,40-8,00	7,90-8,30	7,90-8,30
			4. PDRB Per Kapita	Rp	42,74	45,29	48,63	52,58	57,43	63,48	71,10	71,10
			5. Indeks gini	Indeks	0,437	NA	0,430	0,420	0,410	0,390	0,385	0,385
	Misi 5: Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis	**Sasaran 1.3 :** Meningkatnya daya saing ekonomi dan	6. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian,	%	-0,37	1,36	1,75	2,24	2,72	3,30	3,57	3,57

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Baseline Data	Target					Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang smart	potensi lokal daerah	kehutanan dan perikanan									
			7. Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	8,94	9,24	9,57	9,82	10,02	10,44	10,59	10,59
			8. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,37	5,62	5,91	6,14	6,62	6,91	7,22	7,22
MAJU	**Misi 2:** Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Sasaran 1.4 :** Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya konektivitas antar wilayah	9. Indeks Infrastruktur	Indeks	73,84	72,77	73,30	73,75	74,20	74,63	75,12	75,12
			10. Rasio Konektivitas	Rasio	0,120	0,120	0,120	0,125	0,125	0,130	0,130	0,130
		Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas,	**3. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**84,05**	**84,15**	**84,23**	**84,42**	**84,60**	**84,88**	**85,00**	**85,00**

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Baseline Data	Target					Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Misi 4: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera)	**Sasaran 2.1 :** Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Nilai	66,73	68,00	68,20	68,35	68,57	68,84	69,00	69,00
		Sasaran 2.2 : Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah	12. Maturitas SPIP (sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah)	Nilai	3,098	3,099	3,100	3,101	3,102	3,105	3,110	3,110
BERKELANJUTAN		**Tujuan 3: Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari**	**4. Indeks Demokrasi Indonesia**	**Indeks**	**NA**	**83,71**	**84,46**	**84,.84**	**84,94**	**85,61**	**85,67**	**85,67**
			5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	**Indeks**	**85,64**	**85,75**	**86,20**	**86,50**	**86,90**	**87,20**	**88,35**	**88,35**
			6. Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	**78,56**	**78,50**	**77,50**	**76,50**	**74,62**	**72,62**	**65,27**	**65,27**
	Misi 6 : Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan	**Sasaran 3.1 :** Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan antar umat beragama	13. Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6,80	6,85	6,90	6,95	7,00	7,00	7,00

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Baseline Data	Target					Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur											
BERKELANJUTAN	**Misi 2:** Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Sasaran 3.2 :** Terwujudnya lingkungan hidup yang Asri dan berkualitas	14. Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 Eq	173.745,15*	1.204.249,38	1.360.716,35	1.569.338,99	1.882.272,94	2.247.362,56	2.696.835,07	2.696.835,07
		Sasaran 3.3 : Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	15. Pravalensi Ketidakcuku-pan Konsumsi Pangan (*Pravalence of Undernourish ment)*	%	10,11	10,05	10,00	9,70	9,40	9,20	9,04	9,04
		Sasaran 3.4 : Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	16. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Gambaran keterkaitan antara visi, misi, fokus kerja, tujuan, sasaran,dan indikator kinerja tertuang dalam tabel berikut,

Tabel 3.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
MAJU		**Tujuan 1 :** Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing			1. Tingkat Kemiskinan (%) 2. Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	
	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian		**Sasaran 1.1 :** Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja daerah		1. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	
				Meningkatanya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase kecamatan yang mempunyai puspaga aktif (%)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
				Meningkatnya akurasi dan pemanfaatan data perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
					Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan (%)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kualitas dan efektivas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten (%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	
					Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	
					Cakupan imunisasi bayi lengkap (%)	
					Persentase fasyankes terakreditasi paripurna (%)	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	
					Persentase Rumah Sakit bagas Waras dalam memenuhi ketersediaan sarana , prasarana dan alat kesehatan /SPA sesuai standar (%)	
					Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk (%)	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (%)	
				Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan Posyandu siklus hidup aktif (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
					Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	
				Meningkatnya kualitas pembinaan, prestasi dan daya saing keolahragaan secara berkelanjutan	Persentase pembinaan Atlet berprestasi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
					Persentase perpustakaan yang dibina (%)	
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru SMP (Indeks)	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
					Indeks Pemerataan Guru SD (Indeks)	
					Indeks Pemerataan Guru PAUD (Indeks)	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
					Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	
					Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	
				Meningkatnya Partisipasi Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	
					Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B (%)	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	
					Persentase SMP berakreditasi minimal B (%)	
					Persentase SD berakreditasi minimal B (%)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				Meningkatnya pelindungan dan pemajuan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
				Meningkatnya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya	Persentase Terlestarikannya cagar budaya (%)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
					Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB (%)	
					Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB (%)	
					Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB (%)	
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (%)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Meningkatnya pembinaan kepramukaan	Persentase kwartir/ gudep yang melaksanakan program kerja tahunan secara konsisten (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
				Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan museum sebagai pusat pelestarian dan pembelajaran budaya	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
				Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dari kekerasan dan diskriminasi	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				Terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan (%)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak (%)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Terkendalinya pertumbuhan dan meningkatnya kualitas penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
				Terpeliharanya koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan (%)	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
				Tersedianya data gender dan anak yang akurat dan terintegrasi	Persentase keterisian data pilah gender dan anak kabupaten pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
SEJAHTERA	**Misi 3:** Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan	**Tujuan 1:** Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing	**Sasaran 1.2 :** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan		1. Indeks Gini (Indeks) 2. PDRB Perkapita (ADHB) (Rp. Juta Per Tahun) 3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	
				Meningkatnya akses perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Meningkatnya akurasi dan pemanfaatan data perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
				Meningkatnya jumlah dan kualitas pengiriman transmigran ke kawasan yang telah disiapkan	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi (%)	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya keberdayaan kelompok rentan dalam kehidupan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Meningkatnya kelancara distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks Stabilisasi Harga (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
				Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (US$)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
				Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
				Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan (%)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, dan PPKS lainnya di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PPKS lainnya selain HIV/AIDS dan Napza di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
SEJAHTERA	**Misi 5 :** Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang smart	**Tujuan 1:** Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing	**Sasaran 1.3 :** Meningkatnya daya saing ekonomi dan potensi lokal daerah		1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 3. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	
				Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota (%)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
					Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan (%)	
				Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan perizinan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
				Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				Meningkatnya pelaporan industri dalam SIINas secara tertib dan berkala	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terfasilitasi dalam SIINas (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
				Meningkatnya promosi dan citra positif pariwisata	Persentase media pemasaran pariwisata (%)	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
					Tingkat Hunian Akomodasi (%)	
				Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina (%)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
MAJU	**Misi 2:** Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian	**Tujuan 1:** Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing	**Sasaran 1.4 :** Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya		Indeks Infrastruktur (Angka) Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	
				Meningkatnya akses air minum yang layak bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	lingkungan hidup dan ketahanan bencana		konektivitas antar wilayah	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kondisi baik (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
				Meningkatnya keteraturan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase rencana tata ruang yang disusun (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung perkantoran pemerintah yang terbangun (%)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penanganan permukiman kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
					Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR (%)	
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan (%)	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun (%)	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
				Sasaran: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman	Persentase perumahan yg dilengkapi prasarana sarana utilitas umum (PSU) (%)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
					Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan (%)	
				Terfasilitasinya pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah serta terselenggaranya redistribusi tanah dan penyelesaian ganti kerugian secara tepat dan tertib administrasi	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya (%)	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
				Terpenuhinya kebutuhan rumah layak bagi korban bencana dan masyarakat yang terdampak program pemerintah	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
					Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Terselesaikannya konflik dan kepastian status hukum atas tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan (%)	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
				Terselesaikannya pengadaan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu dan terpenuhinya hak ganti kerugian masyarakat	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
MAJU		**Tujuan 2 : Mewujudkan tata Kekola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas**			**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	
	Misi 4: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat		**Sasaran 2.1 :** Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah		Peringkat/Nilai SAKIP (Nilai)	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Indeks PPID (Indeks)	
					IKM terhadap Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Indeks)	
					Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Nilai)	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif (%)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kecamatan mencapai kategori Prima (%)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat (%)	
					Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah (%)	
					Nilai EPPD (Skor)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan (%)	
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
					Persentase BLUD yang berkinerja baik (%)	
					Persentase BUMD yang berkinerja baik (%)	
					Indeks Tata Kelola Pengadaan (%)	
					Tingkat Capaian Persentase fisik pelaksanaan pembangunan (%)	
					Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang terimplementasikan (%)	
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Akte Kelahiran (%)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	
					Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
					Persentase perpustakaan yang dibina (%)	
				Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (%)	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
					Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah (%)	
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
					Persentase Perangkat daerah dan organisasi atau lembaga yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa dengan tertib administrasi (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Arsip usul musnah (Meter)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
					Persentase arsip yang dialihmediakan (%)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase pengawasan kearsipan internal (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
					Persentase arsip yang diakuisisi (%)	
				Meningkatnya tertib administrasi, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, serta Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Tersedianya data, kajian, dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	
					Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (%)	
				Tersedianya profil kependudukan yang akurat dan mendukung perencanaan pembangunan	Persentase Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan Tahunan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
				Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi kepegawaian, Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN, Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN, dan Meningjkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi (%)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
					Persentase Kinerja ASN bernilai baik (%)	
					Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan (%)	
					Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah (%)	
				Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				Tertatanya administrasi dan wilayah desa secara legal dan fungsional	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	PROGRAM PENATAAN DESA
MAJU	**Misi 4:** Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat	**Tujuan 2:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas,	**Sasaran 2.2 :** Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi (%)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah (%)	
					Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa (%)	
					Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Khusus (%)	
				Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
					Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	
				Meningkatnya pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi yang terpadu, aman, dan mendukung efisiensi pelayanan pemerintahan berbasis digital	Persentase Capaian Digitalisasi Pemerintahan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
					Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (%)	
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
					Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa (%)	
					Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	
					Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Khusus (%)	
					Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi (%)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota (%)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman (%)	
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	
				Tersedianya data statistik sektoral yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
					Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	
BERKELANJUTAN		**Tujuan 3 : Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari**			**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** **Indeks Risiko Bencana (Indeks)** **Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)**	
	Misi 6 : Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur		**Sasaran 3.1 :** Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan antar umat beragama		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
				Meningkatnya deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani (%)	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
				Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran dan non-kebakaran secara efektif dan responsif	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	
				Meningkatnya ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan penyuluhan P4GN (%)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
					Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama (%)	
				Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				Meningkatnya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya	Persentase Terlestarikannya cagar budaya (%)	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan museum sebagai pusat pelestarian dan pembelajaran budaya	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
				Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam penguatan etika dan budaya politik demokratis	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik (%)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
				Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota (%)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman (%)	
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
BERKELANJUTAN	**Misi 2:** Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Tujuan 3 : Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari**	**Sasaran 3.2 :** Terwujudnya lingkungan hidup yang Asri dan berkualitas		Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (TON CO2 EQ)	
				Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (Indeks)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian yang mendukung usaha tani berkelanjutan	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya (Kuintal/Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik Kabupaten (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (%)	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terukur dan berkelanjutan	Indeks Pencemaran Udara (Indeks)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Pencemaran Air (Indeks)	
BERKELANJUTAN	**Misi 2:** Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Tujuan 3 :** Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari	**Sasaran 3.3 :** Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)* ((%))	
				Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian yang mendukung usaha tani berkelanjutan	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya (Kuintal/Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				Meningkatnya kualitas prasarana pertanian dan cakupan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

FRASA VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				Menurunnya kerawanan pangan dan meningkatnya akses pangan bagi masyarakat rentan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
BERKELANJUTAN	**Misi 2:** Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Tujuan 3 :** Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari	**Sasaran 3.4 :** Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	
				Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran dan non-kebakaran secara efektif dan responsif	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi k orban kebakaran (%)	
				Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
					Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	
					Persentase kelompok relawan bencana yang aktif (%)	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

3.2.1. Strategi

Strategi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 dirancang untuk menghadapi tantangan utama pembangunan daerah sekaligus memastikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang. Pendekatan strategi ini menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis potensi daerah, strategi ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan guna mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

1. **Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan angkatan kerja daerah**

   Strategi pembangunan mencakup penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketahanan serta kualitas keluarga, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pemberdayaan pemuda didorong melalui peningkatan kapasitas, kreativitas, dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah, termasuk melalui pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter, kebugaran jasmani serta solidaritas sosial. Perhatian khusus juga diberikan pada pemenuhan hak dan perlindungan anak, kelompok rentan serta penyandang disabilitas guna menciptakan lingkungan yang aman, ramah dan mendukung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

   Kesetaraan dan keadilan gender menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan diharapkan terwujud masyarakat yang inklusif, sehat dan berkelanjutan.

2. **Sasaran 1.2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita masyarakat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan**

   Strategi difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan akses terhadap pelatihan kerja dan kewirausahaan. Penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan peningkatan produktivitas sektor unggulan menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial diperkuat agar lebih adaptif dan responsif terhadap kelompok rentan melalui bantuan yang tepat sasaran, pemberdayaan serta perluasan cakupan jaminan sosial.

3. **Sasaran 1.3: Meningkatnya daya saing ekonomi dan potensi lokal daerah**
   Strategi peningkatan produktivitas ekonomi daerah diarahkan pada optimalisasi potensi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan UMKM melalui peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi serta perluasan akses pasar. Pemerintah Kabupaten Klaten juga memprioritaskan pembinaan dan pengawasan secara lintas sektor kepada desa, meliputi penguatan perekonomian desa, pengembangan lumbung pangan desa, peningkatan ketahanan pangan, dan penguatan koperasi desa serta mendorong hilirisasi produk unggulan lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional maupun nasional. Penguatan infrastruktur ekonomi, termasuk konektivitas antar wilayah, akses logistik dan digitalisasi akan dilakukan guna mempercepat distribusi dan mendorong efisiensi usaha. Selain itu, kemitraan antara pelaku usaha, koperasi dan investor akan difasilitasi untuk memperluas jaringan usaha dan membuka lapangan kerja.

4. **Sasaran 1.4: Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya konektivitas antar wilayah**

   Strategi pembangunan infrastruktur difokuskan pada pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung konektivitas antar daerah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten akan mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan internet, terutama di wilayah tertinggal dan sulit dijangkau. Selain itu, pembangunan infrastruktur dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, tata ruang serta ketahanan terhadap bencana. Kolaborasi dengan sektor swasta dan pemanfaatan teknologi akan didorong untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang efisien, berkualitas, dan ramah lingkungan.

5. **Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah**
   Strategi diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berbasis hasil. Pemerintah Kabupaten Klaten akan memperkuat kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan sasaran pembangunan, meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja, serta memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan secara konsisten. Transparansi dan partisipasi publik juga ditingkatkan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi akan diperluas untuk meningkatkan

transparansi, akuntabilitas serta efisiensi dalam pengambilan keputusan serta optimalisasi pelayanan publik termasuk peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

6. **Sasaran 2.2: Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah**

   Strategi difokuskan pada penguatan budaya pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur, serta integrasi pengendalian intern dalam setiap proses manajemen pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Klaten akan mendorong identifikasi dan mitigasi risiko secara sistematis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam fungsi konsultasi dan *assurance*. Peningkatan efektivitas SPIP ditunjang oleh komitmen pimpinan dan penguatan mekanisme pelaporan serta tindak lanjut atas temuan.

7. **Sasaran 3.1: Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan antar umat beragama**

   Strategi difokuskan pada penguatan dialog antarumat beragama, peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga toleransi serta pengembangan pendidikan karakter yang menjunjung nilai-nilai kebhinekaan, juga mencakup upaya penanganan dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui sistem deteksi dini dan respons cepat. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ruang interaksi sosial yang inklusif dan harmonis.
   Selain itu, sistem deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial diperkuat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.

8. **Sasaran 3.2: Terwujudnya lingkungan hidup yang Asri dan berkualitas**

   Strategi diarahkan pada penguatan upaya pelestarian lingkungan melalui perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Klaten juga akan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta pengurangan emisi gas rumah kaca juga diarahkan untuk membangun ketahanan iklim. Imbal jasa lingkungan/PES *(Payment for Ecosystem Services)* dapat menjadi alternatif pendanaan untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan berkelanjutan dengan melibatkan multipihak, termasuk swasta, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan akademisi. Ke depan, praktik ini akan direplikasi pada Sub DAS Dengkeng, Sub DAS Pepe, dan Sub DAS Samin yang memiliki peran

strategis dalam penyediaan air, pengendalian banjir, serta konservasi lahan dan air tanah.

9. **Sasaran 3.3: Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan**
   Strategi difokuskan pada penguatan infrastruktur dan sistem pendukung ketahanan energi, air, dan pangan secara terpadu dan berkelanjutan. Di bidang energi, pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi akan didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ketahanan air diwujudkan melalui konservasi sumber daya air, pembangunan infrastruktur irigasi yang andal, serta pengelolaan air berbasis daerah aliran sungai. Sementara itu, kemandirian pangan diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan lokal, dan pemberdayaan petani serta pelaku usaha pangan.

10. **Sasaran 3.4: Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim**
    Strategi diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta perubahan iklim melalui perencanaan berbasis risiko, edukasi kebencanaan, dan pelibatan aktif masyarakat. Sistem peringatan dini dan respons tanggap darurat terus ditingkatkan, didukung oleh penyediaan infrastruktur yang tangguh bencana. Kolaborasi lintas sektor juga diperkuat guna menciptakan daerah yang lebih siap, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi berbagai risiko alam dan perubahan iklim.

3.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan panduan umum atau garis besar yang menunjukkan bagaimana suatu tujuan pembangunan atau sasaran strategis akan dicapai melalui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

Sasaran 1.1: **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan angkatan kerja daerah,** arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Peningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah guna menjamin terpenuhinya program wajib belajar 12 tahun, melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan yang layak, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta dukungan pembiayaan dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.
2. Mendorong digitalisasi sekolah dan perpustakaan serta memperkuat literasi dasar (membaca, numerasi, sains dan teknologi);
3. Mengembangkan sistem pendidikan inklusif bagi kelompok rentan dan anak berkebutuhan khusus;

4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
5. Memperluas cakupan layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas, terutama untuk ibu, anak, remaja, dan lansia.
6. Mengintegrasikan program gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental dalam pembangunan SDM;
7. Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan kesehatan;
8. Penguatan alokasi anggaran kesehatan yang proporsional dan berpihak pada program prioritas seperti penanggulangan stunting, peningkatan layanan primer, dan perlindungan kesehatan masyarakat miskin;
9. Melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari penguatan identitas dan karakter bangsa.
10. Mendukung kreativitas dan inovasi berbasis budaya dalam pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata;
11. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif, inovatif, dan kewirausahaan.
12. Mengembangkan sistem pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat akar rumput hingga prestasi nasional/internasional;
13. Mendorong pengarusutamaan gender dalam semua sektor pembangunan, serta pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik.
14. Memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan usia anak melalui kebijakan, layanan, dan edukasi masyarakat.

Sasaran 1.2: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita masyarakat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola untuk Mendukung Iklim Usaha yang Sehat;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata;
3. Memperkuat UMKM dan kewirausahaan melalui akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha;
4. Meningkatkan kualitas dan relevansi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi yang *link and match* dengan kebutuhan industri;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas infrastruktur dasar dan ekonomi;
6. Mendorong investasi yang berorientasi pada pemerataan dan penciptaan lapangan kerja di wilayah tertinggal dan perdesaan;

7. Memperluas cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial, termasuk bantuan tunai, subsidi tepat sasaran, dan jaminan sosial berbasis data terpadu.
8. Mengembangkan skema perlindungan sosial adaptif terhadap risiko bencana, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan dinamika pasar kerja.
9. Memperkuat sistem pendataan dan integrasi layanan untuk memastikan kelompok rentan (fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan) mendapatkan akses terhadap bantuan dan layanan sosial.
10. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk memastikan keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rentan.

Sasaran 1.3: Meningkatnya daya saing ekonomi dan potensi lokal daerah, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Mengembangkan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan nilai tambah;
2. Memperkuat ekosistem kewirausahaan dan UMKM; mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan;
3. Peningkatan Akses Permodalan dan Investasi;
4. Penguatan Pemasaran dan Akses Pasar Produk Unggulan;
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Mendukung Sektor Unggulan;
6. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya;
7. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi di Perdesaan;
8. Penguatan perekonomian desa melalui pembinaan dan pengawasan secara lintas sektor;
9. Peningkatan Akses Permodalan dan Pembiayaan bagi Masyarakat Desa;
10. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Ekonomi Perdesaan;
11. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Aksesibilitas di Perdesaan;

Sasaran 1.4: Terwujudnya pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas dan merata, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Pemetaan Infrastruktur berbasis Kebutuhan dan Keberlanjutan;
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik;
4. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Ramah Lingkungan;
5. Optimalisasi dan pengembangan kawasan wisata Rowo Jombor, Geopark, Sport Center;
6. Optimalisasi Alternatif Pendanaan dan Kemitraan dalam Pembangunan Infrastruktur;
7. Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Infrastruktur.

8. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi;

Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Peningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi dan berbasis hasil *(result-based management),* agar capaian program dapat diukur secara akurat dan transparan;
2. Mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
3. Mendorong digitalisasi sistem pemerintahan daerah, seperti *e-planning, e-budgeting, dan e-audit* untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.
4. Membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah daerah melalui mekanisme musyawarah, forum konsultasi publik, serta akses terbuka terhadap informasi.
5. Mendorong budaya kinerja yang akuntabel melalui sistem penghargaan bagi perangkat daerah yang berprestasi dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata kelola.
6. Mengoptimalkan pelayanan publik daerah dengan pemanfaatan teknologi digital termasuk peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Penjaminan kepemilikan dokumen admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan.
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan Masyarakat Desa;
9. Penguatan Peran BUMDes dan Ekonomi Berbasis Komunitas serta Penguatan Kemitraan dan Akses Pasar bagi Produk Desa;
10. Mendukung pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal.

Sasaran 2.2: Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Penguatan Peran dan Kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);
2. Integrasi SPIP dengan Manajemen Risiko dan Kinerja;
3. Penyusunan dan Pemutakhiran Kebijakan serta SOP Pengendalian Intern;
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendukung Pengendalian Intern;
5. Peningkatan Pemahaman dan Komitmen Pimpinan serta Seluruh ASN terhadap SPIP;
6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP Secara Berkala.

Sasaran 3.1: Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan antar umat beragama , arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Penguatan pendidikan, literasi, dan moderasi beragama untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Peningkatan dialog, komunikasi, dan kerja sama antarumat beragama berbasis kearifan lokal.
3. Pencegahan dan penanganan dini potensi konflik sosial, intoleransi, radikalisme, dan gangguan ketertiban umum.
4. Penguatan peran pemerintah dalam menjamin keharmonisan antarumat beragama dan ketentraman masyarakat.
5. Pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam menjaga kerukunan serta ketertiban wilayah.
6. Pelestarian dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam kerukunan beragama dan stabilitas sosial.
7. Peningkatan peran dan partisipasi media massa dalam mendukung kerukunan, ketentraman, dan kondusivitas wilayah.

Sasaran 3.2: Terwujudnya lingkungan hidup yang Asri dan berkualitas, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati;
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Berkelanjutan;
3. Pengendalian Pencemaran Udara, Air, dan Tanah;
4. Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Efisiensi Sumber Daya Alam;
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat;
6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Lingkungan Hidup;
7. Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup melalui skema *Payment for Environmental Services* (PES) pada Sub DAS potensial (Pusur, Dengkeng, Pepe, Samin);
8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui konservasi hutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan peningkatan tutupan vegetasi;
9. Penurunan Emisi GRK di sektor pertanian dan peternakan melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), penerapan System of Rice Intensification (SRI), penggunaan pupuk organik, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), pengembangan varietas padi rendah emisi, serta penggunaan feed suplemen untuk pakan sapi guna menurunkan emisi metana;
10. Penguatan Ketahanan Iklim melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem;
11. Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, desa, masyarakat, akademisi) dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Sasaran 3.3: Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Diversifikasi Sumber Energi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
2. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan;
3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian;
4. Penguatan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan;
5. Pemberdayaan Petani dan Pelaku Usaha Pangan.

Sasaran 3.4: Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi dalam Manajemen Risiko Bencana dan Perubahan Iklim;
2. Peningkatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Masyarakat;
3. Penguatan Infrastruktur Tahan Bencana dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim;
4. Restorasi dan Perlindungan Ekosistem sebagai Solusi Berbasis Alam;
5. Penguatan Kapasitas dan Kolaborasi Multi-Pihak;
6. Peningkatan Sistem Logistik dan Pemulihan Pasca-Bencana;
7. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Publik.

Strategi dan arah kebijakan daerah dalam rangka pencapaian tujuan/ sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan1: **Mewujudkan Klaten Maju dan Berdaya Saing**	**Sasaran 1.1:** Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Angkatan Kerja Daerah	Strategi pembangunan mencakup penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketahanan serta kualitas keluarga, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pemberdayaan pemuda didorong melalui peningkatan kapasitas, kreativitas, dan peran aktif mereka dalam pembangunan daerah, termasuk melalui pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter, kebugaran jasmani, serta solidaritas sosial. Perhatian khusus juga diberikan pada pemenuhan hak dan perlindungan anak, kelompok rentan, serta penyandang disabilitas, guna menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan, diharapkan terwujud masyarakat yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan.	1. Peningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah guna menjamin terpenuhinya program wajib belajar 12 tahun, melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan yang layak, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta dukungan pembiayaan dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. 2. Mendorong digitalisasi sekolah dan perpustakaan serta memperkuat literasi dasar (membaca, numerasi, sains dan teknologi); 3. Mengembangkan sistem pendidikan inklusif bagi kelompok rentan dan anak berkebutuhan khusus; 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 5. Memperluas cakupan layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas, terutama untuk ibu, anak, remaja, dan lansia. 6. Mengintegrasikan program gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental dalam pembangunan SDM; 7. Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan kesehatan; 8. Penguatan alokasi anggaran kesehatan yang proporsional dan berpihak pada program prioritas seperti penanggulangan stunting, peningkatan layanan primer, dan perlindungan kesehatan masyarakat miskin;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9. Melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari penguatan identitas dan karakter bangsa. 10. Mendukung kreativitas dan inovasi berbasis budaya dalam pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata; 11. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif, inovatif, dan kewirausahaan. 12. Mengembangkan sistem pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat akar rumput hingga prestasi nasional/internasional; 13. Mendorong pengarusutamaan gender dalam semua sektor pembangunan, serta pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. 14. Memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan usia anak melalui kebijakan, layanan, dan edukasi masyarakat.
	Sasaran 1.2: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Perkapita Masyarakat Dan Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	Strategi difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap pelatihan kerja dan kewirausahaan. Penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan peningkatan produktivitas sektor unggulan menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial diperkuat agar lebih adaptif dan responsif terhadap kelompok rentan melalui bantuan yang tepat sasaran, pemberdayaan, serta perluasan cakupan jaminan sosial.	1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola untuk Mendukung Iklim Usaha yang Sehat 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata; 3. Memperkuat UMKM dan kewirausahaan melalui akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha; 4. Meningkatkan kualitas dan relevansi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi yang *link and match* dengan kebutuhan industri;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas infrastruktur dasar dan ekonomi; 6. Mendorong investasi yang berorientasi pada pemerataan dan penciptaan lapangan kerja di wilayah tertinggal dan perdesaan; 7. Memperluas cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial, termasuk bantuan tunai, subsidi tepat sasaran, dan jaminan sosial berbasis data terpadu. 8. Mengembangkan skema perlindungan sosial adaptif terhadap risiko bencana, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan dinamika pasar kerja. 9. Memperkuat sistem pendataan dan integrasi layanan untuk memastikan kelompok rentan (fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan) mendapatkan akses terhadap bantuan dan layanan sosial. 10. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan untuk memastikan keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rentan.
	Sasaran 1.3: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi dan Potensi Lokal Daerah	Strategi peningkatan produktivitas ekonomi daerah diarahkan pada optimalisasi potensi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, dan UMKM melalui peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi, serta perluasan akses pasar. Pemerintah Kabupaten Klaten juga memprioritaskan pembinaan dan	1. Mengembangkan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan nilai tambah; 2. Memperkuat ekosistem kewirausahaan dan UMKM; mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan; 3. Peningkatan Akses Permodalan dan Investasi;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pengawasan secara lintas sektor kepada desa, meliputi penguatan perekonomian desa, pengembangan lumbung pangan desa, peningkatan ketahanan pangan, dan penguatan koperasi desa, serta mendorong hilirisasi produk unggulan lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional maupun nasional. Penguatan infrastruktur ekonomi, termasuk konektivitas antar wilayah, akses logistik, dan digitalisasi, akan dilakukan guna mempercepat distribusi dan mendorong efisiensi usaha. Selain itu, kemitraan antara pelaku usaha, koperasi, dan investor akan difasilitasi untuk memperluas jaringan usaha dan membuka lapangan kerja.	4. Penguatan Pemasaran dan Akses Pasar Produk Unggulan; 5. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Mendukung Sektor Unggulan; 6. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Sumber Daya Alam dan Budaya; 7. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi di Perdesaan; 8. Penguatan perekonomian desa melalui pembinaan dan pengawasan secara lintas sektor; 9. Peningkatan Akses Permodalan dan Pembiayaan bagi Masyarakat Desa; 10. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Ekonomi Perdesaan; 11. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Aksesibilitas di Perdesaan.
	Sasaran 1.4: Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya konektivitas antar wilayah	Strategi pembangunan infrastruktur difokuskan pada pemerataan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung konektivitas antar daerah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten akan mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan internet, terutama di wilayah tertinggal dan sulit dijangkau. Selain itu, pembangunan infrastruktur dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, tata ruang, serta ketahanan terhadap bencana.	1. Pemetaan Infrastruktur berbasis Kebutuhan dan Keberlanjutan; 2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah; 3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik; 4. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Ramah Lingkungan; 5. Optimalisasi dan pengembangan kawasan wisata Rowo Jombor, Geopark, *Sport Center* 6. Optimalisasi Alternatif Pendanaan dan Kemitraan dalam Pembangunan Infrastruktur; 7. Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Infrastruktur;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Kolaborasi dengan sektor swasta dan pemanfaatan teknologi akan didorong untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang efisien, berkualitas, dan ramah lingkungan.	8. Peningkatan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi;
Tujuan 2: **Mewujudkan tata tekola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas**	**Sasaran 2.1:** Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Strategi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Perencanaan dilakukan secara komprehensif dengan mengutamakan pemanfaatan data yang akurat, terbarukan, dan terpilah, guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi akan diperluas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, seluruh proses perencanaan akan diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi pelayanan publik termasuk peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berfokus pada profil kependudukan.	1. Peningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi dan berbasis hasil (*result-based management*), agar capaian program dapat diukur secara akurat dan transparan; 2. Mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. 3. Mendorong digitalisasi sistem pyanemerintahan daerah, seperti *e-planning, e-budgeting*, dan *e-audit* untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. 4. Membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah daerah melalui mekanisme musyawarah, forum konsultasi publik, serta akses terbuka terhadap informasi. 5. Mendorong budaya kinerja yang akuntabel melalui sistem penghargaan bagi perangkat daerah yang berprestasi dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata kelola. 6. Mengoptimalkan pelayanan publik daerah dengan pemanfaatan teknologi digital termasuk peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. Penjaminan kepemilikan dokumen admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan Masyarakat Desa; 9. Penguatan Peran BUMDes dan Ekonomi Berbasis Komunitas serta Penguatan Kemitraan dan Akses Pasar bagi Produk Desa; 10. Mendukung pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal.
	Sasaran 2.2: Meningkatnya Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,	Strategi penguatan kelembagaan dan sumber daya aparatur difokuskan pada peningkatan kapasitas, kompetensi, serta integritas aparatur melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pengelolaan SDM aparatur dilakukan secara meritokratis, didukung sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil dan didorong oleh budaya kerja profesional serta inovatif. Transformasi digital pemerintahan akan diakselerasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi.Selain itu, tata kelola kelembagaan diperkuat melalui penyederhanaan proses kerja, optimalisasi struktur organisasi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja.	1. Penguatan Peran dan Kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah); 2. Integrasi SPIP dengan Manajemen Risiko dan Kinerja; 3. Penyusunan dan Pemutakhiran Kebijakan serta SOP Pengendalian Intern; 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendukung Pengendalian Intern; 5. Peningkatan Pemahaman dan Komitmen Pimpinan serta Seluruh ASN terhadap SPIP; 6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP Secara Berkala
Tujuan 3: **Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari**	**Sasaran 3.1:** Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Strategi difokuskan pada penguatan dialog antarumat beragama, peningkatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga toleransi, serta pengembangan pendidikan karakter yang menjunjung nilai-nilai kebhinekaan, juga mencakup upaya penanganan dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Penguatan Pendidikan dan Literasi Moderasi Beragama; 2. Peningkatan Dialog dan Komunikasi Antarumat Beragama; 3. Pencegahan Konflik Sosial dan Radikalisme; 4. Penguatan Peran Pemerintah dalam Menjamin Keharmonisan Beragama;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		melalui sistem deteksi dini dan respons cepat. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ruang interaksi sosial yang inklusif dan harmonis. Selain itu, sistem deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial diperkuat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.	5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda dalam Menjaga Kerukunan; 6. Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kerukunan Beragama; 7. Mendorong Partisipasi Media dalam Menjaga Kerukunan
	Sasaran 3.2: Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Asri Dan Berkualitas	Strategi diarahkan pada penguatan upaya pelestarian lingkungan melalui perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Klaten juga akan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta pengurangan emisi gas rumah kaca juga diarahkan untuk membangun ketahanan iklim. Kabupaten Klaten juga akan mengembangkan skema Payment for Environmental Services (PES) pada Sub DAS Pusur dengan melibatkan multipihak, termasuk swasta, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan akademisi. Ke depan, praktik ini akan direplikasi pada Sub DAS Dengkeng, Sub DAS Pepe, dan Sub DAS Samin yang memiliki peran strategis dalam penyediaan air, pengendalian banjir, serta konservasi lahan dan air tanah.	1. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman Hayati; 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Berkelanjutan; 3. Pengendalian Pencemaran Udara, Air, dan Tanah; 4. Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Efisiensi Sumber Daya Alam; 5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; 6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Lingkungan Hidup; 7. Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup melalui skema *Payment for Environmental Services* (PES) pada Sub DAS potensial (Pusur, Dengkeng, Pepe, Samin); 8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui konservasi hutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan peningkatan tutupan vegetasi; 9. Penurunan Emisi GRK di sektor pertanian dan peternakan melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), penerapan System of Rice Intensification (SRI), penggunaan pupuk organik, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), pengembangan varietas padi rendah emisi, serta penggunaan feed suplemen untuk pakan sapi guna menurunkan emisi metana;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			10. Penguatan Ketahanan Iklim melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis ekosistem; 11. Kolaborasi multipihak (pemerintah, swasta, desa, masyarakat, akademisi) dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
	Sasaran 3.3: Terwujudnya Ketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan	Strategi difokuskan pada penguatan infrastruktur dan sistem pendukung ketahanan energi, air, dan pangan secara terpadu dan berkelanjutan. Di bidang energi, pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi akan didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ketahanan air diwujudkan melalui konservasi sumber daya air, pembangunan infrastruktur irigasi yang andal, serta pengelolaan air berbasis daerah aliran sungai. Sementara itu, kemandirian pangan diperkuat melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan lokal, dan pemberdayaan petani serta pelaku usaha pangan.	1. Diversifikasi Sumber Energi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); 2. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan; 3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian; 4. Penguatan Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan; 5. Pemberdayaan Petani dan Pelaku Usaha Pangan
	Sasaran 3.4: Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Dan Perubahan Iklim	Strategi diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta perubahan iklim melalui perencanaan berbasis risiko, edukasi kebencanaan, dan pelibatan aktif masyarakat. Sistem peringatan dini dan respons tanggap darurat terus ditingkatkan, didukung oleh penyediaan infrastruktur yang tangguh bencana. Di sisi lain, upaya pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam,	1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi dalam Manajemen Risiko Bencana dan Perubahan Iklim; 2. Peningkatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Masyarakat; 3. Penguatan Infrastruktur Tahan Bencana dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim; 4. Restorasi dan Perlindungan Ekosistem sebagai Solusi Berbasis Alam; 5. Penguatan Kapasitas dan Kolaborasi Multi-Pihak;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		serta pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan iklim. Kolaborasi lintas sektor juga diperkuat guna menciptakan daerah yang lebih siap, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi berbagai risiko alam dan perubahan iklim.	6. Peningkatan Sistem Logistik dan Pemulihan Pasca-Bencana; 7. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Publik

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten, ditetapkan Arah kebijakan Kabupaten Klaten Tahun 2026-2030. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.



Gambar 3.2 Tema Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2026-2030

Arah kebijakan Kabupaten Klaten Tahun 2026-2030 diuraikan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk **"Penguatan Fondasi Dasar"**

Prioritas pembangunan tahun 2026 difokuskan pada:

a. Penguatan Landasan SDM dan Reformasi Birokrasi

Untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan integritas aparatur serta kualitas masyarakat

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
2) Perluasan akses pendidikan anak usia dini dan inklusi;
3) Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi;
4) Penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas, posyandu);
5) Pencegahan stunting dan gizi buruk;
6) Peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak;
7) Penyederhanaan layanan publik berbasis digital (Pemdi);
8) Optimalisasi peran inspektorat dan penguatan sistem pengawasan internal;
9) Penguatan sistem merit dengan menyusun kebutuhan jabatan berbasis kompetensi dan kinerja pegawai, serta didukung oleh peningkatan akurasi data kepegawaian."

10) Pelatihan ASN berbasis kompetensi dan nilai-nilai integritas.

b. Penguatan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, pemukiman yang aman dan layak huni;

Untuk memastikan ketersediaan layanan dasar dan meningkatkan akses antar wilayah

1) Peningkatan cakupan air minum aman dan sanitasi layak (SPAM dan IPLT);
2) Penanggulangan kawasan kumuh dan pembangunan drainase lingkungan;
3) Peningkatan kualitas jalan kabupaten dan penghubung antar kecamatan/ desa;
4) Pengembangan dan revitalisasi jembatan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dalam upaya optimalisasi perdagangan lokal;
5) Peningkatan akses transportasi publik dan integrasi angkutan perdesaan;
6) Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
7) Penataan lingkungan permukiman berbasis mitigasi bencana (rawan longsor, banjir, dan gempa);
8) Penyediaan hunian terjangkau dan fasilitas pendukung bagi kelompok rentan.

c. Penguatan Potensi Daerah dan Sektor Unggulan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi investasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal

1) Pemetaan potensi komoditas unggulan UMKM, pariwisata, industri kreatif;
2) Penyusunan peta tematik potensi daerah (spasial dan sosial ekonomi);
3) Dukungan untuk klaster UMKM dan pariwisata berbasis kearifan lokal;
4) Fasilitasi pelatihan keterampilan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal;
5) Kemitraan riset dan inkubasi bisnis dengan perguruan tinggi;
6) Promosi investasi daerah dan forum bisnis daerah.

d. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pendukung Daya Saing Daerah

Dalam rangka menyiapkan kerangka hukum dan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

1) Penyusunan dan revisi perda/perkada yang mendukung investasi, inovasi, dan layanan publik;
2) Harmonisasi kebijakan sektoral lintas OPD;
3) Penyusunan *roadmap* pembangunan jangka menengah dan panjang berbasis data;
4) Digitalisasi sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan (*e-Planning & e-Monev*);
5) Penguatan regulasi, kapasitas aparatur, dan edukasi masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman;

6) Monitoring capaian indikator utama seperti produktivitas, inovasi daerah, efisiensi layanan publik, dan stabilitas sosial.

e. Penguatan Sektor Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Nasional

Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa sebagai Lumbung Pangan Nasional

1) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis dan non teknis guna mendukung produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan;
2) Penguatan sistem pengelolaan air irigasi partisipatif berbasis kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
3) Pengembangan dan revitalisasi jembatan untuk mendukung mobilitas hasil pertanian;
4) Dukungan untuk klaster pertanian terpadu berbasis potensi lokal;
5) Pemetaan potensi komoditas unggulan pertanian;
6) Penguatan regulasi, kelembagaan, dan kapasitas aparatur desa untuk mendukung perekonomian dan ketahanan pangan desa.

2. Arah Kebijakan Tahun 2027

Pembangunan tahun 2027 diarahkan pada: **"Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur"**

Prioritas pembangunan tahun 2027 diarahkan pada:

a. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan layanan dasar yang inklusif dan berkeadilan.

1) Perluasan beasiswa daerah bagi siswa miskin dan berprestasi di tingkat SD hingga perguruan tinggi;
2) Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan pedagogik dan teknologi pembelajaran digital;
3) Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di wilayah terpencil;
4) Digitalisasi sekolah, penyediaan perangkat TIK dan platform belajar daring;
5) Peningkatan sarana-prasarana Puskesmas rawat inap dan mobil layanan kesehatan keliling;
6) Layanan kesehatan berbasis aplikasi (*telemedicine*) dan peningkatan sistem rujukan;
7) Program promotif dan preventif seperti posyandu digital, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular;
8) Validasi dan pemutakhiran DTKS secara berkala;
9) Perluasan program bantuan sosial berbasis komunitas;
10) Pembentukan unit layanan disabilitas dan pendampingan bagi lansia.

b. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi

Meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi

1) Penguatan Mall Pelayanan Publik dengan sistem OSS yang terintegrasi dan *user-friendly*;
2) Promosi investasi berbasis potensi lokal (pertanian, pariwisata, manufaktur ringan) melalui website interaktif dan expo;
3) Pengembangan kawasan industri mikro dan sentra UMKM berbasis klaster (batik, olahan pangan, logam);
4) Pendampingan dan pelatihan UMKM untuk akses ke pasar digital (*e-commerce*, *marketplace* lokal);
5) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain* dan penguatan keuangan syariah;
6) Penyediaan fasilitas inkubator bisnis untuk pelaku usaha pemula.

c. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial

Mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1) Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar digital dan ramah lingkungan;
2) Pengembangan kawasan agropolitan dan hilirisasi produk pertanian;
3) Pembangunan jalan usaha tani, embung, dan saluran irigasi teknis serta pembangunan dan optimalisasi lumbung pangan desa sebagai pusat cadangan dan distribusi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan;
4) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah, puskesmas, serta fasilitas sosial lainnya;
5) Program bedah rumah untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
6) Pengembangan kawasan permukiman berbasis tata ruang dan aman bencana;
7) Pemeliharaan dan pembangunan jalan kabupaten dan jembatan penghubung desa;
8) Peningkatan transportasi umum dan fasilitas pejalan kaki yang inklusif;
9) Peningkatan infrastruktur penunjang kawasan geopark seperti akses jalan, pusat informasi geowisata, dan fasilitas edukatif.
10) Kolaborasi riset geologi dan lingkungan dengan perguruan tinggi untuk mendukung validasi ilmiah kawasan geopark.

d. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah

Mengembangkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

1) Fasilitasi riset terapan oleh akademisi dan lembaga penelitian lokal untuk sektor unggulan daerah;

2) Peningkatan kapasitas ASN dan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik (klinik inovasi daerah);
3) Insentif bagi desa atau OPD yang berhasil menciptakan inovasi pelayanan masyarakat;
4) Pengembangan Technopark atau inkubator UMKM berbasis potensi unggulan (agro, energi, digital);
5) Peluncuran platform digital "Klaten Inovatif" untuk menampung gagasan, kolaborasi, dan kompetisi inovasi tingkat daerah.

e. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah

Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan prinisip ekonomi syariah

1) Pengembangan Geopark berbasis potensi kawasan Gunung Merapi sebagai bagian dari jaringan geopark nasional/global, yang mendukung konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal.
2) Penyusunan masterplan pengembangan Geopark Gunung Merapi Klaten, termasuk zonasi konservasi, edukasi, dan pariwisata dan pariwisata secara terpadu dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan;
3) Pemasaran dan promosi Geopark sebagai destinasi wisata edukatif serta integrasi dengan produk UMKM lokal khususnya produk bersertifikasi halal sehingga mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah;
4) Pelatihan pemandu lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar geopark untuk pengembangan geowisata berbasis komunitas dengan penerapan prinsip syariah seperti keadilan, keberlanjutan dan kemaslahatan bersama;
5) Penguatan Lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal serta penguatan kemitraan ekosistem halal untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan;
6) Penguatan Ekonomi Syariah melalui pengembangan kelembagaan keuangan mikro syariah, fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, promosi pariwisata halal, serta integrasi produk lokal ke dalam rantai nilai pariwisata berkelanjutan.

3. Arah Kebijakan Tahun 2028

Pembangunan tahun 2028 diarahkan pada: **"Pengembangan Sektor Unggulan dan Inovasi"**

Prioritas pembangunan tahun 2028 diarahkan pada:

a. Pengembangan Riset dan Inovasi

Mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan penguatan sistem riset yang aplikatif guna menjawab kebutuhan pembangunan lokal.

1) Fasilitasi dan pendanaan riset kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha berbasis kebutuhan daerah;

2) Pembentukan Klaster Inovasi Daerah sebagai ruang pengembangan ide dan prototipe solusi lokal;
3) Kompetisi tahunan inovasi pelayanan publik dan inovasi sosial;
4) Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi untuk mendukung inovator lokal, startup, dan pelaku ekonomi kreatif;
5) Pemanfaatan *data analytics* dan big data untuk perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*);
6) Dukungan paten dan hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil riset lokal.

b. Optimalisasi Sektor Unggulan Berbasis Potensi Daerah

1) Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
2) Modernisasi pertanian melalui teknologi *smart farming*, alat mesin pertanian (alsintan), dan digitalisasi pasar hasil pertanian;
3) Revitalisasi infrastruktur irigasi pendukung ketahanan pangan;
4) Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pelatihan pemandu, manajemen homestay, dan standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*);

c. Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Ekonomi

Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik serta memperluas ekonomi digital di masyarakat

1) Penguatan integrasi layanan digital melalui platform *One Klaten Service* untuk pelayanan administrasi dan perizinan.
2) Peningkatan kapasitas ASN dalam literasi digital dan tata kelola data.
3) Digitalisasi UMKM dan pasar tradisional melalui pelatihan (*e-commerce*, pembayaran non-tunai dan sistem inventori).
4) Pembangunan infrastruktur TIK termasuk perluasan jaringan internet di wilayah rural.
5) Implementasi *e-government* secara menyeluruh *(e-office, e-budgeting, e-monitoring)*.

d. Penguatan Kemitraan Dengan Swasta dan Investor Strategis

Mendorong investasi produktif dan kolaboratif untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusi

1) Promosi potensi investasi daerah melalui *Klaten Investment Forum* dan publikasi profil investasi digital;
2) Penerapan skema *Public-Private Partnership (PPP)* dalam pembangunan infrastruktur strategis dan layanan dasar;
3) Penyusunan dan penerapan regulasi yang ramah investasi serta insentif untuk sektor prioritas;

4) Pembentukan *task force* percepatan perizinan dan fasilitasi investasi strategis;

e. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Mengoptimalkan sektor unggulan daerah untuk pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

1) Pengembangan klaster industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal seperti kerajinan, batik, atau kuliner khas;
2) Pengembangan sentra ekonomi kreatif, festival budaya, dan dukungan pada pelaku ekonomi digital berbasis lokal;
3) Penguatan daya tarik destinasi wisata unggulan, termasuk kawasan Geopark Gunung Merapi, dengan promosi digital dan peningkatan amenitas wisata;
4) Kerjasama pengelolaan destinasi wisata dan kawasan industri kreatif dengan investor lokal/nasional;
5) Penguatan kelembagaan klaster perikanan untuk meningkatkan kapasitas manajemen dan daya saing;
6) Produksi pakan alternative kolektif melalaui koperasi/ lembaga khusus guna menekan biaya dan meningkatkan kemandirian;
7) Pengembangan Pengembangan sistem pemasaran perikanan melalui GEMARI serta digitalisasi pasar untuk memperluas akses dan konsumsi ikan;
8) Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) sebagai pusat penyedia benih unggul untuk mendukung Kawasan Minapolitan.

4. Arah Kebijakan Tahun 2029

Pembangunan tahun 2029 diarahkan pada: **"Peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik"**

Pembangunan tahun 2029 difokuskan pada upaya mendorong kemandirian daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan, optimalisasi sumber daya lokal, serta peningkatan daya saing daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi penopang utama untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan global serta kebutuhan masyarakat. Berikut uraian tujuan dan aktivitas untuk mendukung prioritas pembangunan tersebut:

Prioritas pembangunan tahun 2029 fokus pada:

a. Pemantapan Infrastruktur yang Berkualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur dasar serta memperkuat perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

1) Peningkatan kualitas jalan, jembatan, sistem irigasi, sanitasi, dan penyediaan air minum layak;
2) Revitalisasi kawasan hijau, hutan kota, dan ruang terbuka publik;
3) Penguatan kapasitas sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi bencana;

4) Penanaman pohon dan konservasi daerah tangkapan air serta sempadan sungai;
5) Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam infrastruktur publik.

b. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sektor Ekonomi Unggulan

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif secara berkelanjutan

1) Modernisasi sarana produksi pertanian dan penguatan kelembagaan petani;
2) Pelatihan dan inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif lokal;

c. Pemantapan Ekosistem Bisnis dan Ekonomi Berkelanjutan

Mewujudkan lingkungan usaha yang inklusif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal jangka panjang

1) Simplifikasi regulasi dan perizinan berusaha melalui layanan digital;
2) Dukungan akses pembiayaan bagi UMKM melalui kolaborasi dengan perbankan dan *financial technology*;
3) Pendirian pusat layanan UMKM dan pelatihan kewirausahaan terpadu;
4) Penguatan koperasi desa dan jaringan kemitraan usaha untuk mendorong ekonomi berbasis komunitas;
5) Pembentukan kawasan ekonomi terpadu yang ramah lingkungan dan efisien.

d. Pengembangan Ekonomi, Industri Ramah lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rendah emisi dan pelestarian lingkungan, serta pengelolaan sampah yang berwawasan ekonomi sirkular

1) Pengembangan energi terbarukan seperti biogas, panel surya, dan PLTS atap untuk fasilitas umum;
2) Insentif dan fasilitasi bagi industri ramah lingkungan serta pertanian organik;
3) Penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle);*
4) Pembangunan bank sampah di tingkat desa dan sekolah;
5) Edukasi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumber;
6) Penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) dan kompos;
7) Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

e. Penguatan Branding dan Daya Tarik Daerah di Tingkat Nasional dan Internasional

Meningkatkan citra positif, daya tarik investasi, serta pengakuan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang kompetitif

1) Penyusunan dan implementasi strategi branding daerah berbasis potensi dan keunikan lokal;
2) Promosi destinasi wisata unggulan, termasuk kawasan Geopark Merapi, melalui festival budaya dan pariwisata;
3) Optimalisasi media digital dan platform informasi daerah untuk promosi potensi daerah;
4) Sertifikasi produk unggulan dan promosi ekspor UMKM lokal

f. Penguatan Daya Saing Daerah

Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

1) Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan
2) Fasilitasi pemasaran digital dan akses pasar produk unggulan daerah.
3) Kemitraan promosi dengan diaspora, pelaku usaha kreatif, dan komunitas internasional;

5. Arah Kebijakan Tahun 2030

Pembangunan tahun 2030 diarahkan pada: **"Perwujudan Klaten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan"**

Pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2030 diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan manusia seutuhnya, penguatan ekonomi lokal berbasis kerakyatan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Berikut ini adalah rumusan tujuan dan aktivitas per prioritas:

Prioritas pembangunan tahun 2030 difokuskan pada:

a. Perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak dan berkepribadian

Membangun masyarakat yang memiliki karakter, akhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kebangsaan

1) Penguatan pendidikan karakter melalui sekolah dan komunitas;
2) Revitalisasi lembaga adat, budaya, dan keagamaan dalam kehidupan sosial;
3) Penguatan program wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai Pancasila;
4) Pengembangan kampung tematik berbasis budaya dan nilai kearifan lokal;
5) Peningkatan indeks toleransi, gotong royong, dan rasa aman masyarakat, serta konsolidasi dan pemeliharaan keberlanjutan program menuju Kabupaten Klaten tertib dan tentram.

b. Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan

Meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengembangkan sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif) yang inklusif dan berbasis potensi lokal

1) Penguatan kelembagaan dan akses pasar UMKM serta koperasi rakyat;
2) Modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk hasil tani melalui agroindustri;
3) Pengembangan kawasan wisata strategis, termasuk integrasi dengan Geopark Merapi;
4) Digitalisasi ekonomi lokal (*e-commerce*, platform pemasaran daring produk lokal);
5) Pelatihan dan inkubasi wirausaha muda serta penguatan ekosistem *start-up* lokal;
6) Konsolidasi dan keberlanjutan program desa mandiri ekonom dengan fasilitasi kemitraan dengan swasta dan BUMDes untuk pemberdayaan ekonomi desa, serta sistem pembinaan dan pengawasan terpadu lintas sektor.

c. Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender

Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan kesetaraan gender

1) Perluasan akses dan mutu layanan pendidikan inklusif dan berbasis teknologi;
2) Penguatan layanan kesehatan primer dan percepatan penurunan stunting;
3) Pelatihan keterampilan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri;
4) Peningkatan literasi gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan perempuan;
5) Pengembangan ruang publik ramah anak dan penyandang disabilitas;
6) Promosi budaya hidup sehat, olahraga massal, dan penguatan ketahanan keluarga.

d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi

Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas tinggi dan kepercayaan masyarakat

1) Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan peningkatan kualitas SDM birokrasi;

2) Penguatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk transparansi dan efisiensi layanan;
3) Implementasi pengawasan berbasis masyarakat dan pelaporan publik yang transparan;
4) Digitalisasi pelayanan publik berbasis satu data dan interoperabilitas sistem;
5) Peningkatan kepatuhan terhadap prinsip *good governance* dan anti korupsi melalui pelatihan, audit, dan *reward system*;
6) Revitalisasi forum-forum partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

e. Perwujudan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah

Mewujudkan infrastruktur daerah yang terintegrasi, inklusif, dan mendukung tata ruang yang berkelanjutan

1) Penyediaan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur air bersih;
2) Pengembangan kawasan permukiman layak, rumah terjangkau, dan sanitasi sehat;
3) Penataan wilayah berbasis RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk pengendalian alih fungsi lahan;
4) Implementasi kota cerdas (*smart city*) dan tata kelola ruang hijau yang berkelanjutan;
5) Penguatan sistem transportasi publik ramah lingkungan;
6) Integrasi pembangunan infrastruktur dengan kebijakan adaptasi perubahan iklim;
7) Peningkatan pengelolaan sampah secara terpadu melalui: Pengembangan fasilitas pengolahan sampah *Reduce Reuse Recycle* (3R); Penguatan Bank Sampah dan TPS 3R di setiap kecamatan/desa; Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari rumah tangga; Pengembangan teknologi *waste to energy* dan komposisasi.

Kabupaten Klaten mendukung Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030 dengan menyelaraskan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten , sesuai dalam lampiran tabel berikut

Tabel 3.4
Penyelarasan Tema Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Klaten Tahun 2026-2030

Periode (Tahun)	Tema Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
2026	Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	**Penguatan Fondasi Dasar** difokuskan pada: 1. Penguatan landasan SDM dan reformasi birokrasi: 2. Penguatan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, pemukiman yang aman dan layak huni; 3. Pemetaan potensi daerah dan sektor unggulan; 4. Penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung daya saing daerah; 5. Penguatan sektor pertanian mendukung lumbung pangan Nasional.
2027	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	**Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur** difokuskan pada: 1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial; 2. Peningkatan kemudahan berusaha dan investasi; 3. Pengembangan dan modernisasi infrastruktur ekonomi dan sosial; 4. Peningkatan ekosistem inovasi dan riset pengembangan daerah; 5. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah
2028	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	**Pengembangan Sektor Unggulan dan Inovasi** difokuskan pada: 1. Pengembangan riset dan inovasi; 2. Optimalisasi sektor unggulan berbasis potensi daerah; 3. Transformasi digital pelayanan publik dan ekonomi; 4. Penguatan kemitraan dengan swasta dan investor strategis; 5. Pengembangan ekonomi hijau dan biru

Periode (Tahun)	Tema Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten
2029	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan	**Peningkatan Kemandirian Daerah Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** difokuskan pada: 1. Pemantapan infrastruktur yang berkualitas dan pelestarian lingkungan hidup; 2. Peningkatan produktifitas dan efisiensi sektor ekonomi unggulan; 3. Pemantapan ekosistem bisnis dan ekonomi berkelanjutan; 4. Pengembangan ekonomi, industri ramah lingkungan dan pengelolaan sampah; 5. Penguatan branding dan daya tarik daerah di tingkat Nasional dan Internasional; 6. Penguatan daya saing daerah.
2030	Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan	**Perwujudan Klaten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan** difokuskan pada: 1. Perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak dan berkepribadian; 2. Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan; 3. Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsive gender; 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi; 5. Perwujudan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.

3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan sejumlah program prioritas yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan strategis dan kebutuhan riil masyarakat Klaten, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

Program prioritas tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data, program ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program prioritas Bupati Klaten diharapkan mampu menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menjadikan Klaten sebagai daerah yang semakin maju, humanis, dan tangguh menghadapi masa depan. Berikut dijabarkan beberapa program prioritas Kabupaten Klaten 2025-2029.

3.3.1. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Klaten

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Klaten merupakan landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun masa kepemimpinan. Program ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, tantangan pembangunan daerah, serta visi-misi yang diusung dalam mewujudkan *Klaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera*. Program priositas sebagai berikut:

1. **Dalan Alus, Padang dan Banyu Lancar**

   “Dalan Alus” merujuk pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, terutama jalan penghubung antarwilayah, jalan desa, dan jalan usaha tani. Jalan yang mulus dan layak menjadi kunci untuk mempercepat mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

   “Padang” berarti terang, merujuk pada penyediaan dan perluasan jaringan penerangan jalan umum (PJU), terutama di kawasan padat penduduk, jalan utama desa, serta akses menuju pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Penerangan jalan penting untuk meningkatkan rasa aman, mendukung kegiatan sosial malam hari, dan memperbaiki tata kota dan desa.

   “Banyu Lancar” berfokus pada akses air bersih dan penguatan sistem irigasi pertanian. Program ini memastikan setiap warga memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, serta mendorong modernisasi dan perbaikan saluran irigasi demi mendukung produktivitas pertanian. Air yang lancar dan terkelola baik adalah kunci bagi kesehatan, kesejahteraan, dan ketahanan pangan lokal.

Dengan program ini, Klaten tidak hanya membangun fisik wilayahnya, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan menuju desa yang terhubung, terang, sehat, dan berdaya saing secara pangan.

2. **Pupuk Murah, Mudah dan Insentif Untuk Petani**
   Program ini bertujuan memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, distribusi yang mudah diakses, serta pemberian insentif kepada petani sebagai bentuk apresiasi dan dorongan untuk meningkatkan produktivitas. Program ini juga mendorong pemanfaatan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui perbaikan kualitas tanah dan pengurangan ketergantungan pada input kimia sintetis. Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga turut mendukung upaya menjaga kualitas lingkungan dan menjaga kualitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

3. **Modal Usaha 15 juta Untuk Setiap Karang Taruna Desa**
   Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp15 juta untuk setiap Karang Taruna desa sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi generasi muda di tingkat desa. Program ini bertujuan mendukung pengembangan kegiatan usaha produktif yang dikelola oleh Karang Taruna, memperkuat peran pemuda dalam pembangunan ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja dan kreativitas di desa. Melalui program ini, Karang Taruna didorong menjadi motor penggerak kewirausahaan sosial yang berkelanjutan.

4. **Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja**
   Program ini mendorong gerakan kolektif untuk mencintai dan membeli produk UMKM lokal sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil. Melalui penyederhanaan proses perizinan usaha, pelaku UMKM dipermudah dalam mengakses legalitas dan peluang pasar. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perluasan lapangan kerja melalui pengembangan wirausaha baru, kemitraan usaha, serta penciptaan ekosistem ekonomi lokal yang berdaya saing. Ketiganya menjadi satu kesatuan strategi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menurunkan tingkat pengangguran di daerah.

5. **Gratis Berobat, Pendidikan dan Sembako Hanya Dengan KTP**
   Melalui integrasi layanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan secara gratis, pendidikan tanpa biaya, serta bantuan sembako secara mudah dan tepat sasaran hanya dengan menunjukkan KTP. Program ini tidak hanya mempermudah akses terhadap layanan dasar, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat sebagai pelindung dan pemberdaya. Dengan sistem yang berbasis data dan inklusif, program ini diharapkan

mampu mengurangi beban hidup warga sekaligus mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Klaten secara menyeluruh.

6. **Intenet Gratis Sampai Desa**
   Melalui program "Internet Gratis Sampai Desa", Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen memperluas akses digital hingga ke pelosok desa sebagai bagian dari pemerataan layanan publik dan percepatan transformasi digital. Program ini bertujuan menyediakan jaringan internet gratis di ruang-ruang publik strategis seperti balai desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan titik-titik produktif lainnya. Dengan hadirnya internet yang mudah diakses, masyarakat desa dapat memperoleh informasi, mengikuti pendidikan daring, mengembangkan usaha digital, serta terlibat aktif dalam pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Program ini menjadi fondasi penting menuju desa yang terkoneksi, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

7. **Lingkungan Asri, Sampah Teratasi**
   Fokus utama program ini adalah membangun kesadaran dan kebiasaan warga dalam memilah sampah dari rumah, memperluas sistem bank sampah dan TPS3R, serta menggalakkan gerakan penghijauan di tingkat desa, sekolah, dan ruang publik. Program ini juga mendorong inovasi pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular agar limbah tidak hanya teratasi, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan kolaborasi antar masyarakat, pemerintah desa, dan komunitas lingkungan, Klaten bergerak menuju kabupaten yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Untuk menjaga lingkungan asri dilakukan juga upaya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan perbaikan RTLH untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang layak, sehat dan asri.

8. **Satu Desa Satu Fasilitas Olahraga**
   Program ini bertujuan menyediakan fasilitas olahraga sederhana seperti lapangan serbaguna, lapangan voli, bulutangkis, atau area senam yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran, meningkatkan interaksi sosial, serta mendorong pembinaan bakat olahraga di tingkat desa. Dengan pendekatan berbasis potensi dan kebutuhan lokal, program ini juga diharapkan memperkuat semangat hidup sehat, sportivitas, dan kohesi sosial antarwarga.

9. **Program Insentif (Guru Ngaji, Guru Honorer, Penjaga Tempat Ibadah, Kader Posyandu, PKK, Hansip, FKUB, Relawan, RT dan RW)**
   Melalui Program Insentif, pemerintah memberikan dukungan finansial secara rutin kepada kelompok seperti guru ngaji, guru honorer, penjaga tempat ibadah, kader Posyandu, pengurus PKK, hansip, pengurus FKUB, relawan, serta RT dan RW.
   Pemberian insentif ini tidak hanya sebagai penghargaan atas pengabdian mereka, tetapi juga sebagai upaya mendorong keberlanjutan pelayanan sosial berbasis

komunitas. Program ini dikelola secara transparan, berbasis data, dan berkelanjutan, serta diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah dan kinerja peran masing-masing kelompok penerima manfaat.

10. **Pembangunan Creative Hub dan Gedung Kesenian**
    Creative Hub akan menjadi pusat inovasi yang mendukung sektor ekonomi kreatif, seperti desain, konten digital, kerajinan, dan kuliner. Sementara itu, Gedung Kesenian akan difungsikan sebagai ruang pertunjukan, latihan, dan apresiasi seni budaya lokal. Melalui dua fasilitas strategis ini, Klaten menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem kreatif yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan identitas budaya sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Rincian program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rincian Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
1	Dalan Alus, Padang dan Banyu Lancar	1. Penyediaan Air Baku dan Pengelolaan Jaringan Irigasi 2. Terpenuhinya Akses Air Minum Layak 3. Penataan Sistem Drainase 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5.Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian	**Pemetaan dan perencanaan prioritas** · Pemetaan kondisi jalan, jaringan air bersih, dan titik-titik yang belum terjangkau penerangan; · Penetapan wilayah prioritas (desa terpencil, kawasan padat penduduk, akses ekonomi); · Penyusunan rencana teknis per bidang (jalan, air, lampu jalan); · Pelaksanaan pekerjaan awal di titik-titik krusial (jalan penghubung desa-kecamatan, sumur dangkal, lampu jalan utama).	✓	✓				· Program Penyelenggaraan Jalan · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; · Program Pengelolaan Sumber Daya Air · Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	· Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; · Perhubungan
			Pembangunan infrastruktur dasar tahap 1 · Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten dan desa (hotmix, betonisasi); · Pemasangan lampu penerangan jalan di titik-titik prioritas rawan kecelakaan dan padat lalu lintas; · Pembangunan sarana air bersih: pipanisasi, sumur bor, dan penampungan; · Pelibatan masyarakat melalui padat karya dan swakelola desa.	✓	✓	✓	✓	✓	· Program Penyelenggaraan Jalan · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; · Program Pengelolaan Sumber Daya Air · Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	· Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; · Perhubungan

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
			Pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal · Perluasan cakupan jalan desa produktif dan jalan tani; · Penambahan jaringan listrik dan penerangan jalan lingkungan; · Peningkatan cakupan layanan air bersih	✓	✓	✓	✓	✓	· Program Penyelenggaraan Jalan · Program Pengelolaan Sumber Daya Air · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah · Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian · Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	· Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; · Pertanian · Perhubungan
			Optimalisasi, Rehabilitasi, dan Inovasi · Rehabilitasi titik-titik jalan yang mengalami kerusakan atau kelebihan beban; · Penerapan teknologi hemat energi untuk sistem penerangan dan air (tenaga surya, *smart switch*); · Pembangunan embung kecil, sumur resapan, dan SPAM desa.	✓	✓	✓	✓	✓	· Program Penyelenggaraan Jalan; · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum · Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah · Program Pengelolaan Sumber Daya Air · Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian · Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	· Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; · Pertanian · Perhubungan

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
2	Pupuk Murah, Mudah dan Insentif Untuk Petani	1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian 2. Pemberian bantuan berupa pupuk dan bibit 3. Peningkatan pembinaan kepada kelompok tani 4. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	**Pendataan & Penyaluran Awal** · Validasi dan pembaruan data petani penerima melalui KTP & lahan (berbasis SIMLUHTAN dan RDKK); · Distribusi pupuk subsidi tepat sasaran melalui Kartu Tani Klaten; · Penetapan harga pupuk subsidi lokal yang terjangkau. · Penyaluran insentif awal non-tunai (voucher pupuk, alat semprot, benih).	✓	✓	✓	✓	✓	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	· Ketahanan Pangan; · Pertanian
			Kemudahan Akses dan Digitalisasi · Penambahan titik penyalur pupuk resmi di seluruh kecamatan; · Implementasi aplikasi digital/ponsel untuk pengecekan kuota pupuk dan klaim insentif;	✓	✓	✓	✓	✓	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	· Ketahanan Pangan; · Pertanian
			Integrasi Bantuan dan Pelatihan · Integrasi insentif pupuk dengan program pelatihan pertanian ramah lingkungan; · Penyediaan paket subsidi terpadu: pupuk, benih, pestisida ramah lingkungan; · Kolaborasi dengan BUMDes dan koperasi tani untuk pengadaan dan distribusi pupuk.	✓	✓	✓	✓	✓	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	· Ketahanan Pangan; · Pertanian
			Penguatan Produksi & Kemandirian · Dukungan pupuk dan insentif untuk diversifikasi tanam dan pertanian organik; · Fasilitasi pembangunan unit produksi pupuk kompos dan organik desa; · Insentif tunai atau kredit bunga rendah bagi petani mandiri dan kelompok tani produktif;	✓	✓	✓	✓	✓	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	· Ketahanan Pangan; · Pertanian
3	Modal Usaha 15 juta Untuk Setiap	Pemberian Hibah Kepada Lembaga Karang Taruna	**Persiapan dan Penyaluran Awal** · Pendataan dan verifikasi Karang Taruna aktif di seluruh desa;	✓	✓				Program Pemberdayaan Sosial	· Sosial · Pemberdayaan Masyarakat Desa;

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
	Karang Taruna Desa		· Penyusunan pedoman teknis dan mekanisme penyaluran dana; · Sosialisasi program ke seluruh desa/ kelurahan; · Penyaluran modal usaha tahap pertama; · Pelatihan dasar kewirausahaan dan pengelolaan keuangan usaha.							· Kepemudaan dan Olahraga;
			Penguatan Kapasitas dan Monitoring Awal · Evaluasi awal penggunaan modal usaha tahap I: jenis usaha, omzet, dan tantangan; · Pendampingan intensif oleh fasilitator UMKM dan dinas terkait; · Penyaluran modal usaha tahap II untuk desa yang belum menerima di tahun sebelumnya; · Pelatihan lanjutan (branding, pemasaran digital, manajemen usaha sederhana); · Pameran usaha Karang Taruna tingkat kabupaten;		✓	✓			· Program Pemberdayaan Sosial · Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	· Sosial · Koperasi dan UKM · Pemberdayaan Masyarakat Desa; · Kepemudaan dan Olahraga;
			Pengembangan dan Inovasi Usaha · Replikasi usaha sukses antar Karang Taruna (*sharing best practices);* · Fasilitasi akses pemasaran, termasuk kemitraan dengan BUMDes, koperasi, dan e-commerce lokal; · Pemberian insentif tambahan untuk Karang Taruna dengan usaha berkembang; · Digitalisasi pencatatan usaha dengan aplikasi sederhana; · Pelatihan diversifikasi produk dan inovasi usaha.			✓	✓	✓	· Program Pemberdayaan Sosial · Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	· Sosial · Koperasi dan UKM · Pemberdayaan Masyarakat Desa; · Kepemudaan dan Olahraga.
4	Bela Beli Produk UMKM, Perizinan	1. Pembinaan dan Pelatihan UMKM	**Penataan Dasar & Digitalisasi** · Digitalisasi database UMKM	✓	✓				· Program Pengembangan Ekspor;	· Koperasi dan UKM

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
	Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja	2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal 3. Fasilitasi Produk UMKM Unggulan 4. Penyelenggaraan Expo/Pameran UMKM 5. kemudahan perizinan berusaha 6. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal 7. Peningkatan informasi dan promosi terkait potensi investasi 8. Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pencari kerja 9. Perluasan lapangan pekerjaan 10. Penyelenggaraan Job Fair 11. Optimalisasi penempatan tenaga kerja	· Sosialisasi gerakan "Bela Beli Produk UMKM"; · Digitalisasi perizinan dasar (NIB, IUMK) via OSS; · Pelatihan dasar UMKM & kewirausahaan						· Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM); · Program Pengembangan UMKM · Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal · Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri · Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	· Penanaman Modal
			Akses Pasar & Permodalan · Mengarahkan belanja pemerintah wajib produk UMKM. · Penyediaan Kredit ultra mikro & dana bergulir diperluas. · Kemitraan UMKM dengan BUMN dan swasta. · Pendampingan sertifikasi produk (SNI, halal, BPOM).		✓	✓			· Program Pengembangan Ekspor; · Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) · Program Promosi Penanaman Modal	· Koperasi dan UKM · Penanaman Modal
			Perizinan Otomatis & Legalitas · Sistem izin otomatis via OSS UMKM Plus; · Integrasi lintas instansi perizinan (BPOM, Kemenkes, dll); · Pemantauan izin dan pembaruan otomatis; · Percepatan legalisasi UMKM komunitas/ koperasi.			✓	✓		· Program pengembangan ekspor; · Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm) · Program pengembangan iklim penanaman modal · Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	· Koperasi dan UKM · Penanaman Modal
			Klasterisasi & Penciptaan Kerja · Pengembangan klaster UMKM daerah; · Inkubasi wirausaha baru & industri kreatif; · Pelatihan terarah berbasis pasar tenaga kerja; · Target penciptaan lapangan kerja dari UMKM.				✓	✓	· Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; · Program Pengembangan Ekspor; · Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	· Pariwisata · Koperasi dan UKM · Tenaga Kerja

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
									· Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja · Program penempatan tenaga kerja · Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri · Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
5	Gratis Berobat, Pendidikan dan Sembako Hanya Dengan KTP	1. Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin 2. Program cek kesehatan gratis bagi masyarakat 3. Pengadaan perlengkapan alat sekolah bagi siswa, terutama di daerah perbatasan 4. Reward bagi sekolah berprestasi 5. Pemberian Bantuan Sosial untuk warga kurang mampu	**Penyiapan Data dan Uji Coba** · Sinkronisasi NIK warga Klaten dengan data Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan; · Identifikasi warga kurang mampu berdasarkan DTKS dan data Dukcapil; · Pilot project di kecamatan untuk layanan: Berobat gratis di Puskesmas; Bantuan pendidikan dasar (seragam, buku); Sembako murah; · Penandaan warga penerima manfaat dengan NIK aktif dalam sistem lokal.	✓	✓				· Program Pengelolaan Pendidikan; · Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; · Program Pemberdayaan Sosial; · Program Rehabilitasi Sosial; · Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	· Pendidikan; · Sosial · Kesehatan
			Perluasan Akses dan Integrasi Layanan · Perluasan ke seluruh kecamatan di Klaten; · Semua puskesmas dan sekolah wajib layani warga cukup dengan tunjukkan KTP/KIA; · Digitalisasi sistem pencatatan layanan di Puskesmas, sekolah		✓	✓			· Program Pengelolaan Pendidikan; · Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; · Program Pemberdayaan Sosial; · Program Rehabilitasi Sosial; · Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	· Pendidikan; · Sosial · Kesehatan
			Penyempurnaan Mekanisme & Pemantauan · Integrasi sistem pemantauan layanan berbasis NIK di tingkat kabupaten; · Pelatihan operator layanan di desa, sekolah, dan Puskesmas.				✓	✓	· Program Pengelolaan Pendidikan; · Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; · Program Pemberdayaan Sosial; · Program Rehabilitasi Sosial; · Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	· Pendidikan; · Sosial · Kesehatan

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
6	Intenet Gratis Sampai Desa	Diperuntukan pada Ruang Terbuka Publik	**Perencanana dan Pemetaan** · Pemetaan kondisi infrastruktur digital desa: jaringan, listrik, dan lokasi potensial; · Identifikasi titik layanan publik yang diprioritaskan ; · Koordinasi dengan penyedia layanan internet, BUMDes, dan Kementerian terkait; · Penyusunan masterplan dan standar teknis layanan internet desa; · Uji coba layanan di desa percontohan di tiap kecamatan.	✓	✓				· Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; · Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	· Komunikasi dan Informatika; · Kewilayahan
			Pembangunan Infrastruktur Dasar · Pembangunan atau penguatan infrastruktur jaringan; · Penambahan desa layanan tahap I (minimal 25% dari total desa).		✓	✓			· Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; · Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	· Komunikasi dan Informatika; · Kewilayahan
			Perluasan dan Pemanfaatan Layanan · Perluasan cakupan desa (tahap II) dan peningkatan kapasitas bandwidth; · Peluncuran portal layanan desa online yang terhubung dengan internet gratis.			✓	✓		· Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; · Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	· Komunikasi dan Informatika; · Kewilayahan
			Optimalisasi dan Integrasi Program · Optimalisasi kualitas sinyal dan kecepatan akses (upgrade perangkat); · Integrasi layanan internet dengan sistem informasi desa dan smart village; · Penguatan kelembagaan pengelola layanan (misalnya unit usaha BUMDes bidang digital); · Penambahan titik-titik publik baru seperti taman desa, sentra UMKM, dan kawasan wisata.			✓	✓	✓	· Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; · Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	· Komunikasi dan Informatika; · Kewilayahan
7	Lingkungan Asri, Sampah Teratasi	1. Penataan Lingkungan dan Penghijauan Lahan.	**Penataan Dasar & Edukasi Warga**	✓	✓	✓	✓	✓	· Program Pengelolaan Persampahan	· Lingkungan Hidup;

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
		2. Pemanfaatan Lahan Sesuai Ketentuan Tata Ruang. 3. Optimalisasi Pengelolaan Sampah Mulai dari Rumah Tangga 4. Penanganan sampah di TPA Troketon. 5. Infrastruktur Persampahan 6. Perbaikan RTLH 7. Pengelolaan PSU Perumahan 8. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	· Pendataan sumber dan volume sampah per desa/kecamatan; · Revitalisasi TPS (Tempat Penampungan Sementara) di zona padat; · Kampanye “Satu Rumah Satu Tempat Sampah” dan pilah sampah dari rumah; · Penunjukan minimal 1 Desa Percontohan Bebas Sampah per kecamatan; · Pelatihan kader bank sampah dan pengelola sampah mandiri.						· Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	· Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi · Penerapan wajib pilah sampah di sekolah, pasar, dan kantor pemerintah. · Penguatan Bank Sampah Kecamatan & unit pengangkutan berbasis 3R. · Peluncuran aplikasi pelaporan dan pemantauan titik sampah liar. · Insentif desa dan warga yang aktif kelola sampah dan kebersihan lingkungan. · Penanaman pohon dan taman hijau di titik strategis (desa, bantaran sungai, fasilitas umum).	✓	✓	✓	✓	✓	· Program Pengelolaan Persampahan · Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	· Lingkungan Hidup; · Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengolahan Sampah Berbasis Komunitas · Pendirian minimal 5 unit TPS3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* skala desa/kelurahan. · Kolaborasi UMKM lokal untuk daur ulang (eco-brick, kompos, kerajinan). · Pengembangan sadar lingkungan di sekolah. · Pembentukan Relawan Hijau Desa dan lomba antar kampung bersih.	✓	✓	✓	✓	✓	· Program Pengelolaan Persampahan · Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	· Lingkungan Hidup; · Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Perbaikan RTLH dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	✓	✓	✓	✓	✓	· Program Kawasan Permukiman	· Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
			· Memverifikasi data calon penerima, termasuk mengecek kesesuaian dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data prioritas penanganan RTLH. · Melakukan survey lapangan untuk menilai kondisi rumah dan kelayakan calon penerima bantuan. · Menetapkan daftar penerima bantuan RTLH. · Pencairan dana bantuan RTLH · Penerima bantuan, dengan pendampingan, melakukan perbaikan rumah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. · Proses pembangunan rumah dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku · Setelah pembangunan selesai, dilakukan serah terima rumah kepada penerima bantuan							
8	Satu Desa Satu Fasilitas Olahraga	1.Data dan verifikasi fasilitas olahraga 2. Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi	**Pemetaan dan perencanaan fasilitas olahraga eksisting di seluruh desa** · Penyusunan desain standar minimal fasilitas olahraga desa; · Penetapan desa prioritas pembangunan tahap awal;	✓					· Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan · Program Pengelolaan Keuangan Daerah	· Kepemudaan dan Olahraga; · Kewilayahan
			Pembangunan Tahap I · Pembangunan fasilitas olahraga di desa-desa prioritas.		✓	✓			· Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan · Program Pengelolaan Keuangan Daerah	· Kepemudaan dan Olahraga; · Keuangan · Kewilayahan
			Pembangunan Tahap II dan Aktivasi Komunitas · Pembangunan lanjutan di desa berikutnya;		✓	✓	✓		· Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	· Kepemudaan dan Olahraga; · Keuangan

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
			· Pembentukan dan pembinaan komunitas olahraga desa.						· Program Pengelolaan Keuangan Daerah	· Kewilayahan
			Perluasan dan Pembinaan Prestasi · Pembangunan fasilitas di desa tertinggal atau minim akses; · Pembinaan cabang olahraga unggulan desa; · Kompetisi olahraga desa tahunan tingkat kabupaten.			✓	✓		· Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan · Program Pengelolaan Keuangan Daerah	· Kepemudaan dan Olahraga; · Keuangan · Kewilayahan
			Evaluasi dan Replikasi Program · Revitalisasi fasilitas yang rusak atau kurang optimal; · Penyusunan regulasi dan insentif keberlanjutan pengelolaan oleh desa.				✓	✓	· Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah	· Kepemudaan dan Olahraga; · Keuangan Kewilayahan
9	Program Insentif (Guru Ngaji, Guru Honorer, Penjaga Tempat Ibadah, Kader Posyandu, PKK, Hansip, FKUB, Relawan, RT dan RW)	1. Pemberian insentif / Sarpras fasilitasi untuk Guru ngaji, penjaga tempat ibadah 2. Pemberian insentif PKUB 3. Pemberian insentif bagi Honerer GTT/PTT	**Pendataan & Penyaluran Dasar** · Pendataan dan verifikasi penerima insentif berbasis NIK dan domisili; · Penetapan nominal dasar insentif minimum yang adil dan merata; · Penyaluran insentif tunai non-kinerja (flat);	✓	✓	✓			· Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat · Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan · Program Pemberdayaan Sosial; · Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	· Sekretariat Daerah · Pemerintahan Umum · Sosial · Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
			Penyesuaian & Digitalisasi · Penyesuaian nominal berdasarkan beban kerja dan kebutuhan (misal guru ngaji dengan santri aktif lebih banyak); · Pelatihan literasi bagi penerima insentif; · Evaluasi keterlibatan aktif sebagai dasar penyaringan insentif.			✓	✓	✓	· Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat · Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan · Program Pemberdayaan Sosial · Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	· Sekretariat Daerah · Pemerintahan Umum · Sosial · Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Pembangunan Creative Hub dan Gedung Kesenian	1. Ekosistem creative Hub 2. Sarana dan Prasarana Kelengkapan Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif 3. Bangunan Gedung Tidak Sederhana	**Perencanaan dan Desain** · Studi kelayakan dan identifikasi lokasi strategis; · Penyusunan masterplan dan desain arsitektur gedung; · Konsultasi publik dengan komunitas seni, pelaku ekonomi kreatif, dan stakeholder pendidikan; · Penganggaran dan perizinan teknis	✓	✓				· Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata · Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	· Pariwisata · Kebudayaan
			Pembangunan Infrastruktur · Pembangunan fisik tahap I Creative Hub dan Gedung Kesenian; · Penyediaan fasilitas dasar (ruang kerja kreatif, studio, panggung, galeri, dll); · Penataan kawasan pendukung (akses, parkir, konektivitas digital).		✓	✓	✓		· Program Penataan Bangunan Gedung · Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya · Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	· Pariwisata · Kebudayaan · Pekerjaan Umum

No	Program Unggulan	Aktifitas	Rincian	Target Aktivitas Tahun Ke-					Indikasi Rencana Implementasi Program (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Urusan
				2026	2027	2028	2029	2030		
			Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan · Evaluasi pemanfaatan ruang dan dampak ekonomi-sosial budaya; · Revitalisasi atau perluasan fungsi sesuai kebutuhan (coworking, studio konten, dll); · Penetapan Creative Hub dan Gedung Kesenian sebagai destinasi wisata kreatif; · Penerbitan regulasi pengelolaan kolaboratif dan berkelanjutan.				✓	✓	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kebudayaan

3.3.2.Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Klaten

Program strategis merupakan rangkaian kebijakan, rencana aksi, dan kegiatan prioritas yang dirancang oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan visi dan misi selama lima tahun yang akan datang. Program Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rincian dan Konversi Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2025-2029 ke Dalam Nomenklatur Program Urusan Pemerintahan Daerah

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
I	**Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian**			
1	Mengatasi kemiskinan secara terpadu melalui kolaborasi multi *stakeholder* dan berkelanjutan	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; • Program Pengembangan UMKM; • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	• Pemberian bantuan sosial (bansos) melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Tambahan (BPT), Program Indonesia Pintar (PIP); Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa); • Pelatihan kewirausahaan; • Pemberian akses modal usaha bagi IKM/ UMKM potensi; • Pendampingan UMKM lokal yang berpotensi (wisata, pertanian; ecraft)	• Sosial; • Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; • Perindustrian
2	Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul serta akses keterjangkauan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi	Program Penggelolaan Pendidikan	• Pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu; • Pengadaan perangkat TIK di sekolah; • Pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran; • Perluasan askes internet sekolah; • MOU dengan Perguruan Tinggi, untuk subsidi silang/ beasiswa daerah.	Pendidikan

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
3	Membangun sinergi sekolah dengan keluarga dan menguatkan pendidikan budi pekerti dalam kurikulum sekolah serta mengintegrasikan pendidikan yang membangkitkan literasi, daya berpikir kritis-dialektis dan hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Penggelolaan Pendidikan	• Mengintegrasikan pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran tematik di sekolah; • Workshop untuk guru tentang metode pembelajaran berbasis nilai, dialog, dan pemberdayaan potensi siswa secara utuh (*cognitive, affective, psychomotor)*.	Pendidikan
4	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui ketrampilan dan penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	• Pengadaan job fair; • Kegiatan *link and match* dengan dunia usaha; • Pelatihan bagi calon tenaga kerja; • Pelatihan manajemen usaha, akses modal, dan promosi digital bagi IKM	• Tenaga kerja • Perindustrian
5	Menguatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan hak anak serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	• Pelatihan PPRG; • Penguatan P2TP2A; • Penguatan forum anak	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
6	Melakukan pembinaan pemuda, remaja dan prestasi olahraga melalui penyediaan sarana dan prasarana	• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	• Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda • Pembangunan fasilitas olahraga di desa (satu desa minimal satu fasilitas olahraga)	Kepemudaan dan Olah Raga
7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan; • Revitalisasi dan pemenihan sarana prasarana puskesmas dan poyandu' • Satu desa satu ambulans;	Kesehatan
8	Meningkatkan pelayanan medis Ibu Hamil dan melahirkan dan mencegah stunting dengan pemberian makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) dengan pangan lokal	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil dan balita; • Pemberina edukasi gizi berbasis keluarga	Kesehatan

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
9	Mendorong dan memfasilitasi Program Keluarga Sehat dan Sejahtera melalui Program Pola Asuh sehat, pencegahan pernikahan dini, pembinaan keluarga sehat dan harmonis (pencegahan KDRT dan perceraian dini)	• Program Pengendalian penduduk • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); • Program Perlindungan Perempuan	• Kampanye pencegana pernikahan dini (Genre); • Sosialisasi/ edukasi kepada masyarakat Pencegahan KDRT; • Penguatan P2TP2A	• Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
10	Membangun panti asuhan bagi anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo dan rumah singgah dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kaum lanjut usia melalui penyediaan sarana dan prasarana	Program Rehabilitasi Sosial;	• Pembangunan atau revitalisasi fasilitas panti/rusun sosial sesuai standart; • Pelatihan SDM pengasuh dan perawat sosial; • Penambahan ruang layanan kesehatan khusus lansia dan ABK (klinik geriatri dan klinik tumbuh kembang) di puskesmas strategis.	• Sosial; • Kesehatan
11	Memfasilitasi RSUD untuk peningkatan pelayanan medis melalui peningkatan kualitas tenaga medis (dokter umum dan penambahan dokter spesialis dan perawat), peningkatan fasilitas peralatan medis, peningkatan kesejahteraan tenaga medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Rekruitme dan distribusi dokter spesialis dan perawat; • Pelatihan dan workshop untuk dokter umum, perawat, dan nakes lainnya secara berkala; • Pengadaan fasilitas dan alat kesehatan modern.	Kesehatan
II	**Misi 2: Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana**			
1	Mewujudkan manfaat Klaten sebagai kota antara, yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	• Penataan kawasan strategis di jalur utama Solo-Yogyakarta sebagai pusat layanan ekonomi, logistik, UMKM, dan pariwisata; • Revitalisasi kawasan sekitar stasiun (Klaten, Ceper, Delanggu); • Peningkatan kualitas jalan penghubung antar-kecamatan; • Penyediaan transportasi umum antarkota; • Penyediaan WiFi publik di titik transit.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan; • Komunikasi dan Infromatika

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
2	Meningkatkan pembangunan infrastuktur tematik untuk mendukung pengembangan pariwisata, penguatan investasi, pengembangan UMKM, dan akses pasar	• Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	• Pembangunan atau penataan infrastruktur kawasan wisata unggulan (jalan akses, area parkir, signage, area UMKM, toilet, ruang publik terbuka); • Revitalisasi pasar tradisional; • Peningkatan kualitas jalan penghubung antar-kawasan wisata, industri kecil, dan pasar lokal.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Perdagangan
3	Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas	• Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	• Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni; • Revitalisasi kawasan kumuh; • Pembangunan atau renovasi sekolah dan puskesmas di wilayah yang belum memiliki fasilitas atau mengalami kelebihan beban; • Peningkatan jalan antar kecamatan/ desa yang strategis untuk konektivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Permukiman
4	Meningkatkan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi termasuk pengelolaan persampahan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sanitasi	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; • Program Pengelolaan Persampahan	• Pengembangan sistem jaringan air bersih melalui PDAM, sumur bor dalam, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) skala kecil, dan sambungan rumah tangga; • Pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal dan sistem sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas); • Pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah; • Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terintegrasi di sekolah, PKK, Karang Taruna dll.' • Subsidi biaya pemasangan sambungan air rumah tangga (SR) dan pembangunan tangki septik individu bagi rumah tangga prasejahtera.	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Lingkungan Hidup

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta mitigasi dampak perubahan iklim	• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; • Program Pengelolaan Persampahan	• Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah; • Penanaman pohon di daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, dan lereng rawan longsor; • Pengembangan Kampung Iklim (ProKlim) dan Sekolah Adiwiyata; • Kegiatan penyuluhan untuk masyarakat, petani, pelajar, dan pelaku usaha mengenai efek perubahan iklim dan upaya mitigasinya; • Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), bank sampah, dan pelatihan ecobrick serta daur ulang limbah organik dan non-organik.	Lingkungan Hidup
6	Menguatkan sarana dan prasarana kebencanaan, pelayanan informasi kebencanaan dan Peningkatan pelayanan penanganan bencana berbasis kalaborasi antar sektor	• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; • Program Penanggulangan Bencana	• Pengadaan Sarana dan Peralatan Penanggulangan Bencana; • Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System / EWS) pada wilayah rawan bencana; • Pelatihan Gabungan Penanggulangan Bencana Antar Sektor (BPBD, TNI, Polri, Dinkes, komunitas relawan, dinsos dan masyarakat); • Pembentukan dan pelatihan tim relawan siaga bencana berbasis desa/ kelurahan; • Simulasi evakuasi mandiri dan pelatihan dasar tanggap darurat di sekolah, kantor, dan komunitas; • Pembentukan forum koordinasi penanggulangan bencana lintas OPD, lintas wilayah, dan mitra swasta/LSM.	Ketentraman dan ketertiban umum

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
7	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan relawan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; • Program Penanggulangan Bencana	• Pembentukan Desa Tangguh Bencana; • Pelatihan dasar penanggulangan bencana bagi relawan dan masyarakat; • Pemasangan papan informasi jalur evakuasi di lokasi strategis seperti desa, sekolah, kantor, dan permukiman padat	Ketentraman dan ketertiban umum
III	**Misi 3: Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan**			
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM); • Program Pengembangan UMKM; • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	• Pengembangan Sentra UMKM dan Inkubasi Wirausaha Baru; • Pengembangan Kawasan Ekonomi Produktif (Desa/Kecamatan Tematik); • Pelatihan keterampilan teknis (las, menjahit, desain grafis, tata boga, digital marketing) bekerja sama dengan BLK, SMK, dan industri. Bagi calon tenaga kerja; • Promosi dan fasilitasi investasi daerah; • Digitalisasi UMKM dan Akses ke Platform E-commerce; • Event Tematik, Expo UMKM, dan Bazar Produk Lokal	• Perindustrian; • Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, buruh generasi muda dan remaja, serta optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	• Program Penyuluhan Pertanian	• Fasilitasi dan penguatan kapasitas petani; • Pelatihan pertanian ramah lingkungan, pertanian organik, dan sistem pertanian terpadu; • Pelatihan keterampilan kerja baru bagi buruh terdampak PHK atau pekerja informal (mekanik, las, katering, dll.); • Inkubasi bisnis kreatif dan startup pemuda berbasis potensi lokal (agribisnis, digital, fesyen, kuliner); • Optimalisasi Peran dan Usaha BUMDes	• Pertanian • Tenaga kerja;

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
3	Meningkatkan produktivitas daerah dan mempromosikan potensi kepada investor lokal, nasional dan global dan memberikan kemudahan investasi berbasis sumber daya lokal unggulan daerah yang berkelanjutan	• Program Promosi Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	• Penyusunan dan Publikasi Profil Investasi Daerah *(Investment Profile & Opportunity Map)* • Penyelenggaraan Forum Investasi Daerah (*Regional Investment Forum);* • Promosi Digital Potensi Daerah Melalui Media Sosial dan Platform Global	Penanaman Modal
IV	**Misi 4: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera)**			
1	Mewujudkan *good and clean governance* melalui optimaliasi penyelenggaraan pelayanan publik secara secara optimal, cepat, kreatif, transparan dan akuntabel	• Program Penyelenggaraan Pengawasan; • Program Pelayanan Penanaman Modal	• Pelatihan dan pendidikan anti korupsi; • Peningkatan kompetensi dan integritas ASN; • Pembentukan dan Penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP); • Penguatan sistem pengaduan dan aspirasi masyarakat berbasis teknologi	• Pengawasan; • Penanaman Modal
2	Mengembangkan aparatur dan sistem pemerintahan yang dinamis melalui reformasi birokrasi	• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; • Program Penyelenggaraan Pengawasan; • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	• Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Struktur Birokrasi; • Penguatan Manajemen ASN dan Budaya Kinerja; • Rekrutmen ASN berbasis kompetensi dan sistem merit. • Bimbingan Teknis ASN; • Penguatan peran Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).	• Pendidikan dan Pelatihan; • Pengawasan
3	Menguatkan integrasi pelayanan pemerintah daerah sampai ke desa	• Program Penataan Desa; • Program Administrasi Pemerintahan Desa; • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Pembentukan Forum Koordinasi dan Pendampingan Lintas Wilayah; • Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa; • Digitalisasi Layanan Administratif di Tingkat Desa; • Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan Desa	• Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pengawasan pembangunan	• Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; • Program Perekonomian dan Pembangunan	• Menyelenggarakan Musrenbang secara berjenjang dengan pelibatan aktif masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, disabilitas, dan kelompok rentan; • Pembentukan dan Penguatan Forum Warga dan Lembaga Kemasyarakatan; • Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Responsif dan Terintegrasi	• Perencanaan; • Sekretariat Daerah
5	Mengoptimalkan kinerja keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiscal	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah; • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara digital dan berkala. • Meningkatkan pendapatan dari sektor unggulan (pariwisata, parkir, pasar, pajak hotel/restoran, reklame, dll). • Penguatan sistem keuangan daerah berbasis teknologi (e-Budgeting, e-Planning, e-SAKIP, dan SIPD); • Pelatihan ASN pengelola keuangan ; • Efisiensi Belanja Daerah dan Penajaman Program Prioritas; • Penyelarasan prioritas daerah dengan program strategis nasional untuk memperoleh transfer pusat.	Keuangan
6	Meningkatkan kapasitas desa dan memperkuat aparatur desa dalam tata kelola pemerintah desa yang baik dan berkualitas	• Program Penataan Desa; • Program Administrasi Pemerintahan Desa; • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	• Pelatihan untuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD tentang administrasi pemerintahan, keuangan, dan perencanaan Pembangunan; • Peningkatan Literasi Teknologi dan Administrasi Digital Desa; • Penguatan Fungsi Pengawasan Internal dan Partisipatif	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
V	**Misi 5: Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang *smartcity***			
1	Menguatkan ketahanan pangan dengan modernisasi pertanian, optimalisasi lahan, dan pengembangan bibit unggul daerah	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	• Penyediaan dan subsidi alat mesin pertanian (alsintan); • Pelatihan petani dalam penggunaan teknologi pertanian presisi; • Pengembangan sistem irigasi modern; • Pengembangan pertanian lahan pekarangan dan urban farming berbasis komunitas; • Pengembangan dan penguatan bibit unggul lokal; • Penguatan kelembagaan petani dan koperasin tani; • Pembangunan lumbung pangan desa dan gudang penyimpanan hasil pertanian.	• Pertanian • Ketahanan Pangan
2	Mengembangkan kawasan pariwisata, desa wisata, dan destinasi wisata berbasis potensi Lokal dan meningkatkan kemitraan antar pelaku industri pariwisata menuju Klaten menjadi daerah tujuan wisata yang unggul	• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata: • Pelatihan pengelolaan desa wisata; • Pelatihan pemandu wisata ekowisata (desa wisata); • Pelatihan kuliner (higienitas sajian kuliner) bagi pelaku wisata di desa wisata	Pariwisata
3	Meningkatkan penguasaan riset dan daya saing inovasi melalui kalaborasi dan sinergitas lintas sektor	Program Riset dan Inovasi Daerah	• Pengembangan pusat inovasi dan teknologi daerah (innovation hub) untuk menampung ide dan produk inovatif. • Inkubasi startup lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui pelatihan, mentoring, dan akses permodalan. • Lomba TTG tingkat desa dan kecamatan; • Lomba krenova • Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Komersialisasi Inovasi	Penelitian dan Pengembangan

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
4	Mengembangkan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city serta pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;	• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	• Perluasan jaringan internet berkecepatan di kawasan publik, perkantoran pemerintah, sekolah, dan desa. • Perluasan pemasangan Wi-Fi gratis di ruang publik strategis (alun-alun, terminal, taman kota, dll); • Penyediaan dan integrasi aplikasi layanan publik berbasis smart city	1. Komunikasi dan Informatika
5	Mengimplementasikan sistem TIK terintegrasi dan terpadu berbasis data serta Akselerasi digitalisasi secara menyeluruh dan mudah diakses oleh masyarakat	• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	• Pembangunan dan peningkatan jaringan internet berkualitas di kantor pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan desa; • Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); • Pelatihan bagi ASN dan perangkat desa tentang penggunaan aplikasi digital, pengelolaan data, dan keamanan siber; • Peningkatan Keamanan dan Tata Kelola TIK; • Kemitraan dengan penyedia layanan digital (platform cloud, jaringan internet, dan developer aplikasi lokal).	• Komunikasi dan Informatika; • Persandian
VI	**Misi 6: Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur**			
1	Meningkatkan stabilitas sosial masyarakat yang berkarakter, beriman, toleran dan berbudaya serta meningkatkan kerukunan umat beragama	• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	• Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kemasyarakatan; • Sosialisasi dan pelatihan pendidikan karakter di sekolah dan komunitas pemuda; • Kampanye Toleransi dan Moderasi Beragama melalui Media Sosial dan Kegiatan Sosial; • Pemberdayaan seniman dan budayawan lokal untuk menyampaikan nilai persatuan dan kebhinekaan.	Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
2	Mengembangkan kebudayaan, seni tradisi dan modern melalui penyediaan sarana dan prasarana, event, serta promosi kolaboratif	2. Program Pengembangan Kebudayaan 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional; 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	• Pembangunan gedung kesenian, sanggar seni, balai budaya, dan galeri seni lokal; • Festival seni tradisional daerah (wayang, ketoprak, tari-tarian daerah, dll); • Gelar seni modern (musik kontemporer, seni rupa, teater modern) yang melibatkan generasi muda; • Pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan komunitas seni tradisi dan modern; • Promosi Budaya melalui Media Digital dan Kolaborasi Kreatif; • Kolaborasi event budaya dengan pelaku pariwisata, UMKM, dan sekolah/kampus; • Integrasi seni budaya lokal ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah; • Pendataan dan digitalisasi seni tradisi dan budaya lokal (baik benda maupun tak benda); • Publikasi buku, film dokumenter, dan katalog seni budaya Klaten; • Pengajuan seni budaya lokal sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) nasional.	Kebudayaan

3.3.3.Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

Selain program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klaten juga melaksanakan sejumlah program mandatory sebagai bentuk delegasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk di dalamnya dukungan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pembangunan provinsi secara berkelanjutan dan terpadu. Berikut dukungan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap tiga puluh lima Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.7
Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya: Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center dengan memanfaatkan aset pemerintah kabupaten/ kota	Pelatihan tenaga kerja khusus disabilitas (ULD bidang tenaga kerja), penempatan tenaga kerja disabilitas di industri sesuai kriteria
2	Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni: Program "1 KK 1 rumah layak huni", pengembangan pusat rekreasi, promosi membangunan, dan gelanggang olahraga Internasional. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibagi menjadi 30 % kewenangan kabupaten/ kota dan 20 % desa	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi: Pelatihan berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum (Ombudsman, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK)	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi
4	Pelayanan Kesehatan: Layanan kesehatan keliling, puskesmas pembantu dan layanan kesehatan di setiap desa	Opersional pelayanan kesehatan di Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengembangan tambak Ikan nila	Penataan kelembagaan Pokdakan di kawasan Minapolitan dan kawasan sentra budidaya ikan melalui metode Smart Fisheries Village/ SFV (Kampung Budidaya), Menghidupkan kembali Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) sebagai upaya penataan kelembagaan kelompok perikanan di Kabupaten Klaten
6	Sekolah Unggulan: Mendorong sekolah unggulan di setiap kecamatan	Pembangunan SMA yang berlokasi di Kecamatan Kemalang oleh Provinsi Jawa Tengah
7	Rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas: Dibangun disetiap kecamatan	Implementasi Peraturan Bupati No 8 Tahun 2024 terkait pembentukan UPTD PPPA

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
8	Pengembangan wisata: Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata: 1. Pelatihan pengelolaan desa wisata; 2. Pelatihan pemandu wisata ekowisata (desa wisata); 3. Pelatihan kuliner (higienitas sajian kuliner) bagi pelaku wisata di desa wisata
9	BUMDES Berdaya: Kepastian hukum dan bantuan modal usaha bagi setiap Bumdes di Jawa Tengah	Pengembangan BUMDES dan BUMDESMA
10	Penguatan BPBD dan Tagana: Untuk penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Operasional mobil dapur umum, penyediaan logistik kebencanaan, pelatihan mitigasi bencana, penanganan darurat bencana
11	Cek Kesehatan Gratis	Pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai); pengadaan alkes, pelayanan cek kesehatan gratis oleh puskesmas
12	Penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu	Distribusi redistribusi tenaga kesehatan tenaga medis, pengadaan cpns/pppk, untuk ABK pengajuan rekomendasi unit pembina melalui aplikasi renbut.
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas ASN dan perangkat desa	Bimbingan Teknis ASN
14	Bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pendampingan hukum kepada Perangkat Daerah dan Desa
15	Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Optimalisasi dan pengembangan kawasan wisata Rowo Jombor, Geopark, Sport Center
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Bimbingan Sosial bagi anak rentan, Optimalisasi Peran Forum Anak
17	Ekosistem ekonomi syariah: Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Sosialisasi ekonomi syariah bagi masyarakat, fasilitasi kemudahan akses keuangan pada masyarakat (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi pendaftaran HAKI, P-IRT, sertifikat halal, sertifikasi ISO, Sertifikasi TKDN
19	Peningkatan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan untuk para jagal, juru sembelih halal (Juleha)
20	Desa maju dan berdaya: Pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan	Pembuatan dan penguatan lumbung pangan desa; Penguatan Tagana dan Relawan Bencana tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
	go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana	
21	Desa mandiri energi: Pengembangan bio gas, mikro hydro dan tenaga surya	-
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Penguatan dan fasilitasi kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan pemasaran digital bagi pengelola desa wisata
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM (1 RT 1 Kelompok UMKM)	Progran Klaten Subsisdi Bunga Ringan bagi UMKM, termasuk petani
25	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Pengembangan bank sampah dan ekonomi sirkular
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Mendorong pemenuhan PSU perumahan (salah satunya RTH), mendorong pembangunan dan pemeliharaan RTH sampai di tingkat desa
27	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	pemberdayaan PKUB (Paguyuban Kerukunan Umat dan Beragama) di Kecamatan dan desa oleh FKUB Kabupaten
28	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	pemberdayaan PKUB (Paguyuban Kerukunan Umat dan Beragama) di Kecamatan dan desa oleh FKUB Kabupaten; FPK belum terbentuk
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pelatihan kompetensi dasar bagi kader posyandu, pemberian apresiasi dengan lomba kader posyandu berprestasi, jambore kader
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Posyandu lansia, pelatihan car giver (pendamping lansia), puskesmas santun lansia
31	Taruna karya mandiri: Program Kartu Zilenial untuk membuka lapangan kerja	-
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	1. Pelatihan dasar akuntansi; 2. Pelatihan Manajemen perkoperasian; 3. Pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi pengelola koperasi; 4. Pelatihan tata kelola koperasi dan pelatihan penilaian kesehatan koperasi; 5. Sosialisai pendirian Koperasi Desa Merah Putih
33	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Penghargaan bagi insan olahraga berprestasi, pemberian pada Hibah KONI,NPC, KORMI
34	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Pembentukan ULD Bidang Pendidikan

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pemantauan gempa dan G merapi secara real time (ina tews; BMKG), Onlimo di Sungai dengkeng (Cawas).

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3.4.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Klaten Tahun 2025-2029 juga diarahkan berbasis pada pengarustamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu :

1. **Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.**

   Pemerintah Kabupaten Klaten memperkuat sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Kesehatan. Di sisi lain, intervensi tidak langsung dilakukan melalui optimalisasi pelayanan di Posyandu, Puskesmas, fasilitas pendidikan, serta program pemberian makanan tambahan. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengalokasikan dukungan APBD untuk menjangkau kelompok rentan yang belum terakomodasi dalam kuota APBN, guna memastikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas.

2. **Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.**

   Strategi ini difokuskan pada tiga ranah intervensi, yaitu:

   (1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya desa dan sektor produktif.

   (2) Peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi, melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses modal, serta akses pasar yang menyasar individu, rumah tangga, dan komunitas.

   (3) Penguatan sarana dan ekosistem, dengan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat, penguatan kelembagaan lokal, dan pengembangan aset produktif.

3. **Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan**

   Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses

layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, pemberian stimulan jamban serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti sinergitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan (verifikasi dan validasi database kemiskinan), dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom-up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah diverifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan. Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kelompok antara lain: pengembangan potensi local melalui pemberdayaan kelompok usaha, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak.
Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

3.3.5.Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada lampiran IV terdapat arah pembangunan kewilayahan yang setidaknya terdapat 5 pembagian kawasan dengan total sejumlah 18 Kawasan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan (8 Kawasan): Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal- Semarang-Demak-Kudus, Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri

Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo- Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;

2. Kawasan komoditas Unggulan (2 Kawasan) yaitu komoditas Tebu di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati–Rembang, dan Cilacap;
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (4 Kawasan):
   a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan dan Batang);
   b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng–Serayu–Bogowonto (Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara,Wonosobo, Kebumen dan Purworejo); Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana (Kab. Semarang, Demak, Jepara, Pati,Kudus, Rembang, Grobogan); Bengawan Solo (Blora, Sragen,Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri).
4. Kawasan Afirmasi (1 Kawasan): Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana (3 Kawasan): TN Merbabu-Merapi, TN Karimunjawa dan Geopark Kebumen.

Pembangunan wilayah Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 yang terbagi dalam sepuluh wilayah pengembangan diarahkan dengan kebijakan umum ”Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan”. Kebijakan tersebut juga dalam rangka untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah serta memberikan kontribusi untuk perwujudan Indonesia Emas 2045. Pengembangan episentrum pertumbuhan ekonomi baru Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan atau 10 titik aglomerasi Jawa Tengah merupakan implementasi atau penjabaran langsung dari RPJMD Tahun 2025-2029. Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) meliputi Program Unggulan dan Program Strategis. Kabupaten Klaten masuk dalam WP Subosukowonosraten,dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Subosukowonosrten berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut :

1. **Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (*Event Tourism*) dan Wisata Alam serta Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Mendorong peningkatan status Bandara Adi Soemarmo menjadi bandara internasional (pengembangan sebagai bandara umrah dan haji) dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;

2) Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol ruas Solo - Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo;
3) Mendorong pembangunan fasilitas integrasi transportasi antarmoda dan penyediaan layanan angkutan pemadu moda di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta;
4) Mendorong peningkatan layanan perkeretaapian, diantaranya: KRL Commuter Line Surakarta-Yogyakarta (rencana perpanjangan sampai ke Kutoarjo), KA Wisata Bhatara Kresna (Surakarta-Wonogiri), KA Bandara Adi Soemarmo (BIAS), KA Joglosemarkerto (loop) serta mendorong dan memfasilitasi perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta - Surabaya;
5) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Surakarta -Sumberlawang via Sangiran dan Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri yang terkoneksi dengan Batik Solo Trans (BST) dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata (pengembangan program integrasi edutrip dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata) serta perindustrian;
6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Sukoharjo dan Tawangmangu;
7) Pemenuhan perlengkapan jalan provinsi pada ruas pendukung kawasan pariwisata Tawangmangu dan Geopark Wonogiri.

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
1) Mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) strategis regional dan nasional diantaranya: Sangiran, Umbul, Geopark Gunung Sewu, Tawangmangu, Candi Cetho-Sukuh;
2) Fasilitasi penyelenggaraan event nasional dan internasional seni budaya, festival dan olahraga;
3) Mengembangkan pola perjalanan yang mendukung perpanjangan tema wilayah pengembangan untuk mendukung pre dan post tour event;
4) Menciptakan aktivitas wisata yang unik dalam MICE itineraries;
5) Berkolaborasi dengan industri kreatif untuk menciptakan penawaran yang unik untuk mendukung kegiatan even yang berbeda dengan pesaing;
6) Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan cagar budaya (*urban renewal* Kota Tua Surakarta, Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegaran) untuk peningkatan daya saing sektor pariwisata;
7) Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya dan mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya/sejenisnya;
8) Mendorong pembangunan dan pengembangan desa wisata;

9) Digitalisasi promosi pariwisata dan penguatan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi;
10) Pengembangan Geopark melalui jelajah Geopark Gunung Sewu, peningkatan kapasitas pengelolaan geopark, serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan geopark global;
11) Pendampingan pengembangan Geoheritage Klaten;
12) Peningkatan upaya promosi keberadaan Geopark Gunung Sewu sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui: visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain.

2. Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki)

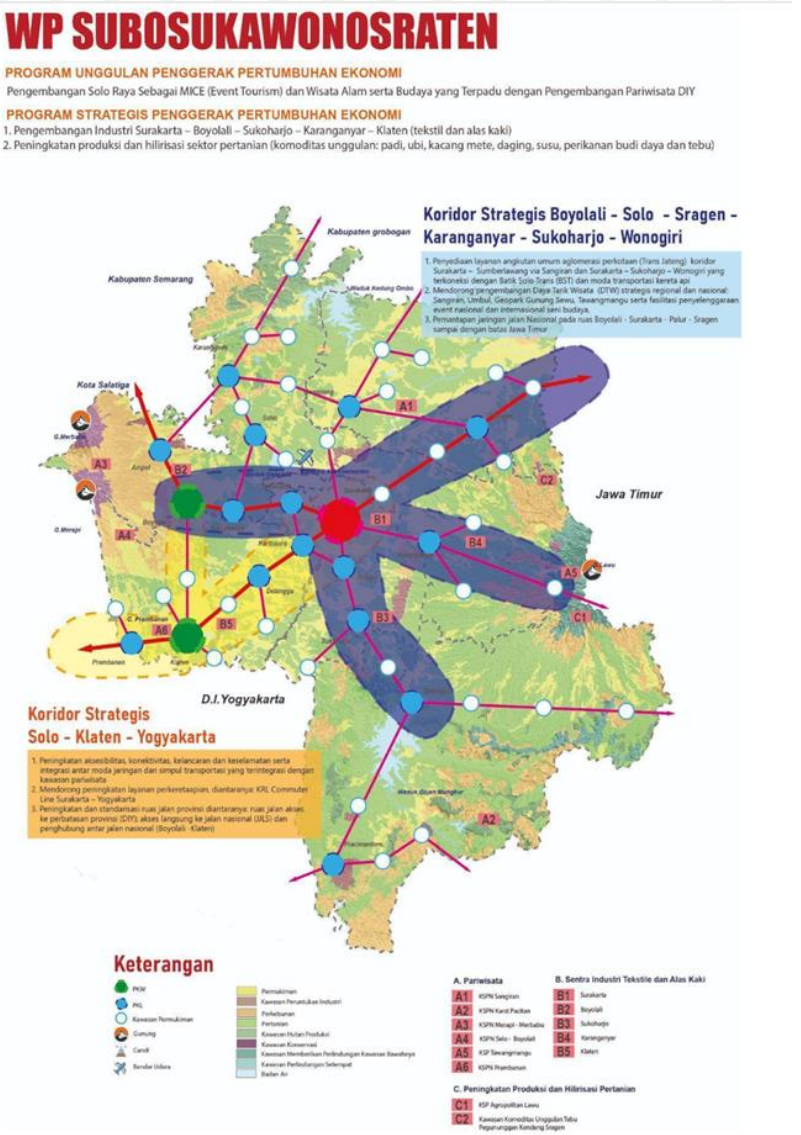
a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor perindustrian, berupa:
   1) Pemantapan jaringan jalan Nasional pada ruas Boyolali-Surakarta-Palur-Sragen sampai dengan batas Jawa Timur;
   2) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Wonogiri - Perbatasan (DIY dan Jatim), Geyer-Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri;
   3) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas jalan akses ke perbatasan provinsi (DIY dan Jatim); akses langsung ke jalan nasional (JJLS) dan penghubung antar jalan nasional (Boyolali -Klaten);
   4) Mendorong optimalisasi Dry-port Jebres dan Kalijambe Sragen.
b. Peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, berupa:
   1) Pengembangan sentra industri hijau;
   2) Pengembangan ekspor produk unggulan;
   3) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
   4) Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
   5) Surakarta.

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, tebu daging, susu, dan perikanan budi daya)

a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
   1) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;
   2) Peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan tebu di Sragen;
   3) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu);
   4) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
   5) Penjaminan kualitas pakan ternak;

6) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
7) Pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
8) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
9) Fasilitasi kampung tematik perikanan (Kampung Lele Boyolali, Kampung Patin Sragen);
10) Pengembangan broodstock center ikan nila di Klaten;
11) Mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di perkotaan (urban farming);
12) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kepoh, Kwangsan dan Padakslorot Kabupaten Karanganyar; Klego Kabupaten Boyolali, Bapang dan Catgawen Kabupaten Sragen; Pundung dan Sidopangus Kabupaten Klaten;
13) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian berupa peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung: Tirtosworo, Bangkan, Kedokan, Selur dan Salam (di Kabupaten Wonogiri) dan Embung Guworejo Sragen.

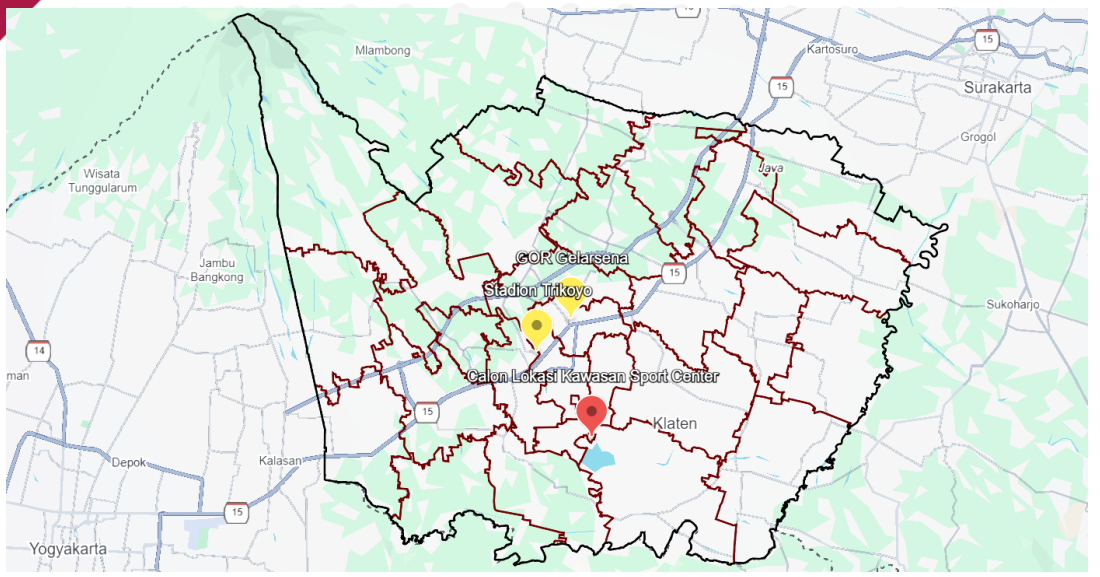
b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
2) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk;
3) Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
4) Kontak bisnis jalinan rantai pasok antara UMKM multiproduk dengan buyer dari pemerintah, BUMN/D, swasta;
5) Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif berbasis potensi lokal;
6) Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi Kelompok Masyarakat Produktif:
7) Magang Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produk UMKM sektor susu;
8) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
9) Pemberdayaan Aspek Produksi Koperasi (FGD KUD di Solo Raya, Bulog dan MBG tentang Hilirisasi dan ketahanan Pangan);
10) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Gemolong -Sragen - Karanganyar, Karangwuni - Perbatasan DIY.



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 3.3 Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten lainnya diprioritaskan pada kebutuhan akan terbangunnya kawasan sport center dinilai penting jika dicermati melalui pendekatan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana serta spasial. Kabupaten Klaten telah memiliki 2 (dua) fasilitas olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu GOR Gelarsena dan Stadion Trikoyo. Namun secara kapasitas kedua fasilitas olahraga ini kurang memenuhi kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk tahun 2024 tercatat sebanyak 2024 1.302.648 jiwa. Selain itu, secara spasial kedua fasilitas olahraga tersebut persebarannya masih memusat di tengah wilayah kabupaten seperti yang dapat dicermati pada gambar di bawah.



Gambar 3.4 Peta Calon Lokasi Kawasan Sport Center dan Persebaran Fasilitas Olahraga Eksisting yang Dikelola Pemda

Kawasan Sport Center yang direncanakan dibangun di Desa Krakitan, Bayat sebelah barat laut Waduk Rowo Jombor merupakan langkah untuk pemerataan fasilitas dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat untuk berolahraga. Kawasan ini akan semakin memacu pengembangan kawasan di poros selatan Kabupaten Klaten. Pembangunan sport center ini juga akan menampung lebih banyak lagi masyarakat dibandingkan kedua fasilitas olahraga eksisting. Dengan ragam fasilitas sport center yang akan tersedia dan daya tampung yang direncanakan lebih besar dari fasilitas eksisting akan memberikan banyak opsi bagi masyarakat. Dari segi aksesibilitas calon lokasi ini cukup dekat dengan Stasiun Kereta Api Klaten. Dengan jarak ±7 km dari Stasiun KA Klaten dapat ditempuh dengan mudah menggunakan kendaraan seperti motor dan mobil. Calon lokasi ini juga berjarak ± 40 km dari pusat Kota Solo dan ± 30 km dari pusat Kota Yogayakarta menjadikannya cukup strategis untuk mengadakan event-event olahraga dengan skala regional hingga nasional.

Kawasan Sport Center Kabupaten Klaten direncanakan dibangun di atas lahan seluas 6,68 ha. Kawasan ini akan dilengkapi dengan beragam fasilitas olahraga seperti jogging track, lapangan futsal, sepakbola, basket, voli, bulu tangkis, kolam renang, panjat tebing, hingga fasilitas lain yang mendukung seperti ruang pertemuan, gudang, asrama/*guest house*, masjid, dan kantin.

Secara umum, tahapan pengembangan sport center akan dilakukan dari tahun 2025-2030 yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan besar: Persiapan, Pembangunan Utama, dan Pembangunan Lanjutan. Penjelasan dari tiap-tiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. **Tahap Persiapan**

   Pada tahap ini persiapan dilaksanakan di 2 (dua) tahun pertama pelaksanaan pengembangan kawasan. Penataan lahan dan persiapan aksesibilitas ke kawasan menjadi penting agar lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat dan penataan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada tahap ini aksesibilitas kawasan dapat dipastikan siap untuk publik.

2. **Tahap Pembangunan Utama**

   Tahap kedua yang dilaksanakan pada 3 (tiga) tahun dari tahun 2027-2029 merupakan tahapan utama dalam pengembangan kawasan ini. Fasilitas olahraga seperti GOR utama, lapangan indoor untuk olahraga seperti basket, bulu tangkis, gymnastic, kolam renang, serta lapangan outdoor untuk olahraga seperti tenis dan panjat tebing dilaksanakan pada tahap ini. Pada tahap ini dipastikan juga amenitas kawasan seperti listrik, toilet, masjid, dan ruang ganti dapat dipastikan siap digunakan untuk publik.

   Pada tahap ini juga fasilitas yang telah selesai dibangun secara bertahap dapat mulai dibuka untuk keperluan publik meskipun masih terbatas.

3. **Tahap Pembangunan Lanjutan**

   Tahap terakhir merupakan pembangunan sarana prasarana lain yang mendukung untuk kepentingan kegiatan di kawasan seperti kantin dan asrama/guesthouse. Kawasan sport center yang ke depan direncanakan untuk perhelatan event-event olahraga dan rekreasi lainnya penting untuk menyediakan amenitas seperti asrama/guesthouse. Pada tahap ini pula dilaksanakan upaya mempercantik dan memperindah kawasan dengan penanaman pepohonan dan tanaman hiasan. Selain sebagai fungsi estetika, proses beautifikasi ini juga bermaksud untuk memberi kenyamanan dan magnet pengunjung untuk datang. Semua tahapan telah dilaksanakan maka kawasan dapat dilakukan peresmian dan dibuka secara total untuk publik.



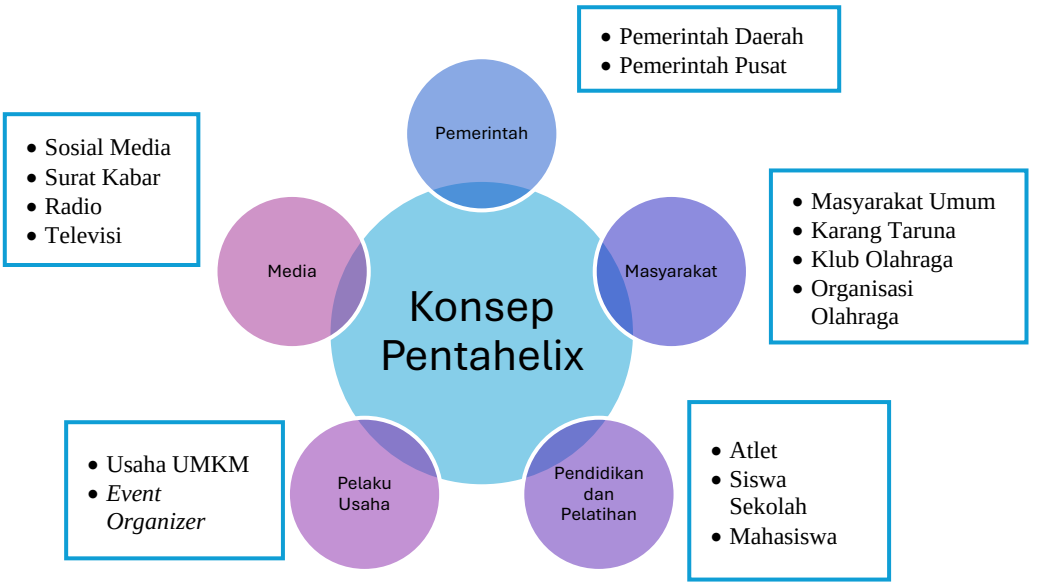
Gambar 3.5 Sketsa Kawasan Sport Center Klaten

Seperti ruang publik lain, sport center juga memiliki fungsi atau peran dalam kawasan sekitarnya. Fungsi yang timbul dari adanya sport center dari segi rekreasional, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga bahkan perekonomian.

Dari segi rekreasional, sport center memberikan fasilitas olahraga yang beragam dan terjangkau untuk masyarakat serta memberikan pilihan masyarakat untuk meluangkan waktu di lokasi tersebut. Hadirnya sport center dari segi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang hilirnya menghasilkan atlet-atlet berprestasi dari Kabupaten Klaten. Diharapkan dengan meningkatnya atlet berprestasi yang lahir maka akan meningkatkan pula minat masyarakat untuk menggemari olahraga serta meningkatkan iklim olahraga kompetitif yang sportif. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia secara rutin hingga memupuk kebiasaan baik untuk gemar berolahraga dan memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Ketiga fungsi tersebut merupakan terjemahan dari salah satu misi RPJMD Klaten 2025-2029 yaitu **"Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian."**

Dari segi sosial, sport center menjadi ruang publik tempat berkumpulnya masyarakat tanpa memandang batas-batas sosial dan ekonomi. Fasilitas olahraga yang beragam dan terjangkau, sehingga masyarakat berkumpul membangun gaya hidup yang lebih sehat serta dapat menjalin komunikasi dan jaringan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan sport center untuk menyelenggarakan event olahraga sebagai bentuk ekspresi dan bagian dari membangun iklim kompetitif di wilayah.

Dari segi perekonomian, sport center mampu menjadi pusat keramaian baru dengan menarik banyak masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah kabupaten karena merupakan ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Ditambah lagi dengan banyaknya peluang untuk terselenggaranya event yang tidak terbatas pada bidang olahraga saja tapi juga kesenian, kebudayaan, bahkan hiburan. Masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat juga dengan hadirnya kawasan sport center ini. Masyarakat sekitar sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berpartisipasi dengan menawarkan aneka produk dengan mendirikan stand ekonomi di sekitar tempat lokasi. Pendirian stand produk UMKM perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat agar tetap tertata rapi dan memudahkan pengunjung untuk bertransaksi. Ke depannya pendirian stand produk UMKM sendiri dapat diselenggarakan secara rutin dengan tetap memperhatikan kebersihan dan kenyamanan kawasan.



Gambar 3.6 Konsep Pentahelix Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Sport Center

Pelibatan dari unsur di luar pemerintahan sangat penting dilakukan mengingat kawasan akan selalu berkembang dan mengalami dinamika. Menggunakan konsep pentahelix ada 5 (lima) unsur yang dapat terlibat dalam pengembangan kawasan sport center.

Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai inisiator proyek ini dapat menggandeng unsur masyarakat yang berkecimpung dalam dunia olahraga seperti klub dan organisasi olahraga (KONI, NPC, dan sejenisnya) serta menggandeng karang taruna memantik adanya event olahraga dan kepemudaan yang positif. Dari segi pendidikan dan pelatihan, akan banyak atlet yang terwadahi dengan adanya fasilitas yang bervariasi serta memungkinkan terbentuknya wadah pelatihan atlet-atlet yang terpusat baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Harapan ke depan

atlet-atlet yang telah terfasilitasi dapat menyumbangkan prestasi di tingkat nasional maupun hingga tingkat internasional sehingga mengharumkan nama bangsa.

Peran media, terutama media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat umum dalam membangun kebiasaan berolahraga dirasakan cukup meningkat pada tahun-tahun terakhir. Ke depan dengan teknologi untuk berbagi pengalaman di media sosial terkait kenyamanan dan keamanan berolahraga di kawasan ini dapat menjadi pendongkrak bagi masyarakat lain untuk beramai-ramai berkunjung dan berolahraga.

Pemerintah
Kabupaten Klaten

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



BAB IV
PROGRAM PERANGKAT

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah Kabupaten Klaten memuat arah pembangunan yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah melalui kegiatan dan subkegiatan. Setiap program dilengkapi indikator serta target kinerja lima tahun ke depan yang didukung dengan rencana pembiayaan, sehingga menjadi acuan bagi masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra.

Program-program perangkat daerah Kabupaten Klaten juga berfungsi mendukung 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah dan 136 Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi program delegasi ke dalam Renstra PD yang diselaraskan dengan nomenklatur subkegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penetapan target kinerja dan alokasi anggaran berlaku untuk periode 2026–2030. Adapun program Tahun 2025 telah tercantum dalam dokumen APBD TA 2025, sehingga tidak dimasukkan kembali ke dalam RPJMD, meskipun kinerjanya tetap menjadi tanggung jawab Kepala Daerah. Rencana program perangkat daerah periode 2025–2030 disusun sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Klaten, tidak hanya untuk memastikan ketercapaian target pembangunan jangka menengah, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah.

Secara khusus, program Tahun 2030 diposisikan sebagai pijakan utama penyusunan RKPD 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030–2034. Dengan demikian, capaian pembangunan Tahun 2030 memiliki peran strategis sebagai titik transisi sekaligus landasan keberlanjutan pembangunan daerah pada periode kepemimpinan berikutnya. Hal ini diharapkan mampu menjamin kesinambungan kebijakan, konsistensi program, serta keberlanjutan capaian kinerja pembangunan.

4.1.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pendidikan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini untuk mendukung ketercapaian misi ke-5 yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsif gender, program ini juga diarahkan untuk menurunkan angka anak tidak sekolah sebagai wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, dimana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta didukung peningkatan budaya membaca dan pengembangan kerjasama inovasi daerah.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan muatan lokal dalam kegiatan belajar mengajar baik ditingkat PAUD, SD maupun SMP. Muatan lokal diajarkan ke siswa agar mengetahui dan memahami kearifan lokal yang ada di daerah, sehingga budaya dan kearifan lokal dapat dilestarikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemenuhan dan ketersediaan guru secara ideal serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan Penguatan kualitas pembelajaran melalui integrasi pendekatan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpihak pada peserta didik.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa dan satra, utamanya bahasa dan sastra daerah.

b. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten, yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak,

pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan dasar.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan untuk pengawasan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian agar sesuai dengan standart (ketentuan).

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa/kelurahan disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten dengan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. Program ini lebih pada manajemen pengelolaan sumber daya air sehingga dalam pemanfaatannya akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman untuk masyarakat.

3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten salah satunya adalah dengan penyediaan sistem pengelolaan persampahan secara terpadu berupa TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang sesuai standart dan berwawasan lingkungan.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak dan aman untuk masyarakat.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten, dengan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan

bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap.

6) Program Penataan Bangunan Gedung
   Program ini digunakan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan bangunan gedung milik daerah.
7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
   Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
8) Program Penyelenggaraan Jalan;
   Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten yang dalam pelaksanaannya mendapatkan perhatian, diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten. Diharapkan dengan infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektiitas dan perekonomian daerah.
9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
   Pelaksanaan program ini dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang jasa konstruksi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sesuai kewenangan daerah.
10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    Program ini ditujukan untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pemenuhan indikator SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2) Program Kawasan Permukiman
   Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten yang diarahkan pada peningkatan dan penanganan kawasan kumuh, utamanya pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
   Pelaksanaan program ini untuk rehabilitasi dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
   Program ini digunakan untuk memfasilitasi penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan mendorong pengembang agar segera

menyerahkan PSU Perumahan yang dibangun kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada pembinaan pengembang perumahan dan kawasan permukiman.

e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini ditujukan untuk pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

2) Program Penanggulangan Bencana
Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten, dengan harapan masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. Program ini dimaksudkan untuk RB inklusif dan pembentukan desa tangguh bencana (Destana). Selain itu, program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.

3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebakaran.

f. Sosial

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan sosial tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

2) Program Rehabilitasi Sosial
Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Pusat Layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PLKSAI); Rumah Singgah (Rusi) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar.

4) Program Penanganan Bencana
Program ini ditujukan pada pemenuhan sandang dan pangan untuk korban bencana.
5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pengelolaan taman makam pahlawan sesuai standart.

2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan tenaga kerja tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana.
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha.
3) Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja.
4) Program Hubungan Industrial
Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara tenaga kerja (buruh) dan perusahaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada implementasi Pemgarustamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di Perangkat Daerah.
2) Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempun yang menjadi korban kekerasan.
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan data pilah gender dan anak yang ada disetiap Perangkat Daerah, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender.
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak sampai tingkat kecamatan.
6) Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

c. Pangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada penyediaan bahan pangan pada lumbung pangan yang menjadi cadangan pangan. Selain itu juga merupakan program unggulan Bupati Klaten dengan pengembangan lumbung pangan.
2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada Bimbingan pengembangan Kelembagaan distribusi pangan : LPM / Gapoktan, Bantuan / stimulan Tunda Jual gabah untuk dikelola sebagai modal usaha kelompok
3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Pelaksanaan program ini diarahkan pada penanganan desa rawan pangan baik yang disebabkan karena akses memperoleh pangan yang sulit maupun karena bencana.
4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini ditujukan untuk pengawasan pangan, terutama pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

d. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan di masyarakat, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Klaten yang hidup dari hasil bercocok tanam (petani).

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
   Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian ganti rugi tanah untuk pembangunan guna memberikan jaminan kepastian bagi mayarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
3) Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
   Program ini diarahkan untuk menfasilitasi pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah.
4) Program Penatagunaan Tanah.
   Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen penatagunaan tanah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pertanahan.

e. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   Program ini diarahkan pada penyedian dokumen perencanaan lingungan hidup yang berkualitas.
2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   Program ini dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, dengan melakukan pemantauan kualitas air dan udara.
3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
   Program ini ditujukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan RTH, yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten di bidang lingkungan hidup dengan penyediaan ruang terbuka hijau hingga tingkat RW serta optimalisasi fungsi RTH dan profil kehati Kabupaten Klaten, rencana induk pengelolaan kehati Kabupaten Klaten.
4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
   Program ini diarahkan pada pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah B3, agar tidak mencemari lingkungan disekitarnya.
5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan lingkungan dan izin PPLH.
6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penidikan, pelatihan dan penyuluhan.

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   Program ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada tokoh/ lembaga masyarakat/ sekolah/ dunia usaha yang peduli terhadap pelestarian lingkungan.
8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
   Program ini diarahkan untuk memastikan setiap aduan masyarakat terkait perusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti dan ditangani.
9) Program Pengelolaan Persampahan
   Program merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dengan fokus pada Pengelolaan persampahan (TPS) dengan budidaya maggot dan Pengembangan TPS Desa/ Kelurahan.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pendaftaran Penduduk
   Pelaksanaan program ini ditujukan pada pelayanan pendaftaran penduduk.
2) Program Pencatatan Sipil
   Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah.
4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
   Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kerjasama Desa
   Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kejasama antar desa.
2) Program Administrasi Pemerintahan Desa
   Program ini diarahkan untuk mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten, yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   Pelaksanaan program ini mengarah pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
4) Program Penataan Desa

Program ini diarahkan untuk peningkatan sarpras dan infrastruktur desa dan dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Penduduk
   Program ini diarahkan pada sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pengendalian penduduk.
2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   Program ini diarahkan pada penurunan masyarakat yang tidak terlayani dalam pemenuhan alat kontrasepsi.
3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan pembinaan keluarga.

i. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perhubungan tahun 2025-2029 adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyelenggaraan dan pemenuhan pelayanan lalu lintas angkutan jalan, guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Klaten.

j. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan komunikasi dan informatika tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi publik terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikemas secara menarik.
2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mendukung ketercapaian Klaten Smart City dengan menyediakan pelayanan publik secara online dan menyiapkan akses internet disetiap Perangkat Daerah.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   Program ini diarahkan pada pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan koperasi di Kabupaten Kleten.
2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Pelaksanaan program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
   Program ini diarahkan mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten yang mengarah pada Optimalisasi Show room produksi UMKM, peningkatan kapasitas kelembagaan Kluster UKM serta digitalisasi produk UKM, Asistensi Usaha mikro berbasis Kluster.
4) Program Pengembangan UMKM
   Program ini diarahkan pada pengembahan usaha mikro

l. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penanaman modal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   Program ini diarahkan pada pengembangan iklim investasi untuk menarik investor menanamkam modalnya di Kabupaten Klaten.
2) Program Promosi Penanaman Modal
   Program ini diarahkan pada promosi investasi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten.
3) Program Pelayanan Penanaman Modal
   Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten guna memberikan pelayanan yang prima dalam perizinan penanaman modal, diarahkan pada pemenuhan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
   Program ini diarahkan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan laporan penanaman modal yang telah dilakukan.
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Pelaksanaan program ini adalah untuk menyediakan dan mengelola data perizinan dan non perizinan serta sistem informasi penanaman modal,

m. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   Program ini diarahkan untuk mengembangkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pelatihan dan pembinaan pemuda dalam organisasi kepemudaaan dan sosial kemasyarakatan.
2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini ditujukan untuk pembinaan terhadap atlet yang dilakukan secara kontinyu.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini diarahkan pada pembinaan dan penguatan pemuda dalam organisasi kepramukaan

n. Statistik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan statistik tahun 2025-2029 adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pelaksanaan program ini fokus pada penyediaan data statistik sektoral.

o. Persandian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan persandian tahun 2025-2029 adalah Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini ditujukan untuk pengamanan Informasi dan komunikasi Perangkat Daerah.

p. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kebudayaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini diarahkan untuk mengembangkan kebudayaan daerah agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat.
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program ini ditujukan untuk mengembangkan kesenian tradisional di Kabupaten Klaten melalui pembinaan terhadap pelaku kesenian.
3) Program Pembinaan Sejarah
Program ini dilaksanakan guna mendukung progam unggulan Bupati Klaten untuk museum daerah taman budaya dengan fokus pada pelestarian dan pembinaan sejarah lokal.
4) Program Pelestarian dan Pengelolaaan Cagar Budaya
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk melestarikan dan mengelola benda peninggalan, situs dan kawasan cagar budaya yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.
5) Program Pengelolaan Permuseuman
Program ini merupakan salah satu program prioritas Bupati Klaten dalam pembangunan museum dan taman budaya, juga untuk mewadahi pengelolaan dan perlindungan terhadap koleksi benda sejarah/ warisan budaya.

q. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perpustakaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
   Pelaksanaan program ini dilakukan guna mendukung pelatihan komputer untuk masyarakat kurang mampu dan program Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku.
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno
   Program ini diarahkan untuk mendukung pelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara

r. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kearsipan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Arsip
   Program ini dilakukan dalam rangka pembinaan dalam pengelolaan arsip sesuai standar nasional kearsipan.
2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   Program ini digunakan untuk meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip-arsip penting.
3) Program Perizinan Penggunaan Arsip
   Program ini ditujukan pada masyarakat dalam kemudahan akses penggunaan arsip yang bersifat tertutup

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

a. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   Pengelolaan program ini ditujukan memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan perairan.
2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   Program ini ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal daerah, pembinaan perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi ikan dan tingkat konsumsi ikan serta sebagai daya tarik wisata.

3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini ditujukan untuk mendukung program hilirisasi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan agar dapat memberikan nilai tambah.

b. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pariwisata tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini merupakan salah satu program yang fokus pada peningkatan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya di Klaten dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.
2) Program Pemasaran Pariwisata
Program ini untuk mendukung promosi dan pemasaran destinasi wisata baik di dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Program ini ditujukan untuk pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif.

c. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini untuk mendukung pengembangan padi rojolele varietas srinar dan srinuk, peningkatan tanaman perkebunan dan hortikultura dengan bibit unggul serta budidaya pengembangan pertanian organik di Kabupaten Klaten. Program ini merupakan program prioritas Bupati
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini merupakan salah satu pendukung program unggulan Bupati Klaten dalam mengembangkan ternak unggul kambing serta diarahkan pada diseminasi dan penegakan Perda LP2B. Selain itu dalam program ini juga diarahkan untuk pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   Program ini dilaksanakan untuk pengendalian, pencegahan, pemberantasan dan penanganan Penyakit Hewan Menular (PHM) dan zoonosis, dan pengawasan produk hewan.
4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana pertanian yang dinilai akan memberi dampak pada usaha pertanian.
5) Program Penyuluhan Pertanian
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan pertanian.

d. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perdagangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   Pelaksanaan program ini diarahkan untuk mengembangkan dan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha untuk memperoleh rekomendasi izin sesuai dengan peraturan perundangan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat/tradisional dengan melakukan revitalisasi pasar dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).
3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) di masyarakat serta menjaga ketersediaan dan pemenuhan pupuk bagi petani.
4) Program Pengembangan Ekspor
   Program untuk meningkatkan daya saing produk industri daerah, yang diarahkan pada jenis produk daerah yang mampu diekspor untuk meningkatkan nilai ekspor daerah dengan indikator kinerja jumlah komoditas yang mampu ekspor.
5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
   Pelaksanaan program ini untuk memberikan pelayanan pengukuran dan perlindungan konsumen.
6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
   Program ini digunakan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Klaten.

e. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perindustrian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah.
2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
   Program ini bertujuan untuk memfasilitasi perizinan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
3) Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional
   Pelaksanaan pada program ini mengarah pada fasilitasi database IKM pada Sistem Industri Nasional (SIINas)

f. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan transmigrasi tahun 2025-2029 adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Program ini dimaksudkan untuk memberangkatkan dan membekali keterampilan bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan menuju wilayah transmigrasi.

4. Urusan Penunjang Pemerintah

Nomenklatur program yang akan digunakan di urusan penunjang pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta penataan organisasi.
2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan pemberian bantuan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada masyarakat, pemberian bantuan hukum kepada OPD dan desa yang ditimpa kasus hukum serta pembinaan tertib administrasi bagi kecamatan dan kelurahan.
3) Program Perekonomian dan Pembangunan
   Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi untuk kegiatan perekonomian dan pembangunan yang menjadi kewenangan sekretariat daerah. Selain itu juga untuk memberikan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui bank yang telah ditunjuk.

b. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memberikan dukungan pelayanan kepada anggota DPRD dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya.

c. Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perencanaan pembangunan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   Pelaksanaan program ini diarahkan guna mendukung keterpaduan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembanguann daerah agar semua target kinerja pembangunan dapat tercapai.

d. Keuangan Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan keuangan daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   Pelaksanaan program ini ditujukan dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal.
2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Program ini ditujukan untuk pengelolaan aset daerah yang optimal.
3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target pajak daerah.

e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Kepegawaian Daerah
   Program ini ditujukan agar pengelolaan manajemen kepagawaian daerah semakin baik dan professional guna mendukung pencapaian sistem merit.
2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
   Pelaksanaan program ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhlak).

f. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penelitian dan pengembangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
   Program ini ditujukan untuk pengembangan kajian potensi unggulan daerah dan pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2) Program Riset Dan Inovasi Daerah
   Program ini ditujukan untuk mendorong kegiatan riset dan inovasi di bidang pemerintahan; sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, juga untuk mendukung program prioritas bupati dalam perbaikan varietas durian khas Klaten.

g. Pengawasan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengawasan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah secara efektif.
2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah dan Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus.

h. Kewilayahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kewilayahan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat.
3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat
4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
   Pelaksanaan dari program ini adalah untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur pemeritah desa.

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.
2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Pelaksanaan program ini lebih pada pendidikan politik masyarakat dan peningkatan peran partai politik melalui pembinaan yang dilakukan setiap tahun.
3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kabupaten Klaten
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya
Pelaksanaan program ini diarahkan pada pembinaan kerukunan umat beragam dan pelaksanaan P4GN.
5) Program Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik dengan melakukan deteksi dini potensi konflik.

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 terperinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dan Pendanaan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						909.010.714.000		979.559.021.398		976.080.847.385		978.093.808.913		983.984.388.167	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						778.253.044.200		786.866.355.398		777.736.947.385		777.355.869.913		772.340.207.167	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,60	83,70	83,80		83,87		84,90		85,10		85,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80,45	80,70	81,10		81,75		82,15		82,70		83,00		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						123.108.669.800		176.250.551.000		180.815.955.000		182.114.513.000		189.658.431.000	
	Meningkatnya Partisipasi Usia Sekolah	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	54,65	56,60	56,90		57,00		57,85		57,95		58,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		Persentase SD berakreditasi minimal B	%	98,59	98,60	98,80		98,95		99,10		99,25		99,40		
		Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	87,93	87,93	88,10		88,70		88,95		89,40		90,10		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,30	98,38	98,49		98,51		98,58		98,60		98,67		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89,77	91,17	92,58		93,98		95,38		96,78		98,18		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,08	99,12	99,13		99,21		99,26		99,34		99,39		

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	10,29	11,05	11,82		12,58		13,34		14,10		14,87		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						394.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						7.225.000.000		15.212.115.000		16.097.945.000		16.993.426.000		20.255.750.000	
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru PAUD	Indeks	-	-	0,39		0,40		0,42		0,43		0,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		Indeks Pemerataan Guru SD	Indeks	-	-	0,45		0,46		0,49		0,52		0,58		
		Indeks Pemerataan Guru SMP	Indeks	-	-	0,44		0,48		0,51		0,55		0,60		
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	52,98	52,98	52,98		53,90		54,25		54,90		55,55		
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	-	-	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						30.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	
	Meningkatnya pelindungan dan pemajuan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						458.670.571.489		433.094.066.657		441.844.835.165		453.314.391.242		456.258.692.884	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						366.843.074.217		345.459.430.779		351.304.386.489		360.783.335.296		356.573.786.605	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,90	88,00	88,50		89,00		89,00		89,20		89,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	75,15	75,20	75,25		75,40		75,55		75,70		75,85		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						88.073.747.110		84.192.230.878		87.065.398.676		89.032.480.946		96.157.686.279	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Bayi AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	13,73	14,15	14,15		14,10		14,05		14,00		13,95		
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	109,20	97,00	97,00		98,00		99,00		99,00		99,00		
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	61,88	61,90	62,30		62,50		62,80		63,00		63,50		
		Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	%	47,00	50,77	51,53		51,53		51,53		51,53		51,53		
		Persentase keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten	%	81,62	81,62	81,70		81,80		81,90		82,00		82,10		
		Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	5,00	25,00	30,00		50,00		60,00		70,00		80,00		
		Persentase Rumah Sakit Bagas Waras dalam memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan /SPA sesuai standar	%	59,00	59,00	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		
		Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	99,53	99,53	99,80		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.132.837.000		1.330.000.000		1.350.000.000		1.360.000.000		1.375.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	26,00	32,00	38,00		41,00		44,00		47,00		50,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	50,00	54,00	60,00		64,00		68,00		70,00		72,00		
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	2,90	3,00	3,01		3,02		3,03		3,04		3,05		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						766.895.000		712.405.000		725.050.000		738.575.000		752.220.000	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	50,00	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.854.018.162		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	0,00	30,00	50,00		80,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	%	98,78	98,00	98,00		98,00		98,00		99,00		99,00		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						210.125.135.200		223.132.163.767		226.452.174.491		224.514.976.765		257.309.587.311	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.940.358.200		26.853.069.767		27.111.625.491		27.514.256.765		28.937.458.311	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,00	87,45	88,00		88,00		87,70		87,80		87,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,00		81,00		81,10		81,15		81,20		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						15.600.000.000		24.731.963.000		25.834.975.000		27.450.003.000		31.512.160.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,34	0,34	0,36		0,37		0,38		0,39		0,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						1.670.000.000		2.280.598.000		1.827.824.000		1.875.564.000		2.049.485.000	
	Meningkatnya akses air minum yang layak bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	94,00	94,29	95,00		96,00		96,42		96,96		97,49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						1.251.061.000		3.636.206.000		3.144.447.000		2.152.778.000		2.183.126.000	
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						4.320.000.000		3.646.832.000		3.867.461.000		4.090.494.000		4.903.024.000	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,00	2,00	2,00		2,00		2,99		3,56		4,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.630.000.000		2.675.693.000		2.777.071.000		2.879.553.000		3.252.905.000	
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	62,62	62,62	63,03		63,18		63,34		63,49		63,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN						41.517.242.000		41.780.634.000		39.461.328.000		34.160.332.000		40.349.973.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BANGUNAN GEDUNG															
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung perkantoran pemerintah yang terbangun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						1.270.000.000		7.324.702.000		7.465.344.000		3.607.518.000		4.125.472.000	
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	20,00	27,00	27,00		29,00		31,00		33,00		35,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						106.167.057.000		108.537.128.000		113.196.009.000		118.916.539.000		137.756.999.000	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kondisi baik	%	48,00	48,06	48,13		48,20		48,27		48,34		48,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						529.295.000		250.777.000		265.949.000		281.286.000		337.161.000	
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						3.230.122.000		1.414.561.000		1.500.141.000		1.586.653.000		1.901.824.000	
	Meningkatnya keteraturan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase rencana tata ruang yang disusun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17.295.055.000		16.338.885.207		16.886.548.600		17.479.431.069		19.656.811.388	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.238.953.000		9.717.783.207		9.748.446.600		9.996.829.069		11.290.709.388	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,00	85,00	85,00		85,05		85,10		85,15		85,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,50		81,75		82,00		82,25		82,50		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.025.500.000		522.000.000		524.000.000		528.500.000		1.002.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan rumah layak bagi korban bencana dan masyarakat yang terdampak program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						795.400.000		410.000.000		775.000.000		785.000.000		1.195.000.000	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	97,63	98,83	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						3.534.862.000		3.919.102.000		4.069.102.000		4.399.102.000		4.399.102.000	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penanganan permukiman kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	97,63	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.671.500.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman	Persentase perumahan yg dilengkapi prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	52,76	52,76	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan	%	24,52	24,52	37,73		47,17		56,60		66,04		75,47		
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						28.840.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan	%	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						22.721.518.980		19.313.460.736		19.829.623.191		20.412.604.093		22.517.558.720	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.428.690.149		11.218.736.736		11.284.768.191		11.431.588.093		11.968.808.720	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,14	88,22	88,30		88,43		88,55		88,68		88,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	68,07	68,21	68,37		68,57		68,92		69,09		69,62		

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.211.343.924		2.724.691.000		2.910.439.000		3.079.337.000		3.673.408.000	
	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram	Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						4.271.571.051		3.554.293.000		3.708.825.000		3.865.041.000		4.434.149.000	
	Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	52,00	52,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1.809.913.856		1.815.740.000		1.925.591.000		2.036.638.000		2.441.193.000	
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran dan non-	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kebakaran secara efektif dan responsif	Waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran	Menit	15,97	15,20	15,20		15,20		15,10		15,00		15,00		Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						20.782.604.200		17.285.249.527		17.661.430.143		18.154.419.205		19.201.346.637	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.590.204.200		8.078.549.527		8.215.710.143		8.383.699.205		8.880.626.637	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,71	90,71	90,71		91,50		92,00		92,50		93,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80,30	80,30	80,30		80,60		80,90		81,20		81,50		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						4.910.000.000		3.090.000.000		3.135.000.000		3.305.000.000		3.305.000.000	
	Meningkatnya keberdayaan kelompok rentan dalam kehidupan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	93,00	94,00	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						4.287.400.000		3.474.900.000		3.643.920.000		3.648.920.000		3.658.920.000	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, dan PPKS lainnya di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PPKS lainnya selain HIV/AIDS dan Napza di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	70,00	70,00	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						1.027.500.000		1.986.800.000		1.986.800.000		2.111.800.000		2.411.800.000	
	Meningkatnya akses perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	84,23	85,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						792.500.000		480.000.000		480.000.000		505.000.000		670.000.000	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						175.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000		275.000.000	
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.317.119.000		7.328.971.000		8.011.688.000		8.695.045.000		9.750.981.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						20.000.000		10.000.000		10.000.000		100.000.000		15.000.000	
	Meningkatnya akurasi dan pemanfaatan data perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.420.000.000		3.601.981.000		4.131.767.000		4.549.956.000		5.130.650.000	
	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	23,26	15,00	23,27		23,28		23,29		23,30		23,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						3.850.000.000		3.229.790.000		3.364.690.000		3.506.060.000		4.007.867.000	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	85,37	24,00	85,84		86,34		86,84		87,34		87,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.027.119.000		487.200.000		505.231.000		539.029.000		597.464.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.059.312.000		1.525.000.000		1.525.000.000		1.615.000.000		1.700.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		185.000.000	
	Meningkatnya kualitas dan efektivas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	2,16	2,20	2,20		2,30		2,40		2,50		2,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						190.000.000		220.000.000		220.000.000		230.000.000		245.000.000	
	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dari kekerasan dan diskriminasi	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						365.900.000		375.000.000		375.000.000		445.000.000		485.000.000	
	Meningkatanya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase kecamatan yang mempunyai puspaga aktif	%	34,62	38,46	38,46		42,31		46,15		50,00		53,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya data gender dan anak yang akurat dan terintegrasi	Persentase keterisian data pilah gender dan anak kabupaten pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA)	%	88,00	88,00	88,00		90,00		92,00		94,00		96,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak	%	12,47	18,70	18,70		24,94		31,17		37,41		49,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						813.412.000		240.000.000		240.000.000		250.000.000		265.000.000	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						39.747.099.200		36.926.863.745		36.763.739.277		37.123.143.319		38.267.426.252	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						37.707.099.200		34.536.863.745		34.168.739.277		34.401.143.319		35.292.426.252	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,94	83,00	83,00		83,20		83,50		83,80		84,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	72,75	72,76	72,77		72,78		72,79		73,00		73,01		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						875.000.000		900.000.000		910.000.000		950.000.000		1.000.000.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	27,22	30,22	35,22		45,22	900.000.000	60,22		75,22		95,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						835.000.000		1.040.000.000		1.100.000.000		1.122.000.000		1.185.000.000	
	Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92,77	92,77	93,00		93,30		93,50		93,75		94,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						255.000.000		375.000.000		505.000.000		570.000.000		690.000.000	
	Menurunnya kerawanan pangan dan meningkatnya akses pangan bagi masyarakat rentan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	15,38	16,00	18,00		18,00		20,00		21,00		23,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						75.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95,09	83,00	94,50		95,00		95,50		96,00		96,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						210.000.000		85.000.000		105.000.000		115.000.000		125.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						45.000.000		22.500.000		35.000.000		37.500.000		40.000.000	
	Terselesaikannya konflik dan kepastian status hukum atas tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terselesaikannya pengadaan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu dan terpenuhinya hak ganti kerugian masyarakat	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						75.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	
	Terfasilitasinya pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah serta terselenggaranya redistribusi tanah dan penyelesaian ganti kerugian secara tepat dan tertib administrasi	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	%	57,50	57,50	72,50		74,00		75,00		76,00		77,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						65.000.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000	
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						46.455.923.200		34.472.442.864		38.282.739.363		41.183.685.959		42.440.641.698	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.362.493.200		13.446.555.864		13.488.547.363		13.512.094.959		13.755.600.698	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95,70	92,61	95,71		95,72		95,73		95,74		95,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	68,70	68,70	68,80		68,85		68,90		69,00		69,10		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						144.354.000		110.325.000		363.975.000		117.665.000		131.106.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.737.049.000		331.019.000		548.021.000		615.208.000		677.821.000	
	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terukur dan berkelanjutan	Indeks Pencemaran Air	Indeks	0,00	0,00	29,00		28,00		27,00		26,00		25,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
		Indeks Pencemaran Udara	Indeks	0,00	0,00	34,00		33,00		32,00		31,00		30,00		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						11.749.807.000		5.665.120.000		5.750.379.000		5.988.746.000		7.039.295.000	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik Kabupaten	%	0,65	0,65	0,68		0,69		0,70		0,71		0,72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						106.801.000		82.580.000		84.552.000		86.545.000		93.805.000	
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100,00	24,00	24,00		29,00		34,00		39,00		44,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						95.177.000		65.494.000		69.457.000		73.643.000		88.056.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan PPLH	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indeks	70,00	70,00	70,00		71,00		72,00		73,00		74,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						96.236.000		82.829.000		87.841.000		92.907.000		111.362.000	
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Persentase Kelompok Masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						288.707.000		259.205.000		274.887.000		290.740.000		348.493.000	
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						45.495.000		32.598.000		34.571.000		36.565.000		43.829.000	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						16.829.804.000		14.396.717.000		17.580.509.000		20.369.572.000		20.151.274.000	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	66,29	66,29	66,29		68,27		70,32		72,30		74,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						9.215.505.649		8.252.039.746		8.351.901.956		8.494.151.513		8.999.620.390	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAN PENCATATAN SIPIL															
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.987.002.629		7.281.084.746		7.373.579.956		7.470.379.513		7.778.479.390	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82,61	82,63	82,65		82,67		82,69		82,71		82,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						641.056.000		542.600.000		529.958.000		555.127.000		665.397.000	
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 satu hari yang memiliki KIA	%	73,13	80,00	82,00		84,00		86,00		88,00		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	6,00	6,00	8,00		10,00		12,00		14,00		16,00		
		Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,36	99,56	99,58		99,60		99,62		99,64		99,65		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						351.260.000		244.562.000		259.358.000		274.315.000		328.805.000	
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Mempunyai Akte Kelahiran	%	99,29	99,36	99,38		99,40		99,42		99,44		99,46		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI						181.187.020		166.793.000		172.006.000		175.000.000		203.939.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Perangkat daerah dan organisasi atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	72,55	72,55	86,96		89,13		91,30		93,48		97,83		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						55.000.000		17.000.000		17.000.000		19.330.000		23.000.000	
	Tersedianya profil kependudukan yang akurat dan mendukung perencanaan pembangunan	Persentase Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan Tahunan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11.536.488.800		9.790.166.001		10.130.562.408		10.500.714.682		11.841.167.223	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.066.019.800		4.260.776.480		4.295.260.794		4.388.691.380		4.678.346.011	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,40	89,60	89,65		89,70		89,75		89,80		89,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	66,20	66,20	66,40		66,60		66,80		67,00		68,00		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						0		65.000.000		70.000.000		80.000.000		100.000.000	
	Tertatanya administrasi dan wilayah desa secara legal dan fungsional	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	-	-	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						90.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000		120.000.000	
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						4.851.007.000		4.159.072.521		4.325.000.000		4.516.053.030		5.257.821.212	
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-	14,06	16,44		4,71		4,49		6,45		6,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						1.529.462.000		1.240.317.000		1.365.301.614		1.415.970.272		1.685.000.000	
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.875.785.800		3.455.000.000		3.955.000.000		4.520.000.000		6.275.000.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						1.417.850.000		805.000.000		830.000.000		830.000.000		860.000.000	
	Terkendalinya pertumbuhan dan meningkatnya kualitas penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	%	12,80	11,10	11,10		10,40		9,70		9,00		8,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN						6.058.789.000		2.010.000.000		2.160.000.000		2.625.000.000		3.910.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KELUARGA BERENCANA (KB)															
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	88,10	88,80	88,80		89,20		89,60		90,00		90,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						3.399.146.800		640.000.000		965.000.000		1.065.000.000		1.505.000.000	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	74,02	74,52	74,52		75,02		75,52		76,02		76,52		
		Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	81,60	82,10	82,10		82,60		83,10		83,60		84,10		
		Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	71,89	72,39	72,39		72,89		73,39		73,89		74,39		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						44.506.183.000		42.726.411.227		44.419.827.698		47.673.829.825		54.550.820.858	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.773.675.100		10.485.530.573		10.867.960.486		10.951.970.527		12.360.014.325	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,09	78,10	73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	70,90	-	71,00		71,50		71,50		72,00		72,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						32.732.507.900		32.240.880.654		33.551.867.212		36.721.859.298		42.190.806.533	
		Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR	%	62,50	30,87	63,00		64,00		65,00		66,00		67,00		Dinas/Badan yang menangani

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	72,47	52,50	73,00		74,00		75,00		76,00		77,00		Bidang Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						19.350.411.000		17.840.844.070		18.490.115.519		19.176.051.258		21.930.489.049	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.585.411.000		5.558.581.070		5.619.238.519		5.709.059.258		6.027.481.049	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,00	80,00	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	85,00	83,00	83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						2.425.000.000		4.150.505.000		4.401.606.000		4.655.442.000		5.580.192.000	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	100,00	73,00	75,00		77,00		79,00		81,00		83,00		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						9.340.000.000		8.131.758.000		8.469.271.000		8.811.550.000		10.322.816.000	
	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi yang terpadu, aman, dan mendukung efisiensi pelayanan pemerintahan berbasis digital	Persentase Capaian Digitalisasi Pemerintahan	%	81,00	76,00	32,00		36,00		38,00		40,00		44,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						24.929.738.000		23.012.574.108		23.324.733.149		23.700.805.120		24.220.785.116	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						23.279.738.000		20.512.574.108		20.574.733.149		20.550.805.120		20.920.785.116	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,86	85,86	86,00		86,20		86,40		86,60		86,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	74,84	74,84	74,90		75,00		75,10		75,20		75,30		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	88,85	37,14	65,71		65,80		66,90		67,00		67,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	36,95	36,95	38,80		40,70		42,50		44,50		46,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						700.000.000		1.500.000.000		1.700.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal	%	63,69	63,69	64,00		64,50		65,00		65,50		66,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						350.000.000		350.000.000		400.000.000		500.000.000		550.000.000	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	1,80	1,80	2,40		2,80		3,20		3,60		4,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Kecil, Dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.071.065.000		5.706.205.512		5.507.433.626		5.604.075.702		6.016.375.791	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.826.065.000		4.124.006.512		4.190.122.626		4.276.162.702		4.583.765.791	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,96	90,35	91,00		91,50		92,50		93,00		93,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	85,60	79,61	80,00		80,75		81,00		81,25		82,00		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						250.000.000		401.863.000		308.006.000		314.235.000		336.927.000	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	67,61	772,43	65,67		67,79		67,80		68,00		68,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						180.000.000		609.120.000		515.701.000		522.374.000		546.683.000	
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	7,94	5,00	5,00		5,02		5,03		5,04		5,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						290.000.000		106.280.000		112.690.000		119.189.000		142.865.000	
	Meningkatnya kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan perizinan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	79,38	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						425.000.000		202.875.000		215.110.000		227.516.000		272.710.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	69,00	80,00	92,00		93,00		95,00		96,00		97,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						100.000.000		262.061.000		165.804.000		144.599.000		133.425.000	
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	77,19	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.376.389.176		6.643.000.000		6.070.000.000		6.690.000.000		8.290.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						639.356.176		393.000.000		420.000.000		540.000.000		540.000.000	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	-	-	9,00		9,00		10,00		10,00		11,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						5.637.033.000		6.150.000.000		5.550.000.000		6.050.000.000		7.650.000.000	
	Meningkatnya kualitas pembinaan, prestasi dan daya saing keolahragaan secara berkelanjutan	Persentase pembinaan Atlet berprestasi	%	43,23	43,33	43,67		44,00		44,33		44,67		45,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya pembinaan kepramukaan	Persentase kwartir/ gudep yang melaksanakan program kerja tahunan secara konsisten	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						322.389.000		180.714.000		191.647.000		202.700.000		242.965.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						322.389.000		180.714.000		191.647.000		202.700.000		242.965.000	
	Tersedianya data statistik sektoral yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						298.330.000		156.686.000		166.166.000		175.749.000		210.660.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						298.330.000		156.686.000		166.166.000		175.749.000		210.660.000	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	85,00	63,00	69,00		73,00		76,00		80,00		84,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12.900.226.824		13.015.030.300		13.689.090.446		13.976.310.424		15.303.310.424	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.692.368.888		8.805.030.300		9.219.090.446		9.050.061.300		10.332.061.300	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86.95	86.95	87,00		87,20		87,50		88,00		88,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	72,95	72,97	72,99		73,01		73,03		73,05		73,07		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.807.650.000		2.905.000.000		2.990.000.000		3.221.249.124		3.231.249.124	
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan serta partisipasi aktif	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	-	-	42,00		47,00		52,00		57,00		62,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	masyarakat dalam pemajuan kebudayaan															
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			-	-		320.000.000		400.000.000		475.000.000		625.000.000		625.000.000	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	-	-	36,36		45,45		54,55		63,64		72,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						259.836.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						435.429.936		405.000.000		470.000.000		510.000.000		510.000.000	
	Meningkatnya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya	Persentase Terlestarikannya cagar budaya	%	7,46	7,46	10,45		13,43		16,42		19,40		22,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						384.942.000		300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000	
	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan museum sebagai pusat pelestarian dan pembelajaran budaya	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	-	-	50,00		50,00		55,00		55,00		60,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						6.460.136.600		7.827.257.000		8.300.798.000		8.779.497.000		10.523.444.000	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.828.054.600		7.171.241.000		7.605.093.000		8.043.671.000		9.641.454.000	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00	88,50	89,00		89,00		90,00		90,00		91,00		Dinas/Badan yang menangani

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	82,00	82,25	82,00		82,00		82,35		82,40		82,45		Bidang Perpustakaan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						632.082.000		616.648.000		653.955.000		691.668.000		829.060.000	
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	%	39,90	47,57	41,00		50,33		60,67		72,00		84,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,02	0,01	0,08		0,12		0,15		0,25		0,30		
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						0		39.368.000		41.750.000		44.158.000		52.930.000	
	Terpeliharanya koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	%	-	-	-		10,00		30,00		60,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						667.309.000		453.607.000		481.052.000		508.795.000		609.862.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						468.177.000		349.363.000		370.500.000		391.867.000		469.707.000	
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase arsip yang diakuisisi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
		Persentase pengawasan kearsipan internal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						199.132.000		94.402.000		100.114.000		105.888.000		126.922.000	
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Arsip usul musnah	Meter	34,00	46,00	72,00		84,00		96,00		108,00		120,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
		Persentase arsip yang dialihmediakan	%	20,95	38,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						0		9.842.000		10.438.000		11.040.000		13.233.000	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0,00	-	0,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.635.000.000		1.740.000.000		1.830.000.000		1.950.000.000		2.130.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	498,00	132,00	562,00		573,24		584,58		602,80		614,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						1.340.000.000		1.405.000.000		1.450.000.000		1.530.000.000		1.670.000.000	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	30.641,00	15.317,00	31.063,88		31.126,01		31.188,26		31.250,64		31.313,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						195.000.000		225.000.000		260.000.000		290.000.000		320.000.000	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	24,62	-	21,91		22,11		22,24		22,51		22,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						7.138.694.000		6.054.642.541		6.920.000.000		7.130.675.080		8.165.000.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.155.000.000		3.374.642.541		3.630.000.000		3.725.675.080		4.425.000.000	
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	%	5,35	5,89	6,48		7.13		7,83		8,62		9,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	31,07	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						2.002.836.200		1.470.000.000		1.780.000.000		1.895.000.000		2.110.000.000	
	Meningkatnya promosi dan citra positif pariwisata	Persentase media pemasaran pariwisata	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
		Tingkat hunian akomodasi	%	37,49	37,65	37,75		37,85		37,95		38,05		38,15		

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						345.000.000		635.000.000		825.000.000		825.000.000		925.000.000	
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	1,80	4,30	6,80		9,30		11,80		14,30		16,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						635.857.800		575.000.000		685.000.000		685.000.000		705.000.000	
	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	51,91	12,98	13,00		15,48		17,98		17,98		17,98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						18.210.416.600		16.707.050.000		18.722.954.950		19.917.383.253		22.801.289.278	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						9.737.808.300		7.514.550.000		8.790.000.000		9.560.033.253		10.866.289.278	
	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian yang mendukung usaha tani berkelanjutan	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya	Kuintal/Ha	68,00	68,82	68,85		68,87		68,89		68,92		68,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						6.490.328.600		7.017.500.000		7.662.954.950		7.867.350.000		9.300.000.000	
	Meningkatnya kualitas prasarana pertanian dan cakupan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						770.000.000		910.000.000		955.000.000		1.100.000.000		1.170.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	68,65	22,00	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						425.000.000		475.000.000		525.000.000		575.000.000		650.000.000	
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						787.279.700		790.000.000		790.000.000		815.000.000		815.000.000	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						5.060.000.000		6.530.000.000		6.930.000.000		7.360.000.000		9.750.000.000	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						3.825.000.000		5.100.000.000		5.400.000.000		5.750.000.000		7.700.000.000	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	44,90	45,00	48,98		51,02		53,06		55,10		57,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						340.000.000		390.000.000		390.000.000		470.000.000		670.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kelancara distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks Stabilisasi Harga	%	97,14	97,14	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						250.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		450.000.000	
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	US$	135.667.266	139.737.284	140.000.000		145.000.000		150.000.000		160.000.000		165.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						130.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		130.000.000	
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	96,41	96,50	97,20		97,30		97,60		97,70		98,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						455.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000		700.000.000	
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	42,86	43,00	57,14		57,14		57,14		71,43		71,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						11.358.401.000		9.268.192.504		9.087.185.352		8.938.895.382		9.846.530.618	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.554.820.000		6.421.204.504		6.067.956.352		5.745.549.382		6.018.861.618	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,25	87,00	87,40		87,40		87,80		88,20		88,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	77,70	77,71	77,72		77,73		77,74		77,75		77,76		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						3.403.581.000		2.171.030.000		2.302.375.000		2.435.151.000		2.918.866.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	17,62	29,48	19,00		21,00		23,00		25,00		27,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						0		541.301.000		574.050.000		607.155.000		727.760.000	
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	%	0,00	0,00	0,00		14,00		14,50		15,00		15,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						400.000.000		134.657.000		142.804.000		151.040.000		181.043.000	
	Meningkatnya pelaporan industri dalam SIINas secara tertib dan berkala	Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terfasilitasi dalam SIINas	%	3,76	24,45	4,00		4,10		4,20		4,30		4,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						185.000.000		135.000.000		140.500.000		148.500.000		154.000.000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						185.000.000		135.000.000		140.500.000		148.500.000		154.000.000	
	Meningkatnya jumlah dan kualitas pengiriman transmigran ke kawasan yang telah disiapkan	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						57.851.421.300		53.457.794.451		55.115.800.254		56.936.085.980		63.523.027.209	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						46.417.945.420		41.760.321.451		42.892.140.254		44.180.505.980		48.829.613.208	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
		IKM terhadap Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks	88,00	88,25	88,50		88,75		89,00		89,25		89,50		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,64	88,00	88,05		88,10		88,15		88,20		88,25		

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Indeks PPID	Indeks	88,00	88,25	88,50		88,75		89,00		89,25		89,50		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	73,00	73,05	73,10		73,15		73,20		73,25		73,30		
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	40,37	40,50	40,80		41,00		41,20		41,40		41,60		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						6.495.291.000		6.639.135.000		6.980.296.001		7.325.174.000		8.581.597.000	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai EPPD	Skor	3,75	3,30	3,35		3,40		3,45		3,50		3,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
		Persentase Kecamatan mencapai kategori Prima	%	-	-	3,85		7,69		11,54		15,38		19,23		
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						4.938.184.880		5.058.338.000		5.243.363.999		5.430.406.000		6.111.817.001	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan serta layanan pengadaan barang dan jasa	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,90	4,93	4,95		4,96		4,98		5,00		5,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	62,96	64,46	68,46		71,46		72,50		73,50		75,00		
		Persentase BLUD yang berkinerja baik	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase BUMD yang berkinerja baik	%	80,00	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang terimplementasikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Tingkat Capaian Persentase fisik pelaksanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.02	SEKRETARIAT DPRD						80.453.227.600		54.876.356.448		56.017.268.568		57.399.772.604		62.366.927.629	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						44.498.170.600		37.419.284.448		37.507.459.568		37.822.521.604		38.900.881.629	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	70,30	70,30	70,45		70,85		71,00		71,45		71,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						35.955.057.000		17.457.072.000		18.509.809.000		19.577.251.000		23.466.046.000	
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.01	PERENCANAAN						10.790.254.800		9.485.342.408		9.660.702.300		9.876.186.274		10.814.052.989	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.640.254.800		6.561.822.408		6.607.110.300		6.691.650.274		7.234.630.989	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,26	89,26	89,50		89,75		90,00		90,25		90,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	83,35	83,35	83,90		83,95		84,00		84,05		84,10		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.300.000.000		1.323.520.000		1.403.592.000		1.484.536.000		1.779.422.000	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN						1.850.000.000		1.600.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PEMBANGUNAN DAERAH															
	Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.02	KEUANGAN						669.523.837.113		649.380.097.842		653.249.698.401		658.335.621.070		664.937.865.072	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						40.410.352.863		28.653.097.492		28.448.491.361		28.420.471.331		28.263.170.643	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,70	87,70	87,80		87,80		87,90		88,00		88,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81,97	81,97	81,99		81,99		82,00		82,00		82,02		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						621.587.336.250		613.200.852.350		617.275.059.040		622.389.001.739		629.148.546.429	
	Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						3.674.775.000		3.674.775.000		3.674.775.000		3.674.775.000		3.674.775.000	
	Meningkatnya tertib administrasi, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,85	3,90	3,95		4,00		4,05		4,10		4,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	peraturan perundang-undang															
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3.851.373.000		3.851.373.000		3.851.373.000		3.851.373.000		3.851.373.000	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan, serta Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,43	13,75	14,00		14,25		14,50		14,75		15,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03	KEPEGAWAIAN						10.474.539.100		9.008.571.433		9.115.383.148		9.263.841.851		9.872.501.087	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.226.595.100		6.479.972.433		6.433.806.148		6.427.620.851		6.472.897.087	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,86	90,86	90,87		90,88		90,89		91,00		91,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,00		81,50		82,00		82,50		83,00		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.247.944.000		2.528.599.000		2.681.577.000		2.836.221.000		3.399.604.000	
	Meningkatnya kualitas layanan adminstrasi kepegawaian, Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN, Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN, dan Meningjkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
		Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	48,60	75,00	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						4.306.567.000		6.901.687.652		7.374.554.997		7.851.682.284		9.509.865.271	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						4.306.567.000		6.901.687.652		7.374.554.997		7.851.682.284		9.509.865.271	
	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.300.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						1.015.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		1.000.000.000	
	Tersedianya data, kajian, dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	-	-	75,00		80,00		85,00		87,00		88,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	-	-	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	-	-	60,00		62,00		64,00		67,50		70,00		
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						285.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000	
	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	-	-	75,00		80,00		82,50		85,00		87,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah	%	-	-	62,50		65,00		66,00		67,00		70,00		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH						21.096.586.400		18.741.895.225		19.249.958.627		19.828.270.318		21.915.131.495	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.085.533.000		13.320.948.552		13.540.221.827		13.678.270.318		14.235.131.495	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,40	86,40	86,41		86,42		86,43		86,44		86,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	83,35	83,35	83,36		83,37		83,38		83,39		83,40		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.283.000.000		1.622.151.800		1.829.736.800		1.950.000.000		2.310.000.000	
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
		Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Khusus	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.728.053.400		3.798.794.873		3.880.000.000		4.200.000.000		5.370.000.000	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Khusus	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01	KECAMATAN						107.838.897.000		91.250.824.286		92.518.710.499		94.227.664.697		100.321.586.861	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						85.363.518.984		73.626.348.487		74.033.456.051		74.874.036.712		77.554.954.764	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,78	82,80	82,97		83,32		83,63		83,93		84,23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	63,13	65,25	68,65		69,13		69,54		69,96		70,44		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						769.080.680		624.343.000		660.728.000		719.336.000		925.830.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100,00	100,00	100,00				100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						11.914.443.986		9.920.460.413		10.448.858.202		10.835.973.650		12.654.806.826	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	96,25	96,35	96,73		97,27		97,31		97,38		97,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4.297.254.300		3.160.320.000		3.339.931.000		3.514.475.000		4.065.944.000	
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	96,85	97,25	97,73		98,04		98,08		98,12		98,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						2.813.787.500		1.858.818.386		1.962.049.246		2.097.988.268		2.363.785.250	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	97,96	98,15	98,38		98,46		98,46		98,46		98,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.680.811.550		2.060.534.000		2.073.688.000		2.185.855.067		2.756.266.021	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	91,35	91,56	91,69		91,85		92,08		92,31		92,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8.567.423.800		6.947.763.191		7.144.125.102		7.365.141.489		68.163.576.015	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.394.411.800		3.708.867.191		3.673.133.717		3.724.722.454		3.757.660.015	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91,80	91,80	92,00		92,00		92,50		92,50		92,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	64,75	64,75	68,00		68,50		68,50		69,00		69,00		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN						661.023.000		586.161.000		591.000.000		621.000.000		671.000.000	

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KARAKTER KEBANGSAAN															
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	14,81	15,00	16,00		29,63		44,44		59,26		74,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						2.373.624.000		1.846.720.000		2.031.991.385		2.136.419.035		62.721.916.000	
	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam penguatan etika dan budaya politik demokratis	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	8,00	8,00	8,00		16,00		24,00		32,00		40,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						242.096.000		247.515.000		262.000.000		272.000.000		312.000.000	
	Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						236.269.000		258.500.000		266.000.000		276.000.000		286.000.000	
	Meningkatnya ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Cakupan penyuluhan P4GN	%	25,53	25,53	26,00		27,00		30,00		33,00		36,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Persentase kelompok agama yang mendapatkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		pembinaan kerukunan beragama														
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						660.000.000		300.000.000		320.000.000		335.000.000		415.000.000	
	Meningkatnya deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN							2.902.695.275.831		2.849.605.877.846		2.880.698.795.615		2.918.433.905.371		3.085.898.287.432	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten tertuang sebagai berikut.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja utama penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1.	Indeks Daya Saing Daerah	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, berdasarkan 4 komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. (Sesuai perhitungan BRIN)	Indeks	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15	4,15
2.	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis	%	12,04	11,24-10,61	11,32-11,21	10,50-10,33	10,40-10,30	10,33-10,25	10,30-10,10	10,30-10,10

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
		kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuai perhitungan BPS)									
3.	PDRB Perkapita	PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Per Kapita = PDRB ADHB / populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode	Juta Rp.	42,74	45,29	48,63	52,58	57,43	63,48	71,10	71,10
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB, RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memilki bobot 20	Indeks	84,05	84,15	84,23	84,42	84,60	84,88	85,00	85,00
5.	Indeks Harmoni Indonesia	Model formula pengukuran IHaI dengen pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: IHaI=Σ(ki-Xi) IHaI: Nilai akhir dari indeks harmoni Σ : simbol operasi penjumlahan ki: Bobot yang diberikan setiap variabel Xi	Indeks	N/A	6,80	6,85	6,90	6,95	7,00	7,00	7,00

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
		Xi: Variabel operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni									
6.	Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah.	TonCO2 eq	173.745,15 *	1.204.249,38	1.360.716,35	1.569.338,99	1.882.272,94	2.247.362,56	2.696.835,07	2.696.835,07
7.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan distance to scale (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP	Indeks	85,64	85,75	86,20	86,50	86,90	87,20	88,35	88,35

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
8.	Indeks Pembangunan Manusia	DO : Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran (Berdasarkan perhitungan BPS)	Indeks	78,16	77,90-78,80	78,70 - 79,50	79,00-80,00	80,00-81,00	81,00-82,00	82,00-83,00	82,00-83,00
9.	Indeks Infrastruktur	Rata-rata capaian pembangunan infrastruktur meliputi jalan, sanitasi, air minum, rumah layak huni, prasarana perlengkapan jalan dan akses internet	Indeks	73,84	72,77	73,30	73,75	74,20	74,63	75,12	75,12
10.	Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan perhitungan BPS	%	5,11	5,70-6,00	5,70-6,50	6,60-7,20	7,00-7,80	7,40-8,00	7,90-8,30	7,90-8,30

Sumber: Hasil desk Perangkat Daerah, 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah tentunya diperoleh dengan melakukan pemetaan secara mendalam terhadap kewajiban daerah dalam mengampu indikator pembentuknya. Berkenaan dengan hal tersebut, di bawah ini diuraikan tabel indikator kinerja daerah yang berangkat dari berbagai macam referensi indikator, seperti indikator SDGs; indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti diamanatkan oleh Permendagri Nomor 19 tahun 2020 dan indikator daerah lainnya (indikator yang disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan daerah).

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator ada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berikut tabel ini Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Klaten.

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)*[1]	Indeks	85,64	85,75	86,20	86,50	86,90	87,20	88,35
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*[1]	%	10,11	10,05	10,00	9,70	9,40	9,27	9,04
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan[1]	%	94,29	94,29	95,99	96,62	97,25	97,88	98,51
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman[1]	%	1,64	1,71	1,84	2,41	2,99	3,56	4,38
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah[1]	%	23,75	24,75	25,75	26,75	27,75	28,75	33,75
6	Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (kumulatif)*[1]	TonCO2 eq	173.745,15*	1.204.249,38	1.360.716,35	1.569.338,99	1.882.272,94	2.247.362,56	2.696.835,07
7	Indeks Risiko Bencana (IRB)[1]	Indeks	78,560	78,500	77,500	76,500	74,620	72,620	65,270
8	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
9	Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota[1]	Indeks	14,902	15,376	15,599	15,986	16,179	16,372	16,565
10	Indeks Harmoni Indonesia*	Indeks	N/A	6,80	6,85	6,90	6,95	7,00	7,00
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan Ekonomi*[1]	%	5,11	5,70-6,00	5,70-6,50	6,60-7,20	7,00-7,80	7,40-8,00	7,90-8,30
2	Tingkat Kemiskinan*[1]	%	12,04	11,24-10,61	11,32-11,21	10,50-10,33	10,40-10,30	10,33-10,25	10,30-10,10
3	PDRB Perkapita (ADHB)*	Juta Rupiah	42,74	45,29	48,63	52,58	57,43	63,48	71,1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka[1]	%	3,97	4,00–3,68	3,70-3,00	3,65-3,55	3,55-3,45	3,50-3,40	3, 45-3,35
5	Indeks Gini	Indeks	0,437	N/A	0,43	0,42	0,41	0,39	0,385

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia[1]	%	16,15	17,84-18,04	18,44	18,84	19,24	19,54	19,84
7	Indeks Pembangunan Manusia*	Indeks	78,16	77,90-78,80	78,70 - 79,50	79,00-80,00	80,00-81,00	81,00-82,00	82,00-83,00
8	Usia Harapan Hidup[1]	Tahun	77,3	77,31	77,88	78,09	78,32	78,55	78,94
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu[1]	kasus	10	10	10	10	10	10	10
10	Jumlah Kematian Balita	balita	18	18	18	17	17	17	17
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita[1]	%	20,8	19,5	18,8	17,6	16,6	15,6	14,63
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage)*[1]	%	79,91	80	80	85	85	90	92,5
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)*[1]	%	85,5	85	85	85	85	90	91,25
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional[1]	%	98,82	98,82	98,9	98,95	99	99,05	99,1
15	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun[1]	tahun	9,29	9,63	9,7	9,78	9,85	9,92	10,55
16	Harapan Lama Sekolah[1]	tahun	13,43	13,84	13,86	13,92	13,99	14,05	14,3
17	Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat[1]	%	68,16	70,66	73,16	75,66	78,16	80,66	83,16
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat [1]	%	80,23	81,33	82,43	83,43	84,63	85,73	86,83
	c. Numerasi SD/Sederajat[1]	%	58,13	61,03	63,93	66,83	69,73	72,63	75,53
	d. Numerasi SMP/Sederajat [1]	%	69,4	70,9	72,4	73,9	75,4	76,9	78,4
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi[1]	%	10,45	10,84	11,23	11,62	12	12,39	12,78

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan[1]	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun[1]	%	92,98	93,5	93,88	94,25	94,63	95	95,38
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	63,56	64	64,5	65	65,5	66	66,5
22	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan[1]	%	30,34	32,58	34,83	37,08	39,33	41,57	43,82
23	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir[1]	%	20,67	21,26	21,86	22,45	23,05	23,64	24,24
24	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial	%	90,5	90,5	90,5	91,2	91,9	92,6	93,3
25	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	59,76	60	61	63	65	66	67,1
26	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)[1]	Indeks	66,13	66,9	67,7	68,4	69,2	70	70,8
27	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	65,26	66,11	66,96	67,83	68,71	69,6	70,5
28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)[1]	Indeks	0,162	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,1
29	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	58,00	58,75	59,50	60,25	61,00	61,75	62,50
30	Persentase Prestasi Olahraga	%	50,32	52,33	52,67	53	53,33	53,67	54
31	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan[1]	%	43,01	49,41	53,91	56,57	59,56	62,61	65,78
32	Jumlah tamu wisatawan mancanegara[1]	Orang	214 ,811	225 ,550	236 ,820	248 ,660	261 ,090	274 ,144	287 ,851
33	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan	Orang	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
34	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57
35	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	3.117	3.659	3.774	3.894	4.149	4.279	4.409

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
36	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	Indeks	N/A	56,66	57,16	57,66	58,16	58,66	59,16
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan[1]	%	38,59	39,29	40,06	40,86	41,67	42,68	42,70
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum[1]	%	3,73	3,74	3,75	3,76	3,77	3,79	3,80
3	Rasio Kewirausahaan Daerah[1]	%	3,30	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB[1]	%	1,13	1,14	1,14	1,15	1,15	1,16	1,16
5	Kapabilitas Inovasi[1]	Indeks	1,87	1,89	1,90	2,00	2,05	2,10	2,15
6	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB[1]	%	23,05	23,05	23,69	24,35	25,02	25,72	26,43
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	-0,37	1,36	1,75	2,24	2,72	3,3	3,57
8	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,63	3,95	4,03	4,25	4,28	4,52	4,87
9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB[1]	%	0,33	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61
10	*Return On Asset (ROA)* BUMD[1]	%	N/A	1,42	1,63	1,86	2,10	2,35	2,37
11	Indeks Infrastruktur*	Indeks	73,84	72,77	73,30	73,75	74,20	74,63	75,12
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak[1]	%	97,57	95,99	95,99	96,12	96,25	96,38	96,51
13	Persentase Desa Mandiri	%	16,37	20,72	21,74	22,76	23,79	25,32	26,85
14	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	13,43	13,75	14,00	14,25	14,50	14,75	15,00
15	Tingkat Inflasi	%	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
16	Rasio konektivitas	Rasio	0,12	0,12	0,12	0,125	0,125	0,13	0,13
17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah[1]	orang	N/A	3.156.796	3.441.185	3.725.574	4.009.963	4.294.352	4.578.741
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan[1]	%	58,72	59,56	60,4	61,23	62,07	62,91	58,72

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/ kota per PDRB[1]	%	0,99	0,96	0,92	0,89	0,86	0,82	0,79
20	Total kredit pada bank milik kabupaten/ kota per PDRB[1]	%	1	0,98	1	0,97	0,94	0,91	0,89
21	Disparitas harga[1]	%	12,8	12,6	12,4	12,2	12	11,8	11,6
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi*[1]	Indeks	84,05	84,15	84,23	84,42	84,6	84,88	85
2	Indeks Reformasi Hukum [1]	Indeks	97,58	97,6	97,62	97 ,64	97,66	97,68	97,7
3	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital[1]	Indeks	4,07	4,1	1,7	1,8	1,9	2	2,2
4	Indeks Pelayanan Publik[1]	Indeks	4,13	4,52	4,53	4,54	4,55	4,64	4,65
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	66,73	68	68,2	68,35	68,57	68,84	69
6	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,94	81	82	83	84	85	86
7	Indeks Perencanaan Pembangunan (Penilaian Mandiri)	Indeks	N/A	70	70,5	71	71,5	72	72,5
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	78,986	79	79,1	79,2	79,3	79,4	79,5
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,098	3,099	3,1	3,101	3,102	3,105	3,11
10	Indeks Integritas Nasional[1]	Indeks	69,59	71,47	71,47	78,76	78,76	79,74	79,74
11	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Daya Saing Daerah*	Indeks	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15
13	Jumlah Kejadian Konflik SARA[1]	Angka	0	0	0	0	0	0	0
14	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota[1]	%	91,39	84,01	84,41	84,81	85,21	85,61	86,01
15	Persentase rumah tangga dengan akses internet[1]	%	70,77	75	79	84	89	95	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,9	4,93	4,95	4,96	4,98	5	5,01
E	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
1)	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
a.	**Urusan Pendidikan**								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89,77	91,17	92,58	93,98	95,38	96,78	98,18
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,08	99,12	99,13	99,21	99,26	99,34	99,39
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,30	98,38	98,49	98,51	98,58	98,60	98,67
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	10,29	11,05	11,82	12,58	13,34	14,10	14,87
5	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi[1]	%	10,45	10,84	11,23	11,62	12,00	12,39	12,78
b.	**Urusan Kesehatan**								
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1,51	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
c.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,36	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	94,29	98,73	95,99	96,62	97,25	97,88	98,51
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	1,64	1,90	1,84	2,41	2,99	3,56	4,38
4	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	90,50	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		84,01	84,01	84,41	84,81	85,21	85,61	86,01
6	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
d.	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	97,56	98,83	95,99	96,12	96,25	96,38	96,51
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100
e.	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15,97	15,20	15,20	15,20	15,10	15,00	15,00
f.	**Urusan Sosial**								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
2)	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**								
a.	**Urusan Tenaga Kerja**								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	**%**	100	90,00	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	**%**	23,26	15,00	23,27	23,28	23,29	23,30	23,31
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,48	45,55	45,71	45,89	46,09	46,26	49,85
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,56	3,70	3,90	4,10	4,30	4,50	4,80
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	85,37	24,00	85,84	86,34	86,84	87,34	87,84
b.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,16	N/A	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan)	%	2,80	2,70	2,70	2,60	2,50	2,40	2,30
c.	**Urusan Pangan**								
1	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	261.447,13	286.140,99	266.712,95	266.925,65	266.980,31	267.069,44	267.247,68

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Jumlah produksi daging	Ton	11.406	12.712	12.800	13.000	13.150	13.500	13.750
3	Jumlah produksi telur	Kg	9.953.193,10	12.421.359	12.892.931	13.279.716	14.076.497	15.343.380	17.184.583
4	Jumlah produksi susu	liter	1.933.433	N/A	2.041.246	2.102.483	2.228.632	2.429.208	2.720.712
5	Populasi ternak ruminansia	ekor	N/A	N/A	200.884	206.169	210.895	213.718	217.838
6	Populasi ternak non ruminansia	ekor	N/A	N/A	10.058.759	10.360.505	10.561.696	10.662.302	10.863.496
d.	**Urusan Pertanahan**								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal,	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
e.	**Urusan Lingkungan Hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)[1]	Indeks	61,09	71,83	71,87	71,92	71,96	72,00	72,04
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Indeks	62,49	64,35	66,29	68,27	70,32	72,43	74,60

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indeks	0	0	0	0	0	0	0
f.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,36	99,56	99,58	99,60	99,62	99,64	99,65
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	73,13	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
3	Kepemilikan Akta Kelahiran umur 0-18 tahun	%	99.29	99.36	99,38	99,40	99,42	99,44	99,46
4	Persentase perangkat daerah dan organisasai atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	72,55	72,55	86,96	89,13	91,30	93,48	97,83
g.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	N/A	14,06	16,44	4,71	4,49	6,45	6,06
h.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR)	%	65,88	N/A	66,50	67,50	68,50	69,50	70,50
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,20	8,00	8,00	7,80	7,60	7,40	7,20
i.	**Urusan Perhubungan**								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	%	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
j.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	78,13	90,74	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	73,00	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00
k.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	88,85	40,37	42,60	43,30	44,10	44,80	45,50
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	63,69	63,69	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00
l.	**Urusan Penanaman Modal**								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	36,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00
m.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,12	1,67	1,69	1,70	1,72	1,73	1,75
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,34	4,88	4,89	4,90	4,91	4,92	4,93
3	Persentase Prestasi Olahraga	%	50,32	52,33	52,67	53,00	53,33	53,67	54,00
n.	**Urusan Statistik**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
o.	**Urusan Persandian**								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	82,12	84,00	69,00	73,00	76,00	80,00	84,00
p.	**Urusan Kebudayaan**								
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan[1]	**%**	30,34	32,58	34,83	37,08	39,33	41,57	43,82
q.	**Urusan Perpustakaan**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	78,09	79,00	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	63,56	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50
r.	**Urusan Kearsipan**								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	89,17	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
3)	**Urusan Pilihan**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
a.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ Kota	ton	31.139,00	31.139,00	31.632,02	31.655,37	31.779,44	31.853,44	31.927,18
b.	**Urusan Pariwisata**								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	31,07	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	5,35	5,89	6,48	7,13	7,83	8,62	9,48
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,49	37,65	37,75	37,85	37,95	38,05	38,15
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,87	4,14	4,43	4,74	5,07	5,42	5,80
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7,05	7,25	7,35	7,45	7,65	7,75	8,00
c.	**Urusan Pertanian**								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Ku/Ha	68,00	68,82	68,85	68,87	68,89	68,92	68,94
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	68,65	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
d.	**Urusan Perdagangan**								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	84,79	84,79	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00
3	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	96,41	96,50	97,20	97,30	97,60	97,70	98,00
e.	**Urusan Perindustrian**								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	1 ,12	1 ,13	1 ,14	1 ,15	1 ,16	1 ,17	1 ,18
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	97 ,56	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	2,00
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100
4)	**Unsur Penunjang Urusan**								
a.	**Unsur Penunjang Sekretariat Daerah**								
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	44 ,00	44 ,00	45 ,00	46 ,00	47 ,00	48 ,00	49 ,00
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan lewat pengadaan	%	70 ,00	70 ,00	71 ,00	72 ,00	72 ,00	73 ,00	74 ,00
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	39 ,00	39 ,00	40 ,00	41 ,00	42 ,00	43 ,00	44 ,00
b.	**Unsur Penunjang Perencanaan**								
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
c.	**Unsur Penunjang Keuangan Daerah**								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	34,57	34,20	34,22	34,21	34,20	34,18	34,16
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,43	13,75	14,00	14,25	14,50	14,75	15,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke-		Target (Tahun)				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	91,22	91,22	91,25	91,45	91,65	91,85	92,00
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	31,15	31,15	31,20	31,20	31,20	31,25	31,25
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-10,07	-10,00	-9,90	-9,80	-9,70	-9,60	-9,50
d.	**Unsur Penunjang Kepegawaian**								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	59,64	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00	65,00
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,09	24,50	24,60	24,80	24,90	25,00	25,00
e.	**Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100
f.	**Unsur Penunjang Pengawasan**								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,098	3,099	3,100	3,101	3,102	3,105	3,110
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,220	3,250	3,300	3,310	3,315	3,330	3,340

*Keterangan : * Indikator Kinerja Utama*

[1] IUP RPJPD/Indikator Sasaran Pokok RPJPD

Pemerintah
Kabupaten Klaten

BAB V
PENUTUP



BAB V
PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klaten serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai berikut:

5.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 berlaku untuk kurun waktu lima tahun, mulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2030-2035 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2030 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Bupati Klaten berkewajiban untuk melakukan sosialiasi Peraturan Daerah tentang RPJMD, agar masyarakat dapat turut serta dalam mengawal, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD;
2. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten beserta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;

3. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 hingga tahun 2029;
4. Dokumen RPJMD ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. RKPD tersebut kemudian menjadi acuan utama dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
5. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD, khususnya dalam penerapannya ke dalam Renstra Perangkat Daerah serta RKPD.
6. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), transformasi digital, pembangunan rendah karbon, serta pembangunan berketahanan iklim;
7. RPJMD ini juga berfungsi sebagai landasan bagi DPRD dan masyarakat Kabupaten Klaten untuk menilai kinerja pemerintah daerah serta melakukan evaluasi terhadap jalannya pembangunan daerah.
8. Untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD ini, diperlukan upaya optimal dalam memanfaatkan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Sumber pendanaan tersebut, baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah, harus dikelola secara lebih inovatif, terpadu, dan tepat sasaran. Sebagai bagian dari optimalisasi ini, perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah, serta fokus pada pembiayaan program prioritas yang sejalan dengan tahapan pembangunan. Di samping itu, pemerintah juga dapat mengakses alternatif pendanaan seperti pinjaman dan hibah untuk mendukung

penganggaran yang berkelanjutan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan prioritas.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Untuk menjamin tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko strategis pemerintah daerah yang kontinu dan partisipatif untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.
2. Untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dan target-target kinerja RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten berkewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD minimal 1 kali dalam lima tahun.

5.4. Perubahan RPJMD

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Pedoman terkait perubahan RPJMD diatur sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila**:**
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan strategis daerah yang berpengaruh terhadap target akhir RPJMD

2. Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar bersifat parsial, perubahan sasaran pokok, program atau perubahan target sasaran serta program tahunan tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran daerah dan program, maka penetapan perubahan dimaksud dituangkan dalam RKPD.

5.5. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2030–2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam RPJMD ini telah dimuat perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2030. Perencanaan ini berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum RPJMD Tahun 2030–2034 disusun.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini dapat diwujudkan dengan baik melalui dukungan dan komitmen tinggi dari para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program serta kegiatan, disertai peran serta aktif para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah. Hal ini menjadi wujud nyata kolaborasi bersama untuk mewujudkan "***Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan***" menuju Indonesia Emas 2045.

BUPATI KLATEN

HAMENANG WAJAR ISMOYO